



RPJMD

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT 2018 - 2023**



LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Nomor Tahun 2019

Nomor 8

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2023

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor Tahun 2019

Tanggal 4 Maret 2019



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

IWA KARNIWA



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebagai visi dan misi kepala daerah terpilih dalam masa pemerintahannya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
9. Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian di Daerah.
10. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung risiko.

11. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Jawa Barat.
12. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
13. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut RTRWP adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana pembangunan tahunan PD yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan visi, misi, analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
20. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

23. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan, untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih Unit Kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam:
 - a. penyusunan Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. penyusunan RKPD; dan
 - c. penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk:
 - a. menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan perencanaan penganggaran;
 - c. menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan perencanaan penganggaran serta perencanaan penganggaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - d. mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota, serta dengan daerah provinsi yang berbatasan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 3

RPJMD merupakan:

- a. penjabaran visi, misi dan program Gubernur ke dalam strategi pembangunan Daerah Provinsi, kebijakan umum, program prioritas Gubernur, dan arah kebijakan keuangan Daerah Provinsi, dengan mempertimbangkan RPJPD dan RTRWP; dan
- b. dokumen perencanaan Daerah Provinsi yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJMD, meliputi:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Memuat secara logis dasar-dasar analisis dan gambaran umum kondisi Daerah, yang meliputi aspek geografi dan demografi secara indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
Memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan ke dalam sub bab.
- d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
Memuat permasalahan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.
- e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
Menjelaskan visi dan misi Pemerintah daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja setiap misi pembangunan.

f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

i. BAB IX : PENUTUP

BAB IV

ISI DAN URAIAN RPJMD

Pasal 5

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
 - b. pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Maret 2019
GUBERNUR JAWA BARAT,



[Signature]
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 4 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,



[Signature]
IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (6-68/2019)



Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD Tahun 2018–2023 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa barat mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, dan mengawal terwujudnya Jabar Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi.



GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program gubernur dan wakil gubernur, sekaligus juga menjadi instrumen pengukuran kinerja pemerintahan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan Tahun 2023. Dalam pencapaian target pembangunan RPJMD melibatkan seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat, mengedepankan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota, serta mendorong peran aktif masyarakat termasuk dunia usaha.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 ini, kami ucapkan terima kasih.

Bandung, Maret 2019



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang.....	I – 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I – 6
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I – 8
1.4. Maksud dan Tujuan	I – 10
1.5. Sistematika Penulisan	I – 10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II - 1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II – 1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II – 32
2.3. Aspek Pelayanan Umum.....	II – 63
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II – 105
2.5. Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2013-2018	II – 135
2.6. Pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	II – 143
2.7. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	II – 162
2.8. Kerja Sama Daerah.....	II – 166
2.9. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	II – 167
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III - 1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III – 1
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III – 27
3.3. Kerangka Pendanaan	III – 44
3.4. Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya	III – 55
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH ..	IV - 1
4.1. Permasalahan Pembangunan	IV – 1
4.2. Isu Strategis	IV – 30



BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V – 1
	5.1. Visi dan Misi.....	V – 1
	5.2. Tujuan Sasaran.....	V – 5
	5.3. Prioritas Pembangunan Daerah 2018-2023.....	V – 17
BAB VI	STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI – 1
	6.1. Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik dan Integratif.....	VI – 1
	6.2. Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial	VI – 11
	6.3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018- 2023	VI – 25
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII – 1
	7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan.....	VII – 1
	7.2. Program Perangkat Daerah	VII – 5
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII – 1
	8.1. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	VIII – 1
	8.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota	VIII – 110
BAB IX	PENUTUP	IX – 1
	9.1. Kaidah Pelaksanaan.....	IX – 1
	9.2. Pedoman Transisi	IX – 2



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Banyaknya Kecamatan, Desa dan Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017	II-2
Tabel 2.2	Potensi Bahan Galian Tambang dan Wilayah Sebarannya	II-6
Tabel 2.3	Ketersediaan Sumber Daya Air di Jawa Barat	II-8
Tabel 2.4	Cekungan Air Tanah (CAT) di Wilayah Jawa Barat	II-10
Tabel 2.5	Luas Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018	II-13
Tabel 2.6	Ketersediaan Air Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota	II-18
Tabel 2.7	Perbandingan <i>Supply Dan Demand</i> Air Provinsi Jawa Barat	II-19
Tabel 2.8	Daya dukung pangan Provinsi Jawa Barat	II-22
Tabel 2.9	Tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung	II-25
Tabel 2.10	Koefisien Lindung Lahan Berdasarkan Jenis Guna Lahan	II-26
Tabel 2.11	Hasil Perhitungan Luas Guna Lahan Fungsi Lindung Di Provinsi Jawa Barat	II-26
Tabel 2.12	Perubahan Luas Tutupan Lahan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2002, 2010, dan 2014	II-27
Tabel 2.13	Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018	II-28
Tabel 2.14	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017	II-28
Tabel 2.15	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017	II-30
Tabel 2.16	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018	II-30
Tabel 2.17	Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2018	II-31



Tabel 2.18	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2018 (juta rupiah)	II-33
Tabel 2.19	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2018 (persen)	II-34
Tabel 2.20	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2018 (persen)	II-36
Tabel 2.21	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017 (persen)	II-37
Tabel 2.22	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2018 (persen)	II-38
Tabel 2.23	Inflasi Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2013-2018	II-39
Tabel 2.24	PDRB Perkapita ADHB dan ADHK di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (juta rupiah)	II-40
Tabel 2.25	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017 (juta rupiah)	II-41
Tabel 2.26	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017 (juta rupiah)	II-42
Tabel 2.27	Indeks Gini Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2013-2018	II-43
Tabel 2.28	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2013-2017	II-44
Tabel 2.29	Indikator Kemiskinan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018	II-45
Tabel 2.30	Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat dan Nasional 2013-2018	II-73
Tabel 2.31	Keadaan Perpustakaan di Jawa Barat Tahun 2017	II-89
Tabel 2.32	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Deposit Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017	II-90
Tabel 2.33	Kondisi Ketersediaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 ..	II-91



Tabel 2.34	Pertumbuhan Subsektor dan Kontribusi Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017	II-96
Tabel 2.35	Capaian Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2017	II-103
Tabel 2.36	Capaian Indikator Kinerja Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2017	II-103
Tabel 2.37	Tingkat Kesempatan Kerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017	II-108
Tabel 2.38	Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi di Indonesia Tahun 2013	II-112
Tabel 2.39	Perbandingan Penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dan 2017	II-113
Tabel 2.40	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 ...	II-115
Tabel 2.41	Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018	II-137
Tabel 2.42	Capaian Indikator SDGs Provinsi Jawa Barat Tahun 2017	II-144
Tabel 2.43	Fokus Penyelesaian Target Indikator SDGS Jawa Barat Periode 2018-2023	II-161
Tabel 2.44	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap BUMD	II-165
Tabel 2.45	Jumlah Kerja Sama Dalam Negeri, Antar Daerah, Daerah Dengan Pihak Ketiga di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2017	II-167
Tabel 2.46	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-168
Tabel 3.1	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017	III-3



Tabel 3.2	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017	III-8
Tabel 3.3	Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2017	III-9
Tabel 3.4	Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017	III-11
Tabel 3.5	Neraca Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017 .	III-12
Tabel 3.6	Analisis Rasio Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017	III-15
Tabel 3.7	Perkembangan Pendanaan APBN (Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017	III-17
Tabel 3.8	Rekapitulasi Pendanaan TJSLP/PKBL BUMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017	III-18
Tabel 3.9	Rekapitulasi Pendanaan Kegiatan TJSLP/PKBL BUMN Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2017	III-19
Tabel 3.10	Rekapitulasi Pendanaan Kegiatan TJSLP/PKBL Swasta di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2017	III-22
Tabel 3.11	Perkembangan Pendanaan Kegiatan TJSL/PKBL Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017	III-25
Tabel 3.12	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017	III-33
Tabel 3.13	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017	III-36
Tabel 3.14	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017	III-38
Tabel 3.15	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017	III-39
Tabel 3.16	Penutup Defisit Riil Anggaran Periode Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017	III-41
Tabel 3.17	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2013-2017	III-42



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Tabel 3.18	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2013-2017	III-43
Tabel 3.19	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	III-47
Tabel 3.20	Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	III-49
Tabel 3.21	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	III-50
Tabel 3.22	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	III-52
Tabel 3.23	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023	III-54
Tabel 5.1	Proyeksi Indikator Makro Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	V-8
Tabel 5.2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	V-10
Tabel 6.1	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023	VI-4
Tabel 6.2	Arah Pembagian Wilayah Pengembangan	VI-14
Tabel 6.3	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	VI-47
Tabel 6.4	Rencana Proyek Strategis Provinsi Tahun 2018-2023 ...	VI-57
Tabel 6.5	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Jawa Barat Tahun 2019	VI-62
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023 Provinsi Jawa Barat	VII-4
Tabel 8.1	Proyeksi Indikator Makro Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	VIII-3
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	VIII-4



Tabel 8.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/ <i>Impact</i> Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	VIII-6
Tabel 8.4	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/ <i>Outcome</i> Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	VIII-31
Tabel 8.5	Penetapan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten dan Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023	VIII-111
Tabel 8.6	Penetapan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten dan Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023	VIII-113
Tabel 8.7	Penetapan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten dan Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023	VIII-115
Tabel 8.8	Penetapan Angka Harapan Hidup Kabupaten dan Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023	VIII-117
Tabel 8.9	Penetapan Pendapatan Per Kapita Kabupaten dan Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023	VIII-119
Tabel 8.10	Penetapan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten dan Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023	VIII-121
Tabel 8.11	Penetapan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten dan Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023	VIII-123
Tabel 8.12	Penetapan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023	VIII-125



Tabel 8.13 Penetapan Indeks Gini Kabupaten dan Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 VIII-127



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan dan Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2018-2023	I-4
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Barat	II-3
Gambar 2.2	Peta Topografi	II-4
Gambar 2.3	Peta Kemiringan Lereng	II-4
Gambar 2.4	Peta Sebaran Mineral dan Zona Layak Tambang Provinsi Jawa Barat	II-6
Gambar 2.5	Peta Wilayah Pertambangan	II-7
Gambar 2.6	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS)	II-9
Gambar 2.7	Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Provinsi Jawa Barat	II-10
Gambar 2.8	Peta Curah Hujan Tahunan	II-11
Gambar 2.9	Peta Tutupan Lahan Jawa Barat Tahun 2018	II-13
Gambar 2.10	Peta Kawasan Rawan Bencana Alam	II-14
Gambar 2.11	Peta Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Provinsi Jawa Barat	II-16
Gambar 2.12	Peta Ketersediaan Air Provinsi Jawa Barat	II-18
Gambar 2.13	Peta Kebutuhan Air Provinsi Jawa Barat	II-20
Gambar 2.14	Peta Selisih <i>Supply</i> dan <i>Demand</i> Air Provinsi Jawa Barat	II-20
Gambar 2.15	Peta Ambang Batas Daya Dukung Air Provinsi Jawa Barat	II-21
Gambar 2.16	Peta Daya Dukung Air Provinsi Jawa Barat	II-21
Gambar 2.17	Peta Ketersediaan Pangan Provinsi Jawa Barat...	II-23
Gambar 2.18	Peta Kebutuhan Pangan Provinsi Jawa Barat	II-23
Gambar 2.19	Peta Selisih <i>Supply</i> Dan <i>Demand</i> Pangan Provinsi Jawa Barat	II-24
Gambar 2.20	Peta Ambang Batas Daya Dukung Pangan Provinsi Jawa Barat	II-24
Gambar 2.21	Peta Daya Dukung Pangan Provinsi Jawa Barat.	II-25
Gambar 2.22	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2013-2018	II-35



Gambar 2.23	Distribusi IPM Kabupaten/Kota Tahun 2017	II-45
Gambar 2.24	Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2013-2018	II-46
Gambar 2.25	Distribusi Harapan Lama Sekolah di Kabupaten/Kota Tahun 2017	II-48
Gambar 2.26	Distribusi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2017	II-49
Gambar 2.27	Distribusi Angka Partisipasi Kasar Kabupaten/Kota Tahun 2017	II-50
Gambar 2.28	Distribusi Angka Partisipasi Murni Kabupaten/Kota Tahun 2017	II-51
Gambar 2.29	Distribusi Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota Tahun 2017	II-52
Gambar 2.30	Persentase Koperasi Aktif di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013–2017	II-85
Gambar 2.31	Konsumsi Ikan Penduduk di Provinsi Jawa Barat 2013–2017	II-94
Gambar 2.32	Tingkat Kesempatan Kerja Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013–2017	II-109
Gambar 2.33	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013–2017	II-111
Gambar 3.1	Rata-Rata Komposisi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2013-2017	III-4
Gambar 3.2	Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013-2017	III-5
Gambar 3.3	Rata-Rata Proporsi Komponen Dana Perimbangan Tahun 2013-2017	III-6
Gambar 3.4	Rata-Rata Proporsi Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2013-2017	III-6
Gambar 5.1	Konsep Pembangunan Jawa Barat	V-4
Gambar 6.1	Posisi RPJMD Tahun 2018-2023 dalam RPJPD 2005-2025 dan Penjabarannya ke RKPD	VI-2
Gambar 6.2	Tema Pembangunan Lima Tahunan Provinsi Jawa Barat	VI-11
Gambar 6.3	Pembagian Wilayah Pengembangan Provinsi	



	Jawa Barat	VI-17
Gambar 6.4	Keterkaitan Fungsional Antarwilayah dan Antarpusat Pengembangan	VI-19



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus bersinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 27 Juni 2018 Provinsi Jawa Barat melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2018-2023. Berdasarkan hasil pilkada, maka ditetapkan pasangan Mochamad Ridwan Kamil dan UU Ruzhanul Ulum sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 serta telah dilantik pada tanggal 5 September 2018. Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih berkewajiban menyusun RPJMD



dan menetapkannya dalam bentuk Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Dengan demikian, visi dan misi serta program prioritas kepala daerah terpilih menjiwai seluruh muatan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan harus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya.

Penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan inovasi dan kolaborasi. Pelaksanaan pembangunan diharapkan tidak hanya sebatas proses atau cara yang selama ini telah dilakukan, namun disertai dengan berbagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Demikian juga diharapkan terjalin kolaborasi yang intensif antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam penyusunan RPJMD, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, meliputi:

1. **Pendekatan teknokratis** menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. **Pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. **Pendekatan politis** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
4. **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

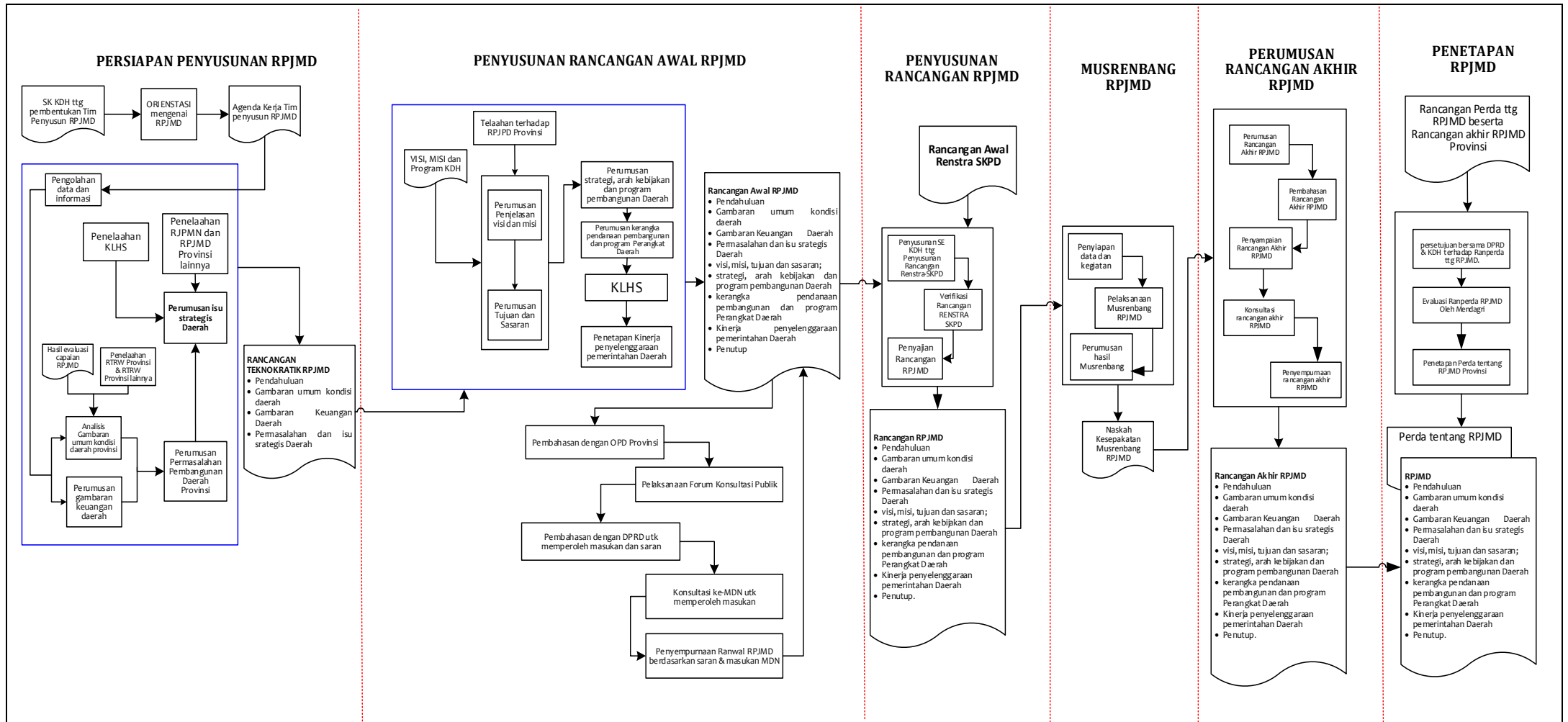


RPJMD Provinsi Jawa Barat juga memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi pada proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi, yaitu:

- a. Pendekatan perencanaan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial.
 - 1) Pendekatan Holistik-Tematik: dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
 - 2) Pendekatan Integratif: dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
 - 3) Pendekatan Spasial/Ruang : dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.
- b. Menerapkan kebijakan anggaran belanja *money follow programme*.
- c. Menerapkan cara baru penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:
 - 1) **Kolaborasi Pemangku Kepentingan** pembangunan melalui implementasi pendekatan Pentahelix – ABCGM (*Academic, Business, Community, Government, and Media*);
 - 2) **Kolaborasi Pendanaan Pembangunan** dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, dana masyarakat/umat, pinjaman daerah, *Corporate Social Responsibility* (CSR), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan obligasi daerah, dan hibah;
 - 3) **Penerapan *Dynamic Government*** sebagai inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - 4) **Pendekatan Spasial dan a-Spasial** melalui 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP); dan
 - 5) **Sinkronisasi Aplikasi dan Interkoneksi Data** dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023



Gambar 1.1
Tahapan dan Tatacara Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023



Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan penetapan Perda tentang RPJMD. Pada tahap persiapan telah dilakukan penyusunan Rancangan teknokratik RPJMD, sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Hasil dari Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi salah satu input bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Selanjutnya, Rancangan Awal disusun dan disempurnakan dengan hasil konsultasi publik, pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD Jawa Barat serta hasil konsultasi ke Menteri Dalam Negeri.

Rancangan Awal yang telah disempurnakan menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Selanjutnya Rancangan Awal Renstra PD menjadi masukan untuk perumusan Rancangan RPJMD dan siap untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD.

Musrenbang RPJMD dilakukan untuk penyempurnaan rancangan akhir RPJMD yang akan diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD. Tahapan selanjutnya, Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, yang akan ditetapkan dengan Perda tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat menjadi dokumen yang sangat strategis, sebab merupakan:

1. Media untuk mengimplementasikan janji Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. Penjabaran pelaksanaan RPJPD Jawa Barat Tahun 2005-2025 periode/tahap keempat;
3. Perwujudan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
4. Pedoman penyusunan RPJMD kabupaten/kota se-Jawa Barat;
5. Pedoman akhir dalam penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
6. Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah;
7. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun; dan



8. Instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappeda.

Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di RPJMD dengan perencanaan strategis di kabupaten/kota dan perencanaan operasional di Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87); dan
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 196 Tahun 2016 Seri E).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.3.1. Hubungan RPJMD Provinsi Jawa Barat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 juga memperhatikan RPJMN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional yang memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.



1.3.2. Hubungan RPJMD Provinsi Jawa Barat dengan RPJPD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD

Dokumen RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD. Penyusunan Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap III dan IV RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD merupakan rencana kerja 5 (lima) tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi.

Selanjutnya, RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Penjabaran rencana tahunan perangkat daerah termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

1.3.3. Hubungan RPJMD Provinsi Jawa Barat dengan RTRW Provinsi Jawa Barat

Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 memperhatikan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Barat dengan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang.



1.3.4. Hubungan RPJMD Provinsi Jawa Barat dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Jawa Barat

Penyusunan RPJMD mencakup Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra PD.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023 adalah memberikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 5 (lima) tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial.

Tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023 adalah:

1. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah;
2. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
3. Menetapkan pedoman untuk penyusunan RPJMD dan RKPD kabupaten/kota se Jawa Barat; dan
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan.

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 disusun dalam 9 (sembilan) bab, sebagai berikut:



Bab I. Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan RPJMD.

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek geograsi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Selain itu, bab ini memuat evaluasi hasil RPJMD periode lalu dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's).

Bab III. Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini memuat kondisi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah 5 (lima) tahun terakhir sebagai dasar untuk merancang kerangka pendanaan untuk membiayai pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Bab IV. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Bab ini memuat permasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunan daerah kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan isu strategis daerah memperhatikan isu internasional, nasional, dan regional Provinsi Jawa Barat.

Bab V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab ini memuat visi dan misi pembangunan jangka menengah. Selanjutnya misi dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran serta indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

Bab VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini menyajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan termasuk integrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Selanjutnya, ditetapkan program pembangunan daerah yang akan menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah dipilih.



Bab VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat program perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun pembangunan Jawa Barat, disertai dengan pendanaannya yang bersifat indikatif.

Bab VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diwakili oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disajikan beserta target setiap tahun, mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.

Bab IX Penutup

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan RPJMD dan pedoman transisi pada saat RPJMD ini berakhir untuk menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara Geografis Provinsi Jawa Barat terletak pada posisi 104°48" - 108°48" Bujur Timur dan 5°50" - 7°50" Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta
- b. Sebelah Barat : berbatasan dengan Provinsi Banten
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah
- d. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Hindia

Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah 37.089,42 Km² (Sumber: perhitungan GIS Tahun 2018 berdasarkan Peta Administrasi Jawa Barat dari Badan Informasi Geospasial Tahun 2018) dengan garis pantai sepanjang 832,69 km (Sumber: Peta RZWP3K Provinsi Jawa Barat). Berdasarkan kewenangan pengelolaan laut 0-12 mil, luas wilayah laut Provinsi Jawa Barat adalah 15.528,90 Km², dan memiliki jumlah pulau-pulau kecil 19 buah.

Secara administratif, wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi kedalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten dan 9 Kota, yaitu Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, dan Pangandaran serta Kota Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya dan Kota Banjar. Kabupaten Sukabumi merupakan wilayah kabupaten terluas di Provinsi Jawa Barat dengan luas 4.145,70 Km² (11,72 persen terhadap luas wilayah Provinsi Jawa Barat), sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Cirebon yaitu seluas 37,36 Km² (0,11 persen terhadap luas wilayah Provinsi Jawa Barat). Wilayah Provinsi Jawa Barat terdiri atas 627 kecamatan, 645 kelurahan dan 5.312 desa, dengan rincian dalam Tabel 2.1.



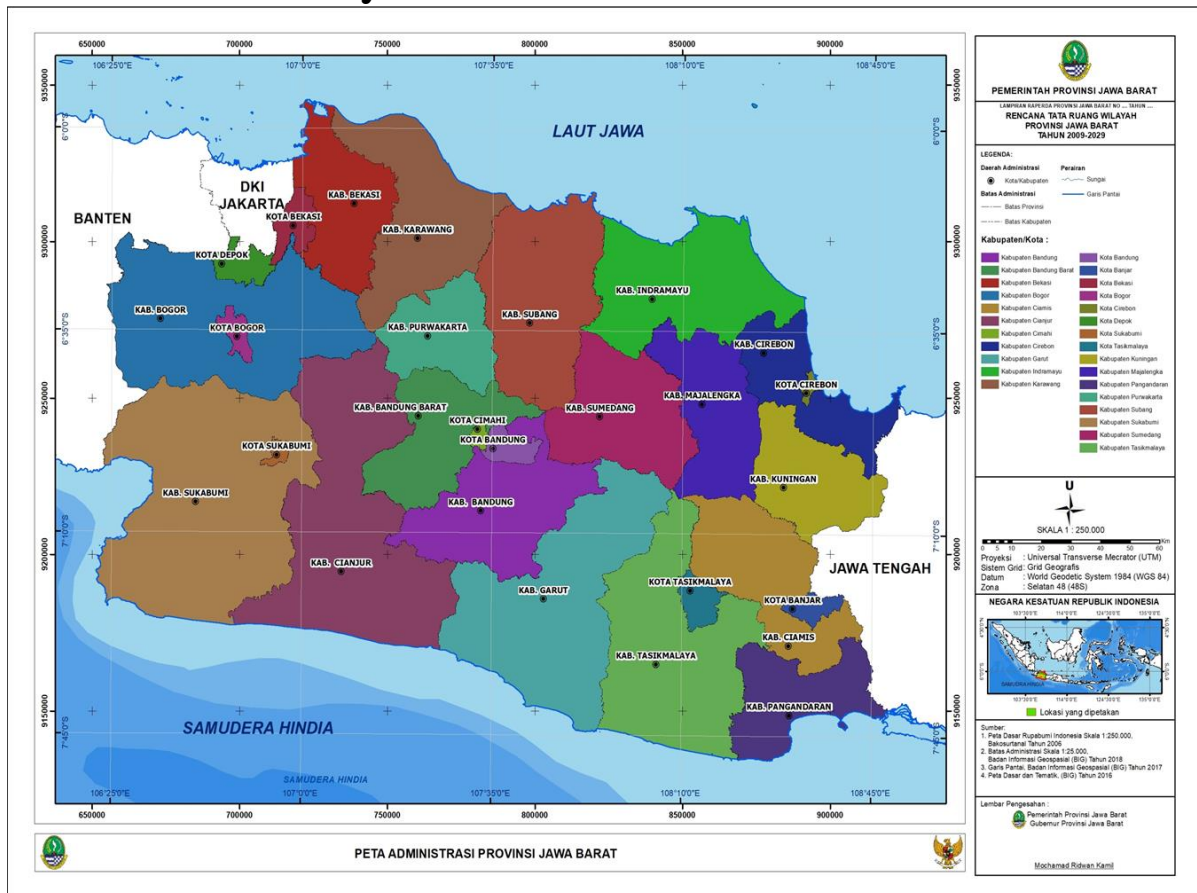
Tabel 2.1
Banyaknya Kecamatan, Desa dan Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Km ²)	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1	Bogor	2.710,62	40	19	416
2	Sukabumi	4.145,70	47	5	381
3	Cianjur	3.840,16	32	6	354
4	Bandung	1.767,96	31	10	270
5	Garut	3.074,07	42	21	421
6	Tasikmalaya	2.551,19	39	-	351
7	Ciamis	1.414,71	27	7	258
8	Kuningan	1.110,56	32	15	361
9	Cirebon	984,52	40	12	412
10	Majalengka	1.204,24	26	13	330
11	Sumedang	1.518,33	26	7	270
12	Indramayu	2.040,11	31	8	309
13	Subang	1.893,95	30	8	245
14	Purwakarta	825,74	17	9	183
15	Karawang	1.652,20	30	12	297
16	Bekasi	1.224,88	23	7	180
17	Bandung Barat	1.305,77	16	-	165
18	Pangandaran	1.010,00	10	-	93
19	Kota Bogor	118,50	6	68	-
20	Kota Sukabumi	48,25	7	33	-
21	Kota Bandung	167,67	30	151	-
22	Kota Cirebon	37,36	5	22	-
23	Kota Bekasi	206,61	12	56	-
24	Kota Depok	200,29	11	63	-
25	Kota Cimahi	39,27	3	15	-
26	Kota Tasikmalaya	171,61	10	69	-
27	Kota Banjar	113,49	4	9	16
	Jawa Barat	35.377,76	627	645	5.312

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017

Peta wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat tercantum dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Barat



Sumber: Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, Tahun 2018

2.1.1.2. Kondisi Geografis

Berdasarkan topografi, Jawa Barat terdiri atas wilayah pegunungan curam di selatan, wilayah lereng bukit yang landai di tengah, wilayah dataran luas di utara, dan wilayah aliran sungai. Topografi mengidentifikasi ketinggian wilayah dari permukaan laut. Wilayah pegunungan curam (9,5%) terletak di bagian selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut, dan wilayah lereng bukit yang landai (36,48%) terletak di bagian tengah dengan ketinggian 10-1.500 m dpl, serta wilayah dataran landai (54,02%) terletak di bagian utara dengan ketinggian 0-10 mdpl.

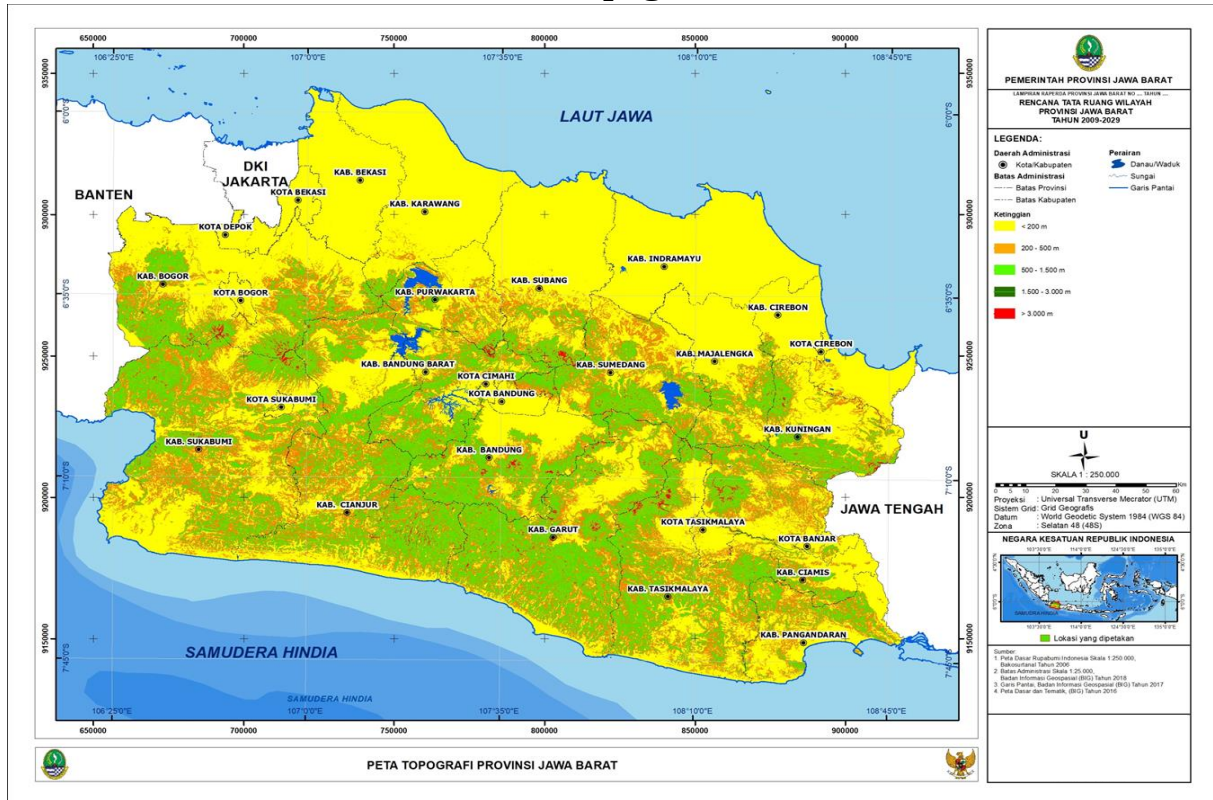
Kondisi fisik dasar pesisir utara Jawa Barat yang terdiri atas dataran pantai dan rawa alluvial pantai dengan kemiringan lereng 0%–5%, merupakan daerah yang bertopografi landai, perairan dangkal, memiliki substrat lumpur, berpasir dan berawa, pola arus yang dipengaruhi arus laut Jawa, serta bervegetasi mangrove dan terumbu karang. Topografi Wilayah Selatan Jawa Barat merupakan pegunungan dan perbukitan terjal, perairan dalam dengan banyak batu karang dan pantai berpasir, pola arus laut yang kuat yang



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

dipengaruhi keberadaan Samudera Indonesia, seperti tercantum dalam peta topografi di Gambar 2.2, dan Peta Kemiringan Lereng dalam Gambar 2.3.

Gambar 2.2
Peta Topografi



Sumber: Badan Informasi Geospasial Tahun 2018

Gambar 2.3
Peta Kemiringan Lereng



Sumber: Badan Informasi Geospasial Tahun 2018

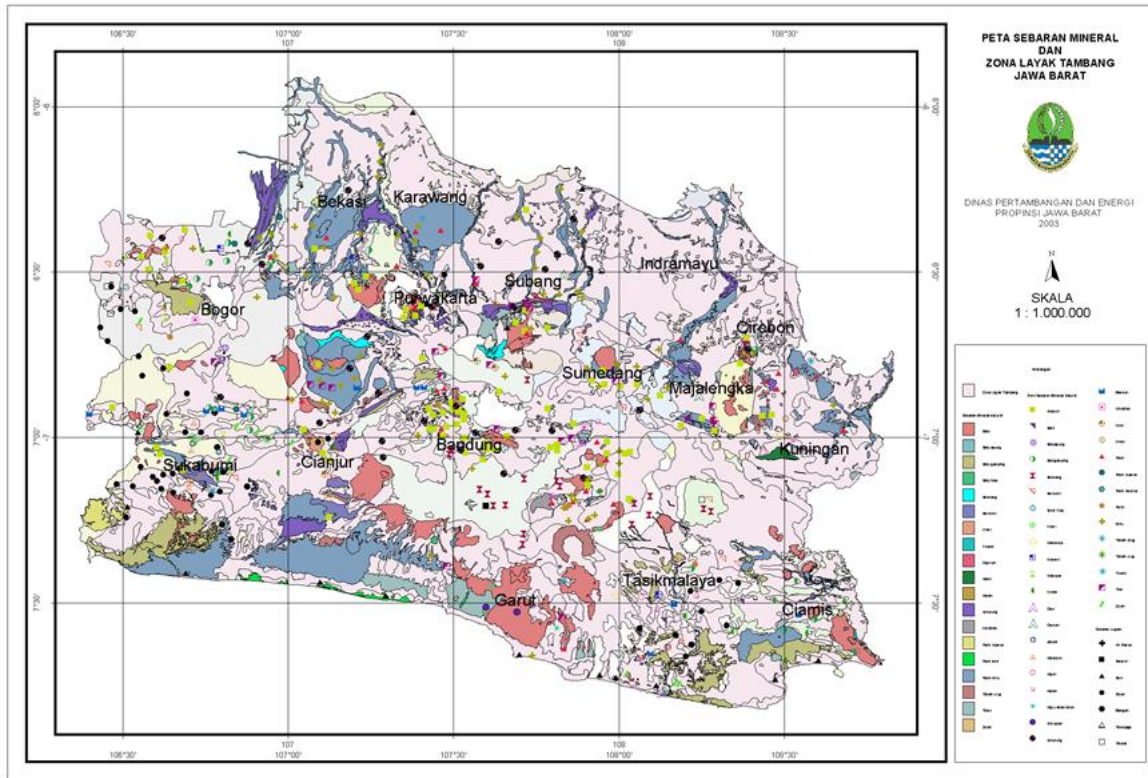


Struktur geologi wilayah Jawa Barat pada dasarnya dipengaruhi oleh peristiwa tumbukan dua lempeng yang sudah berlangsung sejak jutaan tahun lalu. Akibat peristiwa geologi tektonik global ini, batuan sedimen berumur Neogen di Jawa Barat membentuk pola lipatan anjakan (*fold thrust belt*) berarah barat-timur. Beberapa struktur sesar regional di Jawa Barat yang memegang peranan penting, antara lain Sesar Cimandiri, Sesar Baribis dan Sesar Lembang. Salah satu wilayah di Jawa Barat yang unik dari segi geologinya adalah Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu, Sukabumi. Di kawasan ini tersingkap batuan campur aduk (*melange*) yang pembentukannya berasal dari hasil tumbukan dua lempeng pada zaman kapur. Batuan *melange* Ciletuh-Palabuhanratu merupakan batuan tertua di Jawa yang tersingkap di permukaan.

Struktur geologi berupa sesar termasuk ke dalam Pola Sunda umumnya berkembang di utara Jawa (Laut Jawa). Sesar ini termasuk kelompok sesar tua yang memotong batuan dasar (*basement*) dan merupakan pengontrol dari pembentukan cekungan Paleogen di Jawa Barat. Mekanisme pembentukan struktur geologi Jawa Barat terjadi secara simultan di bawah pengaruh aktivitas tumbukan lempeng Hindia-Australia dengan lempeng Eurasia yang berlangsung sejak zaman kapur hingga sekarang. Posisi jalur tumbukan (*subduction zone*) dalam kurun waktu tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Aktivitas tumbukan lempeng yang terakhir menghasilkan jalur gunung api aktif di poros tengah Jawa Barat. Beberapa contoh gunung api aktif di Jawa Barat, antara lain Gunung Salak, Gede, Malabar, Tangkuban Parahu dan Gunung Ciremai.

Jenis batuan berupa batuan sedimen, batuan beku (ekstrusif dan intrusif), dan batuan metamorfik mengandung berbagai kandungan mineral baik logam (mineral logam) dan non-logam (mineral industri), serta bahan konstruksi yang memiliki nilai ekonomi sebagai potensi bahan galian tambang tersebar di 20 kabupaten se-Jawa Barat. Potensi bahan galian tambang meliputi bahan galian mineral logam, mineral industri, dan bahan galian konstruksi, ditunjukkan pada Gambar 2.4 dan Tabel 2.2. Potensi bahan galian tersebut menjadi dasar penetapan Wilayah Pertambangan (WP) yang ditetapkan oleh Menteri ESDM dengan mempertimbangkan keberadaan kawasan lainnya, sehingga tidak seluruh potensi pertambangan dapat dieksplorasi secara bebas.

Gambar 2.4
Peta Sebaran Mineral dan Zona Layak Tambang Provinsi Jawa Barat



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, 2017

Tabel 2.2
Potensi Bahan Galian Tambang dan Wilayah Sebarannya

No.	Jenis Komoditas Tambang	Potensi Jumlah (Ton)	Wilayah Sebaran Komoditas Tambang
1	Andesit	10.124.796.963	Cianjur, Sukabumi, Bogor, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Subang, Tasikmalaya, Pangandaraan, Garut, Bandung, Bandung Barat, Ciamis, Cirebon, Kuningan, Sumedang, Majalengka
2	Batu Gamping/Kapur	3.743.209.839	Sukabumi, Bogor, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Subang, Tasikmalaya, Ciamis, Cirebon, Kuningan, Sumedang, Majalengka, Bandung, Bandung Barat, Banjar, Pangandaran, Garut
3	Bentonit	329.604.075	Cianjur, Sukabumi, Bogor, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Sumedang
4	Diatome	25.552	Bogor, Kuningan
5	Feldspar	26.339.972	Cianjur, Sukabumi, Bogor, Purwakarta, Tasikmalaya, Pangandaraan
6	Fospat	524.160	Sukabumi, Bogor, Tasikmalaya, Pangandaraan, Ciamis, Cirebon
7	Kaolin	5.777.576	Bogor, Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Kuningan, Majalengka
8	Marmar	172.276.288	Sukabumi, Tasikmalaya, Bandung, Bandung Barat
9	Pasir+Tanah Urug	275.153.365.028	Cianjur, Sukabumi, Bogor, Purwakarta, Bekasi, Subang, Tasikmalaya, Pangandaraan, Garut, Ciamis, Cirebon, Indramayu, Kuningan, Banjar, Sumedang, Majalengka
10	Sirtu	1.601.991.429	Cianjur, Sukabumi, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Subang, Tasikmalaya, Garut, Bandung, Bandung Barat, Ciamis, Cirebon, Indramayu, Kuningan, Banjar, Majalengka
11	Pasir Kwarsa	3.257.579.879	Sukabumi, Bogor, Karawang, Bekasi, Bandung, Bandung Barat
12	Tanah Liat	123.678.899.924	Cianjur, Sukabumi, Bogor, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Subang, Tasikmalaya, Pangandaraan,

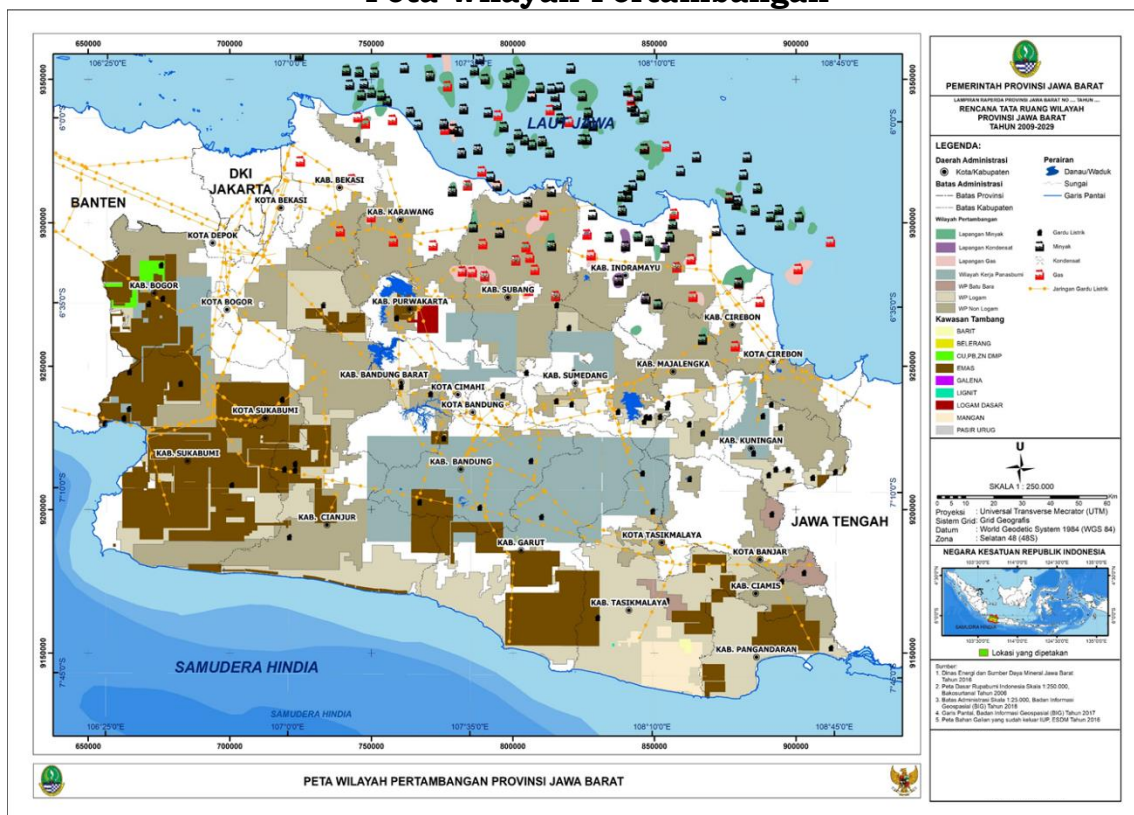


**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Jenis Komoditas Tambang	Potensi Jumlah (Ton)	Wilayah Sebaran Komoditas Tambang
			Bandung, Bandung Barat, Ciamis, Cirebon, Indramayu, Kuningan, Banjar, Sumedang, Majalengka
13	Trass	2.454.950.551	Cianjur, Sukabumi, Bogor, Purwakarta, Subang, Pangandaraan, Bandung, Bandung Barat, Ciamis, Cirebon, Kuningan, Majalengka
14	Zeolit	127.548.000	Sukabumi, Tasikmalaya, Pangandaraan, Ciamis
15	Pasir Besi	24.306	Tasikmalaya
16	Batu 1/2 Permata	1.000.000	Garut
17	Galena	22.271	Cianjur, Ciamis
18	Emas	9.342.173	Bogor, Purwakarta, Tasikmalaya, Garut
19	Perak	57.736.916	Bogor
20	Mangan	500.000	Sukabumi, Tasikmalaya, Garut
21	Onyx	50.606.950	Kuningan
22	Gypsum	6.451.205	Subang, Tasikmalaya, Banjar
23	Pasir Besi	125.706.980	Cianjur, Sukabumi, Tasikmalaya, Pangandaraan, Garut
24	Tembaga	210	Tasikmalaya
25	Belerang	20.360.000	Garut, Banjar
26	Bijih Besi	51.346.000	Tasikmalaya, Garut
27	Kalsit	2.701.600	Pangandaraan, Ciamis, Kuningan
28	Batubara	9.450.800	Sukabumi, Garut, Ciamis, Banjar
29	Seng	70.423	Purwakarta
30	Batu Ares	171.068	Sukabumi
30	Obsidian/Perlit	5.640.000	Sukabumi, Garut

Sumber: Statistik ESDM Tahun 2016, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat

**Gambar 2.5
Peta Wilayah Pertambangan**



Sumber: Kementerian ESDM, 2016



Berdasarkan hidrologi dan hidrogeologi, perhitungan curah hujan yang turun di bumi Jawa Barat sepanjang tahun menghasilkan potensi sumber daya air permukaan (sungai induk dan anak sungainya) mencapai rata-rata 48.023,78 juta m³/tahun dalam kondisi normal. Secara kewilayahan, potensi sumber daya air Jawa Barat terdistribusi pada setiap Wilayah Sungai (WS) yang meliputi WS Ciliwung-Cisadane, WS Citarum, WS Cimanuk-Cisanggarung, WS Citanduy, WS Cisadea-Cibareno, dan WS Ciwulan-Cilaki.

Angka ketersediaan air permukaan berdasarkan debit 90 Tahunan (Q90) adalah sebesar 34.013,40 juta m³/tahun, berdasarkan debit 80 tahunan (Q80) adalah sebesar 36.155,94 juta m³/tahun, dan berdasarkan debit 50 tahunan (Q50) adalah sebesar 44.712,90 juta m³/tahun. Berdasarkan rentang waktu siklus sumber daya air yang semakin pendek menunjukkan bahwa ketersediaan air permukaan semakin menurun. Lebih lanjut mengenai ketersediaan sumber daya air tercantum dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Ketersediaan Sumber Daya Air Di Jawa Barat

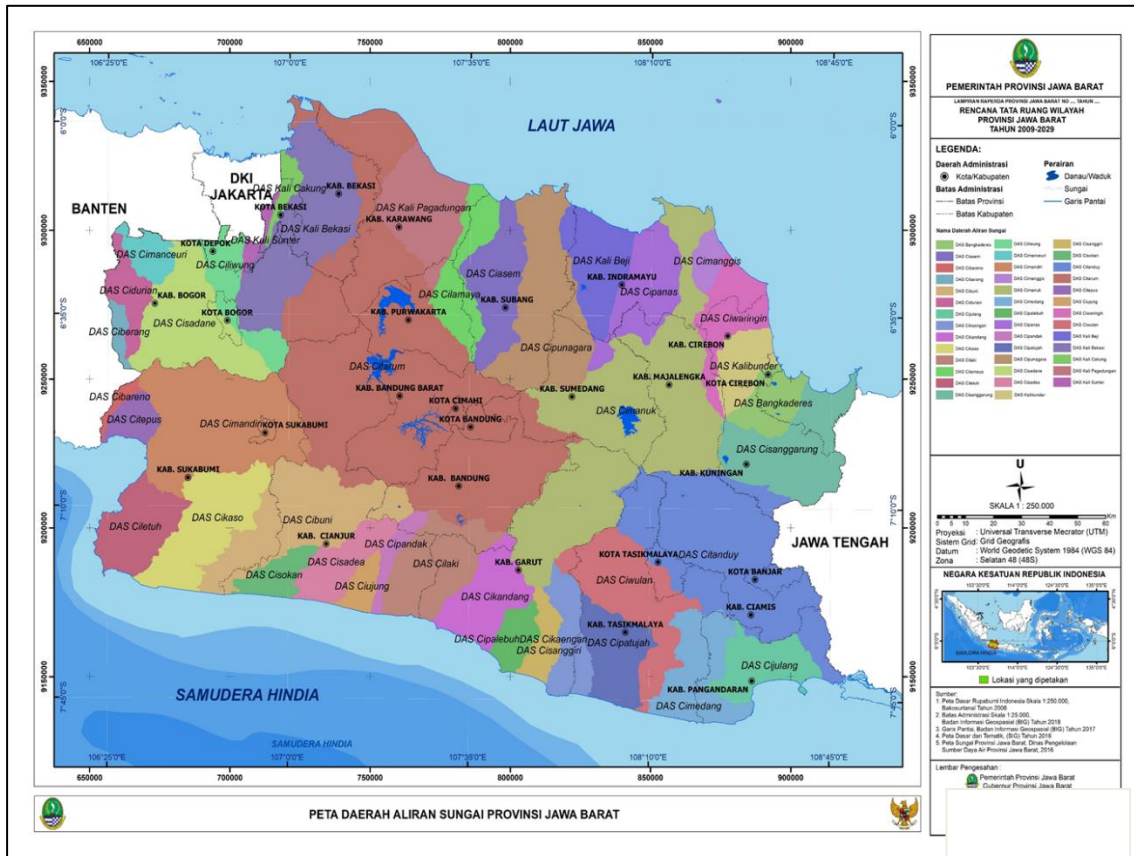
No	Wilayah Sungai	Luas (Km ²)	Potensi SDA (Juta m ³ /thn)	Ketersediaan Air Permukaan (Juta m ³ /thn)		
				Q50	Q80	Q90
1	Ciliwung	3.675,40	5.538,62	9.990,35	9.011,32	7.802,52
2	Cisadea-Cibareno	6.693,60	10.987,47	7.586,62	5.789,65	5.618,55
3	Citarum	11.436,90	12.924,43	10.724,80	7.606,45	7.243,98
4	Cimanuk - Cisanggarung	7.157,50	7.878,07	7.111,68	5.854,20	5.851,24
5	Citanduy	2.682,00	3.542,59	3.079,13	2.613,87	2.482,36
6	Ciwulan - Cilaki	5.415,00	7.152,60	6220.33	5280.45	5.014,76
Total		37.060.40	48.023,78	44712.90	37.095,82	34.013,40

Sumber: Statistik SDA Tahun 2016, Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat

Ketersediaan sumber daya air juga sangat bergantung pada pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) berupa wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya. DAS berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Jumlah DAS yang ada di Jawa Barat sebanyak 41 DAS, terdiri dari 21 DAS bermuara ke Laut Jawa, dan 20 DAS bermuara ke Samudera Hindia. Peta DAS di Jawa Barat tercantum dalam Gambar 2.6.



Gambar 2.6
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS)



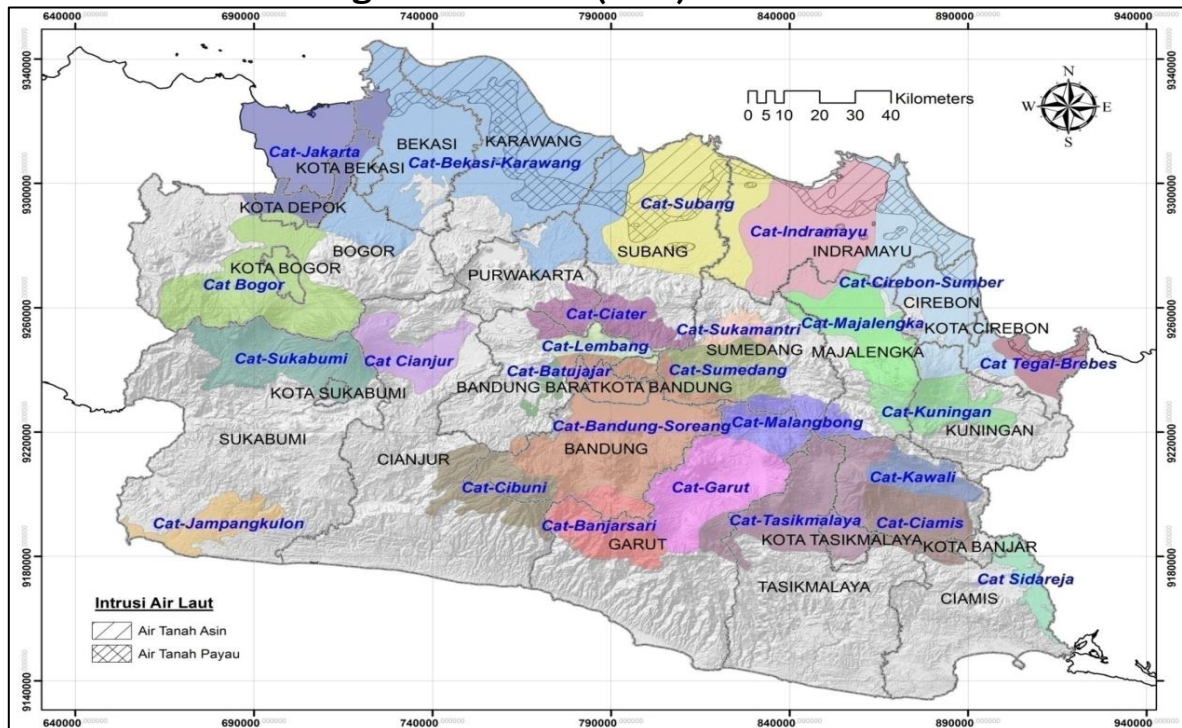
Sumber: Badan Informasi Geospasial Tahun 2018

Sungai-sungai yang bermuara ke Pantai Utara diantaranya Sungai Cimanuk, Cipunagara, Citarum, Kali Bekasi, Pagadungan, Cilamaya, Ciasem, Kali Beji, Cipanas, Cimanggis, Ciwaringin, Kali Bunder, Bangkaderes, dan Cisanggarung. Sungai-sungai yang bermuara ke Pantai Selatan diantaranya Sungai Citepus, Cimandiri, Cikaso, Cibuni, Cisokan, Cisadea, Ciujung, Cipandak, Cilaki, Cikandang, Cipalehuh, Cikaengan, Cisanggiri, Cipatujah, Ciwulan, Cimedang, Cijulang, dan Citanduy.

Secara hidrogeologi, wilayah Jawa Barat memiliki 27 Cekungan Air Tanah (CAT), yang tersebar ke seluruh wilayah yang mencakup 8 CAT Lokal, 15 CAT- Lintas Kabupaten/Kota, dan 4 CAT Lintas Provinsi. Penyebaran CAT di Wilayah Jawa Barat tercantum pada Gambar 2.7. Masing-masing CAT memiliki luasan area tertentu dalam Km², juga potensi air tanah tertentu yang dinyatakan dalam potensi debit air tanah (juta m³/tahun). Potensi air tanah dalam masing-masing CAT tersimpan dalam lapisan satuan batuan tertentu yang dinamakan akuifer, yang berdasarkan sifatnya, akuifer dibedakan atas Akuifer bebas (Q1), dan Akuifer Tertekan (Q2).



Gambar 2.7
Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Provinsi Jawa Barat



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, 2017

Setiap CAT memiliki sifat atau karakteristik, yang mencakup luasan area, potensi air tanah pada akuifer bebas, dan potensi air tanah pada akuifer tertekan, seperti ditunjukkan pada Tabel 2.4. Dalam rangka memelihara keberadaan dan keberlanjutan potensi air tanah, mencakup keadaan, sifat dan fungsi air tanah, pada masing-masing CAT perlu upaya konservasi air tanah di seluruh Wilayah Jawa Barat.

Tabel 2.4
Cekungan Air Tanah (CAT) di Wilayah Jawa Barat

No.	CAT	Luas (km ²)	Q ₁ (jt m ³ /thn)	Q ₂ (jt m ³ /thn)
1	Bogor	1.311	1.019	37
2	Sukabumi	868	759	34
3	Cianjur	467	451	16
4	Jampang Kulon	384	276	-
5	Bekasi-Karawang	3,641	1,43	6
6	Pamanukan-Subang	1,514	429	3
7	Ciater	566	413	30
8	Lembang	169	164	16
9	Batujajar	85	66	1
10	Bandung - Soreang	1.716	369	117
11	Campaka / Cibuni	621	595	28
12	Banjarsari	60	550	30
13	Tasikmalaya	1.219	978	69
14	Garut	886	621	87



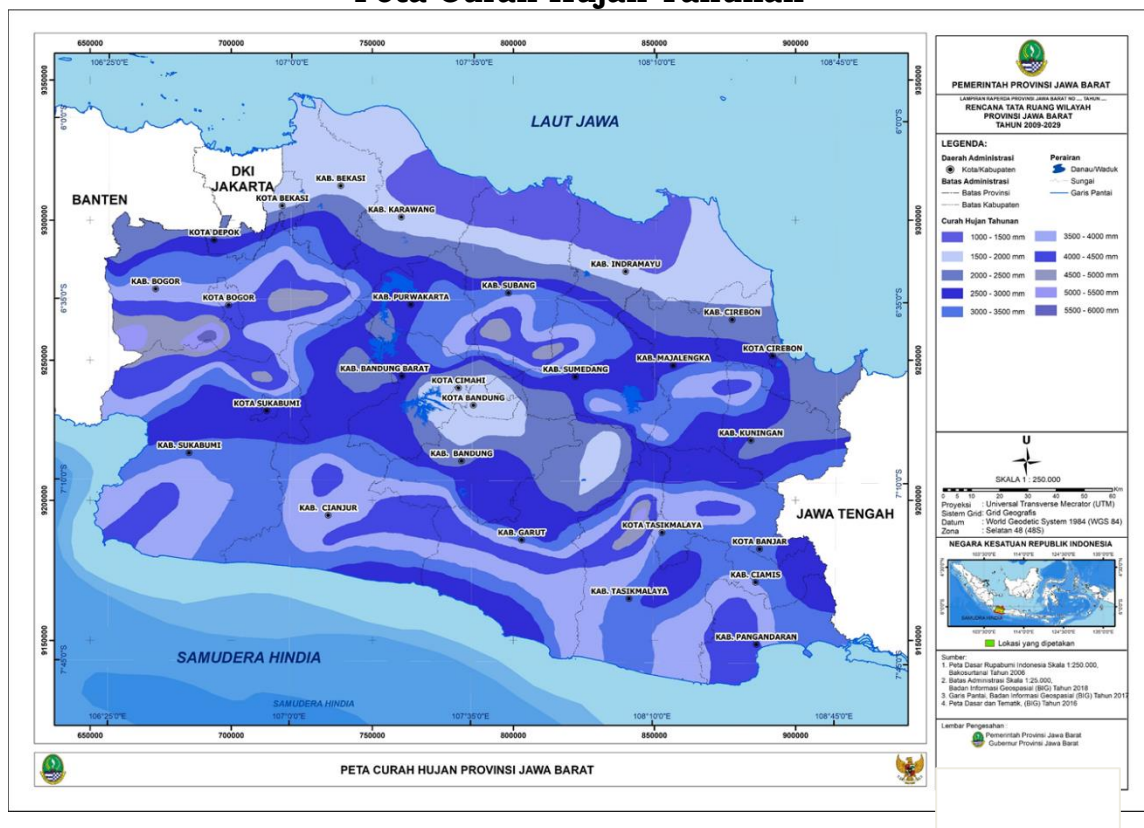
**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	CAT	Luas (km ²)	Q ₁ (jt m ³ /thn)	Q ₂ (jt m ³ /thn)
15	Sadawangi - Selaawi / Malangbong	514	415	30
16	Sumedang	483	519	28
17	Sukamantri	151	98	13
18	Ciamis	581	448	14
19	Kawali	291	224	7
20	Kuningan	507	445	21
21	Jatiwangi-Majalengka	686	554	5
22	Indramayu	1.282	362	46
23	Sumber - Cirebon	1.659	638	4
Jumlah		20.206	11.826	642

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, 2017

Berdasarkan klimatologi iklim daerah Jawa Barat termasuk tropis dengan suhu udara rata-rata antara 16° Celsius - 34° Celsius dan curah hujan yang beragam. Curah hujan di Jawa Barat berada pada rentang curah hujan 1.000 - 4.000 mm per tahun (Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika). Rata-rata hujan setiap bulan menunjukkan perbedaan yang jelas antara periode musim kemarau dengan curah hujan kurang dari 150 milimeter dan periode musim hujan dengan curah hujan lebih dari 150 milimeter.

**Gambar 2.8
Peta Curah Hujan Tahunan**



Sumber: Badan Informasi Geospasial, Tahun 2018



Curah hujan di Jawa Barat dipengaruhi tipologi *Monsoon* yang secara umum memiliki pola hujan rata-rata bulanan dengan satu puncak hujan maksimum yaitu pada Januari atau Desember dan minimum pada bulan Agustus. Sebaran wilayah hujan umumnya berada di Selatan ekuator yang sensitif terhadap gerakan atau perubahan sistem angin monsun. Puncak hujan biasanya terjadi pada saat sistem monsun barat dominan melintasi wilayah tersebut.

Persebaran curah hujan terendah berada di Wilayah Utara (Pantura, Bekasi sampai dengan Cirebon dan Kuningan) dan sebagian Wilayah Tengah Jawa Barat (Sukabumi, Cianjur, Bandung, dan Garut, dan sekitarnya); sedangkan sebaran curah hujan tinggi melingkupi Wilayah Barat-Selatan (Bogor dan Sukabumi), Wilayah Tengah (Purwakarta, Subang, Sumedang, dan sekitarnya) serta Wilayah Timur-Selatan (Tasikmalaya, Kuningan, Ciamis, dan Pangandaran).

Karakteristik curah hujan di Jawa Barat sangat mempengaruhi ketersediaan air baku terutama di Wilayah Utara Jawa Barat sebagai kawasan lahan pertanian pangan beririgasi teknis dan merupakan kawasan lumbung padi nasional di saat puncak kemarau. Sedangkan pada Wilayah Selatan Jawa Barat, kondisi curah hujan yang tinggi perlu menjadi perhatian terhadap kerentanan resiko bencana longsor dan gerakan tanah.

Klasifikasi tutupan lahan Provinsi Jawa Barat terdiri dari klasifikasi hutan, perkebunan, areal terbangun, sawah, ladang/tegalan, rawa/tambak, belukar/semak, dan sungai/waduk/badan air. Kajian tutupan lahan dilakukan secara berkala (4 tahun satu kali) menggunakan analisis *Geographic Information System* (GIS). Kajian tutupan lahan Jawa Barat Tahun 2018, memperhatikan perubahan garis pantai Jawa Barat (sumber: Badan Informasi Geospasial Tahun 2017). Luas masing-masing klasifikasi tutupan lahan dalam jangka waktu Tahun 2014-2018 tahun tercantum dalam Tabel 2.5. Sedangkan peta tutupan lahan Tahun 2018 tercantum dalam Gambar 2.9.



Tabel 2.5
Luas Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018

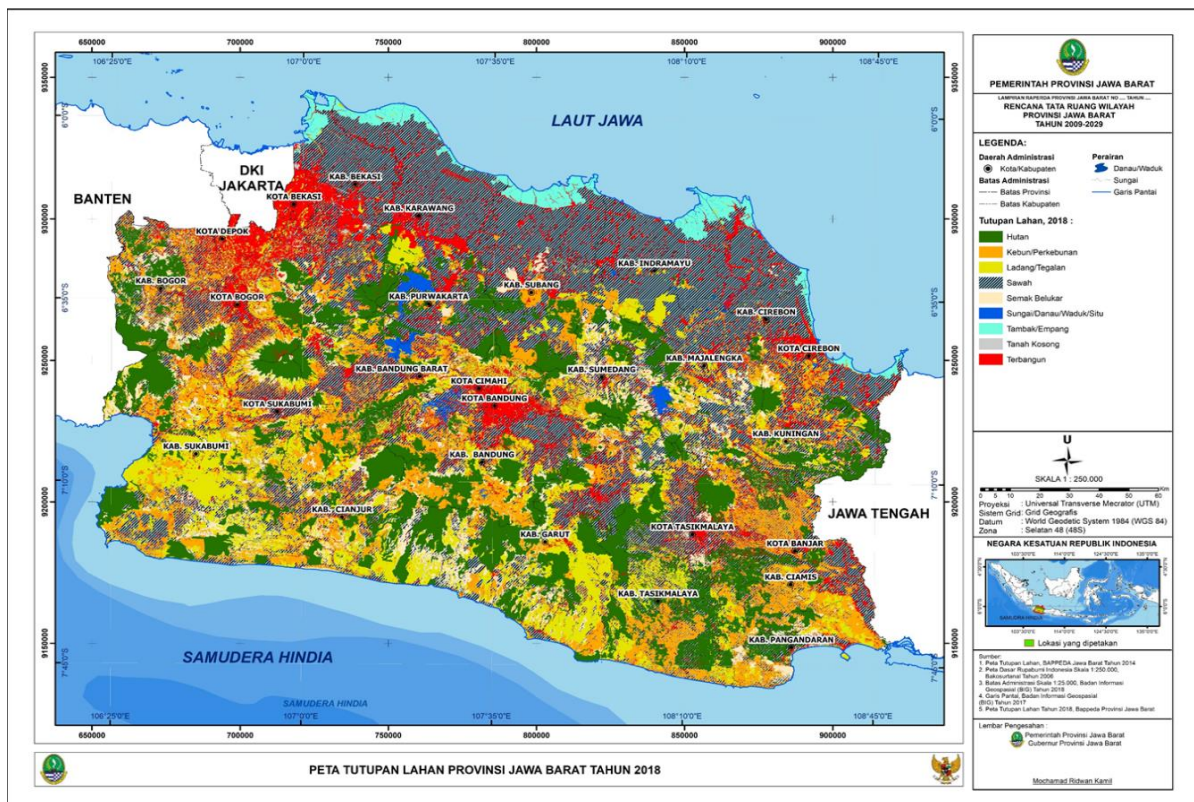
No	Klasifikasi Tutupan Lahan	Tahun (Ha)	
		2014	2018
1	Hutan (Primer/ Sekunder)	703.504,96	695.658,9
2	Kebun Perkebunan/Kebun Campuran)	594.612,79	553.380,6
3	Areal Terbangun (Permukiman/Industri/ Gedung)	456.564,75	483.668,0
4	Sawah (Irigasi/ Tadah Hujan)	1.161.468,86	1.075.704,2
5	Ladang/ Tegalan	446.737,41	532.309,8
6	Rawa/ Tambak/ Empang	77.071,22	78.100,7
7	Belukar/Semak/ Rumput/ Tanah Berbatu	275.457,92	240.511,4
8	Sungai/ Waduk/ Situ/ Badan Air	42.924,97	47.494,5
9	Tanah Kosong	2.033,9	1.941,0

Sumber: Perhitungan GIS, Bappeda Jawa Barat Tahun 2014-2018

Data: Landcover Tahun 2014 (Pemuktahiran Landcover 2010 hasil interpretasi SPOT 6 dan Citra Sekunder 2011-2014)

Pemutakhiran Peta Tutupan Lahan Tahun 2018

Gambar 2.9
Peta Tutupan Lahan Jawa Barat Tahun 2018



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2018

2.1.2. Kawasan Rawan Bencana

Struktur geologi yang bersifat kompleks menjadikan sebagian wilayah Jawa Barat memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dari ancaman bencana alam. Jawa Barat secara geologi terletak di sebelah Utara lajur pertemuan dua lempeng aktif yang saling bertumbukan. Kedua lempeng tektonik yang saling bertumbukan tersebut adalah Lempeng Indo-Australia dengan Lempeng

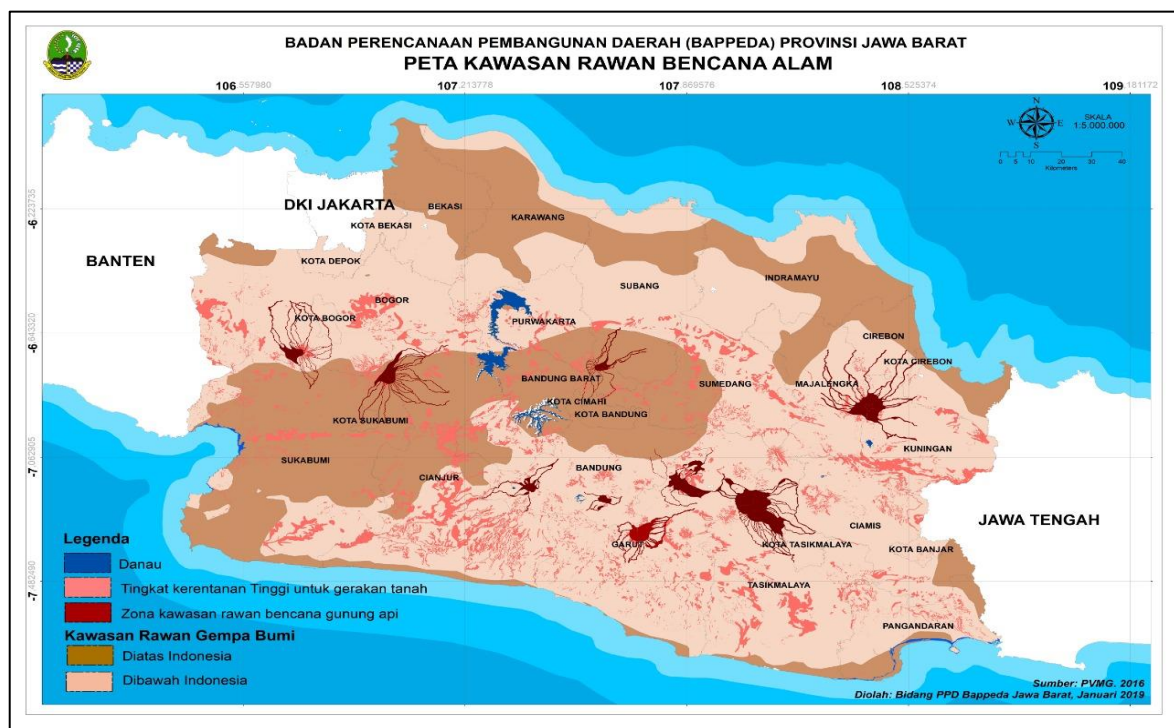


Eropa-Asia. Sumber-sumber potensi penyebab bencana alam di Jawa Barat yang perlu diwaspadai adalah 7 gunung api aktif, 5 sesar aktif serta aktivitas lempeng tektonik di Selatan Jawa Barat.

Wilayah Jawa Barat terletak pada jalur *Circum Pacific* dan mediteran, sehingga sebagian besar wilayahnya termasuk daerah labil yang ditandai dengan masih banyaknya gunung berapi yang masih aktif bekerja sehingga memiliki resiko gempa bumi. Bahaya lingkungan beraspek geologi yang sering terjadi di Jawa Barat antara lain masalah kegempaan, letusan gunung api dan aliran lahar, longsor (gerakan tanah), perubahan garis pantai dan erosi tebing sungai. Sumber penyebab bencana lainnya adalah tingginya intensitas curah hujan yang memicu gerakan tanah terutama di wilayah Jawa Barat bagian Selatan, serta banjir di wilayah Utara Jawa Barat dan Cekungan Bandung. Selain itu, wilayah Selatan Jawa Barat secara geologis memiliki kerentanan terhadap bencana Tsunami.

Kawasan rawan bencana banjir di Jawa Barat terkonsentrasi di Pesisir Pantai Utara Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Cirebon (DAS Cimanuk dan Cipunagara), Cekungan Bandung (DAS Citarum), dan Kabupaten Ciamis (DAS Citanduy). Peta kawasan rawan bencana alam di Jawa Barat, tercantum pada Gambar 2.10.

Gambar 2.10
Peta Kawasan Rawan Bencana Alam



Sumber: Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana dan Geologi (PVMBG), 2016



Berdasarkan peta tersebut diatas, kawasan rawan bencana gunung api terdiri dari:

- Kategori I: berpotensi terhadap aliran lahar hujan;
- Kategori II: berpotensi terlanda aliran awan panas, lava, dan lahar hujan; dan
- Kategori III: yang selalu terancam aliran awan panas, lava, dan gas beracun.

Gunung-gunung di Jawa Barat yang tergolong pada gunung api tipe A adalah Ciremai (Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kota Cirebon), Galunggung (Kabupaten dan Kota Tasikmalaya), Guntur (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut), Papandayan (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut). Adapun Gunung Talagabodas, Wayang Windu, Gunung Gede (Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Sukabumi), Patuha (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur), dan Salak (Kabupaten dan Kota Bogor, serta Kabupaten Sukabumi) tergolong pada tipe B.

Rawan bencana tsunami, terutama terjadi di Palabuhanratu (Kabupaten Sukabumi), Pangandaran (Kabupaten Pangandaran), dan Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan peta kawasan rawan bencana tsunami, terdapat tiga tingkat kerawanan yakni rendah (26,5%), menengah (34,5%), dan tinggi (40%). Tsunami umumnya disebabkan oleh gempa bumi dasar laut.

Khusus pemetaan zona rawan pergerakan tanah di Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 2.11, yang terbagi ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Sangat Rendah

Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan sangat rendah untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini jarang atau hampir tidak pernah terjadi gerakan tanah, baik gerakan tanah lama maupun gerakan tanah baru, kecuali pada daerah tidak luas pada tebing sungai.

2. Rendah

Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan rendah untuk terkena gerakan tanah, umumnya pada zona ini jarang terjadi gerakan tanah jika tidak mengalami gangguan pada lereng, dan jika terdapat gerakan tanah lama, lereng telah mantap kembali.



3. Menengah

Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan menengah untuk terkena gerakan tanah, pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan, atau jika lereng mengalami gangguan.

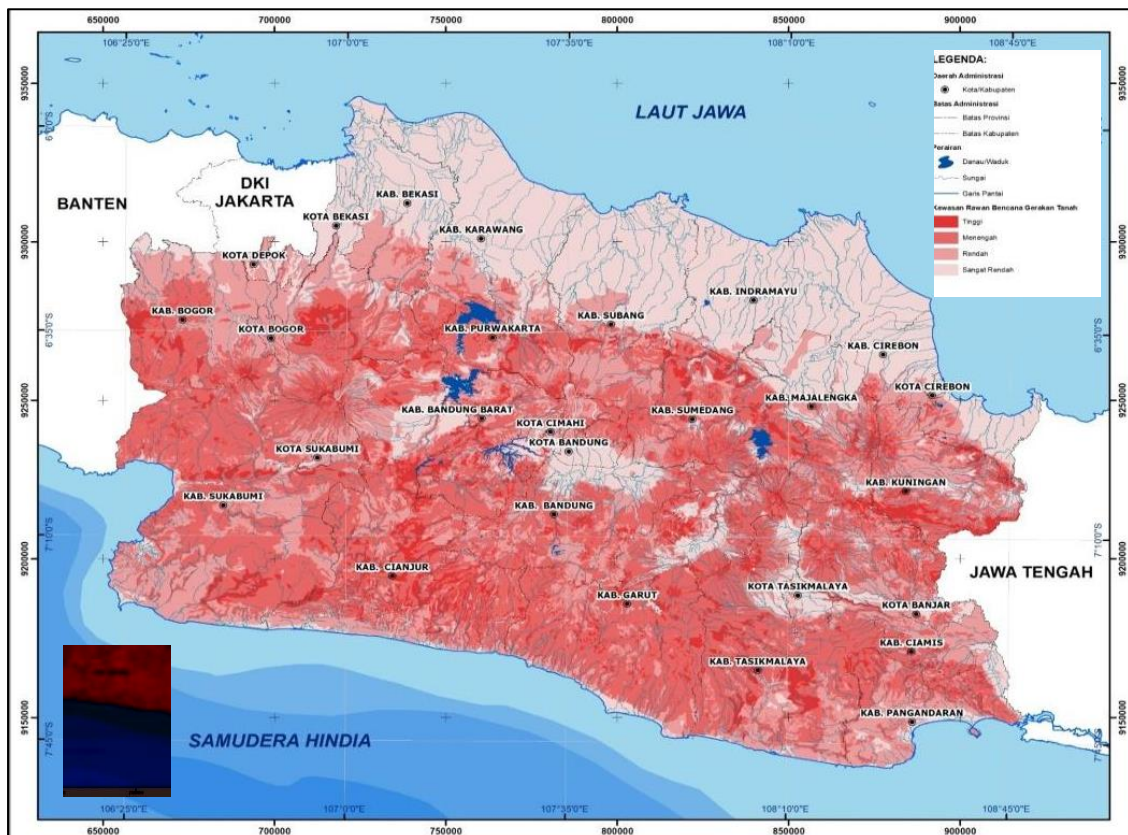
4. Tinggi

Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan tinggi untuk terkena gerakan tanah, pada zona ini sering terjadi gerakan tanah, sedangkan gerakan tanah lama dan gerakan tanah baru masih aktif bergerak, akibat curah hujan yang tinggi dan erosi kuat.

Lebih dari 2/3 dari wilayah Jawa Barat dikategorikan berpotensi rawan bencana gerakan tanah, dengan proporsi:

- 25,9% sangat rendah;
- 25,5% rendah;
- 40,4% menengah; dan
- 7,3% tinggi.

Gambar 2.11
Peta Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Provinsi Jawa Barat



Sumber: Badan Geologi, Tahun 2016



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**



2.1.3. Kapasitas Daya Tampung dan Daya Lingkungan

1) Daya Dukung Air

Daya dukung sumber daya air pada suatu wilayah dapat diartikan sebagai ketersediaan potensi sumber daya air yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup di wilayah tersebut. Potensi air pada suatu wilayah dinyatakan sebagai *supply*, sedangkan kebutuhan air di wilayah tersebut dinyatakan sebagai *demand*. Idealnya, nilai *demand* tidak melebihi kemampuan *supply*. Jika nilai *demand* lebih besar dari *supply*, maka dapat dikatakan bahwa daya dukung air di wilayah tersebut telah terlampaui, sehingga diperlukan penerapan teknologi dan pengelolaan lingkungan yang baik sebagai bentuk pengendalian.

Perhitungan daya dukung air pada kajian ini mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah. Pada peraturan tersebut, dijelaskan metode perhitungan daya dukung air dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan suatu wilayah, baik pada keadaan surplus ataupun defisit. Keadaan surplus menunjukkan bahwa ketersediaan air di wilayah tersebut tercukupi, sedangkan keadaan defisit menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan airnya. Guna mencapai kondisi surplus, fungsi lingkungan yang terkait dengan sistem tata kelola air harus dilestarikan.

Dalam perhitungan ketersediaan air, digunakan Metode Koefisien Limpasan yang dimodifikasi dari Metode Rasional dengan mempertimbangkan curah hujan tahunan dan tutupan lahan, sehingga diperoleh ketersediaan air di Provinsi Jawa Barat sebesar 3.208.002.372,25 m³/tahun. Ketersediaan air di masing-masing kabupaten/kota berdasarkan perhitungan yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 2.6 dengan visualisasi spasial berupa peta ketersediaan air bersih pada Gambar 2.12.

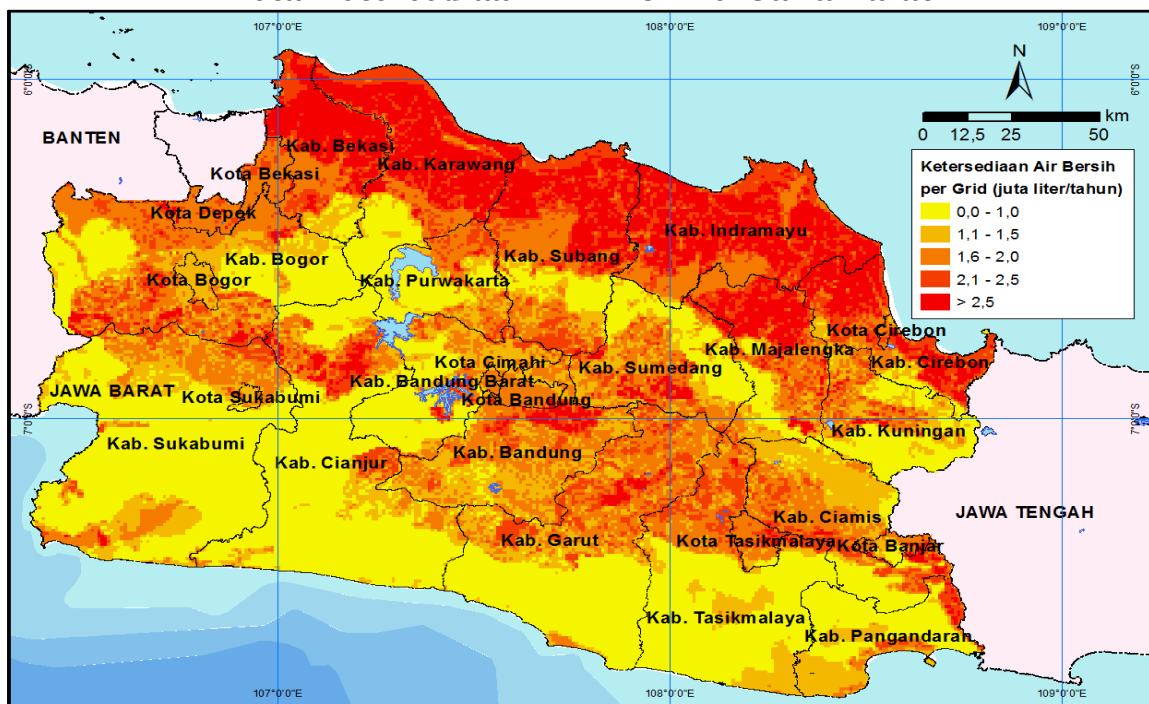


Tabel 2.6
Ketersediaan Air Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Koefesien Limpasan	Curah Hujan Tahunan	Luas Wilayah (m ²)	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)
1	Bogor	0,31201	442	266.381	367.357.614,32
2	Sukabumi	0,3321	348	414.570	479.057.096,81
3	Cianjur	0,3288	361	384.016	455.867.516,19
4	Bandung	0,4277	199	257.010	218.753.288,21
5	Garut	0,3669	166	307.407	187.203.077,16
6	Tasikmalaya	0,3650	286	255.119	266.337.277,14
7	Ciamis	0,2769	220	141.471	86.170.265,06
8	Kuningan	0,3705	160	111.056	65.829.747,49
9	Cirebon	0,2927	200	98.452	57.640.413,85
10	Majalengka	0,2668	239,25	120.424	76.858.780,77
11	Sumedang	0,3402	261,91	151.833	135.285.354,57
12	Indramayu	0,3429	141,67	204.011	99.113.643,37
13	Subang	0,3321	250,83	189.395	157.764.095,18
14	Purwakarta	0,3830	214,25	82.574	67.765.672,72
15	Karawang	0,3623	253	165.220	151.438.275,32
16	Bekasi	0,3963	253	122.488	122.801.266,04
17	Bandung Barat	0,3242	183,33	130.577	77.600.728,91
18	Pangandaran	0,3341	211,41	101.000	71.348.803,51
19	Kota Bogor	0,1928	416,67	11.850	9.521.640,24
20	Kota Sukabumi	0,2800	319,75	4.825	4.319.109,26
21	Kota Bandung	0,1797	211,41	16.767	6.370.319,63
22	Kota Cirebon	0,2188	211,41	3.736	1.728.047,40
23	Kota Bekasi	0,1908	200	20.661	7.884.480,84
24	Kota Depok	0,1819	273,33	20.029	9.955.905,03
25	Kota Cimahi	0,1676	237,33	3.927	1.561.835,21
26	Kota Tasikmalaya	0,2909	285,17	17.161	14.237.359,63
27	Kota Banjar	0,2890	237,3	12.000	8.230.758,40
Jawa Barat					3.208.002.372,25

Sumber: KLHS RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023

Gambar 2.12
Peta Ketersediaan Air Provinsi Jawa Barat



Sumber: KLHS RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023



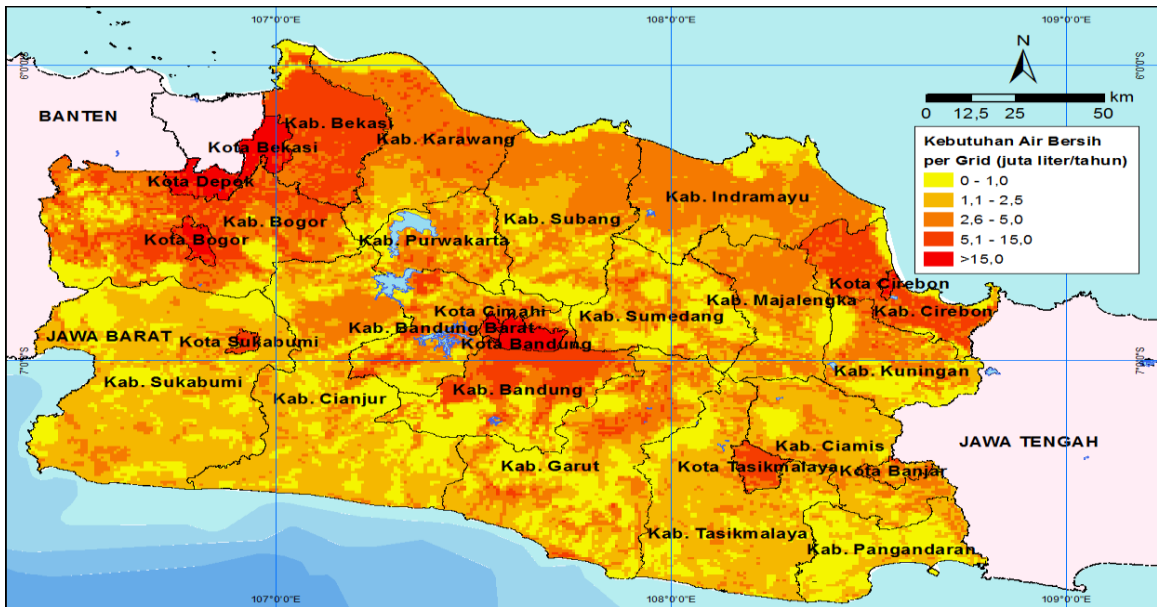
Selanjutnya, dilakukan pula perhitungan kebutuhan air menggunakan standar kebutuhan air untuk hidup layak yang mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009, yaitu sebesar 1.600 m³ air/kapita/tahun. Hasil perhitungan kebutuhan air kemudian dikomparasi dengan nilai ketersediaan air yang diperoleh sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.7 sehingga diketahui bahwa hingga 5 (lima) tahun mendatang ketersediaan air secara umum di Provinsi Jawa Barat masih mencukupi kebutuhan. Akan tetapi, terdapat beberapa kabupaten/kota yang akan mengalami kondisi defisit air, yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, dan Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.7
Perbandingan Supply Dan Demand Air Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2017		2024 (Proyeksi)	
		Kebutuhan Air (m ³ /tahun)	Daya Dukung Air	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)	Daya Dukung Air
1	Bogor	244.727.682	122.629.932	284.203.264	83.154.350,12
2	Sukabumi	107.074.181	371.982.916	110.991.916	368.065.181,21
3	Cianjur	98.592.793	357.274.724	101.489.330	354.378.185,79
4	Bandung	157.532.087	61.221.201	176.831.506	41.921.782,01
5	Garut	112.544.319	74.658.758	119.393.281	67.809.795,96
6	Tasikmalaya	76.311.689	190.025.588	78.778.417	187.558.859,94
7	Ciamis	51.482.038	34.688.227	53.281.517	32.888.747,66
8	Kuningan	46.510.607	19.319.141	48.237.290	17.592.457,09
9	Cirebon	93.863.356	36.222.942	98.406.029	40.765.615,55
10	Majalengka	52.034.575	24.824.206	53.604.937	23.253.844,17
11	Sumedang	50.023.849	85.261.506	51.865.901	83.419.453,17
12	Indramayu	74.495.697	24.617.946	77.024.271	22.089.372,37
13	Subang	67.714.800	90.049.295	72.244.684	85.519.411,58
14	Purwakarta	40.852.304	26.913.369	44.355.253	23.410.420,12
15	Karawang	100.555.076	50.883.199	106.683.397	44.754.878,12
16	Bekasi	147.680.066	24.878.800	187.664.473	64.863.206,56
17	Bandung Barat	72.199.351	5.401.378	78.203.323	602.594,29
18	Pangandaran	17.205.385	54.143.419	17.808.773	53.540.030,11
19	Kota Bogor	46.633.291	37.111.650	51.836.512	42.314.871,36
20	Kota Sukabumi	14.064.049	9.744.939	15.003.953	10.684.843,54
21	Kota Bandung	109.089.244	102.718.924	112.644.446	106.274.126,17
22	Kota Cirebon	13.599.287	11.871.239	14.410.726	12.682.678,20
23	Kota Bekasi	122.079.579	114.195.098	144.514.596	136.630.115,16
24	Kota Depok	95.475.809	85.519.904	118.677.283	108.721.377,57
25	Kota Cimahi	26.018.120	24.456.285	28.690.883	27.129.048,19
26	Kota Tasikmalaya	28.890.743	14.653.383	29.777.255	15.539.895,17
27	Kota Banjar	7.967.264	263.495	8.211.055	19.703,80
Jawa Barat		2.075.217.238	1.132.785.134	2.284.834.271	923.168.101

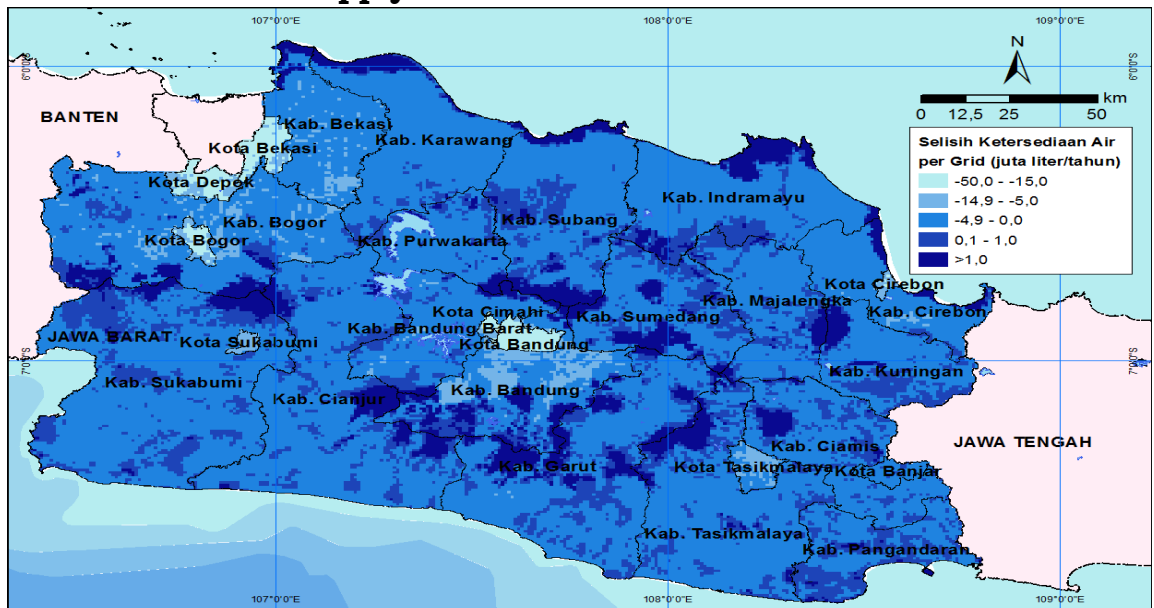
Sumber: KLHS RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023

Gambar 2.13
Peta Kebutuhan Air Provinsi Jawa Barat



Sumber: KLHS RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023

Gambar 2.14
Peta Selisih Supply dan Demand Air Provinsi Jawa Barat



Sumber: KLHS RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023

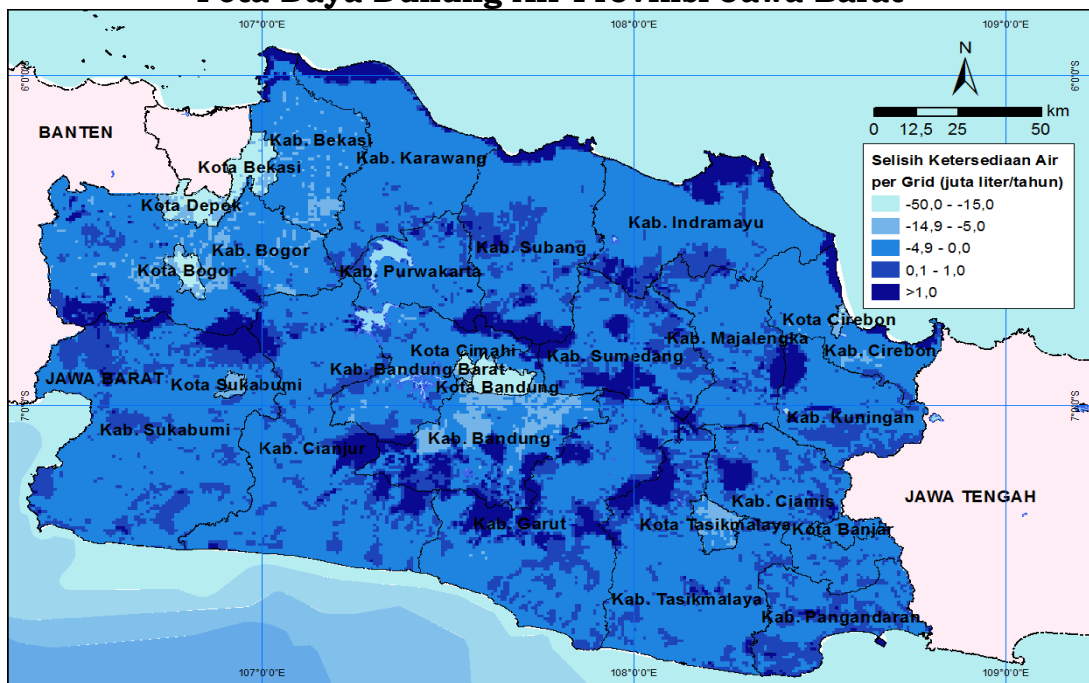
Untuk mengetahui status daya dukung air Provinsi Jawa Barat, dilakukan analisis terhadap ambang batas daya dukung lingkungan hidup (DDLH), yaitu suatu tingkatan yang masih dapat ditoleransi oleh lingkungan berkenaan dengan adanya perubahan pada lingkungan tersebut. Nilai ambang batas merupakan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan sumber daya air yang dinyatakan dalam bentuk jumlah.

Gambar 2.15
Peta Ambang Batas Daya Dukung Air Provinsi Jawa Barat



Sumber: KLHS RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023

Gambar 2.16
Peta Daya Dukung Air Provinsi Jawa Barat



Sumber: KLHS RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023

2) Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan merupakan fungsi dari persentase lahan yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian terhadap satuan luas dan waktu. Semakin besar persentase lahan yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian di suatu wilayah, semakin besar pula daya dukung pangan di wilayah tersebut.



Mengacu kepada data daya dukung pangan dapat disimpulkan bahwa Provinsi Jawa Barat secara umum tergolong baik dalam hal kemandirian pangan dan telah mampu memenuhi kebutuhan minimum penduduknya. Akan tetapi, masih terdapat sejumlah kabupaten/kota dengan nilai daya dukung pangan < 1 , yaitu Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Cirebon, dan Kota Bekasi.

Tabel 2.8
Daya Dukung Pangan Provinsi Jawa Barat

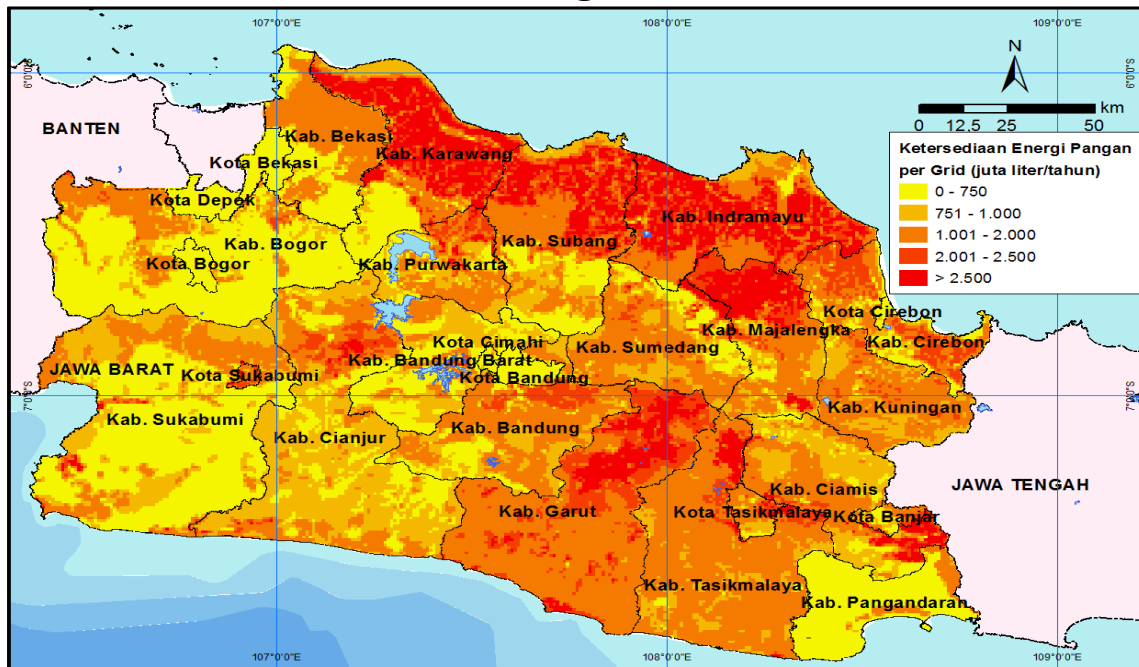
NO	Kab/Kota	Luas Panen (Ha)	Produksi Tanaman Pangan (Ha/tahun)	Ketersediaan Beras (ton/tahun)	Kebutuhan Beras (ton/tahun)	Daya Dukung Pangan
1	Bogor	77.088,0	63,420	4.888.920,96	1.480.658	3,30
2	Sukabumi	125.611,0	60,560	7.607.002,16	647.823	11,74
3	Cianjur	125.971,0	61,340	7.727.061,14	596.509	12,95
4	Bandung	78.345,0	60,360	4.728.904,20	953.105	4,96
5	Garut	120.789,0	62,090	7.499.789,01	680.919	11,01
6	Tasikmalaya	118.117,0	69,500	8.209.131,50	461.703	17,78
7	Ciamis	66.550,0	60,070	3.997.658,50	311.478	12,83
8	Kuningan	58.000,0	60,790	3.525.820,00	281.400	12,53
9	Cirebon	76.489,0	57,970	4.434.067,33	567.895	7,81
10	Majalengka	98.189,0	61,390	6.027.822,71	314.821	19,15
11	Sumedang	69.053,0	60,620	4.185.992,86	302.656	13,83
12	Indramayu	184.432,0	66,900	12.338.500,80	450.716	27,38
13	Subang	160.859,0	62,430	10.042.427,37	409.690	24,51
14	Purwakarta	35.827,0	56,370	2.019.567,99	247.166	8,17
15	Karawang	183.136,0	64,480	11.808.609,28	608.381	19,41
16	Bekasi	85.665,0	54,020	4.627.623,30	893.498	5,18
17	Bandung Barat	33.257,0	58,420	1.942.873,94	436.823	4,45
18	Pangandaran	28.475,0	56,060	1.596.308,50	104.097	15,33
19	Kota Bogor	618,0	58,060	35.881,08	282.142	0,13
20	Kota Sukabumi	3.727,0	65,660	244.714,82	85.091	2,88
21	Kota Bandung	1.675,0	63,710	106.714,25	660.015	0,16
22	Kota Cirebon	461,0	52,190	24.059,59	82.279	0,29
23	Kota Bekasi	535,0	57,010	30.500,35	738.609	0,04
24	Kota Depok	247,0	59,760	14.760,72	577.650	0,03
25	Kota Cimahi	305,0	70,790	21.590,95	157.416	0,14
26	Kota Tasikmalaya	12.060,0	54,480	657.028,80	174.796	3,76
27	Kota Banjar	6.139,0	62,410	383.134,99	48.204	7,95
Jawa Barat				108.726.467,1	12.555.538	8,66

Sumber: KLHS RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023

Kondisi ketersediaan pangan di seluruh Provinsi Jawa Barat disajikan dalam peta berikut ini.

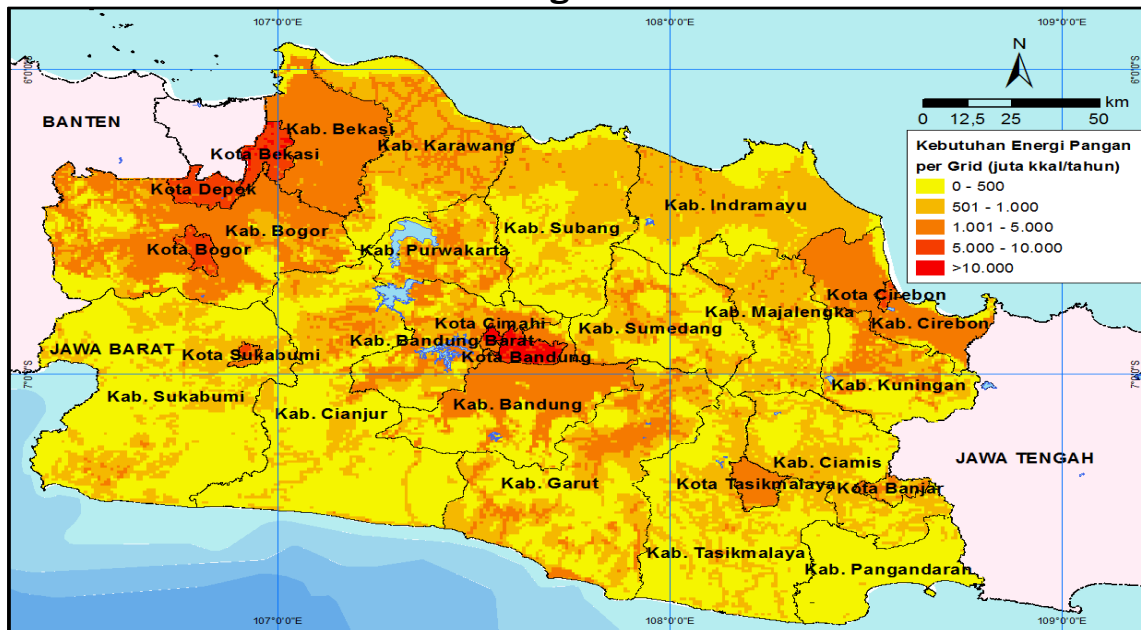


Gambar 2.17
Peta Ketersediaan Pangan Provinsi Jawa Barat



Sumber: KLHS RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023

Gambar 2.18
Peta Kebutuhan Pangan Provinsi Jawa Barat



Sumber: KLHS RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023

Berdasarkan gambar dibawah, terlihat bahwa Kota Bandung, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi memiliki kecenderungan rawan pangan, yaitu terjadinya kebutuhan pangan melebihi ketersediaan. Adapun hubungan antara kebutuhan dan ketersediaan pangan secara umum di Provinsi Jawa Barat digambarkan dalam gambar dibawah.

Gambar 2.19
Peta Selisih Supply Dan Demand Pangan Provinsi Jawa Barat



Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2018-2023

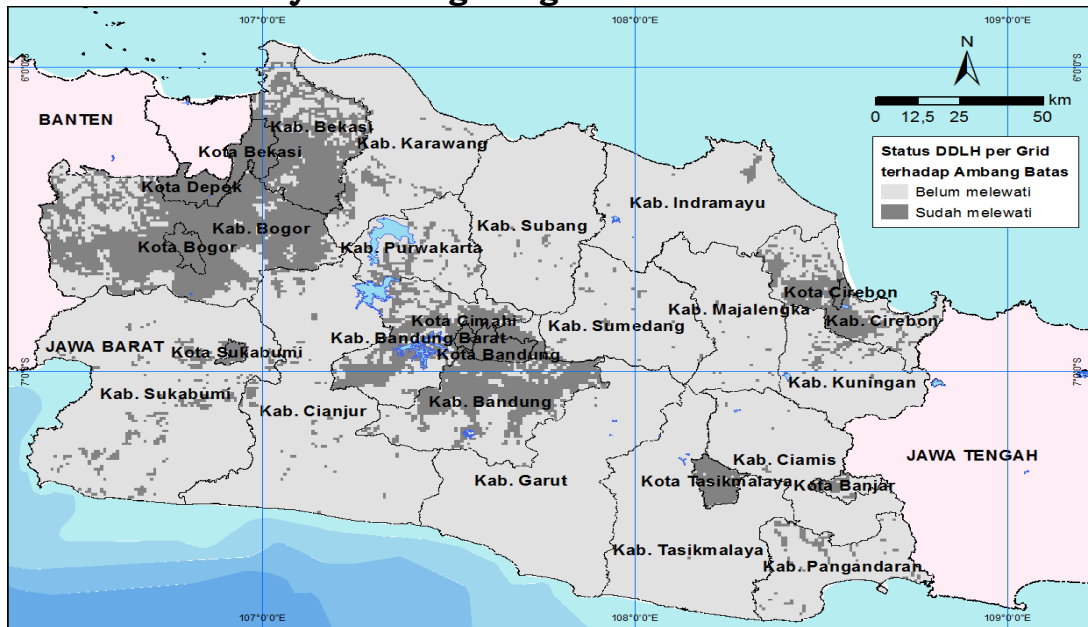
Penentuan status daya dukung pangan dianalisis pula ambang batas DDLH Provinsi Jawa Barat. Peta ambang batas daya dukung pangan dan peta daya dukung pangan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 2.20 dan Gambar 2.21.

Gambar 2.20
Peta Ambang Batas Daya Dukung Pangan Provinsi Jawa Barat



Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2018-2023

Gambar 2.21
Peta Daya Dukung Pangan Provinsi Jawa Barat



Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2018-2023

3) Daya Dukung Fungsi Lahan

Daya dukung fungsi lindung (DDL) dilihat dari luas guna lahan yang memiliki fungsi lindung, koefisien lindung untuk guna lahan, dan luasan wilayah. Daya dukung fungsi lindung memiliki kisaran nilai antara 0 hingga 1. Jika nilainya semakin mendekati angka 1, maka semakin baik fungsi lindung yang ada di wilayah tersebut, demikian pula sebaliknya. Adapun tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung dan koefisien lindung lahan berdasarkan jenis guna lahan sebagai berikut.

Tabel 2.9
Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung

Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung	Rentang Nilai DDL
Sangat rendah	0-0,2
Rendah	0,2-0,4
Sedang	0,4-0,6
Baik	0,6-0,8
Sangat Baik	0,8-1

Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2018-2023



Tabel 2.10
Koefisien Lindung Lahan Berdasarkan Jenis Guna Lahan

No.	Jenis Tata Guna Lahan	Koefisien Lindung
1	Cagar alam	1,00
2	Suaka margasatwa	1,00
3	Taman wisata	1,00
4	Taman buru	0,82
5	Hutan Lindung	1,00
6	Hutan Cadangan	0,61
7	Hutan Produksi	0,68
8	Perkebunan besar	0,54
9	Perkebunan rakyat	0,42
10	Persawahan	0,46
11	Ladang/tegalan	0,21
12	Padang rumput	0,28
13	Danau/tambak	0,98
14	Tanaman kayu	0,37
15	Permukiman	0,18
16	Tanah kosong	0,01

Sumber: KLHS RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023

Dalam perhitungan daya dukung fungsi lahan, seluruh penggunaan lahan memiliki fungsi lindung dengan koefisien yang berbeda. Berikut hasil perhitungan luas guna lahan fungsi lindung Provinsi Jawa Barat dengan data yang diperoleh dari Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2017. Berdasarkan Tabel 2.11, dapat dihitung nilai DDL Provinsi Jawa Barat yaitu 0,66.

Tabel 2.11
**Hasil Perhitungan Luas Guna Lahan Fungsi Lindung
di Provinsi Jawa Barat**

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Koefisien Lindung	Luas Lahan/Lgl (Ha)
1	Hutan Konservasi	179.500,66	1,00	179.500,66
2	Konservasi Perairan	1.391,18	1,00	1.391,18
3	Hutan Lindung	224.040,30	1,00	224.040,30
4	LNH-Sesuai Utk Htn. Lindung	48.379,39	1,00	48.379,39
5	LNH-Resapan Air	424.351,32	1,00	424.351,32
6	LNH-Perlindungan Geologi	58.591,43	1,00	58.591,43
7	LNH-Rawan Letusan Gn. Api	67.996,91	1,00	67.996,91
8	LNH-Rawan Gerakan Tanah	650.632,12	1,00	650.632,12
9	LNH-Rawan Tsunami	38.975,13	1,00	38.975,13
10	KB-Hutan Produksi Terbatas	174.463,34	0,68	118.635,07
11	KB-Hutan Produksi	215.251,16	0,68	146.370,79
12	KB-Hutan Cadangan	1.195,92	0,61	729,51
13	KB-Enclave	23.216,21	0,18	4.178,92
14	Perkotaan	351.180,00	0,18	63.212,40



No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Koefisien Lindung	Luas Lahan/Lgl (Ha)
15	Sawah	83.217,97	0,46	38.280,27
16	Perdesaan	638.840,03	0,18	114.991,21
17	KB-Tubuh Air	38.935,63	0,98	38.156,92
18	Rencana KP2B	506.095,47	0,46	232.803,92
19	Perkebunan Teh	9.162,68	0,21	1.924,16
Jumlah		3.735.416,85		2.453.141,60

Sumber: KLHS RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023

4) Daya Dukung Lahan Terbangun

Daya dukung lahan terbangun (DDLb) ditinjau dari koefisien luas lahan terbangun, luas wilayah, dan luas lahan terbangun. Berdasarkan data tutupan lahan dalam penyusunan Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, luas terbangun di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014 adalah 447.298,06 hektar. Diasumsikan luas lahan untuk infrastruktur adalah 20% dari luas bangunan maka luasnya mencapai Jika rata-rata koefisien lahan terbangun adalah 60% (rata-rata perkotaan dan pedesaan).

Tabel 2.12
Perubahan Luas Tutupan Lahan di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2002, 2010, dan 2014

No	Tutupan Lahan	Luas (Hektar)			Konversi 2002-2014	
		2002	2010	2014	Luas (Ha)	%
1	Hutan	408.623,62	403.623,02	737.048,27	328.424,65	80,37
2	Kebun/Perkebunan	836.367,44	787.412,33	552.969,29	-283.398,15	-33,88
3	Ladang/Tegalan	470.844,88	466.649,05	504.649,40	33.804,52	7,18
4	Sawah	1.111.583,33	1093.699,38	1086.610,47	-24.972,86	-2,25
5	Semak Belukar	437.086,12	398.928,79	270.357,63	-166.728,49	-38,15
6	Sungai/Danau/Waduk/Situ	45.181,79	45.004,11	42.699,02	-2.482,77	-5,50
7	Tambak/Empang	50.868,43	73.677,73	78.780,58	27.912,15	54,87
8	Terbangun	352.556,63	442.613,78	447.298,06	94.741,43	26,87

Sumber: KLHS RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa tutupan lahan untuk kebun/perkebunan, sawah, semak belukar, sungai/danau/waduk/situ memiliki daya tampung lahan yang kurang sehingga memerlukan perhatian khusus dalam pengembangan pembangunan tutupan lahan tersebut.



2.1.4. Demografi

Kondisi demografi suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Berdasarkan data BPS dalam indikator statistik terkini Jawa Barat Tahun 2019, jumlah penduduk Jawa Barat Tahun 2018 mencapai 48.683.861 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,34 persen.

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	45.340.799	46.029.668	46.709.569	47.379.389	48.037.827	48.683.861
	- Laki-laki (jiwa)	23.004.158	23.345.033	23.680.927	24.011.261	24.355.331	24.652.609
	- Perempuan (jiwa)	22.336.641	22.684.635	23.028.642	23.368.128	23.702.496	24.031.252
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1.77	1.52	1.47	1.43	1.39	1.34
3	Kepadatan Penduduk (jiwa/km)	1.282	1.301	1.320	1.339	1.358	1.376

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat dan Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2012-2016 dan Indikator Statistik Terkini Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

Penduduk terbanyak pada tahun 2018 berada di Kabupaten Bogor, yaitu 5.840.907 jiwa, diikuti dengan Kabupaten Bandung sebanyak 3.717.291 jiwa dan Kabupaten Bekasi sebanyak 3.630.907 jiwa. Daerah yang paling sedikit penduduknya adalah Kota Banjar yaitu 182.819 jiwa.

Hampir 72,5 persen penduduk Jawa Barat tinggal di daerah perkotaan sebagai akibat masuknya industri yang mendorong urbanisasi. Daerah penyangga ibukota seperti Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi menyumbang hampir sepertiga (31,64 persen) dari total penduduk Jawa Barat.

Tabel 2.14
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

No	Kabupaten/ Kota	Luas wilayah (Km ²)		Penduduk (orang)		Kepadatan Penduduk (orang/km ²)
		Km ²	% Terhadap Luas Jabar	Jumlah	% Terhadap Penduduk Total Jabar	
1	Bogor	2.710,62	7,66	5.715.009	11.90	2.108
2	Sukabumi	4.145,70	11,72	2.453.498	5.11	592



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No	Kabupaten/ Kota	Luas wilayah (Km ²)		Penduduk (orang)		Kepadatan Penduduk (orang/km ²)
		Km ²	% Terhadap Luas Jabar	Jumlah	% Terhadap Penduduk Total Jabar	
3	Cianjur	3.840,16	10,85	2.256.589	4,70	588
4	Bandung	1.767,96	5,00	3.657.601	7,61	2.069
5	Garut	3.074,07	8,69	2.588.839	5,39	842
6	Tasikmalaya	2.551,19	7,21	1.747.318	3,64	685
7	Ciamis	1.414,71	4,00	1.181.981	2,46	835
8	Kuningan	1.110,56	3,14	1.068.201	2,22	962
9	Cirebon	984,52	2,78	2.159.577	4,50	2.194
10	Majalengka	1.204,24	3,40	1.193.725	2,48	991
11	Sumedang	1.518,33	4,29	1.146.435	2,39	755
12	Indramayu	2.040,11	5,77	1.709.994	3,56	838
13	Subang	1.893,95	5,35	1.562.509	3,25	825
14	Purwakarta	825,74	2,33	943.337	1,96	1.142
15	Karawang	1.652,20	4,67	2.316.489	4,82	1.402
16	Bekasi	1,224,88	3,46	3.500.023	7,29	2.857
17	Bandung Barat	1.305,77	3,69	1.666.510	3,47	1.276
18	Pangandaran	1.010,00	2,85	395.098	0,82	391
19	Kota Bogor	118,50	0,33	1.081.009	2,25	9.122
20	Kota Sukabumi	48,25	0,14	323.788	0,67	6.711
21	Kota Bandung	167,67	0,47	2.497.938	5,20	14.898
22	Kota Cirebon	37,36	0,11	313.325	0,65	8.387
23	Kota Bekasi	206,61	0,58	2.859.630	5,95	13.841
24	Kota Depok	200,29	0,57	2.254.513	4,69	11.256
25	Kota Cimahi	39,27	0,11	601.099	1,25	15.307
26	Kota Tasikmalaya	171,61	0,49	661.404	1,38	3.854
27	Kota Banjar	113,49	0,32	182.388	0,38	1.607
	Jawa Barat	35.378	100	48.037.827	100	1.358

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2017

Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk di Tahun 2017, angka tertinggi berada di Kota Cimahi, 15.307 orang/km², dan terendah di Kabupaten Pangandaran, 391 orang/km². Apabila ditinjau berdasarkan kelompok umur, maka penduduk Jawa Barat Tahun 2017 paling banyak berumur 0-4 tahun yaitu 4.358.598 jiwa, diikuti dengan kelompok umur 5-9 tahun sebanyak 4.274.317 jiwa.



Tabel 2.15
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	2.226.442	2.132.158	4.358.598
5-9	2.192.224	2.032.093	4.274.317
10-14	2.119.125	2.013.614	4.132.739
15-19	2.111.754	2.023.528	4.135.282
20-24	2.074.023	2.017.139	4.091.162
25-29	1.988.219	1.939.736	3.927.955
30-34	1.916.923	1.882.233	3.799.156
35-39	1.889.188	1.871.292	3.760.480
40-44	1.796.103	1.741.669	3.537.772
45-49	1.600.513	1.535.165	3.135.678
50-54	1.331.342	1.287.924	2.619.266
55-59	1.067.165	1.035.235	2.102.400
60-64	802.703	762.705	1.565.408
65-69	534.343	537.177	1.071.520
70-75	341.322	332.281	723.603
75+	343.942	458.549	802.491
Jumlah	24.355.331	23.702.496	48.037.827

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

Selain data kependudukan yang bersumber dari BPS, disajikan pula data yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 sebesar 45.161.325 jiwa. Rata-rata pertumbuhan penduduk periode 2013 sampai dengan 2018 sebesar 1,078 persen. Laju pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan selama periode tersebut, walaupun pada Tahun 2014 sempat mengalami penurunan.

Tabel 2.16
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018

Tahun	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
2013	21.626.912	20.596.572	42.223.484	1,07
2014	21.788.900	20.641.524	42.430.424	0,49
2015	21.976.271	21.219.417	43.195.688	1,14
2016	22.275.690	21.464.469	43.740.159	1,18
2017	22.590.755	21.771.384	44.362.139	1,24
2018	22.915.986	22.245.339	45.161.325	1,35

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, 2018



Jumlah penduduk terbanyak berada di Kabupaten Bogor yaitu sebesar 4.585.812 jiwa atau 10,15 persen dari seluruh penduduk Jawa Barat. Daerah yang memiliki penduduk paling sedikit adalah Kota Banjar yaitu 204.100 jiwa. Demikian juga daerah dengan jumlah kepala keluarga paling sedikit adalah Kota Banjar yaitu 69.364 jiwa atau 0,45 persen. Sementara itu, jumlah kepala keluarga terbanyak berada di Kabupaten Bogor yaitu 1.449.966 jiwa atau 10,15 persen dari seluruh KK se-Jawa Barat.

Tabel 2.17
Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Berdasarkan Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

No	Kabupaten/ Kota	Laki-Laki (jiwa)		Perempuan (jiwa)		Jumlah (jiwa)		Jumlah Kepala Keluarga
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Bogor	2.353.185	5,21	2.232.627	4,94	4.585.812	10,15	1.449.966
2	Sukabumi	1.299.202	2,88	1.252.894	2,77	2.552.096	5,65	818.765
3	Cianjur	1.170.452	2,59	1.092.749	2,42	2.263.201	5,01	736.531
4	Bandung	1.803.113	3,99	1.732.879	3,84	3.535.992	7,83	1.050.755
5	Garut	1.139.923	2,52	1.095.547	2,43	2.235.470	4,95	682.851
6	Tasikmalaya	895.310	1,98	867.312	1,92	1.762.622	3,90	597.376
7	Ciamis	621.963	1,38	618.322	1,37	1.240.285	2,75	416.924
8	Kuningan	582.419	1,29	565.097	1,25	1.147.516	2,54	364.259
9	Cirebon	1.095.984	2,43	1.066.592	2,36	2.162.576	4,79	703.358
10	Majalengka	645.435	1,43	633.318	1,40	1.278.753	2,83	431.581
11	Sumedang	579.337	1,28	568.861	1,26	1.148.198	2,54	376.859
12	Indramayu	933.453	2,07	922.005	2,04	1.855.458	4,11	585.586
13	Subang	786.301	1,74	776.805	1,72	1.563.106	3,46	520.893
14	Purwakarta	473.558	1,05	462.656	1,02	936.214	2,07	306.758
15	Karawang	1.149.127	2,54	1.122.833	2,49	2.271.960	5,03	756.831
16	Bekasi	1.336.713	2,96	1.303.857	2,89	2.640.570	5,85	821.566
17	Bandung Barat	841.125	1,86	808.686	1,79	1.649.811	3,65	512.239
18	Pangandaran	210.115	0,47	210.397	0,47	420.512	0,93	147.482
19	Kota Bogor	521.710	1,16	507.374	1,12	1.029.084	2,28	313.637
20	Kota Sukabumi	173.376	0,38	171.421	0,38	344.797	0,76	105.927
21	Kota Bandung	1.233.357	2,73	1.218.822	2,70	2.452.179	5,43	747.926
22	Kota Cirebon	169.139	0,37	168.447	0,37	337.586	0,75	102.668
23	Kota Bekasi	1.230.001	2,72	1.206.576	2,67	2.436.577	5,40	691.600
24	Kota Depok	930.827	2,06	914.105	2,02	1.844.932	4,09	539.132
25	Kota Cimahi	276.275	0,61	272.098	0,60	548.373	1,21	166.043



No	Kabupaten/ Kota	Laki-Laki (jiwa)		Perempuan (jiwa)		Jumlah (jiwa)		Jumlah Kepala Keluarga
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
26	Kota Tasikmalaya	362.388	0,80	351.157	0,78	713.545	1,58	221.241
27	Kota Banjar	102.198	0,23	101.902	0,23	204.100	0,45	69.364
	Jawa Barat	22.915.986	50,74	22.245.339	49,26	45.161.325	100,00	14.238.118

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, 2018

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Pertumbuhan PDRB

Berdasarkan indikator pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung dengan dua pendekatan harga yaitu harga berlaku dan harga konstan yang semakin meningkat. Dinamika perekonomian Jawa Barat secara agregat yang tercermin dalam pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan distribusinya dapat diungkap dari sisi penawaran (lapangan usaha) dan permintaan (penggunaan). Berdasarkan perhitungan metode baru, sisi penawaran mencakup 17 lapangan usaha.

Perekonomian Jawa Barat Tahun 2018 yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 1.962,23 triliun. Dengan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat Tahun 2018 sebesar 5,64 persen, berarti lebih besar dibanding Tahun 2017 yaitu 5,35 persen.



Tabel 2.18
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2018 (juta rupiah)

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016	2017	2018
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	92.390.134,87	92.653.584,24	92.802.798,97	98.181.660,71	152.939.425,87	170.185.209,93
B	Pertambangan dan Penggalian	26.872.467,19	27.291.421,36	27.403.820,15	27.138.684,60	25.481.689,61	26.616.596,04
C	Industri Pengolahan	477.714.072,28	502.433.623,07	524.466.677,04	549.471.383,78	755.387.255,99	827.301.679,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.025.231,98	6.373.286,03	5.939.653,36	6.139.545,25	10.855.233,28	10.924.693,90
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	845.969,55	896.263,79	948.977,84	1.009.018,45	1.588.061,37	1.789.856,46
F	Konstruksi	87.818.637,11	92.603.491,63	98.555.254,72	103.507.069,45	147.554.690,72	165.605.993,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	177.747.518,19	183.634.922,83	190.440.113,16	198.887.074,01	269.730.854,31	291.738.348,11
H	Transportasi dan Pergudangan	47.965.848,58	51.579.514,10	56.171.095,98	61.135.337,70	103.491.482,19	111.616.094,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	25.985.297,74	27.545.028,81	29.776.546,22	32.549.519,57	48.395.131,81	54.641.271,37
J	Informasi dan Komunikasi	30.651.836,81	36.005.412,36	41.878.751,58	47.856.799,53	51.845.066,83	56.270.696,47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	26.347.771,86	27.497.251,44	29.521.633,81	33.030.521,52	50.121.391,69	54.705.401,09
L	Real Estate	12.561.546,45	13.121.319,37	13.837.689,48	14.738.072,12	18.659.369,94	20.756.473,80
M,N	Jasa Perusahaan	4.265.893,31	4.561.081,01	4.932.613,38	5.334.980,44	7.339.111,19	8.296.692,82
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	23.568.018,37	23.676.877,00	24.987.382,17	25.731.416,57	43.308.875,08	46.473.376,96
P	Jasa Pendidikan	25.715.274,28	29.424.905,69	32.418.865,50	34.885.810,90	51.393.975,37	59.535.857,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.720.170,33	7.780.534,33	8.880.758,33	9.723.042,98	13.472.969,02	14.881.501,78
R,S,T,U	Jasa lainnya	20.347.856,97	22.137.539,99	24.120.774,04	26.226.539,58	36.816.024,21	40.891.837,49
PDRB		1.093.543.545,87	1.149.216.057,05	1.207.083.405,73	1.275.546.477,15	1.342.953.376,17	1.788.380.608,47

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2019



Perekonomian Jawa Barat Tahun 2018 tumbuh sebesar 5,64 persen. Pertumbuhan didukung oleh hampir semua lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalian yang mengalami penurunan sebesar minus 4,11 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Real Estate sebesar 9,64 persen, diikuti oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 9,14 persen dan Jasa Perusahaan sebesar 8,64 persen.

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Real Estate sebesar 9,64 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non profit rumah tangga (LNPRT) sebesar 16,38 persen.

Tabel 2.19
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2013-2018 (persen)

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016	2017	2018
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,50	0,29	0,16	5,80	1,60	2,11
B	Pertambangan dan Penggalian	(1,25)	1,56	0,41	(0,97)	(2,02)	(4,11)
C	Industri Pengolahan	7,19	5,17	4,39	4,77	5,35	6,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,15	5,78	(6,80)	3,37	(11,42)	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,50	5,95	5,88	6,33	7,13	4,96
F	Konstruksi	8,15	5,45	6,43	5,02	7,24	7,48
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,21	3,31	3,71	4,41	4,55	4,19
H	Transportasi dan Pergudangan	4,91	7,53	9,19	8,84	4,83	5,36
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,75	6,00	8,10	9,31	8,37	8,15
J	Informasi dan Komunikasi	9,10	17,47	16,31	14,27	11,85	9,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	12,42	4,36	7,36	11,89	3,48	4,53
L	Real Estate	5,41	4,46	5,46	6,51	9,31	9,64
M,N	Jasa Perusahaan	7,79	6,92	8,15	8,16	8,42	8,64
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(1,39)	0,46	5,53	2,98	4,64	1,59
P	Jasa Pendidikan	8,93	14,43	10,17	7,61	8,67	5,71
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,61	15,78	14,14	9,48	8,38	7,90
R,S, T,U	Jasa lainnya	7,88	8,80	8,96	8,73	9,78	6,69
PDRB		6,33	5,09	5,04	5,67	5,35	5,64

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

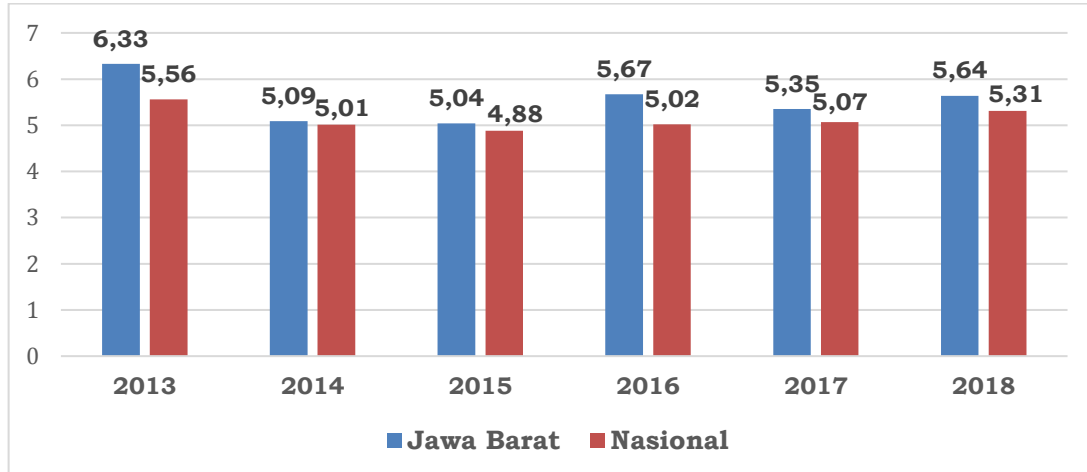


Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2018, Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,80 persen; diikuti Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,65 persen; dan Konstruksi sebesar 0,62 persen.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat selama periode 2013-2018 selalu lebih tinggi dari LPE Nasional. Pola pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Barat hampir mirip sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah. LPE Jawa Barat pada Tahun 2014 dan 2015 sempat mengalami pelambatan, namun pada tahun-tahun berikutnya kembali meningkat. Posisi Tahun 2017 dan 2018 menunjukkan LPE Jawa Barat lebih tinggi dari nasional yaitu masing-masing sebesar 5,35 dan 5,64 persen sementara LPE nasional masing-masing 5,07 persen dan 5,31 persen.

Pada Tahun 2013, LPE Jawa Barat berada di peringkat 15 tertinggi dari 33 provinsi se-Indonesia. Posisi ini mengalami penurunan 5 (lima) tahun kemudian, yaitu menjadi urutan 18 dari 34 provinsi pada Tahun 2018.

Gambar 2.22
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2013-2018



Sumber: BPS Indonesia Tahun 2019

Nilai PDRB Jawa Barat atas dasar harga berlaku dari tahun 2013-2018 selalu mengalami kecenderungan peningkatan. PDRB atas dasar harga berlaku pada Tahun 2017 mencapai 1.788,38 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 2,29 triliun rupiah dibandingkan Tahun 2017 yang mencapai 1.786,09 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.



Tabel 2.20
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2018 (juta rupiah)

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016	2017	2018
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	114.042.321,72	120.787.231,51	132.497.853,52	146.816.710,32	152.939.425,87	170.185.209,93
B	Pertambangan dan Penggalian	34.829.948,32	33.622.738,03	26.025.115,03	25.347.017,32	25.481.689,61	26.616.596,04
C	Industri Pengolahan	544.183.777,95	604.759.573,10	656.824.387,90	703.516.391,60	755.387.255,99	827.301.679,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8.783.322,22	11.008.528,47	11.437.568,85	11.920.087,37	10.855.233,28	10.924.693,90
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	955.503,33	1.019.667,62	1.160.269,63	1.343.138,14	1.588.061,37	1.789.856,46
F	Konstruksi	99.103.612,36	112.073.459,77	125.923.144,03	134.113.402,00	147.554.690,72	165.605.993,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	199.720.305,33	211.469.531,52	231.322.870,97	249.218.104,90	269.730.854,31	291.738.348,11
H	Transportasi dan Pergudangan	56.700.883,10	66.392.631,77	84.070.880,00	94.845.276,90	103.491.482,19	111.616.094,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	30.027.380,08	33.722.152,82	38.098.816,06	43.014.049,80	48.395.131,81	54.641.271,37
J	Informasi dan Komunikasi	30.268.188,40	34.152.993,35	39.711.997,08	45.461.350,23	51.845.066,83	56.270.696,47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	32.408.455,16	35.512.837,54	39.881.237,40	46.100.572,30	50.121.391,69	54.705.401,09
L	Real Estate	13.739.946,85	14.438.750,06	15.578.023,58	16.813.545,79	18.659.369,94	20.756.473,80
M,N	Jasa Perusahaan	4.873.091,87	5.438.669,01	6.076.874,35	6.645.607,08	7.339.111,19	8.296.692,82
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	30.242.182,04	32.191.980,00	36.673.940,87	38.653.630,72	43.308.875,08	46.473.376,96
P	Jasa Pendidikan	29.595.982,53	35.314.726,19	40.563.279,30	44.676.514,82	51.393.975,37	59.535.857,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.194.042,84	8.700.874,00	10.614.557,10	12.064.601,20	13.472.969,02	14.881.501,78
R,S,T,U	Jasa lainnya	22.320.384,69	25.218.731,73	28.278.904,59	32.207.818,33	36.816.024,21	40.891.837,49
PDRB		1.258.989.328,78	1.385.825.076,49	1.524.974.827,42	1.652.757.818,75	1.786.092.377,04	1.788.380.608,47

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2019



Laju pertumbuhan ekonomi di 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2013-2017 menunjukkan pencapaian yang variatif. Tahun 2017 terdapat 9 (sembilan) kabupaten/kota yang memiliki LPE lebih rendah dari LPE Provinsi Jawa Barat, yaitu: (1) Kabupaten Sukabumi, (2) Kabupaten Garut, (3) Kabupaten Ciamis, (4) Kabupaten Cirebon, (5) Kabupaten Indramayu, (6) Kabupaten Subang, (7) Kabupaten Purwakarta, (8) Kabupaten Pangandaran, dan (9) Kota Banjar.

Tabel 2.21
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017 (persen)

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi				
		2013	2014	2015	2016*)	2017**)
1	Kab Bogor	6,14	6,01	6,09	6,10	5,96
2	Kab Sukabumi	5,51	5,98	4,91	5,56	5,14
3	Kab Cianjur	4,89	5,06	5,45	6,43	5,72
4	Kab Bandung	5,92	5,91	5,89	6,34	6,17
5	Kab Garut	4,76	4,82	4,51	5,90	4,89
6	Kab Tasikmalaya	4,65	4,78	4,31	5,91	5,95
7	Kab Ciamis	5,34	5,07	5,59	5,99	5,21
8	Kab Kuningan	6,25	6,33	6,38	6,09	6,36
9	Kab Cirebon	4,96	5,07	4,88	5,63	5,05
10	Kab Majalengka	4,93	4,91	5,33	6,03	6,81
11	Kab Sumedang	4,84	4,71	5,25	5,70	6,23
12	Kab Indramayu	2,86	4,93	2,16	0,08	1,45
13	Kab Subang	4,09	5,02	5,29	5,40	5,10
14	Kab Purwakarta	7,15	5,73	4,77	5,99	5,12
15	Kab Karawang	7,96	5,37	4,50	6,29	5,76
16	Kab Bekasi	6,23	5,88	4,47	4,99	5,78
17	Kab Bandung Barat	5,94	5,71	5,01	5,64	5,69
18	Kab Pangandaran	4,95	4,19	4,98	5,29	5,10
19	Kota Bogor	6,04	6,01	6,14	6,73	6,12
20	Kota Sukabumi	5,41	5,43	5,14	5,64	5,43
21	Kota Bandung	7,84	7,71	7,64	7,79	7,21
22	Kota Cirebon	4,90	5,71	5,81	5,98	5,79
23	Kota Bekasi	6,04	5,61	5,56	6,09	5,73
24	Kota Depok	6,85	7,28	6,64	7,28	6,65
25	Kota Cimahi	5,65	5,49	5,43	5,49	5,43
26	Kota Tasikmalaya	6,17	6,16	6,30	6,91	6,07
27	Kota Banjar	5,45	4,97	5,32	5,86	5,12
Provinsi Jawa Barat		6,33	5,09	5,04	5,67	5,29

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

Keterangan: * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara



Struktur perekonomian Jawa Barat menurut lapangan usaha pada Tahun 2018 didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha utama yaitu: Industri Pengolahan sebesar 42,16 persen; Perdagangan Besar Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 14,87 persen; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 8,67 persen. Dengan demikian, ketiga lapangan usaha tersebut menjadi sandaran utama PDRB Jawa Barat. Jika dirasiokan, nilai kontribusi tersebut menunjukkan struktur ekonomi Jawa Barat yakni perekonomian yang bercirikan industri.

Tabel 2.22
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2018 (persen)

	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017	2018
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,06	8,72	8,69	8,90	8,55	8,67
B	Pertambangan dan Penggalian	2,77	2,43	1,71	1,53	1,42	1,36
C	Industri Pengolahan	43,22	43,64	43,03	42,49	42,24	42,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,70	0,79	0,75	0,72	0,61	0,56
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09
F	Konstruksi	7,87	8,09	8,26	8,12	8,25	8,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,86	15,26	15,24	15,15	15,08	14,87
H	Transportasi dan Pergudangan	4,50	4,79	5,50	5,72	5,79	5,69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,39	2,43	2,50	2,60	2,71	2,78
J	Informasi dan Komunikasi	2,40	2,46	2,60	2,75	2,90	2,87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,57	2,56	2,61	2,79	2,80	2,79
L	Real Estate	1,09	1,04	1,02	1,02	1,04	1,06
M,N	Jasa Perusahaan	0,39	0,39	0,40	0,40	0,41	0,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,40	2,32	2,41	2,34	2,42	2,37
P	Jasa Pendidikan	2,35	2,55	2,66	2,70	2,87	3,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,57	0,63	0,70	0,73	0,75	0,76
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,77	1,82	1,85	1,95	2,06	2,08
	PDRB	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

2.2.2. Laju Inflasi

Laju Inflasi dan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Jawa Barat dipantau oleh BPS di 7 (tujuh) kabupaten/kota yaitu Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi dan Kota Depok.



Angka inflasi di Jawa Barat pada Tahun 2013 tercatat cukup tinggi yaitu 9,15 persen akibat adanya kenaikan harga BBM yang diikuti oleh kenaikan tarif dasar listrik dan harga-harga kebutuhan bahan pokok lainnya yang mendorong inflasi menjadi 9,15 persen. Angka inflasi ini dari tahun ke tahun makin terkendali. Hal ini ditunjukkan dengan nilai inflasi Jawa Barat pada tahun 2018 sebesar 3,54 persen, atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3,63 persen. Walau mengalami penurunan dari Tahun 2017, inflasi Provinsi Jawa Barat masih berada diatas inflasi nasional (3,13 persen).

Tabel 2.23
Inflasi Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2013-2018

Uraian	Inflasi (%)					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Inflasi Jawa Barat	9,15	7,41	2,73	2,75	3,63	3,54
Inflasi Nasional	8,38	8,36	3,35	3,02	3,61	3,13

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2019

Secara umum dari ke 7 (tujuh) wilayah yang menjadi daerah pantauan inflasi di Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Bekasi rata-rata memiliki angka inflasi yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain, termasuk Jawa Barat. Sedangkan untuk Kota Sukabumi, Kota Cirebon dan Kota Tasikmalaya rata-rata tingkat inflasi berada dibawah Jawa Barat. Namun di Kota Bandung cukup berfluktuasi, pada Tahun 2013 justru kenaikan harga-harga dibawah rata-rata Jawa Barat, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya selaku berada di atas Jawa Barat.

Berdasarkan data laju inflasi di 7 (tujuh) kota di Jawa Barat menurut kelompok pengeluaran pada Tahun 2016, terlihat bahwa pemicu kenaikan harga secara umum disumbang oleh kelompok pengeluaran bahan makanan atau *volatile food*. Pada Tahun 2015 dan 2016 kenaikan harga pada kelompok *volatile food* disebabkan oleh pergeseran musim panen sebagai dampak lanjutan dari El Nino di tahun 2015 serta curah hujan yang tinggi di awal tahun. Di Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kota Sukabumi, Kota Depok dan Kota Bogor inflasi dipicu oleh kenaikan harga pada kelompok bahan makanan, makanan jadi, minuman rokok dan tembakau serta pada kelompok pengeluaran kesehatan. Namun di Kota Bogor



kelompok pengeluaran kesehatan menduduki peringkat utama yang kemudian diikuti oleh kelompok pengeluaran bahan makanan.

Untuk mengendalikan laju inflasi tersebut, koordinasi dan intensitas komunikasi terus ditingkatkan oleh Bank Indonesia dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Barat melalui Forum Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sebagai upaya untuk menahan laju inflasi agar tetap terkendali. Pada tahun 2016, Tim Pengendali Inflasi Daerah Jawa Barat melalui tema program Proper Kahiji Utama fokus pada penguatan dan pemberdayaan petani melalui sinergi dengan pihak terkait serta mengaktifkan Sistem Resi Gudang sebagai upaya mengatasi permasalahan infrastruktur, logistik, serta kelembagaan pertanian.

2.2.3. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita sering menjadi acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi PDRB Per kapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sejak Tahun 2013 hingga Tahun 2018 senantiasa mengalami kenaikan. Pada Tahun 2013 PDRB per kapita ADHB tercatat sebesar 27,77 juta rupiah, secara nominal terus mengalami kenaikan hingga Tahun 2018 mencapai Rp. 40,31 juta. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Sementara itu, PDRB per kapita ADHK Tahun 2018 mencapai Rp. 29,16 juta.

Tabel 2.24
PDRB Perkapita ADHB dan ADHK
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (juta rupiah)

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PDRB Perkapita ADHB (Rp)	27,77	30,12	32,65	34,88	37,23	40,31
PDRB Perkapita ADHK (Rp)	24,12	24,97	25,84	26,92	27,98	29,16

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2019



Capaian PDRB Perkapita ADHB dan ADHK di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 yang masing-masing mencapai Rp 40,31 juta dan Rp 29,16 juta bila dibandingkan dengan target pada RPJMD Jawa Barat Tahun 2013-2018 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Target PDRB Perkapita ADHB sebesar Rp 28,00–30,00 juta tercapai bahkan melampaui target. Hal yang sama juga terjadi pada PDRB Perkapita ADHK yang ditargetkan Rp 15,00–17,00 juta, berhasil dilampaui.

Tabel 2.25
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017 (juta rupiah)

No	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
1	Bogor	26,12	28,38	30,79	33,04	35,24
2	Sukabumi	15,97	17,55	19,28	20,92	22,53
3	Cianjur	11,91	12,94	14,42	15,72	17,08
4	Bandung	19,93	22,01	24,28	26,29	28,26
5	Garut	13,46	14,68	15,96	17,30	18,54
6	Tasikmalaya	12,37	13,44	14,79	16,07	17,47
7	Ciamis	16,16	17,55	19,58	20,86	22,46
8	Kuningan	12,91	14,30	16,10	17,48	19,14
9	Cirebon	14,05	15,44	16,81	18,14	19,42
10	Majalengka	14,99	16,32	17,98	19,53	21,29
11	Sumedang	18,01	19,75	21,83	23,65	25,85
12	Indramayu	37,85	40,20	38,66	39,72	41,74
13	Subang	16,52	17,72	19,16	20,37	21,87
14	Purwakarta	45,22	49,99	54,41	58,51	62,04
15	Karawang	63,64	69,47	73,51	79,50	85,07
16	Bekasi	68,64	72,88	75,80	77,80	80,70
17	Bandung Barat	17,24	19,06	20,85	22,47	24,14
18	Pangandaran	17,32	18,74	20,92	22,11	23,79
19	Kota Bogor	25,75	28,28	30,88	33,25	35,62
20	Kota Sukabumi	23,44	25,84	28,18	30,27	32,60
21	Kota Bandung	61,74	69,89	78,91	87,07	96,12
22	Kota Cirebon	45,11	49,37	54,32	58,37	63,00
23	Kota Bekasi	22,45	24,26	26,10	27,59	29,14
24	Kota Depok	19,69	21,54	23,05	24,47	25,88
25	Kota Cimahi	32,20	35,52	38,61	41,35	44,14
26	Kota Tasikmalaya	18,87	20,81	23,17	25,40	27,70
27	Kota Banjar	15,36	16,68	18,36	19,84	21,43
	Total	27,77	30,12	32,65	34,88	37,23

Sumber: BPS kabupaten/kota seluruh Jawa Barat, 2018

Sementara itu, PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan kabupaten/kota pada Tahun 2013 sampai dengan 2017 secara umum juga mengalami peningkatan. Daerah yang memiliki PDRB Per Kapita ADHK diatas nilai provinsi sebanyak 7 daerah. Daerah dengan PDRB per kapita ADHK adalah Kota Bandung sebesar Rp.69,20 juta, disusul oleh Kabupaten



Bekasi sebesar Rp.65,35 juta dan Kabupaten Karawang sebesar Rp.64,27 juta. Daerah dengan nilai terendah adalah Kabupaten Tasikmalaya yaitu Rp.12,63 juta.

Tabel 2.26
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017 (juta rupiah)

No	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
1	Bogor	21,28	22,01	22,8	23,64	24,49
2	Sukabumi	13,92	14,67	15,31	16,09	16,89
3	Cianjur	10,28	10,76	11,30	11,99	12,64
4	Bandung	16,94	17,61	18,31	19,13	19,97
5	Garut	11,64	12,09	12,52	13,16	13,7
6	Tasikmalaya	10,46	10,9	11,33	11,95	12,63
7	Ciamis	13,87	14,49	15,21	16,03	16,77
8	Kuningan	11,17	11,81	12,48	13,16	13,92
9	Cirebon	11,96	12,47	12,98	13,6	14,18
10	Majalengka	12,83	13,39	14,04	14,81	15,74
11	Sumedang	15,28	15,91	16,66	17,54	18,56
12	Indramayu	31,60	32,97	33,50	33,34	33,64
13	Subang	14,32	14,87	15,49	16,16	16,80
14	Purwakarta	38,10	39,75	41,12	43,07	44,77
15	Karawang	54,06	56,33	58,26	61,32	64,27
16	Bekasi	62,03	63,14	63,45	64,13	65,35
17	Bandung Barat	14,44	15,08	15,64	16,33	17,00
18	Pangandaran	14,85	15,38	16,06	16,81	17,56
19	Kota Bogor	22,20	23,12	24,14	25,36	26,51
20	Kota Sukabumi	20,21	21,09	21,96	22,98	24,03
21	Kota Bandung	52,47	56,24	60,28	64,73	69,20
22	Kota Cirebon	39,32	41,17	43,15	45,29	47,48
23	Kota Bekasi	19,35	19,88	20,43	21,11	21,75
24	Kota Depok	16,72	17,31	17,82	18,47	19,05
25	Kota Cimahi	28,15	29,28	30,47	31,79	33,09
26	Kota Tasikmalaya	16,82	17,77	18,82	20,05	21,21
27	Kota Banjar	13,21	13,80	14,46	15,27	16,01
	Total	24,12	24,97	25,84	26,92	27,98

Sumber: BPS Kabupaten/Kota seluruh Jawa Barat, 2018

2.2.4. Indeks Gini

Selama periode 2013 sampai dengan 2018, indeks gini Provinsi Jawa Barat masuk kategori ketimpangan sedang karena berada pada kisaran 0,3 sampai 0,5. Pada tahun 2013, indeks gini Jawa Barat sebesar 0,40 mengalami sedikit peningkatan pada Tahun 2018 yaitu 0,405. Dengan kecenderungan meningkatnya indek gini ini dapat diartikan bahwa distribusi pendapatan penduduk Jawa Barat belum merata.



Tabel 2.27
Indeks Gini Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2013-2018

Uraian	Indeks Gini					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Provinsi Jawa Barat	0,40	0,40	0,43	0,40	0,39	0,405
Nasional	0,41	0,41	0,40	0,39	0,39	0,384

Sumber: BPS RI, 2019

Bila dibandingkan dengan nasional, indeks gini Provinsi Jawa Barat memiliki angka lebih tinggi. Indeks gini nasional pada Tahun 2018 sebesar 0,384. Bila dibandingkan dengan provinsi lain se-Indonesia, maka posisi indeks gini Jawa Barat Tahun 2018 berada pada posisi 32 dari 34 provinsi. Kondisi ini menunjukkan ketimpangan pendapatan di Jawa Barat cukup besar dibanding daerah lain dan membutuhkan berbagai kebijakan untuk mengejar pemerataan.

Data indeks gini kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017 menunjukkan angka yang fluktuatif. Indeks gini kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 yang lebih besar dari indeks gini Provinsi Jawa Barat sebesar 0,40 yaitu: (1) Kabupaten Bandung Barat, (2) Kota Bogor, (3) Kota Sukabumi, (4) Kota Bandung, (5) Kota Cirebon, dan (6) Kota Tasikmalaya.

2.2.5. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Selain Indeks Gini, untuk melihat distribusi pendapatan atau ketimpangan dapat menggunakan kriteria yang dikemukakan oleh Bank Dunia. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, pada tahun 2016 distribusi pendapatan penduduk Jawa Barat tergolong merata pada ketimpangan sedang ke arah rendah. Hal tersebut ditunjukkan bahwa rata-rata 40 persen penduduk berpendapatan rendah menikmati pendapatan sekitar 16 persen sampai 17,6 persen. Sedangkan menurut kriteria Bank Dunia, tingkat ketimpangan rendah jika mereka memperoleh di atas 17 persen dari pendapatan yang ada.

Namun perlu menjadi perhatian bahwa ketimpangan di Jawa Barat bergerak antara ketimpangan sedang dan rendah, dan menjadi sangat sensitif ketika terjadi inflasi yang tinggi dapat mendorong ke arah ketimpangan sedang. Rentannya kondisi tersebut juga diperkuat oleh kecenderungan kelompok 20 persen penduduk dengan penghasilan



tertinggi menikmati pendapatan yang relatif meningkat mendekati angka 50 persen. Pada kelompok penduduk berpengeluaran tinggi terjadi peningkatan persentase dari 47,71 persen di Tahun 2013 menjadi 44,75 persen pada Tahun 2014 dan pada Tahun 2015 kembali meningkat menjadi 48,96 persen. Namun pada Tahun 2016 dan 2017 menurun masing-masing menjadi 46,88 persen dan 46,15 persen.

2.2.6. Indeks Pembangunan Manusia

Posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat dalam Konstelasi Nasional mengalami kenaikan dari posisi 11 pada tahun 2013 menjadi posisi 10 pada tahun 2017. Adapun posisi IPM Jawa Barat se-pulau Jawa pada tahun 2017 berada pada posisi ke 4 (empat), dimana posisi pertama ditempati oleh Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, posisi kedua Daerah Istimewa Yogyakarta dan posisi ketiga ditempati oleh Provinsi Banten.

Upaya percepatan peningkatan IPM difokuskan kepada peningkatan pelayanan dasar baik pendidikan maupun kesehatan yang didukung oleh infrastruktur yang memadai serta mendorong perekonomian masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan wirausaha baru. Adapun perkembangan capaian IPM periode 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.28
Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2013-2017

Uraian	IPM				
	2013	2014	2015	2016	2017
Provinsi Jawa Barat	68,25	68,80	69,50	70,05	70,69
Nasional	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81

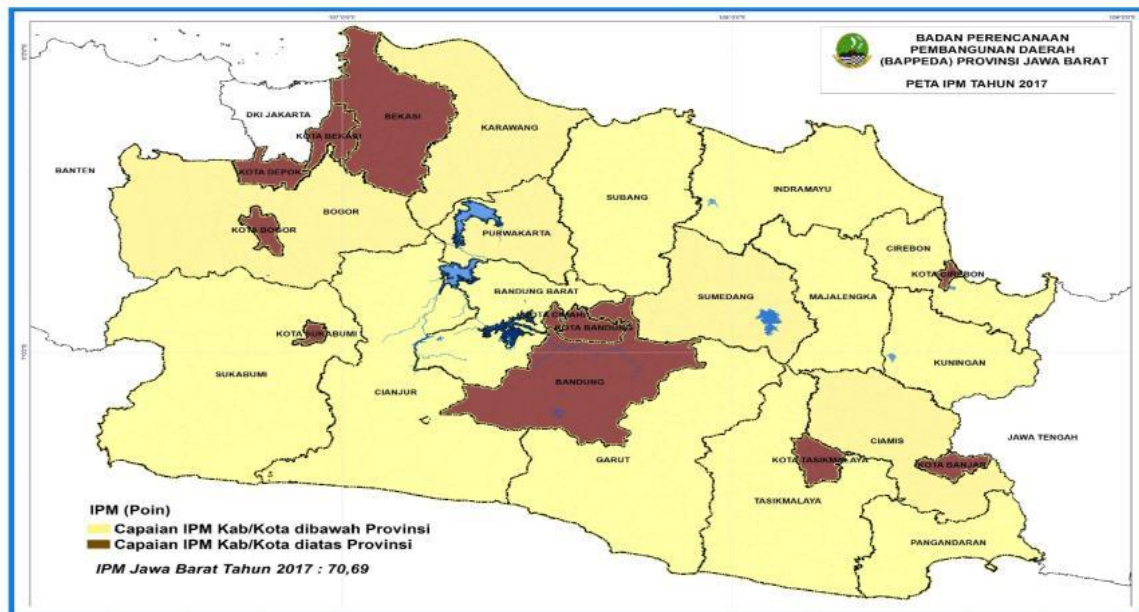
Sumber: BPS RI Tahun 2019

Sebaran IPM kabupaten/kota pada Tahun 2017 menunjukkan sebanyak 15 kabupaten/kota yang posisinya berada dibawah IPM Provinsi Jawa Barat. Dimana IPM terendah berada di kabupaten Cianjur sebesar 63,70 poin. Adapun posisi pencapaian IPM 80 baru dicapai oleh Kota Bandung (80,31 poin) dan Kota Bekasi (80,30 poin). Upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendorong peningkatan IPM di kabupaten/kota difokuskan kepada pembangunan infrastruktur, sarana prasarana dan



akses pendidikan, peningkatan layanan kesehatan dan penyediaan lapangan kerja.

Gambar 2.23
Distribusi IPM Kabupaten/Kota Tahun 2017



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat diolah, 2018

2.2.7. Kemiskinan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun telah melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan, jumlah penduduk miskin pada Tahun 2013 mencapai 4.382.648 jiwa dan turun menjadi 3.539.400 jiwa pada bulan September Tahun 2018. Terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 9,61 persen pada Tahun 2013 menjadi 7,25 persen pada Tahun 2018. Artinya pada periode 2013 sampai dengan 2018, Pemerintah Jawa Barat berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 2,36 persen.

Tabel 2.29
Indikator Kemiskinan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

No	Indikator	Angka Kemiskinan (%)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	4.382.648	4.238.960	4.485.654	4.168.110	3.774.410	3.539.400
2	Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan)	276.825	291.474	318.602	324.119	354.679	371.376
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	9,61	9,18	9,57	8,77	7,83	7,25
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)	1,65	1,39	1,63	1,28	1,39	1,13
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)	0,44	0,33	0,43	0,28	0,35	0,27

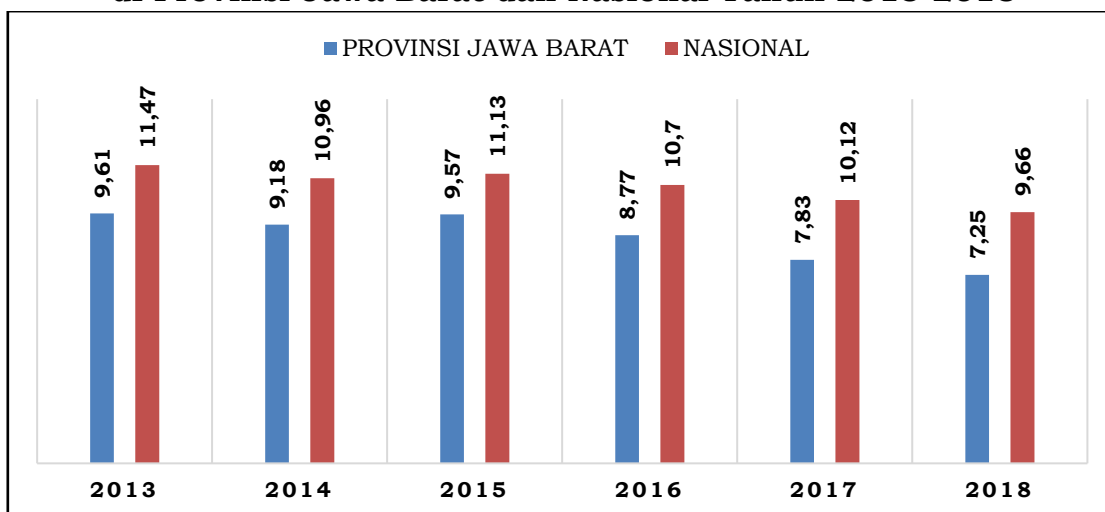
Sumber: BPS RI, 2019



Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar. Berdasarkan tabel di atas, indeks kedalaman kemiskinan tertinggi di Jawa Barat sebesar 1,65 persen pada Tahun 2013, dan terendah sebesar 1,13 persen di tahun 2018. Penurunan ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan.

Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Berdasarkan tabel di atas, Indeks Keparahan Kemiskinan tertinggi sebesar 0,44 persen di tahun 2013, dan terendah sebesar 0,33 persen di tahun 2014. Kondisi keparahan kemiskinan di Jawa Barat sebesar 0,27 persen pada Tahun 2018 yang berarti turun dari tahun sebelumnya, memiliki makna bahwa sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin di Jawa Barat semakin rendah.

Gambar 2.24
Persentase Penduduk Miskin
di Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2013-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2019

Dari Gambar 2.24 dapat dilihat bahwa periode 2013-2018 terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Barat. Walaupun kondisi tersebut juga menunjukkan terjadi perlambatan penurunan kemiskinan di Jawa Barat dari target yang telah ditetapkan akibat dari kondisi makro ekonomi nasional. Informasi lain yang diperoleh dari gambar tersebut, yaitu



persentase penduduk miskin Jawa Barat lebih rendah dibanding nasional yang sebesar 9,66 persen.

Bila dibandingkan dengan provinsi se-Indonesia, posisi persentase penduduk miskin Jawa Barat pada Tahun 2013 berada di urutan 15 dari 33 provinsi. Kondisi ini cenderung membaik pada tahun-tahun berikutnya, yang ditunjukkan dengan persentase penduduk miskin Jawa Barat Tahun 2018 pada posisi 13 dari 34 provinsi.

Data Tahun 2017 menunjukkan bahwa hampir sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Barat memiliki persentase penduduk lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat. Hanya sebanyak 8 (delapan) kabupaten dan kota yang memiliki persentase penduduk miskin dibawah Provinsi Jawa Barat, yaitu: (1) Kabupaten Bandung, (2) Kabupaten Bekasi, (3) Kota Bogor, (4) Kota Bandung, (5) Kota Bekasi, (6) Kota Depok, (7) Kota Cimahi, dan (8) Kota Banjar.

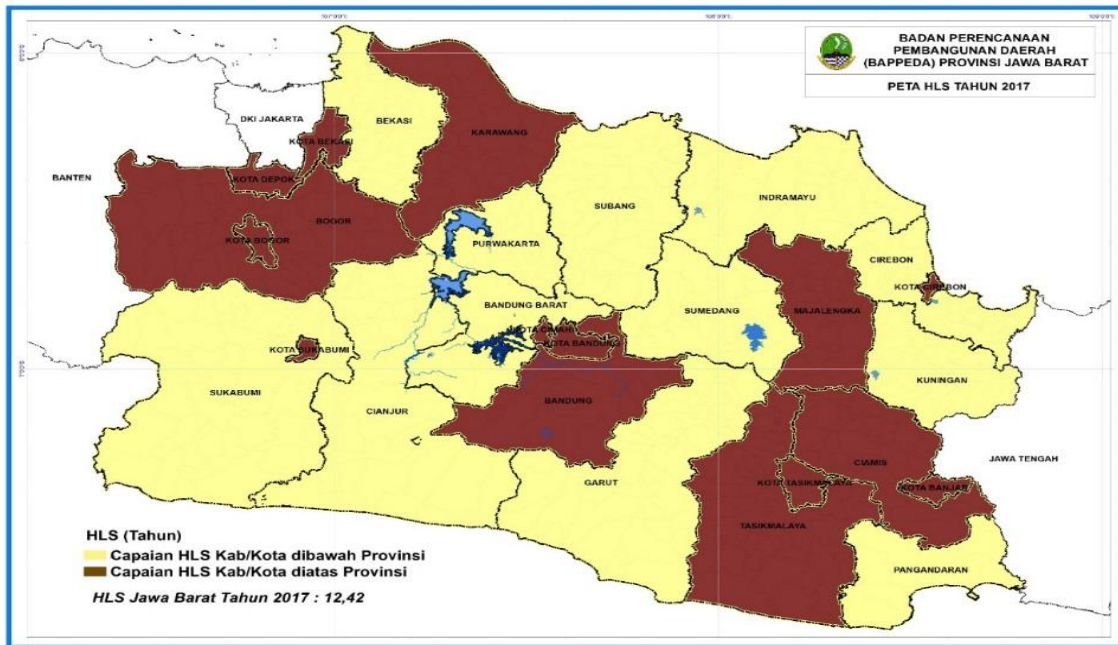
Upaya penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Jawa Barat, yang secara simultan dilaksanakan dalam rangka mencapai target Indikator Kinerja Daerah khususnya indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat yang mencakup upaya dalam bidang ekonomi non pertanian, ekonomi pertanian, pendidikan, kesehatan, dan program keluarga berencana, serta prasarana pendukungnya.

2.2.8. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) Jawa Barat menempati peringkat ke 31 dari 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2017 atau mencapai sebesar 12,35 Tahun. Capaian HLS Jawa Barat berada dibawah capaian Nasional sebesar 12,72 tahun yang berarti anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1. Angka HLS tertinggi dicapai oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 15,42 Tahun dan terendah yaitu Provinsi Papua dengan 10,54 Tahun.

Angka Harapan Lama Sekolah di Jawa Barat pada Tahun 2017 mencapai 12,42 tahun atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (12,30 tahun). Hal ini berarti bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada Tahun 2017 di Jawa Barat memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,42 tahun atau setara dengan Diploma I.

Gambar 2.25
Distribusi Harapan Lama Sekolah di Kabupaten/Kota Tahun 2017



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat diolah, 2018

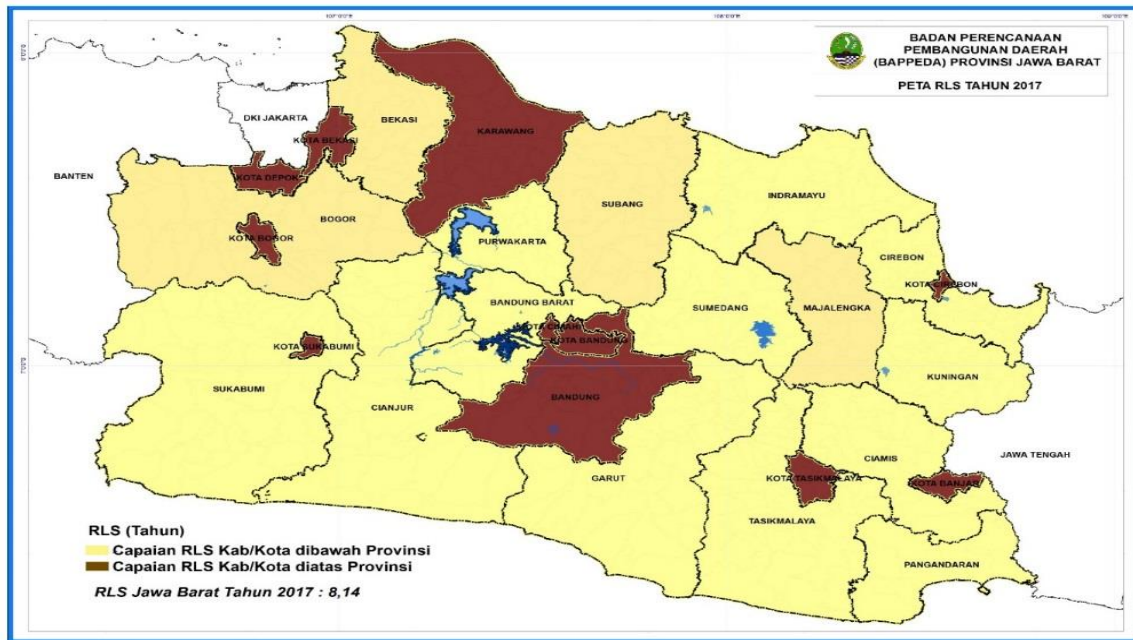
Harapan Lama Sekolah (HLS) di kabupaten/kota Tahun 2017 menunjukkan perkembangan yang cukup baik, hal ini terlihat dari capaian 15 (lima belas) kabupaten/kota yang berada diatas capaian HLS provinsi. Tiga kabupaten/kota dengan HLS tertinggi yaitu Kota Bandung (13,90 tahun), Kota Depok (13,87 tahun) dan Kota Cimahi (13,76 tahun). Sedangkan yang terendah yaitu Kabupaten Bandung Barat (11,79 tahun), Garut (11,73 tahun) dan Subang (11,67 tahun).

2.2.9. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Jawa Barat pada Tahun 2017 sebesar 8,14 tahun menempati peringkat ke 20 dari 34 provinsi di Indonesia. Angka RLS tertinggi dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta dengan 11,02 tahun dan terendah yaitu Provinsi Papua dengan 6,27 tahun.

Bila dibandingkan dengan Rata-Rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Jawa Barat pada tahun sebelumnya, maka terjadi peningkatan 0,19 poin. Kondisi ini berarti bahwa rata-rata penduduk Jawa Barat pada Tahun 2017 baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 7 atau putus sekolah di kelas 8.

Gambar 2.26
Distribusi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2017



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat diolah, 2018

Pada tahun 2017 terdapat 10 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan capaian RLS diatas capaian provinsi. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Jawa Barat tumbuh 0,13 persen per tahun selama periode 2013 sampai dengan 2017. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Jawa Barat yang lebih baik.

Pada Tahun 2017, daerah yang memiliki Rata-Rata Lama Sekolah tertinggi adalah Kota Bekasi dan Kota Cimahi, masing-masing sebesar 10,93 tahun. Angka ini diatas Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Barat yang mencapai 8,14 tahun.

Daerah yang masih perlu mendapatkan perhatian khusus terkait Rata-Rata Lama Sekolah yaitu Kabupaten Sukabumi 6,79 tahun, Kab Kabupaten Cianjur 6,92 tahun, Kabupaten Cirebon 6,61 tahun, Kabupaten Majalengka 6,90 tahun, dan Kabupaten Indramayu 5,97 tahun. Daerah-daerah tersebut masih memiliki Rata-Rata Lama Sekolah dibawah 7 tahun.

2.2.10. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia



yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/ SMP/ SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa. Angka partisipasi kasar merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir menunjukkan nilai APK pada Tahun 2013 sampai 2017 mengalami fluktuasi untuk seluruh jenjang pendidikan. APK SD/MI tertinggi sebesar 109,42 di tahun 2015, terendah sebesar 106,75 di Tahun 2013. Sementara APK SMP/MTs tertinggi sebesar 90,07 di Tahun 2015, terendah sebesar 85,26 di Tahun 2013. Selanjutnya, APK SMA/MA/SMK tertinggi sebesar 76,48 di Tahun 2017, terendah sebesar 60,12 di Tahun 2013.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Tertinggi di Jawa Barat menurut kabupaten/kota yaitu Kota Sukabumi dengan 118,69 dan terendah berada di Kabupaten Cianjur 66,98.

Gambar 2.27
Distribusi Angka Partisipasi Kasar Kabupaten/Kota Tahun 2017



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat diolah, 2018

2.2.11. Angka Partisipasi Murni

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir menunjukkan nilai APM seluruh jenjang pendidikan selalu menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun. APM SD/MI sebesar 97,08 di Tahun 2013, terus meningkat



menjadi 98,06 di tahun 2017. APM SMP/MTs sebesar 76,76 di Tahun 2013, terus meningkat menjadi 80,29 di tahun 2017. APM SMA/MA/SMK sebesar 52,25 di tahun 2013, terus meningkat menjadi 57,22 di Tahun 2017.

Sejalan dengan APK, APM tertinggi di Jawa Barat menurut kabupaten/kota yaitu Kota Sukabumi sebesar 92,87%. Sedangkan daerah yang memiliki APM terendah adalah Kabupaten Cianjur 49,85%.

Gambar 2.28
Distribusi Angka Partisipasi Murni Kabupaten/Kota Tahun 2017



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat diolah, 2018

2.2.12. Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan terdiri dari variabel mortalitas, morbiditas, dan fertilitas. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa indeks kesehatan Jawa Barat mengalami peningkatan selama Tahun 2013-2017. Di Tahun 2013 indeks kesehatan sebesar 73,06 dan meningkat terus sampai Tahun 2017 menjadi 80,72. Tren positif ini menunjukkan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat Jawa Barat.

2.2.13. Angka Harapan Hidup

Membaiknya kondisi kesehatan masyarakat Jawa Barat telah diiringi dengan peningkatan Angka Harapan Hidup. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu Tahun 2013 sampai dengan 2017 semakin lama semakin meningkat hingga mencapai 72,47 tahun. Angka ini berarti bahwa

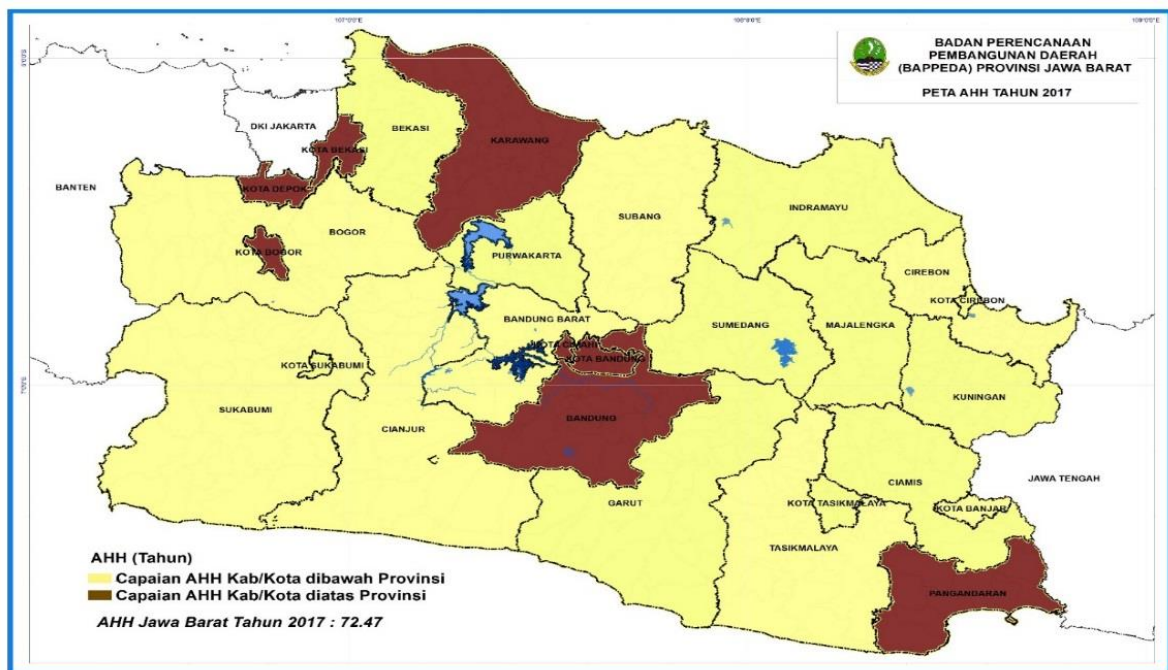


setiap bayi yang lahir pada Tahun 2017 memiliki harapan untuk hidup hingga usia mencapai 72,47 tahun. Peningkatan Angka Harapan Hidup di Jawa Barat ini sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain semakin baik akses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan disertai semakin baiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Angka Harapan Hidup Jawa Barat menempati peringkat ke 5 dari 34 Provinsi di Indonesia, dimana peringkat tertinggi dicapai oleh Provinsi DI Yogyakarta dengan 74,74 tahun dan terendah yaitu Provinsi Sulawesi Barat dengan 64,34 tahun. Sedangkan posisi Indonesia berada pada peringkat ke 8 dengan nilai 71,06 tahun dan berada dua peringkat dibawah Jawa Barat.

Berdasarkan distribusi AHH kabupaten/kota di Jawa barat, terdapat 8 (delapan) daerah yang capaiannya diatas provinsi. Tiga kabupaten/kota dengan AHH tertinggi yaitu Kota Bekasi (74,63), Kota Depok (74,04) dan Kota Bandung (73,86). Sedangkan yang terendah yaitu Cianjur (69,49), Majalengka (69,39), dan Tasikmalaya (68,71).

Gambar 2.29
Distribusi Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota Tahun 2017



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat diolah, 2018



2.2.14. Jumlah Kematian Bayi

Jumlah dan rasio kematian bayi di Jawa Barat dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 menunjukkan adanya penurunan jumlah dan rasio kematian bayi. Pada Tahun 2013, jumlah kematian bayi di Jawa Barat sebanyak 4.356 dengan rasio kematian sebesar 4,6 per 1000 kelahiran hidup dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Pada Tahun 2017 menurun menjadi jumlah kematian bayi sebanyak 3.243 dengan rasio 3.63 per 1000 kelahiran hidup. Adanya penurunan rasio kematian bayi disebabkan adanya upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu melahirkan.

2.2.15. Jumlah Kasus Kematian Ibu

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa jumlah dan rasio kematian ibu di Jawa Barat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan adanya penurunan yang fluktuatif. Pada tahun 2014 turun sampai 748 kematian namun pada tahun 2015 naik menjadi 825 kematian kemudian pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan menjadi 797 kematian ibu melahirkan dengan Rasio 86,97 kematian ibu per 100.0000 kelahiran hidup.

2.2.16. Gizi Masyarakat

Beberapa hal yang dapat menunjukkan masalah Gizi masyarakat di Jawa Barat antara lain ialah Persentase balita gizi buruk, yakni persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita, keadaan tubuh anak bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Gizi buruk adalah kondisi terparah dari kekurangan gizi menahun. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa balita gizi kurang mengalami fluktuatif pada tahun 2017 sebesar 15,1 persen balita kurus sebesar 7,8 persen dan balita stunting sebesar 29,2 persen.

2.2.17. Penyakit Menular dan Tidak Menular

Saat ini Jawa Barat dihadapkan pada masalah, terjadinya peningkatan penyakit menular, maupun penyakit tidak menular. Untuk penyakit menular prioritas ditujukan untuk dapat mengendalikan penyakit Tuberculosis (TB), HIV/AIDS, Filariasis, PD3I (Penyakit yang dapat dicegah dengan immunisasi), dan penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB). Penyakit menular yang



masuk kedalam standar pelayanan miniman kabupaten/kota adalah Tuberculosis (TB) dan HIV/AIDS. Kecenderungan jumlah penderita TB di Jawa Barat pada usia lebih dari 15 tahun terus meningkat.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa penderita TB pada Tahun 2014 sebanyak 254.829 jiwa menurun menjadi 22.693 jiwa pada Tahun 2017. Penderita HIV pada Tahun 2014 sebanyak 1.219 meningkat menjadi 4.222 jiwa. Adanya peningkatan jumlah penderita berkaitan dengan meningkatnya upaya penemuan dan pengobatan kasus HIV maupun TB. Penyakit berpotensi KLB yang harus diwaspadai antara lain penyakit DBD, Diare, Keracunan makanan, Campak, Difteri dan Rabies. Kecenderungan penyakit tidak menular juga terus meningkat dan menjadi penyebab tingginya angka kematian serta meningkatnya biaya perawatan yang menyebabkan beban berat pada BPJS dan Rumah Sakit. Beberapa penyakit tidak menular yang terus meningkat jumlah penderitanya antara lain penyakit hipertensi, diabetes mellitus, Cancer, ODGJ, PPOK dan Cardio vasculer (jantung).

Penyakit tidak menular yang menjadi standar pelayanan minimal adalah hipertensi, diabetes militus, dan kesehatan jiwa. Dalam 5 (lima) tahun terakhir permasalahan kesehatan jiwa cenderung meningkat dan memerlukan peningkatan upaya pelayanan kesehatan jiwa untuk mengatasinya.

Kondisi kesehatan lingkungan merupakan penyebab tidak langsung terhadap tingginya angka kesakitan penyakit menular maupun tidak menular. Pemeriksaan kualitas air minum/air bersih harus terus ditingkatkan, termasuk meningkatkan sarana prasarana sanitasi di dalam rumah tangga dan di fasilitas tempat tempat umum. Meningkatkan pemecuan kepada masyarakat untuk secara mandiri mengubah perilaku tidak melalukan buang air besar di tempat terbuka melalui kegiatan STBM dan kerjasama dengan lintas sektor untuk mencapai desa ODF, Kecamatan ODF, kabupaten ODF dan provinsi.

2.2.18. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

A. Layanan Primer

Puskesmas merupakan ujung tombak dalam mengatasi tantangan masalah kesehatan. Dengan demikian, keberadaan puskesmas menjadi sangat penting sehingga perlu dipastikan bahwa puskesmas memberikan



pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan standar. Untuk memenuhi pelayanan sesuai standar penyelenggaraan puskesmas yang bermutu, mudah di akses dan terjangkau oleh masyarakat, penyelenggaraan pelayanan puskesmas harus memenuhi standar input dan standar proses.

Penilaian puskesmas sesuai standar mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, aspek yang ditentukan sebagai standar yaitu: 1. Lokasi, 2. Bangunan, 3. Prasarana, 4. Peralatan, 5. Ketenagaan, 6. Perizinan dan registrasi, dan 7 Penyelenggaraan. Idealnya rasio puskesmas dengan jumlah penduduk yaitu 1 puskesmas: 30.000 penduduk.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk mengalami fluktuasi yang berakhir dengan kecenderungan menurun. Pada Tahun 2013 sebesar 57.466 dan menurun pada Tahun 2014 menjadi 10.318. Di Tahun 2016 meningkat kembali menjadi 45.123 dan menurun kembali di Tahun 2017 menjadi 44.782. Fluktuasi penurunan dan kenaikan masih menunjukkan angka belum ideal.

B. Layanan Rujukan

Ditinjau dari penyebaran rumah sakit di setiap kota dan kabupaten masih terdapat 9 (sembilan) kota dan 5 (lima) kabupaten dengan jumlah tempat tidur melebihi kapasitas yang dibutuhkan yaitu Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar. Tiga kota yaitu Kota Bogor, Kota Bandung dan Kota Bekasi walaupun mempunyai kelebihan kapasitas tempat tidur tetapi tetap mengalami kekurangan dalam hal pemenuhan kebutuhan rawat inap dikarenakan merupakan penyangga di wilayah sekitarnya. Kota Bogor menjadi penyangga Kabupaten Bogor. Kota Bandung menyangga Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Kota Bekasi menjadi penyangga Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang.

Sedangkan kabupaten/kota yang masih kekurangan tempat tidur dibanding dengan jumlah penduduk antara lain Kabupaten Bogor,



Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Subang. Untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dilaksanakan penilaian akreditasi rumah sakit. Di Jawa Barat terdapat beberapa rumah sakit rujukan regional yaitu Rumah Sakit Provinsi Al Ihsan, RSUD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD Karawang, RSUD Cibinong Kab Bogor, RSUD Syamsudin Kota Sukabumi, RSUD Soekardjo Kota Tasikmalaya, dan RSUD Cibabat Kota Cimahi.

2.2.19. Sumber Daya Kesehatan

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di puskesmas maupun di rumah sakit diperlukan jumlah tenaga medis yang cukup dan mempunyai kompetensi layak. Rasio dokter umum menurut WHO adalah 10 orang dokter umum untuk 10.000 penduduk. Jumlah tenaga dokter spesialis, sub spesialis dan tenaga spesialis penunjang medis (tenaga radiografis dan elektromedis) di rumah sakit masih kurang untuk beberapa wilayah kabupaten di Jawa Barat. Disamping itu, untuk tenaga dokter, tenaga kesehatan tertentu seperti tenaga apoteker, analis kesehatan, nutrisisionis, sanitarian, promkes, dan tenaga non kesehatan seperti tenaga akutansi di Puskesmas/FKTP dirasa masih kurang.

Ketersediaan farmasi pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh aksesibilitas dan ketersediaan obat dan vaksin. Untuk itu perlu manajemen pendistribusian obat dan vaksin yang lebih baik dan efisien. Pemerintah provinsi mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk pemanfaatan aplikasi *e-logistic* diharapkan mampu memantau ketersediaan obat dan vaksin secara *real time* dan memudahkan dalam pendistribusian.

2.2.20. Pembiayaan Kesehatan

Pembiayaan pembangunan kesehatan Jawa Barat bersumber dari APBN, APBD, dan APBD kabupaten/kota sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berdasarkan peraturan ini, pemerintah daerah (provinsi, dan kabupaten/kota) masing-masing dapat mengalokasikan minimal 10% dari APBD nya.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial guna



menjamin kepastian perlindungan dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Pemerintah pusat telah menerapkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai jalan untuk mencapai *Universal Health Coverage* (UHC), dengan menjamin seluruh warga Indonesia memperoleh JKN/KIS pada Tahun 2019.

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kepesertaan dan Pembiayaan Penerima Bantuan Iuran Daerah Provinsi Jawa Barat. Penerapannya dengan proporsi pembiayaan 40% oleh pemerintah provinsi dan 60% oleh pemerintah kabupaten/kota. Jumlah kepesertaan Tahun 2017 dari Januari sampai Desember adalah 23.701.732 jiwa dengan realisasi anggaran sebesar Rp545.242.656.175, dengan demikian 40% kewajiban Pemerintah Provinsi sebesar Rp215.426.725.670.

2.2.21. Pemberdayaan Kesehatan bidang kesehatan

Upaya promotif untuk meningkatkan derajat kesehatan adalah mengedukasi masyarakat melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang dilaksanakan antara lain dengan pemberdayaan masyarakat melalui Posyandu, Poskesdes dan Pospindu. Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Pelayanan kesehatan dasar yang diberikan di Posyandu yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular dengan imunisasi, penanggulangan diare dan gizi yang dilakukan melalui penimbangan balita. Sasaran penduduk posyandu adalah ibu hamil, ibu menyusui, pasangan usia subur, dan balita. Tempat pelaksanaan pelayanan program terpadu dilaksanakan di balai dusun, balai kelurahan, kantor RW.

Rasio Posyandu di Jawa Barat mencapai 1 : 80, dengan range 82 – 88. Rasio 1 : 80 artinya rata-rata setiap satu Posyandu melayani 80 orang



balita. Jumlah sasaran yang dilayani Posyandu tergantung pada proses musyawarah desanya, kondisi serta potensi wilayahnya termasuk jumlah penduduk dan jaraknya. Biasanya satu posyandu bisa melayani 50 -100 balita. Berarti rasio Posyandu terhadap penduduk saat ini di Jawa Barat sudah dalam kisaran 50-100.

2.2.22. Manajemen Regulasi dan Sistem Informasi Kesehatan

Perencanaan kesehatan di tingkat provinsi masih mengalami beberapa masalah diantaranya adalah masih kurangnya regulasi baik di tingkat pusat/kementerian maupun di tingkat provinsi untuk menjamin sinkronisasi atau keselarasan antara prioritas pusat, prioritas provinsi dan kabupaten/kota. Sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah sebagai turunan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait dengan kewenangan daerah provinsi dan kewenangan daerah kabupaten/kota di bidang kesehatan.

Ketersediaan data dan informasi belum cukup memadai dan mutakhir yang sangat dibutuhkan untuk masukan proses penyusunan perencanaan yang lebih baik sesuai kebutuhan agar tepat sasaran dan tepat waktu. Perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan diharapkan dapat lebih mudah dan efisien tepat waktu dengan menggunakan aplikasi pengelolaan data dan informasi yang handal.

2.2.23. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Berdasarkan data BPS, dari 35.353.191 jiwa penduduk usia kerja ini 22.391.003 jiwa adalah angkatan kerja (terdiri dari yang bekerja dan mencari kerja) dan 12.962.188 jiwa bukan angkatan kerja (terdiri dari mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya). Penduduk yang bekerja sejumlah 20.551.575 jiwa terdiri dari 13.531.806 jiwa laki-laki dan 7.019.769 jiwa perempuan.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa rasio penduduk yang bekerja di Jawa Barat mengalami fluktuasi yang berakhir dengan kecenderungan peningkatan. Pada tahun 2013 sebesar 91,54 persen, menurun pada tahun berikutnya menjadi 90,84 persen. Kondisi ini membaik kembali pada Tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 menjadi 91,78 persen.



2.2.24. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Untuk mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender digunakan beberapa indikator, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa Indeks Pembangunan Gender selama periode 2013 sampai 2017 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, dimana tahun 2013 berada di nilai 88,21 meningkat menjadi 89,18 pada Tahun 2017. Sedangkan untuk Indeks Pemberdayaan Gender selama Tahun 2013 sampai 2017, kecenderungan menunjukkan peningkatan dengan nilai 67,57 di Tahun 2013 menjadi 70,04 di Tahun 2017.

2.2.25. Keluarga Pra Sejahtera

Keberhasilan program Keluarga Berencana tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga atau organisasi masyarakat lainnya yang secara bersama-sama mensukseskan program dimaksud yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan tahapan atau tingkatan kesejahteraan keluarga, maka setiap keluarga dapat dikelompokkan kepada 5 (lima) tahapan keluarga yaitu: Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera Tahap I, Keluarga Sejahtera Tahap II, Keluarga Sejahtera Tahap III, dan Keluarga Sejahtera Tahap III plus.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa Keluarga Pra Sejahtera semakin menurun yaitu 1.114.337 pada Tahun 2017, dibandingkan dengan Tahun 2015 yang berjumlah 2.390.125. Di sisi lain, jumlah Keluarga Sejahtera I tahun 2017 sebanyak 6.442.293. Angka ini meningkat drastis bila dibandingkan Tahun 2015 yang berjumlah 3.570.220. Adapun jumlah Keluarga Sejahtera II di Tahun 2017 berjumlah 4.957.539, angka ini menurun drastis dari Tahun 2015 yang berjumlah



6.443.833. Kondisi ini menunjukkan Keluarga Sejahtera II mengalami penurunan menjadi Keluarga Sejahtera I.

2.2.26. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat yang beberapa tahun terakhir diganti menjadi Survey Kepuasan Masyarakat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 sebesar 75 persen dan mengalami peningkatan pada Tahun 2016 dan 2017, masing-masing 80,25 persen dan 87,5 persen. Ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah semakin meningkat.

2.2.27. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah setiap tahun menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa hasil opini BPK atas pengelolaan keuangan di Provinsi Jawa Barat pada kurun waktu 2013-2017 menunjukkan prestasi yang baik yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2.2.28. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan

Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa skor PPH Jawa Barat mengalami fluktuasi yang berakhir dengan kecenderungan peningkatan. Pada Tahun 2013 sebesar 74,90 dan menurun Tahun 2014 menjadi 74. Kondisi ini semakin membaik sampai dengan Tahun 2017



menjadi 84,30. Skor PPH ini menunjukkan tingkat keragaman konsumsi pangan di Jawa Barat yang semakin baik.

2.2.29. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Indikator yang digunakan untuk mengetahui urusan pilihan bidang pertanian salah satunya dengan melihat Kontribusi sektor pertanian dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu (satu tahun).

Kontribusi Pertanian terhadap PDRB di Provinsi Jawa Barat mencakup sub sektor Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian; Subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu; dan Subsektor Perikanan. Pada kurun waktu 2013 sampai dengan 2018, kontribusi sektor ini mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2013 persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 9,06 persen. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan mencapai 8,67 pada Tahun 2018. Kondisi ini terjadi seiring pertumbuhan sektor lain.

2.2.30. Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB

Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB terus mengalami peningkatan dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, dari 2,39 persen menjadi 2,78 persen. Kondisi ini menunjukkan sektor ini mengalami pertumbuhan dan di masa mendatang berpotensi memberikan kontribusi terhadap PDRB yang semakin besar.

2.2.31. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB

Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu dan hasil hutan lainnya. Kegiatan kehutanan juga mencakup jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.

Kurun waktu 2012 sampai dengan 2017, kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB cenderung menurun. Pada Tahun 2012



kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB sebesar 0,10 persen, dan Tahun 2017 turun menjadi 0,07 persen.

2.2.32. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB adalah jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertambangan dibagi dengan jumlah total PDRB dikalikan 100 persen. Seluruh jenis komoditi dalam kategori pertambangan mencakup pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam, serta pertambangan lainnya.

Pada Tahun 2013 kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Jawa Barat sebesar 2,77 persen dan terus menurun hingga mencapai 1,36 persen pada Tahun 2018. Terjadi penurunan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB, seiring berkembangnya sektor lain.

2.2.33. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Kegiatan sektor perdagangan meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan.

Statistik menunjukkan bahwa pada Tahun 2013 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar 15,86 persen dan cenderung mengalami pelambatan pada tahun-tahun berikutnya. Pada Tahun 2018, sektor perdagangan memberi kontribusi sebesar 14,87 persen. Angka ini sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berada pada 15,08 persen.

2.2.34. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Sektor industri merupakan sektor utama dalam perekonomian Indonesia yang memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Walau demikian, kondisi 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB kurun waktu 2013 sampai 2015 menunjukkan peningkatan yakni mencapai 43,03 persen pada tahun



2015. Namun sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar 42,16 persen.

Pada kategori industri pengolahan, industri yang memiliki peranan terbesar adalah industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik, kemudian diikuti oleh industri tekstil dan pakaian. Besarnya kontribusi sektor industri pengolahan tersebut menjadi pedang bermata dua bagi Jawa Barat. Di satu sisi industri pengolahan menjadi pendorong ekonomi Jawa Barat, di sisi lain kondisi tersebut membuat Jawa Barat bergantung pada industri pengolahan membuat Jawa Barat berisiko tinggi mengalami dampak besar jika terdapat gangguan finansial global yang mempengaruhi kinerja industri pengolahan.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan perkembangan kinerja yang dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.3.1. Layanan Urusan Wajib

Pelayanan urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar.

2.3.1.1. Pendidikan

a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan menggambarkan penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. Angka Partisipasi sekolah ini juga memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama pada usia muda.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir dapat dilihat per jenjang usia sekolah yaitu usia SD, usia SLTP, Usia SLTA, dan usia Perguruan Tinggi. Di Provinsi Jawa Barat angka partisipasi sekolah yang paling tinggi yaitu pada usia SD 7-12 tahun, dengan APS di atas 98 persen, artinya hampir semua penduduk usia sekolah SD atau yang berusia 7-12 tahun sedang mengenyam pendidikan di SD. Sedangkan angka partisipasi sekolah yang paling rendah di Provinsi Jawa Barat yaitu usia 19-24 tahun atau perguruan tinggi. Pada Tahun 2013, APS perguruan tinggi sebesar 17,34



persen dan terus mengalami peningkatan menjadi 19,40 di Tahun 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa dari tahun ke tahun jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan perguruan tinggi di Jawa Barat secara persentase mengalami peningkatan.

b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar dan Menengah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar dan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar dan menengah.

Semakin rendah rasio ketersediaan sekolah, semakin baik pelayanan pendidikan suatu daerah. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah murid diimbangi dengan peningkatan jumlah sekolah. Sebaliknya, semakin tinggi rasio ketersediaan sekolah semakin buruk pelayanan pendidikan suatu daerah, karena jumlah sekolah menjadi kurang serta tidak seimbang dengan jumlah murid yang ada.

c. Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar dan Menengah

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar/menengah dan sederajat terhadap jumlah murid pendidikan dasar/menengah dan sederajat, rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar serta untuk mengukur jumlah ideal murid per satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Berdasarkan data statistik, rasio guru terhadap murid sekolah dasar di wilayah Jawa Barat mengalami kecenderungan peningkatan, dengan kondisi Tahun 2017 yakni 1 (satu) banding 23, yang berarti 1 (satu) guru mengajar 23 murid. Sementara rasio guru terhadap murid sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas masing-masing 1 (satu) banding 21 dan 1 (satu) banding 20.

d. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.



Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, angka putus sekolah dasar (SD/MI) di Tahun 2013 sebesar 0,93 persen, dan pada Tahun 2017 turun menjadi 0,08 persen. Untuk tingkat pendidikan sekolah menengah pertama (SMP/MTs), kondisi angka putus sekolah Tahun 2013 sebesar 1,62 persen dan turun 0,52 persen pada Tahun 2017. Selanjutnya, di tingkat pendidikan sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA), kondisi angka putus sekolah Tahun 2013 sebesar 3,05 persen dan pada Tahun 2017 turun menjadi 0,74 persen.

e. Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan, angka kelulusan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, angka kelulusan sekolah dasar (SD/MI) di Tahun 2013 sebesar 99,89 persen dan capaian Tahun 2017 menjadi sebesar 99,61 persen. Untuk tingkat pendidikan sekolah menengah pertama (SMP/MTs), kondisi angka kelulusan Tahun 2013 sebesar 99,59 persen dan Tahun 2017 mencapai 99,87 persen. Berikutnya, kondisi angka kelulusan tingkat pendidikan sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA) pada Tahun 2013 sebesar 98,21 persen dan pada Tahun 2017 menjadi sebesar 98,92 persen.

f. Angka Melanjutkan Pendidikan

Angka melanjutkan pendidikan adalah persentase siswa yang melanjutkan pendidikan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka melanjutkan pendidikan dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, angka melanjutkan pendidikan jenjang sekolah dasar (SD/MI) di Tahun 2013 sebesar 76,66 persen dan capaian di tahun 2017 meningkat menjadi 79,86 persen. Untuk tingkat pendidikan sekolah menengah pertama (SMP/MTs), kondisi angka melanjutkan pendidikan Tahun 2013 sebesar 78,76 persen meningkat menjadi 103,81 persen pada Tahun 2017.



2.3.1.2. Kesehatan

Bidang kesehatan merupakan salah satu hal prioritas yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan dilakukan melalui peningkatan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan perorangan (kuratif dan rehabilitatif) dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan mutu layanan, pemerataan aksesibilitas layanan dan penjangkauan pelayanan kesehatan. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dilakukan dengan upaya promotif-preventif melalui program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), peningkatan kualitas lingkungan, *screening* faktor risiko penyakit tidak menular.

Ketersediaan fasilitas kesehatan yang mampu menjangkau semua elemen masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Di Provinsi Jawa Barat terdapat beragam fasilitas kesehatan yang tersedia, antara lain rumah sakit, puskesmas, poskesdes, posyandu, dan klinik/praktek dokter.

a. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Pelayanan kesehatan dasar yang diberikan di Posyandu yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular dengan imunisasi, penanggulangan diare dan gizi yang dilakukan melalui penimbangan balita.

Sasaran penduduk posyandu adalah ibu hamil, ibu menyusui, pasangan usia subur dan balita. Tempat pelaksanaan pelayanan program terpadu dilaksanakan di balai dusun, balai kelurahan, kantor, kantor RW.

Upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia dengan mengoptimalkan potensi tumbuh kembang anak dapat dilaksanakan secara merata, apabila sistem pelayanan kesehatan yang berbasis



masyarakat seperti Posyandu dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta dapat menjangkau semua sasaran

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa Rasio Posyandu di Jawa Barat mencapai 1 : 80, dengan range 82 – 88. Rasio 1 : 80 artinya rata rata setiap satu Posyandu melayani 80 orang balita.

b. Rasio Puskesmas dan Pustu Per Satuan Penduduk

Puskesmas sebagai ujung tombak dalam mengatasi tantangan tersebut melalui berbagai program kesehatan yang dilaksanakan puskesmas. Dengan demikian keberadaan puskesmas menjadi sangat penting sehingga perlu dipastikan bahwa puskesmas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan standar. Untuk memenuhi pelayanan sesuai standar sudah tentu harus terpenuhi standar inputnya, standar proses diarahkan pada terwujudnya penyelenggaraan puskesmas yang bermutu mudah di akses dan terjangkau oleh masyarakat

Puskesmas sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan tingkat pertama, penyelenggaraannya perlu penataan untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan dan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa pada Tahun 2013, puskesmas/puskesmas keliling di Jawa Barat rata-rata melayani 57.466 orang penduduk dalam satu tahun. Sedangkan pada Tahun 2017, puskesmas/puskesmas keliling di Jawa Barat rata-rata melayani 44.782 orang penduduk dalam satu tahun.

c. Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisasi serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit dibagi dengan jumlah penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa rasio rumah sakit di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 yaitu satu rumah sakit melayani 166.694 orang penduduk.



Pada Tahun 2017, satu rumah sakit di Jawa Barat secara rata-rata melayani 142.124 orang penduduk.

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Tingkat Kemantapan Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Peran dan fungsi jaringan jalan adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas kota/kabupaten, serta kecamatan hingga desa yang ada di Provinsi Jawa Barat. Jaringan jalan penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang. Mengingat pentingnya jalan ini, perlu diketahui proporsi panjang jalan dalam kondisi baik. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Informasi mengenai proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Sistem jaringan jalan yang ada pada Provinsi Jawa Barat, berdasarkan status jalan adalah:

1. Jaringan Jalan Nasional = 1.789,200 Km
(Kepmen PUPR No. 250/KPTS/M/2015 Tanggal 31 April 2015)
2. Jaringan Jalan Provinsi = 2.360,580 Km
(Kepgub Jawa Barat No. 620 / Kep. 1086-Rek Tanggal 4 November 2016)
3. Jaringan Jalan Kabupaten/Kota = 43.570,184 Km
(Kepgub Jawa Barat No. 620/Kep.1350-Rek/2016 tanggal 23 Desember 2016)

Panjang jaringan jalan provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Jabar No.620/Kep.1530-Admrek/2011 dan No.620/Kep.1086-Rek/2016, pada Tahun 2016 semula sebesar 2.191,29 Km menjadi 2.360,58 Km. Hal ini dikarenakan adanya peralihan status dari jalan kabupaten/kota menjadi jalan provinsi. Demikian juga terdapat peralihan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional. Ketercapaian kemantapan jalan kewenangan provinsi cenderung naik setiap tahun. Pada Tahun 2017 tingkat kemantapan jalan sebesar 98,17 persen. Ini berarti terdapat peningkatan dibandingkan pada Tahun 2016 yaitu sebesar 98,01persen. Untuk menentukan kemantapan jalan pada RPJMD Tahun 2013-2018



berdasarkan kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan jalan.

Dengan mengacu pada pedoman yang dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum No. Pd 01-2016-B, tingkat kemantapan jalan pada akhir Tahun 2018 yaitu 90,18%. Nilai ini setara dengan 98,38% bila penilaian kondisi jalan mengacu pada Permen PU. No. 13/PRT/M/2011.

b. Jaringan Irigasi Provinsi

Tingkat kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan provinsi adalah nilai kondisi prasarana fisik sistem dan jaringan irigasi sesuai kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri PUPR No.12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, tingkat kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan provinsi terus meningkat dari 65,98 persen di Tahun 2013 menjadi 73,95 persen di Tahun 2017.

c. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Minum Bersih dan Air Minum Layak

Rumah tangga pengguna air bersih adalah rumah tangga yang memanfaatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota rumah tangga. Ketersediaan dalam jumlah cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan utama dari program penyediaan air bersih yang terus diupayakan oleh pemerintah.

Data lain mengenai air yang umum disajikan juga yaitu air minum layak. Menurut BPS Jawa Barat, indikator air minum layak mulai Tahun 2011 menggunakan rumus baru yaitu air minum layak sudah mencakup air minum utama dan air mandi/cuci. Sedangkan sebelum Tahun 2011 menggunakan rumus lama yaitu hanya air minum utama.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diperoleh informasi bahwa jumlah rumah tangga pengguna air minum bersih di Tahun 2014 sebesar 65,19 persen, meningkat di Tahun 2015 menjadi 68,30 persen dan meningkat kembali di Tahun 2016 dan 2017 menjadi 68,81 persen dan 71,57 persen. Sedangkan untuk jumlah rumah tangga pengguna air minum layak di Tahun 2013 sebesar 63,5 persen dan terus mengalami peningkatan cakupan pelayanan hingga mencapai 70,50 persen pada Tahun 2017.



d. Cakupan Pelayanan Air Minum

Pencapaian terkait Cakupan Pelayanan Air Minum di Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2013 sampai tahun 2017 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pelayanan air minum semakin baik dan menjangkau berbagai wilayah.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa cakupan pelayanan air minum di Provinsi Jawa Barat terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2013 sebesar 60,52 persen dan meningkat terus sampai Tahun 2017 menjadi 73,17 persen.

e. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

Rumah Tangga Bersanitasi adalah jumlah rumah tangga bersanitasi dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, persentase rumah tangga bersanitasi di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014 sebesar 60,96 persen. Kondisi tersebut meningkat di Tahun 2015 menjadi 70,79 persen, dan kembali meningkat di Tahun 2016 menjadi 75,67 persen.

Sedangkan pencapaian terkait cakupan pelayanan air limbah domestik di Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2013 cakupan pelayanan air limbah domestik mencapai 63,40 persen dan terus meningkat sampai Tahun 2017 menjadi 67,01 persen. Ini menunjukkan semakin luasnya cakupan cakupan pelayanan air limbah domestic di wilayah Jawa Barat.

f. Cakupan Pelayanan Persampahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: a.) pengurangan sampah; dan b.) penanganan sampah. Upaya pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa cakupan layanan persampahan perkotaan terus meningkat dari 64,88 persen pada Tahun 2014 menjadi 67,11 persen di Tahun 2017. Pada Tahun 2017 dilakukan perubahan target RPJMD Jawa Barat Tahun 2013-2018, dari target Tahun 2017 sebesar 69-70 persen berubah menjadi 66,78



persen disebabkan karena ada permasalahan teknis dan penganggaran terkait persampahan. Dengan demikian realisasi cakupan layanan persampahan perkotaan Tahun 2017 yang mencapai 67,11 persen mampu melampaui target RPJMD.

2.3.1.4. Perumahan dan Kawasan Pemukiman

a. Cakupan Rumah Layak Huni

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa cakupan rumah layak huni di Jawa Barat terus meningkat. Pada tahun 2014 cakupan rumah layak huni sebesar 92,41 persen, meningkat menjadi 93,12 persen pada Tahun 2017.

b. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Rumah Tidak Layak Huni (rutilahu) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Dalam kurun waktu RPJMD Jawa Barat 2013-2018 direncanakan perbaikan 100.000 unit Rutilahu dengan perincian sebanyak 80.000 unit kategori rutilahu perdesaan yang berada di 18 kabupaten dan sebanyak 20.000 unit kategori rutilahu perkotaan yang berada di 9 kota.

Sampai dengan Tahun 2017, di Jawa Barat telah diselesaikan perbaikan rutilahu sebanyak 127.163 unit rumah dan pada Tahun 2018 telah tersedia anggaran perbaikan rutilahu yang bersumber dari APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota untuk perbaikan 51.337 unit. Jika terlaksana semua, maka sampai dengan Tahun 2018 telah dilaksanakan perbaikan sebanyak 178.500 unit. Berdasarkan data TNP2K, masih ada sekitar 191.507 unit rumah tidak layak huni yang perlu ditangani di Jawa Barat.

2.3.1.5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Jumlah linmas per 10.000 penduduk adalah jumlah linmas dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan 10.000. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa jumlah Linmas pada Tahun 2013 sebanyak 118.666 orang dengan angka rasio 27 per 10.000 penduduk. Di Tahun 2014 turun menjadi 118.666 orang dengan angka rasio 26 per



10.000 penduduk, dan terus menurun sampai dengan Tahun 2016 menjadi 119.424 orang, dengan angka ratio 26 per 10.000 penduduk.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diperoleh informasi jumlah ormas yang terdaftar pada Tahun 2013 sebanyak 1.044 ormas dan meningkat sampai dengan Tahun 2016 menjadi 1.126 ormas. Namun jumlah ini menurun pada Tahun 2017 menjadi 1.043 ormas. Sedangkan jumlah ormas aktif di Provinsi Jawa Barat menunjukkan angka yang fluktuatif yakni Tahun 2013 sebanyak 25 ormas dan mengalami penurunan sampai tahun 2015 menjadi 20 ormas. Jumlah ormas aktif meningkat kembali pada Tahun 2016 menjadi 45 ormas dan turun kembali di Tahun 2017 menjadi 44 ormas. Dari statistik yang ada, dapat diketahui bahwa persentase ormas yang aktif pada Tahun 2013 sebesar 2,39 persen, menurun sampai tahun 2015 menjadi 1,85 persen. Pada Tahun 2017 meningkat kembali menjadi 4,21 persen.

2.3.1.6. Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para PMKS yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Permasalahan PMKS terbanyak di Provinsi Jawa Barat yaitu fakir miskin, penyandang cacat, dan lanjut usia terlantar. Data PMKS di Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi selama periode 2013-2016. Jumlah PMKS tertinggi sebesar 6.548.234 orang pada Tahun 2016 dan terendah sebesar 3.494.178 orang di Tahun 2013. Kategori PMKS yang memiliki jumlah tertinggi selama periode tahun 2013-2016 adalah fakir miskin. Jumlah fakir miskin tertinggi di Tahun 2016 sebesar 4.852.520 orang, dan terendah pada Tahun 2013 sebesar 1.883.432 orang.

Untuk jumlah PMKS yang mendapat bantuan mengalami fluktuasi dari Tahun 2013 sampai Tahun 2017. Jumlah PMKS yang mendapat



bantuan tertinggi di Tahun 2017 sebesar 710.539 orang, dan terendah pada Tahun 2014 sebesar 32.749 orang.

2.3.1.7. Tenaga Kerja

Salah satu faktor terpenting dalam pembangunan adalah ketenagakerjaan. Komposisi dan jumlah tenaga kerja akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan penduduk. Pada urusan ketenagakerjaan indikator yang dijelaskan antara lain Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

a. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat cenderung mengalami fluktuatif. Pada kurun waktu 2013 sampai dengan 2018, TPT terendah mencapai 8,17 persen terjadi pada Tahun 2018, sementara TPT tertinggi terjadi pada Tahun 2013 yakni 9,16 persen.

Dibandingkan dengan TPT nasional, maka TPT Jawa Barat tahun 2013 berada pada posisi lebih tinggi. Pada tahun tersebut, TPT Jawa Barat dibandingkan dengan provinsi lain berada di posisi 30 tertinggi dari 33 provinsi. Sedangkan pada Tahun 2018, TPT Jawa Barat mencapai 8,17 persen, yang berarti lebih tinggi dari TPT nasional yang sebesar 5,34 persen. Pada tahun 2018, TPT Jawa Barat berada pada posisi 33 tertinggi dari 34 provinsi.

Tabel 2.30
Tingkat Pengangguran Terbuka
di Provinsi Jawa Barat dan Nasional 2013-2018

No.	Uraian	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Provinsi Jawa Barat	9,16	8,45	8,72	8,89	8,22	8,17
2	Nasional	6,17	5,94	6,18	5,61	5,50	5,34

Sumber: BPS RI, 2019

Tingkat pengangguran terbuka kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2017 menunjukkan angka yang bervariasi. TPT kabupaten dan kota di Jawa Barat untuk Tahun 2017 yang lebih tinggi dari TPT Provinsi Jawa Barat sebanyak 14 kabupaten dan kota, yaitu: (1) Kabupaten Bogor, (2) Kabupaten Cianjur, (3) Kabupaten Cirebon, (4) Kabupaten Indramayu, (5) Kabupaten Subang, (6) Kabupaten Purwakarta,



(7) Kabupaten Karawang, (8) Kabupaten Bekasi, (9) Kabupaten Bandung Barat, (10) Kota Bogor, (11) Kota Bandung, (12) Kota Cirebon, (13) Kota Bekasi, dan (14) Kota Cimahi. TPT tertinggi berada di Kabupaten Bekasi sebesar 10,97 persen diikuti dengan Cianjur sebesar 10,10 persen. Sedangkan TPT yang terendah di Kabupaten Pangandaran sebesar 3,34 persen.

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio ini menggambarkan partisipasi angkatan kerja pada tiap kelompok umur dan jenis kelamin. TPAK menurut kelompok umur biasanya memiliki pola huruf "U" terbalik. Pada kelompok umur muda (15-24) tahun, TPAK cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah). Begitu juga pada kelompok umur tua (di atas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka masuk pada masa purnabakti (pensiun).

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa TPAK Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi yang berakhir dengan kecenderungan peningkatan. Pada Tahun 2013, TPAK sebesar 63,01 persen dan menurun tahun-tahun berikutnya sampai mencapai 60,34 persen pada Tahun 2015. Kondisi ini membaik pada Tahun 2016 dan 2017, masing-masing 60,65 persen dan 63,34 persen.

c. Pencari Kerja Yang Sudah Ditempatkan

Indikator pencari kerja yang ditempatkan menggambarkan banyaknya pencari kerja yang memperoleh pekerjaan. Pencari kerja yang sudah ditempatkan mengalami fluktuasi selama periode Tahun 2014-2016. Pencari kerja yang sudah ditempatkan tertinggi sebesar 55,45 persen di Tahun 2014, terendah sebesar 40,24 persen di Tahun 2015.



2.3.1.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan memegang peranan penting dan strategis seperti bidang parlemen, tenaga manajer, profesi, administrasi, teknis dan mendapat kesempatan dalam berbagai lapangan pekerjaan. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari indeks pemberdayaan gender, partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sedangkan untuk pembangunan di bidang anak diukur melalui Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

a. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Provinsi Jawa Barat diwakili dengan persentase pegawai negeri sipil perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan data Tahun 2013 sampai tahun 2016 diketahui bahwa persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pada Tahun 2013 sebesar 1,00. Angka ini meningkat menjadi 29,99 persen pada Tahun 2016.

b. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan adalah jumlah angkatan kerja perempuan dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja perempuan dikalikan 100 persen. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat diketahui bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Jawa Barat pada Tahun 2013 sebesar 41,74 persen. TPAK perempuan ini menurun sampai Tahun 2015 menjadi 38,74 persen. Namun kondisi ini membaik ditunjukkan dengan meningkatnya kembali TPAK perempuan secara signifikan di Tahun 2017 menjadi 43,89 persen.



c. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Pemerintah Indonesia mengapresiasi pembangunan di bidang anak dalam wujud Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

Provinsi Jawa Barat telah mencanangkan menjadi Provinsi Layak Anak (PROVILA) pada Tahun 2028. Sampai dengan Tahun 2018, dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, sebanyak 19 kabupaten/kota telah mendapatkan penghargaan KLA.

d. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta *Trafficking*

Menurut laporan dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Barat pada Tahun 2017 yang dilaporkan oleh Motivator Keluarga Berencana (Motekar) sebanyak 454 kasus. Mengingat Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, sepertinya jumlah kasus tersebut belum semuanya terdata. Ini bisa terjadi karena masih banyak masyarakat yang belum melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada kekerasan dalam rumah tangga yang dialami. Mungkin juga karena tidak tahu harus melapor kemana. Atau bisa juga persepsi masyarakat yang menganggap masalah KDRT ini sebagai masalah pribadi rumah tangga yang tidak perlu ikut campur dari orang lain apalagi dilaporkan. Sehingga kebanyakan korban KDRT tidak berani bicara secara terbuka dimungkinkan karena terbentur masalah aib, biaya, dan waktu.

Trafficking masih menjadi permasalahan di Jawa Barat. Hal ini diindikasikan dengan adanya sejumlah korban *trafficking* di Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa korban *trafficking* yang berhasil dipulangkan mengalami fluktuasi, yang berakhir dengan kecenderungan peningkatan. Pada Tahun 2013 sebesar 50 orang dan menurun tahun-tahun berikutnya sampai 11 orang pada Tahun 2015. Jumlah korban *trafficking* meningkat kembali pada tahun 2016 dan 2017 yaitu masing-masing 37 orang dan 57 orang.



2.3.1.9. Pangan

a. Regulasi Ketahanan Pangan

Regulasi Ketahanan Pangan adalah ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda, perkara, dan sebagainya. Data menunjukkan bahwa regulasi ketahanan pangan mulai ada pada Tahun 2013 dan masih berlaku sampai saat ini.

b. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, dan keamanannya.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa Ketersediaan Pangan Utama di Jawa Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di Tahun 2014 sebesar 31.431,80 kg/jiwa/tahun, meningkat pada Tahun 2015 menjadi 174.879,85 kg/jiwa/tahun, dan meningkat kembali di Tahun 2016 menjadi 224.161,71 kg/jiwa/tahun.

c. Konsumsi Beras Per Kapita

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa Konsumsi beras per kapita di Provinsi Jawa Barat secara umum mengalami penurunan walaupun di Tahun 2015 dan 2016 mengalami kenaikan. Konsumsi beras per kapita pada Tahun 2013 sebesar 88,89 kg/kap/th, 2014 sebesar 86,47 kg/kap/th, tahun 2015 sebesar 86,95 kg/kap/th, tahun 2016 sebesar 87,48 kg/kap/th dan tahun 2017 menurun sebesar 83,93 kg/kap/th. Penurunan konsumsi beras kg/kap/th harus terus ditingkatkan oleh karena perubahan alih fungsi lahan sehingga penurunan produksi padi dan seiring laju pertumbuhan penduduk, serta dalam rangka meningkatkan program ketahanan pangan melalui penganekaragaman pangan lokal yang bergizi, beragam, seimbang dan aman.

2.3.1.10. Pertanian

Permasalahan pertanian erat kaitannya dengan surat atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut, sehingga Provinsi Jawa Barat selalu berusaha untuk meningkatkan anggarannya untuk mensertifikatkan hak atas tanah yang dikuasai dan dimiliki pemerintah daerah. Namun kemauan



pemerintah daerah terhalang atau terhambat dengan pihak lain yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan sertifikat atau bukti kepemilikan atas tanah dengan alasan kapasitas dan kemampuannya yang terbatas.

Persentase Luas Lahan Bersertifikat adalah proporsi luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL), terhadap luas wilayah daratan. Indikator pertanahan ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, persentase luas lahan bersertifikat di Provinsi Jawa Barat di Tahun 2014 sebesar 37,96 persen, menurun di Tahun 2015 menjadi 29,12 persen, dan meningkat kembali di Tahun 2016 menjadi 40,75 persen.

2.3.1.11. Lingkungan Hidup

a. Capaian Fungsi Kawasan Lindung

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan lindung terdiri dari kawasan lindung hutan dan non hutan. Kawasan lindung hutan meliputi kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi, sedangkan kawasan lindung non hutan meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (kawasan yang sesuai untuk hutan lindung/fungsi penyangga, kawasan resapan air), kawasan rawan bencana alam (kawasan rawan letusan gunung api, kawasan rawan gerakan tanah, kawasan rawan tsunami), dan kawasan perlindungan geologi (cagar geologi dan karst).

Persentase Tutupan Lahan yang Berfungsi Lindung terhadap Luas Wilayah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 adalah 37,2 persen dan meningkat pada Tahun 2017 menjadi 38,52 persen. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah beserta masyarakat Jawa Barat dalam meningkatkan luasan tutupan lahan.

b. Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dinyatakan melalui Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan RAD-



GRK, Provinsi Jawa Barat menargetkan penurunan emisi sebesar 10,16% dari kondisi tanpa aksi (*Business as Usual*) pada Tahun 2020. Target ini yang akan dicapai melalui kegiatan mitigasi pada sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi dan pengelolaan limbah domestik.

Pada Tahun 2013-2017, upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Barat terus meningkat hingga mencapai 12,56 persen pada Tahun 2017. Hal ini menandakan bahwa kegiatan mitigasi yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat semakin baik pada setiap tahunnya, bahkan melampaui target RAD GRK.

c. Pencapaian Status Mutu Sungai dan Waduk Besar

Pencapaian status mutu sungai dan waduk besar dihitung berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai di 11 DAS Prioritas dan 1 Waduk Besar, meliputi DAS Citarum, Ciliwung, Cimanuk, Cisadane, Cileungsi/Kali Bekasi, Cilamaya, Citanduy, Cibuni, Cilaki, Cipunagara, dan Ciwaringin, serta Waduk Darma.

Pada kurun waktu 2013-2017, pencapaian status mutu sungai dan waduk besar Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan dengan capaian tertinggi sebesar 96,55 persen pada Tahun 2017.

2.3.1.12. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten/kota adalah ada atau tidaknya ketersediaan database kependudukan skala provinsi. Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2013 sampai dengan 2017 berada dalam kategori “ada”.



2.3.1.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Persentase PKK Aktif

Persentase PKK aktif adalah jumlah PKK aktif dibagi dengan jumlah PKK dikalikan 100 persen. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa Persentase PKK aktif di Provinsi Jawa Barat tahun 2014 sebesar 96,63 persen, menurun di tahun 2015 menjadi 99,16 persen. Pada tahun berikutnya, persentase PKK aktif meningkat kembali menjadi 99,07 persen.

b. Persentase Ormas/LSM Aktif

Persentase Ormas/LSM aktif adalah jumlah Ormas/LSM aktif dibagi dengan jumlah Ormas/LSM dikalikan 100 persen. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa pada Tahun 2013 persentase Ormas/LSM aktif sebesar 7,1 persen, menurun di Tahun 2014 menjadi 4,5 persen. Selanjutnya, capaian pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 meningkat kembali menjadi 4,7 persen dan 8,6 persen.

2.3.1.14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 4T; terlalu muda melahirkan (di bawah usia 20 tahun), terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan, dan terlalu tua melahirkan (di atas usia 35 tahun). Selain itu, program KB juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Selain itu, KB juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan.

a. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah jumlah anak dibandingkan dengan jumlah keluarga.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa rata-rata jumlah anak per keluarga di Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi yang berakhir dengan kecenderungan penurunan. Pada Tahun



2013 dan Tahun 2014 rata-rata jumlah anak per keluarga di Provinsi Jawa Barat sebesar 3 orang. Pada Tahun 2015 menurun menjadi 1,20 atau 1 orang. Selanjutnya, di Tahun 2016 meningkat kembali menjadi 1,22 atau 1 orang, dan di tahun 2017 menurun kembali menjadi 1,14 atau 1 orang.

b. Cakupan Peserta KB aktif

Sasaran pelaksanaan program KB yaitu Pasangan Usia Subur (PUS). PUS adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun. Peserta KB Aktif adalah PUS yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa Peserta KB aktif di Provinsi Jawa Barat selama periode Tahun 2013 sampai Tahun 2016 menunjukkan kecenderungan menurun. Pada Tahun 2013 sebanyak 7.071.978 PUS, menurun di Tahun 2014 menjadi 6.998.177 PUS. Meningkat kembali di Tahun 2015 dan terjadi penurunan signifikan dari 9.715.496 PUS menjadi 1.441.317 PUS di Tahun 2016. Ini menunjukkan semakin menurunnya pemahaman dan kesadaran PUS di Jawa Barat untuk menjadi peserta KB yang aktif.

2.3.1.15. Perhubungan

Urusan Perhubungan mencakup 4 (empat) bidang pelayanan, yaitu: bidang pelayanan perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, dan perkeretaapian. Berikut ini diuraikan lebih rinci mengenai pelayanan perhubungan di Jawa Barat.

a. Perhubungan Darat

Moda transportasi darat merupakan moda yang dominan dalam penyelenggaraan urusan perhubungan di Jawa Barat. Mobilitas angkutan orang dan barang sebagian besar masih menggunakan jalan raya.

Terminal merupakan salah satu komponen prasarana dalam transportasi, yang berfungsi sebagai titik tempat masuk dan keluarnya penumpang dan barang dalam sistem angkutan. Terminal dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu terminal penumpang dan terminal barang. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau



antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Sedangkan terminal barang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan atau antar moda transportasi. Pada umumnya terminal penumpang dan terminal barang dijadikan satu lokasi terminal karena untuk memudahkan bagi penumpang yang bepergian dengan membawa barang bawaannya. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, Jumlah terminal dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 sejumlah 122 terminal.

Salah satu indikator yang menggambarkan kinerja pelayanan perhubungan darat, yaitu tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan provinsi. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, kondisi yang ada di Jawa Barat, tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan provinsi dari Tahun 2013 sebesar 15,83 persen terus meningkat sampai tahun 2017 menjadi 26,78 persen.

b. Perhubungan Laut

Pembangunan pelabuhan laut dan ASDP di Jawa Barat diarahkan untuk menyediakan pelabuhan laut internasional dan mengoptimalkan pelabuhan yang ada dalam melayani pergerakan orang dan barang antar pulau dari dan ke Jawa Barat. Pelayanan angkutan laut juga untuk memfasilitasi hasil kegiatan ekonomi di Jawa Barat yang makin meningkat, serta mendukung dan meningkatkan konektivitas Jawa Barat melalui transportasi laut.

Pembangunan pelabuhan ASDP di Jawa Barat memfasilitasi dan melayani angkutan ASDP yang ada di Jawa Barat kepada masyarakat yang berada pada daerah terisolir dan tidak terdapat layanan transportasi jalan. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa perkembangan kinerja pembangunan perhubungan laut dan ASDP Tahun 2013 sebesar 42,11 persen, meningkat sampai dengan Tahun 2016 menjadi 69,69 persen. Namun pada tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi 62,42 persen.



c. Perhubungan Udara

Pembangunan perhubungan udara di Jawa Barat diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan bandar udara di Jawa Barat guna menampung penumpang dan barang, baik domestik maupun internasional yang dapat melayani pergerakan orang dan barang dari dan ke Jawa Barat. Hal itu dilaksanakan dengan mengembangkan bandar udara yang telah ada dan meningkatkan fungsi pangkalan udara serta pembangunan bandar udara baru.

Bandar udara di Jawa Barat yang aset dan pengelolanya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah Bandar Udara Nusawiru Pangandaran, yang pada Tahun 2016 telah berhasil memperoleh sertifikat dari Kementerian Perhubungan sebagai Bandara Komersial. Dengan demikian, Bandara Nusawiru secara prasarana telah dapat melayani penerbangan komersial dan siap untuk dikembangkan sebagai pintu gerbang di pusat pertumbuhan Pangandaran yang mendukung pariwisata dari dan ke Pangandaran serta sesuai Rencana Induk Bandara Nusawiru.

Pembangunan Bandar Udara Internasional Jawa Barat di Kertajati Majalengka yang telah dimulai sejak Tahun 2003, juga telah berhasil dilakukan pendaratan perdana oleh Presiden R.I. dan Gubernur Jawa Barat pada Kamis, 24 Mei 2018. Pendaratan Perdana secara resmi sukses dilakukan oleh Pesawat Kepresidenan Republik Indonesia di Bandara Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), yang terletak di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Kedatangan pesawat Kepresidenan Jenis Boeing 737-800 Business Jet RI-001 yang berjudul “Indonesia One” yang mendarat pukul 09.30 WIB di *Runway* BIJB. Pada hari yang sama dilanjutkan dengan pendaratan perdana oleh Gubernur Jawa Barat dan seluruh Pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pesawat Garuda Air dan Batik Air dalam rangka “Historical Landing” BIJB. Pembangunan BIJB digagas dan dikawal oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan terus diupayakan pembangunannya dengan melibatkan berbagai pihak, untuk menjadi Kebanggaan dan dapat memacu pertumbuhan perekonomian di Jawa Barat.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa persentase ketersediaan prasarana transportasi udara selalu meningkat sampai dengan tahun 2017. Di Tahun 2013 sebesar 8,47 persen meningkat sampai Tahun 2017 menjadi 55,56 persen.



d. Perkeretaapian

Pembangunan transportasi perkeretaapian di Jawa Barat diharapkan mampu menjadi tulang punggung angkutan barang dan angkutan penumpang perkotaan sehingga dapat menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Daerah. Penyelenggaraan transportasi perkeretaapian daerah yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan perekonomian. Oleh karena itu penyelenggaraan perkeretaapian di masa depan harus mampu menjadi bagian penting dalam struktur perekonomian.

Rencana pembangunan perkeretaapian di Jawa Barat telah disusun dalam Rencana Induk Perkeretaapian di Jawa Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2014. Rencana Induk tersebut telah memperhatikan kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi provinsi.

2.3.1.16. Komunikasi dan Informatika

Keberadaan *website* milik pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan penyebaran informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa website milik pemerintah daerah mulai awal periode sampai dengan akhir dalam status “Ada”, dan jumlah pelaksanaan pameran expo tahun 2014 sebanyak 4 kali, meningkat di Tahun 2015 dan Tahun 2016 menjadi 65 kali dan 123 kali.

2.3.1.17. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

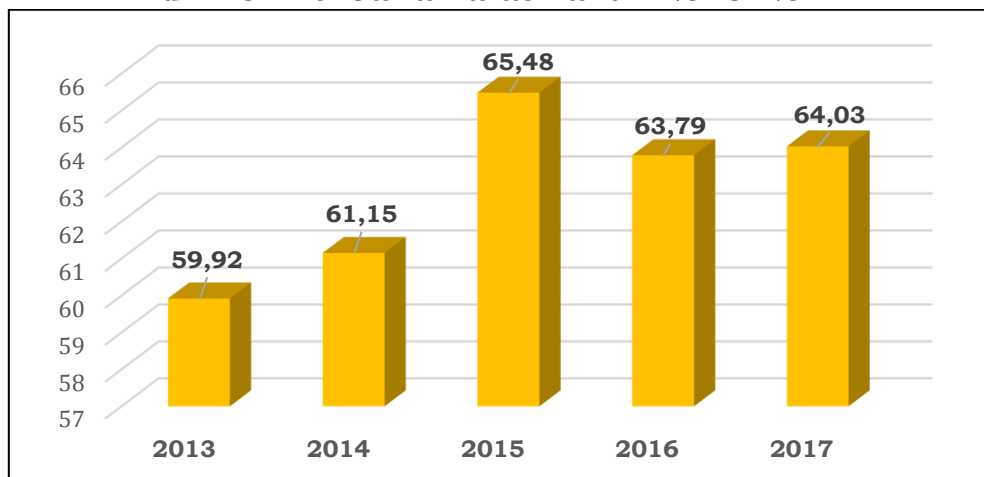
Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Sedangkan usaha



menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Sasaran revitalisasi koperasi menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 25/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi adalah mewujudkan kesadaran pengurus, pengelola dan anggota dalam mengembangkan koperasi menjadi koperasi aktif; dan koperasi yang lebih besar. Jika dilihat dari persentase Koperasi Aktif dan Koperasi Tidak Aktif terhadap Jumlah Koperasi di Jawa Barat pada periode 2013–2017 menunjukkan kecenderungan yang positif. Persentase koperasi aktif sebesar 59,92 persen di Tahun 2013, meningkat menjadi 64,03 persen di Tahun 2017.

Gambar 2.30
Persentase Koperasi Aktif
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013–2017



Sumber Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, 2018

Peningkatan kapasitas usaha KUKM diantaranya dilakukan melalui penambahan modal usaha, yang salah satunya dengan pemanfaatan dana bergulir (kredit). Jumlah penerima manfaat kredit modal usaha pada periode Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi, namun tetap menunjukkan trend yang positif. Pada Tahun 2013 terdapat 5.750 penerima manfaat kredit modal usaha dan jumlah ini bertambah dari tahun ketahun. Pada



Tahun 2017 mencapai 11.996 penerima, namun angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 14.868 penerima.

Pencetakan wirausaha baru merupakan salah satu usaha dalam mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM. Pada periode 2014-2017 jumlah pencetakan wirausaha baru menunjukkan kecenderungan yang cukup positif. Kondisi ini sekaligus menurunkan tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja.

2.3.1.18. Penanaman Modal

Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan pengertian penanaman modal sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan penanaman modal dapat dicapai tujuan seperti mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong ekspor non migas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana dan pengembangan daerah tertinggal.

Jawa Barat merupakan provinsi yang paling diminati oleh investor baik dari dalam negeri maupun manca negara, hal tersebut terlihat sebagaimana data beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa besaran investasi pada Tahun 2013-2017 secara umum meningkat. Pada Tahun 2013 senilai 76,50 triliun rupiah, meningkat menjadi 107,05 triliun rupiah pada Tahun 2017.

2.3.1.19. Kepemudaan dan Olahraga

Dengan jumlah pemuda sebanyak 11.090.538 jiwa atau 20% dari jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat (sumber: Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, 2017), menjadikan Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pemuda terbesar di Indonesia. Pemuda Provinsi Jawa Barat merupakan keunggulan demografi yang besar, tetapi belum menjadi kekuatan sosial dan ekonomi yang sebanding dengan jumlah dan persentasinya yang besar. Permasalahan utama pembangunan kepemudaan di Jawa Barat adalah ketersediaan lapangan dan kesempatan kerja bagi pemuda Jawa Barat. Partisipasi dan kepemimpinan pemuda di Jawa Barat yang masih rendah, serta masih tingginya permasalahan gender



dan diskriminasi merupakan sebagian dari permasalahan kepemudaan di Jawa Barat. Bahkan berdasarkan hasil survei Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016 yang dirilis Tahun 2017, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Barat hanya mencapai 46,33 dan merupakan ranking 30 dari 34 provinsi yang disurvei. Permasalahan ini merupakan tantangan pembangunan kepemudaan di Jawa Barat.

Pembangunan olahraga adalah suatu proses yang membuat manusia memiliki banyak akses untuk melakukan aktivitas fisik. Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO) adalah salah satu indikator dari IPO yang diukur untuk mengetahui angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga. Permasalahan pembangunan olahraga di Jawa Barat selain masih rendahnya partisipasi masyarakat berolahraga di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Permasalahan ini menjadikan indeks partisipasi masyarakat di Provinsi Jawa Barat masih rendah.

Prestasi olahraga dihasilkan dari pembinaan yang berkelanjutan, dan pembibitan atlet dimulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat senior guna menghasilkan prestasi Olahraga Jawa Barat pada tingkat nasional. Permasalahan peningkatan prestasi Olahraga Jawa Barat antara lain belum optimalnya peran sentra keolahragaan (Sekolah Khusus Olahraga, PPLP, Puslatda) dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, terbatasnya jumlah dan kualitas pembina dan tenaga keolahragaan, masih rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan, serta terbatasnya jumlah dan kualitas sentra pembinaan olahraga di Jawa Barat yang memenuhi standar Nasional dan Internasional. Permasalahan tersebut yang menjadikan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat nasional belum maksimal.

2.3.1.20. Kebudayaan

a. Sarana Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan festival seni dan budaya, di Provinsi Jawa Barat terdapat sarana untuk penyelenggaraan berbagai acara atau event seni dan budaya. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diperoleh informasi bahwa sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2017 bertambah menjadi 12 sarana dari 7 sarana di Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016.



b. Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2013 dan Tahun 2014 berjumlah 1.921 dan capaian kondisi akhir di Tahun 2015 dan Tahun 2016 terus meningkat masing-masing menjadi sebanyak 1.933 dan 2.522.

2.3.1.21. Statistik

Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan urusan statistik daerah berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti Buku “Provinsi Dalam Angka” dan Buku “PDRB Provinsi”. Penyusunan kedua buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan sebagai rujukan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan. Adapun sistem data dan statistik yang terintergrasi yang sudah dibangun adalah Sistem Satu Data Pembangunan Jawa Barat. Penerapan sistem ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat.

2.3.1.22. Persandian

Urusan persandian dititikberatkan pada pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi. Saat ini baru sekitar 6 (enam) aplikasi yang dilakukan *penetration test* dari sekitar 263 aplikasi yang terinventarisir. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui celah kerawanan dari aplikasi, sehingga dapat dilakukan antisipasi untuk memperbaiki celah kerawanan tersebut dan relatif aman dari serangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Aplikasi yang sudah dilakukan *pentest* adalah SIPKD (Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sistem Informasi Perijinan di Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Server dan Email jabarprov.go.id di Dinas Komunikasi dan Informatika, RKPD online di Bappeda, dan SLO di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Ini berarti, baru 2,28 persen aplikasi di Pemda yang telah dilakukan *penetration test*.



2.3.1.23. Perpustakaan

a. Minat Baca Masyarakat

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka, yang bertujuan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan dan menyebarkan bahan pustakanya untuk masyarakat umum. Dalam mendukung minat baca masyarakat, di Jawa Barat terdapat beberapa perpustakaan. Kondisi perpustakaan tersebut dirinci pada tabel berikut:

Tabel 2.31
Keadaan Perpustakaan di Jawa Barat Tahun 2017

No.	Nama Lembaga	Jumlah Lembaga	Kondisi Existing Perpustakaan		Persentase Perpustakaan Yang Sudah Ada
			Ada	Belum Ada	
A. Perpustakaan Umum					
1	Provinsi	1	1	-	100%
2	Kabupaten/Kota	27	27	-	100%
3	Kecamatan	627	180	447	28,7 %
4	Desa	5.312	3.743	1.569	70,46 %
5	Kelurahan	645	445	200	69 %
6	Perpustakaan Masyarakat/Taman Bacaan Masyarakat	925	925	-	100 %
B. Perpustakaan Khusus					
1	Perangkat Daerah Provinsi	54	11	43	20,3 %
2	Perangkat Daerah Kab/Kota	864	68	796	7,8 %
3	Pondok Pesantren	12.000	474	11.526	4 %
4	Rumah Sakit	28	9	19	32,1 %
5	Puskesmas	854	91	763	10,7 %
6	PKK Provinsi	1	1	-	100%
7	PKK kabupaten/Kota	27	27	-	100%
C. Perpustakaan Sekolah					
1	Sekolah Dasar (SD)	19.533	2.613	16.920	13,4 %
	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	91	91	-	100 %
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	5.101	3.481	1.620	68,2 %
	Madrasah Tsanawiah (MTs.) Negeri	159	159	159	100 %
	Madrasah Tsanawiah (MTs.) Swasta	2.585	325	2.260	12,57 %
3	Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	905	436	469	48,2 %
	Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta	1.414	945	469	66,9 %



No.	Nama Lembaga	Jumlah Lembaga	Kondisi Existing Perpustakaan		Persentase Perpustakaan Yang Sudah Ada
			Ada	Belum Ada	
4	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri	261	165	96	63,2 %
	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta	1.950	1.235	715	63,3 %
5	Madrasah Aliyah (MA) Negeri	77	77	-	100 %
	Madrasah Aliyah (MA) Swasta	998	300	698	30,06 %
6	Sekolah Luar Biasa	329	329	-	100 %
	D. Perpustakaan Perguruan Tinggi				
1	Perguruan Tinggi Negeri	10	10	-	100 %
2	Perguruan Tinggi Swasta	367	367	-	100 %
	Jumlah Total	58.905	17.142	41.731	29,15 %

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jawa Barat, 2018

b. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2013 sebanyak 424.003 orang, dan terus mengalami peningkatan sampai dengan Tahun 2017 menjadi 593.707 orang.

c. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Provinsi Jawa Barat selama tahun 2013-2017 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2017 terdapat koleksi buku berupa buku (monograph) sebanyak 189.943 eksemplar, *e-book* sejumlah 6.082 eksemplar, maupun koleksi digital sebanyak 991 eksemplar, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Selain koleksi buku di perpustakaan umum Provinsi Jawa Barat, terdapat juga koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Deposit Provinsi Jawa Barat. Koleksi ini berupa buku (monograph), serial (majalah dan bulletin), koleksi digital, dan koleksi audio. Jumlah koleksi ini bertambah setiap tahun, dan khusus untuk koleksi audio baru tersedia pada Tahun 2017.

Tabel 2.32
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Deposit
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017

Uraian	s./d. 2013	2014	2015	2016	2017
	Eksemplar	Eksemplar	Eksemplar	Eksemplar	Eksemplar
Buku (Monograph)	1471	27.029	31.975	39.109	43.071
Serial (Majalah, Buletin)	1.244	1.736	2.108	2.435	2.809
Koleksi Digital	515	615	690	790	966
Koleksi Audio	-	-	-	-	50

Sumber: Laporan Dispusipda Jabar Tahun 2017



2.3.1.24. Kearsipan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, peran dan fungsi arsip adalah sebagai bahan utama untuk akuntabilitas kinerja pemerintah, dan ketersediaan arsip yang autentik dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan karena arsip merupakan alat bukti yang sah.

Sedangkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terdapat berbagai kegiatan atau peristiwa yang terjadi serta bernilai kesejarahan, apabila terekam informasinya (*recorded of information*) pada arsip dalam bentuk dan format sesuai dengan perkembangan TIK, maka arsip-arsip yang bernilai kesejarahan tersebut wajib diselamatkan, dilestarikan, dibuka akses penggunaan atau pemanfaatannya untuk publik. Keberadaan arsip-arsip kesejarahan atau arsip statis tersebut akan menjadi memori kolektif bangsa yang sangat berguna bangsa dan negara.

Kondisi ketersediaan arsip dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat disajikan pada tabel di bawah. Data disajikan berdasarkan arsip yang bernilai guna primer seperti nilai guna administrasi, nilai guna keuangan, nilai guna hukum, dan nilai guna ilmu pengetahuan berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.33
Kondisi Ketersediaan Arsip Dinamis
di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

No	Uraian Arsip	Periode Tahun	Volume S.D. 2018
1.	Arsip-arsip yang bernilai guna primer seperti nilai guna administrasi, nilai guna keuangan, nilai guna hukum, dan nilai guna ilmu pengetahuan berasal dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat di lingkup Biro	1974-2008	31.531 boks
2.	Arsip-arsip yang bernilai guna primer seperti nilai guna administrasi, nilai guna keuangan, nilai guna hukum, dan nilai guna ilmu pengetahuan berasal dari Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	1976-2008	6.118 boks
3.	Arsip-arsip yang bernilai guna primer seperti nilai guna administrasi, nilai guna keuangan, nilai guna hukum, dan nilai guna ilmu pengetahuan berasal dari Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	1957-2009	26.545 boks
	Jumlah Total 1+2+3		64.194 boks

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jawa Barat, 2018



2.3.2. Layanan Urusan Pilihan

Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah di Provinsi Jawa Barat. Urusan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

2.3.2.1. Kelautan dan Perikanan

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan. Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Potensi kelautan dan perikanan cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya.

Salah satu arah kebijakan pembangunan urusan bidang Kelautan dan Perikanan yaitu peningkatan produksi kelautan dan perikanan, serta peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk hasil kelautan dan perikanan. Capaian kinerja indikator keberhasilan tersebut antara lain ditunjukkan melalui jumlah produksi perikanan budidaya dan jumlah produksi perikanan tangkap di Jawa Barat.

a. Produksi Perikanan

Potensi perikanan budidaya ke depan menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan sub sektor perikanan di Jawa Barat. Peranan sub sektor perikanan terhadap perekonomian Provinsi Jawa Barat tidak hanya ditinjau dari aspek nilai produksi perikanan yang cenderung menggambarkan kondisi makro dari perekonomian. Namun demikian, peranan terhadap perekonomian perlu dilihat juga sebagai upaya



untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku yang terlibat dalam sub sektor perikanan.

Produksi perikanan budidaya memberikan sumbangan yang jauh lebih besar dibandingkan perikanan tangkap bagi produksi perikanan di Provinsi Jawa Barat. Kenaikan produksi perikanan tangkap secara absolut lebih sedikit dibandingkan dengan kenaikan produksi perikanan budidaya selama periode Tahun 2013-2017. Pada Tahun 2017, produksi perikanan budidaya mencapai 1.141.748,52 ton, sementara produksi perikanan tangkap hanya 198.884,39 ton.

b. Nilai Tukar Nelayan

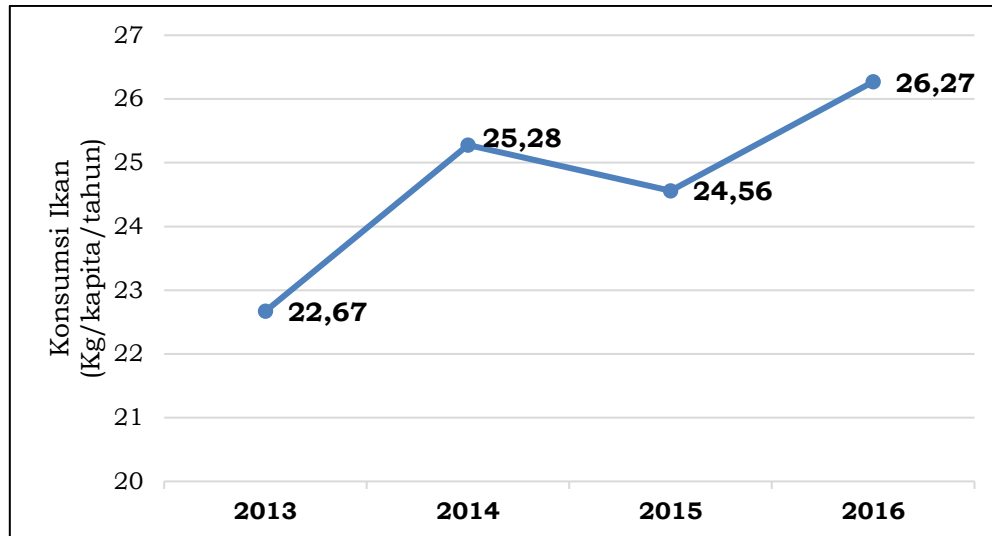
Nelayan merupakan ujung tombak yang terlibat dalam aktivitas perekonomian di sub sektor perikanan. Tingkat kesejahteraan nelayan salah satunya diukur melalui nilai tukar nelayan yang menunjukkan kemampuan nelayan untuk mengakses kebutuhan barang dan jasa yang dibutuhkan dibandingkan dengan nilai produksi yang dihasilkan. Dengan rata-rata nilai tukar nelayan selama periode tahun 2011–2017 sebesar 100,4 menunjukkan bahwa nelayan secara relatif mampu memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun nilainya relatif terbatas.

c. Konsumsi Ikan Per Kapita

Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang dapat menjadi alternatif di tengah permasalahan yang dihadapi dalam produksi daging. Rata-rata konsumsi ikan masyarakat di Jawa Barat masih relatif rendah jika dibandingkan dengan standar *World Health Organization* (WHO) yaitu 36 kg/kapita/tahun. Walau demikian, capaian Provinsi Jawa Barat dalam konsumsi ikan menunjukkan *trend* yang meningkat selama periode 2010-2017.

Peningkatan konsumsi ikan akan berimplikasi terhadap permintaan ikan, oleh karena itu produksi ikan perlu menjadi perhatian. Tantangan utama yang dihadapi ialah bagaimana kemampuan menyediakan ikan sebagai sumber protein bagi konsumsi masyarakat maupun sebagai bahan baku industri pengolahan dalam kondisi sumber daya ikan yang semakin terbatas, masih maraknya kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan, tidak diatur, dan melanggar hukum (*IUU Fishing*), belum adanya kepastian spasial bagi usaha perikanan.

Gambar 2.31
Konsumsi Ikan Penduduk
di Provinsi Jawa Barat 2013 – 2017



Sumber: Background Study Perikanan, Bappeda, 2017

2.3.2.2. Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pariwisata merupakan industri jasa, berkaitan dengan transportasi, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa lainnya seperti bank, asuransi, keamanan. Pariwisata menawarkan tempat istirahat, budaya, dan petualangan.

Jawa Barat sebagai bagian dari keindahan alam Indonesia selalu berusaha menggali dan mengembangkan potensi wilayah dalam bidang pariwisata. Dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional dan penciptaan lapangan kerja dan kesempatan usaha masyarakat, destinasi pariwisata dapat dikembangkan dengan seluas-luasnya. Selain itu, pariwisata juga berperan dalam pemerataan pendapatan dan mendukung perkembangan dan pelestarian seni budaya dan keindahan alam di Provinsi Jawa Barat. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah berusaha mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang Pariwisata untuk menarik wisatawan datang, baik dari dalam negeri (wisatawan nusantara) maupun dari luar negeri (wisatawan mancanegara).

Kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun nusantara merupakan barometer keberhasilan pariwisata Jawa Barat. Dengan kekayaan alam, seni dan budaya, serta ekonomi kreatif di berbagai wilayah Jawa Barat, menjadi daya tarik yang besar untuk industri pariwisata. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa



jumlah wisatawan mancanegara pada Tahun 2013 berjumlah 1.794.401 orang wisatawan dan sejak Tahun 2014 jumlahnya terus meningkat hingga Tahun 2017 menjadi 4.984.035 orang. Kenaikan jumlah wisatawan mancanegara pada Tahun 2017 sangat signifikan bila dibandingkan jumlah wisatawan mancanegara Tahun 2015 yang sebanyak 2.027.629 orang.

Jumlah wisatawan nusantara ke Jawa Barat selalu meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah wisatawan domestik Tahun 2013 sebanyak 45.536.179 orang terus meningkat sampai Tahun 2017 mencapai sebanyak 59.644.070 orang.

Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara maupun nusantara ke Jawa Barat pada Tahun 2013 hingga Tahun 2017 terus meningkat. Hal ini disebabkan adanya optimalisasi sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan promosi pariwisata, seperti meningkatkan peran dan kualitas “content” situs dan peran *Tourist Information Centre* (TIC) yang dimiliki; peningkatan varietas media promosi dan frekuensi promosi yang dilakukan; menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan kepariwisataan; peningkatan kerjasama dengan pihak pers; dan merintis kerjasama di bidang pemasaran pariwisata dengan *stakeholder* pariwisata baik di dalam maupun luar negeri dan dukungan *event/kegiatan*.

2.3.2.3. Pertanian

Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Sub urusan pertanian sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi wewenang pemerintah daerah provinsi, yaitu: sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan perizinan usaha pertanian.

a. Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap PDRB

Pertanian Jawa Barat meskipun perkembangannya selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung berfluktuatif namun kondisinya cukup menggembirakan. Bila ditinjau dari sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, data pada Tahun 2017 menunjukkan kontribusi Tanaman



Pangan dan Hortikultura terhadap PDRB Jawa Barat masing-masing 45,91 persen dan 19,61persen. Dibandingkan tahun sebelumnya, kontribusi tanaman pangan terhadap PDRB mengalami penurunan sebesar 1,10 persen, sementara kontribusi tanaman hortikultura terhadap PDRB meningkat sebesar 4,35 persen.

Tabel 2.34
Pertumbuhan Subsektor dan Kontribusi Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kontribusi tanaman pangan terhadap PDRB	49,50	47,75	48,20	48,54	45,91
2	Kontribusi tanaman hortikultura terhadap PDRB	17,64	18,55	18,08	18,53	19,61
3	Pertumbuhan subsektor tanaman pangan	7,08	-2,22	-3,78	8,84	-1,10
4	Pertumbuhan subsektor tanaman hortikultura	-0,33	1,87	3,86	3,88	4,35

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

b. Kontribusi Subsektor Perkebunan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan di antaranya tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat, kelapa, kelapa sawit, keret, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete dan sebagainya. Pada Tahun 2013, persentase sektor perkebunan mencapai 0,80 persen. Namun pada Tahun 2014 sampai dengan ta Tahun hun 2016 cenderung turun mencapai 0,63 persen. Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB kembali meningkat di Tahun 2017 menjadi 0,67 persen.

2.3.2.4. Kehutanan

Sumber daya hutan merupakan salah satu penyangga kehidupan yang harus dikelola dengan bijaksana agar mampu memberikan kontribusi dan manfaat secara optimal dan lestari. Hutan rakyat dapat memberikan manfaat sebagai salah satu penyangga ekonomi masyarakat antara lain



dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pengembangan wilayah. Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumberdaya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai ekosistem, hutan sangat berperan dalam penyediaan sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global.

Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Hutan sebagai sumber daya nasional harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat sehingga tidak boleh terpusat pada seseorang, kelompok, atau golongan tertentu. Manfaat yang optimal bisa terwujud apabila kegiatan pengelolaan hutan dapat menghasilkan hutan yang berkualitas tinggi dan lestari.

a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

Rumus penghitungan persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis adalah luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi dibagi dengan luas total hutan dan lahan kritis dikalikan 100 persen. Berdasarkan data Tahun 2014-2017, rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Jawa Barat mencapai 26,08 persen pada Tahun 2014, meningkat pada Tahun 2015 menjadi 100 persen. Namun pada Tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 81,28 persen.

b. Kerusakan Kawasan Hutan

Persentase kerusakan kawasan hutan dihitung dengan cara luas kerusakan kawasan hutan dibagi dengan luas kawasan hutan dikalikan 100 persen. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa persentase kerusakan kawasan hutan di Jawa Barat pada Tahun 2014 sebesar 1,22 persen, menurun sampai dengan Tahun 2016 menjadi 0,02 persen.



2.3.2.5. Energi Dan Sumber Daya Mineral

a. Rasio Elektrifikasi

Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah rumah tangga yang telah mendapat layanan kelistrikan dengan jumlah total rumah tangga di suatu wilayah. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa Rasio elektrifikasi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 sebesar 80,50 persen dan terus meningkat hingga mencapai 99,87 persen di Tahun 2017. Rasio elektrifikasi yang tinggi tersebut diharapkan dapat mencapai 100 persen sehingga seluruh warga di Provinsi Jawa Barat dapat menikmati aliran listrik untuk keperluan sehari-hari.

Dengan pertimbangan bahwa Rasio Elektrifikasi 100% akan tercapai di Tahun 2018, maka pada RPJMD periode Tahun 2018-2023 indikator kinerja daerah Jawa Barat bidang energi ditingkatkan menjadi konsumsi listrik per kapita (KWh/kapita). Konsumsi listrik per kapita merupakan indikator internasional untuk mengukur kemajuan ekonomi suatu wilayah berdasar pada pemanfaatan energi listrik untuk mendorong pertumbuhan sektor produktif.

Pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) juga didorong agar porsi bauran energi meningkat. EBT pada skala kecil turut meningkatkan konsumsi listrik per kapita, namun secara umum berkontribusi signifikan pada penurunan emisi gas rumah kaca, sehingga pengembangan EBT menjadi bagian dari pemenuhan indikator penurunan emisi gas rumah kaca.

b. Persentase Penertiban Pertambangan Tanpa Izin

Persentase Penertiban Pertambangan Tanpa Izin adalah jumlah usaha pertambangan ilegal yang telah ditertibkan dibagi dengan jumlah usaha pertambangan ilegal dikali 100 persen. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa persentase penertiban pertambangan tanpa izin mengalami fluktuasi yang berakhir dengan kecenderungan peningkatan. Pada Tahun 2013 dan Tahun 2014 sebesar 81,41 persen dan 84,32 persen, menurun di Tahun 2015 menjadi 79,07 persen dan meningkat kembali di tahun-tahun berikutnya sampai Tahun 2016 menjadi 82,86 persen dan 100 persen pada Tahun 2017.

Untuk mengukur kualitas lingkungan hidup dapat digunakan indikator kinerja daerah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai



salah satu indikator untuk mengukur ketercapaian program-program bidang lingkungan hidup. Pertambangan dan konservasi air tanah menjadi unsur penting di dalam pencapaian indikator tersebut.

2.3.2.6. Perdagangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, definisi dari perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

a. Laju Pertumbuhan Ekspor

Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan dari negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik terdorong untuk memperluas pasar keluar daerah bahkan keluar negeri.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekspor Provinsi Jawa Barat di Tahun 2014 sebesar 14,83 persen, meningkat di Tahun 2015 menjadi 15,05 persen, kemudian mengalami penurunan yang drastis di Tahun 2016 dengan laju pertumbuhan ekspor hanya sebesar 3,34 persen. Di Tahun 2017 laju pertumbuhan ekspor meningkat lagi menjadi 13,42 persen.

b. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan adalah jumlah nilai ekspor dikurangi dengan nilai impor. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa Pada Tahun 2014 ekspor bersih perdagangan di Jawa Barat sebesar U\$ 13,66 juta, di Tahun 2015 turun menjadi U\$ 12,74 juta. Selanjutnya, pada Tahun 2016 meningkat kembali menjadi U\$ 14,187 juta.

2.3.2.7. Perindustrian

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa persentase pertumbuhan industri di Provinsi Jawa Barat pada kurun waktu 2013 sampai dengan 2017 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2013 pertumbuhan industri sebesar 7,19 persen dan mengalami penurunan



sampai Tahun 2015 yakni 4,39 persen. Namun mulai Tahun 2016 mengalami peningkatan dengan posisi Tahun 2017 sebesar 5,35 persen.

2.3.2.8. Transmigrasi

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa Persentase Transmigrasi Swakarsa di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 sebesar 15,38 persen, menurun menjadi 11,91 persen di Tahun 2015 dan meningkat kembali menjadi 35,93 persen pada Tahun 2016.

2.3.3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.3.1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dokumen perencanaan daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah terpilih yang nanti akan dijabarkan dalam program kerja dan perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). RPJMD akan dijabarkan dengan rencana tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

a. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jawa Barat telah tersedia atau ada, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.

b. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat telah tersedia atau ada. RPJMD Provinsi Jawa



Bara Tahun 2013-2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 yang merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

c. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah, ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut: (a) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013; (b) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2014; (c) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015; (d) Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016; (e) Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017; (f) Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018; dan (g) Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.

d. Persentase Keselarasan Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

Persentase keselarasan penjabaran program RPJMD kedalam RKPD adalah jumlah program RKPD tahun bersangkutan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD mencapai persentase sebesar 100 persen, sedangkan pada Tahun 2017 menurun menjadi 99 persen. Hal ini disebabkan adanya Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat yang diikuti dengan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.



2.3.3.2. Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Berdasarkan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Selanjutnya, rancangan Perda yang telah disetujui diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi bersama dengan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi perda dan peraturan gubernur. Namun bila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat setiap tahun menetapkan Perda tentang APBD Provinsi Jawa Barat dan Pergub tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Barat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.



2.3.3.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dilingkungan Pemerintah Daerah provinsi Jawa Barat diwakili dengan beberapa indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah. Umumnya capaian indikator menunjukkan peningkatan, walaupun masih terdapat beberapa indikator yang Tahun 2017 yang tidak sebaik Tahun 2016.

Tabel 2.35
Capaian Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2017

No	Uraian	2016	2017
1	Persentase ketersediaan aparatur sesuai hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja	0	85
2	Persentase tingkat pelanggaran disiplin pegawai	0	2
3	Persentase pegawai yang mendapat nilai SKP >76%	91	78
4	Indeks kepuasan layanan kepegawaian	86	90
5	Persentase ketersediaan layanan informasi kepegawaian	100	100

Sumber: www.sakip.jabarprov.go.id

2.3.3.4. Penelitian dan Pengembangan

Indikator kinerja fungsi penelitian dan pengembangan pada Tahun 2017 umumnya menunjukkan peningkatan dibandingkan Tahun 2016. Capaian indikator kinerja penelitian dan pengembangan disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.36
Capaian Indikator Kinerja Penelitian dan Pengembangan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2017

No	Uraian	2016	2017
1.	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti	77	83
2.	Persentase Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	50	55
3.	Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan HAKI Tingkat Provinsi Jawa Barat	42	50
4.	Persentase hasil riset dan IPTEK yang diterapkan	40	50
5.	Persentase hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaan	67	70
6.	Persentase Kerja sama Penelitian Pengembangan dan Penerapan IPTEK yang diimplementasikan	100	100

Sumber: www.sakip.jabarprov.go.id



2.3.3.5. Fungsi lainnya

2.3.3.5.1. Pengawasan

Fungsi penunjang terkait pengawasan akan mempunyai kewenangan antara lain: pengawasan terhadap pemerintah daerah dan aparatur, pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan atas pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial. Tindak lanjut temuan terdiri dari: jumlah temuan (R), tindak lanjut yang selesai (S), tindak lanjut dalam proses (DP), dan belum ditindaklanjuti (B).

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa jumlah temuan (R) tertinggi terhadap kabupaten/kota di Tahun 2015 sebanyak 957 temuan, sedang terendah di Tahun 2013 sebesar 497 temuan. Persentase tindak lanjut yang bisa selesai (% S) tertinggi di Tahun 2011 sebesar 81,83 persen, terendah di Tahun 2015 sebesar 31,56 persen.

Jumlah temuan (R) tertinggi terhadap PD di Provinsi Jawa Barat di Tahun 2011 sebesar 1.004 temuan, sedang terendah di Tahun 2014 sebesar 590 temuan. Persentase tindak lanjut yang bisa selesai (% S) tertinggi di Tahun 2011 sebesar 98,31 persen, terendah di Tahun 2015 sebesar 0 persen.

Berdasarkan data tindak lanjut temuan BPK, diketahui bahwa jumlah temuan (R) tertinggi di Tahun 2014 sebesar 378 temuan, sedang terendah di Tahun 2013 sebesar 108 temuan.

2.3.3.2. Sekretariat Daerah

a. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun hasil penilaian dari laporan LKIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang umumnya disebut SAKIP beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan dari CC di



Tahun 2014 menjadi sebesar A di Tahun 2016 dan 2017. Prestasi ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Jawa Barat semakin baik, akuntabel dan program yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran.

b. Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada Pemerintah setiap tahun berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat PP Nomor 6 Tahun 2008. Penetapan peringkat dan skor LPPD merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD, yang dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan beberapa Kementerian/LPNK (Kementerian PANRB, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemensetneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS, dan LAN) untuk memotret kinerja penyelenggaraan Pemda terutama dari aspek manajemen pemerintahan.

Dari hasil evaluasi tersebut dapat diperoleh gambaran kinerja dari pemerintahan daerah, baik di level pengambil kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Capaian Tahun 2013 menunjukkan LPPD Provinsi Jawa Barat adalah peringkat 5 se-Indonesia dengan skor 2,7267 atau status tinggi. Capaian LPPD Jawa Barat pada tahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan dan posisi Tahun 2016 di peringkat 2 dengan skor 3,2496 dan status sangat tinggi.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.



2.4.1. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity-PPP). Daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa.

Berdasarkan data BPS, indikator Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan. Tahun 2013 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan sebesar 9.421 ribu rupiah/orang/tahun meningkat sampai dengan 10.285 ribu rupiah/orang/tahun di Tahun 2017. Kondisi ini menunjukkan semakin tingginya kemampuan masyarakat Jawa Barat dalam membeli suatu barang atau jasa.

2.4.2. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga maka semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk.

Selain itu, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir diperoleh informasi bahwa pengeluaran rata-rata perkapita sebulan penduduk Jawa Barat meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 rata-rata



pengeluaran perkapita sebulan sebesar Rp. 729.315 terus meningkat hingga mencapai sebesar Rp. 1.103.337 di Tahun 2017.

Persentase pengeluaran untuk makanan tertinggi sebesar 51,01 persen di Tahun 2017, terendah sebesar 47,48 persen di Tahun 2015. Sedangkan pengeluaran untuk non makanan tertinggi sebesar 52,52 persen di Tahun 2015, terendah sebesar 48,99 persen di Tahun 2017.

2.4.3. Nilai Tukar Petani

Indikator kinerja daerah urusan pertanian Provinsi Jawa Barat diukur melalui Nilai Tukar Petani (NTP). NTP merupakan indikator yang memberikan gambaran bagaimana kehidupan petani ditopang oleh usaha sektor pertaniannya. Nilai tukar petani memperlihatkan dua sisi kehidupan petani yaitu yang pertama sisi pendapatan petani yang menopang seluruh pembiayaan hidup rumah tangga petani dari hasil penjualan produk pertaniannya. Sisi yang kedua adalah sisi pengeluaran untuk kelangsungan rumah tangga petani.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa NTP Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, 2016 dan 2017 tergolong lebih tinggi (3,48 poin, 2,66 poin dan 1,86) dibandingkan NTP Nasional pada Tahun 2015, 2016 dan 2017 yang masing-masing sebesar 101,59, 101,65 dan 103,06. Pada Tahun 2017, NTP Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan menjadi 108,39. Fluktuatifnya perkembangan NTP menunjukkan harga-harga komoditas pertanian yang sangat kental dengan faktor musiman, harga meningkat apabila jumlah produksi sedang mengalami penurunan seperti pada musim kemarau, musim angin barat saat gelombang laut meningkat produksi ikan menurun. Sebaliknya, harga akan menurun apabila persediaan komoditas di sentra-sentra pertanian melimpah karena musim panen. Hal ini mengakibatkan *take home pay* petani tidak tetap untuk jumlah produksi yang diasumsikan sama seperti produksi pada Tahun dasar 2007.

2.4.4. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk



menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa jumlah tindak pidana kriminalitas di Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat. Pada Tahun 2014 sebanyak 23.485 kasus, meningkat menjadi 24.461 kasus di Tahun 2015, kemudian turun menjadi 23.777 kasus di Tahun 2016 dan meningkat kembali di Tahun 2017 menjadi 24.689 kasus.

Untuk persentase penyelesaian tindak pidana kriminalitas di Provinsi Jawa Barat juga mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada Tahun 2014, penyelesaian tindak pidana kriminalitas sebesar 50,64 persen, naik menjadi 52,82 persen di Tahun 2015, kemudian turun menjadi 49,17 persen di Tahun 2016. Pada tahun berikutnya naik kembali menjadi 60,84 persen.

2.4.5. Tingkat Kesempatan Kerja

Tingkat kesempatan kerja (TKK) adalah salah satu indikator ketenagakerjaan yang memberikan informasi besarnya persentase angkatan kerja yang bekerja di suatu wilayah. Tingkat kesempatan kerja juga menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja. Berdasarkan data periode 2013-2017, diketahui bahwa TKK Provinsi Jawa Barat cenderung fluktuatif. Posisi TKK tertinggi terjadi pada Tahun 2017 yaitu 91,78 persen. Kondisi ini mengindikasikan dari tahun ke tahun cenderung terjadi peningkatan angkatan kerja yang bekerja di Jawa Barat.

Tabel 2.37
Tingkat Kesempatan Kerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Angkatan kerja	20.620.610	21.006.139	20.586.356	21.075.899	22.391.003
2	Bekerja	18.731.943	19.230.943	18.791.482	19.202.038	20.551.575
3	Tingkat Kesempatan Kerja (%)	90,84	91,55	91,28	91,11	91,78

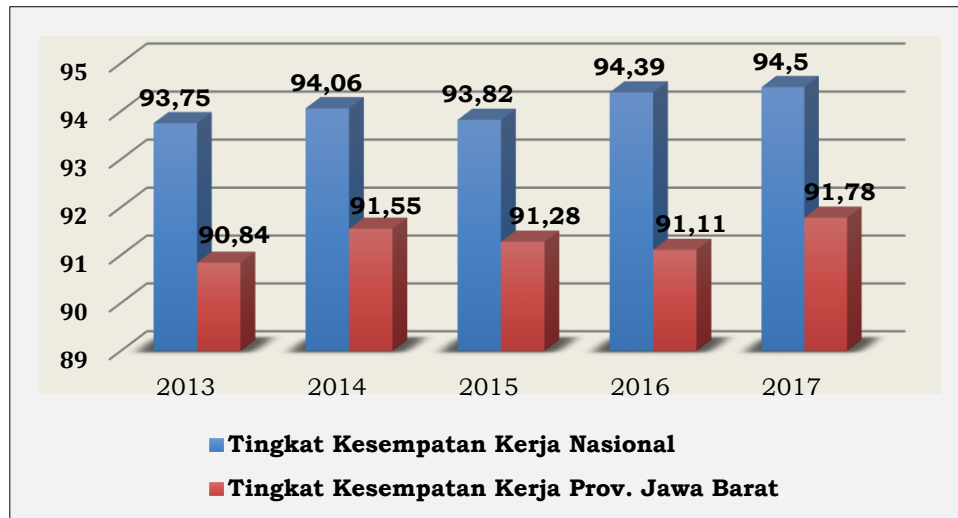
Sumber: Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2014 – 2018, BPS (diolah)

Namun, jika dibandingkan dengan TKK Nasional, angka TKK Provinsi Jawa Barat berada di bawah TKK Nasional sejak tahun 2013 hingga 2017.



Posisi terakhir pada Tahun 2017, TKK nasional mencapai 94,5 persen, sementara TKK Jawa Barat sebesar 91,78 persen.

Gambar 2.32
Tingkat Kesempatan Kerja Nasional dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013–2017



Sumber :
- Jawa Barat dalam Angka, Tahun 2014 – 2018 (diolah)
- Statistik Indonesia Tahun 2014 – 2018 (diolah)

2.4.6. Rasio Ketergantungan

Masalah ketenagakerjaan tidak hanya melihat dari TPT dan jumlah penduduk bekerja, namun perlu diperhatikan pula aspek kualitas ketenagakerjaan. Salah satunya adalah dengan memperhatikan rasio ketergantungan. Angka Beban Ketergantungan (*Dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Selama periode 2013-2017 angka beban ketergantungan cenderung mengalami penurunan. Angka beban ketergantungan di Jawa Barat sebesar 48,39 di Tahun 2013, terus mengalami penurunan sampai Tahun 2015 menjadi sebesar 47,62. Pada Tahun 2016 meningkat menjadi 48,22, dan menurun lagi menjadi 47,02 pada Tahun 2017. Arti dari angka 47,02 pada Tahun 2017 adalah bahwa setiap 100 penduduk produktif masih



menanggung beban sekitar 47 penduduk tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas).

2.4.7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Barat kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir fluktuatif. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, nilai IKLH Tahun 2013 adalah 47,80. Sedangkan pada Tahun 2017 IKLH Jawa Barat mencapai 51,85. Hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup. Berdasarkan publikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada Pada Tahun 2017 Provinsi Papua Barat masih merupakan provinsi yang memiliki nilai IKLH tertinggi; disusul oleh Provinsi Kalimantan Utara, Papua, Aceh, dan Kalimantan Timur. Sementara nilai IKLH terkecil diduduki oleh Provinsi DKI Jakarta.

2.4.8. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya yang telah dan terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menciptakan *good governance* menuju *clean governance*. Langkah awalnya adalah melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang ditandai oleh organisasi yang sangat gemuk dan berjenjang, adanya tumpang tindih kewenangan dan peraturan perundang-undangan, rendahnya produktivitas kerja pegawai, ketidakjelasan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang seharusnya tergambar dalam *Machinery of Government* (MoG) yakni *interconnected between structural and process*, belum semuanya memiliki *Standard Operational Procedure* (SOP) yang jelas dan terukur, serta penempatan sumber daya manusia aparatur yang tidak *The Right Man In The Right Place*.

Melalui reformasi birokrasi, perlu dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, dengan mengutamakan nilai 4E yakni efektivitas, efisiensi, *equity* (rasa adil), serta ekonomis (hemat dan optimal). Tujuannya adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkarakter, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.



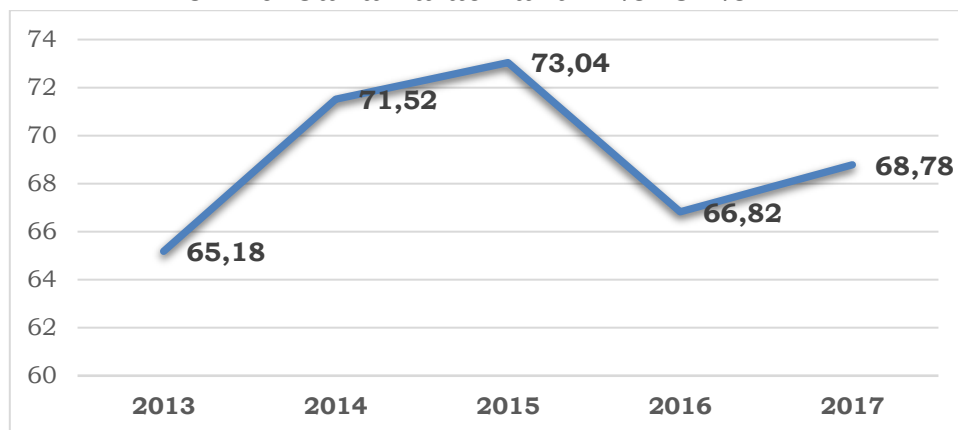
Pengukuran penerapan reformasi birokrasi menggunakan indeks reformasi birokrasi. Indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan. Semula, indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat adalah predikat C pada Tahun 2013, meningkat menjadi B pada Tahun 2016 dan berhasil naik menjadi BB pada Tahun 2017.

2.4.9. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di suatu wilayah. Tingkat capaian IDI diukur berdasarkan 3 (tiga) aspek, 11 (sebelas) variabel, dan 28 (dua puluh delapan) indikator demokrasi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan penguatan aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Barat.

Hasil survey BPS Provinsi Jawa Barat, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari Tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami fluktuasi. Posisi tertinggi terjadi pada Tahun 2015 yaitu 73,04. Pada tahun berikutnya sempat turun ke 66,82, lalu pada Tahun 2017 meningkat ke angka 68,78.

Gambar 2.33
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013–2017



Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, 2018



2.4.10. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta berkerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dari definisi tersebut, alat ukur Indeks kerukunan umat beragama terdiri dari 3 indikator utama, yaitu (1). Toleransi, (2). Kesetaraan, dan (3). Kerjasama. Indeks Kerukunan Umat Beragama dapat digunakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan persoalan kerukunan umat beragama yang dapat menangkal intoleransi dan radikalisme.

Dari hasil survei Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Balitbang dan Diklat Kemenag RI, Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Barat dari awal Tahun 2015 berada pada angka 72,6. Tahun 2016 mengalami penurunan sebanyak 9 Poin menjadi 63,39, dan meningkat pada Tahun 2017 menjadi 68,5. Posisi 2017 ini masuk dalam kategori rukun.

2.4.11. Indeks Risiko Bencana Daerah (IRBI)

Indikator Risiko Bencana Daerah (IRBI) merupakan indikator di dalam mengukur risiko bencana. IRBI dilakukan dengan menghitung indeks bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Proses menghitung IRBI dilakukan dengan menggunakan kalkulasi secara spasial sehingga dapat menghasilkan peta risiko dan nilai grid yang dapat dipergunakan dalam menyusun penjelasan peta risiko.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2013, Provinsi Jawa Barat dikategorikan sebagai daerah dengan IRBI yang Tinggi. Kondisi ini menuntut pemerintahan daerah dan masyarakat Provinsi Jawa Barat untuk dapat melakukan tindakan kesiapsiagaan, maupun bersiap pada saat terjadi bencana dan pasca bencana.

Tabel 2.38

Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi di Indonesia Tahun 2013

No	Provinsi	Skor	Kelas Rasio
1.	Aceh	160	Tinggi
2.	Sumatera Utara	150	Tinggi
3.	Sumatera Barat	153	Tinggi
4.	Riau	147	Tinggi
5.	Jambi	142	Sedang



No	Provinsi	Skor	Kelas Rasio
6.	Sumatera Selatan	142	Sedang
7.	Bengkulu	172	Tinggi
8.	Lampung	153	Tinggi
9.	Kepulauan Bangka Belitung	162	Tinggi
10.	Kepulauan Riau	116	Sedang
11.	DKI Jakarta	103	Sedang
12.	Jawa Barat	166	Tinggi
13.	Jawa Tengah	158	Tinggi
14.	Daerah Istimewa Yogyakarta	165	Tinggi
15.	Jawa Timur	171	Tinggi
16.	Banten	180	Tinggi
17.	Bali	170	Tinggi
18.	Nusa Tenggara Barat	172	Tinggi
19.	Nusa Tenggara Timur	156	Tinggi
20.	Kalimantan Barat	157	Tinggi
21.	Kalimantan Tengah	141	Sedang
22.	Kalimantan Selatan	152	Tinggi
23.	Kalimantan Timur	165	Tinggi
24.	Sulawesi Utara	151	Tinggi
25.	Sulawesi Tengah	158	Tinggi
26.	Sulawesi Selatan	167	Tinggi
27.	Sulawesi Tenggara	169	Tinggi
28.	Gorontalo	140	Sedang
29.	Sulawesi Barat	191	Tinggi
30.	Maluku	179	Tinggi
31.	Maluku Utara	169	Tinggi
32.	Papua Barat	154	Tinggi
33.	Papua	125	Sedang

Sumber: IRBI Tahun 2013, BNPB

Potret penurunan indeks risiko bencana di beberapa kabupaten/kota Jawa Barat yang rawan bencana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.39
Perbandingan Penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dan 2017

ID Kab	Kabupaten/Kota	Indeks Risiko Bencana			Persentase	
		2015	2016	2017	2016	2017
3201	Bogor	152,4				
3202	Sukabumi	231,2		127,6		-44,8%
3204	Bandung	174,0		100,7		-42,1%
3207	Ciamis	215,2	178,2	133,5	-17,2%	-38,0%
3218	Pangandaran	215,2	215,2	104,2	0,0%	-51,6%
3216	Bekasi	164,8	164,8	108,9	0,0%	-33,9%
3217	Bandung Barat	162,0	120,0	101,9	-25,9%	-37,1%
3271	Kota Bogor	107,2	87,4	62,7	-18,4%	-41,5%
3273	Kota Bandung	154,0	126,0		-18,2%	
3276	Kota Depok	102,4	83,5	70,7	-18,4%	-31,0%

Sumber: BNPB, diolah 2018



2.4.12. Indeks Kebahagiaan

Indikator kebahagiaan merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kesejahteraan karena kebahagiaan merupakan refleksi dari tingkat kesejahteraan yang telah dicapai oleh setiap individu (Kapteyn, Smith dan Soest, 2010 dalam Indeks Kebahagiaan 2017, BPS). Indikator kebahagiaan akan menggambarkan tingkat kesejahteraan subjektif terkait beberapa aspek kehidupan yang dianggap esensial dan bermakna bagi sebagian besar penduduk dan masyarakat (Martin, 2012; OECD, 2011, 2013 dalam Indeks Kebahagiaan 2017, BPS).

Indeks Kebahagiaan Indonesia Tahun 2017 yang dihitung dengan menggunakan Metode 2014, lebih tinggi dibanding Tahun 2014. Pada Metode 2014, Indeks Kebahagiaan diukur menggunakan 1 (satu) dimensi, yaitu Kepuasan Hidup, sedangkan pada Metode 2017 Indeks Kebahagiaan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi, yaitu: Kepuasan Hidup, Perasaan, dan Makna Hidup.

Indeks Kebahagiaan Provinsi Jawa Barat tahun 2014 sebesar 67,66 pada skala 0 sampai 100. Angka ini naik menjadi 69,58 pada Tahun 2017. Kondisi kehidupan penduduk Jawa Barat dapat dikatakan cukup bahagia pada Tahun 2017, karena sudah di atas 50. Namun bila dibandingkan dengan nasional, indeks kebahagiaan Jawa Barat masih berada di bawah indeks kebahagiaan nasional yaitu 70,69 berdasarkan data Tahun 2017.

Keseluruhan capaian pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 sampai dengan 2018 sebagaimana telah diuraikan pada aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing di bab ini, disajikan pada tabel di bawah.



Tabel 2.40
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan	Persen	6.33	5.09	5.04	5.67	5,35	5,64
2	Laju inflasi	Persen	9.15	7.41	2.73	2.75	3,63	3,54
3	PDRB per kapita	Juta	27,77	30,12	32,65	34,88	37,23	40,31
4	Indeks Gini	Indeks	0,40	0,40	0,43	0,40	0,39	0,405
5	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia							
	- 40 Persen Terendah	Persen	17,27	17,38	16,77	16,44	16,86	n/a
	- 40 Persen Menengah	Persen	35,02	34,87	34,27	36,68	37,00	n/a
	- 20 Persen Tertinggi	Persen	47,71	47,75	48,96	46,88	46,15	n/a
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	68,25	68,80	69,50	70,05	70,69	n/a
7	Persentase penduduk miskin	Persen	9.61	9.18	9.57	8.77	7,83	7,25
8	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	4.382.648	4.238.960	4.485.654	4.168.110	3.774.410	3.539.400
9	Garis Kemiskinan	Rp	276.825	291.474	318.602	324.119	354.679	371.376
10	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Persen	1,65	1,39	1,63	1,28	1,39	1,13
11	Indeks Keparahan Kemiskinan	Persen	0,44	0,33	0,43	0,28	0,35	0,27



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,81	12,08	12,15	12,30	12,42	n/a
13	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,58	7,71	7,86	7,95	8,14	n/a
14	APK SD/MI	Persen	106,75	106,98	109,42	108,09	107,54	n/a
15	APK SMP/MTs	Persen	85,26	87,50	90,07	89,58	88,8	n/a
16	APK SMA/SMK/MA	Persen	60,12	68,55	70,23	70,56	76,48	n/a
17	APM SD/MI	Persen	97,08	97,60	97,68	97,82	98,06	n/a
18	APM SMP/MTs	Persen	76,76	79,30	79,55	79,76	80,29	n/a
19	APM SMA/SMK/MA	Persen	52,25	56,48	56,73	56,92	57,22	n/a
20	Jumlah Kematian Bayi	Jiwa	4.356	1.321	3.334	3.072	3.243	n/a
21	Rasio Kematian Bayi	Rasio	4.6	4.19	4.09	3.93	3.63	n/a
22	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Jiwa	781	748	825	797	797	n/a
23	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	72.09	72,23	72,41	72,44	72,47	n/a
24	Persentase Balita Gizi buruk	Persen	0.72	0.07	0.07	0.07	n/a	n/a
25	Jumlah Angkatan Kerja	Orang	20.620.610	21.006.139	20.586.356	21.075.899	22.391.003	n/a
26	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	91,54	90,84	91,10	91,28	91,78	n/a
27	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	88,21	88,35	89,11	89,56	89,18	n/a
28	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	67,57	68,87	69,02	69,02	70,04	n/a



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Keluarga pra sejahtera	Persen	2.577.327	2.390.125	2.390.125	1.083.117	1.114.337	n/a
30	Persentase KS I	Persen	3.656.177	3.570.220	3.570.220	7.140.709	6.442.293	n/a
31	Persentase KS II, III, Plus	Persen	6.164.324	6.443.833	6.443.833	3.546.196	4.957.539	n/a
32	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Persen	75	75	75	80,25	87,5	n/a
33	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	n/a
34	Skor PPH	Skor	74,90	74	78,3	81	84,30	n/a
35	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	9,06	8,72	8,69	8,90	8,60	8,67
36	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	2,39	2,43	2,43	2,55	2,71	2,78
37	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	Persen	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	n/a
38	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	Persen	2,77	2,43	1,7	1,53	1,43	1,36
39	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	15,86	15,26	15,19	15,08	15,08	14,87
40	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (tanpa migas)	Persen	43,22	43,64	43,03	42,49	42,29	42,16



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B. ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Fokus Layanan Urusan Wajib							
1.1	Pendidikan							
1.1.1	Angka Partisipasi Sekolah							
1.1.1.1	Sekolah Dasar (SD/MI)	Persen	98,85	99,30	99,57	99,54	99,51	n/a
1.1.1.2	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	Persen	89,40	92,84	93,19	93,41	93,77	n/a
1.1.1.3	Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	Persen	59,98	65,48	65,72	65,82	66,62	n/a
1.1.1.4	Perguruan Tinggi	Persen	17,34	19,27	19,40	n/a	n/a	n/a
1.1.2	Rasio Guru Terhadap Murid							
1.1.2.1	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar	Rasio	6,29	14,8	15	21	23	n/a
1.1.2.2	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Menengah Pertama	Rasio	33,17	11,17	16	21	21	n/a
1.1.2.3	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Menengah Atas	Rasio	26,3	9,59	20	18	20	n/a
1.1.3	Angka Putus Sekolah							
1.1.3.1	Sekolah Dasar (SD/MI)	Persen	0,93	0,74	0,18	0,10	0,08	n/a
1.1.3.2	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	Persen	1,62	1,11	0,57	0,48	0,52	n/a



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.3.3	Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	Persen	3,05	1,77	1,45	1,37	0,74	n/a
1.1.4	Angka Kelulusan							
1.1.4.1	Sekolah Dasar (SD/MI)	Persen	99,89	99,49	99,75	99,93	99,61	n/a
1.1.4.2	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	Persen	99,59	99,03	99,46	99,63	99,87	n/a
1.1.4.3	Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	Persen	98,21	98,59	98,70	98,52	98,92	n/a
1.1.5	Angka Melanjutkan Pendidikan							
1.1.5.1	Sekolah Dasar (SD/MI)	Persen	76,66	78,22	77,41	75,9	79,86	n/a
1.1.5.2	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	Persen	78,76	92,35	97,77	102,67	103,81	n/a
1.1.5.3	Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1.2	Kesehatan							
1.2.1	Indeks Kesehatan	Indeks	73,06	73,33	73,66	80,68	80,72	n/a
1.2.2	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	Rasio	82	86	84	83	88	n/a
1.2.3	Rasio Puskesmas/Puskemas Keliling per satuan penduduk	Rasio	57.466	10.318	44.485	45.123	44.782	n/a
1.2.4	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	Rasio	166.694	149.447	147.349	144.891	142.124	n/a



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1.3.1	Tingkat Kemantapan Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik dan sedang	Persen	97,56	97,68	97,8	98,01	98,17	n/a
1.3.2	Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	Persen	65,98	67,34	69,65	72,06	73,95	n/a
1.3.3	Rumah Tangga Pengguna Air Minum Bersih	Persen	n/a	65,19	68,30	68,81	71,57	n/a
1.3.4	Rumah Tangga Pengguna Air Minum Layak	Persen	63,5	65,01	67,20	67,62	70,50	n/a
1.3.5	Cakupan Pelayanan Air Minum	Persen	60,52	65,43	67,13	71,14	73,17	n/a
1.3.6	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	n/a	60,96	70,79	75,67	n/a	n/a
1.3.7	Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	Persen	63,40	63,59	65,03	65,64	67,01	n/a
1.3.8	Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan	Persen	64,70	64,88	65,65	66,26	67,11	n/a
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
1.4.1	Cakupan Rumah Layak Huni	Persen	n/a	92,41	92,70	92,78	93,12	n/a



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Unit	36.291	36.773	12.385	9.562	32.152	n/a
1.5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							
1.5.1	Jumlah Linmas	orang	118.666	118.866	120.928	119.424	n/a	n/a
1.5.2	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	rasio	27	26	26	26	n/a	n/a
1.6	Sosial							
1.6.1	Jumlah PMKS	orang	3.494.178	6.402.369	6.045.376	6.548.234	n/a	n/a
1.6.2	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial	orang	479.255	32.749	644.268	643.618	710.539	n/a
1.6.3	Jumlah Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi	unit	n/a	849	3.518	5.350	n/a	n/a
1.7	Tenaga Kerja							
1.7.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	63,01	62,77	60,34	60,65	63,34	n/a
1.7.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	9,16	8,45	8,72	8,89	8,22	8,17
1.7.3	Pencari Kerja yang Sudah Ditempatkan	persen	n/a	55,45	40,24	47,57	n/a	n/a



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1.8.1	Jumlah Perempuan di Lembaga Pemerintah	Jumlah	162.119	30.588	30.588	1.792.030	n/a	n/a
1.8.2	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Persen	1,00	16,86	16,86	29,99	n/a	n/a
1.8.3	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	41,74	42,30	38,74	40,30	43,89	n/a
1.8.4	Perkembangan Perolehan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Nasional	Jumlah	3 Kab/Kota	n/a	6 Kab/Kota	n/a	15 Kab/Kota	19 Kab/Kota
1.8.5	Korban Trafficking yang Berhasil dipulangkan	Orang	50	13	11	37	57	n/a
1.9	Pangan							
1.9.1	Regulasi Ketahanan Pangan	Ada/Tidak Ada	ada	ada	ada	ada	ada	n/a
1.9.2	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/jiwa/tahun	n/a	31.431,80	174.879,85	224.161,71	n/a	n/a
1.9.3	Konsumsi Beras Per Kapita	Kg/kapita /tahun	88,89	86,47	86,95	87,48	83,93	n/a
1.10	Pertanahan							
1.10.1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	Persen	n/a	37,96	29,12	40,75	n/a	n/a



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.11	Lingkungan Hidup							
1.11.1	Persentase Tutupan Lahan yang Berfungsi Lindung terhadap Luas Wilayah	Persen	n/a	37,2	37,2	37,2	38,52	n/a
1.11.2	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	7,70	9,57	10,23	11,45	12,56	n/a
1.11.3	Pencapaian Status Mutu Sungai Dan Waduk Besar Dengan Tingkat Cemar Sedang	Persen	10,40	13,14	23,45	56,12	96,55	n/a
1.12	Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil							
1.12.1	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	n/a
1.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1.13.1	Persentase PKK aktif	Persen	n/a	96,63	99,16	99,07	n/a	n/a
1.13.2	Persentase Ormas/LSM Aktif	Persen	7,1	4,5	4,7	8,6	n/a	n/a



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1.14.1	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	Anak	3	3	1,20	1,22	1,14	n/a
1.14.2	Cakupan Peserta KB Aktif	Orang	7.071.978	6.998.177	9.715.496	1.441.317	n/a	n/a
1.15	Perhubungan							
1.15.1	Jumlah Terminal	Unit	122	122	122	122	122	n/a
1.15.2	Jumlah Pelabuhan Laut	Unit	10	10	10	10	10	n/a
1.15.3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi	Persen	15,83	17,02	19,06	20,03	26,78	n/a
1.15.4	Persentase Ketersediaan Prasarana Transportasi Laut dan ASDP	Persen	42,11	47,37	58,98	69,69	62,42	n/a
1.15.5	Persentase ketersediaan prasarana transportasi udara	Persen	8,47	11,94	22,01	48,73	55,56	n/a
1.15.6	Persentase penyediaan prasarana kereta api di Jawa Barat	Persen	1.135,44	1.135,44	1.135,44	1.135,44	89,36	n/a



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.16	Komunikasi dan Informatika							
1.16.1	Keberadaan Website Milik Pemerintah Daerah	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	n/a
1.16.2	Jumlah Pelaksanaan Pameran/Expo	kali	n/a	4	65	123	n/a	n/a
1.17	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
1.17.1	Persentase Koperasi Aktif	persen	59,92	61,15	65,48	63,79	64,03	n/a
1.17.2	Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha	usaha	5.750	5.101	8.365	14.868	11.996	n/a
1.17.3	Jumlah Pencetakan Wirausaha Baru	Orang	n/a	43.033	20.150	19.121	46.887	n/a
								n/a
1.18	Penanaman Modal							n/a
1.18.1	Total Investasi (PMDN/PMA)	Rp juta	76.507.042	89.713.310	98.006.794	105.348.264	107.056.423	n/a
1.18.2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)	Rp juta	9.006.138	18.726.922	26.272.865	30.360.212	38.390.647	n/a
1.18.3	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA)	Rp juta	67.500.904	70.986.388	71.733.928	74.988.052	68.665.776	n/a
1.19	Kepemudaan dan Olahraga							
1.19.1	Indeks Pembangunan Pemuda	persen	n/a	n/a	44,50	46,33	n/a	n/a



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20	Kebudayaan							
1.20.1	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Dan Budaya	Unit	7	7	7	7	12	n/a
1.20.2	Jumlah Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Jumlah	1.921	1.921	1.933	2.522	n/a	n/a
1.21	Statistik							
1.21.1	Buku Provinsi Dalam Angka	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	n/a
1.21.2	Buku PDRB Provinsi	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	n/a
1.22	Persandian							
1.22.1	Persentase aplikasi di Pemda yang telah dilakukan <i>penetration test</i>	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	2,28	n/a
1.23	Perpustakaan							
1.23.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	424.003	494.565	513.731	566.925	593.707	n/a
1.23.2	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Umum	Eksemplar	97.353	144.747	149.047	182.355	189.943	n/a



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.24	Kearsipan							
1.24.1	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	10	10	10	20	30	n/a
1.24.2	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Kegiatan	4	4	16	18	n/a	n/a
2	Fokus Layanan Urusan Pilihan							
2.1	Kelautan dan Perikanan							
2.1.1	Produksi Perikanan Tangkap	ton/tahun	207.103,50	206.156,70	271.030,59	n/a	198.884,39	n/a
2.1.2	Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum	ton/tahun	10.201,00	12.851,00	21.317,00	n/a	-	n/a
2.1.3	Produksi Perikanan Budidaya	ton/tahun	970.567,76	1.006.016,98	1.075.260,00	n/a	1.141.748,52	n/a
2.1.4	Nilai Tukar Nelayan	Poin	96,84	99,12	99,12	n/a	101,64	n/a
2.1.5	Konsumsi Ikan Per Kapita	Persen	22,67	25,28	24,56	26,27	n/a	n/a
2.2	Pariwisata							
2.2.1	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	1.794.401	1.962.639	2.027.629	4.428.094	4.984.035	n/a
2.2.2	Jumlah Wisatawan Domestik	Orang	45.536.179	47.992.088	56.334.706	58.728.666	59.644.070	n/a



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3	Pertanian							
2.3.1	Pertumbuhan Subsektor Tanaman Pangan	Persen	7,08	-2,22	-3,78	8,84	-1,10	
2.3.2	Pertumbuhan Subsektor Tanaman Hortikultura	Persen	-0,33	1,87	3,86	3,88	4,35	
2.3.3	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	Persen	0.80	0.73	0.67	0.63	0,67	
2.4	Kehutanan							
2.4.1	Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis	Persen	n/a	26,08	100	81,28	n/a	n/a
2.4.2	Kerusakan Kawasan Hutan	Persen	n/a	1,22	0,45	0,02	n/a	n/a
2.5	Energi dan Sumberdaya Mineral							
2.5.1	Rasio Elektrifikasi	Rasio	80,50	83,41	93,71	97,87	99,87	n/a
2.5.2	Persentase Penertiban Pertambangan Tanpa Izin	Persen	81,41	84,32	79,07	82,86	100	n/a
2.6	Perdagangan							
2.6.1	Laju Pertumbuhan Ekspor	Persen	5,5 – 6,0	14,83	15,05	3,34	13,42	n/a
2.6.2	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	U\$ Juta	n/a	13,66	12,74	14,187	n/a	n/a



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7	Perindustrian							
2.7.1	Persentase Pertumbuhan Industri	Persen	7,19	n/a	4,39	n/a	5,35	n/a
2.8	Transmigrasi							
2.8.1	Persentase Transmigran Swakarsa	Persen	n/a	15,38	11,91	35,93	n/a	n/a
3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan							
3.1	Perencanaan							
3.1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.1.2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.1.3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.1.4	Persentase keselarasan penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	100	100	100	100	99	n/a



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2	Keuangan							
3.2.1	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Tepat waktu/Tidak	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
3.3	Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan							
3.3.1	Persentase ketersediaan aparatur sesuai hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja	n/a	n/a	n/a	n/a	0	85	n/a
3.3.2	Persentase tingkat pelanggaran disiplin pegawai	n/a	n/a	n/a	n/a	0	2	n/a
3.3.3	Persentase pegawai yang mendapat nilai SKP >76%	n/a	n/a	n/a	n/a	91	78	n/a
3.3.4	Indeks kepuasan layanan kepegawaian	n/a	n/a	n/a	n/a	86	90	n/a
3.3.5	Persentase ketersediaan layanan informasi kepegawaian	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	n/a
3.4	Penelitian dan Pengembangan							
3.4.1	Persentase Rekomendasi	n/a	n/a	n/a	n/a	77	83	n/a



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti							
3.4.2	Persentase Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	n/a	n/a	n/a	n/a	50	55	n/a
3.4.3	Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan HAKI Tingkat Provinsi Jawa Barat	n/a	n/a	n/a	n/a	42	50	n/a
3.4.4	Persentase hasil riset dan IPTEK yang diterapkan	n/a	n/a	n/a	n/a	40	50	n/a
3.4.5	Persentase hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaan	n/a	n/a	n/a	n/a	67	70	n/a
3.4.6	Persentase Kerja sama Penelitian Pengembangan dan Penerapan IPTEK yang diimplementasikan	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	n/a
3.5	Fungsi Lainnya							
3.5.1	Pengawasan							
3.5.1.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan Terhadap Kab/kota							
	% S (tindak lanjut yang selesai)	persen	75,25	65,20	31,56	n/a	n/a	n/a



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	% DP (tindak lanjut dalam proses)	persen	17,30	22,54	22,57	n/a	n/a	n/a
	% B (belum ditindaklanjuti)	persen	7,44	12,25	45,87	n/a	n/a	n/a
3.5.1.2	Persentase Tindak Lanjut Temuan Terhadap PD							
	% S	persen	87,07	84,07	0	n/a	n/a	n/a
	% DP	persen	8,71	11,69	0	n/a	n/a	n/a
	% B	persen	4,23	4,24	0	n/a	n/a	n/a
3.5.1.3	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK							
	% TS	persen	61,11	57,67	73,06	44,44	21,88	n/a
	% TB	persen	28,70	39,15	22,28	55,56	37,50	n/a
	% BT	persen	10,19	3,17	4,66	0	40,63	n/a
3.5.2	Sekretariat Daerah							
3.5.2.1	Nilai LKjIP/LAKIP	Nilai	CC	CC	BB	A	A	n/a
3.5.2.2	Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Peringkat/Skor/Status	Peringkat 5/Skor: 2,7267/Status: tinggi	Peringkat 3/Skor: 2,9202/Status: tinggi	Peringkat 2/Skor: 3,1760/Status: sangat tinggi	Peringkat 2 /Skor: 3,2496/Status: sangat tinggi	n/a	n/a
3.5.3	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
3.5.3.1	Jumlah Ormas Terdaftar	Unit	1.044	1.054	1.079	1.126	1.043	n/a
3.5.3.2	Jumlah Ormas Aktif	Unit	25	24	20	45	44	n/a



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.5.3.3	Persentase Ormas Aktif	Persen	2,39	2,27	1,85	3,99	4,21	n/a
C.	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	ribu rupiah	9.421	9.447	10.035	10.035	10.285	n/a
2	Pengeluaran Konsumsi Pangan Rumah Tangga per Kapita	ribu rupiah	729.315	781.065	896.895	983.877	1.103.337	n/a
3	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Per kapita	ribu rupiah	363.995	405.316	471.012	506.107	540.525	n/a
4	Nilai Tukar Petani	poin	103,81	104,43	105,07	104,31	104,92	n/a
5	Jumlah Tindak Pidana Kriminalitas	Kasus	n/a	23.485	24.461	23.777	24.689	n/a
6	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kriminalitas	Persen	n/a	50,64	52,82	49,17	60,84	n/a
7	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	90,84	91,55	91,28	91,11	91,78	n/a
8	Rasio Ketergantungan	persen	48,39	47,97	47,62	48,22	47,02	n/a
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	47,80	45,06	52,91	46,01	51,85	n/a
10	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	C	n/a	C	B	BB	n/a
11	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Poin	65,18	71,52	73,04	66,82	68,78	n/a



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	n/a	n/a	72,6	63,39	68,5	n/a
13	Indeks Risiko Bencana Daerah (IRDI)	Poin	166	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
14	Indeks Kebahagiaan	Poin	n/a	67,66	n/a	n/a	69,58	n/a

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019



2.5. Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2013-2018

Perencanaan pembangunan merupakan proses yang kontinyu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi. Hasil pembangunan yang disajikan dalam bentuk evaluasi pelaksanaan RPJMD merupakan informasi penting bagi proses perencanaan periode berikutnya.

Evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 memberikan gambaran pelaksanaan pembangunan sekaligus penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diwakili oleh berbagai data dan informasi pembangunan daerah. Informasi capaian pembangunan yang diwakili oleh indikator kinerja sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Berdasarkan RPJMD Jawa Barat Tahun 2013–2018 ditetapkan sejumlah 59 indikator kinerja sasaran yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Tingkat capaian indikator pembangunan Provinsi Jawa Barat merupakan perbandingan antara realisasi dengan target yang direncanakan di RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018. Berdasarkan data diatas, capaian indikator kinerja sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 sampai dengan Tahun 2017 menunjukkan terdapat 41 indikator yang tercapai, 15 indikator yang tidak tercapai dan 3 (tiga) indikator tidak tersedia data dari penyedia data yang berwenang.

Sementara itu, beberapa capaian indikator kinerja sasaran Tahun 2018 disajikan sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,64 persen. Dengan demikian, tingkat capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018 sebesar 97,92 persen. Ini berarti target Tahun 2018 tidak tercapai.
- b. Indeks Gini mencapai 0,405. Dengan demikian, tingkat capaian Indeks Gini Tahun 2018 sebesar 93,42 persen. Ini berarti target tahun 2018 tidak tercapai.
- c. Angka Kemiskinan mencapai 7,25 Persen. Dengan demikian, tingkat capaian Angka Kemiskinan Tahun 2018 sebesar 98,88 persen. Ini berarti target Tahun 2018 tidak tercapai.
- d. Laju Pertumbuhan Ekspor secara *year-on-year* ekspor Non Migas naik 2,96 persen. Sedangkan Ekspor Migas (*y-o-y*) naik 108,89 persen dari Tahun 2017. Total ekspor naik 3,57 persen. Dengan demikian, tingkat



capaian Laju Pertumbuhan Ekspor Tahun 2018 sebesar 89,25 persen. Ini berarti target Tahun 2018 tidak tercapai.

- e. Inflasi mencapai 3,04 persen. Dengan demikian, tingkat capaian Inflasi Tahun 2018 sebesar 139,20 persen. Ini berarti target Tahun 2018 tercapai, bahkan melampaui target.
- f. Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 110,90 (bulan Desember 2018). Dengan demikian, tingkat capaian Nilai Tukar Petani Tahun 2018 sebesar 96,49 persen. Ini berarti target Tahun 2018 tidak tercapai.
- g. Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 8,17 persen. Dengan demikian, tingkat capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018 sebesar 93,90 persen. Hal ini berarti target Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018 belum tercapai.



Tabel 2.41
Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD 2013-2018						Capaian Indikator Kinerja 2013-2017					Evaluasi Capaian Di Akhir Tahun 2017
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
A. MISI 1 : MEMBANGUN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING														
Sasaran 1: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata														
1	Indeks Pembangunan Manusia	poin	73,40	74,25 – 74,75	74,75 – 75,50	69,56 – 70,91 (MB)	70,82 - 71,03	71,04 - 71,54	73,58	74,28 (ML)	74,72 (ML)	70,19 (MB)	70,69	Tidak tercapai
2	Indeks Pendidikan	poin	82,31	84,65	85,50	60,17 – 62,04 (MB)	88,00	89,00	58,08 (MB)	59,26 (MB)	59,95 (MB)	60,67 (MB)	61,63	Tercapai
3	Angka Melek Huruf	persen	97,00 - 97,50	97,50 – 98,00	98,00 – 98,50	98,50 – 99,00	99,00 – 99,50	99,00 – 99,50	96,87	98,29	98,29	98,78	12,76	Tercapai
4	Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten	tahun	8,20 - 8,25	8,25 – 8,30	8,30 – 8,50	8,50 – 8,75	8,75 – 9,10	9,10 – 9,50	8,09	7,69 (ML)	7,88 (ML)	5,63 – 8,89 (MB)	8,02	Tidak tercapai
5	Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota	tahun	9,25 - 11,00	9,50 – 11,25	9,75 – 11,50	10,25 – 11,75 (ML)	10,75 – 12,00	11,50 – 12,50	9,25	10,10 (ML)	10,19 (ML)	8,07 - 10,93 (ML)	9,82	Tercapai
6	APK Sekolah Menengah	persen	72,68	80,48	87,48	92,80	94,10	95,50	72,68	61,19	67,58	67,56	81,25	Tidak tercapai
7	APK Pendidikan Tinggi	persen	16-17	17 – 18	18 - 19	19 – 20	20-22	22-25	17,09	19,06	N/A	17,76	19,19	Tidak tercapai
Sasaran 2: Meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi semua serta perluasan akses pelayanan yang terjangkau dan merata														
8	Indeks Kesehatan	poin	72,60	75,60	76,53	81,17 – 82,74	81,18 - 81,48	81,49 - 81,54	73,06	73,33 (ML)	73,66 (ML)	81,05 (MB)	81,18	Tercapai
9	AHH (Angka Harapan Hidup)	tahun	68,70 - 68,9	69 - 69,2	70 - 70,25	70,5– 71	70,75 - 71,50	71 - 72	72,09	72,23	72,41	72,44	72,47	Tercapai
Sasaran 3: Meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan kelembagaan serta berbudaya IPTEK														
10	Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk mendapat HAKI	buah/ tahun	5	10	20	25	30	40	5	5	30	42	52	Tercapai



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD 2013-2018						Capaian Indikator Kinerja 2013-2017					Evaluasi Capaian Di Akhir Tahun 2017
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
11	Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12 tahun ke atas	orang	11.400.000	12.540.000	13.794.000	15.173.400	16.690.740	18.359.814	11.400.000	11.400.000	7.722.903	7.722.903	17.783.520	Tidak tercapai
Sasaran 4: Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga														
12	Indeks Pemberdayaan Gender	poin	69,70	70	72,02	73	69,40	69,65	69,57	68,87	69,02	71,15	N/A	Tercapai
B. MISI 2: MEMBANGUN PEREKONOMIAN YANG KOKOH DAN BERKEADILAN														
Sasaran 1: Jawa Barat sebagai daerah pertanian berbasis agrikultur														
13	Skor Pola Pangan Harapan	poin	72	74	76	78	80	82	74,90	74	78,3	81,0	84,30	Tercapai
14	Pencetakan Sawah Baru	Ha	400	5,000	25,000	50,000	80	100	400	5000	0	N/A	400	N/A
Sasaran 2: Meningkatkan daya saing usaha pertanian														
15	Nilai Tukar Petani (NTP)	poin	109 – 110	110 – 111	111– 112	112 – 113	113 - 114	114 - 116	109 – 110	105,16	105,06	108,06	108,39	Tidak tercapai
16	Sertifikasi Jaminan Mutu Pelaku Usaha Produk Pertanian	buah	130	205	305	415	540	690	130	N/A*)	0	120	2.756	Tidak tercapai
Sasaran 3: Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi														
17	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	63,01	64,00 – 65,00	65,00– 66,00	66,00 – 67,00	60,96	61,27	63,01	62,77	60,34	60,65	63,34	Tidak tercapai
18	PDRB Per Kapita (ADHB)	juta - rp	21,25 - 21,50	21,50 – 22,00	22,00 – 24,00	24,00 – 26,00	26,00 – 28,00	28,00 – 30,00	27,77	30,11	32,65	34,88	37,18	Tercapai
19	PDRB Per Kapita (ADHK)	juta - rp	8,5 - 9,0	9,00 – 9,50	9,50 – 11,00	11,00 – 13,00	13,00 – 15,00	15,00 – 17,00	24,12	24,97	25,85	26,92	27,96	Tercapai
20	Laju Pertumbuhan Ekspor	persen	5,5 – 6,0	6,0 – 6,5	6,5 - 7,0	7,0 – 7,5	3,50 - 4,00	4,00 - 4,50	- 6,29	5,64	5,65	2,93	11,54	Tidak tercapai
21	Nilai Investasi PMA – PMDN	trilyun-rp	76,52 – 85,55	85,55 – 95,81	95,81 – 107,79	107,79 – 121,80	121,80 - 138,85	138,85 - 154,00	93,52	108,89	121,51	143,04	162,72	Tercapai
22	Nilai Investasi PMDN	trilyun-rp	16 – 17	17 – 19	19 - 21	21 - 23	23 - 27	27 - 34	26,02	37,91	49,78	68,05	94,05	Tercapai



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD 2013-2018						Capaian Indikator Kinerja 2013-2017					Evaluasi Capaian Di Akhir Tahun 2017
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
23	Nilai Penanaman Modal Asing (PMA)	trilyun-rp	60 - 70	65 - 75	75 - 85	85 - 95	84,65	86,87	67,5	70,98	71,73	74,99	68,66	Tercapai
24	Nilai Investasi/PMTB ADHB	trilyun-rp	154,18 - 174,2	174,2 - 194,2	198,6 - 208,6	226,4 - 246,4	267,2 - 287,2	315,3 - 335,3	194,33	305,989	396,36	412,30	449,34	Tercapai
25	Inflasi	persen	9,15	6,0 - 7,0	6,3 - 7,3	6,3 - 7,3	4,0 - 5,0	4,0 - 5,0	9,15	7,60	2,73	2,75	3,63	Tercapai
Sasaran 4: Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan														
26	Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha	orang	5,750	6,250	7,250	7.750	7.75	7.75	5,750	5,101	8,365	14.868	11,996	Tercapai
27	Indek Daya beli / Indek Pengeluaran	poin	64,17	64,00	64,45	68,90 - 69,46	70,44	70,62	65,08	65.5 (ML)	66,16 (ML)	69,51	70,22	Tercapai
28	Daya Beli Masyarakat (ML)/Pengeluaran (MB)	ribu rupiah	644.041	645,000 (ML)	650,000 (ML)	9.610.827 - 9.781.956 (MB)	1.098	1.16	9.421 (MB)	9.447 (MB)	9.778 (MB)	10.035 (MB)	10.285 (MB)	Tercapai
Sasaran 5: Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional														
29	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen/tahun	5,2-5,8	5,90 - 6,50	6,20 - 6,80	6,3 - 6,9	5.5 - 5.76	5.76 - 5.81	6,06	5,07	5,03	5,66	5,29	Tidak tercapai
30	Indeks Gini	poin	0,4 - 0,39	0,38-0,37	0,37 - 0,36	0,36 - 0,35	0,39	0,38	0,41	0,40	0,43	0,40	0,39	Tercapai
C. MISI 3 : MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAHAN, PROFESIONALISME APARATUR, DAN PERLUASAN PARTISIPASI PUBLIK														
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi public														
31	Skala Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	skala 1 - 4	3	3	4	4	3,5	3,5	3	3	3	3,21	3,5	Tidak tercapai
32	Jumlah Penerbitan Perijinan	izin	39,029	42.931	47.224	51.946	52,000	52,000	33.783	40.868	48.741	44.362	17.818	Tidak tercapai
33	Pendapatan Asli Daerah	trilyun-rp	11,0	14,30	13,30	14,6	16,1	17,7	11,0	15,04	16,26	17,04	18,03	Tercapai



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD 2013-2018						Capaian Indikator Kinerja 2013-2017					Evaluasi Capaian Di Akhir Tahun 2017
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
34	Indikator Daya Saing Provinsi	ranking	6 - 5	5 - 4	4 - 3	3 - 2	2-1	2-1	6 - 5	5	N/A	2	2*	Tercapai
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis IPTEK														
35	Skala Komunikasi Organisasi	skala 1 - 7	3	3	3,5	4	5	6	N/A	N/A*)	2,74	4,97	5	Tercapai
36	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	poin	50	60	70	75	80	85	50	63	73	76,50	82,89	Tercapai
37	Indeks Persepsi Korupsi	poin	5,5	6	6,5	7	7,5	8	5,5	3,7	N/A	N/A	N/A*	N/A
Sasaran 3: Meningkatkan profesionalisme dan kualitas kesejahteraan aparatur														
38	Indeks Kebahagiaan	poin	55 - 57	57 - 59	59 - 61	61 - 63	63 - 65	63 - 65	65,11	67,66	N/A	N/A	69,58	Tercapai
Sasaran 4: Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum														
39	Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum	persen	57	60	63	65	68	70	57	71,3	62,58	62,58	71,36	Tidak tercapai
40	Indeks Demokrasi	poin	N/A	66,50 - 67,00	67,00 - 67,50	67,00 - 67,50	68,00 - 68,50	68,50 - 69,00	65,18	71,52	73,04	66,82	N/A	Tercapai
D.	MISI 4: MEWUJUDKAN JAWA BARAT YANG NYAMAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTURSTRATEGIS YANG BERKELANJUTAN													
Sasaran 1: Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana														
41	Jumlah Penduduk	jiwa	45.204.289	46.035.927	46.800.123	47.577.000	48.366,90	49.169,70	45,380,799	46.029.669	47.379.389	46.800.123	48.037.827	Tercapai
42	Persentase Tutupan Lahan yang Berfungsi Lindung terhadap Luas Wilayah	Persen	36 - 37	37 - 38	38 - 39	39 - 41	38-39	39-40	N/A	37,2	37,2	37,2	38,52	Tercapai
43	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen	2	4 - 3	5 - 4	5	6	7	7,70	9,57	10,23	11,45	12,56	Tercapai



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD 2013-2018						Capaian Indikator Kinerja 2013-2017					Evaluasi Capaian Di Akhir Tahun 2017
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
44	Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat cemar sedang	Persen	9,6 - 10,4	10,4 - 10,8	10,8 - 11,2	11,2 - 11,7	11,7 - 12,3	12,3 - 13	10,40	13,14	23,45	56,12	96,55	Tercapai
Sasaran 2: Meningkatkan kualitas pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat														
44	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi	persen	11,5 - 12,03	12,03 - 25,09	25,09 - 39,77	38,22	26,73	33,43	13,08	15,83	17,02	20,03	26,78	Tercapai
45	Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	persen	64-66	66 -71	67 - 72	72 - 77	72-74	74-76	65,98	67,37	69,65	67 - 72	73,95	Tercapai
46	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	persen	78-80	80 - 82	82 - 84	84 - 86	96 - 98	98 - 100	80,50	83,41	93,71	82 - 84	99,87	Tercapai
47	Cakupan Pelayanan Persampahan (Perkotaan)	persen	63-64	64 - 65	65 - 67	67 - 69	66,78	67,30	64,70	64,88	65,65	65 - 67	67,11	Tercapai
48	Cakupan Pelayanan Air Minum	persen	54-58	58 - 63	63 - 70	70 - 73	73 - 74	74 - 76	60,52	65,433	67,13	63 - 70	73,17	Tercapai
49	Cakupan Pelayanan Air Limbah (Domestik Perkotaan)	persen	63-63,50	63,5 - 64	64 - 65	65 - 67	67 - 68	68 - 69	63,40	63,59	65,03	64 - 65	67,01	Tercapai
Sasaran 3: Meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur														
51	Tingkat Kemantapan Jalan (kondisi baik dan sedang)	persen	93-93,70	97,10 - 97,4	97,20 - 97,50	97,3 - 97,6	98,15 - 98,25	98,50 - 98,60	97,56	97,68	97,80	98,01	98,17	Tercapai



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD 2013-2018						Capaian Indikator Kinerja 2013-2017					Evaluasi Capaian Di Akhir Tahun 2017
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
E.	MISI 5: MENINGKATKAN KEHIDUPAN SOSIAL, SENI DAN BUDAYA, PERAN PEMUDA DAN OLAH RAGA SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM BINGKAI KEARIFAN LOKAL													
Sasaran 1: Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)														
52	Angka Kemiskinan	persen	8,80-7,80	7,80 - 6,80	6,80 - 5,90	5,90 – 5,00	7,97	7,17	9,61	9,18	9,57	8,77	7,83	Tidak tercapai
53	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	9-8,80	8,50 - 8,00	8,00 - 7,50	7,50 – 7,00	8,0	7,7	9,16	8,45	8,72	8,89	8,22	Tidak tercapai
54	Jumlah PMKS yang Ditangani	orang	479.255	527.181	579. 899	637.888	701.677	771.845	479.255	2.582	643.618	643.618	710.539	Tercapai
55	Jumlah Pekerja Anak	orang	562.815	551.558	540.527	529.717	519.122	508.74	562.815	54	192.288	192.288	191.448	Tercapai
Sasaran 2: Meningkatkan peran pemuda, organisasi masyarakat dan prestasi olahraga serta penanganan komunitas tertentu														
56	Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Internasional	orang	1	2	3	3	4	5	N/A	0	0	7	15	Tercapai
Sasaran 3: Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan olahraga, seni budaya dan pariwisata														
57	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (target optimis)	700.000	810.000	950.000	1.100.000	1.500.000	1.750.000	877.868	902.735	1.067.271	1.754.715	2.038.319	700.000	Tercapai
58	Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional	10	10	10	10	10	10	4	5	3	8	5	10	Tercapai
Sasaran 4: Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama														
59	Tingkat Harmonisasi Kerukunan Antar Umat Beragama	poin	3	3	4	4	5	5	N/A	3,6	N/A	N/A	3,425	N/A

Sumber: diolah Bappeda, 2018



2.6. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sebagai komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan secara nasional dan global seperti diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama-sama dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota dan filantropi, organisasi masyarakat, serta akademisi telah membuat Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs untuk periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2023.

Penyusunan RAD SDGs Jawa Barat ini selain memperhatikan prinsip dasar pembangunan berkelanjutan yaitu *people, planet, prosperity, peace, dan partnership*, juga mengacu dan memperhatikan: (1) Sasaran, dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025; (2) Hasil evaluasi pelaksanaan MDGs Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2015; (3) Sembilan prioritas pembangunan (Nawacita) yang ada dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019; (4) RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018; dan (5) Prioritas Pembangunan yang tertuang dalam RKPD Jawa Barat Tahun 2019 sebagai bahan acuan untuk RPJMD 2018-2023 setelah pelantikan gubernur baru.

Pelaksanaan RAD SDGs Jawa Barat tahun 2017 menjadi gambaran awal pencapaian target indikator dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023, guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Adapun capaian indikator SDGs Jawa Barat tahun 2017 disajikan pada tabel dibawah ini.



Tabel 2.42
Capaian Indikator SDGs Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
Target Pencapaian Indikator Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan				
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	8,77	7,83
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	65	70
	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	12,06	12,63
	1.3.1.(c)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	2.825.431	4.139.860
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	78,09	79,57
	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	93,4	93,8
	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	74,88	75,3
	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	67,62	70,5



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	63,79	64,4
	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	10,83	8,08
	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	95,11	96,03
	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ sederajat.	82,44	77,87
	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.	52,18	57,59
	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	79,25	80,22
	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	99,75	99,78
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	5	5
Target Pencapaian Indikator Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan				
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	10,08	10,3



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	12,84	10,5
	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	11,25	11,42
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	34,58	34,56
	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	11,91	12,11
	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	25,1	24,8
	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	35,2	33,7
	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	59,13	59,82
	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	84,3	85,2



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	46.621,65	50.817,18
Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.	2.4.1	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	22	24
Target 2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianeka-ragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pertanian	2.5.1*	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.	6	8
	2.5.2*	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.	8	7
Target Pencapaian Indikator Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera				
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	89	88
	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.		



TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	78,09	79,57
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	35	34
	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	14	14
	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	4,01	3,63
	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	80	85
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	0,41	0,67
	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	23	23
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	6,95	6,7
	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	30,16	28,76
	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	8,33	7,83
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	74,88	75,3
	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	2,28	2,28



TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	65	70
	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	65	70
Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the <i>Framework Convention on Tobacco Control WHO</i> di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.	40,28	40,71
Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai <i>The Doha Declaration</i> tentang the <i>TRIPS Agreement and Public Health</i> , yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	77,94	80,38
Target Pencapaian Indikator Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas				
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	65,5	69,7
	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	72,8	76
	4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	68	71,8
	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	108,07	106,17



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	99,86	99,96
	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	67,56	76,62
	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	8,60	8,71
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	65,71	68,67
Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	19,19	23,29
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat;	97,82	97,96
		Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (2) SMP/MTs/ sederajat;	79,76	79,97
		Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (3) SMA/SMK/MA/ sederajat;	56,92	57,11
		Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	19,19	20,91



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	98,22	98,57
Target Pencapaian Indikator Tujuan 5 : Kesenjangan Gender				
Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	0	2
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	0,01	0,0044
	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	100	100
Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	46	45
	5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	76,62	81,25
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	19,32	19,32
	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	44,12	44,39
Target Pencapaian Indikator Tujuan 7 : Energi Terbarukan				
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	97,84	99,87
	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	1.184	1.155
	7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.	2.013	2.015



TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	83,89	86,33
Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	15,67	15,95
Target 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	7.3.1*	Intensitas energi primer.	23,9	24,1
Target Pencapaian Indikator Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi				
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita. (ADHK)	5,67	5,29
	8.1.1.(a)	PDRB per kapita. (ADHB)	34,88	37,18
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	7,33	6,40
	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	51,36	50,22
	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	3,6	3,01
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	14.868	11.996
	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	15.339	16.604
	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	8,89	8,55
Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	6,18	6,30
	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	5,79	4,30



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	4.428.094	4.984.035
	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	58.728.666	59.644.070
Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1*	Jumlah kantor bank	5.027	5.057
Target Pencapaian Indikator Tujuan 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur				
Target 9,1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua,	9,1,2,(b)	Jumlah dermaga penyeberangan,	3	3
	9,1,2,(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	10	10
Target 9,2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.	10,08	14,33
	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	28,56	26,03
Target 9.4 Pada tahun 2030. meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan. dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan. yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	11,45	12,56
Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	60,99	62,48
	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	27,92	31,39



TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
Target Pencapaian Indikator Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan				
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Koefisien Gini.	0,402	0,403
	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	8,77	7,83
	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	1.220	1.085
	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	10,00	13,48
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	634	100
	10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	-	-
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	37,64	38,44
Target Pencapaian Indikator Tujuan 17: Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan				
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	1,03	1,01
	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	0,95	0,92
Target Pencapaian Indikator Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak				
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	71,14	73,17



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	35	37
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	64,15	66,25
	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	3.945	4.358
	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	917	1,130
	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	27	27
	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	n.a	n.a
Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	23	23
	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	n.a	n.a



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	1,093	1,336
Target Pencapaian Indikator Tujuan 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan				
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	93,30 – 93,89	93,89 – 94,48
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	1	1
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	152.063 (325,5)	50.195 (105,9)
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	66,26	67,1
Target Pencapaian Indikator Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab				
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional	12.4.1.(a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU.	372	389



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	n.a	n.a
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1	Jumlah TPS3R yang dibangun	24	4
	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	30	34
Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	2.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	100	100
Target Pencapaian Indikator Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim				
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	5	5
	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	152.063 (325,5)	50.195 (105,9)
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	13.2.1*	Dokumen <i>Biennial Update Report</i> (BUR) Indonesia.	NA	NA
	13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	5	6
	13.2.2	Jumlah kota/kabupaten yang memiliki RAD-GRK	0	2
Target Pencapaian Indikator Tujuan 14: Ekosistem Lautan				
14. Ekosistem Lautan	14.2.1.(a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.	0	0



TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.	14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	32,25	34,96
Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.	14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	1	1
	4.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	35.000	19.000
Target Pencapaian Indikator Tujuan 15: Ekosistem Daratan				
Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	22,02	22,02
	15.1.2	Luas taman kehati	151,23	151,23
Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.	15.3.1	Proporsi lahan kritis terhadap luas lahan keseluruhan.	9,24	8,78
	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	3,8	5,4
Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1	Proporsi lahan kritis terhadap luas lahan keseluruhan.	9,24	8,78
	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	3.8	5.4



TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
Target 15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.	15.4.1	Persentase Tutupan Hutan	22.02	32.81
Target 15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai- nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1.(a).	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	0	0
Target 15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.	15.a.1.	Anggaran pemerintah daerah untuk konservasi dan keanekaragaman hayati	Rp8.718.000.000	Rp.9.988.585.550
Target Pencapaian Indikator Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh				
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	29,15	29,15
Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	40	54
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota).	WTP	WTP
	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	80,03 (A)	81,69 (A)



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	67,63(B)	71,64(BB)
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	20	20
	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	35	35
	16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	49,9	51,37
	16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.	73,37	67,64
	16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	72,34	62,79
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	75	78,6

Sumber: diolah Bappeda, 2018



Berdasarkan hasil analisis antara capaian indikator SDGS Tahun 2013-2017 dengan target yang harus dicapai pada periode RPJMD Tahun 2018-2023 diperoleh fokus pembangunan Jawa Barat. Dari 147 indikator TPB/SDGs yang terdapat pada Rencana Aksi Daerah SDGs Jawa Barat terdapat 3 (tiga) skala prioritas indikator pembangunan berkelanjutan yaitu: (1) Perlu prioritas tinggi sebanyak 69 indikator, (2) Perlu prioritas sedang sebanyak 27 indikator, (3) Perlu prioritas rendah sebanyak 51 indikator seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.43
Fokus Penyelesaian Target Indikator SDGS Jawa Barat
Periode 2018-2023

Goal	Perlu Prioritas Tinggi	Perlu Prioritas Sedang	Perlu Prioritas Rendah	Total Indikator
1. Tanpa Kemiskinan	6	5	5	16
2. Tanpa Kelaparan	10	2	2	14
3. Kehidupan sehat dan sejahtera	13	2	2	17
4. Pendidikan berkualitas	4	3	4	11
5. Kesetaraan Gender	4	0	3	7
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	6	1	3	10
7. Energi bersih dan terjangkau	3	1	2	6
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	6	3	4	13
9. Industri Inovasi dan Infrastruktur	2	4	2	8
10. Berkurangnya Kesenjangan	1	2	4	7
11. Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan	1	0	3	4
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab	3	0	2	5
13. Penanganan Perubahan Iklim	2	0	3	5
14. Ekosistem Lautan	1	0	3	4
15. Ekosistem Daratan	3	0	4	7
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh	2	4	5	11
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan	2	0	0	2
Jumlah	69	27	51	147

Sumber: RAD SDGs Jawa Barat, 2018

Berdasarkan tabel di atas, maka fokus penyelesaian indikator SDGs pada periode 2018-2023 berada pada 69 indikator dengan level perlu intervensi tinggi, khususnya pada tujuan: Tanpa Kemiskinan, Tanpa



Kelaparan; Kehidupan sehat dan sejahtera; Pendidikan berkualitas; Kesetaraan Gender; serta Air Bersih dan Sanitasi Layak.

2.7. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Pembentukan BUMD pada era 2000-an bertujuan untuk mengembangkan investasi daerah, memanfaatkan potensi daerah dan menangkap peluang usaha serta menggali sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan guna mendukung pembangunan daerah dan akses permodalan bagi KUMKM di Jawa Barat.

Di Provinsi Jawa Barat terdapat BUMD keuangan dan BUMD non keuangan. BUMD non keuangan di Jawa Barat, meliputi:

1. PT. Jasa dan Kepariwisata, dibentuk berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menjadi Perseroan Terbatas (Perusahaan Perseroan Daerah).
2. PT. Tirta Gemah Ripah, dibentuk berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pendirian PT. Tirta Gemah Ripah.
3. PT. Agronesia, dibentuk berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas Agronesia.
4. PT. Jasa Sarana Jawa Barat, dibentuk berdasarkan Perda Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT. Jasa Sarana Jawa Barat.
5. PT. Agro Jabar, dibentuk berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Agro.
6. PT. BIJB, dibentuk berdasarkan Perda Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity.
7. PT. Migas Hulu Jabar, dibentuk berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu.
8. PT. Migas Hilir Jabar, dibentuk berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hilir.
9. PD. Agribisnis dan Pertambangan dibentuk berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 1999 dan Perda Nomor 31 Tahun 2010.



Adapun BUMD keuangan di Jawa Barat, meliputi:

1. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, dibentuk berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2009 tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
2. PT. Jamkrida Jabar, dibentuk berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat.
3. PT. BPR Intan Jabar Kab. Garut dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Jawa Barat No. 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum PD BPR Hasil Merger di Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya menjadi Perseroan Terbatas.
4. PT. BPR Karya Utama Jabar Kab. Subang dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Jawa Barat No. 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum PD. BPR Hasil Merger di Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya menjadi Perseroan Terbatas.
5. PT. BPR Cianjur Jabar Kab. Cianjur dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Jawa Barat No. 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum PD BPR Hasil Merger di Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya menjadi Perseroan Terbatas.
6. PT. BPR Cipatujah Jabar Kab. Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Jawa Barat No. 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum PD. BPR Hasil Merger di Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya menjadi Perseroan Terbatas.
7. PT. BPR Wibawa Mukti Jabar Kab. Bekasi dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Jawa Barat No. 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum PD. BPR Hasil Merger Menjadi Perseroan Terbatas.
8. PT. BPR Artha Galuh Mandiri Jabar Kab. Ciamis dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Jawa Barat No. 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum PD. BPR Hasil Merger Menjadi Perseroan Terbatas.
9. PT. BPR Majalengka Jabar, dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Jawa Barat No. 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum PD BPR Hasil Merger Menjadi Perseroan Terbatas.



10. PD Bank Perkreditan Rakyat dibentuk berdasarkan Perda Povinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015.
11. PT Lembaga Keuangan Mikro dibentuk berdasarkan Perda Povinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015.

Permodalan BUMD yang dimaksud pada bagian ini adalah modal sendiri (ekuitas) yang diperoleh dari setoran modal pemegang saham. Modal pada BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas terbagi atas saham dan pemerintah daerah memiliki saham paling sedikit sebesar 51% atau dapat memiliki keseluruhannya atau sebesar 100%. BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas disebut Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda), sedangkan untuk BUMD yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) modalnya tidak terbagi atas saham. BUMD ini, seluruh modalnya dimiliki oleh satu Pemerintah Daerah. Bila pada kondisi pemilik modal Perumda lebih dari satu Pemerintah Daerah maka Perumda ini berubah bentuk hukumnya menjadi Perseda.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mengembangkan investasinya dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya penyertaan modal kepada BUMD baik untuk membeli dan menyetorkan setoran modal/saham kepada BUMD yang berbentuk Perseroda, atau menyetorkan modalnya kepada Perumda. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap BUMD dapat dilihat pada tabel pada halaman selanjutnya.

Realisasi setoran modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada BUMD **Rp. 7.097.917.965.115**, - (Tujuh Triliun Sembilan puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Lima Belas Rupiah). Pemenuhan setoran modal/saham tersebut dilakukan dengan mempertimbangan Peraturan Daerah terkait dengan pendirian masing-masing BUMD dan Perda terkait Penyertaan Modal kepada masing-masing BUMD, serta kebutuhan dan kelayakan penyertaan modal daerah. Kelayakan penyertaan modal pada PT Asuransi Bangun Askrida dan PT BPR Karawang Jabar telah dikaji dan dinyatakan layak oleh Penasihat Investasi Pemerintah Daerah (PIPD) walaupun 2 (dua) perusahaan tersebut bukan BUMD Jawa Barat.



Tabel 2.44
Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap BUMD

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA BUMD	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN S.D. 2019	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN
1.	2019	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk	Perda No. 11 Tahun 2009	2.040.000.000.000	1.092.498.683.464	947.501.316.536
2.	2007	PT. Agronesia	Perda No. 12 Tahun 2017	262.500.000.000	255.000.000.000	7.500.000.000
3.	2012	PT. Tirta Gemah Ripah	Perda No. 3 Tahun 2015	245.000.000.000	245.000.000.000	-
4.	2010	PT. Jasa Sarana Jawa Barat	Perda No. 2 Tahun 2010	1.020.000.000.000	700.000.000.000	320.000.000.000
5.	2007	PD Agribisnis dan PERTambangan	Perda No. 31 Tahun 2010	72.771.688.651	72.771.688.651	-
6.	2017	PT. Jasa dan Kepariwisata Jabar	Perda No. 3 Tahun 2018	3.500.000.000.000	2.851.333.000.000	648.667.000.000
7.	2012	PT. Jamkrida Jabar	Perda No. 17 Tahun 2012	153.000.000.000	153.000.000.000	-
8.	2012	PT. Asuransi Bngun Askrida	Perda No. 22 Tahun 2011	50.000.000.000	1.310.000.000	48.690.000.000
9.	2012	PT. Agro Jabar	Perda No. 18 Tahun 2012	76.500.000.000	30.000.000.000	46.500.000.000
10.	2013	PT. Bandar udara Internasional Jawa Barat	Perda No. 1 Tahun 2018	2.487.500.000.000	1.521.554.593.000	965.945.407.000
11	2013	PT. BPR Intan Jabar	Perda No. 10 Tahun 2016	44.880.000.000	7.000.000.000	37.880.000.000
		PT. BPR Karya Utama Jabar		35.700.000.000	5.996.750.000	29.703.250.000
		PT. BPR Cianjur Jabar		45.900.000.000	9.165.566.750	36.703.250.000
		PT. BPR Cipatujah Jabar		20.400.000.000	3.997.490.000	16.402.510.000
12	2014	PD. Bank Perkreditan Rakyat	Perda No. 6 Tahun 2015	27.342.390.000	27.342.390.000	-
13	2014	PT. Lembaga Keuangan Mikro	Perda No. 11 Tahun 2015	29.647.803.250	29.647.803.250	-
14	2014	PT. Migas Hulu Jabar	Perda No. 12 Tahun 2016	50.000.000.000	35.000.000.000	15.000.000.000
15	2014	PT Migas Hilir Jabar	Perda No. 11 Tahun 2014	140.000.000.000	35.000.000.000	105.000.000.000
16	2015	PT. BPR Wibawa Mukti Jabar	Perda No. 10 Tahun 2016	26.520.000.000	12.400.000.000	14.120.000.000
17	2015	PT. BPR Majalengka Jabar	Perda No. 10 Tahun 2016	9.996.000.000	6.800.000.000	3.196.000.000
18	2015	PT. BPR Artha Galuh Mandiri Jabar	Perda No. 10 Tahun 2016	4.080.000.000	2.200.000.000	1.880.000.000
19	2015	PT. BPR Karawang Jabar	Perda No. 10 Tahun 2016	6.075.000.000	900.000.000	5.175.000.000
Jumlah Total				10.347.812.881.901	7.097.917.965.115	3.249.894.916.786

Sumber: Bappeda, 2019



Jumlah penyertaan modal (investasi) yang termasuk pada kewajiban Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp. 10.347.812.881.901, - (Sepuluh Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribuan Sembilan Ratus Satu Rupiah). Adapun jumlah sisa modal yang belum disertakan dan menjadi kewajiban Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp. 3.249.894.916.786, - (Tiga Triliun Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribuan Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).

2.8. Kerja Sama Daerah

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengamanatkan bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama daerah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas layanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama daerah yang dilaksanakan terdiri dari kerja sama antar daerah, kerja sama dengan pihak ketiga serta kerja sama dengan badan atau pemerintah luar negeri.

Kebijakan kerja sama antar daerah diarahkan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Mengingat kerja sama antar daerah yang berbatasan bersifat wajib, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan mendorong dilaksanakannya kerja sama penyelenggaraan urusan di daerah yang berbatasan baik provinsi maupun kabupaten/kota yang memiliki eksternalitas lintas daerah, dampak negatif bersifat lintas daerah serta apabila urusan tersebut dipandang lebih efektif dan efisien dilaksanakan melalui kerja sama. Untuk itu akan disusun pemetaan urusan yang akan dikerjasamakan dengan daerah yang berbatasan (kerja sama wajib) dan memanfaatkan forum Musrenbang sebagai instrumen perencanaan kerja sama wajib.

Untuk kerja sama dengan pihak ketiga (swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga non pemerintah lainnya) dilaksanakan dalam kerangka pelayanan publik, pengelolaan asset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah, dan kerja sama investasi. Sedangkan kerja sama dengan pihak luar negeri diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya,



peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan serta promosi potensi daerah.

Melalui kolaborasi *stakeholder* pembangunan (pemerintah, akademisi, swasta, komunitas dan media) dan dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus berkomitmen dalam penyelenggaraan kerja sama daerah sebagai strategi penyelenggaraan pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat.

Tabel 2.45
Jumlah Kerja Sama Dalam Negeri, Antar Daerah, Daerah Dengan Pihak Ketiga di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2017

No	Bentuk Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama/Tahun					Jumlah
		2014	2015	2016	2017	2018	
Kerja Sama Dalam Negeri							
1	Kerja Sama antar Daerah	24	25	30	123	128	330
2	Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga	116	150	178	282	173	899
Kerja Sama Luar Negeri (dengan Pemerintah dan Lembaga Luar Negeri)							
3	LoI	-	3	3	6	1	13
	MoU	-	-	1	8	-	9
	Agreement/ Implementing Arrangement	3	2	-	3	4	12
Jumlah		143	180	212	422	306	1263

Sumber: Biro Pemerintahan dan Kerjasama, Setda Provinsi Jawa Barat, 2018

2.9. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, meliputi: SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat, SPM



Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Sosial.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menerapkan keenam SPM tersebut. Adapun rincian penerapan masing-masing jenis pelayanan dasar melalui program perangkat daerah terkait disajikan pada tabel dibawah.

**Tabel 2.46
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PERKIRAAN REALISASI 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
SPM PENDIDIKAN						
1	Pendidikan menengah	Program Pendidikan Menengah	1	APK SMA/SMK Sederajat	85%	Dinas Pendidikan
			2	APM SMA/SMK Sederajat	65%	
			3	SMA/SMK Sederajat Akreditasi A	10%	
			4	SMA yang Memenuhi Standar Sarana dan Prasarana	70%	
			5	SMK yang Memenuhi Standar Sarana dan Prasarana	70%	
2	Pendidikan khusus	Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	1	APK SLB	24%	Dinas Pendidikan
			2	Sekolah SLB Terakreditasi A	5%	
			3	SLB yang memenuhi standar sarana dan prasarana	20%	
SPM KESEHATAN						
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Program Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Akibat KLB Provinsi	1	Persentase penanganan kesehatan pada kejadian bencana dan paska bencana	100%	Dinas Kesehatan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		PERKIRAAN REALISASI 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi		2	Persentase penanganan kesehatan pada Kejadian Luar Biasa Penyakit	100%	
SPM PEKERJAAN UMUM						
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	1	Cakupan Pelayanan Air Minum	78%	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota		2	Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	69%	
SPM PERUMAHAN RAKYAT						
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Persentase Penanganan Hunian Rumah untuk Pendukung Pelaksanaan Program Pemerintah dan Pasca Bencana	100%	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi					
SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT						
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat	1	Jumlah penanganan kasus pelanggaran Perda dan Perkada	150 kasus	Satuan Polisi Pamong Praja
			2	Jumlah pemeliharaan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	800 kali	
			3	Jumlah kesiapsiagaan penanganan	100 kali	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		PERKIRAAN REALISASI 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				bencana oleh Satlinmas		
			4	Jumlah peningkatan kapasitas anggota Satlinmas di Jawa Barat	756 orang	
			5	Jumlah Pol PP dan PPNS yang terdidik dan berkompeten	520 orang	
SPM SOSIAL						
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial	1	Persentase PMKS yang pulih dan berkembang keberfungsian sosialnya	2,61%	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti					
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti					
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti					
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar	1%	Dinas Sosial
			2	Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya	100%	

Sumber: RKPD Tahun 2019



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan merupakan salah satu bab yang harus termuat dalam penentuan kerangka kebijakan menengah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat, dijabarkan sebagai berikut:

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan terhadap APBD serta analisis kinerja pelaksanaan APBD yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.



Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya. Secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD disajikan berikut ini:

a) Pendapatan Daerah

Secara umum komponen pendapatan terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian, dan Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah Lainnya.

Pendapatan daerah yang disajikan secara serial menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013-2017 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.



Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan (%)
4	PENDAPATAN	19.237.611.310.213	22.310.953.031.230	24.009.980.850.227	27.694.035.120.859	32.163.957.645.604	13,8%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	12.360.109.870.372	15.038.153.309.919	16.032.856.414.345	17.042.895.113.672	18.081.123.739.824	10,2%
4.1.1	Pendapatan Pajak daerah	11.236.145.853.981	13.753.760.402.652	14.617.071.393.160	15.727.483.589.791	16.483.085.760.842	10,3%
4.1.2	Pendapatan Retribusi daerah	63.654.937.210	70.081.405.577	73.404.322.719	73.564.738.396	60.273.043.774	-0,8%
4.1.3	Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	261.601.089.168	304.380.444.819	281.661.628.120	322.402.263.906	345.121.410.237	7,6%
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	798.707.990.013	909.931.056.871	1.060.719.070.346	919.444.521.579	1.192.643.524.971	11,7%
4.2	DANA PERIMBANGAN	2.950.532.545.672	3.260.505.636.017	2.506.877.511.840	10.622.671.443.683	13.981.445.314.589	85,7%
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.398.007.484.672	1.494.604.220.017	1.184.319.132.840	1.778.216.936.253	1.851.522.979.677	10,1%
4.2.2	Dana Alokasi Umum	1.472.453.011.000	1.687.686.386.000	1.303.654.355.000	1.248.112.171.860	3.011.001.477.000	32,2%
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	80.072.050.000	78.215.030.000	18.904.024.000	7.596.342.335.570	9.118.920.857.912	10006,4%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.926.968.894.169	4.012.294.085.294	5.470.246.924.042	28.468.563.504	101.388.591.191	48,8%
4.3.1	Pendapatan Hibah	20.092.101.669	22.232.854.794	22.869.295.542	23.468.563.504	23.799.491.191	4,4%
4.3.4	Dana Penyesuaian	3.906.876.792.500	3.990.061.230.500	5.447.377.628.500	5.000.000.000	7.500.000.000	-2,8%
4.3.3	Lain-lain Penerimaan	-	-	-	-	-	-
4.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi /Pemerintah Daerah lainnya	-	-	-	-	70,089,100,000	-

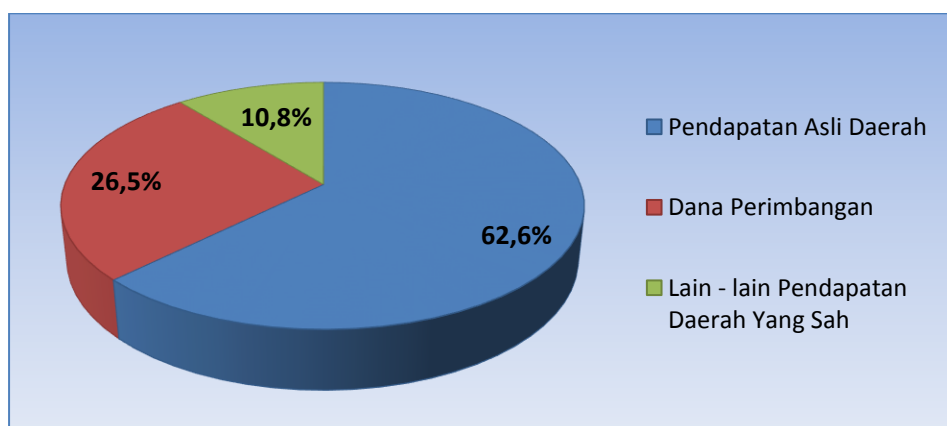
Sumber: LRA Tahun 2013-2017



Berdasarkan Tabel 3.1 diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan daerah cenderung meningkat rata-rata 13,8% selama 5 tahun, dengan kontribusi yang paling besar dari Lain-lain Pendapatan Asli daerah yaitu sebesar 11,7%. Adapun pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 85,7% pada Tahun 2013-2017, dimana tingkat pertumbuhan tertinggi berasal dari Dana Alokasi Khusus sebesar 10006,4%. Tingginya nilai ini dikarenakan adanya reklasifikasi posting kode rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2013-2015 pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Dana Penyesuaian. Kemudian sejak tahun 2016 direklasifikasi pada kelompok Dana Perimbangan dalam Dana Alokasi Khusus Non Fisik, sehingga apabila dirata-ratakan dari Tahun 2013-2017 kenaikannya sangat signifikan. Selain dari PAD dan Pendapatan Dana Perimbangan, sumber utama pendapatan daerah adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang mengalami peningkatan sebesar 48,8%. Peningkatan tersebut diakibatkan adanya Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah lainnya pada Tahun 2017 sebesar Rp 70.089.100.000 Sementara jumlah pendapatan dari Dana Penyesuaian menurun sebesar 2,8%, karena adanya reklasifikasi posting Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) semula pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah kemudian sejak Tahun 2016 direklasifikasi pada kelompok Dana Perimbangan.

Berikut ini disajikan grafik rata-rata proporsi realisasi pendapatan daerah Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017.

**Gambar 3.1.
Rata-Rata Komposisi Komponen Pendapatan Daerah
Tahun 2013-2017**



Sumber: LRA Provinsi Jabar 2013-2017, diolah



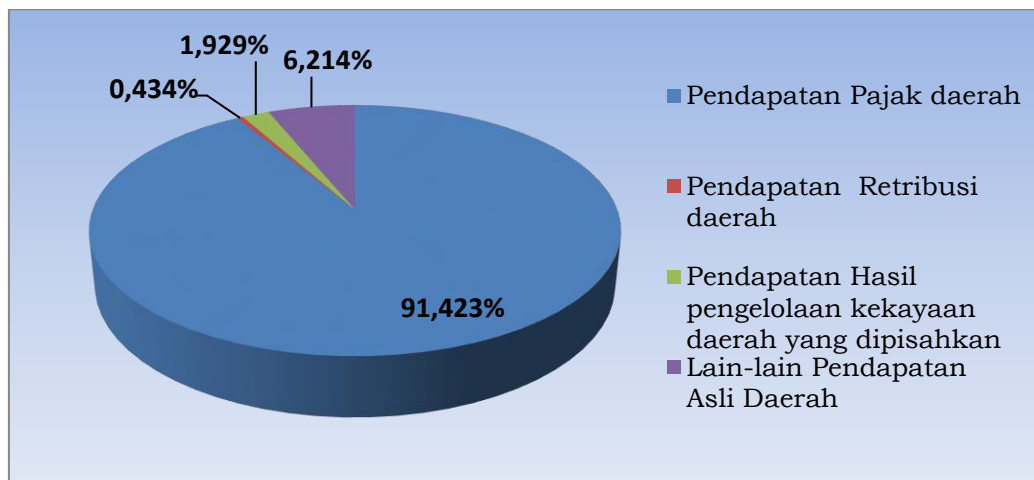
Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata proporsi komponen Pendapatan Daerah Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 terbesar berasal dari Pendapatan Pajak Asli Daerah yaitu sebesar 62,6%. Hal ini dengan proporsi Dana Perimbangan sebesar 26,5% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 10,8% dari seluruh total pendapatan.

Rincian dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 disajikan sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah

Rata-rata proporsi komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 terbesar berasal dari Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 91,42%. Sisanya terdiri dari lain-lain pendapatan asli daerah sebesar 6,21%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 1,93%, dan Pendapatan Retribusi Daerah sebesar 0,43%.

Gambar 3.2.
Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2013-2017

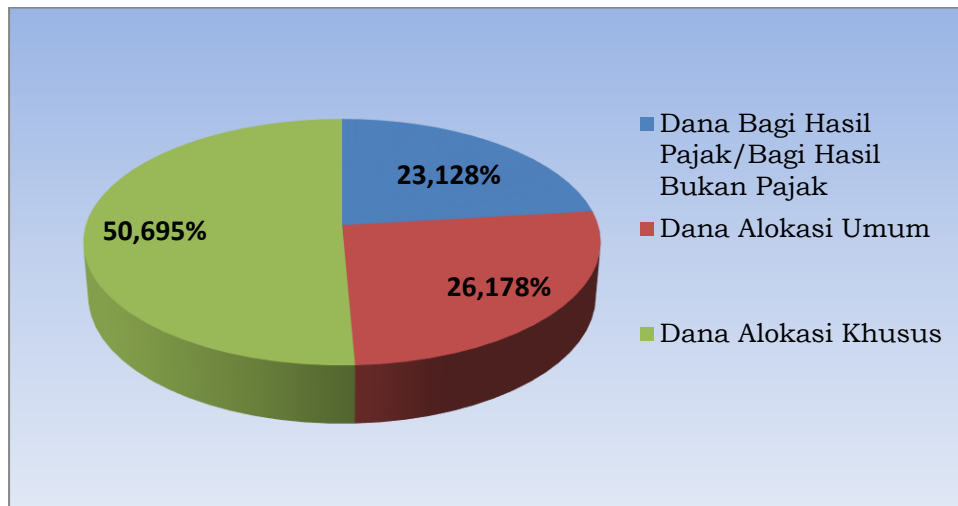


Sumber: Diolah dari LRA Provinsi Jabar 2013-2017

2. Dana Perimbangan

Komposisi dana perimbangan selama Tahun 2013-2017 berasal dari Dana Alokasi Khusus sebesar 50,69% dan Dana Alokasi Umum Sebesar 26,18%, sedangkan sisanya sebesar 23,13% merupakan Dana Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.

Gambar 3.3.
Rata-Rata Proporsi Komponen Dana Perimbangan
Tahun 2013-2017

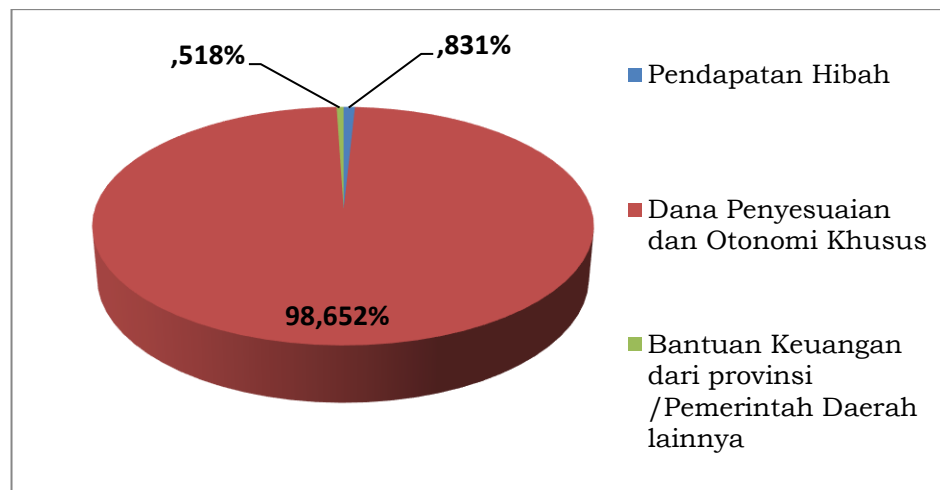


Sumber: Diolah dari LRA Provinsi Jabar 2013-2017

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penyumbang terbesar dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berasal dari Dana Penyesuaian sebesar 98,65%. sisanya sebesar 0,83% berupa Pendapatan Hibah dan 0,52% adalah lain-lain Penerimaan.

Gambar 3.4.
Rata-Rata Proporsi Komponen Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah Tahun 2013-2017



Sumber : Diolah dari LRA Provinsi Jabar 2013-2017

b) Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Secara umum komponen belanja terdiri dari:



- 1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada kabupaten/kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
- 2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat. Realisasi belanja daerah Tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel 3.2.



Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2017

Kode	Uraian	Realisasi (Tahun)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
5	BELANJA	18.396.745.323.179	20.797.988.465.006	24.417.605.860.513	27.621.964.467.242	32.706.749.485.376	15,50
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.724.113.007.857	16.958.816.393.654	19.256.280.145.688	21.748.500.641.497	25.804.945.655.137	15,08
5.1.1	Belanja Pegawai	1.535.932.801.908	1.569.541.693.357	1.671.229.142.927	1.835.034.492.249	5.152.653.055.073	49,82
5.1.3	Belanja Subsidi	2.940.521.000	6.805.400.000	18.990.870.500	14.999.772.000	14.758.266.000	71,97
5.1.4	Belanja Hibah	5.673.020.648.350	6.179.782.845.290	6.826.862.952.000	9.854.923.609.133	9.526.753.045.558	15,11
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	13.600.215.000	2.871.320.000	3.048.750.000	9.940.000.000	37.096.500.000	106,63
5.1.6	Belanja Bagi Hasil	3.994.277.231.373	5.461.539.028.033	6.406.192.657.944	6.393.271.239.759	6.902.132.882.595	15,45
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	3.504.341.590.226	3.738.146.028.076	4.329.955.772.317	3.640.311.644.356	4.171.504.088.911	5,29
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	130.078.898	-	19.884.000	47.817.000	-
5.2	BELANJA LANGSUNG	3.672.632.315.322	3.839.172.071.352	5.161.325.714.825	5.873.463.825.745	6.901.803.830.239	17,57
5.2.1	Belanja Pegawai	426.605.110.043	304.590.203.719	223.252.160.576	233.811.805.839	281.793.512.576	-7,51
5.2.2	Belanja Barang dan jasa	1.973.247.376.538	2.174.779.252.470	2.639.397.429.044	2.780.296.396.345	4.308.394.171.933	22,97
5.2.3	Belanja Modal	1.272.779.828.741	1.359.802.615.163	2.298.676.125.205	2.859.355.623.561	2.311.616.145.730	20,28

Sumber: LRA Tahun 2013-2017, diolah



Berdasarkan Tabel 3.2 diperoleh gambaran periode Tahun 2013-2017 bahwa pertumbuhan belanja mengalami pertumbuhan dengan rata-rata kenaikan sebesar 15,50%. Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 15,08%. Komponen Belanja Tidak Langsung terbesar pertumbuhannya adalah belanja sosial, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 106,34%. Pertumbuhan tersebut dikarenakan adanya kenaikan yang cukup signifikan pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2017 sebesar Rp 37.096.500.000 berarti terdapat kenaikan sebesar Rp 27.156.500.000.

Sedangkan dari data realisasi Belanja Langsung diperoleh bahwa terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun yaitu rata-rata sebesar 17,57%. Walau demikian secara bertahap terjadi penurunan komponen belanja pegawai rata-rata sebesar 7,51% selama periode 2013-2017. Kondisi ini mendorong peningkatan belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Tabel 3.3
Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2017

No	Uraian	2016	2017
A	Pendapatan Umum Daerah		
1	Pendapatan asli daerah	17.042.895.113.672	18.081.123.739.824
2	Dana Bagi Hasil	1.778.216.936.253	1.851.522.979.677
3	Dana Alokasi Umum	1.248.112.171.860	3.011.001.477.000
	Jumlah A	20.069.224.221.785	22.943.648.196.501
B	Belanja Pegawai		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	774.052.942.382	2.567.003.671.898
2	Tambahan penghasilan PNS	722.775.955.703	1.161.360.854.267
	Jumlah B	1.496.828.898.085	3.728.364.526.165
	Kemampuan Keuangan Daerah	18.572.395.323.700	19.215.283.670.336

Sumber : Diolah dari LRA Provinsi Jabar 2016-2017

Berdasarkan data tabel diatas dapat ditentukan kelompok kemampuan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017. Kemampuan keuangan daerah dihitung dari besaran pendapatan umum daerah dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 memiliki kemampuan keuangan daerah sebesar Rp 18.572.395.323.700 Nilai tersebut termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi. Sedangkan pada Tahun 2017 sebesar Rp



19.215.283.670.336 yang berarti nilai tersebut juga termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan daerah Tinggi.

c) Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Provinsi Jawa Barat terdiri dari:

- 1) Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah;
- 2) pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang; dan
- 3) Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan.

Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan pada Tabel 3.4 menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah Provinsi Jawa Barat.



Tabel 3.4
Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
6	PEMBIAYAAN DAERAH (netto)	2.745.605.824.020	3.136.108.941.804	3.891.871.624.714	3.271.852.254.627	3.036.248.951.611	3,80
6.1	Penerimaan Pembiayaan	2.934.630.824.020	3.494.683.941.804	4.551.871.624.714	3.650.427.254.627	3.348.123.951.611	5,31
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Silpa)	2.916.306.735.414	3.586.471.831.054	4.549.073.508.028	3.485.029.560.541	3.345.697.892.227	5,61
	Koreksi	-	(91.787.889.250)	-	-	-	-
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	18.324.088.606	-	2.798.116.686	165.397.694.086	-	-
6.1.8	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	-	-	-	-	2.426.059.384	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	189.025.000.000	358.575.000.000	660.000.000.000	378.575.000.000	311.875.000.000	28,38
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	119.025.000.000	358.575.000.000	610.000.000.000	378.575.000.000	311.875.000.000	53,96
6.2.5	Dana Bergulir	70.000.000.000	-	50.000.000.000	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	3.586.471.831.054	4.549.073.508.028	3.484.246.614.428	3.343.922.854.244	2.493.457.111.838	-6,51

Sumber: LRA Tahun 2013 -2017, diolah



Berdasarkan Tabel 3.4 diperoleh gambaran bahwa realisasi pembiayaan netto dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan rata rata sebesar 3,80%. Penerimaan pembiayaan mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 5,31%, sedangkan dari data realisasi pengeluaran pembiayaan diperoleh gambaran realisasi pengeluaran pembiayaan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yaitu rata-rata sebesar 28,38%.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu *entitas* pelaporan mengenai aset, utang dan *ekuitas* dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Provinsi Jawa Barat serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio *likuiditas* dan *solvabilitas*. Selanjutnya mengenai gambaran neraca Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu Tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel 3.5.

**Tabel 3.5
Neraca Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata - Rata Pertumbuhan (%)
ASET						
ASET LANCAR						
Kas Di Kas Daerah	3.480.110.450.294	4.530.256.803.058	3.459.266.840.057	3.315.803.533.501	2.404.194.947.419	-6,3%
Kas Di Bendahara Penerimaan	9.263.121	-	213.250	-	129441300	-
Kas Di Bendahara Pengeluaran	91.745.127.250	50.738.851	329.625.741	690.217.203	44.795.467.537	1737,3%
Kas Di BLUD	14.574.059.260	19.769.526.880	24.903.737.136	27.429.103.540	46.243.868.312	35,1%
Kas Lainnya	-	-	-	-	75.389.070	-
Piutang Pajak Dan Retribusi	6.894.533.741	5.277.222.115	-	-	-	-
Piutang Pajak	-	-	1.987.572.773.342	1.128.749.868.058	208.989.450.410	-
Piutang Retribusi	-	-	1.964.157.020	1.925.608.925	3.884.941.338	-
Piutang Lain - Lain PAD Yang Sah	-	-	-	64.780.902.087	80.236.170.745	-
Piutang BLUD	21.047.523.402	27.849.726.788	41.854.871.409	-	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	732.191.280	592.397.097	563.677.395	504.897.595	446.607.995	-11,5%
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	3.183.512.118	3.214.284.826	3.168.398.993	3.690.500.531	3.698.031.989	4,1%
Bagian Lancar Piutang Sewa	1.175.866.400	876.195.133	768.541.821	1.395.534.560	820.635.471	0,7%
Bagian Lancar Piutang Kerjasama	-	-	-	5.330.997.000	4.630.075.000	-
Piutang Lainnya	6.413.861.306	6.183.014.578	6.189.134.585	-	-	-
Penyisihan Piutang	-	-	-118.835.119.335	-129.115.859.784	-16.494.060.183	-
Penyisihan Piutang BLUD	-	-	-16.246.552.322	-	-	-
Beban Dibayar Dimuka	10.513.121.025	4.144.591.052	2.246.774.962	8.509.512.481	7.421.881.280	39,9%



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata - Rata Pertumbuhan (%)
Persediaan	133.600.854.477	165.859.270.702	119.210.109.468	217.188.565.589	235.735.480.747	21,7%
Persediaan BLUD	4.142.768.084	5.805.601.015	5.427.649.485	11.966.613.798	23.591.516.524	62,8%
JUMLAH ASET LANCAR	3.774.143.131.757	4.769.879.372.094	5.518.384.833.006	4.658.849.995.085	3.048.399.844.957	-2,0%
INVESTASI JANGKA PANJANG						
INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN						
Dana Bergulir	243.825.257.200	337.130.364.260	439.397.794.708	267.373.574.970	265.316.486.570	7,2%
Dana Penjaminan	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,0%
Penyisihan Dana Bergulir	-	-	-61.322.794.708	-53.473.574.970	-51.416.486.570	-
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN	248.825.257.200	342.130.364.260	383.075.000.000	218.900.000.000	218.900.000.000	1,7%
INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.412.059.648.000	3.934.927.303.932	4.816.921.935.617	5.907.651.621.623	9.100.789.072.117	28,6%
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN	3.412.059.648.000	3.934.927.303.932	4.816.921.935.617	5.907.651.621.623	9.100.789.072.117	28,6%
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	3.660.884.905.200	4.277.057.668.192	5.199.996.935.617	6.126.551.621.623	9.319.689.072.117	27,1%
ASET TETAP						
Tanah	6.957.295.449.652	7.526.033.539.503	8.220.334.492.471	8.865.243.125.716	11.458.684.421.322	13,6%
Peralatan dan Mesin	1.622.927.007.616	1.902.384.969.393	2.288.227.089.078	2.816.907.751.955	4.523.831.967.246	30,3%
Gedung dan Bangunan	1.780.795.799.472	2.012.114.650.160	2.319.146.011.948	2.778.442.415.043	6.422.981.747.622	44,8%
Jalan, Jaringan dan Instalasi	6.520.612.954.190	6.790.702.576.992	7.145.536.334.038	7.134.806.709.143	7.678.593.819.862	4,2%
Aset Tetap Lainnya	38.800.016.528	43.147.680.771	45.648.970.080	80.245.207.457	482.803.913.007	148,6%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	70.463.631.556	206.678.646.522	696.785.048.687	1.085.315.941.948	1.045.971.403.432	120,6%
Akumulasi Penyusutan	-	-	-7.133.000.193.744	-7.264.174.288.881	-9.766.444.558.447	-
JUMLAH ASET TETAP	16.990.894.859.013	18.481.062.063.341	13.582.677.752.558	15.496.786.862.381	21.846.422.714.045	9,3%
ASET LAINNYA						
Bagian Jangka Panjang Piutang Tuntutan Ganti Rugi	49.536.375	28.354.167	12.125.000	36.081.458	-	-0,6%
Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa	390.295.300	243.554.888	-	939.000.867	398.504.367	-
Bagian Jangka Panjang Piutang Kerjasama	-	-	-	166.759.570.655	162.129.495.655	-
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	514.464.446.000	493.045.596.000	493.045.596.000	1.080.898.492.938	1.080.898.492.938	28,8%
Aset Tak Berwujud	61.895.670.653	97.014.903.991	116.833.277.765	146.318.803.358	194.400.566.850	33,8%
Aset Lain - Lain	504.235.912.086	495.807.666.125	800.290.212.785	1.555.978.842.946	2.581.188.965.521	55,0%
Akumulasi Amortisasi	-	-	-27.333.214.225	-30.860.083.853	-39.806.528.292	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	-109.413.329.230	-915.717.666.096	-819.270.558.285	-
JUMLAH ASET LAINNYA	1.081.035.860.414	1.086.140.075.170	1.273.434.668.094	2.004.353.042.273	3.159.938.938.754	33,2%
JUMLAH ASET	25.506.958.756.384	28.614.139.178.798	25.574.494.189.275	28.286.541.521.361	37.374.450.569.874	11,1%
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata - Rata Pertumbuhan (%)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	21.859.854	-	1906612730	-
Pendapatan Diterima Dimuka	50.415.750	1.031.318.812	4.720.061.878	5.625.378.264	6.403.208.704	584,1%
Utang belanja	-	-	312.288.201.728	473.156.258.351	436.417.579.331	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	10.318.734.785	13.945.654.782	-	-	-	-
Utang Bagi Hasil Pajak-Retri-busi kepada Pemkab/Pemkot	570.761.380.360	479.980.343.735	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	581.130.530.895	494.957.317.329	317.030.123.460	478.781.636.615	444.727.400.766	-1,7%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja - BLUD	679.418.738	901.054.186	-	-	-	-
Kewajiban Jangka Panjang Lainnya	-	-	932.493.254	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	679.418.738	901.054.186	932.493.254	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	581.809.949.633	495.858.371.515	317.962.616.714	478.781.636.615	444.727.400.766	-1,8%
EKUITAS						
EKUITAS	24.925.148.806.751	28.118.280.807.283	25.256.531.572.561	27.807.759.884.746	36.929.723.169.107	11,4%
JUMLAH EKUITAS	24.925.148.806.751	28.118.280.807.283	25.256.531.572.561	27.807.759.884.746	36.929.723.169.107	11,4%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	25.506.958.756.384	28.614.139.178.798	25.574.494.189.275	28.286.541.521.361	37.374.450.569.874	11,1%

Sumber: Neraca Provinsi Jawa Barat 2013-2017

a) Aset

Aset pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat selama periode Tahun 2013-2017 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,1%, dengan rata-rata pertumbuhan untuk masing-masing jenis aset antara lain investasi jangka panjang rata-rata naik sebesar 1,7%, aset tetap peningkatan dengan rata-rata turun sebesar 9,3%. Sedangkan aset lancar mengalami penurunan sebesar 2,0%.

b) Kewajiban

Kewajiban pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat selama periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 mengalami penurunan dengan rata-rata 1,8%, kewajiban jangka pendek penurunan dengan rata-rata sebesar 1,7% serta pada Tahun 2017 tidak memiliki kewajiban jangka panjang.



c) Ekuitas Dana

Perkembangan ekuitas Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2013-2017 tumbuh rata-rata sebesar 11,4%. Berdasarkan dari neraca Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, maka hasil analisa perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas disajikan sebagaimana tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6
Analisis Rasio Keuangan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	6,49	9,64	17,41	9,73	10,28
2	Rasio cepat (<i>quick ratio</i>)	6,26	9,29	17,01	9,25	15,95
3	Rasio total hutang terhadap total asset	0,02	0,02	0,01	0,02	0,01
4	Rasio hutang terhadap modal	0,02	0,02	0,01	0,02	0,01

Sumber: Hasil perhitungan, 2018

Hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan solvabilitas yang positif. Analisis keduanya disajikan sebagai berikut.

A. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis kondisi keuangan Provinsi Jawa Barat yaitu:

1. Rasio lancar (*current ratio*)

Rasio lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan tabel di atas, rasio lancar pada tahun 2013 adalah sebesar 6,49 dan tahun 2017 sebesar 10,28.

2. Rasio cepat (*quick ratio*)

Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar. *Quick ratio* menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel



di atas, quick rasio pada tahun 2013 sebesar 6,26 serta periode tahun 2017 *quick rasio* sebesar 15,95. Hal ini berarti kemampuan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

B. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. *Solvable* berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya, jadi rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio *solvabilitas* terdiri atas:

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Besar rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2013 sebesar 0,02 dan pada tahun 2017 sebesar 0,01. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

2. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2013 rasio hutang terhadap modal pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 0,02 serta periode tahun 2017 sebesar 0,01. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Provinsi Jawa Barat, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang.

3.1.3. Kinerja Pendanaan Non APBD

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan Provinsi Jawa Barat selain bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan



yang dikelola oleh Perangkat Daerah di kabupaten/kota maupun perangkat daerah provinsi.

Tabel 3.7
Perkembangan Pendanaan APBN (Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013–2017

Pagu Dana	Jenis APBN		Jumlah
	Dekonsentrasi	Tugas Pembantuan	
2013	1.057.619.548.000,00	864.220.603.000,00	1.921.840.151.000,00
2014	360.214.143.000,00	900.244.748.000,00	1.260.458.891.000,00
2015	535.487.821.000,00	685.366.350.000,00	1.220.854.171.000,00
2016	631.685.958.000,00	633.389.036.000,00	1.265.074.994.000,00
2017	436,495,090,000,00	431,243,048,000,00	867,738,138,000,00

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, diolah 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan pendanaan APBN pada 5 (lima) tahun terakhir adalah terjadi kenaikan dan penurunan yang cukup besar dan Tahun 2017 berada pada posisi menurun. Penurunan ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tiga Menteri Bappenas, Kementerian Keuangan RI, Kemendagri RI yang menyatakan pemindahan pengalokasian pendanaan APBN dari Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dialihkan ke Dana Alokasi Khusus (DAK). Pelaksanaan penggunaan yang pendanaannya bersumber dari Dana APBN Tahun Anggaran 2016, paling besar digunakan untuk pembiayaan program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan, program peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura ramah lingkungan, program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, dengan nilai anggaran belanja sebesar Rp. 563,3 Milyar. Selain itu juga digunakan untuk pembiayaan program pengelolaan sumber daya air (operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sda, jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat yang dioperasikan dan dipelihara, layanan perkantoran) dengan anggaran sebesar Rp. 105,4 Milyar.

b. Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Selain APBN pendanaan pembangunan non APBD Jawa Barat yang lainnya adalah Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Sampai dengan saat ini



sudah terdaftar sebanyak 161 mitra PKBL dan TJSL Jawa Barat. Mitra PKBL dan TJSL diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun turut juga berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Dalam artian bahwa tanggung jawab sosial yang dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan nilai tambah dari masyarakat tetapi tanggung jawab ini haruslah berkesinambungan sampai waktu yang cukup panjang.

Program Pembangunan yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL adalah program yang kesinambungan atau sustainability serta berdampak positif terhadap masyarakat, penekanan kepada 3 (tiga) hal tersebut bahwa bantuan yang diberikan dirancang memiliki dampak yang berkelanjutan karena kerjasama program pembangunan PKBL dan TJSL berbeda dengan donasi bencana alam yang bersifat tidak terduga dan tidak dapat di prediksi. Program yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL harus berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Dukungan kerjasama pendanaan untuk pelaksanaan program pembangunan di Jawa Barat yang bersumber dari TJSLP/PKBL dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.8
Rekapitulasi Pendanaan TJSLP/PKBL BUMD
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017

TAHUN	REALISASI		
	PD. Jasa & Kepariwisata	PT Bank BJB. Tbk	PT Jasa Sarana
2013	66.185.000	12.424.330.360	1.780.478.100
2014	55.347.500	17.308.357.887	955.000.000
2015	64.140.000	12.584.260.942	1.440.000.000
2016	94.926.800	21.582.752.378	660.000.000
2017	41.000.000	13.746.936.053	
Jumlah	321.599.300	77.646.637.620	4.835.478.100

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, diolah 2018



Tabel 3.9
Rekapitulasi Pendanaan Kegiatan TJSPL/PKBL BUMN
Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2017

NO	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH REALISASI					
		2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	Perum Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO)	38.000.000	557.549.000	413.264.000	40.000.000	112.916.590	40.000.000
2	Perum Jasa Tirta II		909.473.500	1.229.128.800	865.209.500	1.373.626.250	4.820.090.500
3	Perum Perhutani Unit III		676.087.850	286.050.000	7.520.344.623	427.694.500	404.087.500
4	PT Adhi Karya		2.293.278.750	857.500.000	396.596.000	678.543.000	472.456.209
5	PT Aneka Tambang (ANTAM)	2.550.000.000	7.521.576.514	4.825.862.901		2.947.804.271	5.373.366.973
6	PT Angkasa Pura II (Husen Sastranegara)		1.939.214.444	2.561.011.155	371.898.415	1.226.450.707	799.322.630
7	PT Asuransi Abri (ASABRI)	443.307.000	1.461.990.000	331.954.000	49.360.000		
8	PT Asuransi Jasa Indonesia		392.000.000	406.277.000	450.000.000	370.000.000	811.150.000
9	PT Asuransi Kesehatan		98.000.000				
10	PT Bank Mandiri	1.950.000.000	2.781.346.223	2.346.160.666	662.319.500	2.394.227.052	3.249.799.238
11	PT Bank Negara Indonesia (BNI)	150.000.000		2.274.197.834	2.751.393.651		21.300.542.618
12	PT Bank Rakyat Indonesia (BRI)		4.302.463.267	3.930.637.000	3.748.741.000	4.490.670.000	19.366.083.000
13	PT Bio Farma	19.713.610.722	9.727.926.326	12.680.822.681	16.473.450.576	16.409.829.982	14.013.363.166
14	PT Brantas Abipraya					619.625.000	
15	PT Hutama Karya						
16	PT Jasa Marga Cab. Purbaleunyi		1.211.496.550	403.521.250	1.000.000.000	1.662.852.750	2.597.627.250
17	PT Jasa Raharja		800.280.000	2.964.220.000	240.850.000	1.109.713.700	1.110.500.000
18	PT LEN Industri			597.125.000	337.000.000	456.495.650	914.425.000
19	PT Nindya Karya						
20	PT Pegadaian		815.467.000	278.877.700	133.770.750	1.666.747.750	3.168.669.807
21	PT Pelabuhan Indonesia II Cirebon		607.750.000		16.850.000	492.900.000	1.630.373.249
22	PT Pembangunan Perumahan						
23	PT Perkebunan Nusantara VIII	1.800.000.000				5.294.928.000	168.025.000
24	PT Pertamina (SR PP Regions JBB)	1.200.000.000			4.335.837.528	10.921.472.652	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH REALISASI					
		2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
25	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Kamojang		7.730.088.764	6.394.406.448	3.464.948.475	4.549.054.210	4.583.807.125
26	PT Pertamina EP					11.547.455.548	8.964.388.555
27	PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)		1.913.623.000	4.816.309.099	530.000.000	4.618.069.416	17.752.613.140
28	PT Pindad		1.675.902.300	321.128.750	187.594.750	295.223.520	515.018.600
29	PT Pos Indonesia Kanwil Bandung				1.061.800.000	679.862.500	756.176.000
30	PT Prashada Pamunah Limbah (PPLI/WMI)		434.500.000	976.900.000	445.100.000	265.100.000	457.491.000
31	PT Pupuk Kujang		1.990.361.400		1.803.703.450	2.560.625.200	1.744.744.200
32	PT Sucofindo		1.206.000.000	1.361.000.000			
33	PT Taspen				214.576.000		171.900.000
34	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk		19.050.335.000	43.348.378.000	443.264.800	65.135.097.515	51.322.809.500
35	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)					2.355.000.000	39.500.000
36	PT Waskita Karya		507.187.000				
37	PT Wijaya Karya						
JUMLAH		27.844.917.722	70.603.896.888	93.604.732.284	47.544.609.018	144.661.985.763	166.548.330.260

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, Bappeda



Berdasarkan tabel diatas untuk realiasi program CSR/TJSLP perusahaan yang bersumber dari BUMN di Jawa Barat selama kurun waktu 6 (enam) tahun untuk anggaran tertinggi dilakukan oleh PT Biofarma, sedangkan untuk peringkat kedua dilakukan oleh PT Pertamina *Geothermal Energy* (PGE) Area Kamojang dan peringkat ketiga dilakukan oleh perusahaan PT Aneka Tambang.

Dengan melihat pertumbuhan/perkembangan peminatan para perusahaan sebagai mitra CSR Jabar dari kalangan BUMN di Jawa Barat terhadap misi kemanusiaan (pembangunan 1000 Ruang Kelas Baru) dan lingkungan maka pencapaiannya perlu ditingkatkan terus melalui sosialisasi Program CSR Jabar kepada seluruh perusahaan BUMN di Jawa Barat. Sosialisasi ini dengan melibatkan Kementerian BUMN RI sebagai Pembina para perusahaan BUMN khususnya untuk wilayah perusahaan-perusahaan BUMN di Jawa Barat. Hal ini dimaksudkan supaya tercipta sinergi dan sinkronisasi program CSR/TJSLP antara Tim Fasilias CSR Jabar dengan semua perusahaan BUMN yang ada di Jawa Barat yang berjumlah 112 perusahaan BUMN.

Data pada tabel dibawah menyajikan realiasi program CSR/TJSLP perusahaan yang bersumber dari swasta di Jawa Barat selama kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir. Untuk anggaran tertinggi bersumber dari PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (Citeureup-Bogor), sedangkan untuk peringkat kedua bersumber dari *Chevron Geothermal* Indonesia Ltd, dan peringkat ketiga dari perusahaan *Chevron Geothermal* Salak Ltd.

Perkembangan pendanaan kegiatan TJSL dan PKBL di Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan dan penurunan yang besar, hal tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.23. Pada periode 2012 sampai dengan 2017, jumlah pendanaan kegiatan TJSL dan PKBL tertinggi terjadi pada Tahun 2016 sebesar Rp 255.277.123.564. Kondisi ini mengalami penurunan pada Tahun 2017 menjadi Rp 242.837.534.754.



Tabel 3.10
Rekapitulasi Pendanaan Kegiatan TJSLP/PKBL Swasta di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2017

NO	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH REALISASI				
		2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	Chevron Geothermal Indonesia Ltd. (Drajat - Garut)	3.716.500.000	2.520.500.000	10.813.500.000	7.545.700.000	
2	Chevron Geothermal Indonesia Ltd. (Salak)	8.337.967.575	579.028.390	6.417.364.875	6.043.395.500	
3	PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart)	1.222.600.605		790.553.580	2.268.500.000	1.888.860.000
4	PT Astra International	3.090.000.000		830.000.000	28.309.882.447	
5	PT Bank Danamon, Tbk Kanwil Jabar			23.200.000		
6	PT Belfoods Indonesia	40.918.800		4.400.000	72.006.300	61.932.500
7	PT Bakti Usaha Menanam Nusantara (BUMN) Hijau Lestari			2.807.100.000	99.990.000	
8	PT Coca Cola Amatil Indonesia			219.627.250	1.127.423.900	857.172.567
9	PT Indocement Tunggal Prakarsa (Citeureup-Bogor) Tbk	8.230.951.560	5.685.630.093	9.435.011.586	9.663.913.886	6.140.845.720
10	PT Indocement Tunggal Prakarsa (Palimanan-Cirebon) Tbk	4.945.596.334	5.719.631.634		5.601.998.315	1.558.082.150
11	PT Indocement Tunggal Prakarsa Non Plant (Bandung Barat) Tbk					274.650.000
12	PT Indonesia Power UP Kamojang	1.524.463.300	4.540.341.000	356.211.500	4.180.620.941	4.389.187.276
13	PT Indonesia Power UP Saguling					4.025.478.740
14	PT Indonesia Power UJP PLTU Jawa Barat 2 Pelabuhanratu					577.923.000
15	PT Jababeka Tbk.	4.506.420.000	625.000.000	1.712.221.070		
16	PT Maligi Permata Industrial Estate (KIIC)	881.950.056	539.566.300	694.179.520	158.570.000	1.519.361.601
17	Kawasan Industri & Pergudangan Marunda Center - Bekasi	367.595.220	1.344.864.427	402.400.000	2.056.904.586	430.187.100
18	PT Megalopolis Manunggal Industrial Development (MM 2100)				445.933.765	
19	PT Pikiran Rakyat Bandung					
20	PT Pindo Deli			3.395.000.000		
21	PT Putera Sampoerna Foundation	6.910.000.000	4.083.810.000		2.975.000.000	
22	PT Sari Ater	149.847.500	94.209.000		233.715.150	139.848.000
23	PT Sinkona Indonesia Lestari				75.500.000	
24	PT Telkomsel	1.100.000.000		400.000.000		385.081.633
25	PT Tirta Investama - Danone Aqua		1.831.410.714			
26	PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia				1.725.000.000	8.552.694.385
27	PT Trans Retail Indonesia			500.000.000		
28	Star Energy Geothermal Darajat	5.256.700.000				8.799.635.000



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH REALISASI				
		2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
29	PT HM Sampoerna, Tbk			2.700.523.217		
30	PT Kino Indonesia			167.734.200	181.132.000	71.162.500
31	PT Glostar Indonesia (Cikembar)			150.903.000	115.019.291	115.097.000
32	PT Glostar Indonesia (Sukalarang)			123.774.000	34.000.000	85.900.000
33	PT JX Nippon Oil & Energy Lubricants Indonesia			7.900.000	13.700.000	33.450.000
34	PT Sharp Semiconductor Indonesia			161.900.000	386.500.000	561.880.000
35	PT Harapan Anang Bakri and Sons			358.041.400		
36	PT PJB Muara Tawar				1.995.349.661	2.150.438.600
37	PT Jababeka Tbk				1.765.218.697	2.113.342.826
38	PT Menara Terus Makmur				96.500.000	56.400.000
39	PT CONWOOD INDONESIA				306.375.000	
40	PT Mane Indonesia				33.140.000	
41	PT Loreal Manufacturing Indonesia				93.000.000	93.000.000
42	PT Komatsu Undercarriage Indonesia				118.500.000	569.695.000
43	PT MMC Metal Fabrication				62.800.000	49.968.000
44	PT T.RAD INDONESIA					63.676.662
45	PT Supernova Flexible Packaging				42.125.000	
46	PT Showa Indonesia MFG				320.132.000	372.850.000
47	PT Nippon Steel and Sumikin Materials Indonesia				48.000.000	84.920.000
48	PT Bekasi Power				1.142.000.000	
49	PT Bakrie Pipe Industries					764.203.919
50	PT FCC Indonesia				100.300.000	315.500.000
51	PT Marugo Rubber Indonesia				19.000.000	38.200.000
52	PT Indocement Tunggal Prakarsa Non Plant (Bandung Barat) Tbk				668.825.000	
53	PT Iwatani Industrial Gas Indonesia				3.012.305.102	500.000
54	PT Chiyoda Integre Indonesia				90.383.900	
55	PT Yutaka Manufacturing Indonesia				409.391.825	440.470.000
56	PT Astra Honda Motor				3.274.589.357	
57	PT Freyabadi Indotama				41.851.000	30.000.000
58	PT TD Automotive Compressor Indonesia				479.200.000	393.750.000
59	PT Suryacipta Swadaya				844.066.000	371.856.000
60	PT Asin Indonesia					362.164.750
61	PT Aisin Indonesia Automotive					151.965.000
62	PT BPR Cipatujah Jabar					316.501.650
63	PT SAN-N-Garmino					28.060.000
64	PT Holcim Indonesia Tbk					880.240.000



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH REALISASI				
		2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
65	PT Pratama Abadi Industri					2.918.729.320
66	PT Sugity Creatives					1.031.454.417
67	PT Procter & Gamble					302.806.000
68	PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia					828.700.000
69	PT Surya Cipta Swadaya					371.856.000
70	PT Nestle Indonesia					828.700.000
71	PT Astra Daihatsu Motor					723.142.250
72	PT Federal Nittan Industries					197.525.000
73	PT Kayaba Indonesia					379.372.500
74	PT Nusa Keihin Indonesia					24.875.000
75	PT Denso Indonesia					251.412.000
76	PT Astra Komponen Indonesia					47.775.000
77	PT Honda Lock Indonesia					104.960.000
78	PT Kawai Indonesia					214.500.000
79	PT Fuji Technica Indonesia					98.095.655
80	PT P&G Operation Indonesia					302.806.000
81	PT Pakoakuina					151.965.000
82	PT Autoplastik Indonesia					113.965.000
83	PT Musashi Auto Parts Indonesia					240.561.000
84	PT Federal Izumi Manufacturing					222.000.000
85	PT Mitra Karawangjaya					244.947.500
86	PT Inti Ganda Perdana					150.885.000
87	PT Aatra Daido Steel Indonesia					38.247.800
88	PT Astra Otoparts Tbk					350.164.500
89	PT AT Indonesia					238.465.000
90	PT Astra Visteon Indonesia					66.294.375
91	PT Astra Otoparts Tbk. Divisi Adiwira Plastik					349.813.625
92	PT Astra Otoparts Divisi WINTEQ					1.165.860.000
93	PT Wiraswasta Gemilang Indonesia					367.078.720
94	PT Voith Paper Rolls Indonesia					30.000.000
95	PT Exedy Manufacturing Indonesia					28.180.200
JUMLAH		.281.510.950	27.563.991.558	42.471.545.198	88.277.458.623	62.501.268.441

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, Bappeda



Tabel 3.11
Perkembangan Pendanaan Kegiatan TJSL/PKBL
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017

NO	JENIS PERUSAHAAN	NILAI TOTAL INVESTASI PRGRAM TJSL/PKBL JAWA BARAT				
		2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	BUMD	14.270.993.460	18.318.705.387	14.088.400.942	22.337.679.178	13.787.936.053
2	BUMN	70.603.896.888	93.604.732.284	47.544.609.018	144.661.985.763	166.548.330.260
3	SWASTA	50.281.510.950	27.563.991.558	42.471.545.198	88.277.458.623	62.501.268.441
Jumlah		135.156.401.298	139.487.429.229	104.104.555.158	255.277.123.564	242.837.534.754

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, Bappeda



c. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Mulai banyak pemerintah daerah yang menyadari pentingnya kontribusi dari pihak swasta dalam mendorong pencapaian dari Target Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs).

Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu, teknologi, efisiensi dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumber daya publik yang tepat maka hal ini dapat berkontribusi lebih untuk pembangunan berkelanjutan. Namun melibatkan pihak swasta membutuhkan lingkungan yang stabil serta didukung dengan peraturan dan kerangka regulasi yang kuat, persiapan kelembagaan yang jelas, dan faktor lainnya yang penting untuk “menciptakan pangsa pasar”.

Persoalan lain adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang diinginkan atau diharapkan. Artinya, masih banyak bidang-bidang lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, dan agama yang juga membutuhkan penyerapan anggaran dari APBD. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Pada kondisi inilah kemudian skema pembiayaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dapat menjadi solusi. Prinsip dari skema ini tidak lain dan tidak bukan adalah gotong royong. Melalui skema pembiayaan KPBU ini, pemerintah, BUMN/BUMD, serta swasta bahu-membahu dalam membiayai untuk mengakselerasikan pembagunan.

Kegiatan di Jawa Barat yang telah didanai dari KPBU adalah proyek TPPAS Regional Legok Nangka, dimana ruang lingkup yang di kerjasamakan melalui KPBU adalah Pengelolaan sampah padat perkotaan sejumlah 1.800 ton per hari yang bersumber dari 6 Kabupaten (Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Garut) yang berlokasi di Legok Nangka,



Jawa Barat, selain itu juga Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) dengan kapasitas 18 MW, dan Perjanjian Jual Beli Listrik dengan PLN. Mekanisme Pembayaran : Pembayaran Ketersediaan yang bersumber dari anggaran tipping fee provinsi Jawa Barat dan penjualan listrik dari PLN.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Kebijakan Pendapatan

Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat merupakan perkiraan yang terukur secara Nasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari: sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi CPDP, UPT, UPPD dan Balai Penghasil.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan.
4. Meningkatkan *deviden* BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
5. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
6. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.
7. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.
8. Pemantapan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
9. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.



Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPH OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan;
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan; dan
3. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan kabupaten/kota untuk obyek pendapatan sesuai wewenang provinsi.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut.

1. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui:
 - a. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
 - b. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - c. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - d. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui *drive thru*, Gerai Samsat dan *Samsat Mobile*, layanan SMS, pengembangan Samsat Outlet, dan Samsat Gendong serta e-Samsat;
 - e. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di seluruh kantor bersama/samsat dengan menggunakan parameter iso 9001-2008;
 - f. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
 - g. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta



- mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan;
- h. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah; dan
 - i. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil.
2. Strategi pencapaian target dana perimbangan, dilakukan melalui:
- a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 - b. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil;
 - c. Peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan *lifting* migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi; dan
 - d. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).
3. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang sah, strategi yang ditempuh melalui:
- a. Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri;
 - b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat; dan
 - c. Pembentukan lembaga pengelola dana masyarakat.



3.2.2. Kebijakan Belanja

Belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program penjabaran kebijakan perangkat daerah untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi gubernur dan wakil gubernur. Adapun Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari beberapa komponen yaitu belanja pegawai, belanja subsidi, belanja bagi hasil, belanja hibah, belanja bantuan sosial belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Kebijakan belanja daerah, sebagai berikut:

1. Memprioritaskan belanja untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan pilihan;
2. Memprioritaskan pemenuhan rencana pembangunan RPJMD Tahun 2013-2018;
3. Sinkronisasi prioritas pembangunan RPJMN Tahun 2010-2014 dan RPJMN Tahun 2015-2019;
4. Pendukung terhadap pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG`s) dan *Sustainable Development Goals* (SDG`s);
5. Pemenuhan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Belanja Daerah;
6. Pemenuhan anggaran fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10% dari total belanja APBD diluar gaji;
7. Pemenuhan anggaran fungsi infrastruktur sekurang-kurangnya 10% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
8. Pengalokasian Bantuan keuangan kabupaten/kota, bantuan desa, hibah, Bansos dan subsidi sebagai implementasi kebijakan perimbangan keuangan antara provinsi dan kabupaten/kota;
9. Pengalokasian Anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Belanja Operasional Sekolah (BOS) Pusat, Pajak Rokok sesuai dengan peruntukan yang di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan; dan



10. Mengalokasikan anggaran untuk kepentingan nasional serta kebutuhan penting dan mendesak lainnya.

Belanja daerah, dari tahun ke tahun relatif mengalami kenaikan. Pada Tahun 2017 belanja tidak langsung mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan belanja daerah tahun 2016, dikarenakan pada tahun 2017 ada kenaikan pada Belanja Pegawai sebagai konsekuensi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini ditandai dengan beralihnya gaji dan tunjangan tenaga kependidikan SMA/SMK seiring dengan beralihnya pengelolaan sekolah menengah dari urusan kabupaten/kota menjadi urusan provinsi, sehingga besaran belanja pegawai mengalami kenaikan yang signifikan.

3.2.3. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan penyertaan modal dan pendukung penyaluran Kredit Cinta Rakyat (KCR). Khusus untuk investasi pembelian surat berharga (pembelian saham) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 menyatakan bahwa investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila APBD diperkirakan surplus serta pemerintah daerah harus memenuhi kewajibannya untuk melayani masyarakat dan membangun daerah melalui APBD terlebih dahulu, sebelum merencanakan untuk berinvestasi. Apabila APBD diperkirakan surplus saat pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA), maka rencana investasi pemerintah daerah akan disetujui dengan membuat perencanaan dan kajian investasi. Sedangkan kebijakan pengeluaran diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai berikut:



1. Pemerintah daerah dapat melakukan percepatan pembangunan (khususnya melalui peningkatan pelayanan publik);
2. Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi pemerintah daerah;
3. Pemerintah daerah memiliki independensi dalam menentukan nilai obligasi yang akan diterbitkan, tingkat bunga/kupon, jangka waktu, peruntukan, dll;
4. Peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang aktivitas perekonomian; dan
5. Promosi kepada pihak luar melalui publikasi di pasar modal akan mampu menarik investor menanamkan modalnya yang dapat melebihi nilai penerbitan obligasi daerah.

3.2.4. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Provinsi Jawa Barat pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang.

a. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Provinsi Jawa Barat.



Tabel 3.12
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2017

Kode	Uraian	2013			2014			2015		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
5	BELANJA	20.054.069.975.958	18.396.745.323.179	91,74	24.225.747.390.906	20.797.988.465.006	85,9	27.752.682.415.573	24.417.605.860.513	87,98
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	15.810.155.638.384	14.724.113.007.857	93,13	19.372.474.878.534	16.958.816.393.654	87,5	21.686.438.822.087	19.256.280.145.688	88,79
5.1.1	Belanja Pegawai	1.648.209.654.391	1.535.932.801.908	93,19	1.706.329.491.689	1.569.541.693.357	92	1.778.690.298.085	1.671.229.142.927	93,96
5.1.3	Belanja Subsidi	10.000.000.000	2.940.521.000	29,41	10.000.000.000	6.805.400.000	68,1	20.000.000.000	18.990.870.500	94,95
5.1.4	Belanja Hibah	6.063.165.928.140	5.673.020.648.350	93,57	6.886.319.731.400	6.179.782.845.290	89,7	7.643.860.862.000	6.826.862.952.000	89,31
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	23.845.670.000	13.600.215.000	57,03	8.186.000.000	2.871.320.000	35,1	17.000.000.000	3.048.750.000	17,93
5.1.6	Belanja Bagi Hasil	4.084.468.094.706	3.994.277.231.373	97,79	5.804.361.085.247	5.461.539.028.033	94,1	6.597.238.772.635	6.406.192.657.944	97,1
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	3.926.881.520.149	3.504.341.590.226	89,24	4.646.350.570.198	3.738.146.028.076	80,5	5.544.350.892.459	4.329.955.772.317	78,1
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	53.584.770.998	-	-	310.928.000.000	130.078.898	-	85.297.996.908	-	-
5.2	BELANJA LANGSUNG	4.243.914.337.574	3.672.632.315.322	86,54	4.853.272.512.372	3.839.172.071.352	79,1	6.066.243.593.486	5.161.325.714.825	85,08
5.2.1	Belanja Pegawai	463.222.796.032	426.605.110.043	92,1	332.511.928.187	304.590.203.719	91,6	250.088.838.048	223.252.160.576	89,27
5.2.2	Belanja Barang dan jasa	2.258.501.758.953	1.973.247.376.538	87,37	2.472.566.360.718	2.174.779.252.470	88	2.989.975.605.854	2.639.397.429.044	88,27
5.2.3	Belanja Modal	1.522.189.782.589	1.272.779.828.741	83,62	2.048.194.223.467	1.359.802.615.163	66,4	2.826.179.149.584	2.298.676.125.205	81,34



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

(lanjutan)

Kode	Uraian	2016			2017			Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Rata-Rata Penyerapan (%)
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%		
5	BELANJA	29.493.210.807.883	27.621.964.467.242	93,66	34.429.026.041.552	32.706.749.485.376	95,00	0,98	90,86
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	22.807.901.948.556	21.748.500.641.497	95,36	26.755.432.696.561	25.804.945.655.137	96,45	0,99	92,25
5.1.1	Belanja Pegawai	1.964.995.266.290	1.835.034.492.249	93,39	5.199.192.018.051	5.152.653.055.073	99,10	1,59	94,33
5.1.3	Belanja Subsidi	15.000.000.000	14.999.772.000	100	15.000.000.000	14.758.266.000	98,39	43,67	78,17
5.1.4	Belanja Hibah	10.180.627.452.113	9.854.923.609.133	96,8	9.863.495.294.372	9.526.753.045.558	96,59	0,90	93,19
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	18.380.000.000	9.940.000.000	54,08	47.479.445.000	37.096.500.000	78,13	39,68	48,45
5.1.6	Belanja Bagi Hasil	6.572.457.593.224	6.393.271.239.759	97,27	6.968.418.260.973	6.902.132.882.595	99,05	0,35	97,06
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	4.027.435.706.096	3.640.311.644.356	90,39	4.507.759.030.986	4.171.504.088.911	92,54	1,34	86,15
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	29.005.930.833	19.884.000	0,07	154.088.647.179	47.817.000	0,03	-	0,02
5.2	BELANJA LANGSUNG	6.685.308.859.327	5.873.463.825.745	87,86	7.648.250.315.188	6.901.803.830.239	90,24	1,23	85,76
5.2.1	Belanja Pegawai	260.145.578.711	233.811.805.839	89,88	302.752.764.886	281.793.512.576	93,08	0,29	91,19
5.2.2	Belanja Barang dan jasa	3.097.185.938.161	2.780.296.396.345	89,77	4.599.883.412.734	4.308.394.171.933	93,66	1,77	89,41
5.2.3	Belanja Modal	3.327.977.342.455	2.859.355.623.561	85,92	2.745.614.137.567	2.311.616.145.730	84,19	1,38	80,29

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017



Berdasarkan Tabel 3.12 dari data realisasi rata-rata pertumbuhan Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Tahun 2013-2017 sebesar 0,98%, dengan rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Langsung sebesar 0,99% dan Belanja Langsung sebesar 1,23%. Adapun realisasi penggunaan belanja dibandingkan dengan anggaran yang tersedia Tahun 2013-2017 rata-rata sebesar 90,86%, dengan rata-rata penggunaan belanja dibandingkan dengan anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar 92,25% dan Belanja Langsung sebesar 85,76%.

b. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Provinsi Jawa Barat ditampilkan pada Tabel 3.13 sebagai berikut:



Tabel 3.13
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
A.	Belanja Tidak Langsung	1.500.499.027.584	1.530.166.584.036	1.619.550.838.569	1.773.445.657.923	4.017.200.548.841
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	650.134.087.400	672.897.326.285	731.450.717.945	774.052.942.382	2.567.003.671.898
2	Belanja Tambahan Penghasilan	614.849.359.279	621.315.680.874	632.816.883.316	722.775.955.703	1.161.360.854.267
3	Biaya Pemungutan Pajak	2.000.800.009	1.367.298.903	583.204.313	-	-
4	Insentif Pemungutan Pajak	221.935.751.900	222.693.523.750	242.999.229.400	264.639.927.050	273.404.127.200
5	Insentif Pemungutan Retribusi	953.036.261	1.128.754.224	1.008.803.595	1.257.832.788	1.190.895.476
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	10.625.992.735	10.764.000.000	10.692.000.000	10.719.000.000	14.241.000.000
B.	Belanja Langsung	623.763.196.535	633.764.832.911	656.713.871.000	789.558.297.701	905.086.486.633
1	Belanja Honorarium PNS Provinsi	28.252.193.500	25.055.815.250	26.871.610.500	31.572.820.993	23.144.909.840
2	Honorarium PNS Non Provinsi	61.528.129.620	19.802.106.000	20.351.032.800	20.722.697.000	163.350.980.781
3	Belanja Uang Lembur	9.294.982.161	9.035.668.050	8.599.336.100	-	-
4	Uang Jahit Pakaian	946.942.500	2.072.771.000	-	-	-
5	Belanja Premi Asuransi	5.966.374.182	6.405.768.979	5.064.209.106	5.513.820.598	1.955.648.940
7	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.338.520.930	6.092.651.900	6.738.005.097	12.264.864.949	12.172.495.780
8	Belanja Pakaian Kerja	5.414.521.200	6.401.877.435	9.593.182.125	6.986.987.868	6.438.821.909
9	Belanja Pakaian Khusus dan Hari2 Tertentu	7.845.639.550	13.186.122.500	20.165.368.090	22.260.116.873	24.404.787.124
10	Belanja Perjalanan Dinas PNS Provinsi	312.483.706.478	309.558.764.319	312.717.314.956	352.429.933.350	364.241.337.693
11	Belanja Perjalanan Dinas PNS Non Provinsi	2.010.960.405	25.765.106.853	7.502.370.816	11.394.042.515	8.862.533.308
12	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	-	-	-	-



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
13	Belanja Pemulangan Pegawai	593.500.000	1.066.500.000	760.000.000	130.500.000	45000000
14	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	6.699.177.400	5.770.157.000	5.838.280.400	4.603.764.825	3876678773
15	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	22.741.753.441	13.532.437.443	9.503.200.813	11.845.732.381	17266301385
16	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, Peralatan dan Perlengkapan)**	156.646.795.168	190.019.086.182	223.009.960.197	309.833.016.349	279.326.991.100
TOTAL		2.124.262.224.119	2.163.931.416.947	2.276.264.709.569	2.563.003.955.624	4.922.287.035.474

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Provinsi Jabar 2013-2017



Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017

No	Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100 (%)
1	2013	2.124.262.224.119	18.585.770.323.179	11,43
2	2014	2.163.931.416.947	21.256.563.465.006	10,18
3	2015	2.276.264.709.569	25.077.605.860.513	9,08
4	2016	2.563.003.955.624	28.000.539.467.242	9,15
5	2017	4.922.287.035.474	33.018.624.485.376	14,91

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Provinsi Jabar 2013-2017

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif menurun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, tahun 2013 persentasenya sebesar 11,43% dan tahun 2016 sebesar 9,15%. Pada tahun 2017 persentasenya meningkat menjadi sebesar 14,91%, namun dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih besar dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan.

c. Analisis Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dapat dilihat pada Tabel 3.15 berikut:



**Tabel 3.15
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
A	Belanja Tidak Langsung	5.532.001.327.445	7.032.871.910.190	8.079.296.780.359	8.230.543.439.314	10.990.886.096.284	19,4%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	650.134.087.400	672.897.326.285	731.450.717.945	774.052.942.382	2.567.003.671.898	62,4%
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	614.849.359.279	621.315.680.874	632.816.883.316	722.775.955.703	1.161.360.854.267	19,4%
3	Biaya Pemungutan Pajak	2.000.800.009	1.367.298.903	583.204.313	-	-	-
4	Insentif Pemungutan Pajak	221.935.751.900	222.693.523.750	242.999.229.400	264.639.927.050	273.404.127.200	5,4%
5	Insentif Pemungutan Retribusi	953.036.261	1.128.754.224	1.008.803.595	1.257.832.788	1.190.895.476	6,8%
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	10.625.992.735	10.764.000.000	10.692.000.000	10.719.000.000	14.241.000.000	8,4%
7	Gaji dan Tunjangan DPRD	22.254.245.251	26.194.269.963	28.335.365.207	36.970.404.579	43.418.766.132	18,4%
8	Gaji dan Tunjangan Gubernur/Wakil Gubernur	219.529.073	220.839.358	220.228.151	223.129.747	214.653.410	-0,5%
9	Belanja Penerimaan Lainnya Gubernur/Wakil Gubernur	12.960.000.000	12.960.000.000	23.122.711.000	24.395.300.000	25.681.538.000	22,3%
10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	3.988.455.644.448	5.455.461.772.660	6.405.426.901.111	6.392.971.712.365	6.902.132.882.595	15,5%
11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota	5.821.586.925	6.077.255.373	765.756.833	-	-	-
12	Belanja Bagi Hasil Kepada Pihak Ketiga	-	-	-	299.527.394	-	-
13	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.791.294.164	1.791.188.800	1.874.979.488	2.237.707.306	2.237.707.306	6,0%
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	119.025.000.000	458.575.000.000	660.000.000.000	378.575.000.000	311.875.000.000	67,2%
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	119.025.000.000	458.575.000.000	660.000.000.000	378.575.000.000	311.875.000.000	67,2%
	TOTAL A+B	5.651.026.327.445	7.491.446.910.190	8.739.296.780.359	8.609.118.439.314	11.302.761.096.284	19,8%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Jabar 2013-2017, diolah



3.2.5. Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Berikut ini disajikan penghitungan penutup defisit riil anggaran pada periode 2013 sampai 2017.



Tabel 3.16
Penutup Defisit Riil Anggaran Periode Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Relisasi Tahun (Rp)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	PENDAPATAN DAERAH	19.237.611.310.213	22.310.953.031.230	24.009.980.850.227	27.694.035.120.859	32.163.957.645.604
2	BELANJA DAERAH	18.396.745.323.179	20.797.988.465.006	24.417.605.860.513	27.621.964.467.242	32.706.749.485.376
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	189.025.000.000	458.575.000.000	660.000.000.000	378.575.000.000	311.875.000.000
A.	Defisit Riil	651.840.987.034	1.054.389.566.224	-1.067.625.010.286	-306.504.346.383	-854.666.839.772
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:						
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	2.916.306.755.414	3.586.471.831.054	4.549.073.508.028	3.485.029.506.541	3.345.697.892.227
2	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	18.324.088.665	-	2.798.116.686	165.397.694.086	2.426.059.384
3	Koreksi	-	-91.787.889.250	-	-	-
B.	Total Realisasi Penerimaan	2.934.630.844.079	3.494.683.941.804	4.551.871.624.714	3.650.427.200.627	3.348.123.951.611
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		3.586.471.831.113	4.549.073.508.028	3.484.246.614.428	3.343.922.854.244	2.493.457.111.839

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Provinsi Jabar 2013-2017



Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Data SiLPA lima tahun terakhir menunjukkan nilai yang fluktuatif. Selama kurun waktu 2013 sampai 2017, nilai SiLPA tertinggi pada tahun 2014 yaitu Rp 4.549.073.508.028 Posisi SiLPA pada Tahun 2017 sebesar Rp 2.493.457.111.839. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.17 berikut ini:

Tabel 3.17
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Jawa Barat
Periode Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata - Rata Pertumbuhan (%)
1	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	2.916.306.755.414	3.586.471.831.054	4.549.073.508.028	3.485.029.506.541	3.345.697.892.227	5,6%
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-
3	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	2.916.306.755.414	3.586.471.831.054	4.549.073.508.028	3.485.029.506.541	3.345.697.892.227	5,6%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Jabar 2013-2017, diolah

Analisis yang dapat dilakukan untuk mendapat gambaran realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.18 berikut ini:



Tabel 3.18
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Jawa Barat
Periode Tahun 2013-2017

URAIAN	2013		2014		2015		2016		2017		Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2013	% dari SiLPA (%)	2014	% dari SiLPA (%)	2015	% dari SiLPA (%)	2016	% dari SiLPA (%)	2017	% dari SiLPA (%)	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	3.586.471.831.054		4.549.073.508.028		3.484.246.614.428		3.343.922.854.244		2.493.457.111.839		
Bersumber Dari:											
Pelampauan Pendapatan	1.857.447.640.223	51,79	1.017.891.603.625	22,38	28.081.719.930	0,81	1.202.775.273.754	36,00	792.322.488.099	31,78	28,55
Penghematan Belanja	1.657.324.652.779	46,21	3.427.758.925.900	75,35	3.335.076.555.060	95,72	1.871.246.340.641	56,00	1.696.933.526.372	68,06	68,27
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	18.324.088.606	0,51	-	-	2.798.116.686	0,08	166.180.586.199	5,00	4.201.097.367	0,17	-
Penghematan Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	25.000.000.000	0,70	-	-	-
Penghematan Pembiayaan Netto	53.375.449.446	1,49	103.422.978.503	2,27	118.290.222.752	3,4	78.720.653.650	2,40	-	-	-

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Provinsi Jabar 2013-2017



3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun komponen dari pendapatan daerah, meliputi: Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pada proyeksi pendapatan daerah terdapat beberapa asumsi yang menjadi dasar proyeksi, diantaranya asumsi proyeksi pajak, PKB (pajak kendaraan bermotor) tahun 2018-2023 mengalami kenaikan setiap tahunnya, dengan rata-rata kenaikan sebesar Rp.630,741 milyar atau sebesar 8,27% per tahun. Proyeksi BBNKB dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 bersifat flat. Proyeksi disusun berdasarkan estimasi penjualan per tahun sebanyak 1.296.000 unit KBM, terdiri dari estimasi kendaraan roda empat sebanyak 1,1 juta dengan *marketshare* sebesar 18% atau setara 198.000 unit KBM, dan estimasi penjualan kendaraan bermotor roda dua sebanyak 6,1 juta dengan *marketshare* sebesar 18% atau setara 1.098.000 unit KBM, serta mempertimbangkan rencana kenaikan tarif BBNKB-I dari 10% menjadi 12,5% mulai Tahun 2019.

Lebih lanjut, penetapan proyeksi pendapatan retribusi relatif stagnan dan tidak menggambarkan kenaikan penerimaan. Hal ini disebabkan terdapat perubahan kebijakan yang memberikan dampak terhadap penurunan total penerimaan. Kebijakan dimaksud adalah perubahan kewenangan dialihkannya pemungutan tera-tera ulang dari pemerintah



provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota. Selain itu terjadi perubahan pola pengelolaan keuangan dari retribusi daerah menjadi PPK BLUD untuk Rumah Sakit Paru, Rumah Sakit Jiwa dan Balai Kesehatan Paru masyarakat. Perubahan kewenangan ini paling tidak sudah mengurangi pendapatan kurang lebih Rp. 43 milyar.

Struktur pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah diperoleh dari pendapatan jasa giro, pendapatan bunga atas penempatan deposito, pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan atas pengelolaan Sampah regional dan pemanfaatan aset oleh pihak ketiga. Pendapatan denda pajak daerah diharapkan diperoleh dari dampak gencarnya pemerintah Provinsi melakukan penelusuran kendaraan yang tidak mendaftarkan ulang. Sementara pendapatan dari pengelolaan sampah regional dimana pemerintah provinsi menyediakan tempat pembuangan akhir dan pengolahannya diharapkan memberikan trend meningkat sejalan dengan pertumbuhan produksi sampah di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

Terkait proyeksi Dana Perimbangan, penyusunan target dana bagi hasil pajak/bukan pajak periode 2018-2023 secara umum terdapat kenaikan sebesar 4,27% per tahun. Kenaikan tersebut mempertimbangkan rerata realisasi dana bagi hasil pajak sebesar 4,99% per tahun dan penurunan dana bagi hasil bukan pajak sebesar 3,27% per tahun pada periode 2013-2017. Penyusunan target DAU berdasarkan rerata pertumbuhan realisasi DAU tahun 2012-2016, yang tumbuh sebesar 0,86% dan hasil konsultasi dengan Kasubdit DBH Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan. Penyusunan target DAK bersifat flat dengan *baseline* Tahun 2018, mempertimbangkan tidak ada perubahan yang fundamental terkait perhitungan alokasi, nilai tahun-tahun sebelumnya yang dianggap masih relevan sebagai perkiraan target.

Sementara penyusunan Proyeksi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah berdasarkan pertumbuhan penerimaan hibah dari pihak ketiga selama kurun waktu 2014-2017 sebesar 3,57% per tahun. Pertumbuhan ini telah memperhitungkan estimasi dana insentif daerah dari pemerintah.

Pada sisi lain, terdapat belanja daerah yang merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat yang



terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah Tahun 2019 berdasarkan angka APBD Tahun 2019. Sedangkan proyeksi Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 dihitung berdasarkan rata-rata pertumbuhan pendapatan dan belanja periode sebelumnya dengan menggunakan angka dasar data realisasi APBD Tahun Anggaran 2018, disajikan pada Tabel 3.19.

Belanja Bantuan Keuangan pada Tabel 3.19, termasuk dialokasi untuk bantuan keuangan kepada partai politik. Pengalokasian belanja bantuan partai politik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp 30.000.000.000 setiap tahun mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Alokasi ini berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2018. Selanjutnya, pengalokasian ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2023.



Tabel 3.19
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Uraian	Realisasi		Proyeksi			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PENDAPATAN	34.287.512.001.438	34.882.308.945.575	36.610.307.179.215	37.737.423.362.070	39.012.817.985.825	40.080.929.800.787
Pendapatan Asli Daerah	20.011.464.307.537	19.765.448.937.775	21.411.244.999.549	22.442.656.325.801	23.618.394.082.046	24.686.504.698.128
Pendapatan Pajak Daerah	18.153.618.094.193	18.394.357.886.000	19.868.334.810.198	20.846.263.513.636	21.838.397.631.254	22.882.306.739.036
Retribusi Daerah	52.842.782.692	47.890.192.237	52.947.162.372	57.808.842.755	62.907.766.373	68.206.850.078
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	348.537.989.633	366.500.271.290	436.249.719.227	460.541.008.650	474.521.753.991	493.424.178.586
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.456.465.441.019	956.700.588.248	1.053.713.307.752	1.078.042.960.760	1.242.566.930.428	1.242.566.930.428
			-	-	-	-
Dana Perimbangan	14.207.941.513.901	15.052.236.213.800	15.133.282.963.282	15.228.402.384.859	15.327.468.606.972	15.327.468.805.852
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	1.804.540.601.861	1.388.997.919.800	1.590.579.229.902	1.658.178.847.173	1.729.480.338.722	1.729.480.537.602
Dana Alokasi Umum	3.023.552.986.000	3.212.647.404.000	3.092.112.843.380	3.119.632.647.686	3.147.397.378.250	3.147.397.378.250
Dana Alokasi Khusus	9.379.847.926.040	10.450.590.890.000	10.450.590.890.000	10.450.590.890.000	10.450.590.890.000	10.450.590.890.000
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	68.106.180.000	64.623.794.000	65.779.216.384	66.364.651.410	66.955.296.807	66.956.296.807
Hibah	22.044.000.000	22.044.000.000	23.285.590.617	23.971.914.626	24.678.719.385	24.679.719.385
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33.750.000.000	42.579.794.000	42.493.625.767	42.392.736.784	42.276.577.422	42.276.577.422
Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya	12.312.180.000	-	-	-	-	-
BELANJA	33.698.220.296.819	37.055.508.945.575	38.572.645.255.864	39.568.580.562.070	40.818.187.324.750	41.836.224.305.447
Belanja Tidak Langsung	25.838.208.359.468	28.148.428.550.758	29.059.357.221.425	29.443.438.982.664	30.085.642.304.145	30.687.170.433.757
Belanja Pegawai	5.544.183.049.925	5.322.286.211.549	7.390.813.680.114	7.400.813.680.114	7.411.174.819.266	7.421.550.464.013
Belanja Subsidi	19.359.366.500	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Uraian	Realisasi	Proyeksi				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Belanja Hibah	8.789.711.098.518	9.213.738.682.702	9.663.738.682.702	9.678.738.682.702	9.694.224.664.594	9.709.735.424.058
Belanja Bantuan Sosial	278.015.390.000	298.152.000.000	198.152.000.000	198.152.000.000	198.152.000.000	198.152.000.000
Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ kota dan Pemerintah Desa*	7.450.622.081.732	7.470.689.320.200	7.553.853.148.782	7.887.355.296.568	8.224.501.444.784	8.576.263.701.411
Belanja Bantuan Keuangan	3.756.133.209.513	5.798.562.336.307	4.172.799.709.827	4.198.379.323.280	4.477.589.375.500	4.701.468.844.275
Belanja Tidak Terduga	184.163.280	25.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000
Belanja Langsung	7.860.011.937.351	8.907.080.394.817	9.513.288.034.439	10.125.141.579.406	10.732.545.020.605	11.149.053.871.690

Sumber: Hasil proyeksi, 2019



3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

a. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Proyeksi SiLPA dilakukan berdasarkan pertumbuhan realisasi besaran SiLPA periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Direncanakan proyeksi nilai dan tingkat pertumbuhan SiLPA tahun 2019-2023 sebesar minus 4,7%. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang proses perencanaan, penganggaran, sistem pengendalian dan evaluasi dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penggunaan anggaran semakin efektif serta sesuai dengan perencanaan.

Tabel 3.20
Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Uraian	Realisasi	Proyeksi				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya (SiLPA)	2.493.457.111,839	2.250.000.000,000	2.062.338.076,649	1.931.157.200,000	1.905.369.338,925	1.855.294.504,660

Sumber: Hasil proyeksi, 2019

b. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi Belanja pengeluaran wajib dan mengikat proyeksi tahun 2018 sampai dengan 2023 menggunakan data rata-rata pertumbuhan belanja wajib kurun waktu 2013-2017. Berdasarkan hasil proyeksi, direncanakan nilai dan tingkat pertumbuhan belanja pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 mengalami kenaikan. Lebih rinci mengenai proyeksi tersebut ditunjukkan melalui Tabel 3.21.



Tabel 3.21
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023

No	Uraian	Realisasi		Proyeksi			
		2018	2019 (APBD)	2020	2021	2022	2023
A	Belanja Tidak Langsung	13.217.389.451.308	13.330.146.389.111	13.712.784.707.652	14.162.843.982.763	14.619.441.950.530	15.093.623.075.499
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.667.064.008.187	2.733.740.608.392	2.802.084.123.602	2.872.136.226.692	2.943.939.632.360	3.017.538.123.169
2	Tambahan Penghasilan PNS	1.550.097.021.028	1.281.885.395.385	1.477.841.779.933	1.514.787.824.431	1.552.657.520.042	1.591.473.958.043
3	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	278.500.000.000	289.166.506.092	296.395.668.744	303.805.560.463	311.400.699.474	319.185.716.961
4	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.702.593.616	341.104.265.992	341.152.228.637	341.200.191.282	341.248.153.927	341.296.116.572
5	Gaji dan Tunjangan DPRD	67.013.932.000	73.528.605.300	73.576.567.945	73.624.530.590	73.672.493.235	73.720.455.880
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	25.200.000.000	26.460.000.00	26.475.750.000	27.137.643.750	27.816.084.844	28.511.486.965
7	Gaji dan Tunjangan Gubernur/Wakil Gubernur	277.892.000	284.839.300	291.960.283	299.259.290	306.740.772	314.409.291
8	Belanja Penerimaan Lainnya Gubernur/ Wakil Gubernur	26.377.458.000	27.036.894.450	27.712.816.811	28.405.637.232	29.115.778.162	29.843.672.616
9	Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Guru	1.058.629.674.000	1.082.709.954.000	1.083.400.662.916	1.084.091.812.465	1.084.783.402.930	1.085.475.434.591
10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	7.542.526.872.477	7.470.689.320.200	7.553.853.148.782	7.887.355.296.568	8.224.501.444.784	8.576.263.701.411
11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	-	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
B	Pengeluaran Pembiayaan	88.200.000.000	76.800.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
1	Penyertaan Modal	88.200.000.000	76.800.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
	Total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama (a+b)	13.305.589.451.308	13.406.946.389.111	13.812.784.707.652	14.262.843.982.763	14.719.441.950.530	15.193.623.075.499

Sumber: Hasil proyeksi, 2019



c. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan proyeksi pendapatan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) serta belanja tidak langsung dapat diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Tahun 2018-2023 untuk mendanai pembangunan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil analisis, total penerimaan meningkat dari Rp 34.357.747.712.711 pada realisasi Tahun 2018 diproyeksikan terus meningkat sampai dengan Rp 41.936.224.305.447 pada Tahun 2023. Proyeksi total penerimaan setelah dikurangi dengan proyeksi belanja tidak langsung, maka diperoleh angka proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Jawa Barat pada Tahun 2023 sebesar Rp 11.149.053.871.690.

Adapun proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Provinsi Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 disajikan pada Tabel 3.22.



Tabel 3.22
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Uraian	Realisasi		Proyeksi			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan	34.287.512.001.438	34.882.308.945.575	36.610.307.179.215	37.737.423.362.070	39.012.817.985.825	40.080.929.800.787
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	2.493.457.111.839	2.250.000.000.000	2.062.338.076.649	1.931.157.200.000	1.905.369.338.925	1.855.294.504.660
Penerimaan Kembali Dana Bergulir	70.235.711.273					
Total penerimaan	34.357.747.712.711	37.132.308.945.575	38.672.645.255.864	39.668.580.562.070	40.918.187.324.750	41.936.224.305.447
Dikurangi:						
Pengeluaran pembiayaan	88.199.998.800	76.800.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
Belanja Tidak Langsung	25.838.208.359.468	28.148.428.550.758	29.059.357.221.425	29.443.438.982.664	30.085.642.304.145	30.687.170.433.757
Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah	8.431.339.354.443	8.907.080.394.817	9.513.288.034.439	10.125.141.579.406	10.732.545.020.605	11.149.053.871.690

Sumber: Hasil proyeksi



d. Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow programme*) dan kebutuhan. Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ditunjukkan pada Tabel 3.23.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun prioritas anggaran untuk pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

- a. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat.
- b. **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Alokasi pemenuhan pelayanan dasar dihitung pada prioritas II dengan pertimbangan bahwa prioritas gubernur dan wakil gubernur juga termasuk hal tersebut.
- c. **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.



Tabel 3.23
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

No	Uraian	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023
	KAPASITAS RILL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	8.907.080.394.817	9.513.288.034.439	10.125.141.579.406	10.732.545.020.605	11.149.053.871.690
	PRIORITAS I	317.279.247.533	335.916.017.100	355.647.497.974	376.537.992.758	398.655.581.156
1	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap BLUD	100.131.205.872	106.012.845.546	112.239.968.779	118.832.869.041	125.813.031.829
2	Belanja Jasa Kantor (Listrik, Air, Telepon/Internet)	109.508.870.218	115.941.347.588	122.751.664.352	129.962.014.540	137.595.895.849
3	Belanja Premi Asuransi	1.827.408.578	1.934.749.329	2.048.395.203	2.168.716.559	2.296.105.511
4	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	74.399.748.374	78.769.939.545	83.396.832.805	88.295.506.662	93.481.925.327
5	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25.390.487.504	26.881.907.660	28.460.932.833	30.132.708.881	31.902.683.931
6	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	6.021.526.987	6.375.227.432	6.749.704.002	7.146.177.075	7.565.938.709
	PRIORITAS II	5.315.613.412.759	7.248.215.397.277	8.113.576.143.189	8.593.626.842.236	9.021.691.686.022
	PRIORITAS III	3.274.187.734.525	1.929.156.620.062	1.655.917.938.243	1.762.380.185.611	1.728.706.604.512

Sumber: Hasil proyeksi, 2019



3.4. Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

Dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di Jawa Barat membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan tidak memungkinkan dibebankan kepada APBD. Oleh sebab itu, pemerintah daerah provinsi akan memperkuat integrasi sumber pendanaan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kolaborasi APBD kabupaten/kota, obligasi daerah, pinjaman bank, KPBU/PPP, dana umat dan swasta.

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan Provinsi Jawa Barat selain bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh perangkat daerah di kabupaten/kota maupun perangkat daerah provinsi.

b. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Selain APBN pendanaan pembangunan non APBD Jawa Barat yang lainnya adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat, yang dimaksud dengan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah mensinergikan penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL untuk bidang sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur desa dan kota, dalam rangka optimalisasi program pembangunan di provinsi dan kabupaten/kota. Prinsip pendanaan PKBL dan TJSL adalah **rupiah sama dengan 0 (nol)** dan **pola kerja bersinergi program derajat tinggi dan koordinasi derajat rendah**. Pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol) adalah setiap perusahaan melaksanakan PKBL dan TJSL secara mandiri, artinya bahwa pengelolaan pendanaannya pun oleh perusahaan yang bersangkutan dan bukan merupakan bagian dari pendapatan daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Penyelenggaraan Program PKBL dan TJSL dilakukan melalui pendekatan : **a. partisipatif**, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak



yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan; **b. kemitraan**, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan **c. kesepakatan**, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSJ dan PKBL

Adapun program dan kegiatan pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TJSJ dan PKBL meliputi 8 (delapan) aspek yaitu : **(a) sosial**, yang diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); **(b) lingkungan**, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan; **(c) kesehatan**, yang diarahkan agar seluruh wilayah Jawa Barat dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan; pembiayaan kesehatan; sumberdaya kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; serta pemberdayaan masyarakat; **(d) pendidikan**, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal; **(e) peningkatan daya beli**, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; agribisnis; perikanan; dan pasar tradisional; **(f) infrastruktur dan sanitasi lingkungan**, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan; **(g) sarana dan prasarana keagamaan**; dan **(h) program pembangunan lainnya** yang disepakati oleh perusahaan, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

c. Kolaborasi APBD Kabupaten/Kota

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD kabupaten/kota. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntaskan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga



nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan provinsi sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota, sehingga antara provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerjasama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

d. Obligasi Daerah

Obligasi daerah merupakan alternatif kanal pembiayaan yang layak dipertimbangkan sebagai sumber pendanaan daerah, instrumen ini adalah efek berupa surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan tidak dijamin oleh pemerintah pusat, hanya untuk membiayai kegiatan investasi sarana prasarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD. Namun pada dasarnya penerbitan obligasi daerah sangat bergantung pada kapasitas daerah tersebut. Pembangunan sarana dan prasarana yang diajukan harus mempunyai nilai keuntungan secara ekonomis, keuntungan dari sarana prasarna tersebut digunakan untuk membayar pokok hutang beserta bunganya.

Kelebihan obligasi daerah sebagai alternatif pendanaan pembangunan antara lain mampu menarik minat pemilik dana atau masyarakat untuk berinvestasi dan mampu menyediakan dana dalam jumlah besar. Mekanisme penerbitan obligasi daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum pernah menerbitkan obligasi daerah, namun Pemerintah Jawa Barat merupakan salah satu pemerintah daerah yang serius menjajaki kemungkinan penerbitan obligasi daerah.

e. Pinjaman Daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan, pinjaman daerah dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Konsep dasar pinjaman daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman



Daerah pada prinsipnya diturunkan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.

Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dari pinjaman daerah di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah;
2. Pinjaman daerah harus merupakan inisiatif pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas;
4. Pemerintah daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri;
5. Pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain;
6. Pinjaman daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan pemerintah daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman;
7. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah;
8. Proyek yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah; dan
9. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah, diantaranya adalah bersumber dari:



1. Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri;
2. Pemerintah daerah lain;
3. Lembaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
5. Masyarakat, berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Pemerintah daerah dapat menggunakan hasil dari pinjaman daerah sebagaimana jenis pinjamannya, yaitu:

1. Pinjaman jangka pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas;
2. Pinjaman jangka menengah dipergunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan;
3. Pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang (i) menghasilkan penerimaan langsung, (ii) menghasilkan penerimaan tidak langsung, (iii) memberikan manfaat ekonomi dan social; dan
4. Khusus pinjaman jangka panjang dalam bentuk obligasi daerah digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana akan melakukan pinjaman daerah dengan sumber pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank/Non Bank untuk pendanaan pembangunan.

f. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan



Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha.

Kerjasama pemerintah dengan badan usaha dilakukan dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Kerjasama tersebut mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.

Skema pendanaan KPBU dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kerjasama pemerintah dan badan usaha menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi.

Karakteristik proyek KPBU meliputi:

1. Proyek KPBU merupakan proyek infrastruktur yang penyediaannya dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha;
2. Skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJPK dan suatu badan usaha;
3. Dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggung jawab atas desain, kontribusi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU;
4. Perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha; dan
5. Basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPK dan badan usaha.

Kriteria dan jenis infrastruktur prioritas yang dapat dibiayai melalui pendanaan KPBU terdiri:

1. Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
2. Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
3. Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;



4. Memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
5. Membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur prioritas kerja sama pemerintah dan swasta.

Pendanaan pembangunan melalui KPBU memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas proyek dengan pelibatan badan usaha yang memungkinkan adanya pembagian risiko dan menjamin ketepatan waktu dan anggaran (*on schedule-on budget*);
- b. Menjamin kualitas pelayanan karena *performance* diperjanjikan dalam kontrak; dan
- c. KPBU memiliki perlindungan hukum yang baik karena regulasinya jelas dan *governance* terjaga melalui mekanisme KPBU yang melibatkan pemangku kepentingan (Bappenas dalam pemilihan proyek, Kementerian Keuangan dalam pemberian fasilitas fiskal, LKPP dalam proses pengadaan, BKPM dalam menjajaki minat dan nilai pasar, Kementerian Dalam Negeri dalam pemberian rekomendasi *Availability Payment/AP* Daerah, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dalam *debottlenecking*, dan PT. PII dalam pemberian penjaminan Pemerintah), serta *best practice* KPBU sudah ada di berbagai negara dan berbagai sektor.

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha di Indonesia sudah dibuka untuk 19 sektor, baik KPBU ekonomi maupun sosial yang mempunyai kelayakan finansial tinggi (*full cost recovery*) atau kelayakan marjinal. 19 jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha yaitu: 1) infrastruktur transportasi; 2) infrastruktur jalan; 3) infrastruktur sumber daya air dan irigasi; 4) infrastruktur air minum; 5) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat; 6) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat; 7) infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; 8) infrastruktur telekomunikasi dan informatika; 9) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, termasuk infrastruktur energi terbarukan; 10) infrastruktur konservasi energi; 11) infrastruktur ekonomi fasilitas perkotaan; 12) infrastruktur kawasan; 13) infrastruktur pariwisata, antara lain pusat informasi pariwisata (*tourism information center*); 14)



infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan; 15) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya; 16) infrastruktur kesehatan; 17) infrastruktur pemasyarakatan; 18) infrastruktur perumahan rakyat; 19) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya.

Pengelompokan 19 jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha melalui skema pendanaan KPBU dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok terdiri **kelompok pertama** 7 (tujuh) jenis infrastruktur konektivitas (transportasi, jalan, ketenagalistrikan, migas dan energi baru dan terbarukan (EBT), konservasi energi, telekomunikasi dan informatika), **kelompok kedua** 7 (tujuh) jenis infrastruktur fasilitas perkotaan (air minum, pengelolaan limbah setempat, pengelolaan limbah terpusat, pengelolaan sampah, SDA dan irigasi, pasar tradisional, perumahan rakyat, dan **kelompok ketiga** 6 jenis infrastruktur fasilitas sosial (pariwisata, fasilitas pendidikan, lembaga pemasyarakatan, sarana olahraga dan budaya, kawasan/*technopark*, kesehatan).



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan gambaran umum pembangunan Provinsi Jawa Barat selama beberapa tahun terakhir yang disajikan di Bab 2 dokumen ini, maka permasalahan pokok pembangunan adalah; (1) Masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, masalah sosial dan keamanan; (2) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia; (3) Masih belum optimalnya pelayanan infrastruktur; (4) Pertumbuhan ekonomi daerah mengalami pelambatan; (5) Meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan (6) Masih belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat. Masalah pokok tersebut dipicu oleh berbagai permasalahan yang dapat dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) aspek, sebagai berikut:

4.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Pertumbuhan Ekonomi Belum Optimal

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 6 (enam) tahun mengalami fluktuasi. LPE Jawa Barat pada Tahun 2013 sebesar 6,33 persen mengalami kecenderungan penurunan sampai 5,64 persen pada tahun 2018. Nilai terendah terjadi pada Tahun 2015 yaitu 5,04 persen. Dinamika pertumbuhan ekonomi Jawa Barat terlihat dari adanya kecenderungan penurunan LPE Jawa Barat dari peringkat 15 dari 33 provinsi se-Indonesia ke urutan 18 dari 34 provinsi pada Tahun 2017. Masih terdapat 9 (sembilan) kabupaten/kota dengan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat terdapat, yaitu: (1) Kabupaten Sukabumi, (2) Kabupaten Garut, (3) Kabupaten Ciamis, (4) Kabupaten Cirebon, (5) Kabupaten Indramayu, (6)



Kabupaten Subang, (7) Kabupaten Purwakarta, (8) Kabupaten Pangandaran, dan (9) Kota Banjar. Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang memberdayakan rakyat, perlu adanya kebijakan yang terpadu.

2. Pengendalian Inflasi belum optimal

Selama 6 (enam) tahun terakhir, inflasi Jawa Barat menunjukkan kecenderungan penurunan, semula berada di angka 9,15 pada Tahun 2013 turun menjadi 3,54 di Tahun 2018. Walau inflasi dapat dikendalikan sampai 3,54, namun bila dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 3,13 persen, maka berada posisi lebih tinggi. Sumbangan inflasi terbesar di Jawa Barat berasal dari 3 (tiga) kota yaitu Kota Bandung sebesar 0,71 persen, Kota Bekasi 0,59 persen, dan Kota Bogor 0,78 persen. Komponen penyebab inflasi Jawa Barat tak bisa dilepaskan dari komponen bahan makanan, transportasi, dan rokok.

3. Distribusi Pendapatan Penduduk Belum Merata

Indeks gini Provinsi Jawa Barat masuk kategori ketimpangan sedang karena berada pada kisaran 0,3 sampai 0,5. Pada tahun 2013, indeks gini Jawa Barat sebesar 0,40 mengalami sedikit peningkatan pada Tahun 2018 menjadi 0,405. Bila dibandingkan dengan nasional, indeks gini Provinsi Jawa Barat memiliki angka lebih tinggi. Indeks gini nasional pada Tahun 2018 sebesar 0,384.

Bila dibandingkan dengan provinsi lain se-Indonesia, maka posisi indeks gini Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 berada pada posisi 32 tertinggi dari 34 provinsi. Angka indeks gini ini meningkat dari posisi Tahun 2013 yang berada di urutan 26 tertinggi dari 34 provinsi di Indonesia. Peningkatan indeks gini Provinsi Jawa Barat mengindikasikan adanya masalah ketimpangan pendapatan.

4. Penanggulangan Kemiskinan Belum Optimal

Pada periode Tahun 2013 sampai 2018 Pemerintah Jawa Barat berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 2,36 persen yaitu dari 9,61 persen ke 7,25 persen. Upaya penurunan kemiskinan di Jawa Barat belum cukup optimal bila dibandingkan dengan upaya yang dilakukan oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Pada Tahun 2018 persentase penduduk



miskin di Jawa Barat menempati peringkat 15 terendah dari 33 provinsi. Kondisi ini cenderung membaik pada tahun-tahun berikutnya, yang ditunjukkan dengan persentase penduduk miskin Jawa Barat Tahun 2018 berada pada posisi 13 dari 34 provinsi.

Lebih lanjut, data Tahun 2017 menunjukkan bahwa hampir sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Barat memiliki persentase penduduk miskin lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat. Hanya sebanyak 8 (delapan) kabupaten dan kota yang memiliki persentase penduduk miskin dibawah Provinsi Jawa Barat, yaitu: (1) Kabupaten Bandung, (2) Kabupaten Bekasi, (3) Kota Bogor, (4) Kota Bandung, (5) Kota Bekasi, (6) Kota Depok, (7) Kota Cimahi, dan (8) Kota Banjar.

5. Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat pada Tahun 2017 berada di posisi 10 tertinggi dari 34 provinsi di Indonesia. Mengingat SDM merupakan salah satu modal pembangunan, maka kebijakan yang tepat untuk peningkatan kualitasnya pun sangat dibutuhkan. Dengan jumlah penduduk yang besar, mendorong Provinsi Jawa Barat untuk dapat memanfaatkan kondisi ini menjadi potensi dan bukan menjadi hanya masalah.

Bila ditelaah sampai ke kabupaten/kota, sebaran IPM pada tahun 2017 menunjukkan sebanyak 15 kabupaten/kota yang posisinya berada dibawah IPM Provinsi Jawa Barat. Ini mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas hidup SDM IPM di seluruh wilayah Jawa Barat, khususnya bagi daerah yang masih rendah pencapaian IPM-nya seperti Kabupaten Cianjur (63,70).

6. Harapan Lama Sekolah Belum Optimal

Permasalahan yang dihadapi terkait Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Barat antara lain: (a) Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 sebesar 12,35 Tahun menempati peringkat ke 31 dari 34 provinsi. HLS Jawa Barat juga masih berada di bawah HLS Nasional yang mencapai 12,72 tahun. Nilai HLS 12,35 berarti anak-anak usia 7 tahun di Jawa Barat memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1; dan (b) Masih terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota yang berada dibawah capaian HLS provinsi. Tiga kabupaten/kota dengan



HLS terendah yaitu Kabupaten Bandung Barat (11,79 tahun), Garut (11,73 tahun) dan Subang (11,67 tahun).

7. Rata-Rata Lama Sekolah Belum Optimal

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Jawa Barat pada tahun 2017 sebesar 8,14 tahun menempati peringkat ke 20 dari 34 Provinsi di Indonesia. Posisi ini mengindikasikan masih rendahnya RLS penduduk Jawa Barat. Permasalahan yang dihadapi yakni masih terdapat daerah yang nilai RLS rendah. Beberapa daerah yang membutuhkan peningkatan kualitas dan cakupan layanan pendidikan, khususnya untuk meningkatkan RLS yaitu Kabupaten Sukabumi 6,79 tahun, Kabupaten Cianjur 6,92 tahun, Kabupaten Cirebon 6,61 tahun, Kabupaten Majalengka 6,90 tahun, dan Kabupaten Indramayu 5,97 tahun. Daerah-daerah tersebut masih memiliki Rata-Rata Lama Sekolah dibawah 7 tahun, yang berarti bahwa rata-rata penduduk Jawa Barat pada tahun 2017 baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 7 atau putus sekolah di kelas 8.

8. Masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat

Kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Barat selama beberapa tahun terakhir masih belum optimal. Berbagai masalah kesehatan ditemui di berbagai daerah. Adapun masalah kesehatan yang membutuhkan penanganan, antara lain:

a. Gizi Masyarakat

Masih terdapat kasus balita gizi kurang yang ditandai dengan fluktuasi balita kurus dan balita stunting. Berdasarkan data pada tahun 2017 sebesar 15,1 persen balita kurus sebesar 7,8 persen dan balita stunting sebesar 29,2 persen.

b. Penyakit Menular dan Tidak Menular

Sejak beberapa tahun terakhir, Jawa Barat dihadapkan pada masalah kesehatan terjadinya peningkatan penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Kecenderungan jumlah penderita TB di Jawa Barat pada usia lebih dari 15 tahun terus meningkat. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa tahun 2014, sebanyak 254.829 jiwa menurun menjadi 22.693 jiwa pada tahun 2017. Penderita HIV pada tahun 2014 sebanyak 1.219, meningkat menjadi 4.222 jiwa. Adanya peningkatan



jumlah penderita berkaitan dengan meningkatnya upaya penemuan dan pengobatan kasus HIV maupun TB Penyakit berpotensi KLB yang harus di waspadai antara lain penyakit DBD, diare, keracunan makanan, campak, difteri dan rabies.

Kecenderungan penyakit tidak menular juga terus meningkat dan menjadi penyebab tingginya angka kematian serta meningkatnya biaya perawatan yang menyebabkan beban berat pada BPJS dan Rumah Sakit. Beberapa penyakit tidak menular yang terus meningkat jumlah penderitanya antara lain penyakit hipertensi, diabetes mellitus, cancer, ODGJ, PPOK dan cardio vasculer (jantung). Penyakit tidak menular menjadi standar pelayanan minimal adalah hipertensi, diabetes militus, dan kesehatan Jiwa. Selain itu, dalam lima tahun terakhir permasalahan kesehatan jiwa cenderung meningkat dan memerlukan peningkatan upaya pelayanan kesehatan jiwa untuk mengatasinya

c. Belum optimalnya akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Kecenderungan penurunan rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk. Pada tahun 2013 sebesar 57.466 dan menurun pada Tahun 2014 menjadi 10.318. Di tahun 2016 meningkat kembali menjadi 45.123 dan menurun kembali di Tahun 2017 menjadi 44.782. Fluktuasi penurunan dan kenaikan masih menunjukkan angka belum ideal.

Tiga kota yaitu Kota Bogor, Kota Bandung dan Kota Bekasi walaupun mempunyai kelebihan kapasitas tempat tidur tetapi tetap mengalami kekurangan dalam hal pemenuhan kebutuhan rawat inap dikarenakan merupakan penyangga di wilayah sekitarnya. Sementara kabupaten/kota yang masih kekurangan tempat tidur dibanding dengan jumlah penduduk antara lain Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Subang.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yaitu terkait sumber daya kesehatan. Jawa Barat masih dihadapkan dengan masalah kurangnya jumlah tenaga dokter, tenaga kesehatan tertentu seperti tenaga apoteker, analis kesehatan, nutrisisionis, sanitarian, promkes, dan tenaga non kesehatan seperti tenaga akutansi di puskesmas/FKTP.



Lebih lanjut, masih diperlukan peningkatan manajemen pendistribusian obat dan vaksin yang lebih baik dan efisien. Selain itu perlunya optimalisasi pemerintah provinsi untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota dalam memanfaatkan aplikasi e-logistic untuk memantau ketersediaan obat dan vaksin secara *real time* dan memudahkan dalam pendistribusian.

9. Menurunnya Kontribusi Beberapa Sektor Terhadap PDRB

Selama kurun waktu 2013 sampai dengan 2018, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan mencapai 8,67 pada Tahun 2018. Walau sempat meningkat di Tahun 2016 menjadi 8,90 persen, kontribusi sektor pertanian kembali turun pada Tahun 2017 menjadi 8,60 persen.

Hal yang sama terjadi pada sektor kehutanan. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB mengalami penurunan di Tahun 2017 menjadi 0,08 persen. Angka ini lebih kecil jika dibandingkan pada Tahun 2013, dimana kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB mencapai 0,09 persen.

Penurunan juga terjadi pada kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Jawa Barat. Menurunnya kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB ditunjukkan dari data Tahun 2013, dimana kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Jawa Barat sebesar 2,77 persen dan terus menurun hingga mencapai 1,36 persen pada Tahun 2018.

Selanjutnya, statistik menunjukkan bahwa pada Tahun 2013 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar 15,86 persen dan cenderung mengalami pelambatan pada tahun-tahun berikutnya. Pada Tahun 2018, sektor perdagangan memberi kontribusi sebesar 14,87 persen. Angka ini meningkat namun belum signifikan dibanding tahun sebelumnya yang berada pada 15,08 persen.

Kondisi 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Padahal sektor industri merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB kurun waktu 2013 sampai 2015 mengalami peningkatan hingga mencapai 43,03 persen pada Tahun 2015. Namun sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar 42,16 persen.



4.1.2. Aspek Pelayanan Umum

4.1.2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Bidang Pendidikan

Permasalahan pendidikan di Jawa Barat antara lain: (1) Belum meratanya akses pendidikan; (2) Belum optimalnya mutu pendidikan; (3) Belum optimalnya tata kelola pendidikan; (4) Belum *link and match* lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha; (5) Masih rendahnya minat baca masyarakat.

Kelima permasalahan di atas memiliki akar masalah sebagai berikut:

- a. Belum meratanya distribusi guru antar daerah;
- b. Masih banyak sekolah yang belum terakreditasi;
- c. Nilai rata-rata uji kompetensi guru masih relatif rendah;
- d. Nilai rata-rata ujian nasional masih rendah;
- e. Belum sinergisnya pembagian tata kelola pendidikan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait dengan kewenangan;
- f. Rendahnya tingkat partisipasi pendidikan di tingkat pendidikan menengah;
- g. Program dan kegiatan masih belum menyoar peningkatan mutu dan daya saing pendidikan;
- h. Pengangguran terbesar lulusan pendidikan menengah kejuruan;
- i. Masih belum meratanya akses dan partisipasi pendidikan terutama di pendidikan menengah dan tinggi;
- j. Rendahnya minat baca masyarakat Jawa Barat;
- k. Masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan, baik sarana prasarananya, koleksi, SDM maupun aspek-aspek perpustakaan lainnya;
- l. Belum terintegrasinya layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah milik pemerintah dalam memberikan layanan literasi melalui program perpustakaan keliling; dan
- m. Belum ada regulasi yang mengatur tentang pengelola perpustakaan sekolah untuk bekerja sama dengan komunitas literasi seperti forum perpustakaan desa/kelurahan atau forum perpustakaan taman bacaan masyarakat.



2. Bidang Kesehatan

Permasalahan kesehatan yang masih ditemui di Provinsi Jawa Barat meliputi:

- a. Masih banyaknya Jumlah kematian ibu dan bayi;
- b. Masih tingginya penyakit menular dan tidak menular;
- c. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat;
- d. Masalah gizi masyarakat;
- e. Rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan kesehatan; dan
- f. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata.

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pembangunan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Provinsi Jawa Barat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penataan ruang ditinjau dari:
 - 1) Sejumlah 24 RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP) masih berupa hasil kajian dan belum ditetapkan dengan peraturan daerah, sebab perlu disesuaikan dengan pedoman penyusunan KSP yang baru terbit Tahun 2016, dan perlu menyesuaikan pula dengan perubahan KSP dalam Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.
 - 2) RTRW belum menjadi acuan/pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan atau pelaksanaan pembangunan oleh seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan peninjauan kembali RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 pada Tahun 2015, sebagian besar indikasi program belum dilaksanakan, dan disamping itu terdapat pelaksanaan pemanfaatan ruang (pembangunan) yang tidak tercantum dalam RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.
 - 3) Beberapa perangkat pengendalian pemanfaatan ruang sebagai acuan pelaksanaan tertib tata ruang dan pengawasan penataan ruang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Perangkat pengendalian dimaksud, meliputi peraturan zonasi, pemberian insentif dan disinsentif, dan penenaan sanksi. Selain itu pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penataan ruang



belum dilaksanakan secara menyeluruh mengacu pada RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.

- b. Kondisi baik jaringan irigasi kewenangan provinsi baru mencapai 73,95 persen di Tahun 2017. Sekitar 26,05 persen irigasi dalam kondisi rusak berat dan ringan, hal ini disebabkan karena umur jaringan irigasi yang sudah terlalu tua dan kerusakan karena tinggi dan rentannya kejadian bencana alam di Provinsi Jawa Barat.
- c. Tingginya frekuensi kejadian banjir yang salah satunya disebabkan rendahnya kapasitas daya tampung sungai, situ dan sumber air lainnya serta lamanya proses pembangunan infrastruktur sumber daya air lainnya.
- d. Cakupan pelayanan air minum belum optimal dan masih perlu ditingkatkan dengan melihat target *Universal Access*. Cakupan pelayanan air minum baru mencapai 73,17 persen di Tahun 2017. Akar masalah terkait masalah cakupan pelayanan air minum, antara lain:
 - 1) Kualitas air baku rendah dan kuantitas air baku berfluktuasi di beberapa tempat;
 - 2) Sebaran sumber air baku tidak merata berdasarkan pemusatan penduduk, sehingga pendistribusian air minum belum optimal;
 - 3) Kinerja kelembagaan belum menerapkan prinsip *good governance* sehingga pengelolaan sistem tidak optimal, baik di PDAM maupun pada lembaga pengelola SPAM yang dikelola masyarakat;
 - 4) Keterbatasan pendanaan APBD untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum; dan
 - 5) Belum semua pemerintah kabupaten/kota memiliki kebijakan dan rencana pemenuhan kebutuhan air minum.
- e. Cakupan pelayanan air limbah domestik baru mencapai 67,01 persen di tahun 2017. Akar masalah dari cakupan pelayanan air limbah domestik yang belum optimal, yaitu:
 - 1) Masih tingginya angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS);
 - 2) Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS), terutama menyangkut limbah;
 - 3) Rendahnya komitmen kepala daerah terhadap pentingnya mendidik masyarakat untuk ber-PHBS;



- 4) Masih rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur pengolahan limbah setempat;
 - 5) Masih terbatasnya regulasi pengelolaan air limbah di tingkat kabupaten/kota;
 - 6) Belum ada unit kerja khusus untuk pengelolaan limbah;
 - 7) Masih rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur pengolahan limbah setempat;
 - 8) Masih rendahnya tingkat pelayanan limbah terpusat; dan
 - 9) Terbatasnya pendanaan di tingkat kabupaten/kota untuk pembangunan infrastruktur pengolahan limbah sistem terpusat.
- f. Tingkat kemantapan jalan provinsi mencapai 98,17 persen di tahun 2017. Untuk mengoptimalkan kenyamanan dan kelancaran lalu lintas, maka kondisi jalan masih perlu ditingkatkan lagi. Akar masalah dari kondisi jalan yang belum optimal, antara lain:
- 1) Jaringan jalan belum merata, ketimpangan kawasan jalur utara, tengah dan selatan, sehingga tingkat mobilitas antar wilayah terbatas;
 - 2) Umur teknis layanan jalan sudah terlampaui; dan
 - 3) Terdepresiasi oleh bencana alam, dan *overload* MST.
- g. Cakupan pelayanan persampahan mencapai 67,11 persen di Tahun 2017. Akar masalah terkait belum optimalnya pelayanan persampahan, antara lain:
- 1) Perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan serta belum ada kesadaran dalam mengurangi dan memilah sampah (3R);
 - 2) Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terpadu (pada sumber, TPS, TPA, dan pengangkutan dari hulu ke hilir); dan
 - 3) Pengelolaan persampahan berorientasi 3R (dari hulu ke hilir) yang belum efektif dan terpadu.

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Cakupan rumah layak huni di Jawa Barat sebesar 93,12 persen di Tahun 2017, ini berarti masih belum mencapai target RPJMD 2013-2018 sebesar 93,30-93,89 persen. Akar masalah terkait belum tercapainya target pelayanan rumah layak huni, antara lain:



- a. Harga rumah tidak terjangkau bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan dibawah MBR;
- b. Persoalan penyediaan tanah untuk rumah MBR, antara lain keterbatasan dan mahalnya harga lahan, pembangunan rumah bagi MBR yang sesuai dengan batas harga pemerintah berlokasi jauh dari perkotaan dan tempat kerja, dan belum ada intervensi pemerintah untuk penyediaan tanah bagi pembangunan perumahan dan mengendalikan harga lahan;
- c. Implementasi kebijakan penyediaan rumah MBR di tingkat pusat tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah;
- d. Tahapan perizinan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tidak transparan dan akuntabel;
- e. Pelayanan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang tidak memenuhi standar, berpotensi menimbulkan penurunan kualitas lingkungan permukiman;
- f. Ketidakmampuan masyarakat secara ekonomi untuk meningkatkan kualitas rumahnya;
- g. Dukungan PSU yang terbatas karena belum menjadi aset pemerintah dikarenakan pengembang belum menyerahkan asetnya yang disebabkan prasyarat untuk serah terima belum terpenuhi; dan
- h. Pembangunan perumahan belum sejalan dengan rencana pembangunan perkotaan yang tercantum dalam RTRW/RDTR karena dalam beberapa kasus belum ada dokumennya.

5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Masalah ketentraman dan ketertiban umum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kehidupan politik yang diarahkan untuk mewujudkan demokrasi masih dimaknai sebagai kebebasan semata oleh sebagian masyarakat yang seringkali dapat mengganggu kelompok masyarakat lainnya yang mempengaruhi kondisi ketentraman dan ketertiban umum. Dalam aspek hukum, penegakkan hukum yang lemah dan tidak konsisten mempengaruhi pula kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Jawa Barat sebagai daerah penyangga ibu kota negara dan lintasan Jawa Sumatera dengan jumlah penduduk yang besar dan heterogen; memiliki obyek vital nasional; dan merupakan daerah kunjungan wisata,



daerah Pendidikan, dan industri, menjadi pemicu timbulnya berbagai permasalahan sosial. Tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya masih cukup tinggi, demikian pula dengan masalah kepemilikan lahan. Selain itu, protes ketidakpuasan terhadap suatu masalah yang mengarah pada perusakan fasilitas umum seringkali terjadi. Namun secara keseluruhan sikap masyarakat untuk mendukung terciptanya tertib sosial melalui upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban, cukup baik.

6. Bidang Sosial

Permasalahan bidang sosial, yaitu kecenderungan meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini disebabkan oleh: (1) Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran; (2) Belum optimalnya penanganan bencana sosial; (3) Masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasan anak, perempuan dan *human trafficking*; (4) Belum optimalnya penanganan PMKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin serta perlindungan dan jaminan sosial; (5) Masih rentan terhadap konflik sosial; dan (6) Kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

4.1.3. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Bidang Tenaga Kerja

Permasalahan terkait tenaga kerja adalah: (1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang rendah sebesar 63,34 persen di Tahun 2017; (2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tinggi yaitu 8,22 persen di Tahun 2017. Akar permasalahan dari permasalahan tenaga kerja, antara lain:

- a. Lapangan kerja terbatas;
- b. Kompetensi angkatan kerja tidak sesuai kebutuhan kerja;
- c. Banyak pemutusan hubungan kerja (PHK);
- d. Kurangnya minat pencari kerja untuk usaha mandiri;
- e. Angka *Employment to Population Ratio* (EPR) Provinsi Jawa Barat rendah;
- f. Proporsi penduduk bekerja yang tergolong "pekerja rentan/*vulnerable employment*" cukup tinggi lebih dari 50 persen;



- g. Penduduk perempuan yang bekerja di bawah 35 jam per minggu lebih tinggi dibanding laki-laki;
- h. Masih tingginya penduduk yang bekerja di sektor informal;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) banyak didominasi lulusan SMK akibat *missmatch* (tidak sesuai) dengan kebutuhan industri atau perusahaan;
- j. Pencari kerja lebih memilih bekerja di perkotaan dibanding pedesaan; dan
- k. Penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian mengalami penurunan.

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, yaitu:

- a. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang rendah;
- b. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- c. Masih banyaknya kasus perdagangan perempuan dan anak di Jawa Barat; dan
- d. Masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Bidang Pangan

Permasalahan di bidang pangan yang dihadapi Provinsi Jawa Barat adalah Skor Pola Pangan Harapan pada Tahun 2017 sebesar 85,2 poin. Angka ini sudah cukup baik, namun masih di bawah rata-rata nasional sebesar 90,4 poin. Selain itu terdapat permasalahan ketidakstabilan harga pangan dan menurunnya Konsumsi Beras Per Kapita dari 87,48 persen pada Tahun 2016 menjadi 83,93 persen di Tahun 2017. Akar permasalahan di bidang pangan, antara lain:

- a. Masih tingginya masyarakat yang mengalami kerentanan pangan;
- b. Ketersediaan pangan di Jawa Barat masih mengalami ketimpangan;
- c. Keragaman konsumsi pangan masih rendah, hanya tergantung pada satu jenis bahan pokok yaitu beras;
- d. Distribusi dan logistik pangan yang belum optimal;



- e. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), hal ini berpengaruh terhadap prevalensi stunting di Jawa Barat; dan
- f. Kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan masih rendah.

4. Bidang Pertanian

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, luas lahan bersertifikat di Jawa Barat tidak banyak menunjukkan peningkatan sehingga masih menjadi permasalahan yang membutuhkan penanganan lebih baik. Permasalahan pertanian adalah terkait surat atau bukti kepemilikan atas tanah. Penanganan masalah pertanian ini membutuhkan peningkatan koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

5. Bidang Lingkungan Hidup

Pada urusan lingkungan hidup ditemui masalah terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal ini disebabkan antara lain:

- a. Menurunnya kualitas air akibat pencemaran oleh limbah domestik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, dan pertambangan;
- b. Menurunnya kualitas udara ambien akibat emisi kendaraan bermotor dan cerobong industri, serta meningkatnya emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, dan pengelolaan limbah domestik;
- c. Menurunnya fungsi layanan jasa ekosistem DAS Jawa Barat yang ditandai dengan menurunnya kuantitas air akibat berkurangnya daerah resapan air, berkurangnya tutupan vegetasi, dan meningkatnya alih fungsi lahan produktif;
- d. Meningkatnya kerusakan sumber daya alam, ekosistem, dan keanekaragaman hayati akibat kerusakan lahan;
- e. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang dalam mewujudkan kebijakan 45% kawasan lindung Jawa Barat; dan
- f. Meningkatnya risiko bencana akibat belum optimalnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana.

6. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Permasalahan pada terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi Jawa Barat, yaitu:

- a. Arus migrasi masuk penduduk ke Jawa Barat yang tinggi menyebabkan kendala dalam hal pendataan administrasi kependudukan, antara penduduk asli Jawa Barat dan penduduk non permanen di Jawa Barat. Hal ini yang menyebabkan selalu terjadi perbedaan data jumlah penduduk antara data SIAK dengan data BPS;
- b. Keterbatasan ketersediaan sarana dan prasarana dan SDM jempot bola di kabupaten/kota, menyebabkan proses pelayanan dokumen administrasi kependudukan terhambat, dalam menjangkau daerah terpencil/pelosok;
- c. Keterbatasan SDM ASN yang berkompeten menjadi *administrator database*;
- d. Kompetensi SDM dalam hal memberikan pelayanan masih belum merata. Sehingga perlu dilakukan pembinaan yang lebih intensif, untuk meminimalkan terjadinya kasus pungli di area pelayanan;
- e. Aksesibilitas jaringan komunikasi data dari kabupaten/kota yang akan melakukan perekaman kurang merata;
- f. Sarana berupa peralatan perekaman/pencetakan di kabupaten/kota banyak yang rusak dan tidak layak operasi;
- g. Ketergantungan logistik perekaman dan pencetakan (blanko KTP EL) masih tersentralisasi, sehingga keterlambatan pengadaan dan distribusi ke daerah akan mengganggu kecepatan proses di daerah; dan
- h. Dari sisi kelembagaan, terdapat beberapa kabupaten/kota yang wilayah kerjanya memiliki cakupan yang luas namun tidak didukung dengan UPTD.

7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi:

- a. Belum optimalnya tata kelola pemberdayaan masyarakat desa yakni belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan kolaboratif dan inovatif untuk menuju Gerbang Desa JUARA;



- b. Belum sinergisnya program/kegiatan pembangunan daerah berlokasi desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat maupun dengan kabupaten/kota, masih bersifat parsial/sektoral;
- c. Masih belum optimalnya infrastruktur dasar dan ekonomi dalam mendukung perekonomian perdesaan antara lain: 1) belum seluruh desa memiliki BUMDes; 2) masih adanya desa *blankspot*; dan 3) belum optimalnya pemanfaatan potensi desa untuk mendorong OVOP (*One Village One Product*);
- d. BUMDes belum dioptimalisasi sebagai katalis perekonomian desa;
- e. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes belum memahami pengelolaan BUMDes (pelaksana teknis hingga kepala desa);
- f. Belum optimalnya pemahaman dan pemanfaatan IT untuk meningkatkan daya saing perdesaan menuju kemandirian desa;
- g. Belum optimalnya pembangunan desa mencakup: 1) peningkatan pelayanan dasar; 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan; 3) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; 4) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna; dan 5) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa;
- h. Kecenderungan menurunnya budaya gotong royong dalam bentuk interaksi secara langsung pada masyarakat desa dan perkotaan yang diindikasikan oleh mulai berubahnya bentuk partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan;
- i. Belum optimalnya penganggaran CSR dan *crowdfunding* untuk memberikan alternatif metode penganggaran pada program-program perdesaan melalui dana CSR dan penggalangan dana melalui jaringan internet; dan
- j. Lemahnya pengelolaan profil desa dan kelurahan sebagai bahan penyusunan perencanaan.

8. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang ditemui di Jawa Barat yaitu peningkatan jumlah Keluarga Pra Sejahtera menjadi Keluarga Sejahtera I tidak dibarengi dengan peningkatan dari Keluarga Sejahtera I ke Keluarga Sejahtera II, III dan III



Plus. Jumlah Keluarga Sejahtera II, III dan III Plus Tahun 2016 mengalami penurunan menjadi Keluarga Sejahtera I sebanyak 55 persen bila dibandingkan dengan kondisi Tahun 2015.

9. Bidang Perhubungan

Permasalahan utama bidang perhubungan di Jawa Barat yaitu:

- a. Belum berkembangnya sistem jaringan transportasi massal perkotaan berbasis jalan dan rel serta integrasi antar moda angkutan;
- b. Masih rendahnya ketersediaan aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
- c. Jumlah penumpang angkutan umum yang masih rendah;
- d. Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan;
- e. Masih tingginya *overloading* angkutan barang;
- f. Belum optimalnya keberadaan bandar udara untuk menampung penumpang dan barang baik domestik maupun internasional; dan
- g. Belum tersedianya pelabuhan laut internasional dan belum optimalnya pelabuhan yang ada dalam melayani pergerakan orang dan barang antar pulau.

10. Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan utama bidang komunikasi dan informatika untuk aplikasi dan informatika, meliputi:

- a. Penerapan *e-Government* sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum ditindaklanjuti dengan kebijakan/aturan hukum daerah;
- b. Belum ada rencana induk/*strategic plan/masterplan/blueprint* teknologi informasi di Jawa Barat;
- c. Belum adanya standar pembangunan/pengembangan aplikasi/sistem Informasi/website, data, serta infrastruktur TI;
- d. Belum adanya standar keamanan informasi;
- e. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada beberapa layanan TI;
- f. Kurangnya kuantitas, kualitas dan peningkatan kompetensi SDM pengelola TI;
- g. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan terhadap akses informasi yang lebih beragam dan cepat, namun kelemahannya



- berdampak pada akurasi dari informasi tidak menjadi prioritas. Tantangan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk kembali menata pengelolaan komunikasi dan informasi; dan
- h. Belum ada regulasi terbaru seiring dengan perkembangan teknologi informasi tentang pengembangan kelompok informasi masyarakat, pembinaan komunitas komunikasi dan informatika serta pembinaan media tradisional.

11. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Beberapa permasalahan yang dihadapi koperasi dan usaha kecil dan menengah (KUKM), yaitu:

- a. Akses pembiayaan bagi KUKM khususnya terhadap dunia perbankan masih minim. Fasilitas pembiayaan yang diterima KUKM di tahun 2014 sebesar 1.140 unit usaha memang sempat mengalami peningkatan menjadi 1.560 unit usaha pada Tahun 2015, namun pada Tahun 2016 kembali turun menjadi 1.194 unit usaha;
- b. Jumlah pelaku usaha yang menerima Kredit Cinta Rakyat (KCR) selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan. Tahun 2015 menunjukkan penerima sebanyak 3.257 KUKM namun terus menurun sampai 700 KUKM pada Tahun 2016. Diharapkan bahwa penurunan ini menunjukkan kemandirian pembiayaan dari KUKM semakin baik, sehingga makin sedikit yang membutuhkan bantuan atau fasilitas pembiayaan;
- c. Persentase koperasi aktif yang masih terbilang kecil selama Tahun 2012-2017, dengan persentase tertinggi sebesar 64,03 persen di Tahun 2017; dan
- d. Menurunnya Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha dari yang semula 14.868 usaha pada tahun 2016 menjadi 11.996 usaha di tahun 2017.

Secara umum akar permasalahan di bidang KUKM, antara lain:

- a. Belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif (35,97%);
- b. Masih rendahnya informasi akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil terutama di perdesaan;



- c. Pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil belum optimal; dan
- d. Belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil.

12. Bidang Penanaman Modal

Beberapa permasalahan pada bidang penanaman modal, yaitu:

- a. Realisasi investasi di kabupaten/kota belum merata masih terkonsentrasi di daerah Bodebekarpur;
- b. Belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan/kegiatan PMA/PMDN; dan
- c. Menurunnya realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2017 sebesar 68,67 Triliun Rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 74,99 Triliun Rupiah.

Adapun akar permasalahan yang menyebabkan hal tersebut, yaitu:

- a. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata;
- b. Belum sesuainya kualifikasi angkatan kerja lokal dengan pasar tenaga kerja; dan
- c. Dinamika sosial mempengaruhi kepastian dan keamanan berusaha.

13. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan bidang kepemudaan, yaitu:

- a. Rendahnya partisipasi pemuda Jawa Barat dalam lapangan dan kesempatan kerja;
- b. Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam organisasi dan kepemimpinan; dan
- c. Belum optimalnya penanganan kesetaraan dan diskriminasi gender.

Adapun permasalahan yang dihadapi bidang olahraga, antara lain:

- a. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga yang ditandai dengan rendahnya persentase penduduk Jawa Barat yang melakukan kegiatan olahraga;
- b. Belum optimalnya peran sentra keolahragaan (Sekolah Khusus Olahraga, PPLP, dan Puslatda) guna pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
- c. Terbatasnya jumlah dan kualitas pembina dan tenaga keolahragaan;



- d. Belum adanya sinergi antara industri olahraga, pariwisata dan industri lainnya untuk mendukung prestasi olahraga dan perekonomian di Jawa Barat;
- e. Masih rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan;
- f. Terbatasnya jumlah dan kualitas sentra pembinaan olahraga di Jawa Barat yang memenuhi standar nasional dan internasional; dan
- g. Kurangnya sarana terbuka publik yang dapat digunakan untuk berolahraga di kota/kabupaten di Jawa Barat.

14. Bidang Statistik

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan statistik yaitu:

- a. Masih rendahnya ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang dikelola oleh Bidang Statistik di Dinas Komunikasi dan Informatika. Data yang tersedia pada Tahun 2018 sebanyak 2.218, yang berarti mencapai 65% dari keseluruhan data yang ditargetkan. Belum optimalnya pencapaian tersebut disebabkan belum maksimalnya pengelolaan data di perangkat daerah dan kabupaten/kota sehingga *supply* data ke provinsi masih rendah;
- b. Belum optimalnya sistem satu data karena masih kurangnya SDM yang mengelola database dan belum tersosialisasi; dan
- c. Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan statistik sektoral sehingga berdampak pada masih rendahnya data terolah spasial dan aspaspial.

15. Bidang Persandian

Pada saat membahas tentang persandian, maka tidak lepas dengan aspek keamanan informasi sebab dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 53 tentang Badan Siber dan Sandi negara (BSSN) maka ruang lingkup persandian saat ini tidak hanya sekedar pengiriman dan penerimaan surat melalui radiogram atau sejenisnya saja tapi lebih luas lagi ke arah pengamanan informasi. Saat ini berkenaan dengan persandian terdapat permasalahan sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya kesadaran aparaturnya maupun masyarakat akan pentingnya keamanan informasi (*security awarness*) antara lain



- ditandai dengan makin maraknya informasi yang disebarakan kepada masyarakat melalui dokumen-dokumen pemerintah yang diragukan keasliannya, dan penyebaran informasi di masyarakat yang belum diketahui kebenarannya;
- b. Sarana dan prasarana pendukung pengamanan informasi yang relatif masih terbatas, yaitu:
 - 1) Belum mempunyai perangkat pendukung kontra penginderaan;
 - 2) *Jamming* yang tersedia terbatas jumlahnya (1 *jamming*); dan
 - 3) Jaring komunikasi sandi belum dilaksanakan.
 - 4) Belum ada ruangan *Security Operating Centre* (SOC) yang dapat memonitor lalu lintas data/informasi di Jawa Barat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak lazim atau mengantisipasi adanya serangan dari pihak luar.
 - c. Permasalahan VA (*vulnerability assesment*) pengamanan informasi baik jaringan maupun aplikasi. Saat ini baru sekitar 6 (enam) aplikasi yg dilakukan *penetration test* dari sekitar 263 aplikasi yang terinventarisir sebagai upaya untuk mengetahui celah kerawanan dari aplikasi. Aplikasi yang sudah dilakukan pentest adalah Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIPKD), Sistem Informasi Perijinan (Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu), *server* dan *email jabarprov.go.id* (Dinas Komunikasi dan Informatika), RKPD online (Bappeda), dan SLO (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral);
 - d. Pengamanan aset-aset dan ruangan pimpinan yang perlu disterilkan dari upaya-upaya penyadapan informasi oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab masih relatif terbatas jumlahnya. Saat ini baru 3 (tiga) pimpinan daerah meliputi 9 (sembilan) titik yang dapat diamankan/disterilkan yakni ruang kerja, ruang rapat, dan rumah dinas gubernur, wakil gubernur, dan Sekretaris Daerah saja dari 40 lebih pimpinan Jawa Barat yang ada;
 - e. Pengamanan dokumen-dokumen penting dari pemalsuan dan peningkatan upaya pelayanan lebih efektif dan efisien belum optimal. Saat ini baru 33 orang yang memegang Sertifikat Elektronik atau 3 perangkat daerah yang dapat memanfaatkan Sertifikat Elektronik (SE), yakni Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu



dari sejumlah 2.000 lebih pejabat struktural dan 30.000 lebih ASN di Jawa Barat; dan

- f. Sumber daya manusia persandian dan keamanan informasi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat masih sedikit, baru ada 3 (tiga) orang (2 orang di Diskominfo dan 1 orang di Sekretariat Daerah). Sementara di kabupaten/kota tidak lebih dari 10 orang sandiman. Selain itu, SDM yang memiliki pengetahuan teknis mengenai *penetration test* maupun kontra penginderaan pun belum ada.

16. Bidang Kebudayaan

Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a. Masih rendahnya perlindungan terhadap budaya lokal Jawa Barat;
- b. Masih rendahnya apresiasi terhadap budaya lokal Jawa Barat;
- c. Kurang optimalnya promosi budaya lokal Jawa Barat di dalam dan luar negeri; dan
- d. Kuatnya pengaruh budaya asing terhadap budaya Jawa Barat.

17. Bidang Perpustakaan

Permasalahan di bidang perpustakaan dapat dilihat dari aspek kelembagaan teknis dan aspek pembudayaan kegemaran budaya masyarakat. Secara umum permasalahan di bidang perpustakaan diuraikan sebagai berikut:

- A. Permasalahan kelembagaan teknis perpustakaan di Jawa Barat, yaitu:
 - a. Penyelenggaraan perpustakaan belum mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan yang meliputi pengembangan koleksi, SOTK, sarana dan prasarana, anggaran, layanan, bahan perpustakaan, tenaga perpustakaan, kerja sama, penyelenggaraan perpustakaan, dan pengelolaan perpustakaan;
 - b. Perpustakaan Umum kabupaten/kota masih ada yang belum memiliki prasarana gedung permanen;
 - c. Masih kurangnya kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia Perpustakaan baik tenaga Fungsional Pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan; dan
 - d. Kegiatan layanan perpustakaan belum menjangkau daerah tertinggal, terjauh dan terluar.



- B. Permasalahan pembudayaan kegemaran membaca di Jawa Barat, yaitu:
- a. Masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap perpustakaan;
 - b. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan perpustakaan sebagai tempat berkegiatan;
 - c. Kurangnya promosi dan publikasi pemanfaatan perpustakaan dalam meningkatkan kegemaran membaca masyarakat;
 - d. Gerakan membaca dalam kegiatan literasi belum masif dan masih bersifat parsial belum terintegrasi; dan
 - e. Pemaknaan membaca masih berorientasi kepada baca dan tulis belum kepada pemaknaan holistik dan komprehensif.

18. Bidang Kearsipan

Urusan kearsipan sebagai urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar masih dilaksanakan belum optimal. Hal ini ditandai dengan akses penggunaan arsip belum efektif; penelusuran dan identifikasi arsip kesejarahan belum efektif; pengelolaan arsip perangkat daerah atau pencipta arsip belum tertib; dan pemahaman sumber arsip bersejarah masih rendah. Adapun akar masalah dari permasalahan tersebut yaitu ketersediaan fasilitas dan sumber daya kearsipan yang belum layak sesuai standar kearsipan, serta keterbatasan sumber informasi arsip kesejarahan.

4.1.4. Urusan Pilihan

1. Bidang Kelautan dan Perikanan

Permasalahan di bidang kelautan dan perikanan dapat dilihat dari Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang cenderung turun pada periode 2013-2017 sebesar 0,63 persen, dan menurunnya produksi perikanan tangkap dari yang semula 271.030,59 ton/tahun pada Tahun 2015 menjadi hanya 198.884,39 ton/tahun di Tahun 2017. Secara umum akar permasalahan, antara lain:

- a. Eksploitasi ruang laut yang berlebihan dan tingginya tingkat pencemaran mengakibatkan penurunan laju tangkapan (*fish landing*) dan kerusakan lingkungan wilayah pesisir;
- b. Ketimpangan sumber daya kelautan dan perikanan antara Jawa Barat bagian Utara dan Jawa Barat bagian Selatan;



- c. Pelabuhan perikanan Jawa Barat belum dimanfaatkan secara optimal dan masih terbatasnya pemenuhan sarana prasarana perikanan budidaya dan tangkap (lahan, kapal, dll);
- d. Pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi secara sistematis antara hulu dan hilir;
- e. Masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi oleh nelayan;
- f. Pencemaran perairan umum dan laut; dan
- g. Belum optimalnya kapasitas pengelolaan zonasi wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil 0-12 mil.

2. Bidang Pariwisata

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jawa Barat masih kecil yaitu sekitar 2,55 persen pada Tahun 2016. Beberapa kondisi yang menjadi akar masalah masih belum optimalnya perkembangan pariwisata, yaitu:

- a. Belum semua kabupaten/kota di Jawa Barat memiliki dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah (Riparda) Kabupaten/Kota;
- b. Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas infrastruktur, serta dukungan amenities pariwisata (rumah makan, restoran, toko cenderamata, dan fasilitas umum seperti sarana ibadah, kesehatan, taman, dan lain-lain);
- c. Belum terintegrasinya promosi pariwisata yang dilakukan antara provinsi dan kabupaten/kota; dan
- d. Kelembagaan dan sumber daya pengelola destinasi wisata kurang profesional, terlihat dari masih adanya pungli atau pungutan liar di destinasi wisata.

3. Bidang Pertanian

Permasalahan pokok terkait pertanian di Jawa Barat, yaitu kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB beberapa tahun terakhir menunjukkan fluktuasi dan cenderung menurun; menurunnya pertumbuhan Subsektor Tanaman Pangan; dan masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian. Secara umum, akar permasalahan di bidang pertanian, yaitu:

- a. Belum optimalnya aktivitas ekonomi pertanian dari hulu ke hilir;
- a. Menurunnya luas lahan pertanian dan terganggunya ekosistem pertanian sebagai konsekuensi dari intensitas pembangunan sektor non-pertanian yang sangat tinggi;



- b. Rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian;
- c. Tingginya gangguan hama dan penyakit tanaman pertanian dan perkebunan, serta peternakan;
- d. Rendahnya penerapan sertifikasi jaminan mutu hulu-hilir pertanian;
- e. Rendahnya regenerasi petani; dan
- f. Rendahnya akses permodalan.

4. Bidang Kehutanan

Permasalahan pembangunan bidang kehutanan di Provinsi Jawa Barat, yaitu:

- a. Tingkat degradasi hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) masih tinggi, yang disebabkan oleh perubahan tutupan lahan, akibat alih fungsi lahan. Hal ini juga mengakibatkan banyaknya lahan kritis di luas kawasan hutan;
- b. Pengelolaan hutan di Jawa Barat belum optimal; dan
- c. Rendahnya produksi hasil hutan kayu dan non kayu.

Secara umum akar permasalahan bidang kehutanan, antara lain:

- a. Tingginya aktivitas ekonomi secara berlebihan di kawasan hulu DAS;
- b. Meningkatnya gangguan ekosistem;
- c. Jumlah masyarakat miskin di sekitar hutan masih tinggi; dan
- d. Rendahnya teknologi pemanfaatan sumberdaya hutan.

5. Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan di bidang energi dan sumber daya mineral, yaitu:

- a. Masih ditemukan aktivitas pertambangan yang tidak mengikuti kaidah usaha pertambangan yang baik (*good mining practise*);
- b. Meningkatnya penggunaan air tanah;
- c. Instalasi tenaga listrik belum terstandarisasi;
- d. Belum meratanya akses terhadap layanan listrik; dan
- e. Pemanfaatan energi final belum efisien dan minimnya pemanfaatan baru dan terbarukan.

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (1). Ketidakseimbangan antara jumlah personil inspektur tambang beserta perlengkapan kerjanya dengan luas wilayah usaha pertambangan; (2) Meningkatnya penggunaan air tanah akibat air permukaan yang belum



mampu memenuhi kebutuhan air untuk masyarakat baik kebutuhan domestik maupun industri; (3) Belum ada perangkat untuk mensertifikasi instalasi tenaga listrik; (4) Basis data terpadu yang menjadi dasar pemberian bantuan sambungan instalasi listrik rumah tangga miskin belum sinkron antara TNP2K, PT PLN (Persero) dan Pemerintah Daerah; dan (5) Keterbatasan peran pemda dalam mengembangkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dan inefisiensi penggunaan energi.

6. Bidang Perdagangan

Permasalahan perdagangan di Jawa Barat, yaitu cenderung menurunnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh:

- a. Dominasi barang impor;
- b. Kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok;
- c. Promosi produk industri lokal (asal Jawa Barat) masih dirasa kurang;
- d. Persaingan antara UMKM/pasar tradisional dengan pasar modern;
- e. Kualitas dan kuantitas Infrastruktur pasar tradisional belum memadai; dan
- f. Belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.

7. Bidang Perindustrian

Permasalahan bidang perindustrian yang terjadi beberapa tahun terakhir di Jawa Barat, yaitu:

- a. Menurunnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Kontribusi sektor industri menurun dari 43,22 persen di tahun 2013 menjadi 42,29 persen di tahun 2017;
- b. Pertumbuhan industri mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Pada periode 2013-2017, persentase pertumbuhan industri di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 sebesar 7,19 persen dan pada Tahun 2017 menjadi 5,35 persen.

Secara umum akar permasalahan bidang perindustrian, yaitu:

- a. Produk industri berdaya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi (pajak dan biaya distribusi);
- b. Infrastruktur pendukung kawasan industri yang belum terintegrasi mengakibatkan tingginya biaya logistik dan ketimpangan



- pengembangan kawasan industri di Jawa Barat bagian Barat dengan Jawa Barat bagian Timur;
- c. Bahan baku industri mayoritas impor mengakibatkan biaya produksi tinggi;
 - d. Peranan industri kecil dan menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri; dan
 - e. Belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi.

8. Bidang Transmigrasi

Kompleksitas dalam masalah kepadatan penduduk di Jawa Barat salah satunya pada bidang transmigrasi yang kurang mendapatkan perhatian. Sebagai contoh, pada Tahun 2017-2018 alokasi transmigran Jawa Barat yang diberikan oleh Pusat mengalami penurunan. Belum lagi masalah terkait kompetensi transmigran Jawa Barat yang tidak jarang kalah bersaing dengan daerah lainnya. Secara umum permasalahan pada bidang transmigrasi, sebagai berikut:

- a. Peningkatan kompetensi transmigran Jawa Barat;
- b. Pengawasan dan pendataan transmigrasi lokal; dan
- c. Penguatan sistem dan pengelolaan transmigrasi.

4.1.5.Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Bidang Perencanaan

Permasalahan bidang perencanaan pembangunan adalah belum optimalnya kelengkapan data dan informasi pembangunan daerah, serta belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan. Hal ini cenderung disebabkan oleh indikator kinerja daerah yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) belum dirumuskan dan ditata jenjang kinerjanya dengan baik.

2. Bidang Keuangan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

- a. Kapasitas fiskal kabupaten/kota masih banyak yang dibawah 15 persen dari APBD-nya, sehingga rasio anggaran belanja publiknya masih banyak yang dibawah 50 persen.



- b. Metode penerapan SPI perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan.
- c. Belum ada ukuran penetapan belanja operasional per pendapatan sebagai hasil kinerja operasional terhadap kebutuhan belanja unit penghasil sehingga standarisasi sarana prasarana tidak terjamin, terutama terkait waktu penuntasannya secara keseluruhan.

3. Bidang Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang kepegawaian berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sedangkan fungsi BKD yaitu perumusan kebijakan dan penetapan kebijakan teknis kepegawaian dan penyelenggaraan kepegawaian daerah meliputi kesekretariatan, pengadaan dan informasi pegawai, mutasi dan administrasi kepegawaian, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin.

Beberapa permasalahan terkait isu-isu kepegawaian dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan masih menjadi kendala dalam hal pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang aparatur. Pengadaan CPNS yang terkonsentrasi oleh pemerintah pusat menyebabkan kekurangan pegawai terutama berkaitan hal yang sifatnya teknis. E-formasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terkadang tidak mampu mengisi kekurangan pegawai yang dialami provinsi. Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, memang terjadi pelimpahan pegawai yang sangat signifikan, namun penambahan tersebut tidak dapat menutupi kekurangan pegawai dalam hal teknis, mengingat hampir 80 persen pegawai yang dialih kelola ke provinsi adalah guru;
- b. Reformasi birokrasi terutama dari parameter manajemen kepegawaian masih memerlukan peningkatan. Perlu dilakukan secara khusus program-program yang menunjang reformasi birokrasi sehingga amanat undang-undang tentang harus terlaksananya reformasi birokrasi bisa tercapai;
- c. Belum adanya perencanaan manajemen kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Selain itu, ditemui juga kondisi belum sesuainya antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan



Standar Kompetensi Jabatan sebagai jaminan profesionalisme Aparatur Sipil Negara; dan

- d. Belum semua PNS memiliki kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebagai Jaminan Profesionalisme PNS.

4. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan sampai saat ini belum memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan dan masyarakat. Beberapa hal yang masih menjadi masalah, yaitu:

- a. Persentase Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) belum optimal;
- b. Jumlah karya IPTEK yang didaftarkan HAKI Provinsi Jawa Barat belum optimal; dan
- c. Persentase hasil riset dan IPTEK yang diterapkan belum optimal.

5. Fungsi Lainnya

Permasalahan dalam fungsi lain penunjang urusan pemerintahan daerah, antara lain:

- a. Masuknya perilaku sosial dan budaya asing yang negatif yang mengaburkan nilai budaya lokal dan kearifan local;
- b. Munculnya berbagai ancaman serta gangguan terhadap ketenteraman dalam masyarakat sehingga menghambat pembangunan di masyarakat yang berdampak pada potensi kerawanan di masyarakat;
- c. Belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah;
- d. Belum tuntasnya batas administrasi daerah;
- e. Rentang kendali dan pelayanan publik belum optimal;
- f. Belum optimalnya pengendalian intern pemerintahan;
- g. Belum optimalnya strukturisasi organisasi pemerintahan daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
- h. Belum optimalnya promosi dan informasi potensi pembangunan di Jawa Barat;
- i. Peningkatan potensi ATHG terhadap stabilitas politik dan keamanan;
- j. Melemahnya pemahaman dan implementasi ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan;
- k. Meningkatnya kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba;



- l. Kecenderungan peningkatan konflik sosial;
- m. Melemahnya kehidupan demokrasi;
- n. Meningkatnya potensi konflik antar umat beragama;
- o. Melemahnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; dan
- p. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

4.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

Pada Aspek Daya Saing Daerah terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Meningkatnya jumlah tindak pidana kriminalitas
Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa jumlah tindak pidana kriminalitas di Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuatif yang cenderung meningkat. Pada tahun 2014 sebanyak 23.485 kasus, meningkat menjadi 24.461 kasus di tahun 2015, kemudian turun menjadi 23.777 kasus di tahun 2016 dan meningkat kembali di tahun 2017 menjadi 24.689 kasus.
2. Tingginya Indeks Risiko Bencana Daerah (IRDI)
Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2013, Provinsi Jawa Barat dikategorikan sebagai daerah dengan IRDI yang Tinggi. Kondisi ini menuntut pemerintahan daerah dan masyarakat Provinsi Jawa Barat untuk dapat melakukan tindakan kesiapsiagaan, maupun bersiap pada saat terjadi bencana dan pasca bencana.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dimasa datang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu; (1) Permasalahan pembangunan Provinsi Jawa Barat; (2) Dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Jawa Barat; (3) Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Jawa Barat; (4) Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Provinsi Jawa Barat; dan (5) KLHS RPJMD, maka ditetapkan 5 (lima) isu strategis pembangunan jangka



menengah Provinsi Jawa Barat yaitu; (1) Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia; (2) Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial; (3) Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; (4) Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan; dan (5) Reformasi birokrasi.

Secara umum dari 5 (lima) isu strategis diatas diuraikan sebagai berikut:

1. Kualitas Nilai Kehidupan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, hal ini menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengembangan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Jawa Barat mampu bersaing secara global. Namun saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait perkembangan sumber daya manusia antara lain masih rendahnya pelayanan pendidikan di Jawa Barat yang ditunjukkan dengan adanya fluktuasi capaian Angka Partisipasi Kasar periode 2012-2017, sedangkan nilai APM menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun pada seluruh jenjang pendidikan. Angka Partisipasi sekolah yang paling rendah di Provinsi Jawa Barat yaitu pada kelompok usia 19-24 tahun atau pada jenjang perguruan tinggi. Selain peningkatan pelayanan pendidikan hal lain yang harus dituntaskan adalah peningkatan kualitas tenaga pengajar, dimana kondisi saat ini belum meratanya ketersediaan guru terutama guru di daerah terpencil, serta nilai rata-rata uji kompetensi guru masih relatif rendah.

Selain hal tersebut diatas, masalah tata kelola juga terjadi seperti masih banyaknya sekolah yang terakreditasi C dan masih banyak sekolah yang belum terakreditasi, belum sinergisnya pembagian tata kelola pendidikan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait dengan kewenangan, masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan dan kualitas dan relevansi, tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing, masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan, baik sarana prasarananya, koleksi, SDM maupun aspek-aspek perpustakaan lainnya, belum terintegrasinya layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah milik pemerintah



dalam memberikan layanan literasi melalui program perpustakaan keliling, belum ada regulasi yang mengatur tentang pengelola perpustakaan sekolah untuk bekerja sama dengan komunitas literasi seperti forum perpustakaan desa/kelurahan atau forum perpustakaan taman bacaan masyarakat.

Selain permasalahan pelayanan pendidikan, permasalahan pelayanan kesehatan di Jawa Barat pada saat ini menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan Indeks Kesehatan belum optimal dan masih perlu ditingkatkan, dengan capaian sebesar 80,72 poin pada tahun 2017, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dan rasio balita per satuan posyandu yang cenderung menurun. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, kinerja pelayanan kesehatan yang rendah. Disamping itu, permasalahan gizi kurang di masyarakat cenderung masih tinggi yang ditunjukkan dengan 1 dari 4 anak usia 0-59 bulan di Provinsi Jawa Barat mengalami stunting.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Jawa Barat pada saat ini masih perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan masih terjadinya diskriminasi pengupahan sektor informal terhadap perempuan, kualitas tenaga kerja perempuan masih rendah, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang masih rendah, paradigma pembangunan anak masih bersifat parsial, segmentatif, dan sektoral serta partisipasi perempuan di lembaga pemerintah baru mencapai 29,99 persen.

2. Kemiskinan, Pengangguran dan Masalah Sosial

Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, dan menjadi salah satu perhatian pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bahwa tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada Maret 2012 penduduk miskin Jawa Barat sebesar 10,09 persen, sedangkan Maret 2018 sebesar 7,45 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,38 persen. Persoalan kemiskinan bukan sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi



akar penyebab kemiskinan salah satunya adalah pola hidup konsumtif. Dimensi lain yang perlu diperhatikan dalam persoalan kemiskinan adalah tingkat kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2). Kemiskinan lebih banyak terjadi di desa dibandingkan dengan perkotaan, diindikasikan dari angka kemiskinan perdesaan sebesar 10,25 persen dan kemiskinan perkotaan sebesar 6,47 persen pada Maret Tahun 2018. Kemiskinan di pedesaan disebabkan oleh rendahnya akses pelayanan dasar, akses ekonomi dan infrastruktur serta pola hidup masyarakat.

Pengangguran merupakan salah satu masalah penting yang harus segera dituntaskan, dimana berdasarkan data BPS tercatat terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari Februari Tahun 2012 sebesar 9,84 persen menjadi 8,16 persen pada bulan Februari Tahun 2018 dan selama lima tahun terakhir terjadi penurunan pengangguran sebesar 1,68 persen. Meskipun terjadi penurunan secara persentase namun secara absolut jumlah pengangguran masih tinggi yaitu sebesar 1,86 juta orang pada Februari Tahun 2018 hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan kesempatan kerja baru serta tidak adanya *link and match* antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan pasar kerja. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas, banyak PHK, kurangnya minat pencari kerja untuk usaha mandiri menjadi faktor-faktor pemicu angka pengangguran tinggi di Jawa Barat.

Permasalahan sosial muncul diakibatkan karena perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Sumber permasalahan sosial bisa terjadi dari proses sosial kemasyarakatan dan bencana alam. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jawa Barat mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan karena masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, belum optimalnya penanganan bencana sosial, masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasan anak, perempuan dan *human trafficking*, belum optimalnya penanganan PMKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan Fakir Miskin serta Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan masih rentan terhadap konflik sosial dan kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Lebih lanjut, permasalahan sosial lainnya yang potensial dapat terjadi yaitu Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan, pemahaman ideologi serta



kerukunan beragama. Untuk itu, perlu langkah-langkah preventif dan advokasi yang intens demi terciptanya kerukunan umat beragama.

3. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Pemerataan pembangunan dan kesesuaian daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi perhatian utama dalam perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat. Pemerataan pembangunan dituangkan dalam rencana wilayah pengembangan, daya dukung lingkungan dituangkan dalam penetapan kawasan lindung 45%, sedangkan daya tampung lingkungan dituangkan dalam rencana pola ruang kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, serta kawasan budidaya lainnya. Namun disisi lain, dinamika pembangunan dipengaruhi faktor internal maupun eksternal yang lebih mengutamakan kepentingan investasi dan kebutuhan pertumbuhan ekonomi, sehingga berkembang tanpa prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, serta tidak menciptakan keseimbangan ekonomi sosial dan lingkungan. Pembangunan lebih terkonsentrasi di perkotaan yang sudah berkembang, dan sebagian lainnya berlokasi di kawasan yang berfungsi lindung atau di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya. Kondisi ini menyebabkan pemerataan pembangunan tidak tercapai, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak diutamakan.

Pemerataan pembangunan perlu mendapat dukungan dalam penetapan sistem perkotaan dan jaringan prasarana yang mampu meningkatkan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti kawasan unggulan pertanian, pariwisata dan industri. Konektivitas perlu ditingkatkan untuk mencapai efisiensi pergerakan orang, barang dan jasa di seluruh wilayah Jawa Barat. Pemerataan pembangunan berbasis komunitas diwujudkan melalui pemenuhan sarana prasarana permukiman seperti penyediaan perumahan, peningkatan cakupan pelayanan air bersih dan air baku, pengolahan persampahan dan limbah. Pelaksanaan pembangunan yang berbasis tata ruang dan lingkungan menjadi dasar peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga menjadi penting untuk diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan wilayah dan sektoral.



Daya dukung dan daya tampung lingkungan diwujudkan pula melalui antisipasi dampak perubahan iklim dan mitigasi bencana, sehingga meminimalisir kerugian ekonomi, memberi kenyamanan, dan berkelanjutan. Antisipasi dampak perubahan iklim melalui peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, diharapkan dapat meminimalkan kerusakan lingkungan, risiko bencana, dan kerugian ekonomi, serta mampu mempertahankan kesehatan masyarakat.

Pengolahan sampah terpadu lintas daerah, pembangunan sanitasi baik individual maupun komunal, pelayanan air minum, air bersih dan air baku harus dioptimalkan terutama peningkatan cakupan pelayanan dan distribusi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengelolaan air limbah domestik dan industri dalam rangka mengendalikan pencemaran sungai dan pengelolaan terpadu.

Salah satu hal penting dalam isu ini adalah penataan ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di Jawa Barat masih belum sepenuhnya memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

4. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Yang Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mengalami perlambatan hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya; belum berkembangnya koperasi dan usaha kecil dan menengah, khususnya pada akses modal KUKM terhadap dunia perbankan masih minim, belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif, pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil belum optimal, dan belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil.

Terjadinya penurunan realisasi penanaman modal asing yang disebabkan oleh realisasi investasi di kabupaten/kota belum merata, ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata, dinamika sosial mempengaruhi kepastian dan keamanan berusaha, belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan/kegiatan PMA/PMDN.

Permasalahan lain yang penting adalah belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif, hal



tersebut disebabkan oleh masih lemahnya konektivitas infrastruktur transportasi menuju destinasi wisata, terbatasnya atraksi di destinasi wisata yang menekan lama kunjung wisatawan, belum terinternalisasinya nilai-nilai *hospitality* di masyarakat, belum maksimalnya analisa pasar wisatawan, branding dan aktivitas promosi, keterbatasan produk ekonomi kreatif dan rendahnya konsumsi produk lokal.

Pada sektor pertanian terjadi beberapa permasalahan yang ditandai dengan Masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian, belum optimalnya aktivitas ekonomi pertanian dari hulu ke hilir, terganggunya ekosistem pertanian dan menurunnya luas lahan pertanian, hal tersebut disebabkan oleh intensitas pembangunan sektor non-pertanian sangat tinggi, ketersediaan data pertanian belum memadai, rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian, tingginya gangguan hama dan penyakit tanaman pertanian dan perkebunan, peternakan, serta rendahnya penerapan sertifikasi jaminan mutu hulu-hilir pertanian, rendahnya regerasi petani dan rendahnya akses permodalan.

Pada sektor perikanan dan kelautan terdapat permasalahan yang ditandai oleh turunnya Nilai Tukar Nelayan, hal tersebut disebabkan oleh eksploitasi ruang laut yang berlebihan dan tingginya tingkat pencemaran mengakibatkan penurunan laju tangkapan (*fish landing*) dan kerusakan lingkungan wilayah pesisir, pelabuhan perikanan Jawa Barat belum dimanfaatkan secara optimal dan masih terbatasnya pemenuhan sarana prasarana perikanan budidaya dan tangkap (lahan, kapal, dll), pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi secara sistematis antara hulu dan hilir, masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi oleh nelayan, dan pencemaran perairan umum dan laut.

Pada sektor pangan masih terdapat beberapa masalah yang ditandai oleh Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Jawa Barat yang masih berada dibawah rata-rata nasional dan ketidakstabilan harga. Hal ini menyebabkan masalah antara lain masih tingginya jumlah masyarakat miskin rawan pangan, ketersediaan pangan di Jawa Barat masih mengalami ketimpangan, masih rendahnya keragaman konsumsi pangan, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang berpengaruh terhadap gizi.



Pada sektor kehutanan masih terdapat permasalahan yang ditandai oleh degradasi lahan masih tinggi di Daerah Aliran Sungai (DAS), pengelolaan hutan belum optimal dan rendahnya produksi hasil hutan kayu dan non kayu. Hal ini disebabkan oleh tingginya aktivitas ekonomi secara berlebihan di kawasan hulu DAS, meningkatnya gangguan ekosistem, jumlah masyarakat miskin di sekitar hutan masih tinggi, dan rendahnya teknologi pemanfaatan sumberdaya hutan.

Sementara pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh menurunnya kontribusi perdagangan terhadap PDRB, hal tersebut disebabkan oleh dominasi barang impor, kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, promosi produk industri lokal (asal Jawa Barat) masih dirasa kurang, dan belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.

Lebih lanjut, pada sektor industri ditemui masalah pokok yaitu menurunnya pertumbuhan sektor industri. Hal tersebut disebabkan oleh produk industri memiliki daya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi (pajak dan biaya distribusi). Kondisi ini dipicu oleh infrastruktur pendukung kawasan industri belum terintegrasi yang mengakibatkan tingginya biaya logistik dan ketimpangan pengembangan kawasan industri di Jawa Barat bagian Barat dengan Jawa Barat bagian Timur, bahan baku industri mayoritas impor, peranan industri kecil dan menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri, dan belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi.

5. Reformasi Birokrasi

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Jawa Barat masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan, masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik, pelayanan data perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penataan peraturan perundang-undangan, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi dan Misi

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah:

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

Jabar Juara Lahir Batin: pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri.

Inovasi: pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi: perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antartingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:



1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.

Konsep Jabar Juara secara “batin” sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini. Secara umum misi pertama memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat Jawa Barat sebagai manusia dengan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan peran rumah ibadah sebagai pusat pembangunan peradaban di Jawa Barat.

Melalui misi ini peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban diperkuat untuk melahirkan manusia Jawa Barat yang berakhlak baik dan berjiwa besar. Selain masjid, pembangunan manusia di Jawa Barat yang bertaqwa juga dilakukan dengan pengembangan pesantren sebagai ujung tombak membangun lingkungan masyarakat yang damai, tentram, dan bahagia.

2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.

Misi ini diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Jawa Barat; agar rakyat Jawa Barat dapat menikmati pendidikan dan kesehatan; perempuan Jawa Barat mampu mengekspresikan potensi kebaikannya dengan optimal, dan para pemuda menyadari panggilan jiwanya dan dapat berperan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemenuhan kesejahteraan sosial dapat mendukung lahirnya masyarakat yang bahagia. Kebahagiaan diperoleh dari terjaminnya kehidupan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat. Kesejahteraan sosial juga mendorong lahirnya masyarakat yang berkualitas dan produktif. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya.

3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.

Misi 3 dalam penjawaban visi Jabar Juara Lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi memiliki inti utama yang berpusat pada pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan. Infrastruktur adalah investasi pembangunan yang akan mendorong lahirnya pusat



pertumbuhan baru, mengurangi beban logistik yang mampu menjaga stabilitas harga, serta mempercepat perpindahan manusia dan barang antar kota dan kabupaten. Berbagai aktivitas pembangunan dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup agar daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak terlampaui dan kelestarian ekosistem tetap terjaga.

4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.

Misi 4 membawa amanah yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Jawa Barat. Ekonomi umat yang adil dan sejahtera yang dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi Jawa Barat.

Penggunaan teknologi untuk optimalisasi proses dan menghubungkan antar pelaku ekonomi secara cepat dapat mengatasi ketimpangan antar kawasan perdesaan dan perkotaan, juga dapat mengurangi angka pengangguran melalui terbukanya peluang kerja baru.

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam tata kelola pemerintahan, ‘*Good Governance*’ atau ‘Tata Kelola yang Baik’ harus diimplementasikan di berbagai skala, mulai dari perusahaan hingga pemerintahan dengan delapan pilarnya yaitu konsensus, partisipasi, ketaatan pada hukum, efektivitas dan efisiensi, setara dan inklusif, responsif, transparan dan akuntabel.

Di Jawa Barat, *Good Governance* direpresentasikan melalui penerapan provinsi cerdas (*smart province*) untuk menjamin kinerja birokrasi yang kompetitif, transparan, efektif, efisien, dan handal.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat didasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan yang hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023, meliputi:

Religijs – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif

Jabar Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas: Pro Perubahan; Pro Kesetaraan; Pro Ekonomi Umat dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Jawa Barat 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.



Gambar 5.1
Konsep Pembangunan Jawa Barat

Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat didukung oleh pendayagunaan modal dasar pembangunan, yaitu:

1. Karakteristik masyarakat Jawa Barat yang religius dan berbudaya adiluhung mendorong terciptanya kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan;



2. Posisi geografis Jawa Barat yang berbatasan dengan ibukota negara menjadikan Jawa Barat sebagai lintasan utama arus regional penumpang dan barang Sumatera-Jawa-Bali;
3. Keanekaragaman sumber daya alam hayati dan sumber daya buatan serta sumber daya manusia produktif menjadi potensi pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat;
4. Keragaman budaya Jawa Barat merupakan modal sosial yang akan mempercepat proses pembangunan; dan
5. Keamanan dan ketertiban yang relatif stabil menjadi pendukung pelaksanaan pembangunan.

5.2. Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Jawa Barat periode 2018-2023 dilakukan melalui pendekatan teknokratik dan partisipatif yang holistik, sebagai penjabaran visi dan misi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dalam upaya pencapaian arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 periode berkenaan.

Indikasi pencapaian visi RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, ditandai dengan:

1. Provinsi termaju dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan yang bermutu, akuntabel dan berbasis ilmu pengetahuan.
2. Provinsi termaju dalam bidang pengembangan masyarakat yang cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi (*society development*).
3. Provinsi termaju dalam bidang pengelolaan pertanian dan kelautan.
4. Provinsi termaju dalam bidang energi baru dan terbarukan.
5. Provinsi termaju dalam bidang industri manufaktur, industri jasa dan industri kreatif.
6. Provinsi termaju dalam bidang infrastruktur yang handal dan pengelolaan lingkungan hidup yang berimbang untuk pembangunan berkelanjutan.
7. Provinsi termaju dalam bidang pengembangan budaya lokal dan menjadi destinasi wisata dunia.



Selain hal-hal yang disebutkan di atas, penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan 5 (lima) tahun yang akan datang, juga memperhatikan modal dasar Provinsi Jawa Barat, yaitu:

1. Karakteristik masyarakat Jawa Barat yang religius dan berbudaya merupakan modal sosial yang mampu mendorong terciptanya kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan;
2. Posisi geografis yang berbatasan dengan ibukota negara menjadikan Jawa Barat sebagai lintasan utama arus regional penumpang dan barang Sumatera-Jawa-Bali;
3. Keanekaragaman sumber daya alam hayati dan sumber daya buatan serta sumber daya manusia produktif menjadi potensi pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat; dan
4. Keamanan dan ketertiban yang relatif stabil menjadi pendukung pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil perumusan, maka penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Jawa Barat Tahun 2018-2023 terdiri dari 7 (tujuh) tujuan dan 21 (dua puluh satu) sasaran. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat. Pencapaian indikator kinerja Kepala Daerah selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Dengan demikian, target pencapaian pembangunan lima tahun ke depan jelas dan terukur.

Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka menengah dan jangka panjang digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Indeks Gini. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (*Impact*) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional dan nasional sehingga diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi,



dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta pelaku pembangunan lainnya.

Penetapan tujuan dan sasaran misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 ini merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan. Indikator makro Provinsi Jawa Barat disajikan pada Tabel 5.1.



Tabel 5.1
Proyeksi Indikator Makro Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Proyeksi					Kondisi Akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,69	71,06	71,42- 71,91	71,91 – 72,52	72,52- 73,13	73,13- 73,74	73,74- 74,35	73,74- 74,35
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,39	1,36	1,50	1,48	1,45	1,43	1,41	1,41
3.	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,83	7,25	6,66-6,90	6,07-6,31	5,48-5,72	4,89-5,13	4,30-4,54	4,30-4,54
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,22	8,17	8,0-7,9	7,9-7,7	7,7-7,5	7,5-7,3	7,3-7,1	7,3-7,1
5.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,35	5,64	5,4 - 5,8	5,5 – 5,9	5,6 – 6,0	5,7 – 6,1	5,8 – 6,2	5,8 – 6,2
6.	Indeks Gini	Poin	0,393	0,405	0,38-0,39	0,37-0,38	0,37-0,38	0,36-0,37	0,36-0,37	0,36-0,37

Sumber: Hasil proyeksi, 2019



Penentuan proyeksi laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dalam RPJMD 2018-2023 melibatkan *stakeholder* terkait antara lain para pakar ekonomi dari akademisi, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat, pelaku usaha yang tergabung dalam KADIN Jawa Barat dan asosiasi pelaku usaha lainnya dengan mempertimbangkan teori ekonomi dan data historis capaian ekonomi Jawa Barat berdasarkan data BPS.

Dalam proyeksi laju pertumbuhan ekonomi 5 (lima) tahun kedepan mempertimbangkan kondisi perekonomian global dan nasional serta beberapa asumsi yang bersifat mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah menggambarkan size market yang besar sehingga meningkatkan konsumsi rumah tangga dan daya tarik investasi.
2. Ekonomi kreatif yang tumbuh kembang mengangkat potensi lokal dan pariwisata Jawa Barat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang menjanjikan.
3. Keunggulan sumber daya alam yang tidak dimiliki daerah lain dalam sektor pertanian, peternakan dan perikanan.
4. Program-program pemerintah daerah terutama dalam bentuk pendampingan kolaborasi dengan pelaku pembangunan lainnya akan menstimulus pertumbuhan inklusif.
5. Penyelesaian dan beroperasinya sejumlah proyek infrastruktur antara lain BIJB, Tol Bocimi, Tol Cisemdawu, Cikampek *elevated* dan Pelabuhan Patimban.



Tabel 5.2
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi										
Misi 1: Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban										
1.1. Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial		Indeks Kerukunan Umat Beragama (persen)	68,5	68,7	68,6 - 69	69,1 - 69,5	69,6 - 70	70,1 - 70,5	70,6 - 71	70,6 - 71
	1.1.1. Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	a. Indeks Kerukunan Umat Beragama (persen)	68,5	68,7	68,6 - 69	69,1 - 69,5	69,6 - 70	70,1 - 70,5	70,6 - 71	70,6 - 71
		b. Indeks Demokrasi (Poin)	68,78	73,91	68,79 - 70,78	70,79 - 71,78	71,79 - 72,78	72,79 - 73,78	73,79 - 74,78	73,79 - 74,78
Misi 2: Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif										
2.1. Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan Masyarakat		Indeks Kebahagiaan (Poin)	69,58	70-71	70-71	70-71	71-73,5	71-73,5	73,6-76	73,6-76
	2.1.1. Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	a. Indeks Kebahagiaan (Poin)	69,58	70-71	70-71	70-71	71-73,5	71-73,5	73,6-76	73,6-76



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	2.1.2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan	a. Usia Harapan Hidup (tahun)	72,47	72,76	73,67 – 74,87	74,87 – 76,07	76,07– 77,27	77,27 – 78,47	78,47 – 79,67	78,47 – 79,67
	2.1.3. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Poin)	70,04	70,14	70,34	71	72	72,3	73,25	73,25
		b. Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Persen)	89,18	89,52	89,32	89,82	90,5	91	92	92
	2.1.4. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	a. Rata-Rata lama sekolah (tahun)	8,14	8,18	8.28	8.39	8.49	8.60	8.70	8.70
		b. Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,42	12,88	13.15	13.39	13.64	13.89	14.14	14.14
	2.1.5. Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan, Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional	a. Indeks Pembangunan Pemuda (Poin)	46,33	49,00	53,63	56,31	59,13	62,09	65,19	65,19



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
2.2. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tenang berbasis kearifan lokal dan seni budaya daerah		a. Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (Persen)	N/A	N/A	16,63	18,65	20,72	21,83	22,16	22,16	
	2.2.1	Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal	a. Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (Persen)	N/A	N/A	16,63	18,65	20,72	21,83	22,16	22,16
	2.2.2	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	a. Indeks Ketentraman dan Ketertiban (poin)	69,58	69,61	70-71	70-71	71-73,5	71-73,5	73,6-76	73,6-76
Misi 3: Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah											
3.1. Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan		a. Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)	40,90	40,90-41,00	41-43	44-46	47-49	50-52	53-55	53-55	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	3.1.1. Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok	a. Konsumsi listrik per kapita (Kwh/kapita)	1.155	1.231	1.300	1.340	1.386	1.447	1.503	1.503
	3.1.2. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	a. Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)	40,90	40,90-41,00	41 - 43	44 - 46	47 - 49	50 - 52	53 - 55	53 - 55
	3.1.3. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	a. Indeks Desa Membangun (Poin)	0,64	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69	0,69
	3.1.4. Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan	a. Usulan pembentukan Daerah persiapan otonomi baru (Usulan)	0	0	0	1	1	2	2	6
3.2. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan		a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Poin)	51,85 (metode lama)	49,54 (metode baru)	49,76	49,98	50,20	50,42	50,64	50,64



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	3.2.1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Poin)	51,85 (metode lama)	49,54 (metode baru)	49,76	49,98	50,20	50,42	50,64	50,64	
		b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	2,02	2,38	2,80	3,92	5,87	7,11	7,72	7,72	
	3.2.2. Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik	a. Indeks Penggunaan Air (Poin)	N/A	N/A	1,1923	1,1910	1,1834	1,1822	1,1811	1,1811	
	3.2.3. Meningkatkan ketangguhan terhadap bencana	a. Indeks Risiko Bencana (IRB) (Poin)	166	166	165	164	163	162	161	161	
	Misi 4: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.										
	4.1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta		a. Produk Domestik Regional Bruto (ADHB) (Triliun Rupiah)	1.788,38	1.962,23	2.288,75	2.471,85	2.669,60	2.883,16	3.113,82	3.113,82



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
mengurangi disparitas ekonomi	4.1.1. Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan yang mandiri	a. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Poin)	85,2	81,6	82,4	83,2	84	84,8	85,6	85,6
		b. Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin)	108,39	110,90	113,11	115,36	117,65	120,00	122,38	122,38
	4.1.2. Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	a. Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (%)	2,71	2,85	2,30-3,00	3,01-3,15	3,16-3,30	3,31-3,45	3,46-3,50	3,46-3,50
	4.1.3. Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat	a. Laju pertumbuhan Sektor Industri (%)	5,35	6,49	2,63	2,70	2,77	2,85	2,94	2,94
		b. Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	4,55	4,19	3	3	4	4	5	5
	4.1.4. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (Triliun Rupiah)	449,37	473,00	495,40	520,17	546,18	573,48	602,15	602,15
		b. Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (%)	18,06	20,1	21	22	23	24	25	25



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota										
5.1. Terwujudnya <i>good governance</i> dan <i>whole of government</i>		a. Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)	BB	BB	BB	A	A	A	A	A
	5.1.1. Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang <i>smart</i> , bersih dan akuntabel	b. Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)	BB	BB	BB	A	A	A	A	A
	5.1.2. Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.	a. Tingkat efektivitas kerjasama Daerah (%)	N/A	N/A	50	60	70	80	90	90

Sumber: hasil proyeksi



5.3. Prioritas Pembangunan Daerah 2018-2023

Prioritas pembangunan daerah merupakan janji-janji kampanye gubernur dan strategis untuk dilaksanakan pada Tahun 2018–2023. Prioritas Pembangunan Daerah ini salah satu pendukung terhadap pencapaian visi dan misi. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023, meliputi:

1. Akses pendidikan untuk semua dan pengembangan budaya
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata
5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara
6. Infrastruktur konektivitas wilayah
7. Gerakan membangun desa (Gerbang desa)
8. Subsidi gratis golongan ekonomi lemah (golekmah)
9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah

Prioritas Pembangunan Daerah diatas akan menghasilkan transformasi pembangunan berupa pesantren juara, masjid juara, ulama juara, kesehatan juara, perempuan juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, guru juara, ibu dan anak juara, millennial juara, perguruan tinggi juara, SMK juara, transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, energi juara, nelayan juara, pariwisata juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, UMKM juara, wirausaha juara, birokrasi juara, APBD juara, ASN juara, dan BUMD juara.

Rangkaian prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 ini akan diterjemahkan lebih lanjut kedalam program pembangunan daerah yang disajikan pada Bab VI RPJMD ini.



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Permasalahan serta Isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) Tahun 2018-2023 dapat dijabarkan sebagai berikut.

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik dan Integratif

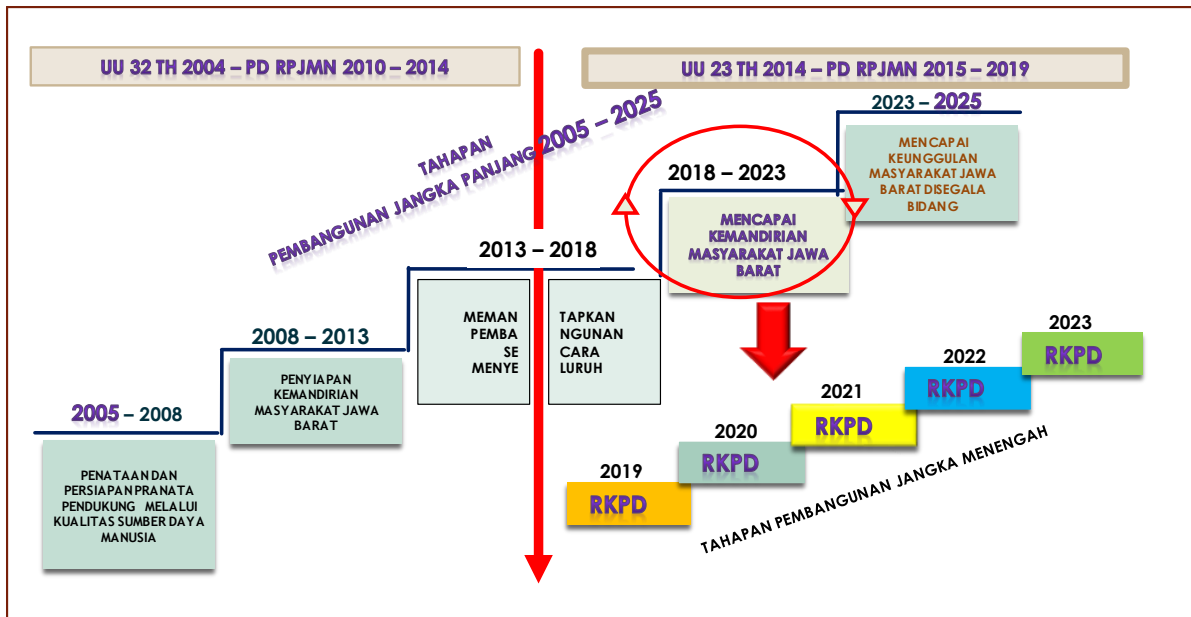
Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan periode 2018-2023 merupakan tahap pembangunan keempat dari RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.



Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, tema atau fokus pembangunan pada periode 2018-2023 adalah “Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”. Tema ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023. RPJMD akan menjabarkan tema tersebut setiap tahun, yang akan menjadi pedoman bagi penentuan fokus/tema pembangunan dalam RKPD. Hal ini disajikan pada Gambar 6.1.



Gambar 6.1.
Posisi RPJMD Tahun 2018-2023 dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan Penjabarannya ke RKPD

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yaitu metode SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Lingkungan itu sendiri mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*),



kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*). Analisis ini didasarkan pada logika berpikir bahwa dalam menentukan strategi kebijakan yang akan diimplementasikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada, sehingga dapat dicapai keseimbangan antara kondisi internal dengan kondisi eksternal.

Berdasarkan perhitungan, yang menghasilkan alternatif strategi yang mendapat bobot paling tinggi adalah *weakness – opportunity* (WO) yaitu Strategi Mengurangi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang. Hal ini dapat diartikan bahwa Provinsi Jawa Barat menghadapi peluang pasar yang sangat besar tetapi di sisi lain menghadapi berbagai kelemahan internal. Fokus strategi meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik. Meskipun strategi WO merupakan alternatif strategi terbaik yang memiliki nilai pembobotan yang paling tinggi, namun belum tentu semua strategi-strategi tersebut dapat dilaksanakan secara simultan, sehingga perlu dilakukan prioritas apabila dalam pelaksanaannya secara bersama-sama menemui kendala sumber daya (*resources constraints*).

Adapun pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat disajikan pada Tabel 6.1.



Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah
Provinsi Jawa Barat 2018-2023

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
VISI: TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI			
Misi 1: Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban			
1.1. Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial	1.1.1. Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	1.1.1.1. Meningkatkan Penerapan Nilai-nilai Agama dan Pancasila dalam kehidupan masyarakat	a. Meningkatkan fasilitasi penguatan sumber daya dan lembaga keagamaan serta ekonomi umat
			b. Meningkatkan wawasan ideologi kebangsaan
Misi 2: Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif			
2.1. Meningkatnya Kebahagiaan dan Kesejahteraan Masyarakat	2.1.1. Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	2.1.1.1. Mempercepat Penanggulangan kemiskinan secara terpadu	a. Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin
			b. Meningkatkan Kemampuan Ekonomi bagi Masyarakat Miskin
			c. Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Dasar bagi Masyarakat Miskin
		2.1.1.1. Memperluas Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha	a. Meningkatkan Kapasitas dan Keterampilan Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar
			b. Mengembangkan Inkubator Bisnis



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	2.1.2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan	2.1.2.1 Meningkatkan kualitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan	a. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing b. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan c. meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif
	2.1.3. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	2.1.3.1. Memperkuat Peran Keluarga dan Kesetaraan Gender	a. Meningkatkan ketahanan keluarga serta Peran dan Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.1.4. Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	2.1.4.1. Menyelenggarakan Pendidikan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau	a. Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berdaya saing dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi yang menjangkau seluruh wilayah b. Meningkatkan kesejahteraan, Kompetensi dan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah c. Meningkatkan minat baca masyarakat
	2.1.5. Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan, Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional	2.1.5.1. Meningkatkan Peran Stakeholder Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan	a. Meningkatkan Peran Organisasi Kepemudaan dan Pembinaan Karakter Pemuda yang Mandiri dan Kreatif b. Menumbuhkan budaya bergerak dan berolahraga di masyarakat c. Penguatan sistem pendidikan dan pembinaan prestasi olahraga



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2.2. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram berbasis kearifan lokal dan seni budaya daerah	2.2.1. Meningkatnya pelestarian kebudayaan lokal	2.2.1.1. Melestarikan kearifan lokal dan kebudayaan Jawa Barat Memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam meningkatkan jumlah objek pemajuan kebudayaan	a. Meningkatkan pelestarian, dan pengakuan atas seni dan budaya lokal
	2.2.2. Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	2.2.2.1. Meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat	a. Meningkatkan penanganan pelanggaran Perda
Misi 3: Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah			
3.1. Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	3.1.1. Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok	3.1.1.1. Meningkatkan akses layanan listrik yang memenuhi standar	a. Meningkatkan kualitas operasional instalasi tenaga listrik b. Meningkatkan jangkauan pelayanan listrik untuk kepentingan aktivitas ekonomi, pelayanan publik dan rumah tangga hingga ke pelosok
	3.1.2. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	3.1.2.1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem jaringan infrastruktur transportasi	a. Meningkatkan kemantapan Jalan sampai ke pelosok b. Membangun prasarana jalan yang menghubungkan wilayah potensial



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		3.1.2.2. Mengembangkan sistem jaringan transportasi massal yang handal dan modern	a. Mengembangkan sistem jaringan transportasi massal perkotaan berbasis jalan dan rel yang aman, nyaman dan terjangkau dan antar moda
			b. Mengembangkan prasarana transportasi Darat, Laut, Udara dan ASDP yang berkeselamatan dan menghubungkan wilayah strategis
	3.1.3. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	3.1.3.1 Mempercepat pembangunan desa	a. Memperkuat infrastruktur dasar desa dan kawasan perdesaan
			b. Memperkuat ekonomi desa dan kawasan perdesaan
	3.1.4. Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan	3.1.4.1. Optimalisasi penataan daerah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi baru	c. Memperkuat pemerintahan desa
			Mempercepat pemekaran wilayah yang memiliki potensi untuk menjadi DOB
3.2. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	3.2.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	3.2.1.1. Meningkatkan pengelolaan DAS, konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya	a. Meningkatkan kualitas dan penyediaan air serta kualitas udara
			b. Meningkatkan kualitas tutupan lahan
			c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		3.2.1.2. Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	a. Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, dan pengelolaan limbah domestik, serta kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim
		3.2.1.3. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	a. Meningkatkan pengelolaan limbah domestik
			b. Meningkatkan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	3.2.2. Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik	3.2.2.1. Meningkatkan kelestarian dan pendayagunaan sumber daya air	c. Meningkatkan tertib tata kelola pertanahan
			a. Meningkatkan kelestarian dan perlindungan terhadap Sumber Daya Air
	b. Meningkatkan pengelolaan layanan air untuk domestik, industri dan pertanian		
3.2.3. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	3.2.3.1. Mengurangi Risiko Bencana	c. Meningkatkan kinerja jaringan irigasi	
		a. Meningkatkan mitigasi dan penanggulangan bencana	
Misi 4: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi Dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan			
4.1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan	4.1.1. Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang mandiri	4.1.1.1. Menyediakan pangan berkualitas bagi masyarakat	a. Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi		4.1.1.2. Mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi/produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan	a. Revitalisasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia.
			b. Pengembangan kawasan kluster pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan
			c. Mengembangkan unit pengelolaan hutan rakyat lestari dan meningkatkan akses pemanfaatan hutan melalui perhutanan sosial
	4.1.2. Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	4.1.2.1. Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata	a. Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata serta meningkatkan kualitas ekonomi kreatif
			b. Peningkatan promosi pariwisata berbasis digital
	4.1.3. Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat	4.1.3.1. Meningkatkan daya saing industri	a. Mengembangkan kluster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi
			4.1.3.2. Meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri
a. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional			
b. Menciptakan iklim usaha yang berdaya saing			



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	4.1.4. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	4.1.4.1. Meningkatkan investasi daerah	a. Meningkatkan kualitas kelembagaan, dukungan pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar (<i>Off Taker & Promosi</i>)
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kepemimpinan Yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota			
5.1. Terwujudnya <i>good governance</i> dan <i>whole of government</i>	5.1.1. Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang <i>smart</i> , bersih dan akuntabel	5.1.1.1. Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi	a. Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis <i>e-government</i>
			b. Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika
	5.1.2 Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.	5.1.2.1. Meningkatkan kerjasama pembangunan	a. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar tingkat pemerintahan

Sumber: hasil analisis, 2018



Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan diatas, maka dapat disimpulkan tema atau fokus pembangunan. Tema atau fokus pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi pemerintah Jawa Barat dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD setiap tahun.

Penetapan tema tahunan pada RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari tema pembangunan tahap keempat pada RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, yaitu *Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat*. Untuk mewujudkan tema pembangunan tahap keempat pada RPJPD Provinsi Jawa Barat, maka tema pembangunan Tahun 2018-2023 disajikan pada Gambar 6.2 berikut ini.



Gambar 6.2.
Tema Pembangunan Lima Tahunan Provinsi Jawa Barat

6.2. Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial

Pendekatan spasial mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, khususnya dalam menyelaraskan kebijakan ruang antar wilayah, antar sektor dan dimensi waktu pembangunan RPJMD Tahun 2018-2023. Fungsi RTRW merupakan matra spasial RPJPD yang mengarahkan lokasi dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Provinsi Jawa Barat. Kedudukan RTRW adalah sebagai pedoman dalam:

- Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana sektoral lainnya;
- Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;



- c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah Kabupaten/Kota, serta keserasian antarsektor;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- e. Penataan ruang KSP; dan
- f. Penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Tahun 2018 - 2023 yang telah dirumuskan dengan pendekatan holistik-tematik dan integratif selain memperhatikan pelaksanaan urusan sesuai kewenangan provinsi harus mengadopsi kebijakan penataan ruang yang terkait pengembangan wilayah, pengembangan struktur ruang (sistem perkotaan dan jaringan prasarana), dan pola ruang (kawasan lindung dan budidaya). Kebijakan penataan ruang merupakan arahan dalam mencapai tujuan penataan ruang Jawa Barat yaitu mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdayasaing menuju Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia. Tujuan penataan ruang Jawa Barat dicapai melalui sasaran penataan ruang, meliputi:

1. Tercapainya ruang untuk kawasan lindung seluas 45% dari wilayah Jawa Barat dan tersedianya ruang untuk ketahanan pangan;
2. Terwujudnya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
3. Terwujudnya ruang untuk kawasan perkotaan dan perdesaan dalam sistem wilayah yang terintegrasi; dan
4. Terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang.

Kebijakan pengembangan wilayah memberi acuan fokus pengembangan dan arahan sifat pengembangan secara kewilayahan sesuai karakteristik, potensi pengembangan (kebijakan nasional dan infrastruktur strategis eksisting), serta daya dukung lingkungan untuk mendukung pembangunan. Kebijakan struktur ruang dan pola ruang memberi arahan pengembangan sarana dan prasarana serta pengembangan sektor ekonomi yang dominan dalam skala provinsi. Penyelarasan ini berimplikasi pada kesesuaian arahan pembangunan ekonomi, sosial, dan fisik dengan target lokasi dan prioritas penanganan yang sesuai dengan fokus pengembangan wilayah serta rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan.

Selanjutnya dalam perumusan rencana pembangunan, penyelarasan prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 perlu memperhatikan indikasi program pemanfaatan ruang dalam dimensi



waktu yang sama, yang merupakan perwujudan rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang untuk mencapai tujuan penataan ruang Jawa Barat. Kebijakan penataan ruang wilayah Jawa Barat yang diterapkan sebagai pendekatan spasial meliputi:

a. Kebijakan Pengembangan Wilayah

Pembagian 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP) serta keterkaitan fungsional antarwilayah dan antarpusat pengembangan. Pembagian WP meliputi WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP Sukabumi dsk, WP KK Cekungan Bandung, dan WP Priangan Timur dan Pangandaran. Penetapan WP dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan, dan fokus peningkatan keunggulan tiap WP. Arah pembagian wilayah pengembangan tercantum dalam Tabel 6.2 dan Gambar 6.3.



Tabel 6.2
Arahan Pembagian Wilayah Pengembangan

Wilayah Pengembangan	Arah Pengembangan	Fokus Pengembangan
<p>WP Bodebekpunjur</p> <p>Tema Pengembangan: mengendalikan perkembangan fisik wilayah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melengkapi fasilitas pendukung PKL - Mengembangkan infrastruktur strategis - Mengembangkan perdagangan jasa, industri non polutan dan industri kreatif, pariwisata - Investasi padat modal yang efisien lahan, air baku, energi, teknologi tinggi, nonpolutif - Pengendalian pemanfaatan lahan di kawasan konservasi, pelibatan swasta dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi, peningkatan SDM lokal - Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein hewani) 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kota Bogor, Depok, dan Bekasi: Kota satelit utk mendorong pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Jakarta; Simpul pelayanan dan jasa perkotaan; perdagangan dan jasa serta industri padat tenaga kerja. b. Kab. Bogor, Bekasi: Kawasan penyangga dalam sistem PKN Kawasan Perkotaan Jakarta; Industri ramah lingkungan (tidak banyak menggunakan air tanah). c. Kawasan Puncak (Bogor-Cianjur): Fokus pada kegiatan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan lindung; kawasan penyangga dalam sistem PKN Kawasan Perkotaan Jakarta.
<p>WP Sukabumi, dsk</p> <p>Tema Pengembangan: Mendorong perkembangan koridor Sukabumi-Cianjur dan PKW Palabuhanratu, serta membatasi perkembangan di bagian selatan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL - Mengembangkan infrastruktur strategis - Mengembangkan agribisnis, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, wisata pantai dan agro, dan wisata minat khusus. - Pengembangan bisnis kelautan yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan modal investasi untuk menghasilkan daya saing global 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kota Sukabumi: pusat pengolahan agribisnis dan peternakan, Agropolitan, wisata agro, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKW Sukabumi. b. Kab. Sukabumi: Agribisnis, kawasan penggembalaan umum ternak, Ruminansia, wisata pantai, wisata agro, wisata minat khusus, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKW Palabuhanratu dan simpul layanan wilayah sekitarnya, pengembangan wilayah pesisir selatan melalui pengembangan wisata pantai dan minat khusus serta perikanan tangkap, pertambangan mineral logam dan non-logam, pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi yang diarahkan untuk kegiatan bisnis kelautan di PKW Palabuhanratu. c. Kab. Cianjur: Agribisnis, pertanian, perkebunan, kehutanan, kawasan penggembalaan umum ternak ruminansia, wisata agro, wisata alam, industri kreatif, pengembangan wilayah pesisir untuk perikanan tangkap, wisata minat khusus, pertambangan mineral logam dan non-logam.



Wilayah Pengembangan	Arah Pengembangan	Fokus Pengembangan
<p>WP KK Cekungan Bandung</p> <p>Tema Pengembangan: Mengendalikan pembangunan dengan mengoptimalkan fungsi pemerintahan di tingkat pusat dan daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKW dan PKL - Mengendalikan pengembangan kegiatan di kawasan perkotaan - Mengembangkan kawasan pinggiran PKN dengan tetap menjaga fungsi lindung kawasan - Mengembangkan pembangunan dan hunian vertikal 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kota Bandung: PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya; Perdagangan dan jasa; Industri kreatif dan <i>high tech</i>; Pariwisata; Transportasi. b. Kab. Bandung: Bagian dari PKN Metropolitan Bandung; Kawasan Peruntukan Industri; Wisata alam; Pertanian; Perkebunan. c. Kab. Sumedang: PKL, melengkapi sarana dan prasarana minimal PKL; Pusat pendidikan tinggi (Jatinangor); Agrobisnis; Kawasan Industri. d. Kota Cimahi: Kawasan inti PKN Metropolitan Bandung; Perdagangan dan jasa; Industri kreatif dan <i>high tech</i>. e. Kab. Bandung Barat: Bagian dari PKN Metropolitan Bandung; Industri non polutif; pertanian; Industri kreatif dan <i>high tech</i>.
<p>WP Priatim- Pangandaran</p> <p>Tema Pengembangan: Mendorong perkembangan PKW Tasikmalaya dan PKW Pangandaran, serta pengembangan secara terbatas kawasan Provinsi di bagian selatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL - Mengembangkan infrastruktur strategis - Mengembangkan pariwisata Pangandaran dsb - Mengembangkan sektor dan komoditas unggulan dengan meningkatkan akses sentra-sentra produksi 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kota Tasikmalaya: PKW Tasikmalaya, pusat pengembangan industri kerajinan, perdagangan dan jasa. b. Kab. Tasikmalaya: sektor pertanian dan industri pengolahannya, perikanan dan industri pengolahannya, pusat pengembangan industri kerajinan, wisata alam. c. Kab. Garut: Pertanian dan industri pengolahannya, perikanan dan industri pengolahannya, wisata alam dan minat khusus d. Kab. Ciamis: sektor pertanian, dan industri pengolahan hasil pertanian e. Kota Banjar: simpul transportasi dan jasa perkotaan di Jabar Selatan, perdagangan dan jasa, pintu gerbang Provinsi Jawa Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. f. Kab. Pangandaran: diarahkan sebagai PKW dengan sarana prasarana terintegrasi, sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional, sektor pertanian, industri pengolahan hasil pertanian, wisata pantai, perikanan dan industri pengolahannya.
<p>WP Purwakarta</p> <p>Tema Pengembangan: Mendorong pengembangan kawasan dengan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL - Mengembangkan infrastruktur strategis - Mengembangkan pertanian tanaman pangan, agroindustri, industri manufaktur non polutif dan non ekstraktif, industri kreatif dan multimedia, 	<ol style="list-style-type: none"> a. PKW Cikampek-Cikopo: memenuhi fungsinya sebagai PKW dengan melengkapi sarana prasarana yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya (<i>hinterland</i>). b. Kab. Purwakarta: industri non-polutif dan non-ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air, serta industri



Wilayah Pengembangan	Arah Pengembangan	Fokus Pengembangan
tetap mengendalikan sawah di Pantura	bisnis kelautan yang berdaya saing tinggi dan berorientasi ekspor	kreatif; pariwisata dan agroindustri; pertambangan mineral logam dan non-logam. c. Kab. Subang: simpul pendukung pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya; pertanian lahan basah berkelanjutan; industri non-polutif dan non-ekstraktif yang tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan sawah; bisnis kelautan; pertambangan mineral non-logam. d. Kab. Karawang: simpul pendukung pengembangan PKN Kaw. Perkotaan Bodebek; pertanian lahan basah berkelanjutan; bisnis kelautan; industri non-polutif dan non-ekstraktif yang tidak mengganggu irigasi dan cadangan air; agroindustri.
WP Ciayumajakuning Tema Pengembangan: Mendorong pengembangan wilayah gerbang timur Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKW dan PKL - Mengembangkan infrastruktur strategis - Pola ruang PKN dalam bentuk ring (Ring 1: Jasa perdagangan dan transportasi, Ring 2: Industri berbasis lokal, Ring 3: Penyedia bahan baku) - Mengembangkan wisata budaya, religi dan alam - Mendorong agribisnis yang didukung sektor industri, perikanan laut dan darat, pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan dan peternakan di kawasan pinggir - Mendorong pengembangan hutan mangrove, rumput laut dan perikanan tambak - Pengendalian perikanan tangkap di kawasan pesisir 	a. Kota Cirebon: PKN Cirebon, dengan sarpras yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya, simpul utama pelayanan, jasa, perdagangan dan industri di Jabar bagian Timur, wisata budaya dan religi. b. Kab. Cirebon: Bagian dari PKN Cirebon dengan sarpras yang terintegrasi, industri, bisnis kelautan, pertanian, dan pertambangan mineral. c. Kab. Indramayu: PKW Indramayu, dengan sarpras yang terintegrasi, pertanian lahan basah berkelanjutan, bisnis perikanan dan kelautan, industri pertambangan terutama minyak dan gas, agribisnis dan agroindustri. d. Kab. Majalengka: Lokasi Bandara Internasional Jawa Barat dan <i>Aerocity</i> di Kertajati, daerah Konservasi utama TN. G. Ciremai, agribisnis, industri, dan pertambangan mineral, pengembangan sarpras yang terintegrasi di PKW Kadipaten. e. Kab. Kuningan: Sebagai PKL, dengan sarana prasarana pendukung, pertanian, wisata alam, agroindustri, daerah konservasi utama TN G. Ciremai, dan perlindungan sumber air. f. Kab. Sumedang: Sebagai PKL, dengan sarana prasarana pendukung, agribisnis, industri, dan pertambangan mineral.

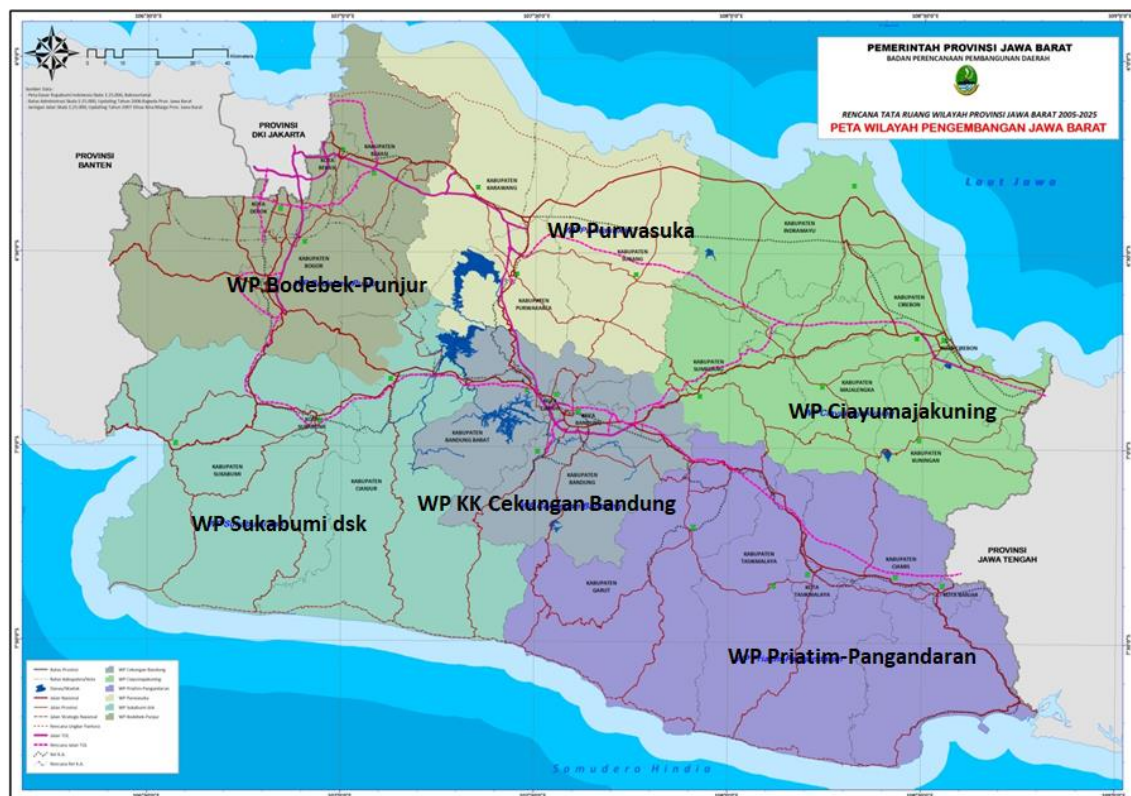
Sumber: RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029



Keterkaitan fungsional antarwilayah pengembangan merupakan strategi yang ditujukan untuk meningkatkan sinergitas dan integrasi pengembangan wilayah antar WP dan Kawasan Khusus (KK) untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, meliputi:

- Kawasan yang terletak di bagian Utara provinsi, mencakup WP Bodebekpunjur dan sebagian WP Purwasuka, WP KK Cekungan Bandung dan WP Ciayumajakuning, menjadi **kawasan yang dikendalikan perkembangannya**;

Dikendalikan: membatasi perkembangan kegiatan budidaya yang dapat meningkatkan terjadinya alih fungsi lahan kawasan lindung dan pertanian lahan basah beririgasi teknis yang dapat mengganggu keberlanjutan ekosistem wilayah, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.



Sumber: RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029

Gambar 6.3.
Pembagian Wilayah Pengembangan Provinsi Jawa Barat

- Kawasan yang terletak di bagian Timur provinsi, mencakup sebagian WP Ciayumajakuning, WP KK Cekungan Bandung dan WP Priangan Timur-Pangandaran, ditetapkan sebagai **kawasan yang didorong perkembangannya**;



Didorong: memfasilitasi berkembangnya kegiatan budidaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tanpa mengabaikan fungsi lingkungan yang merupakan karakteristik khusus wilayah tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan melalui pengembangan kawasan Segitiga Emas Cirebon-Patimban-Kertajati sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat

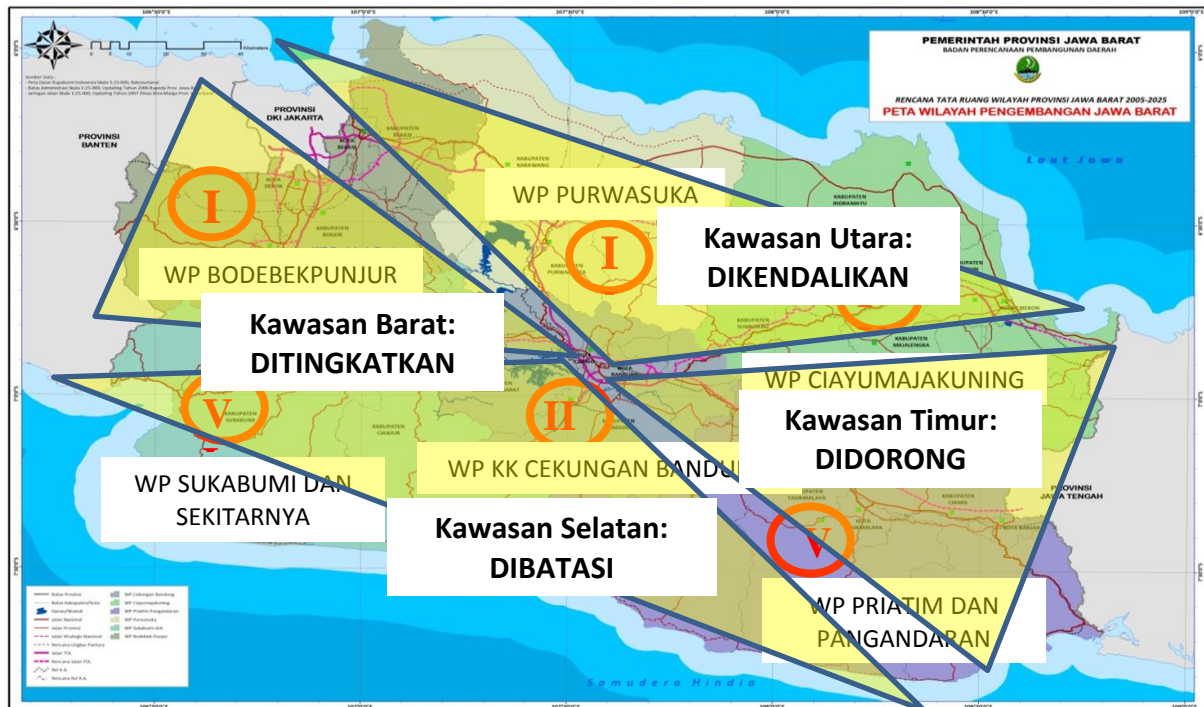
- Kawasan yang terletak di bagian Selatan provinsi, meliputi sebagian WP KK Cekungan Bandung, WP Sukabumi dan sekitarnya serta WP Priangan Timur-Pangandaran, ditetapkan menjadi **kawasan yang dibatasi perkembangannya;**

Dibatasi: pengembangan kota-kota perlu memperhatikan keseimbangan daya dukung lingkungan sesuai dengan kondisi dan karakteristik yang dimiliki. Kerentanan terhadap risiko bencana alam (gempa, letusan gunung berapi, gerakan tanah, dan bahaya geologi lainnya); gangguan terhadap hulu DAS, menghindari alih fungsi lahan lindung dan lahan pertanian sawah produktif.

- Kawasan yang terletak di bagian Barat provinsi, meliputi sebagian WP Bodebekpunjur, WP KK Cekungan Bandung dan WP Sukabumi dan sekitarnya, ditetapkan menjadi **kawasan yang ditingkatkan perkembangannya.**

Ditingkatkan: prioritas fasilitasi pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju cita-cita yang diinginkan, tanpa mengabaikan fungsi lingkungan yang harus dijaga.

Keterkaitan fungsional antarwilayah dan antarpusat pengembangan tercantum pada Gambar 6.4.



Gambar 6.4.
Keterkaitan Fungsional Antarwilayah dan Antarpusat Pengembangan

b. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang

- 1) Pemantapan peran perkotaan di Jawa Barat sesuai fungsi yang telah ditetapkan, yaitu PKN, PKW, dan PKL.
- 2) Pengembangan sistem kota-desa yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung serta fungsi kegiatan dominannya.
- 3) Pengendalian perkembangan kawasan perkotaan di wilayah Utara, serta wilayah yang berada di antara wilayah utara dan selatan untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan.
- 4) Pengendalian perkembangan sistem kota di wilayah Selatan dengan tidak melebihi daya dukung dan daya tampungnya.
- 5) Penataan dan pengembangan infrastruktur wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah untuk mewujudkan sistem kota di Jawa Barat.
- 6) Mendorong terlaksananya peran Wilayah Pengembangan (WP) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk.
- 7) Mengutamakan pembangunan hunian vertikal pada kawasan permukiman perkotaan guna optimalisasi dan efisiensi ruang



budidaya yang semakin terbatas, terutama pada kawasan yang perlu dikendalikan.

- 8) Mengamankan kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan rencana tata ruang pertahanan dan keamanan.

c. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang

- 1) Kebijakan Pengembangan Kawasan Lindung:
 - a) Pencapaian luas kawasan lindung sebesar 45%.
 - b) Menjaga kualitas kawasan lindung.
- 2) Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya:
 - a) Mempertahankan lahan sawah berkelanjutan serta meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan guna menjaga ketahanan pangan Jawa Barat dan Nasional.
 - b) Mendorong pengelolaan wilayah pesisir, dan pulau kecil dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumberdaya dan kegiatan pembangunan berkelanjutan.
 - c) Mengoptimalkan potensi lahan budidaya dan SDA, guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

d. Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

1. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengawasan dan penertiban berdasarkan arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
2. Pemberian izin pemanfaatan ruang sebagai salah satu alat pengendalian pemanfaatan ruang.
3. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang merupakan kewenangan kabupaten/kota, berpedoman pada RTRWP.
4. Pemberian izin pemanfaatan ruang oleh kabupaten/kota yang berdampak besar dan/atau menyangkut kepentingan nasional dan/atau provinsi, dikoordinasikan dengan Gubernur.



Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ditindaklanjuti dengan rencana struktur ruang (rencana sistem perkotaan dan jaringan prasarana), rencana pola ruang (rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya), penetapan Kawasan Strategis Provinsi (KSP), indikasi program utama sebagai perwujudan 4 (empat) sasaran penataan ruang Jawa Barat, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 menetapkan 24 KSP dan arahan penanganannya, serta diamanatkan untuk menyusun Rencana Tata Ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Rancangan Akhir Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat menghasilkan penilaian dan pertimbangan komprehensif yang memperhatikan kebijakan dan rencana tata ruang nasional, hanya mempertahankan 2 (dua) KSP yaitu KSP Sukabumi dan sekitarnya yang menambahkan penanganan Geopark Ciletuh, dan KSP BIJB dan Aerocity. Kemudian dalam mengakomodir kebijakan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Patimban, Indramayu dan Cirebon, dirumuskan penambahan kawasan strategis di 3 lokasi tersebut.

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang dirumuskan berdasarkan masukan seluruh pemangku kepentingan, terdiri dari indikasi program utama, lokasi, pelaksana, waktu pelaksanaan, dan sumber pembiayaan. Indikasi program pemanfaatan ruang berisi rencana pembangunan yang harus diselaraskan dalam rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan. Penyelarasan indikasi program utama dalam rencana pembangunan daerah maupun rencana strategis/rencana kerja perangkat daerah untuk dilaksanakan dan mendukung perwujudan ruang sesuai tujuan dan sasaran penataan ruang Jawa Barat. Indikasi program, meliputi:

a) Perwujudan Struktur Ruang

- 1) Pengembangan infrastruktur strategis: jaringan prasarana jalan, perhubungan, sumberdaya air, energi, dan permukiman.
- 2) Penyediaan sarana prasarana minimal di Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).



b) Perwujudan Pola Ruang

- 1) Pencapaian 45% kawasan lindung:
 - Peningkatan luasan kawasan lindung hutan;
 - Peningkatan fungsi kawasan lindung;
 - Rehabilitasi lahan kritis; dan
 - Pemantapan fungsi konservasi kawasan lindung.
- 2) Penyediaan ruang ketahanan pangan:
 - Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - Peningkatan jaringan irigasi;
 - Pembangunan jaringan irigasi baru;
 - Peningkatan fungsi sawah beririgasi teknis;
 - Pengembangan pengaturan pola tanam sesuai dengan perubahan iklim;
 - Penyediaan prasarana sumberdaya air untuk cadangan air; dan
 - Pemeliharaan saluran irigasi
- 3) Pelaksanaan pengurangan resiko bencana:
 - Mitigasi non struktural; dan
 - Mitigasi struktural.
- 4) Perwujudan ruang investasi sektor perekonomian:
 - Industri:
 - a. Optimalisasi perbaikan aspek lingkungan hidup untuk industri yang berkelanjutan;
 - b. Penguatan sinergi antar industry;
 - c. Pembangunan infrastruktur penunjang industri;
 - d. Pengembangan Kawasan Industri;
 - e. Pengembangan industri pengolahan untuk mendukung komoditas unggulan Jabar Selatan; dan
 - f. Pengembangan pengelolaan kawasan ekonomi khusus industry.
 - Perdagangan:
 - a. Pembangunan pusat distribusi regional.
 - Pariwisata:
 - a. Peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata berstandar internasional;
 - b. Pengembangan destinasi wisata unggulan;
 - c. Pengembangan desa wisata;



- d. Pembangunan pusat budaya; dan
 - e. Pengembangan pengelolaan kawasan ekonomi khusus pariwisata.
 - Pertanian:
 - a. Pengembangan agropolitan dan minapolitan;
 - b. Pengembangan desa mandiri benih dan padi;
 - c. Pengembangan dan penataan kawasan tambak;
 - d. Pengembangan dan penataan kawasan peternakan unggulan; dan
 - e. Pengembangan agro *technopark* dan *science technopark*
 - Perumahan dan Permukiman:
Penyediaan tanah untuk perumahan dan kawasan permukiman melalui optimalisasi aset tanah milik pemerintah provinsi dan pengadaan tanah.
- c) Kebijakan Pengembangan Wilayah Perbatasan

Provinsi Jawa Barat berbatasan dengan provinsi lain yakni sebelah Utara berbatasan Provinsi DKI Jakarta, sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Banten, dan sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Wilayah perbatasan Provinsi Jawa Barat merupakan etalase bagi Provinsi Jawa Barat dan pintu gerbang masyarakat keluar masuk Provinsi Jawa Barat sehingga perlu ditata dan dikelola dengan baik secara sektoral maupun melalui kerjasama antar daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Beberapa kerjasama antar daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu:

1) Kebijakan Wilayah Perbatasan Jawa Barat – DKI Jakarta

Pembangunan wilayah perbatasan Jawa Barat – DKI Jakarta dikelola melalui Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (BKSP Jabodetabekjur). Keberadaan BKSP Jabodetabekjur dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah Jabotabek yang tujuan dibentuknya BKSP adalah untuk membina pola permukiman penduduk dan



penyebaran kesempatan kerja lebih merata atas dasar kebijakan pemerintah, serta penyerasian perencanaan pengembangan wilayah Jabotabek. Selanjutnya BKSP Jabotabek berkembang menjadi BKSP Jabodetabekjur berpedoman pada Permendagri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur.

2) Kebijakan Wilayah Perbatasan Jawa Barat – Banten

Kebijakan pembangunan wilayah perbatasan Jawa Barat – Banten berfokus pada aspek:

- a) Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Aspek Pelayanan Umum meliputi urusan pendidikan, kesehatan, sosial, tibumtranslinmas, penanggulangan bencana, pemerintahan (batas wilayah), dan lain-lainnya sesuai kesepakatan kerjasama.
- b) Aspek Daya Saing meliputi urusan pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil (KUK), perdagangan, pertanian, kelautan dan perikanan, penataan ruang, lingkungan hidup, Sumber Daya Air (SDA), perhubungan, pekerjaan umum, dan lain-lainnya sesuai kesepakatan kerjasama.

3) Kebijakan Wilayah Perbatasan Jawa Barat – Jawa Tengah

Kebijakan pembangunan wilayah perbatasan Jawa Barat – Banten berfokus pada aspek:

- a) Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Aspek Pelayanan Umum meliputi urusan pendidikan, kesehatan, sosial, tibumtranslinmas, penanggulangan bencana, pemerintahan (batas wilayah), dan lain-lainnya sesuai kesepakatan kerjasama.
- b) Aspek Daya Saing meliputi pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil (KUK), perdagangan, pertanian, kelautan dan perikanan, penataan ruang, lingkungan hidup, Sumber Daya Air (SDA), perhubungan, pekerjaan umum, dan lain-lainnya sesuai kesepakatan kerjasama.



Berdasarkan kebijakan penataan ruang dalam RTRW Provinsi Jawa Barat, maka kebijakan dan strategi pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 diarahkan untuk:

1. Pembangunan sektoral sesuai kebijakan pengembangan wilayah, serta arahan struktur ruang dan pola ruang, agar terwujud efektivitas pengelolaan pembangunan, terpenuhinya sarana dan prasarana minimal di setiap pusat kegiatan, terpenuhinya pelayanan publik, konektivitas, perlindungan kawasan berfungsi lindung untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam untuk pengembangan sektor ekonomi.
2. Pembangunan wilayah tetap harus memperhatikan keseimbangan daya dukung lingkungan hidup, kelestarian fungsi lindung dan konservasi untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat Jawa Barat terutama pemenuhan terhadap kuantitas dan kualitas air bersih, lahan hutan dan pangan, serta kegiatan sosial, ekonomi, dan fisik yang aman dari kerawanan bencana
3. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dalam mewujudkan tujuan penataan ruang Jawa Barat dan rencana pembangunan Tahun 2019-2029, dengan lintas sektoral, lintas wilayah pusat/provinsi/kabupaten/kota, yang berkolaborasi dengan seluruh *stakeholder* pembangunan Jawa Barat.
4. Peningkatan tertib ruang melalui inovasi dalam pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.

6.3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023

Prioritas pembangunan daerah merupakan implementasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan sekaligus juga merupakan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018-2023. Adapun 9 (sembilan) prioritas pembangunan daerah terdiri dari:

1. Akses pendidikan untuk semua
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata
5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara
6. Infrastruktur konektivitas wilayah
7. Gerakan membangun desa (Gerbang desa)



8. Subsidi gratis golongan ekonomi lemah (golekmah)
9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah

1. Akses Pendidikan Untuk Semua

Education for All (EFA) merupakan pendidikan yang merata untuk semua lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, pendidikan adalah hak Warga Negara tanpa kecuali baik berupa pendidikan formal maupun non formal. Hal ini sejalan dengan amanat yang tercantum dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Akses pendidikan untuk semua sebagai upaya memperluas kesempatan pendidikan pada semua tingkatan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal bagi seluruh masyarakat Jawa Barat terutama masyarakat kurang mampu. Perluasan dan pemerataan pendidikan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar seluruh masyarakat dapat memperoleh hak yang sama di dalam mengakses pendidikan. Langkah Pemerintah Jawa Barat guna mewujudkan akses pendidikan untuk semua diterjemahkan dalam Jabar Juara sebagai berikut:

a. Sekolah Juara

1) Sekolah Jabar Juara (Sajajar)

Sekolah Jabar Juara (Sajajar) merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan menengah dan layanan khusus. Selain itu juga, Sekolah Jabar Juara (Sejajar) merupakan inovasi layanan pendidikan menengah di Jawa Barat yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat di Jawa Barat dalam mengakses layanan pendidikan. Tujuan Sajajar antara lain perluasan sekolah induk untuk memperkuat sekolah terbuka, penguatan kemitraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri, pengembangan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri, pemanfaatan teknologi yang mendukung terhadap sistem pembelajaran yang aktif dan efisien (termasuk untuk belajar jarak jauh) dan terakhir pengembangan sistem asesmen yang memungkinkan rekognisi terhadap pengalaman belajar berbeda pada peserta didik. Implementasi Sekolah Jabar Juara (Sejajar), di antaranya: Sekolah Menengah (SM) Terbuka, SMK



Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), *Smart School*, *Digital Learning*, Beasiswa untuk siswa miskin, Penguatan Laboratorium SMA, Bengkel kerja SMK, Pengembangan SMK Tematik. Selain itu juga fokus pada penguatan kerjasama SMK dengan industri, Penguatan kompetensi guru, kepala sekolah, pengawas, dan tenaga pendidikan lainnya, Pengembangan Sekolah Hijau, dan Pengembangan Sekolah Inklusif, Ramah Anak, Sekolah Aman Bencana, dan Sekolah Tangguh.

2) Jabar Masagi

Jabar Masagi merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menumbuhkan manusia yang harmoni dengan diri, alam, dan seluruh makhluk hidup. Program tersebut akan menumbuhkan identitas budaya lokal pada siswa-siswi di Jawa Barat, dengan nilai-nilai kearifan Sunda Priangan, Cirebonan, dan Betawian. Jabar Masagi berfokus pada pendidikan karakter dengan mengusung filosofi surti, harti, bukti dan bakti, serta mengajarkan peserta didik untuk cinta agama, bela negara, menjaga budaya, serta cinta lingkungan.

3) Sekolah Tanpa Gawai (Setangkai)

Sekolah Tanpa Gawai (Setangkai) merupakan salah satu inovasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melindungi anak dan remaja dari pengaruh informasi yang tidak layak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuat pedoman agar anak-anak mampu mengendalikan pemakaian gawai di sekolah. Salah satu hal penting yang harus dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan gawai adalah literasi digital yaitu kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan mengkomunikasikan konten/informasi, dengan kecakapan kognitif maupun teknis. Untuk ke depan perlu dipastikan TIK dapat terintegrasi penuh ke dalam pendidikan dan pelatihan di seluruh jenjang.

4) Sekolah Terpadu

Sekolah Terpadu yakni program Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memudahkan akses masyarakat seluas-luasnya pada fasilitas pendidikan terutama pada daerah yang memiliki keterbatasan dari sisi geografis. Sekolah terpadu yaitu dua atau tiga sekolah dengan



jenjang pendidikan berbeda (pendidikan dasar dan pendidikan menengah) dalam satu lokasi yang diharapkan mampu meningkatkan angka partisipasi masyarakat untuk bersekolah di daerah-daerah yang rawan terhadap putus sekolah dan akses yang jauh untuk melanjutkan sekolahnya.

b. Guru Juara

Program guru juara merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat. Mewujudkan guru yang berkualitas dengan kompetensi yang tersertifikasi serta berdaya saing akan mampu menghasilkan siswa yang unggul. Program ini akan diawali dengan pemerataan rasio guru dan murid, pemberian subsidi terutama sembako untuk guru yang membutuhkan, dan pemberian tunjangan bagi guru sesuai dengan prestasi dan kinerjanya.

c. SMK Juara

SMK Juara difokuskan pada pembangunan dan revitalisasi SMK di Jawa Barat, Sertifikasi Nasional bagi SMK mulai dari Pendidik hingga lulusan melalui kerjasama dengan lembaga akademik baik di dalam maupun luar negeri, dan menciptakan SMK yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan lokal sehingga tidak ada lagi *miss match* antara lulusan dan kebutuhan pasar kerja.

d. Perguruan Tinggi Juara

Perguruan Tinggi Juara dengan menjadikan Perguruan Tinggi sebagai *Center of Excellence dan Inovation* melalui kerjasama akademisi, bisnis/industri, pemerintah, masyarakat serta media. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun turut untuk mewujudkan adanya Perguruan Tinggi di setiap Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Desa binaan sebagai wujud tri darma perguruan tinggi di Jawa Barat.

e. Budaya Juara

Penetapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan membawa semangat baru dalam upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan di Jawa Barat. Jawa Barat memiliki kebudayaan yang unik, menarik, dan beranekaragam. Namun demikian dalam kehidupan bermasyarakat, aktualisasi kebudayaan lokal pada kenyataannya masih mengalami hambatan, diantaranya masih rendahnya perlindungan terhadap



budaya lokal, masih rendahnya apresiasi terhadap budaya lokal, kurang optimalnya promosi budaya lokal Jawa Barat di dalam dan luar negeri serta kuatnya pengaruh budaya asing terhadap budaya lokal. Dalam rangka mengatasi persoalan tersebut, Jawa Barat telah menetapkan program Budaya Juara dengan menekankan pada upaya pemajuan kebudayaan Jawa Barat yang meliputi tradisi lisan; manuskrip; adat istiadat; ritus; pengetahuan tradisional; teknologi tradisional; seni; bahasa; permainan rakyat; olahraga tradisional; dan cagar budaya.

f. Perempuan Juara

Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta) merupakan sekolah untuk perempuan khususnya di pedesaan. Sekolah ini merupakan wadah perempuan desa bertukar pengetahuan dan pengalaman, menemukenali kebutuhan dan juga kepentingan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Pengetahuan dan pengalaman yang dipertukarkan dalam sekolah ini berkaitan dengan kebutuhan perempuan yang bersifat praktis maupun strategis. Untuk memulai kegiatan diperlukan sebuah proses pendidikan dan pelatihan bagi fasilitator yang akan mendampingi seluruh proses kegiatan sekolah perempuan nantinya.

g. Olahraga Juara

Olahraga juara meliputi pembangunan atau revitalisasi pusat olahraga untuk menjadikan pusat olahraga yang dapat meningkatkan prestasi olahraga di Jawa Barat, mempertahankan juara umum Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Tahun 2020, dan mendirikan layanan gratis perbaikan rumah atlet yang berprestasi.

h. Milenial Juara

Milenial juara sebagai upaya mencetak generasi muda yang cerdas dan kreatif untuk menjawab berbagai tantangan serta persaingan global. Program Milenial juara meliputi *Career Expo* dan *Career Days* untuk *Fresh Graduate* di setiap kabupaten/kota, *Start-Up/Creative Hub* di kabupaten/kota dengan fasilitas pengembangan ide dan bisnis, ekspedisi barudak juara, dan beasiswa kuliah dalam dan luar negeri untuk putra dan putri daerah.



i. Migran Juara

Program Migran Juara adalah program perluasan kesempatan kerja ke luar negeri bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Barat. Program ini memuat antara lain akselerasi peningkatan kesempatan kerja ke luar negeri melalui peningkatan kompetensi PMI, Sertifikasi Profesi PMI dan peningkatan layanan PMI melalui *Migrant Centre* yang menyediakan layanan Pusat pelatihan bagi Calon PMI, PMI dan Purna PMI; Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Keimigrasian bagi Calon PMI; dan layanan *call centre* bagi Calon PMI dan PMI.

j. Tanggap Bencana Juara

Tanggap Bencana Juara merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana, baik sebelum, pada saat, dan setelah bencana terjadi. Hal ini menjadi penting mengingat Provinsi Jawa Barat berada pada daerah rawan bencana (*ring of fire*). Program Tanggap Bencana Juara meliputi penerapan kurikulum muatan lokal tanggap bencana di seluruh sekolah di Jawa Barat, pemetaan potensi dan pusat mitigasi bencana, *disaster-proofing* terkait ketangguhan infrastruktur vital provinsi dan fasilitas vital wilayah perkotaan dan perdesaan dan *crisis center* kebencanaan.

2. Desentralisasi Layanan Kesehatan

Desentralisasi kesehatan merupakan salah satu program untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga program pembangunan kesehatan lebih efektif dan efisien dalam menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat. Dalam mewujudkan desentralisasi layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat diterjemahkan melalui berbagai Jabar Juara sebagai berikut:

a. Kesehatan Juara

1) Layad Rawat

Layad rawat merupakan program pelayanan kesehatan dengan melakukan kunjungan dan perawatan gratis oleh dokter dan tenaga medis ke rumah-rumah masyarakat di seluruh kabupaten/kota dengan melakukan pelaporan dan panggilan darurat melalui telepon (*Hotline*) atau media *online* lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.



- 2) Puskesmas Juara
Puskesmas Juara adalah menciptakan puskesmas di seluruh Jawa Barat memiliki sarana dan prasarana puskesmas yang memadai dan terakreditasi.
 - 3) Pembangunan dan Revitalisasi Rumah Sakit
Pembangunan dan revitalisasi rumah sakit meliputi pembangunan rumah sakit baru, revitalisasi rumah sakit yang kurang layak, dan revitalisasi rumah sakit tipe C menjadi tipe B.
 - 4) Mobil Kekasih
Kendaraan Konseling Silih Asih (Mobil Kekasih) yakni kendaraan yang ditujukan sebagai media konsultasi bagi masyarakat terhadap permasalahan Psikologis yang dihadapi.
 - 5) Jaminan kesehatan masyarakat miskin yang terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
 - 6) Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren)
Poskestren yakni upaya kesehatan berbasis masyarakat dimana pesantren-pesantren yang ada di Jawa Barat didorong agar memiliki kesiapan, kemampuan, serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan secara mandiri.
- b. Ibu dan Anak Juara
- 1) Ojek Makanan Bayi dan Balita (OMABA)
OMABA (Ojek Makanan Bayi dan Balita) yaitu layanan antar makanan bergizi bagi ibu hamil, bayi dan balita meliputi OMABA pada ibu hamil (pemenuhan gizi ibu hamil, pemberian tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan sesuai standar), OMABA pada balita (pemantauan tumbuh kembang, imunisasi, ASI eksklusif, MP ASI dan pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan dasar lokal), dan OMABA mendukung pelayanan kesehatan bagi remaja putri untuk pemberian tablet penambah darah.
 - 2) Ngabring Ka Sakola (Ngabaso)
Ngabring Ka Sakola (Ngabaso) yakni berjalan kaki ke sekolah diantar oleh orang tua yang bertujuan agar anak-anak di Jawa Barat terbiasa berjalan kaki sehingga memiliki tubuh yang sehat dan memiliki kepedulian terhadap teman-teman sebayanya.



3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi

Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi ditujukan untuk mengakselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi regional, sekaligus menyelesaikan masalah tingkat pengangguran dan kemiskinan. Upaya penanganan hal tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan pelaksanaan urusan KUKM yang didukung oleh urusan perdagangan, perindustrian, dan penanaman modal, serta memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas perekonomian pada urusan pangan, pertanian, kehutanan dan kelautan perikanan.

Keterkaitan dan integrasi pelaksanaan urusan-urusan tersebut diterjemahkan melalui upaya-upaya yang mendukung peningkatan kualitas iklim usaha berbasis (inovasi) digital melalui pendampingan kepada wirausahawan, peningkatan akses pasar dan pembiayaan, penyediaan sarana prasarana usaha, serta meningkatkan efektifitas rantai pasok produk pertanian dan perikanan. Fokus pembangunan diarahkan pada (a) Peningkatan Kemandirian Jawa Barat Dalam Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan Untuk Mencapai Kedaulatan Pangan; (b) peningkatan Peran Industri dan Perdagangan Dalam Mendorong Petumbuhan dan Stabilitas Perekonomian; dan (c) Peningkatan Kualitas Iklim Usaha Yang Mendorong Terciptanya Investasi Yang Berdampak Positif Pada Perekonomian. Langkah Pemerintah Jawa Barat guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi diterjemahkan dengan berbagai Jabar Juara sebagai berikut:

a. Petani Juara

Petani juara diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan petani di Jawa Barat yang dilakukan dengan meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui:

1. Menjamin ketersediaan benih berkualitas;
2. Peningkatan kualitas dan pemberdayaan sumberdaya pertanian, diantaranya perlindungan dan pemberdayaan petani;
3. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penyakit ternak;
4. Peningkatan sarana dan prasarana, perlindungan lahan produktif serta teknologi pertanian; dan
5. Peningkatan produksi dan nilai tambah pertanian.



Hasil implementasi langkah-langkah diatas pada Tahun 2023 ditunjukkan dengan terwujudnya target Produksi tanaman pangan hortikultura sebanyak 12.919.701 ton untuk mendukung kedaulatan pangan dan Pengembangan 15 simpul/gudang pangan.

b. Nelayan Juara

Nelayan juara diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan nelayan di Jawa Barat yang dilakukan dengan meningkatkan produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan, serta menjaga kelestarian laut dan kawasan pesisir melalui:

1. Peningkatan jaminan ketersediaan benih berkualitas;
2. Peningkatan kualitas dan pemberdayaan sumberdaya kelautan dan perikanan, diantaranya perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
3. Peningkatan sarana dan prasarana, serta teknologi kelautan dan perikanan; dan
4. Peningkatan produksi dan nilai tambah kelautan dan perikanan.

Hasil implementasi langkah-langkah diatas pada Tahun 2023 ditunjukkan dengan terwujudnya target berupa pembangunan/pengembangan 1 (satu) *integrated coastal city*.

c. Industri Juara

Industri juara diarahkan untuk meningkatkan produktivitas industri di Jawa Barat yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan nilai produksi yang mengarah pada peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui:

1. Penguatan penyediaan bahan baku industri dan meningkatkan penggunaan bahan baku lokal;
2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana dan teknologi industri;
3. Penguatan struktur industri melalui peningkatan kemitraan antara Industri Besar (IB) dengan Industri Kecil Menengah (IKM); dan
4. Peningkatan akses pembiayaan dan pasar bagi IKM.

Hasil implementasi langkah-langkah diatas pada tahun 2023 ditunjukkan dengan target berupa perwujudan 1 (satu) model kawasan industri terpadu berbasis inovasi dan kolaborasi yang akan menjadi Kawasan Industri Percontohan di Indonesia. Selain Kawasan industri percontohan tersebut, terdapat juga KEK Industri Kertajati Aerotropolis, dan KEK Patimban.



d. Pasar Juara

Pasar juara diarahkan untuk meningkatkan daya saing pasar rakyat, mendukung kelancaran logistik dan distribusi bahan kebutuhan masyarakat serta mendorong terjadinya penguatan pasar dalam negeri melalui:

1. Revitalisasi Pasar Rakyat;
2. Peningkatan kesejahteraan para pedagang dengan meningkatkan omzet penjualan di Pasar Rakyat;
3. Pengembangan Pasar Rakyat ber-SNI (Standar Nasional Indonesia); dan
4. Peningkatan perlindungan konsumen dan tertib niaga.

Hasil implementasi langkah-langkah diatas pada Tahun 2023 ditunjukkan dengan terwujudnya target berupa 24 Pasar Rakyat ber-SNI di kabupaten dan kota di Jawa Barat.

e. Logistik Juara

Logistik juara diarahkan untuk mengefektifkan distribusi produk bahan pokok (konsumsi) sekaligus menjamin ketersediaan bahan pokok dan barang penting di Jawa Barat melalui:

1. Keterkaitan antar sistem logistik melalui perwujudan Pusat Distribusi Regional Jawa Barat;
2. Ketersediaan infrastruktur perdagangan berupa Pasar, Gudang, Toko Modern dan sarana prasarana perdagangan lainnya;
3. Ketersediaan infrastruktur transportasi yang memadai;
4. Ketersediaan infrastruktur jaringan informasi logistik; serta
5. Ketersediaan infrastruktur keuangan antara lain sistem resi gudang, keterlibatan perbankan atau lembaga keuangan lainnya dalam sistem logistik.

Hasil implementasi langkah-langkah diatas pada Tahun 2023 ditunjukkan dengan terwujudnya target berupa operasionalisasi 1 (satu) “*Command Centre Logistik Juara*” yaitu sistem logistik terpadu yang dapat memantau, mengevaluasi serta sebagai sistem deteksi dini bagi ketersediaan bahan pokok dan barang penting di Jawa Barat.

f. UMKM Juara

UMKM juara diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas UMKM yang sekaligus menangani masalah pengangguran di Jawa Barat melalui:



1. Peningkatan pembinaan kelembagaan dan akses pembiayaan bagi UMKM;
2. Pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan nilai kompetitif produk atau komoditas UMKM, serta akses pasar; dan
3. Peningkatan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM untuk mengakselerasi pencapaian UMKM naik kelas.

g. Wirausaha Juara

Wirausaha juara diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku usaha, terutama *start-up*, dengan mengefektifkan dan memperluas cakupan inkubator bisnis melalui:

1. Pembinaan dan pendampingan manajemen usaha;
2. Fasilitasi akses pembiayaan bagi wirausaha; dan
3. Pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses pasar.

Hasil implementasi langkah-langkah diatas sebagai bentuk realisasi UMKM Juara dan Wirausaha Juara pada Tahun 2023 ditunjukkan dengan terwujudnya target pertumbuhan usaha kecil naik kelas sebesar 32% dari total jumlah usaha kecil di Jawa Barat dan pertumbuhan koperasi berkualitas sebesar 41% dari total jumlah koperasi di Jawa Barat.

4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata

Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata ditujukan untuk mengakselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi regional (khususnya diluar wilayah aglomerasi ekonomi) sekaligus menyelesaikan masalah tingkat pengangguran dan kemiskinan melalui pemberian nilai tambah dari sektor pariwisata. Hal ini dirumuskan dalam fokus pembangunan bidang ekonomi di Jawa Barat Tahun 2018-2023, diantaranya adalah pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan desa wisata. Upaya penanganan hal tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan pelaksanaan urusan pariwisata yang didukung oleh urusan kehutanan, perdagangan, perindustrian, penanaman modal, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, energi dan sumberdaya mineral, serta memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas perekonomian pada urusan KUKM, pertanian dan kelautan perikanan, serta pemberdayaan masyarakat dan desa.



Langkah Pemerintah Jawa Barat guna mewujudkan pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata diterjemahkan dengan berbagai Jabar Juara sebagai berikut:

a. Pariwisata Juara

Rencana pembangunan terkait pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata di Jawa Barat terbagi menjadi 3 (tiga) fokus utama, yaitu:

1) Membangun akses ke destinasi yang sudah ada, yang diterjemahkan ke dalam rencana:

- Pembangunan akses infrastruktur transportasi, perhubungan, permukiman, energi dan telekomunikasi;
- Pembiayaan, *off taker*, dan promosi usaha kreatif sebagai upaya peningkatan kualitas dan peningkatan akses pasar produk ekonomi kreatif;
- Pengembangan fasilitasi *meeting, incentives, conferences and exhibition* (MICE) di 5 (lima) Pusat Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) yang berperan sebagai *tourism hub* dimana kelima Pusat DPP tersebut berfungsi sebagai pintu masuk utama, pusat informasi dan pemasaran, serta penyebaran pergerakan wisatawan;
- Pengembangan destinasi wisata geopark di Jawa barat melalui peningkatan akses infrastruktur, amenities dan atraksi, serta pengajuan ke dalam jaringan geopark nasional dan internasional untuk meningkatkan promosi; dan
- Peningkatan efektivitas pemasaran pariwisata melalui penciptaan *smart digital tourism platform*.

2) Membangun destinasi wisata baru, yang diterjemahkan ke dalam rencana:

- Pembangunan dan revitalisasi tujuan wisata yang meliputi pengembangan akses infrastruktur, amenities dan atraksi di destinasi wisata; dan
- Pengembangan desa wisata melalui revitalisasi seni budaya lokal, mengemas aktivitas penduduk lokal menjadi atraksi, pengembangan *homestay* dan sarana prasarana amenities lainnya, internalisasi nilai *sapta pesona* di masyarakat, pengembangan



produk ekonomi kreatif setempat, penyediaan akses infrastruktur, energi dan telekomunikasi.

3) Membuat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis pariwisata, yang diterjemahkan kedalam rencana:

- Pengembangan sumber daya manusia (SDM) pariwisata melalui pembangunan atau revitalisasi sekolah vokasi pariwisata; dan
- Penguatan promosi pariwisata Jawa Barat melalui penguatan analisa pasar, *branding*, penyelenggaraan *event* pariwisata secara regular, pemanfaatan teknologi digital sebagai media promosi; dan

Hasil implementasi langkah-langkah diatas sebagai bentuk realisasi Pariwisata Juara pada Tahun 2023 ditunjukkan dengan terwujudnya target berupa:

- 1) Pembangunan/pengembangan 18 Desa Wisata;
- 2) Pembangunan/pengembangan 27 destinasi wisata baru; dan
- 3) Pembangunan 6 Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata, meliputi: KEK Pariwisata Cikidang-Sukabumi, KEK Lido, KEK Sumedang (Jatigede), KEK Agrowisata Purwakarta, KEK Pangandaran, dan KEK Kota Raya Walini.

b. Ekonomi Kreatif Juara

Ekonomi kreatif juara diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku ekonomi kreatif sekaligus menangani masalah pengangguran di Jawa Barat yang dilakukan melalui:

- 1) Penguatan kapasitas kelembagaan pelaku usaha ekonomi kreatif;
- 2) Pengembangan sarana dan prasarana kota kreatif;
- 3) Pemanfaatan teknologi digital untuk mengembangkan kualitas produk; dan
- 4) Pengembangan promosi produk ekonomi kreatif.

Hasil implementasi langkah-langkah diatas sebagai bentuk realisasi Ekonomi Kreatif Juara pada tahun 2023 ditunjukkan dengan terwujudnya target berupa pembangunan 27 unit *creative center* di kabupaten dan kota.



5. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara

Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara melalui:

a. Pesantren Juara

Pesantren juara merupakan upaya untuk memberdayakan keberadaan pesantren yang ada di Jawa Barat agar memiliki kemandirian secara ekonomi, memiliki pendidikan pesantren yang berkualitas dalam membentuk sumber daya manusia yang bertakwa, berpancasila dan berdaya saing serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar pesantren. Adapun pembangunan pesantren juara meliputi:

- 1) *One Pesantren One Product* (OPOP) yakni suatu program dalam menciptakan, mengembangkan dan memasarkan produk yang dihasilkan oleh setiap pesantren di Jawa Barat yang dapat meningkatkan kemandirian pesantren.
- 2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pesantren.
- 3) Bantuan Sarana dan prasarana pesantren yakni suatu program dalam meningkatkan fasilitas yang dimiliki oleh pesantren agar optimal dalam memberikan pendidikan kepada para santri.
- 4) Bantuan operasional pesantren dan pemberian beasiswa santri dan insentif kyai, yakni suatu program dalam memberikan bantuan kepada santri yang kurang mampu dan insentif kyai sebagai bentuk upaya dukungan pemerintah Jawa Barat kepada Kyai yang memberikan pendidikan keagamaan kepada masyarakat Jawa Barat.
- 5) Penyetaraan alumni pesantren melalui sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Pendidikan yang diharapkan para lulusan pesantren memiliki kompetensi yang setara dan bersaing dengan lulusan pendidikan formal lainnya untuk mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi baik PTN/PTS.
- 6) Pesantren Lansia dan ramah difabel yakni sebagai program agar pesantren dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk lansia maupun difabel.
- 7) Festival Pesantren yakni suatu program festival tahunan yang diharapkan mampu mengasah kemampuan peserta dibidang keagamaan, juga merupakan ajang silaturahmi antar pesantren dan sekolah di Jawa Barat.
- 8) Ramadhan Mubarak dilaksanakan untuk meningkatkan apresiasi seniman, budayawan dan masyarakat terhadap seni di bulan



Ramadhan, sehingga diharapkan pesantren menjadi produktif dan mandiri secara ekonomi, serta para santri menjadi kreatif dan inovatif.

- 9) Beasiswa bagi santri yang akan melanjutkan ke program studi S1/S2/S3 dan pengiriman bagi santri yang berprestasi untuk mengikuti pendidikan lanjutan di luar negeri.

b. Masjid Juara

- 1) Subuh Berjamaah & Magrib Mengaji dimaksudkan untuk mendekatkan masyarakat dengan masjid dalam penguatan keimanan dan ketakwaan masyarakat.
- 2) Kredit Masyarakat Sejahtera dimaksudkan untuk menjadikan masjid dan tempat ibadah lainnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pinjaman modal akan diberikan melalui masjid dan tempat ibadah lainnya yang berdasarkan syariat agama masing-masing.
- 3) Masjid Ramah Anak dimaksudkan untuk menambah fasilitas-fasilitas ramah anak di berbagai masjid seperti menyediakan TPA, arena bermain anak di pelataran masjid, pembimbingan anak untuk ikut shalat berjamaah dan lain-lain.

c. Ulama Juara

- 1) Ajangan Masuk Sekolah dimaksudkan untuk mengirim ulama ke sekolah-sekolah sebagai sarana penguatan pendidikan agama
- 2) Beasiswa Kuliah untuk Penghafal Al-Qur'an dimaksudkan untuk memberikan beasiswa bagi penghafal Al-Qur'an.
- 3) *English for Ulama* bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ulama dalam berbahasa Inggris.

d. Manusia Pancasila

- 1) Penguatan kerukunan umat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jawa Barat.
- 2) Penguatan pendidikan multikulturalisme bertujuan untuk menghormati, mengakui, dan menghayati perbedaan di semua bidang kehidupan manusia.
- 3) Penguatan pendidikan demokrasi bertujuan untuk memahami, menghayati, mengamalkan dan mengembangkan konsep, prinsip dan nilai demokrasi sesuai dengan nilai-nilai pancasila.



6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah

Konektivitas wilayah sejalan dengan sasaran pokok pembangunan nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan dan Membangun Transportasi Massal Perkotaan. Dalam rangka mewujudkan peningkatan konektivitas di Provinsi Jawa Barat, terdapat beberapa pembangunan infrastruktur transportasi yang menjadi prioritas dan diterjemahkan dalam Jabar Juara sebagai berikut:

a. Transportasi Juara

- 1) Prioritas sektor perhubungan terdiri dari: pembangunan terminal Tipe B, pemasangan *road barrier* dan perlengkapan jalan, perpanjangan *runway* dan pengembangan Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati di Kabupaten Majalengka, pembangunan Bandar Udara Cikembar Kabupaten Sukabumi, Optimasi Bandar Udara Nusawiru di Kabupaten Pangandaran, pelabuhan Pengumpan regional di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Pangandaran dan Kota Cirebon.

Disamping itu, didorong juga dukungan terhadap pembangunan proyek strategis nasional yaitu pembangunan *Inland waterways* CBL, Terminal dan Pendukungnya, pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban di Kabupaten Subang, serta mendorong terwujudnya beberapa kegiatan Pemerintah Pusat diantaranya: reaktivasi empat jalur kereta api (Bandung – Ciwidey sepanjang ±37,4 km, Rancaekek – Tanjungsari sepanjang ±12 km, Banjar – Pangandaran – Cijulang sepanjang ±82 km dan Cibatuh – Garut – Cikajang sepanjang ±44,37 km), pembangunan jalur KA Tanjungsari – Kertajati – Arjawinangun, Pembangunan jalur KA Patimban dan Pembangunan Jalur KA baru yang mendukung pariwisata dan jalur KA ganda serta pembangunan sektor transportasi lainnya;

- 2) Prioritas Sektor Bina Marga terdiri dari pembangunan dan peningkatan jalan horizontal poros tengah Purwakarta-Jonggol-Sukamakmur sepanjang ±89,64 km di Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bogor, pembangunan Jalan Khusus Tambang di Kabupaten Bogor, pembangunan jalan Lingkar sepanjang ±20 km di Kabupaten Cirebon, pembangunan jalan Lingkar Sukabumi segmen 4 sepanjang ±5,5 km di Kabupaten Sukabumi, pembangunan Jalan



Sukasari – Lembang di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung Barat, pembangunan dan peningkatan jalan Jalur Tengah Selatan Jawa Barat, pembangunan dan peningkatan jalan Simpang Muara Cikadu-Simpang Pancuh Tilu-Cikadu sepanjang ±28,6 km, dan peningkatan Jalan Provinsi lainnya, serta peningkatan jalan kabupaten/kota diantaranya peningkatan jalan lingkaran Kuningan–Sampora–batas Cirebon dan peningkatan jalan desa.

Disamping itu, didorong juga dukungan terhadap pembangunan proyek strategis nasional yaitu pembangunan 16 ruas jalan tol di Jawa Barat, pembangunan Jalan Puncak II (Sentul – Sp. Sukamakmur – Kota Bunga – Cipanas (Cianjur) sepanjang ±67,65 km di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, peningkatan dan pelebaran jalan alternative Lingkaran Gentong sepanjang ±10,4 km di Kabupaten Tasikmalaya, peningkatan Jalan Soreang-Ciwidey sepanjang 11,69 km. Peningkatan dan pelebaran jalan Jalur Bandung – Soreang – Naringgul – Cidaun sepanjang 58 Km. Peningkatan dan pelebaran Jalan Jalur Banjar – Kalipucang – Pangandaran sepanjang 48,66 Km. Pembangunan Flyover Depok, pembangunan *Flyover* Laswi, pembangunan Flyover Supratman, pembangunan *Flyover* Buah Batu-Kiaracondong, pembangunan Flyover Moh. Toha, pembangunan Flyover Kopo-Leuwi Panjang, pembangunan *Flyover* Nurtanio di Kota Bandung, pembangunan Flyover Cimareme-Batujajar, pembangunan Flyover Simpang Tiga Padalarang-Purwakarta di Kabupaten Bandung Barat, dan pembangunan infrastruktur jalan lainnya.

b. Energi Juara

Peningkatan infrastruktur energi dilaksanakan melalui 1) Pengembangan penerapan energi baru dan terbarukan dan diversifikasi energi, yaitu dengan memberikan kemudahan dalam berinvestasi, dukungan regulasi, bantuan pembangunan pembangkit listrik dan pembentukan *road map* EBT; 2) Program *Caang Baranang*, yaitu dengan mendorong penerangan jalan umum di Jawa Barat menyala 100% menggunakan lampu hemat energi; dan 3) Program Elektrifikasi 100%, yaitu bekerja sama dengan PLN dalam membangun jaringan listrik ke pelosok hingga rasio elektrifikasi dapat mencapai 100%.



c. Lingkungan Juara

Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui 1) Program Citarum Harum Juara, yaitu merevitalisasi daerah aliran sungai (DAS) Citarum yang dilaksanakan dalam rangka mendukung Program Nasional Citarum Harum. Provinsi Jawa Barat juga melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di DAS lainnya, yaitu DAS Cimanuk, DAS Ciliwung, DAS Cisadane, DAS Cileungsi-Kali Bekasi, DAS Cilamaya, DAS Cimanuk, DAS Cipunagara, DAS Ciwaringin, DAS Cibuni dan DAS Cilaki; 2) Pembangunan waduk baru dan normalisasi situ/danau, yaitu pembangunan 7 waduk baru meliputi Tegalluar, Santosa, Sadawarna, Cimeta, Sukawana, Cikapundung, dan Citarik, serta normalisasi danau sebagai upaya pengendalian banjir; dan 3) Konservasi hutan dan rehabilitasi lahan kritis, yaitu dengan penanaman dan pemeliharaan pohon secara berkelanjutan.

d. Kelola Sampah Juara

Peningkatan pengelolaan persampahan dilaksanakan melalui: 1) Inovasi *waste to energy* dan integrasi pengelolaan sampah regional; 2) Pembangunan dan operasional Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Regional, yaitu TPPAS Lulut Nambo, TPPAS Legoknangka, TPPAS Cirebon Raya, dan TPPAS Bekarpur; 3) Pendidikan mengenai pengelolaan sampah dengan prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* (3R).

e. Kota Juara

Kota Juara diarahkan sebagai perwujudan kawasan perkotaan yang modern, yang dilakukan melalui 1) Penataan Alun-alun Kota; 2) Penerapan *Smart City*, yaitu penerapan teknologi pada system perkotaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah; dan 3) Pembangunan fasilitas kota ramah difabel, agar pembangunan infrastruktur dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk masyarakat berkebutuhan khusus.

f. Pantura Juara

Peningkatan pembangunan di Pantura Jawa Barat dilaksanakan melalui 1) Mendorong pertumbuhan kawasan industri dengan meningkatkan fasilitas dan infrastruktur penunjang kebutuhan kawasan industri; dan 2) Lumbung Padi Jabar, yaitu peningkatan



produksi, khususnya di Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang dan Kabupaten Indramayu, sehingga tercapai Jawa Barat sebagai lumbung padi nasional.

g. Pansela Juara

Peningkatan pembangunan di Pansela Jawa Barat dilaksanakan melalui 1) Pengembangan destinasi wisata di Jabar Selatan; 2) Peningkatan aksesibilitas di Jabar Selatan meliputi akses bandar udara, stasiun kereta dan pelabuhan, serta pembangunan jalan tol; dan 3) Pemekaran kabupaten di Jabar Selatan untuk membentuk daerah otonom baru dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

7. Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa)

Gerbang Desa adalah sebuah gerakan untuk mewujudkan Desa yang mandiri yaitu Desa yang mampu membangun dan memberdayakan masyarakat Desa dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sarana prasarana Desa, melalui kolaborasi Pemerintah, Masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Gerbang Desa meliputi:

a. Satu Desa Satu BUMDes

Satu Desa Satu BUMDes adalah upaya membentuk atau mengembangkan BUMDes di seluruh desa Jawa Barat.

b. *One Village One Company* (OVOC)

OVOC adalah upaya peningkatan ekonomi masyarakat Desa dengan mengoptimalkan peran BUMDesa dalam mengelola potensi Desa.

c. Desa Digital

Desa digital sebagai upaya membangun jaringan internet di desa khususnya desa *blank spot* untuk memastikan akses informasi yang setara dalam pengembangan potensi desa, pemasaran, percepatan akses, dan pelayanan informasi.

d. Patriot Desa

Patriot Desa adalah pemuda Jawa Barat yang lulus pendidikan dan pelatihan untuk menjadi pendamping desa dalam melakukan pemberdayaan melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi.



- e. CEO BUMDesa (*Chief Executive Officer*)
CEO BUMDesa adalah sarjana lulusan PTN/PTS (*fresh-graduate*) yang bertugas mendampingi BUMDesa untuk mencapai tujuan organisasi.
- f. Kampung Keluarga Juara
Kampung Keluarga Juara merupakan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Jawa Barat melalui penurunan angka kelahiran dan meningkatkan Partisipasi Keluarga Berencana (KB) Warga desa.
- g. Desa Sejahtera Mandiri
Desa sejahtera mandiri adalah masyarakat desa yang mampu menciptakan kreativitas dan inovasi untuk mewujudkan swasembada, berpartisipasi secara aktif dalam membangun desa dan memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan penghidupan secara berkelanjutan, serta menciptakan nilai tambah bagi produktifitas desa.
- h. Desa Wisata
Desa wisata adalah upaya mendorong desa yang memiliki Potensi alam yang bagus menjadi daerah wisata melalui pengelolaan daerah wisata sebagai destinasi yang menjadi daya tarik wisatawan melalui pengembangan Desa Wisata.
- i. Sapa Warga
Sapa Warga merupakan bentuk inovasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menampung aspirasi warga Jabar melalui pengembangan IT dan Media Sosial.
- j. Mobil Siaga
Mobil siaga adalah bantuan mobil bagi desa dengan konsep multifungsi untuk memenuhi kebutuhan primer warga desa antara lain; mengantar jenazah, mobil hiburan, angkutan pertanian, serta panggung untuk hajatan.
- k. Penguatan Infrastruktur Perdesaan
Penguatan infrastruktur perdesaan merupakan upaya penguatan sarana prasarana bagi pembangunan desa dan aktivitas masyarakat perdesaan.
- l. Jembatan Desa
Jembatan desa adalah jembatan yang berfungsi untuk menghubungkan dua ujung jalan yang terputus oleh adanya rintangan, sungai dan saluran air, yang dibangun didalam wilayah administratif perdesaan.



8. Subsidi Gratis Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah)

Golekmah adalah upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat bagi golongan ekonomi lemah melalui:

- a. Pelayanan kesehatan untuk warga kurang mampu.
- b. Sekolah gratis bagi warga kurang mampu.
- c. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
- d. Beasiswa Perguruan Tinggi bagi warga kurang mampu.
- e. Buruh juara
 - 1) Hunian untuk buruh yakni membangun hunian dengan harga dan jarak yang terjangkau dengan tempat kerja buruh.
 - 2) Transportasi Buruh yakni dengan menyediakan transportasi gratis untuk buruh dari dan menuju tempat kerja.
 - 3) Sekolah anak buruh yakni dengan pembangunan/revitalisasi sekolah di sekitar kawasan industri agar anak buruh bisa bersekolah dengan jarak yang terjangkau.
- f. Sembako gratis

Rencana pelaksanaan sembako gratis dilakukan melalui penjarangan usulan subsidi sembako dari kabupaten/kota yang berisi data mengenai komoditas sembako dan rumah tangga miskin yang akan menerima subsidi, pendistribusian tanda bukti penerima subsidi, koordinasi dan pemberian pembiayaan subsidi kepada instansi terkait.

9. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah

Inovasi terhadap pelayanan publik dan penataan daerah diwujudkan melalui:

- a. Birokrasi Juara

Birokrasi juara yakni upaya dalam meningkatkan birokrasi yang efektif dan efisien, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik berkualitas yang ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan *Smart Province/Jabar Digital Province* meliputi: pembangunan *Command Center, Integrated Government Dashboard*, Jabar satu data dan satu peta, *open data*, unit *Jabar Digital Service*, revitalisasi dan intergrasi *Website Jabar Juara*, dan reformasi dalam tata kelola pemerintahan.



b. Aparatur Sipil Negara (ASN) Juara

ASN Juara adalah upaya menciptakan ASN yang berkualitas melalui *cooperate-university, talent management/ talent pool, e-aparatur*, lelang jabatan, remunerasi berbasis kinerja dan beasiswa bagi ASN.

c. APBD Juara

APBD Juara adalah upaya optimalisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah melalui inovasi teknologi (*e-planning, e-budgeting, e-monev*), optimalisasi dana pembangunan untuk kabupaten/kota (bantuan keuangan provinsi), dan penguatan Kemitraan Pemerintah - Badan Usaha (KPBU).

d. BUMD Juara

BUMD Juara yakni upaya untuk mereformasi BUMD dengan menerapkan *Good Corporate Governence*, meningkatkan efektifitas dan efisiensi BUMD guna meningkatkan PAD Jawa Barat, mendorong kemitraan BUMD dengan Badan Usaha Swasta, dan optimalisasi pemanfaatan aset provinsi.

e. Penataan daerah

Untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Provinsi Jawa Barat dipandang perlu untuk melakukan penataan daerah melalui pemekaran wilayah kabupaten, kecamatan atau desa/kelurahan.

Pelaksanaan prioritas pembangunan daerah sebagaimana diuraikan diatas, menjadi sebuah amanat yang harus diprioritaskan. Selain program unggulan tersebut, maka prioritas pembangunan juga diarahkan untuk penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan provinsi. Penerapan SPM dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah terkait diwujudkan dalam program dan kegiatan. Program terkait penerapan SPM menjadi bagian dari program pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat. Hal ini ditunjukkan pada tabel dibawah.



Tabel 6.3
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam RPJMD
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
TAHUN 2019					
SPM PENDIDIKAN					
1	Pendidikan menengah	Program Pendidikan Menengah	1	APK SMA/SMK Sederajat	Dinas Pendidikan
			2	APM SMA/SMK Sederajat	
			3	SMA/SMK Sederajat Akreditasi A	
			4	SMA yang Memenuhi Standar Sarana dan Prasarana	
			5	SMK yang Memenuhi Standar Sarana dan Prasarana	
2	Pendidikan khusus	Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	1	APK SLB	Dinas Pendidikan
			2	Sekolah SLB Terakreditasi A	
			3	SLB yang memenuhi standar sarana dan prasarana	
SPM KESEHATAN					
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Program Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Akibat KLB Provinsi	1	Persentase penanganan kesehatan pada kejadian bencana dan paska bencana	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi		2	Persentase penanganan kesehatan pada Kejadian Luar Biasa Penyakit	
SPM PEKERJAAN UMUM					
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	1	Cakupan Pelayanan Air Minum	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota		2	Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	
SPM PERUMAHAN RAKYAT					
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Penanganan Hunian Rumah untuk Pendukung Pelaksanaan Program	Dinas Perumahan dan Permukiman



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi		Pemerintah dan Pasca Bencana		
SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT					
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat	1	Jumlah penanganan kasus pelanggaran Perda dan Perkada	Satuan Polisi Pamong Praja
			2	Jumlah pemeliharaan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	
			3	Jumlah kesiapsiagaan penanganan bencana oleh Satlinmas	
			4	Jumlah peningkatan kapasitas anggota Satlinmas di Jawa Barat	
			5	Jumlah Pol PP dan PPNS yang terdidik dan berkompeten	
SPM SOSIAL					
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial	1	Persentase PMKS yang pulih dan berkembang keberfungsian sosialnya	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti				
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti				
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti				
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar	Dinas Sosial
			2	Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
TAHUN 2020-2023					
SPM PENDIDIKAN					
1	Pendidikan menengah	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas	1	Rasio Siswa Per-Sekolah SMA	Dinas Pendidikan
			2	Rasio Siswa Per-Kelas SMA	
			3	Persentase Sekolah yang menjadi Sekolah SMA dengan Akreditasi B	
		Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	1	Rasio Siswa Per-Sekolah SMK	Dinas Pendidikan
			2	Rasio Siswa Per-Kelas SMK	
			3	Persentase Sekolah SMK yang menjadi Sekolah dengan Akreditasi B	
			4	Angka Kelulusan SMK	
			5	Persentase lulusan SMK yang terserap di DU/DI	
		Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	1	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Dinas Pendidikan
			2	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	
			3	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	
			4	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	
		Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	1	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	Dinas Pendidikan
			2	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			3	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	
			4	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	
		Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	1	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Dinas Pendidikan
			2	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	
			3	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	
			4	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	
		Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	1	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	Dinas Pendidikan
			2	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	
			3	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	
			4	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	
		Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas	1	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	Dinas Pendidikan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Pendidikan Wilayah V		
			2 Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	
			3 Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	
			4 Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	
		Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	1 Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	Dinas Pendidikan
			2 Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	
			3 Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	
			4 Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	
		Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	1 Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	Dinas Pendidikan
			2 Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	
			3 Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			4	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	
		Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	1	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	Dinas Pendidikan
			2	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	
			3	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	
			4	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	
		Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	1	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	Dinas Pendidikan
			2	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	
			3	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	
			4	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	
		Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	1	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	Dinas Pendidikan
			2	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			3	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	
			4	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	
		Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	1	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	Dinas Pendidikan
			2	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	
			3	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	
			4	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	
		Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	1	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	Dinas Pendidikan
			2	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	
			3	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	
			4	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	
		Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan	1	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	Dinas Pendidikan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	2	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	
			3	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	
			4	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	
2	Pendidikan khusus	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	1	Rasio siswa per sekolah SLB	Dinas Pendidikan
			2	Rasio siswa per kelas SLB	
			3	Persentase SLB terakreditasi minimal B	
			4	Angka Kelulusan SLB	
			5	Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan Jarak Jauh	
SPM KESEHATAN					
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Program Kesehatan Akibat Bencana Dan Kesehatan Akibat KLB Provinsi	1	Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapat pelayanan dasar	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi		2	Persentase penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapat pelayanan dasar	
SPM PEKERJAAN UMUM					
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Program pengembangan air baku	1	Persentase Rencana Pengembangan Air Baku yang diterapkan	Dinas Sumber Daya Air
		Program air baku di WS. Ciliwung-Cisadane	1	Kapasitas Tampung air baku di WS. Ciliwung-Cisadane	Dinas Sumber Daya Air
		Program air baku di WS. Cisadea-Cibareno	1	Kapasitas Tampung air baku di WS. Cisadea-Cibareno	Dinas Sumber Daya Air



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Program air baku di WS. Citarum	1 Kapasitas Tampung air baku di WS. Citarum	Dinas Sumber Daya Air
		Program air baku di WS. Cimanuk-Cisanggarung	1 Kapasitas Tampung air baku di WS. Cimanuk-Cisanggarung	Dinas Sumber Daya Air
		Program air baku di WS. Citanduy	1 Kapasitas Tampung air baku di WS. Citanduy	Dinas Sumber Daya Air
		Program air baku di WS. Ciwulan-Cilaki	1 Kapasitas Tampung air baku di WS. Ciwulan-Cilaki	Dinas Sumber Daya Air
		Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	1 Cakupan Pelayanan Air Minum	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	1 Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	Dinas Perumahan dan Permukiman
SPM PERUMAHAN RAKYAT				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan	1 persentase Penanganan Hunian Rumah untuk Pendukung Pelaksanaan Program Pemerintah dan Pasca Bencana	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi		1 persentase Penanganan Hunian Rumah untuk Pendukung Pelaksanaan Program Pemerintah dan Pasca Bencana	
SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT				
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.	Program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Satuan Polisi Pamong Praja



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
SPM SOSIAL				
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Program Rehabilitasi Sosial di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh	1 Persentase penyandang disabilitas yang di rehabilitasi di UPTD PSRPD Cibabat Cimahi	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Program Rehabilitasi Sosial di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus	1 Persentase anak membutuhkan perlindungan khusus yg mendapat rehabilitasi sosial di UPTD	Dinas Sosial
		Program pelayanan Rehabilitasi sosial di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum	1 persentasi ABH yang di rehab di PSRABH Cileungsi Bogor dan satpel	Dinas Sosial
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Program Rehabilitasi Sosial di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan	1 Persentase lanjut usia di dalam balai yg mendapat perlindungan sosial	Dinas Sosial
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Program Rehabilitasi Sosial di UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya	1 Persentase PMKS yg mendapat rehabilitasi sosial di PRSBK dan satpel - RTM	Dinas Sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1 Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar	Dinas Sosial

Sumber: Hasil analisis, 2019



Dalam pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat periode 2018 sampai dengan 2023 terdapat beberapa proyek strategis. Proyek strategis tersebut dilaksanakan dengan beberapa sumber pendanaan, baik APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, KPBU dan peran swasta. Hal ini merupakan cerminan dari aspek kolaborasi sebagaimana termuat dalam visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, diantaranya melalui kolaborasi pendanaan. Proyek strategi ini juga menunjukkan adanya pertimbangan efisiensi penentuan program sesuai dengan prioritas pembangunan.

**Tabel 6.4
Rencana Proyek Strategis Provinsi
Tahun 2018-2023**

NO	KEGIATAN	SUMBER ANGGARAN				TARGET
		APBN	APBD	KPBU	SWASTA	
I	Proyek Strategis Nasional					
1.1	Jalan Tol					
1	Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan;(59 km);				√	2020
2	Jalan Tol Ciawi - Sukabumi(54km)	√		√		2019
3	Jalan Tol Sukabumi-Ciranjang (28 km)	√		√	√	2023
4	Jalan Tol Ciranjang-Padalarang (33 km)			√	√	2023
5	Jalan Tol Serpong - Cinere (10,1km);				√	2019
6	Jalan Tol Cinere - Jagorawi (14,64km);				√	2019
7	Jalan Tol Cimanggis - Cibitung (25,4km);				√	2019
8	Jalan Tol Cibitung - Cilincing (34km);				√	2019
9	Jalan Tol Depok - Antasari (21,54km);				√	2018
10	Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kp. Melayu (21,04km);				√	2021
11	Jalan Tol Bogor Ring Road (11km)	√		√	√	2021
12	Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan (64km)			√	√	2019
13	Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated (36,4km)			√	√	2019
1.2	Kereta Api					
1	Double Track Jawa Selatan	√				2022
2	<i>High Speed Railway Jakarta - Bandung.</i>	√			√	2019
3	Kereta Api Jakarta-Surabaya	√		√	√	2021
1.3	Prasarana dan Sarana Kereta Api dalam kota					
1	Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi				√	2018
1.4	Bandar Udara					
1	Bandara Kertajati	√	√	√	√	2023
1.5	Pelabuhan					



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	KEGIATAN	SUMBER ANGGARAN				TARGET
		APBN	APBD	KPBU	SWASTA	
1	Inland Waterways/CBL Cikarang – Bekasi Laut Jawa;				√	2021
2	Pelabuhan Patimban	√				2019 (Fase I)
1.6	Penyediaan Air Minum					
1	SPAM Regional Cirebon Raya (Jatigede)	√	√	√		2023
2	SPAM Regional Jatiluhur			√	√	2023
1.7	Bendungan dan Jaringan Irigasi					
1	Bendungan Kuningan	√	√			2021
2	Bendungan Ciawi	√	√			2022
3	Bendungan Sukamahi	√	√			2021
4	Bendungan Leuwikeris	√	√			2022
5	Bendungan Cipanas	√	√			2022
6	Bendungan Sadawarna	√	√			2021
7	Bendungan Matenggeng	√				2023
1.8	Infrastruktur Pendidikan					
1	Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia	√				2023
1.9	Infrastruktur Ketenagalistrikan					
1	Pembangkit, Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi Nasional	√			√	2023
II	INFRASTRUKTUR STRATEGIS DAERAH					
2.1	Jalan Tol					
1	Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) (27,3km)	√				2023
2	Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (184km)	√		√	√	2023
3	Akses Tol BIJB (1,8km)	√	√			2019
4	Akses Tol Patimban (37.7km)	√				2020
5	Tol NS-Link Kota Bandung (14,3km)				√	2023
6	Tol Cikarang - Ciranjang (52,3km)				√	2023
2.2	Jalan Strategis					
1	Jalan Puncak II (67,65km)	√	√	√		2021
2	Jalan Lingkar Soreang - Ciwidey (11,69 km)	√				2023
3	Jalan Lingkar Kuningan (13,7km)	√	√			2023
4	Jalan Lingkar Cirebon (22.3 km)	√	√			2023
5	Jalan Lingkar Sukabumi		√			2023
6	Jalan Lingkar Gentong		√			2023
7	Jalan Sukasari-Lembang (18,3 km)		√			2021
8	Jalan khusus Tambang Parung (15 km)				√	2022
9	Jalan Alternatif Bts. Bandung/Subang - Subang (Tanjakan Emen)		√			2022
10	Pembangunan Fly Over :					
11	- Kopo, Kota Bandung (1,3 km)	√	√			2021
12	- Buah Batu- Kiaracondong Kota Bandung (1,96 km)	√	√			2022



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	KEGIATAN	SUMBER ANGGARAN				TARGET
		APBN	APBD	KPBU	SWASTA	
13	- Dewi Sartika Kota Depok (bantuan hibah)		√			2021
14	- Flyover Pelangi di Kota Bandung		√			2019
15	-Fly over Lembang di Kab Bandung		√			2020
16	-Flyover Kadungora di Kab. Garut		√			2022
17	-Flyover Simpang Kadipaten di Kab. Majalengka		√			2021
2.3	Kereta Api					
1	Reaktivasi Jalur KA Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari	√	√			2021
2	Reaktivasi Jalur KA Banjar-Pangandaran-Cijulang	√	√			2022
3	Reaktivasi Jalur KA Bandung-Ciwidey	√	√			2022
4	Reaktivasi Jalur KA Cibatu-Garut-Cikajang	√	√			2022
5	Double Track Bogor-Sukabumi	√				2021
6	Double Track lintas Padalarang-Bandung-Cicalengka	√				2023
7	Reaktivasi Jalur KA. Cianjur-Padalarang	√	√			2020
8	Shortcut Cibungur-Tanjungrasa	√	√			2020
9	Reaktivasi Jalur KA. Cirebon-Kadipaten	√	√			2022
2.4	Prasarana dan Sarana Kereta Api dalam kota					
1	LRT Bandung Raya		√	√	√	2022
2.5	Bandara Udara					
1	Pembangunan Bandara di Sukabumi	√	√			2023
2	Pengembangan Bandara Nusawiru Kab. Pangandaran			√	√	2022
2.6	Pelabuhan					
1	Pengembangan Pelabuhan Cirebon			√	√	Jangka pendek 2020
2	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional Palabuhanratu	√	√			2020
3	Pembangunan Pelabuhan Bojongsalawe	√				2020
5	Pengembangan Pelabuhan Penyebrangan Majingklak	√				2020
6	Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Muaragembong	√				2020
7	Pembangunan Pelabuhan Tarumajaya				√	2020
8	Pembangunan Dermaga Wisata Palangpang	√	√	√		2023
2.7	Infrastruktur Perumahan dan Permukiman					
	Penyediaan Perumahan bagi MBR (buruh industri) dan ASN:					
1	Cipeuyeum Kab. Cianjur	√	√	√		2019-2020
2	Purwakarta	√	√	√		2020-2021
3	Gedebage	√	√	√		2023
4	Sumedang	√	√	√		2023
5	Bandung	√	√	√		2023



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	KEGIATAN	SUMBER ANGGARAN				TARGET
		APBN	APBD	KPBU	SWASTA	
6	Kota Bogor	√	√	√		2023
7	Bekasi	√	√	√		2023
2.8	Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman					
1	Pembangunan Alun-Alun		√			2020-2022
2	Pembangunan Creative Centre		√			2020-2022
3	Pembangunan Pusat Budaya		√			2020-2022
4	Pembangunan Mesjid Raya Al Jabar		√			2021
5	Pembangunan Mesjid Monumental Jawa Barat		√			2019
2.9	Persampahan					
1	TPPAS Regional Cirebon Raya	√	√	√		2022
2	TPPAS Regional Legok Nangka	√	√	√		2022
3	TPPAS Regional Nambo	√	√	√		2020
2.10	Penyediaan Air Minum					
	SPAM Regional Bandung Raya					
1	Kertasari	√	√	√		2023
2	Cigondoang	√	√	√		2023
3	Sinumbra	√	√	√		2023
4	Cikalong (Tahap II-Pembangunan IPA)	√	√	√		2022
5	SPAM Pangandaran (Pusat Pertumbuhan)	√	√	√		2023
2.11	Sistem Air Limbah					
1	SPALD-T (Regional Bojongsoang)	√	√	√		2023
2	SPALD-T (Komunal-DAS Citarum)	√	√			2021
2.12	Bendungan, Waduk, dan Jaringan Irigasi					
1	DI. Caringin	√	√			2020
2	DI. Parigi	√	√			2023
3	DI. Cikalong	√	√			2023
4	DI. Curugdendeng	√	√			2023
5	DI. Candragoyang	√	√			2023
6	DI. Rengrang	√	√			2020
2.13	Pariwisata					
1	KEK Cikidang, Kabupaten Sukabumi	√		√	√	2019
2	KEK Pangandaran, Kabupaten Pangandaran	√		√	√	2019
3	Geopark Ciletuh, Kabupaten Sukabumi	√	√		√	2020
4	Candi Jiwa, Kabupaten Karawang	√	√		√	2023
5	KEK Aerocity Kertajati, Kabupaten Majalengka	√		√	√	2021
6	KEK Lido, Kabupaten Bogor	√		√	√	2021
7	KEK Sumedang (Jatigede)	√		√	√	2022
8	KEK Agrowisata Purwakarta	√		√	√	2023
2.14	Kelautan					
1	PPI Gebangmekar	√	√		√	2021



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	KEGIATAN	SUMBER ANGGARAN				TARGET
		APBN	APBD	KPBU	SWASTA	
2	PPI Bondet	√	√		√	2021
3	PPI Karangsong	√	√		√	2021
4	PPI Dadap	√	√		√	2021
5	PPI Rancabuaya	√	√		√	2021
6	PPI Cilauteureun	√	√		√	2021
7	PPI Pamayangsari	√	√		√	2021
8	PPI Nusamanuk	√	√		√	2021
9	PPI Batukaras	√	√		√	2021
10	PPI Cisolok	√	√		√	2021
2.15	Pertanian					
1	<i>Food Hubs</i> , Kota Cirebon		√		√	2020
2	<i>Food Hubs</i> , Kabupaten Bogor		√		√	2020
2.16	Kawasan Sains dan Teknologi					
1	Kawasan Sains dan Teknologi Pusat Jawa Barat di Jatinangor Kabupaten Sumedang			√		
2	Kawasan Sains dan Teknologi Kopi Jawa Barat di Pangalengan Kabupaten Bandung			√		
3	Kawasan Sains dan Teknologi Pertanian Terpadu dan Indigopera Jawa Barat di Cikadu Kabupaten Cianjur			√		
4	Kawasan Sains dan Teknologi Industri Kreatif Jawa Barat di Kota Cirebon			√		

Sumber: *Bappeda*, 2019

Program pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 merupakan pelaksanaan dari sasaran pembangunan jangka menengah yang mencerminkan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Program pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat disajikan dalam 2 (dua) tabel yaitu Tabel 6.5 yang memuat program pembangunan daerah Tahun 2019, dan Tabel 1 pada Buku II memuat program pembangunan daerah Tahun 2020-2023. Hal ini dilakukan karena ada perbedaan nomenklatur program pada Tahun 2019 dan Tahun 2020-2023.



Tabel 6.5
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Pembangunan Daerah Dan Jabar Juara	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2017	2018	2019				
					Target	Rp.			
VISI: TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI									
Misi 1: Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban									
Tujuan:									
1.1.	Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	68,5	68,7	68,6-69		Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial
Sasaran:									
1.1.1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	68,5	68,7	68,6-69		Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial
		2	Indeks Demokrasi	Poin	68,78	73,91	68,79-70,78		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program:									
1	Program Kesatuan Bangsa dan Politik						9.000.000.000	PPD: Pendidikan agama dan rumah ibadah juara JJ: Masjid Juara, Manusia Pancasila	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		1	Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Barat	Poin			73		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Pembangunan Daerah Dan Jabar Juara	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017	2018	2019			
							Target	Rp.		
		2	Rasio masyarakat Jawa Barat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan	Persen			1,5			
		3	Persentase penurunan aksi unjuk rasa di Jawa Barat	Persen			59			
		4	Persentase penurunan konflik sosial di Jawa Barat	Persen			50			
		5	Tingkat harmonisasi kerukunan antar umat beragama	Skala			68,5			
Misi 2: Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif										
Tujuan:										
2.1.	Meningkatnya Kebahagiaan dan Kesejahteraan Masyarakat	1	Indeks Kebahagiaan	Poin	69,58	70-71	70-71			IKU Pemerintah Daerah
Sasaran:										
2.1.1	Meningkatnya Kualitas dan Taraf Hidup Masyarakat	1	Indeks Kebahagiaan	Poin	69,58	70-71	70-71			IKU Pemerintah Daerah
Program:										
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial							5.757.025.000	PPD: Subsidi Gratis Golekmah JJ: Pelayanan kesehatan untuk warga kurang mampu, Sekolah gratis bagi warga kurang mampu	Dinas Sosial
		1	Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar	Persen			1			
		2	Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya	Persen			100,00			



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Pembangunan Daerah Dan Jabar Juara	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017	2018	2019			
							Target	Rp.		
2	Program Pemberdayaan Sosial							5.033.150.000	PPD: Subsidi Gratis Golekmah JJ: Pelayanan kesehatan untuk warga kurang mampu, Sekolah gratis bagi warga kurang mampu	Dinas Sosial
		1	Persentase PSKS perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen			8,85			
		2	Persentase PSKS kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen			7,92			
		3	Persentase sumber dana bantuan sosial yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen			44,00			
		4	Persentase peningkatan pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial	Persen			1			
		5	Persentase warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya	Persen			45,55			
3	Program Penanganan Fakir Miskin							3.096.905.000	PPD: Subsidi Gratis Golekmah JJ: Pelayanan kesehatan untuk warga kurang mampu, Sekolah gratis bagi warga kurang mampu, Sembako gratis	Dinas Sosial
		1	Persentase keluarga miskin dan kelompok rentan yang meningkat produktivitas sosial ekonominya	Persen			1			



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Pembangunan Daerah Dan Jabar Juara	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017	2018	2019			
							Target	Rp.		
4	Program Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan							6.065.865.000	PPD: Subsidi Gratis Golekmah JJ: Buruh juara	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Perusahaan			12.000			
		2	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	Perusahaan			6.000			
5	Program Peningkatan Kesempatan Kerja							4.314.050.200	PPD: Subsidi Gratis Golekmah JJ: Buruh juara	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen			60			
6	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja							13.077.194.000	PPD: Subsidi Gratis Golekmah JJ: Buruh juara PPD: Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi JJ: Wirausaha baru	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen			57			
		2	Jumlah Tenaga Kerja yang Tersertifikasi	Orang			500			
		3	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang			1.000			
Sasaran:										
2.1.2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan	1	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,47	72,76	72,85			



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Pembangunan Daerah Dan Jabar Juara	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2017	2018	2019				
					Target	Rp.			
Program:									
1	Program Promosi Kesehatan						2.759.412.300	PPD: Desentralisasi Layanan Kesehatan JJ: Kesehatan Juara, Ibu dan Anak Juara PPD: Subsidi Gratis Golekmah JJ: Pelayanan kesehatan untuk warga kurang mampu	Dinas Kesehatan
		1	Persentase Rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persen			70		
		2	Persentase Desa Siaga Aktif	Persen			85		
2	Program Pengembangan Lingkungan Sehat						1.178.521.000	PPD: Desentralisasi Layanan Kesehatan JJ: Kesehatan Juara, Ibu dan Anak Juara PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Kesehatan
		1	Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Yang Berkualitas	Persen			61,5		
		2	Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jamban Sehat	Persen			56		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Pembangunan Daerah Dan Jabar Juara	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019			
					Target	Rp.		
3	Program Pelayanan Kesehatan					221.011.767.700	PPD: Desentralisasi Layanan Kesehatan JJ: Kesehatan Juara, Ibu dan Anak Juara PPD: Subsidi Gratis Golekmah JJ: Pelayanan kesehatan untuk warga kurang mampu	Dinas Kesehatan
	1	Ratio kematian ibu	Persen			86		
	2	Ratio kematian bayi	Persen			5,9		
	3	Prevalensi Gizi Buruk	Persen			0,52		
	4	Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan	Persen			89		
4	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular					8.486.884.000	PPD: Desentralisasi Layanan Kesehatan JJ: Kesehatan Juara	Dinas Kesehatan
	1	Persentase desa/kelurahan yang mencapai UCI \geq 90%	Persen			94		
	2	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (treatment Succes Rate)	Persen			89		
	3	Prevalensi Hipertensi	Persen			28,55		
	4	Persentase Kab/Kota dengan 100% Puskesmas melaksanakan Pelayanan Kesehatan Jiwa	Persen			100		
	5	Persentase Penduduk yang Mengalami Gangguan Jiwa Berat dan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di RS Jiwa	Persen			44,10		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Pembangunan Daerah Dan Jabar Juara	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017	2018	2019			
							Target	Rp.		
5	Program Sumber Daya Kesehatan							87.793.992.500	PPD: Desentralisasi Layanan Kesehatan JJ: Kesehatan Juara	Dinas Kesehatan
		1	Persentase Puskesmas Terisi Dokter Sesuai Standar	Persen			100			
		2	Persentase RSUD terisi dokter spesialis Penunjang sesuai standar	Persen			64,52			
		3	Jumlah Puskesmas yang sudah Terakreditasi	Unit			256			
		4	Jumlah Rumah Sakit yang sudah Terakreditasi	Unit			95			
		5	Jumlah RS mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai standar	Unit			99			
		6	Persentase ketersediaan obat esensial di instalasi farmasi kabupaten/kota	Persen			75			
		7	Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan	Persen			85			
6	Program Manajemen Kesehatan							5.420.980.000	PPD: Desentralisasi Layanan Kesehatan JJ: Kesehatan Juara	Dinas Kesehatan
		1	Terpenuhinya Regulasi Kebijakan Bidang Kesehatan Provinsi	Dokumen			2			
		2	Tercapainya Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Provinsi (Pemerintah dan Swasta)	Persen			55			



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Pembangunan Daerah Dan Jabar Juara	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2017	2018	2019				
					Target	Rp.			
7	Program Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Akibat KLB Provinsi						2.716.627.100	PPD: Desentralisasi Layanan Kesehatan JJ: Kesehatan Juara PPD: Akses Pendidikan Untuk Semua JJ: Tanggap Bencana Juara	Dinas Kesehatan
		1	Persentase Penanganan Kesehatan pada Kejadian Bencana dan Paska Bencana	Persen			100		
		2	Persentase Penanganan Kesehatan pada Kejadian Luar Biasa Penyakit	Persen			100		
Sasaran:									
2.1.3	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	70,04	70,14	70,34		IKU Pemerintah Daerah
		2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	89,18	89,52	89,32		IKU Pemerintah Daerah
Program:									
1	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak lintas daerah Kabupaten/Kota						16.532.475.000	PPD: Subsidi Gratis Golekmah JJ: Ibu dan Anak Juara, Perempuan Juara	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
		1	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	Persen			60		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Pembangunan Daerah Dan Jabar Juara	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2017	2018	2019				
					Target	Rp.			
	2	Persentase Kab/Kota mendapat Penghargaan KLA Tingkat Nasional	Persen			70			
	3	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Persen			80			
2	Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga						11.000.000.000	PPD: Subsidi Gratis Golekmah JJ: Ibu dan Anak Juara, Perempuan Juara	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
	1	Menurunnya Keluarga Pra Sejahtera	Keluarga			1.083.117			
Sasaran:									
2.1.4	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	1	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,14	8,18	8,28		IKU Pemerintah Daerah
		2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,42	12,88	13,15		IKU Pemerintah Daerah
Program:									
1	Program Pendidikan Menengah						1.306.738.798.631	PPD: Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Sekolah Juara, SMK Juara, Tanggap Bencana Juara, Budaya Juara, Guru Juara PPD: Subsidi Gratis Golekmah JJ: Sekolah	Dinas Pendidikan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Pembangunan Daerah Dan Jabar Juara	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019			
					Target	Rp.		
							gratis bagi warga kurang mampu	
	1	APK SMA/SMK Sederajat	Persen			85		
	2	APM SMA/SMK Sederajat	Persen			65		
	3	SMA/SMK Sederajat Akreditasi A	Persen			10		
	4	SMA yang Memenuhi Standar Sarana dan Prasarana	Persen			70		
	5	SMK yang Memenuhi Standar Sarana dan Prasarana	Persen			70		
2	Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus					60.803.757.000	PPD: Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Sekolah Juara PPD: Subsidi Gratis Golekmah JJ: Sekolah gratis bagi warga kurang mampu	Dinas Pendidikan
	1	APK SLB	Persen			24		
	2	Sekolah SLB Terakreditasi A	Sekolah			5		
	3	SLB yang Memenuhi Standar Sarana dan Prasarana	Persen			20		
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan					50.211.025.000	PPD: Akses pendidikan untuk semua JJ: Guru juara	Dinas Pendidikan
	1	Nilai Rerata Uji Kompetensi GTK SMA/MA/SMK/SLB	Nilai			75,51		
	2	Kualifikasi S2 Guru SMA	Persen			10		
	3	Kualifikasi S2 Guru SMK	Persen			10		
	4	Kualifikasi S2 Guru SLB	Persen			5		
4	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)					1.046.697.000.000	PPD: Subsidi Gratis Golekmah JJ: Sekolah Juara	Dinas Pendidikan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Pembangunan Daerah Dan Jabar Juara	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	2019			
						Target	Rp.		
		1	Siswa Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SMP/SMA/SMK/SLB Negeri Swasta	Siswa			8.050.838		
Sasaran:									
2.1.5	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat nasional	1	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	46,33	49,00	53,63		IKU Pemerintah Daerah
Program:									
1	Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga						10.057.973.066	PPD: Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Olahraga Juara, Millennial Juara	Dinas Pemuda dan Olahraga
		1	Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Olahraga	Orang			10.137		
		2	Persentase Kecamatan Penempatan Sarjana Pendamping, Penggerak, Pembangunan Olahraga (SP3OR)	Persen			17,28		
		3	Persentasi Tenaga Olahraga Tradisional, Layanan Khusus dan Rekreasi yang dibina yang bersertifikat	Persen			10		
		4	Jumlah event olahraga Tradisional, Layanan khusus dan Rekreasi yang diselenggarakan dan diikuti	Event			9		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Pembangunan Daerah Dan Jabar Juara	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019			
					Target	Rp.		
2	Program Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi, Dan Organisasi Olahraga					49.914.978.050	PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat berbasis inovasi JJ: Olahraga Juara, Millennial Juara	Dinas Pemuda dan Olahraga
	1	Jumlah Penerima Penghargaan Insan Olahraga Berprestasi/Berjasa	Orang			1.160		
	2	Persentasi medali emas yang diperoleh dalam Event Nasional:						
		a. POPNAS	Persen			20		
		b. POPWILNAS	Persen			0		
		c. PEPARPENAS	Persen			12		
	3	Persentasi Sertifikat Lanjutan bagi Tenaga Olahraga Prestasi yang dibina	Persen			10		
	4	Persentasi Pembangunan Kawasan SPORT Jabar Arcamanik	Persen			90		
	5	Jumlah Event Olahraga yang Mendukung Prestasi Olahraga Jawa Barat	Event			7		
	6	Jumlah Sarana dan Prasarana keolahragaan di Kabupaten/Kota yang tersedia	Kab/Kota			5		
3	Program Peningkatan dan Pembinaan Kepemudaan dan Kepramukaan					11.017.644.999	PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat berbasis inovasi JJ: Olahraga Juara, Millennial Juara	Dinas Pemuda dan Olahraga
	1	Jumlah pemuda berprestasi Nasional. (Pemuda pelopor, PPAN, Paskibraka, KPN)	Orang			17		
	2	Persentasi Pemuda yang Berwirausaha atas Pembinaan Kewirausahaan	Persen			10		
	3	Persentasi Pembinaan Organisasi Kepemudaan yang Terdata	Persen			20		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Pembangunan Daerah Dan Jabar Juara	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017	2018	2019			
							Target	Rp.		
		4	Prestasi Marching Band di Tingkat Nasional	Peringkat			1			
		5	Jumlah Penerima Penghargaan Kepemudaan dan Kepramukaan	Kategori			5			
		6	Jumlah Event Kepemudaan Tingkat Jawa Barat	Event			2			
		7	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan di Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab/Kota			5			
Tujuan:										
2.2.	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram berbasis kearifan lokal dan seni budaya daerah	1	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat	Persen	N/A	N/A	16,63			IKU Pemerintah Daerah
Sasaran:										
2.2.1	Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal	1	Indeks Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat	Poin	N/A	N/A	16,63			IKU Pemerintah Daerah
Program:										
1	Program Pengembangan Nilai Budaya							9.100.000.000	PPD: Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata JJ: Budaya Juara	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		1	Pelestarian bahasa, sastra dan aksara daerah	Jumlah pembinaan Pelestarian bahasa, sastra dan aksara daerah			3			



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Pembangunan Daerah Dan Jabar Juara	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	2019			
						Target	Rp.		
		2	Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, sejarah dan permuseuman	Jumlah pembinaan Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, sejarah dan permuseuman			3		
		3	Pengusulan HKI	Pengusulan HKI/rekomendasi per tahun			1		
2	Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya						10.077.000.000	PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat berbasis inovasi JJ: Budaya Juara	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		1	Pelestarian Seni Tradisi	Jumlah Pembinaan Seni Tradisi			3		
		2	Jumlah Event/Festival/Pasanggiri/Lomba/Sayembara Karyaseni	Event/Pertahun			5		
Sasaran:									
2.2.2	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	1	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	69,58	69,61	70-71		IKU Pemerintah Daerah
Program:									
1	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat						8.536.500.000	PPD: Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Tanggap Bencana Juara	Satuan Polisi Pamong Praja



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Pembangunan Daerah Dan Jabar Juara	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			2017	2018	2019					
					Target	Rp.				
	1	Jumlah penanganan kasus pelanggaran Perda dan Perkada	Kasus			150				
	2	Jumlah pemeliharaan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Kali			800				
	3	Jumlah kesiapsiagaan penanganan bencana oleh Satlinmas	Kali			100				
	4	Jumlah peningkatan kapasitas anggota Satlinmas di Jawa Barat	Orang			756				
	5	Jumlah Pol PP dan PPNS yang terdidik dan berkompeten	Orang			520				
Misi 3: Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah										
Tujuan:										
3.1.	Terwujudnya Percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1	Tingkat Konektivitas antar wilayah	Persen	40,90	40,90-41,00	41-43			IKU Pemerintah Daerah
Sasaran:										
3.1.1	Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok	1	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh/Kapita	1.155	1.231	1.300			IKU Pemerintah Daerah
Program:										
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Geologi						11.250.446.000	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Energi Juara	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		1	Persentase Usaha Pertambangan yang Tertib Administrasi dan Teknis	Persen			34,53			



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Pembangunan Daerah Dan Jabar Juara	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017	2018	2019			
							Target	Rp.		
		2	Persentase Peningkatan Muka Air Tanah	Persen			5			
2	Program Pengembangan Energi							22.285.825.000	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Energi Juara	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		1	Konsumsi Listrik Per Kapita	Kwh			1.376			
		2	Jumlah Instalasi Tenaga Listrik yang Laik Operasi	Unit			600			
		3	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Bidang Energi	Persen			0,36			
Sasaran:										
3.1.2	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	1	Tingkat Konektivitas antar wilayah	Persen	40,90	40,90-41,00	41 - 43			IKU Pemerintah Daerah
Program:										
1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan							102.289.102.000	PPD: Infrastruktur konektivitas wilayah JJ: transportasi juara, logistik juara	Dinas Perhubungan
		1	Persentase ketersediaan Prasarana Transportasi Darat,Laut & ASDP, Kereta Api dan Udara	Persen			79			
2	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum							73.367.450.000	PPD: Infrastruktur konektivitas wilayah JJ: transportasi	Dinas Perhubungan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Pembangunan Daerah Dan Jabar Juara	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2017	2018	2019				
					Target	Rp.			
							juara, logistik juara		
	1	Jumlah Penumpang Angkutan Umum	Orang			174.000.000			
	2	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca bidang Transportasi	Persen			0,42			
3	Pengembangan Fasilitas Perlengkapan Jalan						19.087.744.000	PPD: Infrastruktur konektivitas wilayah JJ: transportasi juara, logistik juara	Dinas Perhubungan
	1	Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Ruas Jalan Provinsi	Persen			38			
4	Program Pengendalian dan Pengamanan Perhubungan						9.338.500.000	PPD: Infrastruktur konektivitas wilayah JJ: transportasi juara	Dinas Perhubungan
	1	Persentase Angkutan Penumpang Umum (AKDP) yang Daftar Ulang Kartu Pengawasan	Persen			56			
5	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan							PPD: Infrastruktur konektivitas wilayah JJ: transportasi juara, logistik juara, Jembatan Desa PPD: Pengembangan destinasi dan	Dinas BMRP
	1	Tingkat kemantapan jalan	Persen	89,3	90,18	91,48	400.390.303.450		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Pembangunan Daerah Dan Jabar Juara	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017	2018	2019			
							Target	Rp.		
									infrastruktur pariwisata JJ: Pariwisata Juara	
6	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	1	Tingkat kemantapan jalan	Persen	89,3	90,18	91,48	660.407.082.100	PPD: Insfrastruktur konektivitas wilayah JJ: transportasi juara, logistik juara, Jembatan Desa PPD: Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata JJ: Pariwisata Juara	Dinas BMPR
Sasaran:										
3.1.3	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	1	Indeks Desa Membangun	Poin	0,64	0,64	0,65			IKU Pemerintah Daerah



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Pembangunan Daerah Dan Jabar Juara	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2017	2018	2019				
					Target	Rp.			
Program:									
1	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat						9.407.500.000	PPD: Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) JJ: Desa Digital, Patriot Desa, Desa Sejahtera Mandiri, Mobil Siaga, Sapa warga, One Village One Company (OVOC), Satu Desa Satu BUMDes, CEO BUMDesa (Chief Executive Officer)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang Terlibat dalam Kegiatan TMMD, BSMSS,dan BBGRM	Persen			80		
		2	Persentase Lembaga Lembaga Budaya dan Keswadayaan Masyarakat	Persen			80		
		3	Persentase Posyandu Mandiri	Persen			100		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Pembangunan Daerah Dan Jabar Juara	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019			
					Target	Rp.		
2	Program Pemanjangan Pemerintahan Dan Pembangunan Desa					54.766.000.000	PPD: Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) JJ: Desa Digital, Patriot Desa, Desa Sejahtera Mandiri, Mobil Siaga, Sapa warga, Satu Desa Satu BUMDes, CEO BUMDesa (Chief Executive Officer), Penguatan Infrastruktur Perdesaan, Jembatan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	1	Persentase Tingkat Perkembangan Desa Mandiri	Persen			25		
	2	Jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang Memiliki Pendidikan di atas Pendidikan Mininal	Persen			65		
	3	Jumlah Desa yang Sudah Menerapkan SISKEUDES	Desa			60		
	4	Tingkat Kelengkapan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Sesuai Standar Baku Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Persen			50		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Pembangunan Daerah Dan Jabar Juara	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2017	2018	2019				
					Target	Rp.			
3	Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan					21.703.574.800	PPD: Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) JJ: Desa Digital, Patriot Desa, Desa Sejahtera Mandiri, Mobil Siaga, Sapa warga, Satu Desa Satu BUMDes, CEO BUMDesa (Chief Executive Officer), Penguatan Infrastruktur Perdesaan, Jembatan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		1	Persentase Anggaran APB-Desa diatas 30% untuk Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persen			40		
		2	Jumlah desa yang sudah memiliki rencana tata ruang wilayah desa	dokumen			40		
4	Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan					53.406.600.000	PPD: Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) JJ: Desa Digital, Patriot Desa, Desa Sejahtera Mandiri, Mobil Siaga, Sapa warga, Satu Desa Satu BUMDes, CEO BUMDesa (Chief Executive	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Pembangunan Daerah Dan Jabar Juara	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2017	2018	2019				
					Target	Rp.			
							Officer), One Village One Company (OVOC)		
	1	Persentase Kader Terlatih dalam Kelembagaan Desa	Persen			50			
	2	Jumlah dan jenis Teknologi Tepat Guna (TTG) di Jawa Barat	buah			25			
	3	Persentase Pelibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	Persen			70			
	4	Persentase Kerjasama Pengembangan Kapasitas Produksi Desa, dan Akses Pemasaran Potensi Desa	Persen			30			
	5	Persentase Kader Terlatih dalam Kelembagaan Desa	Persen			50			
Sasaran:									
3.1.4	Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan	1	Usulan Pembentukan Daerah Persiapan Otonomi Baru	Usulan	0	0	0		IKU Pemerintah Daerah
Program:									
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Tingkat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Persen	-	-	85	400.000.000	PPD: Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah JJ: Birokrasi Juara Sekretariat Daerah



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Pembangunan Daerah Dan Jabar Juara	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			2017	2018	2019					
					Target	Rp.				
Tujuan:										
3.2.	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	51.85 (Metode Lama)	49,54	49,76		PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara, Kelola Sampah Juara	IKU Pemerintah Daerah
Sasaran:										
3.2.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	51,85 (metode lama)	49,54 (metode baru)	49,76		PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara, Kelola Sampah Juara	IKU Pemerintah Daerah
		2	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	2,02	2,38	2,8		PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara, Kelola Sampah Juara	IKU Pemerintah Daerah
Program:										
1	Program Pengelolaan DAS dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya						23.876.417.846		PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Kehutanan
		1	Persentase Tutupan Hutan	Persen	NA	NA	32.87			
		2	Persentase Jumlah Penangkar Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi yang memiliki izin	Persen	NA	NA	20			
		3	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan Hutan (%)	Persen	NA	NA	2			
		4	Persentase Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditetapkan	Persen	NA	NA	10			



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Pembangunan Daerah Dan Jabar Juara	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2017	2018	2019				
					Target	Rp.			
	5	Persentase Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kehutanan	Persen	8,17	9,77	11,35			
2	1	Peningkatan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Persen			100	1.090.000.000	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Kehutanan
3		Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup					2.090.000.000	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Lingkungan Hidup
	1	Indeks Kualitas Air	Poin	42,07 (Metode Lama)	42,27	42,47			
	2	Indeks Kualitas Udara	Poin	78,91 (Metode Lama)	79,11	79,31			
	3	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Bidang Pengelolaan Limbah Domestik	Persen	0,01	0,51	0,62			
4		Program Penataan Ruang					3.850.210.000	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara, Kota Juara PPD: Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah JJ: Birokrasi Juara	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	1	Persentase ketersediaan rencana tata ruang	Persen	78	78	79,25			



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Pembangunan Daerah Dan Jabar Juara	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019			
					Target	Rp.		
	2	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang diberikan	Persen	100	100	100		
	3	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penataan ruang	Persen	100	100	100		
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman					14.174.000.000	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara, Kota Juara, Kelola Sampah Juara PPD: Subsidi Gratis Golekmah JJ: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)	Dinas Perumahan dan Permukiman
	1	Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	Persen	67,01	70,74	70,67		
	2	Cakupan Pelayanan Penanganan Persampahan	Persen	67,11	67,87	69		
	3	Cakupan Pengurangan Sampah	Persen	N/A	N/A	3,49		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Pembangunan Daerah Dan Jabar Juara	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2017	2018	2019			
							Target	Rp.		
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan							203.936.851.000	PPD:Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Tanggap Bencana Juara PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara, Kota Juara PPD: Subsidi Gratis Golekmah JJ: Buruh Juara, Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)	Dinas Perumahan dan Permukiman
		1	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	93,04	98,46	98,77			
		2	Penanganan backlog Perumahan	Persen	8,90	8,81	8,72			
		3	Persentase Penanganan Hunian Rumah untuk Pendukung Pelaksanaan Program Pemerintah dan Pasca Bencana	Persen	3,7	3,7	100			
		4	Persentase Layanan Pembinaan Teknis Bangunan Gedung dan Rumah Negara	Persen	100	100	100			
Sasaran:										
3.2.2	Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik	1	Indeks Penggunaan Air	Poin	N/A	N/A	11.923			IKU Pemerintah Daerah



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Pembangunan Daerah Dan Jabar Juara	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019			
					Target	Rp.		
Program:								
1	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Situ, Sungai, Pantai, dan Sumber Daya Air lainnya					218.526.594.824	PPD: Gerakan bangun desa JJ: Lingkungan Juara, Tanggap bencana juara	Dinas Sumber Daya Air
	1	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Air	Persen			0,5		
	2	Tingkat Pelayanan Rekomendasi Perijinan Sumber Daya Air	Persen			60		
2	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Tambak dan Jaringan Pengairan Lainnya					131.618.323.000	PPD: Gerakan bangun desa JJ: Lingkungan Juara, Tanggap bencana juara	Dinas Sumber Daya Air
	1	Indeks kinerja sistem irigasi	Persen			52		
	2	Cakupan layanan D.I. Tambak	Ha			0		
3	Program Pengelolaan Kelembagaan, Data dan Sistem Informasi Sumber Daya Air					10.063.750.000	PPD: Gerakan bangun desa JJ: Lingkungan Juara, Tanggap bencana juara	Dinas Sumber Daya Air
	1	Tingkat Implementasi Penerapan Rekomendasi Kebijakan yang Dihasilkan Kelembagaan SDA	Persen			60		
	2	Tingkat Penyediaan Sistem Informasi SDA yang dapat Diakses Masyarakat	Persen			45		
Sasaran:								
3.2.3	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	1	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin	166	166	165	IKU Pemerintah Daerah



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Pembangunan Daerah Dan Jabar Juara	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2017	2018	2019				
					Target	Rp.			
Program:									
1	Program Pengurangan Kerentanan Bencana						1.424.300.000	PPD: Akses Pendidikan Untuk Semua JJ: Tanggap Bencana Juara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	Tingkat Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sektor Pembangunan	Persen			80		
		2	Tingkat Pengurangan Korban Jiwa Akibat Bencana Alam	Persen			75		
2	Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana						11.660.000.000	PPD: Akses Pendidikan Untuk Semua JJ: Tanggap Bencana Juara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	Tingkat Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab/Kota			27		
		2	Tingkat Penanganan Keadaan Darurat Bencana	Persen			90		
		3	Tingkat Pemulihan Pasca Bencana	Persen			95		
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana						1.300.000.000	PPD: Akses Pendidikan Untuk Semua JJ: Tanggap Bencana Juara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Persen			75		
4	Program Pengendalian Daya Rusak Air	1	Tingkat Pengurangan Titik Terdampak Banjir dan Kekeringan	Persen			4.900.000.000	PPD: Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Tanggap Bencana Juara PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah	Dinas Sumber Daya Air



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Pembangunan Daerah Dan Jabar Juara	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2017	2018	2019				
					Target	Rp.			
5	Program pengendalian daya rusak air pada WS. Cisadea-Cibareno						JJ: Lingkungan Juara PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Sumber Daya Air	
		1	Persentase kejadian daya rusak air yang ditangani pada WS. Cisadea-Cibareno	Persen	na	na	0		
6	Program pengendalian daya rusak air pada WS. Ciwulan-Cilaki						PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Sumber Daya Air	
		1	Persentase kejadian daya rusak air yang ditangani pada WS. Ciwulan-Cilaki	Persen	na	na	0		
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman						PPD: Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata JJ: Pariwisata Juara, Lingkungan Juara, Kelola Sampah Juara	Dinas Perumahan dan Permukiman	
		1	Pengurangan luas genangan di permukiman	Persen	na	na	85		
Misi 4: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi Dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan									
Tujuan:									
4.1.	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta	1	Produk Domestik Regional Bruto (ADHB)	Rp. Trilyun	1786,09	1.911.116	2044,89		IKU Pemerintah Daerah



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Pembangunan Daerah Dan Jabar Juara	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2017	2018	2019				
					Target	Rp.			
mengurangi disparitas ekonomi									
Sasaran:									
4.1.1	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan	1	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Poin	85,2	81,6	82,4		IKU Pemerintah Daerah
		2	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	104,92	109,00	109,50		IKU Pemerintah Daerah
Program:									
1	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dan Hortikultura						82.647.250.108	PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat berbasis inovasi JJ: Petani Juara PPD: Gerakan Bangun Desa JJ: One Village One Company (OVOC) PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Pantura Juara	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen			2,5		
		2	Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Persen			1,5		
		3	Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan	Persen			2,5		
2	Program Peningkatan Produksi Perikanan Dan Daya Saing Produk Perikanan						41.024.922.500	PPD: Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi	Dinas Kelautan dan Perikanan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Pembangunan Daerah Dan Jabar Juara	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2017	2018	2019				
					Target	Rp.			
							JJ: Nelayan Juara		
	1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton			244.000			
	2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton			1.200.000			
	3	Peningkatan produksi perikanan yang memenuhi standar jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan	Persen			91			
	4	Konsumsi Ikan Jawa Barat	Kg/Kap/Tahun			29,10			
3	Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan						30.336.697.210	PPD: Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi JJ: Nelayan Juara	Dinas Kelautan dan Perikanan
	1	Peningkatan Penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan secara akuntabel	Persen			75			
	2	Jumlah Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	Kawasan			1			
	3	Jumlah Benih Ikan yang ditebar di Perairan Daratan	Ekor			60.000.000			
	4	Jumlah Plasma Nutfah yang dilestarikan	Jenis			4			
	5	Produksi garam	Ton			245.978			
4	Program Peningkatan Produksi Produktifitas dan Nilai Tambah Perkebunan						28.437.500.000	PPD: Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi JJ: Petani Juara	Dinas Perkebunan
	1	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Rata-rata Komoditas Perkebunan	Persen			2,6			
	2	Peningkatan ketersediaan benih unggul komoditas perkebunan	Persen			2,6			
	3	peningkatan benih tanaman perkebunan tersertifikasi	Persen			2,6			
	4	Peningkatan Kemantapan Kelembagaan	Persen			2,6			
	5	Optimalisasi Lahan Perkebunan	Ha			≥484,234			
	6	Penurunan intensitas serangan OPT Perkebunan	Persen			1			



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Pembangunan Daerah Dan Jabar Juara	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			2017	2018	2019						
					Target	Rp.					
5	Program Ketahanan Pangan	7	Peningkatan Penerapan Jaminan Mutu	Persen			10				
		1	Skor Pola Pangan Harapan	Poin			86,5	8.209.922.000	PPD: Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi JJ: Petani Juara, Logistik Juara	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	
6	Program Peningkatan Produksi Produktifitas dan Nilai Tambah Produk Peternakan						29.471.069.300	PPD: Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi JJ: Petani Juara	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan		
		1	Produksi Komoditas Peternakan								
			a Daging	Ton				1.043.467			
			b.Telur	Ton				243.517			
			c.Susu	Ton				326.698			
			2	Jumlah Sertifikasi Jaminan Mutu Pelaku Usaha Produk Peternakan	Unit				480		
			3	Peningkatan mutu produk peternakan							
			a Daging	Persen					60		
			b.Telur	Persen					81		
			c.Susu	Persen					81		
	4	Bobot Kinerja Pengendalian PHMS di Jawa Barat	Poin				76				
7	Program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat						6.221.243.618	PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat berbasis inovasi JJ: Petani Juara, Pariwisata Juara	Dinas Kehutanan		
		1	Persentase Peningkatan Produksi hasil hutan	Persen				1			
		2	Persentase Peningkatan Jasa Wisata Alam	Persen					8		
		3	Persentase Bertambahnya Manajemen Hutan Rakyat	Persen					20		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Pembangunan Daerah Dan Jabar Juara	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			2017	2018	2019					
					Target	Rp.				
Sasaran:										
4.1.2	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	1	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	Persen	2,71	2,85	2,90-3,00			IKU Pemerintah Daerah
Program:										
1	Program pengembangan destinasi wisata						71.235.000.000	PPD: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata JJ: Pariwisata Juara	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		1	Jumlah Event Pariwisata	Event Per Tahun			3			
2	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata						12.050.000.000	PPD: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata JJ: Pariwisata Juara	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		1	Jumlah Event Promosi Pariwisata	Event Per Tahun			5			
		2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Jawa Barat	Orang Per Tahun			6.030.682			
		3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusatntara ke Jawa Barat	Orang Per Tahun			72.169.325			



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Pembangunan Daerah Dan Jabar Juara	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2017	2018	2019				
					Target	Rp.			
3	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Situ, Sungai, Pantai, dan Sumber Daya Air lainnya					218.526.594.824	PPD: Gerakan bangun desa JJ: Lingkungan Juara, Tanggap bencana juara PPD: Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata JJ: Pariwisata Juara	Dinas Sumber Daya Air	
	1	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Air	Persen			0,5			
	2	Tingkat Pelayanan Rekomendasi Perijinan Sumber Daya Air	Persen			60			
Sasaran:									
4.1.3	Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat	1	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Persen	5,35	6,49	4,63		IKU Pemerintah Daerah
		2	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	4,55	4,19	3		IKU Pemerintah Daerah
Program:									
1	Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga						3.760.000.000	PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat Berbasis Inovasi JJ: Pasar Juara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	1	Indeks Keberdayaan Konsumen	Poin				37		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Pembangunan Daerah Dan Jabar Juara	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2017	2018	2019				
					Target	Rp.			
	2	Jumlah Pengujian Mutu Barang	Jumlah Pengujian			160			
	3	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	SNI Wajib			20			
2	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri						16.000.000.000	PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat Berbasis Inovasi JJ: Pasar Juara, Logistik Juara, UMKM Juara, Wirausaha Juara PPD: Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara JJ: Pesantren Juara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	1	Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB	Persen			22			
	2	IHK (Indeks Harga Konsumen) Bahan Makanan	Poin			150			
3	Program Pengembangan Ekspor						2.900.000.000	PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat Berbasis Inovasi JJ: Pasar Juara, Logistik Juara, Industri Juara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	1	Volume Ekspor	Ribu Ton			7.500			
	2	Nilai Ekspor	Juta USD			30.000			
Sasaran:									
4.1.4	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	1	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Triliun Rupiah	449,337	473,000	495,400		IKU Pemerintah Daerah



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Pembangunan Daerah Dan Jabar Juara	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019			
					Target	Rp.		
	2 Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	Persen	18,06	20,10	21			IKU Pemerintah Daerah
Program:								
1	Program Peningkatan Investasi Daerah					3.950.000.000	PPD: Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah JJ: BUMD Juara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	1 Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN	Trilyin Rupiah			108,5			
2	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					5.800.000.000	PPD: Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah JJ: Birokrasi Juara	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Perijinan)	Poin			79			
3	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif koperasi usaha kecil dan menengah					130.264.736.600	PPD: Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi JJ: UMKM Juara, Wirausaha Juara	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
	1 Pertumbuhan koperasi berkualitas				20			
	2 pertumbuhan akses modal KUK				20			
	3 pertumbuhan jumlah rasio wirausaha				1,5			
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kepemimpinan Yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota								



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Pembangunan Daerah Dan Jabar Juara	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2017	2018	2019				
					Target	Rp.			
Tujuan:									
5.1.	Mewujudkan <i>good governance</i> dan <i>whole of government</i>	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	BB	BB	BB		IKU Pemerintah Daerah
Sasaran:									
5.1.1	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang <i>smart</i> , bersih dan akuntabel	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	BB	BB	BB		IKU Pemerintah Daerah
Program:									
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur						32.819.739.500	PPD: Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah JJ: Birokrasi Juara, ASN Juara	Badan Kepegawaian Daerah
		1	Persentase pegawai yang mencapai SKP diatas 76%;	Persen			80		
		2	Persentase Pelanggaran Disiplin	Persen			2		
		3	Jumlah PNS yang Melanjutkan Pendidikan Formal	Orang			200		
		4	Tingkat Kesejahteraan Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Persen			100		
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah						11.628.100.000	PPD: Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah JJ: Birokrasi Juara	Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)
		1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Tingkat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Persen			85		
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor			82,30		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Pembangunan Daerah Dan Jabar Juara	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2017	2018	2019				
					Target	Rp.			
	3	Persentase Penggunaan Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa Mulai Dari Perencanaan, Proses Pengadaan sampai dengan Monev/Pelaporan	Persen			100			
	4	Nilai hasil evaluasi AKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Kategori			A			
3	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum dan HAM					8.406.500.000	PPD: Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah JJ: Birokrasi Juara	Sekretariat Daerah (Biro Hukum dan HAM)	
	1	Persentase Harmonisasi dan Sinkronisasi terhadap Rancangan Prodak Hukum Daerah	Persen			80			
4	Program Pembinaan dan Pengawasan					27.050.000.000	PPD: Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah JJ: Birokrasi Juara	Inspektorat Daerah Provinsi	
	1	Hasil Penilaian EPPD Provinsi Jawa Barat di Tingkat Nasional	Poin			3.275			
	2	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	Peringkat			A			
	3	Opini BPK-RI terhadap LKPD Provinsi Jawa Barat	Opini			WTP			
	4	Level Maturitas SPIP Pemeintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Level			III			
	5	Persentase Penyelesaian tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI	Persen			75			
	6	Persentase Penyelesaian TLHP Hasil Pemeriksaan Inspektorat terhadap PD Provinsi	Persen			90			
	7	Persentase Nilai Indikator RAD-PPK	Persen			100			



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Pembangunan Daerah Dan Jabar Juara	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2017	2018	2019				
					Target	Rp.			
	8	Persentase Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat	Persen			75			
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah					28.694.600.000	PPD: Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah JJ: APBD Juara	Badan Pendapatan Daerah	
	1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen			56,52			
	2	Dana Perimbangan	Persen			43,16			
	3	Pendapatan Lain-lain yang Sah	Persen			0,31			
	4	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Pendapatan Daerah)	Skor			82,3			
4	Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah					38.706.639.283	PPD: Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah JJ: APBD Juara	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	1	Jumlah penetapan petunjuk pelaksanaan di bidang pengelolaan keuangan daerah	Buah			3			
	2	Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran	Persen			100			
	3	Persentase aset yang diamankan secara fisik dan legal	Persen			40			
	4	Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan asset daerah.	Persen			85			
Sasaran:									
5.1.2	Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif	1	Tingkat Efektivitas Kerjasama Daerah	Persen	N/A	N/A	50		IKU Pemerintah Daerah



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan		Prioritas Pembangunan Daerah Dan Jabar Juara	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019			
					Target	Rp.		
Program:								
1	Program Kerja Sama Pembangunan					9.391.900.000	PPD: Inovasi Pelayanan publik dan penataan daerah JJ: Birokrasi Juara	Biro Pemerintahan dan Kerjasama, Sekretariat Daerah
		1	Kerja sama antar daerah	Buah		10		
		2	Kerja sama dengan pihak ketiga	Buah		15		
		3	Kerja sama luar negeri	Buah		3		
		4	Peraturan perundang-undangan yang diharmonisasi terkait upaya sinkronisasi regulasi bidang kerja sama daerah	Buah		3		
JUMLAH						5.315.613.412.759		

Sumber: hasil analisis, 2019



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program perangkat daerah guna mencapai sasaran pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi, maka dialokasikan anggaran untuk belanja tidak langsung maupun belanja langsung sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III RPJMD ini. Kerangka pendanaan pembangunan daerah dapat dijelaskan menurut struktur belanja daerah yaitu Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerapkan *money follow programme* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Hal ini berarti program dan kegiatan strategis yang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut:

- a. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat. Komponen belanja langsung wajib dan mengikat meliputi: Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap BLUD; Belanja Jasa Kantor (Listrik, Air, Telepon/Internet); Belanja Premi Asuransi; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; dan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS.
- b. **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Alokasi pemenuhan pelayanan dasar dihitung pada prioritas II dengan pertimbangan bahwa prioritas gubernur dan wakil gubernur juga termasuk hal tersebut. Alokasi belanja pada prioritas II diarahkan untuk:
 - 1) Pelaksanaan 9 (sembilan) prioritas pembangunan Jawa Barat Tahun 2019-2023, meliputi: 1) Akses pendidikan untuk semua dan pengembangan budaya; 2) Desentralisasi pelayanan kesehatan; 3) Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi; 4) Pengembangan



- destinasi dan infrastruktur pariwisata; 5) Pendidikan agama dan tempat ibadah juara; 6) Infrastruktur konektivitas wilayah; 7) Gerakan bangun desa (Gerbang desa); 8) Subsidi gratis golekmah; dan 9) Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.
- 2) Pemenuhan sasaran pembangunan dalam rangka perwujudan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.
 - 3) Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) kewenangan provinsi, meliputi 19 jenis pelayanan dasar yaitu: pendidikan menengah; pendidikan khusus; pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi; pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota; penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi; pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi; rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.
 - 4) Penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs).
 - 5) Sinkronisasi prioritas pembangunan RPJMN 2015-2019, dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024.
 - 6) Pemenuhan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Belanja Daerah.
 - 7) Pemenuhan anggaran fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10% dari total belanja APBD diluar gaji.
 - 8) Pemenuhan anggaran fungsi infrastruktur sekurang-kurangnya 10% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta



peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

- c. **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Alokasi anggaran prioritas III diperuntukkan untuk mendanai program-program perangkat daerah yang tidak termasuk dalam kategori Prioritas I dan Prioritas II. Program-program tersebut dilaksanakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi namun tidak menjadi prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018-2023, serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran.

Adapun kerangka pendanaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat, disajikan pada Tabel 7.1.



Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023
Provinsi Jawa Barat

Uraian	Proyeksi				
	2019	2020	2021	2022	2023
BELANJA	37.055.508.945.575	38.572.645.255.864	39.568.580.562.070	40.818.187.324.750	41.836.224.305.447
Belanja Tidak Langsung	28.148.428.550.758	29.059.357.221.425	29.443.438.982.664	30.085.642.304.145	30.687.170.433.757
Belanja Pegawai	5.322.286.211.549	7.390.813.680.114	7.400.813.680.114	7.411.174.819.266	7.421.550.464.013
Belanja Subsidi	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
Belanja Hibah	9.213.738.682.702	9.663.738.682.702	9.678.738.682.702	9.694.224.664.594	9.709.735.424.058
Belanja Bantuan Sosial	298.152.000.000	198.152.000.000	198.152.000.000	198.152.000.000	198.152.000.000
Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ kota dan Pemerintah Desa*	7.470.689.320.200	7.553.853.148.782	7.887.355.296.568	8.224.501.444.784	8.576.263.701.411
Belanja Bantuan Keuangan	5.798.562.336.307	4.172.799.709.827	4.198.379.323.280	4.477.589.375.500	4.701.468.844.275
Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000
Belanja Langsung	8.907.080.394.817	9.513.288.034.439	10.125.141.579.406	10.732.545.020.605	11.149.053.871.690
Belanja Pegawai	330.617.892.211	-	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	5.417.384.921.089	-	-	-	-
Belanja Modal	3.159.077.581.517	-	-	-	-

Sumber: hasil analisis Tim Penyusun RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023



7.2. Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih.
2. Berbasis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.
3. Pelayanan dasar berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM).
4. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).
5. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta kualitas lingkungan hidup.
6. Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi.

Rencana program perangkat daerah Provinsi Jawa Barat untuk periode Tahun 2019 berjumlah 225 program, sementara Tahun 2020 sampai dengan 2023 sebanyak 811 program. Program dimaksud merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Provinsi Jawa Barat, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Program perangkat daerah Provinsi Jawa Barat disajikan berdasarkan urusan/fungsi penunjang yang terbagi menjadi 2 (dua) tabel dan dimuat dalam Buku II Pada Buku II disajikan Tabel 2 yang memuat program perangkat daerah Tahun 2019, dan Tabel 3 memuat program perangkat daerah Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023.

Pemisahan penyajian program perangkat daerah kedalam 2 (dua) tabel disebabkan adanya perbedaan nomenklatur dan jumlah program antara Tahun 2019 dengan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023. Program Tahun 2019 disusun sesuai dengan program RKPD dan APBD Tahun 2019 yang ditetapkan pada Tahun 2018. Sementara program perangkat daerah Tahun 2020 sampai dengan 2023 mengalami penyesuaian dengan struktur organisasi dan arsitektur kinerja RPJMD dan perangkat daerah sehingga terbentuk *cascade* kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023.



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sementara dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

8.1. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Guna menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan indikator makro pembangunan yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Indeks Gini. Indikator kinerja makro tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan Provinsi Jawa Barat, sekaligus memberi dukungan bagi pencapaian indikator kinerja makro pembangunan nasional dan menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat. Proyeksi indikator kinerja makro mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dimuat pada Tabel 8.1.

Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut IKU pemerintah daerah, memuat indikator kinerja



tujuan dan/atau sasaran RPJMD sebagai tolok ukur penilaian kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023. IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat. IKU Provinsi Jawa Barat yang disajikan pada Tabel 8.2.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu IKK tingkat dampak (*impact*) dan IKK tingkat hasil (*outcome*). IKK tingkat dampak (*impact*) memuat IKU pemerintah daerah maupun IKU perangkat daerah. IKK tingkat dampak (*impact*) merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD yang juga merupakan IKU pemerintah daerah, serta indikator kinerja tujuan dan sasaran seluruh Renstra Perangkat Daerah yang juga merupakan IKU perangkat daerah. IKK tingkat dampak (*impact*) disajikan pada Tabel 8.3. Sementara indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat hasil (*outcome*) yang digunakan untuk menggambarkan indikator kinerja program dan target per tahun selama 5 (lima) tahun disajikan pada Tabel 8.4.

Penetapan indikator kinerja mulai dari IKU pemerintah daerah, IKU perangkat daerah, dan indikator kinerja program secara berjenjang sesuai kinerja yang akan dihasilkan/dicapai, diharapkan dapat memberikan gambaran arsitektur kinerja pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.



Tabel 8.1
Proyeksi Indikator Makro Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,69	71,06	71,42- 71,91	71,91 – 72,52	72,52- 73,13	73,13- 73,74	73,74- 74,35	73,74- 74,35
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,39	1,36	1,50	1,48	1,45	1,43	1,41	1,41
3.	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,83	7,45	6,66-6,90	6,07-6,31	5,48-5,72	4,89-5,13	4,30-4,54	4,30-4,54
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,22	8,17	8,0-7,9	7,9-7,7	7,7-7,5	7,5-7,3	7,3-7,1	7,3-7,1
5.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,35	5,64	5,4-5,8	5,5-5,9	5,6-6,0	5,7-6,1	5,8-6,2	5,8-6,2
6.	Indeks Gini	Poin	0,393	0,405	0,38-0,39	0,37-0,38	0,37-0,38	0,36-0,37	0,36-0,37	0,36-0,37

Sumber: Hasil proyeksi, 2019



Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	68,5	68,7	68,6 - 69	69,1 - 69,5	69,6 - 70	70,1 - 70,5	70,6 - 71	70,6 - 71
2.	Indeks Demokrasi	Poin	68,78	73,91	68,79 - 70,78	70,79 - 71,78	71,79 - 72,78	72,79 - 73,78	73,79 - 74,78	73,79 - 74,78
3.	Indeks Kebahagiaan	Poin	69,58	70-71	70-71	70-71	71-73,5	71-73,5	73,6-76	73,6-76
4.	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,47	72,76	73,67 - 74,87	74,87 - 76,07	76,07- 77,27	77,27 - 78,47	78,47 - 79,67	78,47 - 79,67
5.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	70,04	70,14	70,34	71	72	72,3	73,25	73,25
6.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	89,18	89,52	89,32	89,82	90,5	91	92	92
7.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,14	8,18	8.28	8.39	8.49	8.60	8.70	8.70
8.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,42	12,88	13.15	13.39	13.64	13.89	14.14	14.14
9.	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	46,33	49	53,63	56,31	59,13	62,09	65,19	65,19
10.	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat	Persen	N/A	N/A	16,63	18,65	20,72	21,83	22,16	22,16
11.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	69,58	69,61	70-71	70-71	71-73,5	71-73,5	73,6-76	73,6-76
12.	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Persen	40,9	40,90-41,00	41 - 43	44 - 46	47 - 49	50 - 52	53 - 55	53 - 55
13.	Konsumsi listrik per kapita	kWh/ Kapita	1.155	1.231	1.300	1.340	1.386	1.447	1.503	1.503
14.	Indeks Desa Membangun	Poin	0,64	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69	0,69
15.	Usulan Pembentukan Daerah Persiapan Otonomi Baru	Usulan	0	0	0	1	1	2	2	6



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
16.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	51,85 (metode lama)	49,54 (metode baru)	49,76	49,98	50,2	50,42	50,64	50,64
17.	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	2,02	2,38	2,8	3,92	5,87	7,11	7,72	7,72
18.	Indeks Penggunaan Air	Poin	N/A	N/A	1,1923	1,1910	1,1834	1,1822	1,1811	1,1811
19.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin	166	166	165	164	163	162	161	161
20.	Produk Domestik Regional Bruto (ADHB) (Rp. Triliun)	Triliun Rupiah	1.788,38	1.962,23	2.288,75	2.471,85	2.669,60	2.883,16	3.113,82	3.113,82
21.	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	poin	85,2	81,6	82,4	83,2	84	84,8	85,6	85,6
22.	Nilai Tukar Petani (NTP)	poin	108,39	110,9	113,11	115,36	117,65	120	122,38	122,38
23.	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	Persen	2,71	2,85	2,30-3,00	3,01-3,15	3,16-3,30	3,31-3,45	3,46-3,50	3,46-3,50
24.	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Persen	5,35	6,49	2,63	2,7	2,77	2,85	2,94	2,94
25.	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	4,55	4,19	3	3	4	4	5	5
26.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Triliun Rupiah	449,37	473	495,4	520,17	546,18	573,48	602,15	602,15
27.	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Persen	18,06	20,1	21	22	23	24	25	25
28.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	BB	BB	BB	A	A	A	A	A
29.	Tingkat Efektivitas Kerjasama Daerah	Persen	N/A	N/A	50	60	70	80	90	90

Sumber: Hasil proyeksi, 2019



Tabel 8.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/Impact
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,69	71,06	71,42-71,91	71,91-72,52	72,52-73,13	73,13-73,74	73,74-74,35	73,74-74,35	Indikator Makro
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,39	1,36	1,5	1,48	1,45	1,43	1,41	1,41	Indikator Makro
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,83	7,45	6,66-6,90	6,07-6,31	5,48-5,72	4,89-5,13	4,30-4,54	4,30-4,54	Indikator Makro
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,22	8,17	8,0-7,9	7,9-7,7	7,7-7,5	7,5-7,3	7,3-7,1	7,3-7,1	Indikator Makro
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,29	5,64	5,4-5,7	5,4-5,7	5,4-5,7	5,67-5,89	5,67-5,89	5,67-5,89	Indikator Makro
6	Indeks Gini	Poin	0,39	0,405	0,38-0,39	0,37-0,38	0,37-0,38	0,36-0,37	0,36-0,37	0,36-0,37	Indikator Makro
7	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,47	72,76	73,67 – 74,87	74,87 – 76,07	76,07– 77,27	77,27 – 78,47	78,47 – 79,67	78,47 – 79,67	IKU Pemerintah Daerah
8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	70,04	70,14	70,34	71	72	72,3	73,25	73,25	IKU Pemerintah Daerah
9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	89,18	89,52	89,32	89,82	90,5	91	92	92	IKU Pemerintah Daerah
10	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,14	8,18	8.28	8.39	8.49	8.60	8.70	8.70	IKU Pemerintah Daerah
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,42	12,88	13.15	13.39	13.64	13.89	14.14	14.14	IKU Pemerintah Daerah



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	Produk Domestik Regional Bruto (ADHB) (Rp. Triliun)	Triliun Rupiah	1.788,38	1.962,23	2.288,75	2.471,85	2.669,60	2.883,16	3.113,82	3.113,82	IKU Pemerintah Daerah
13	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Poin	85,2	81,6	82,4	83,2	84	84,8	85,6	85,6	IKU Pemerintah Daerah
14	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	Persen	2,71	2,85	2,30-3,00	3,01-3,15	3,16-3,30	3,31-3,45	3,46-3,50	3,46-3,50	IKU Pemerintah Daerah
15	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Persen	5,35	6,49	2,63	2,7	2,77	2,85	2,94	2,94	IKU Pemerintah Daerah
16	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	4,55	4,19	3	3	4	4	5	5	IKU Pemerintah Daerah
17	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Triliun Rupiah	449,37	473	495,4	520,17	546,18	573,48	602,15	602,15	IKU Pemerintah Daerah
18	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Persen	18,06	20,1	21	22	23	24	25	25	IKU Pemerintah Daerah
19	Indeks Kepuasan Pelayanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	Indeks	N/A	N/A	3,51-4 (Baik)	3,51-4 (Baik)	3,51-4 (Baik)	4,01-4,5 (Sangat Baik)	4,01-4,5 (Sangat Baik)	4,01-4,5 (Sangat Baik)	IKU Dinas Pendidikan
20	APM SMA/SMK/SMLB	Persen	60,64	N/A	66,65	69,60	72,56	75,51	78,46	78,46	IKU Dinas Pendidikan
21	Rata-Rata Nilai ujian Nasional SMA/SMK	Nilai	52,2 (SMA IPA), 48,8 (SMA IPS), 52,31 (BHS) 52,2 (SMK)	51,08 (SMA IPA), 46,21 (SMA IPS), 43,83 (SMK)	54,03 (SMA IPA), 49,16 (SMA IPS), 46,78 (SMK)	56,98 (SMA IPA), 52,11 (SMA IPS), 49,73 (SMK)	59,93 (SMA IPA), 55,06 (SMA IPS), 52,68 (SMK)	62,88 (SMA IPA), 58,02 (SMA IPS), 55,64 (SMK)	65,84 (SMA IPA), 60,97 (SMA IPS), 58,59 (SMK)	65,84 (SMA IPA), 60,97 (SMA IPS), 58,59 (SMK)	IKU Dinas Pendidikan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
22	Ratio Kematian Ibu	per 100.000	N/A	N/A	86/100.000 KH	85/100.000 KH	84/100.000 KH	83/100.000 KH	82/100.000 KH	82/100.000 KH	IKU Dinas Kesehatan
23	Ratio Kematian Bayi	per 1000	N/A	N/A	5.2/1.000 KH	5/1.000 KH	4.8/1.000 KH	4.6/1.000 KH	4.4/1.000 KH	4.4/1.000 KH	IKU Dinas Kesehatan
24	Prevalensi Stunting	Persen	N/A	N/A	27,2	25,2	23,2	21,2	19,2	19,2	IKU Dinas Kesehatan
25	Persentase Penyehatan Lingkungan Terhadap Akses Jamban Sehat	Persen	N/A	N/A	75	80	85	90	95	95	IKU Dinas Kesehatan
26	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Cakupan Rumah Tangga Ber PHBS >60%	Persen	N/A	N/A	40,7	51,9	63	77,8	85,2	85,2	IKU Dinas Kesehatan
27	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB	Persen	N/A	N/A	90	90	90	90	90	90	IKU Dinas Kesehatan
28	Prevalensi Hipertensi	Persen	N/A	N/A	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	IKU Dinas Kesehatan
29	Persentase Warga Negara Yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Kesehatan
30	Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi	Persen	N/A	N/A	94,76	99,81	99,81	99,81	99,81	99,81	IKU Dinas Kesehatan
31	Persentase Ketersediaan Obat Esensial	Persen	N/A	N/A	90	91	92	93	95	95	IKU Dinas Kesehatan
32	Persentase Penduduk Yang Mendapat Jaminan Kesehatan Menuju	Persen	N/A	N/A	85	90	95	95	95	95	IKU Dinas Kesehatan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<i>Universal Health Coverage</i>										
33	Persentase aksesibilitas menuju kawasan potensial dan pusat-pusat kegiatan yang dibangun/ditingkatkan	Persen	N/A	N/A	2,49	19,57	51,06	79,64	100	100	IKU Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
34	Tingkat kemantapan jalan	Persen	89,30	90,18	91,48	95,53	99,28	99,97	100	100	IKU Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
35	Persentase penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang	Persen	78	78	79,25	83,00	88,75	93,00	97,50	97,50	IKU Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
36	Indeks Penggunaan Air (IPA)	Poin	N/A	N/A	1,1923	1,1910	1,1811	1,1822	1,1834	1,1834	IKU Dinas Sumber Daya Air
37	Persentase Peningkatan kapasitas tampung sumber daya air	Persen	N/A	N/A	0,31	0,2	0,25	0,25	0,26	0,26	IKU Dinas Sumber Daya Air
38	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	Persen	N/A	N/A	52,31	52,51	52,71	52,91	53,11	53,11	IKU Dinas Sumber Daya Air
39	Tingkat implementasi rekomendasi yang dihasilkan oleh kelembagaan Sumber Daya Air	Persen	N/A	N/A	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	IKU Dinas Sumber Daya Air



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
40	Persentase Titik Terdampak Banjir dan Kekeringan yang ditangani	Persen	N/A	N/A	5,00	6,00	7,50	8,50	10,00	10,00	IKU Dinas Sumber Daya Air
41	Rasio permukiman layak	Rasio	0,9928	0,9948	0,9952	0,9955	0,9959	0,9962	0,9966	0,9966	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
42	Cakupan akses infrastruktur dasar permukiman	Persen	69	72	74	77	80	83	86	86	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
43	Tingkat kualitas kawasan permukiman	Persen	1,44	1,60	6,86	6,7	7,18	3,35	0,47	0,47	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
44	Tingkat ketersediaan rumah layak	Persen	8,88	8,77	8,66	8,55	8,44	8,33	8,22	8,22	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
45	Pemenuhan unsur penyelenggaraan bangunan gedung	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
46	Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan	Persen	5,65	12,90	21,77	42,74	62,10	80,65	100	100	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
47	Cakupan akses infrastruktur dasar permukiman	Persen	69	72	74	77	80	83	86	86	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
48	Persentase luasan genangan permukiman yang tertangani	Persen	N/A	N/A	85	70	55	40	25	25	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
49	Laju Penegakan Perda dan Perkada	Persen	4,5	4,5	5	6	6	6	6	6	IKU Satuan Polisi Pamong Praja



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
50	Tingkat Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Persen	62	83,50	70	75	80	85	90	90	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
51	Persentase anggota linmas untuk perlindungan masyarakat	Persen	55	60	75	80	85	90	95	95	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
52	Persentase Anggota Satpol PP dan PPNS yang kompeten	Persen	40	45	70	75	80	85	90	90	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
53	persentase PMKS yang Terlayani Kesejahteraan Sosialnya	Persen	N/A	N/A	59,81	60,00	60,19	60,38	60,57	60,57	IKU Dinas Sosial
54	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yg berpartisipasi dalam penanganan PMKS	Persen	N/A	N/A	40	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	IKU Dinas Sosial
55	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	N/A	N/A	63,56	63,67	63,79	63,91	64,03	64,03	IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
56	Persentase Pencari Kerja Yang Bersertifikat	Persen	N/A	N/A	0,25	0,35	0,37	0,39	0,42	0,42	IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
57	Persentase pencari kerja terdaftar yang Bekerja	Persen	N/A	N/A	61,90	62,78	63,66	64,55	65,43	65,43	IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
58	Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	N/A	N/A	5	10	15	20	25	25	IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	antara Pekerja dengan Perusahaan										
59	Persentase jumlah perusahaan yang diawasi	Persen	N/A	N/A	20	20	20	20	20	20	IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
60	Persentase realisasi MoU yang dilaksanakan	Persen	N/A	N/A	85	85	85	85	85	85	IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
61	Persentase kabupaten/kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Persen	56	70	81	89	93	96	100	100	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
62	Tingkat Keberhasilan penanganan kasus KED terhadap perempuan dan anak	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
63	Cakupan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender	Persen	22	22	22	23	23	23	23	23	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
64	Cakupan perempuan di legislatif	Persen	24	24	24	26	26	26	26	26	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
65	Cakupan Pemahaman Pengarusutamaan Gender	Persen	20	25	29	44	66	74	100	100	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
66	Cakupan kabupaten kota yang mendapat pembinaan di bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan di Jawa Barat	Persen	20	30	40	45	60	80	100	100	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
67	Cakupan kabupaten kota yang mendapat peningkatan kualitas perempuan hidup di Jawa Barat	Persen	20	30	40	45	60	80	100	100	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
68	Angka Fertilitas Total (Total Fertility Rate)	Jiwa	2,24	2,24	2,34	2,31	2,28	2,26	2,23	2,23	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
69	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	42,07	36,2	42,47	42,67	42,87	43,07	43,27	43,27	IKU Dinas Lingkungan Hidup
70	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	78,91	72,8	79,31	79,51	79,71	79,91	80,11	80,11	IKU Dinas Lingkungan Hidup
71	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Limbah Domestik	Persen	N/A	N/A	0,62	6,07	12,21	12,23	15,80	15,80	IKU Dinas Lingkungan Hidup
72	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota di Jawa Barat	Persen	N/A	N/A	81,12	81,83	82,63	83,47	84,28	84,28	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
73	Persentase Desa Mandiri	Persen	N/A	N/A	2,58	4,46	6,34	8,22	10,11	10,11	IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
74	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan TMMD/BBGRM/BSMSS	Jumlah	N/A	N/A	TMMD : 12 Kab BBGRM 1 & BSMSS 24 Kab/Kota wilayah	TMMD : 12 Kab BBGRM 1 & BSMSS 24 Kab/Kota wilayah	TMMD : 12 Kab BBGRM 1 & BSMSS 24 Kab/Kota wilayah	TMMD : 12 Kab BBGRM 1 & BSMSS 24 Kab/Kota wilayah	TMMD : 12 Kab BBGRM 1 & BSMSS 24 Kab/Kota wilayah	TMMD : 12 Kab BBGRM 1 & BSMSS 24 Kab/Kota wilayah	IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Kodam III Siliwangi	Kodam III Siliwangi	Kodam III Siliwangi	Kodam III Siliwangi	Kodam III Siliwangi	Kodam III Siliwangi	
75	Jumlah Desa Literasi yang dibina	Desa	N/A	N/A	100	200	300	400	500	500	IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
76	Jumlah KPD	KPD	N/A	N/A	653	300	300	300	460	460	IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
77	Jenis inovasi dan TTG yang dihasilkan dari 27 Kabupaten/Kota.	Jenis	N/A	N/A	8	13	18	22	27	27	IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
78	Tingkat ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat, Perhubungan Laut dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, Perhubungan Udara	Persen	25,39	26,905	37	47	58	81	87	87	IKU Dinas Perhubungan
79	Tingkat ketersediaan Sarana, Prasarana Perhubungan Darat dan Fasilitas Perlengkapan jalan	Persen	20,47	25,44	37,67	52,29	58,20	61,34	64,21	64,21	IKU Dinas Perhubungan
80	Tingkat ketersediaan Prasarana Perhubungan Udara	Persen	27,93	47,15	59,72	70,13	76,94	81,8	83,82	83,82	IKU Dinas Perhubungan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
81	Tingkat ketersediaan prasarana dan fasilitas keselamatan Perhubungan Laut dan ASDP	Persen	27,78	32,03	36,09	44,16	65,22	90,72	100	100	IKU Dinas Perhubungan
82	Tingkat Pelayanan transportasi Kereta Api perkotaan di Jawa Barat	Persen	81,48	81,48	81,48	85,19	85,19	88,89	96,30	96,30	IKU Dinas Perhubungan
83	Tingkat ketersediaan Jaringan Transportasi Massal berbasis Rel	Persen	0	3	16	20	32	89,6	100	100	IKU Dinas Perhubungan
84	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	N/A	2.90	3	3.3	3.5	3.7	4	4	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
85	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Persen	82,89	90,32	90,4	90,45	90,5	90,55	90,6	90,6	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
86	Persentase penyelesaian sengketa informasi	Persen	N/A	N/A	80	85	90	93	95	95	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
87	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level	I s.d II	II+ s.d III	III	III s.d III+	III+	III s.d. IV	IV	IV	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
88	Tingkat kematangan pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Persen	N/A	N/A	77	81	84	87	91	91	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
89	Laju Peningkatan UMKM yang mengakses kredit	Persen	N/A	N/A	20	21,5	23	24,5	26,2	26,2	IKU Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
90	Persentase Koperasi berkualitas	Persen	N/A	N/A	30	32	34,5	37,5	41	41	IKU Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
91	Laju Peningkatan Koperasi yang mengakses kredit	Persen	N/A	N/A	20	21	23	26	30	30	IKU Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
92	Persentase UMKM yang Naik Kelas	Persen	N/A	N/A	17	19	22	26	32	32	IKU Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
93	Laju pertumbuhan investasi PMA-PMDN	Persen	N/A	N/A	3	3	3	3	3	3	IKU Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
94	Nilai realisasi investasi	Triliun Rupiah	N/A	N/A	107,00 - 115,06	112,27 - 120,27	117,48 - 125,48	122,69 - 130,69	127,90 - 135,90	127,90 - 135,90	IKU Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
95	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan	Poin	N/A	N/A	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00	82,00	IKU Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
96	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Poin	N/A	N/A	45,33	47,33	49,33	51,33	53,33	53,33	IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
97	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)	Persen	N/A	N/A	52	54	56	58	60	60	IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
98	Peringkat Jawa Barat pada Multievent Berkebutuhan Khusus Nasional:										IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
	a. PEPARNAS		N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	
	b. PEPARPENAS	Peringkat	N/A	N/A	1	N/A	1	N/A	1	1	
99	Peringkat Jawa Barat pada Multievent Nasional:										IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
	a. PON		N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	
	b. PEPARNAS		N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	c. POPNAS		N/A	N/A	1	N/A	1	N/A	1	N/A	
	d. POPWILNAS		N/A	N/A	N/A	1	N/A	1	N/A	N/A	
109	Indeks membaca masyarakat	Poin	N/A	N/A	68,5	69	69,5	70	70,5	70,5	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
110	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Membaca	Poin	N/A	N/A	62,92	63,23	63,55	63,86	64,18	64,18	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
111	Tingkat Kebiasaan Membaca Masyarakat	Poin	N/A	N/A	68,02	68,36	68,70	69,04	69,39	69,39	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
112	Tingkat Pemanfaatan Bahan Bacaan	Poin	N/A	N/A	74,58	74,95	75,32	75,70	76,08	76,08	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
113	Persentase PD yang memenuhi standar baku kearsipan	Persen	N/A	N/A	52	59	66	73	80	80	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
114	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	Persen	N/A	40	52	59	66	73	80	80	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
115	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan arsip	Persen	N/A	N/A	31	48	65	82	100	100	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
116	Persentase Penyelamatan dan Pelestarian arsip Statis	Persen	N/A	N/A	31	48	65	82	100	100	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
117	NTUP Sub Sektor Kelautan dan Perikanan	Poin	115,00	121,69	122,69	123,99	125,39	126,89	128,59	128,59	IKU Dinas Kelautan dan Perikanan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
118	Produksi Perikanan	Ton	-	-	1.444.000	1.508.880	1.576.858	1.649.085	1.723.721	1.723.721	IKU Dinas Kelautan dan Perikanan
119	Persentase peningkatan konsumsi ikan Provinsi Jawa Barat	Persen	2,48	3,20	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	IKU Dinas Kelautan dan Perikanan
120	Kawasan Konservasi Perairan yang Dikelola	Persen	-	5,28	13,54	22,27	24,38	25,43	26,32	26,32	IKU Dinas Kelautan dan Perikanan
121	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	Persen	45,16	55,48	50	55	60	65	70	70	IKU Dinas Kelautan dan Perikanan
122	Persentase seni budaya yang dilestarikan	Persen	N/A	N/A	16,42	19,03	20,56	21,65	21,79	21,79	IKU Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
123	Laju seni budaya yang dilestarikan	Jumlah	N/A	N/A	3,79	16,61	8,12	5,40	0,50	0,50	IKU Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
124	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	N/A	N/A	1.830.000	1.920.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000	IKU Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
125	Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara	Orang	N/A	N/A	49.000.000	51.400.000	54.000.000	56.500.000	59.300.000	59.300.000	IKU Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
126	Skor PPH tingkat Ketersediaan	Point	N/A	N/A	89,8	90,7	91,6	92,5	93,4	93,4	IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
127	Tingkat Konsumsi Pangan:										



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	- energi	kkal/kap/hr		N/A	2150	2150	2150	2150	2150	2150	IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	- protein	gr/kap/hr	N/A	N/A	57	57	57	57	57	57	
128	Persentase keamanan pangan segar asal tumbuhan yang sesuai SNI	Persen	N/A	N/A	84	86	88	90	92	92	IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
129	Skor PPH Ketersediaan	Point	N/A	N/A	89,8	90,7	91,6	92,5	93,4	93,4	IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
130	Nilai Tukar Usaha Peternakan (NTUP)	Point	N/A	N/A	126,07	126,17	126,27	126,37	126,47	126,47	IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
131	Produksi komoditas peternakan (ton):										IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	- Daging	ton	N/A	N/A	1.043.467	1.099.606	1.158.765	1.221.106	1.286.802	1.286.802	
	- Telur	ton	N/A	N/A	243.517	257.373	272.018	287.496	303.854	303.854	
	- Susu	ton	N/A	N/A	326.698	343.698	361.764	380.685	400.594	400.594	
132	Produksi tanaman pangan dan hortikultura	Ton	N/A	N/A	12.454.406	12.570.313	12.686.496	12.802.956	12.919.701	12.919.701	IKU Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
133	NTUP -R	Poin	112,41	112,81	>100	>100	>100	>100	>100	>100	IKU Dinas Perkebunan
134	Laju peningkatan produksi komoditas unggulan utama perkebunan	Persen	N/A	N/A	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	IKU Dinas Perkebunan
135	Laju peningkatan nilai tambah produk perkebunan	Persen	N/A	N/A	2	2	2	2	2	2	IKU Dinas Perkebunan
136	Persentase tutupan hutan	Persen	N/A	N/A	32,87	32,93	32,99	33,06	33,12	33,12	IKU Dinas Kehutanan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
137	Tingkat kerusakan hutan	Persen	N/A	N/A	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	IKU Dinas Kehutanan
138	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan	Persen	N/A	N/A	10	10	10	10	10	10	IKU Dinas Kehutanan
139	Produksi Hasil Hutan	Persen	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	IKU Dinas Kehutanan
140	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	Persen	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	IKU Dinas Kehutanan
141	Persentase peningkatan penerimaan jasa wisata alam	Persen	N/A	N/A	10	10	10	10	10	10	IKU Dinas Kehutanan
142	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Persen	N/A	N/A	0	50	35	25	20	20	IKU Dinas Kehutanan
143	Jumlah konsumsi listrik di Jawa Barat	GWh	49.919	54.555	58.367	64.475	69.096	73.409	77.428	77.428	IKU Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
144	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (thdp BAU 2030)	Persen	0,91	1,07	1,63	2,45	5,13	7,59	7,68	7,68	IKU Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
145	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi dan teknis	Persen	30	35	40	45	50	55	60	60	IKU Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
146	Persentase Sumur Bor yang meningkat muka air tanahnya	Persen	1,84	1,84	2	2	2	2	2	2	IKU Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
147	Kontribusi industri Jawa Barat terhadap nasional	Persen	42,29	41.59 (TW.III)	N/A	41,60	42,56	43,52	44,47	44,47	IKU Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
148	PDRB industri non migas	Triliun Rupiah	755,38	N/A	N/A	816,56	839,21	863,15	888,5	888,5	IKU Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
149	Laju Pertumbuhan Perdagangan Jawa Barat	Persen	N/A	N/A	N/A	3	4	4	5	5	IKU Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
150	Laju pertumbuhan ekspor non migas	Persen	11,80797522	N/A	N/A	4	6	8	10	10	IKU Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
151	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Triliun Rupiah	269,77	N/A	N/A	321,90	354,78	393,36	438,71	438,71	IKU Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
152	Persentase Kebijakan yang Efektif	Persen	90	90	90,5	91	91,5	92	92,5	92,5	IKU Sekretariat Daerah
153	Persentase Bahan Kebijakan umum pembinaan, Pemahaman, Pengamalan keagamaan	Persen	90	90	90,5	91	91,5	92	92,5	92,5	IKU Sekretariat Daerah
154	Persentase Usulan Daerah Persiapan Otonom yang disetujui DPRD Provinsi	Persen	N/A	N/A	N/A	75	75	75	75	75	IKU Sekretariat Daerah
155	Persentase Dokumen Persyaratan dan Kelayakan Pemekaran Daerah yang Dianalisis	Persen	N/A	N/A	75	75	75	75	75	75	IKU Sekretariat Daerah
156	Persentase Kerja Sama yang Ditindaklanjuti	Persen	65	70	75	80	85	90	90	90	IKU Sekretariat Daerah



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
157	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pelayanan dan Pengembangan Sosial yang ditindaklanjuti	Persen	90	90	90	90	90	90	90	90	IKU Sekretariat Daerah
158	Skoring LPPD Provinsi di Tingkat Nasional	skor/nilai	3,17	3,24	3,34	3,38	3,41	3,43	3,44	3,44	IKU Sekretariat Daerah
159	Persentase Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Umum	Persen	90	90	90	90	90	90	90	90	IKU Sekretariat Daerah
160	Persentase koordinasi dan fasilitasi produk perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM serta dokumentasi pembinaan dan pengawasan produk hukum	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	IKU Sekretariat Daerah
161	Level Kematangan/ Maturitas PBJ	Level	N/A	N/A	2	3	3	3	4	4	IKU Sekretariat Daerah
162	Persentase perumusan kebijakan umum serta koordinasi, supervisi, pembinaan, pengendalian dalam aspek BUMD Lembaga Keuangan, BUMD NonLembaga Keuangan dan investasi Daerah yang ditindaklanjuti	Persen	90	90	90	90	90	90	90	90	IKU Sekretariat Daerah



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
163	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	IKU Sekretariat Daerah
164	Nilai Penguatan Organisasi	Nilai	N/A	N/A	2,08	2,22	2,37	2,53	2,70	2,70	IKU Sekretariat Daerah
165	Nilai Penataan Organisasi	Nilai	N/A	N/A	2,22	2,33	2,45	2,57	2,70	2,70	IKU Sekretariat Daerah
166	Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	3,83	N/A	4,1	4,39	4,71	5,04	5,40	5,40	IKU Sekretariat Daerah
167	Nilai Penataan Tata Laksana	Nilai	3,43	N/A	3,62	3,82	4,04	4,26	4,50	4,50	IKU Sekretariat Daerah
168	Kategori akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Jawa Barat	Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	IKU Sekretariat Daerah
169	Nilai Manajemen Perubahan	Nilai	3,51	N/A	3,69	3,88	4,07	4,28	4,50	4,50	IKU Sekretariat Daerah
170	Kualifikasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Kualifikasi	Cukup Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	IKU Sekretariat Daerah
171	Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan	Kualifikasi	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Sekretariat Daerah
172	Persentase Kualitas Layanan Umum, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah lingkup Sekretariat Daerah	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	IKU Sekretariat Daerah



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
173	Tingkat dukungan dan fasilitasi	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	IKU Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
174	Indeks kepuasan masyarakat	Skor	N/A	N/A	3	3,5	4	4	4	4	IKU Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
175	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga, Keprotokolan, Promosi dan Informasi yang terlayani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Badan Penghubung
176	Persentase koordinasi jejaring kerja dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Jawa Barat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Badan Penghubung
177	Persentase fasilitasi promosi dan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan potensi pembangunan Jawa Barat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Badan Penghubung
178	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan Jawa Barat	Persen	80	80	80	85	90	95	100	100	IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
179	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
180	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tinggi	Persen	N/A	N/A	80	80	90	90	90	90	IKU Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
181	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah Tinggi	Persen	N/A	N/A	80	80	80	80	80	80	IKU Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
182	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	56,22	58,08	56,66	57,62	58,57	59,48	60,38	60,38	IKU Badan Pendapatan Daerah
183	Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kualifikasi (1), Kinerja (3), Disiplin (4)	Persen	N/A	48	64,5	66	67,5	68,25	69	69	IKU Badan Kepegawaian Daerah
184	Indeks Sistem Merit	Skor	N/A	268	230,5	333,5	355	377	387,5	387,5	IKU Badan Kepegawaian Daerah
185	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Persen	10	20	30	40	40	40	40	40	IKU Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
186	Persentase PNS Pemprov Jabar yang bersertifikat kompetensi	Persen	70	80	90	100	100	100	100	100	IKU Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
187	Persentase Smart ASN Prov Jabar	Persen	N/A	20	40	60	80	80	80	80	IKU Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
188	Jumlah Akreditasi Pengembangan Kompetensi	Sertifikat	4	5	6	7	8	8	8	8	IKU Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
189	Persentase Kajian Kelitbangan yang Didiseminasikan Kepada Perangkat Daerah atau Stakeholder Lainnya	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
190	Persentase rekomendasi kebijakan daerah yang dihasilkan	Persen	80	100	20	40	60	80	100	100	IKU Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
191	Persentase rencana kelitbangan yang diimplementasikan	Persen	70	70	20	40	60	80	100	100	IKU Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
192	Persentase hasil kelitbangan yang diterapkan	Persen	108,33	100	20	40	60	80	100	100	IKU Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
193	Persentase inovasi berbasis IPTEK yang diterapkan	Persen	93,33	100	20	40	70	90	100	100	IKU Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
194	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kelitbangan	Persen	100	100	20	40	70	90	100	100	IKU Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
195	Persentase Kerjasama Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan IPTEK yang diterapkan	Persen	100	100	20	40	60	80	100	100	IKU Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
196	Persentase dokumen perencanaan, peningkatan kualitas aparatur, sarana prasarana dan dokumen pengelolaan keuangan	Persen	100	100	20	40	70	90	100	100	IKU Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
197	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (EPPD) Provinsi Jawa Barat	Poin	3,176	3,249	3,259	3,275	3,291	3,357	3,424	3,424	IKU Inspektorat
198	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang masuk peringkat 10 besar nasional	Kab/Kota	3	2	4	6	8	10	10	10	IKU Inspektorat
199	Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Nilai	A	A	A	A	A	A	A	A	IKU Inspektorat
200	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang nilai SAKIP-nya adalah \geq BB	Pemerintah Daerah	2	2	5	10	15	20	25	25	IKU Inspektorat



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
201	Opini BPK-RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU Inspektorat
202	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang opini atas LKPD adalah WTP	Kab/Kota	25	N/A	25	26	27	27	27	27	IKU Inspektorat
203	Nilai evaluasi reformasi birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	N/A	71,64	75	81	83	85	87	87	IKU Inspektorat
204	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level	2	3	3	3	3	3	4	4	IKU Inspektorat
205	Nilai Indikator Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Inspektorat
206	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3	3	4	4	IKU Inspektorat
207	Indeks Kerentanan Bencana	Poin	N/A	N/A	2	1,7	1,5	1	0,7	0,7	IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah
208	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa	Poin	N/A	N/A	70,78	71,78	72,78	73,78	74,78	74,78	IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
209	Tingkat Bina Politik dan Demokratisasi	Poin	N/A	N/A	70,78	71,78	72,78	73,78	74,78	74,78	IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II. ASPEK DAYA SAING DAERAH											
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	68,5	68,7	68,6 - 69	69,1 - 69,5	69,6 - 70	70,1 - 70,5	70,6 - 71	70,6 - 71	IKU Pemerintah Daerah
2	Indeks Demokrasi	Poin	68,78	73,91	68,79 - 70,78	70,79 - 71,78	71,79 - 72,78	72,79 - 73,78	73,79 - 74,78	73,79 - 74,78	IKU Pemerintah Daerah
3	Indeks Kebahagiaan	Poin	69,58	70-71	70-71	70-71	71-73,5	71-73,5	73,6-76	73,6-76	IKU Pemerintah Daerah
4	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat	Persen	N/A	N/A	16,63	18,65	20,72	21,83	22,16	22,16	IKU Pemerintah Daerah
5	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	69,58	69,61	70-71	70-71	71-73,5	71-73,5	73,6-76	73,6-76	IKU Pemerintah Daerah
6	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	46,33	49	53,63	56,31	59,13	62,09	65,19	65,19	IKU Pemerintah Daerah
7	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Persen	40,9	40,90-41,00	41 - 43	44 - 46	47 - 49	50 - 52	53 - 55	53 - 55	IKU Pemerintah Daerah
8	Konsumsi listrik per kapita	kWh/ Kapita	1.155	1.231	1.300	1.340	1.386	1.447	1.503	1.503	IKU Pemerintah Daerah
9	Indeks Desa Membangun	Poin	0,64	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69	0,69	IKU Pemerintah Daerah
10	Usulan Pembentukan Daerah Persiapan Otonomi Baru	Usulan	0	0	0	1	1	2	2	6	IKU Pemerintah Daerah
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	51,85 (metode lama)	49,54 (metode baru)	49,76	49,98	50,2	50,42	50,64	50,64	IKU Pemerintah Daerah
12	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	2,02	2,38	2,8	3,92	5,87	7,11	7,72	7,72	IKU Pemerintah Daerah
13	Indeks Penggunaan Air	Persen	N/A	N/A	1,1923	1,191	1,1834	1,1822	1,1811	1,1811	IKU Pemerintah Daerah



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin	166	166	165	164	163	162	161	161	IKU Pemerintah Daerah
15	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	108,39	110,9	113,11	115,36	117,65	120	122,38	122,38	IKU Pemerintah Daerah
16	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	BB	BB	BB	A	A	A	A	A	IKU Pemerintah Daerah
17	Tingkat Efektivitas Kerjasama Daerah	Persen	N/A	N/A	50	60	70	80	90	90	IKU Pemerintah Daerah

Sumber: Hasil proyeksi, 2019



Tabel 8.4
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/Outcome
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
III. ASPEK PELAYANAN UMUM											
I.	Pendidikan										
1	Rasio Siswa Per-Sekolah SMA	Rasio	425	419	720	720	720	720	720	720	Dinas Pendidikan
2	Rasio Siswa Per-Kelas SMA	Rasio	35	34	36	36	36	36	36	36	Dinas Pendidikan
3	Persentase SMA dengan Akreditasi B	Persen	50	53	56,5	56,5	61	65	70	70	Dinas Pendidikan
4	Angka Kelulusan SMA	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
5	Rasio Siswa Per-Sekolah SMK	Persen	366	351	2520	2520	2520	2520	2520	2520	Dinas Pendidikan
6	Rasio Siswa Per-Kelas SMK	Rasio	36,8	36,2	36	36	36	36	36	36	Dinas Pendidikan
7	Persentase SMK dengan Akreditasi B	Persen	30	35	20	20	20	20	20	20	Dinas Pendidikan
8	Angka Kelulusan SMK	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
9	Persentase lulusan SMK tersertifikasi	Persen	30	35	15	20	25	30	35	35	Dinas Pendidikan
10	Rasio siswa per sekolah SLB	Rasio	57,78	58,48	SDLB-SMPLB 45-SMPLB/SMA LB 48	SDLB-SMPLB 45-SMPLB/SMA LB 48	SDLB-SMPLB 45-SMPLB/SMA LB 48	SDLB-SMPLB 45-SMPLB/SMA LB 48	SDLB-SMPLB 45-SMPLB/SMA LB 48	SDLB-SMPLB 45-SMPLB/SMA LB 48	Dinas Pendidikan
11	Rasio siswa per kelas SLB	Rasio	62,25	6,99	SDLB/SMPLB (9)-SMPLB/SMA LB (6)	SDLB/SMPLB (9)-SMPLB/SMA LB (6)	SDLB/SMPLB (9)-SMPLB/SMA LB (6)	SDLB/SMPLB (9)-SMPLB/SMA LB (6)	SDLB/SMPLB (9)-SMPLB/SMA LB (6)	SDLB/SMPLB (9)-SMPLB/SMA LB (6)	Dinas Pendidikan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	Persentase SLB terakreditasi minimal B	Persen	44,50	47,02	51,06	56,38	61,7	67,02	72,34	72,34	Dinas Pendidikan
13	Angka Kelulusan SLB	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
14	Jumlah Siswa Pendidikan dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)	Persen	N/A	13,88	17	25	32	40	48	48	Dinas Pendidikan
15	Persentase Guru yang memiliki sertifikat Pendidik	Persen	20	23	20	30	50	70	80	80	Dinas Pendidikan
16	Persentase Kepala Sekolah yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Persen	90	90	20	30	50	70	80	80	Dinas Pendidikan
17	Persentase Pengawas yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Persen	100	100	20	30	50	70	80	80	Dinas Pendidikan
18	Persentase Siswa Penerima Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS) SD/SMP/SMA/SMK/SLB/Nege ri Swasta	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
19	Persentase Sekolah dan Siswa SMA/SMK/SLB yang terlayani dalam BOS	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
20	Persentase sekolah menengah sederajat yang memanfaatkan fasilitas digital di UPTD Tikomdik	Persen	N/A	N/A	22	24	26	28	30	30	Dinas Pendidikan
21	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Rasio	N/A	N/A	720/2250/1 45	720/2250/1 46	720/2250/1 47	720/2250/1 48	720/2250/1 49	720/2250/1 49	Dinas Pendidikan
22	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Rasio	N/A	N/A	36/8	36/9	36/10	36/11	36/12	36/12	Dinas Pendidikan
23	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Persen	N/A	N/A	50/20	56.5/22	61/26	65/28	70/30	70/30	Dinas Pendidikan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
24	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
25	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	Rasio	N/A	N/A	720/2250/1 45	720/2250/1 46	720/2250/1 47	720/2250/1 48	720/2250/1 49	720/2250/1 49	Dinas Pendidikan
26	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	Rasio	N/A	N/A	36/8	36/9	36/10	36/11	36/12	36/12	Dinas Pendidikan
27	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	Persen	N/A	N/A	50/20	56.5/22	61/26	65/28	70/30	70/30	Dinas Pendidikan
28	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
29	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Rasio	N/A	N/A	720/2250/1 45	720/2250/1 46	720/2250/1 47	720/2250/1 48	720/2250/1 49	720/2250/1 49	Dinas Pendidikan
30	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Rasio	N/A	N/A	36/8	36/9	36/10	36/11	36/12	36/12	Dinas Pendidikan
31	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Persen	N/A	N/A	50/20	56.5/22	61/26	65/28	70/30	70/30	Dinas Pendidikan
32	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
33	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	Rasio	N/A	N/A	720/2250/1 45	720/2250/1 46	720/2250/1 47	720/2250/1 48	720/2250/1 49	720/2250/1 49	Dinas Pendidikan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
34	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	Rasio	N/A	N/A	36/8	36/9	36/10	36/11	36/12	36/12	Dinas Pendidikan
35	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	Persen	N/A	N/A	50/20	56.5/22	61/26	65/28	70/30	70/30	Dinas Pendidikan
36	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
37	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	Rasio	N/A	N/A	720/2250/1 45	720/2250/1 46	720/2250/1 47	720/2250/1 48	720/2250/1 49	720/2250/1 49	Dinas Pendidikan
38	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	Rasio	N/A	N/A	36/8	36/9	36/10	36/11	36/12	36/12	Dinas Pendidikan
39	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	Persen	N/A	N/A	50/20	56.5/22	61/26	65/28	70/30	70/30	Dinas Pendidikan
40	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
41	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	Rasio	N/A	N/A	720/2250/1 45	720/2250/1 46	720/2250/1 47	720/2250/1 48	720/2250/1 49	720/2250/1 49	Dinas Pendidikan
42	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	Rasio	N/A	N/A	36/8	36/9	36/10	36/11	36/12	36/12	Dinas Pendidikan
43	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	Persen	N/A	N/A	50/20	56.5/22	61/26	65/28	70/30	70/30	Dinas Pendidikan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
44	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
45	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	Rasio	N/A	N/A	720/2250/1 45	720/2250/1 46	720/2250/1 47	720/2250/1 48	720/2250/1 49	720/2250/1 49	Dinas Pendidikan
46	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	Rasio	N/A	N/A	36/8	36/9	36/10	36/11	36/12	36/12	Dinas Pendidikan
47	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	Persen	N/A	N/A	50/20	56.5/22	61/26	65/28	70/30	70/30	Dinas Pendidikan
48	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
49	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	Rasio	N/A	N/A	720/2250/1 45	720/2250/1 46	720/2250/1 47	720/2250/1 48	720/2250/1 49	720/2250/1 49	Dinas Pendidikan
50	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	Rasio	N/A	N/A	36/8	36/9	36/10	36/11	36/12	36/12	Dinas Pendidikan
51	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	Persen	N/A	N/A	50/20	56.5/22	61/26	65/28	70/30	70/30	Dinas Pendidikan
52	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
53	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	Rasio	N/A	N/A	720/2250/1 45	720/2250/1 46	720/2250/1 47	720/2250/1 48	720/2250/1 49	720/2250/1 49	Dinas Pendidikan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
54	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	Rasio	N/A	N/A	36/8	36/9	36/10	36/11	36/12	36/12	Dinas Pendidikan
55	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	Persen	N/A	N/A	50/20	56.5/22	61/26	65/28	70/30	70/30	Dinas Pendidikan
56	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
57	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	Rasio	N/A	N/A	720/2250/1 45	720/2250/1 46	720/2250/1 47	720/2250/1 48	720/2250/1 49	720/2250/1 49	Dinas Pendidikan
58	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	Rasio	N/A	N/A	36/8	36/9	36/10	36/11	36/12	36/12	Dinas Pendidikan
59	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	Persen	N/A	N/A	50/20	56.5/22	61/26	65/28	70/30	70/30	Dinas Pendidikan
60	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
61	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	Rasio	N/A	N/A	720/2250/1 45	720/2250/1 46	720/2250/1 47	720/2250/1 48	720/2250/1 49	720/2250/1 49	Dinas Pendidikan
62	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	Rasio	N/A	N/A	36/8	36/9	36/10	36/11	36/12	36/12	Dinas Pendidikan
63	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	Persen	N/A	N/A	50/20	56.5/22	61/26	65/28	70/30	70/30	Dinas Pendidikan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
64	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
65	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	Rasio	N/A	N/A	720/2250/1 45	720/2250/1 46	720/2250/1 47	720/2250/1 48	720/2250/1 49	720/2250/1 49	Dinas Pendidikan
66	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	Rasio	N/A	N/A	36/8	36/9	36/10	36/11	36/12	36/12	Dinas Pendidikan
67	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	Persen	N/A	N/A	50/20	56.5/22	61/26	65/28	70/30	70/30	Dinas Pendidikan
68	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
69	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	Rasio	N/A	N/A	720/2250/1 45	720/2250/1 46	720/2250/1 47	720/2250/1 48	720/2250/1 49	720/2250/1 49	Dinas Pendidikan
70	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	Rasio	N/A	N/A	36/8	36/9	36/10	36/11	36/12	36/12	Dinas Pendidikan
71	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	Persen	N/A	N/A	50/20	56.5/22	61/26	65/28	70/30	70/30	Dinas Pendidikan
72	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
II. Kesehatan											
1	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Persentase Persalinan	Jumlah	17	17	17	19	21	24	27	27	Dinas Kesehatan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal 88%										
2	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Pemberian Tablet Tambah Darah Pada Bumil Minimal 95%	Persen	17	17	17	19	21	24	27	27	Dinas Kesehatan
3	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Rumah Tangga Yang Akses Terhadap Air Minum Yang Berkualitas	Persen	80	80	80	85	90	90	100	100	Dinas Kesehatan
4	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Rumah Tangga Yang Akses Terhadap Jamban Sehat	Persen	75	75	75	80	85	90	95	95	Dinas Kesehatan
5	Persentase Kabupaten/Kota Yang Puskesmas Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar	Persen	55	55	55	60	65	70	75	75	Dinas Kesehatan
6	Persentase Kabupaten/Kota Yang Puskesmas Menyelenggarakan Kesehatan Olah Raga Pada Kelompok Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Persen	55	55	55	60	65	70	75	75	Dinas Kesehatan
7	Jumlah Unsur Masyarakat Tingkat Provinsi Yang Dilibatkan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah	4	4	4	4	4	4	4	4	Dinas Kesehatan
8	Angka Keberhasilan Pengobatan Tb (Treatment Succes Rate)	Persen	90	90	90	90	90	90	90	90	Dinas Kesehatan
9	Persentase Pasien HIV Yg Di Obati	Persen	60	60	60	65	70	75	80	80	Dinas Kesehatan
10	Persentase Desa/Kelurahan Yang Mencapai Uci >90%	Persen	90	90	90	90,5	91	91,5	92	92	Dinas Kesehatan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Persentase Kab/Kota Yg 50 % Puskesmas Melaksanakan Tatalaksana Pneumonia Balita Sesuai Standar	Persen	60	60	60	60	60	65	65	65	Dinas Kesehatan
12	Persentase Kab/Kota Yang Melakukan Deteksi Dini Hepatitis B Pada Ibu Hamil	Persen	70	70	70	80	90	100	100	100	Dinas Kesehatan
13	Persentase Kab/Kota Yang Mencapai Ir Dbd < 49/100.000 Pddk	Persen	68	68	68	70	72	74	76	76	Dinas Kesehatan
14	Persentase Kab/Kota Yang Sudah Eliminasi Malaria	Persen	89	89	89	89	93	93	93	93	Dinas Kesehatan
15	Proporsi Cacat Kusta Tk li	Persen	10	10	10	10	9	9	9	9	Dinas Kesehatan
16	Proporsi Kab/Kota Yang Mencapai Eliminasi Filariasis	Persen	27	27	27	45	54	73	73	73	Dinas Kesehatan
17	Persentase Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies Ditatalaksana Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
18	Prevalensi Hipertensi	Persen	60	60	60	60	60	60	60	60	Dinas Kesehatan
19	Persentasi Penduduk Yang Mengalami Gangguan Jiwa Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
20	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di RS Paru	Persen	75	75	75	76	77	78	79	79	Dinas Kesehatan
21	Persentase Kegiatan Rapid Health Assesment	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
22	Persentase Masyarakat Yang Dilayani Dilokasi Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
23	Persentase Puskesmas Siap Akreditasi	Persen	95	95	95	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
24	Persentase Kab/Kota Memiliki Laboratorium Kesehatan Terakreditasi	Persen	19	19	19	30	40	50	60	60	Dinas Kesehatan
25	Persentase Kabupaten Kota Puskesmas Sesuai Standar	Persen	82	82	82	86	91	96	100	100	Dinas Kesehatan
26	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Minimal 50 % Puskesmas Menyelenggarakan Kesehatan Tradisional	Persen	64	64	64	72	80	88	96	96	Dinas Kesehatan
27	Persentase Kab/Kota yg mempunyai 80% Rumah Sakit dengan pencapaian SPM	Persen	19	19	19	33	48	63	78	78	Dinas Kesehatan
28	Persentase Rumah Sakit Regional yg memenuhi standar	Persen	38	38	38	50	63	75	88	88	Dinas Kesehatan
29	Persentase Rumah Sakit Siap Akreditasi	Persen	60	60	60	70	80	90	100	100	Dinas Kesehatan
30	Persentase Rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
31	Jumlah Kab/Kota Yang Melaksanakan Kerjasama Dengan Provinsi Terkait LAYAD Rawat	Jumlah	8	8	8	13	18	23	27	27	Dinas Kesehatan
32	Jumlah Penambahan Parameter Pemeriksaan Yang Diakreditasi	Jumlah	68	68	68	70	72	74	76	76	Dinas Kesehatan
33	Persentase Kepuasan Pelanggan	Persen	55	55	55	60	65	70	75	75	Dinas Kesehatan
34	Jumlah Penambahan Parameter Pemeriksaan Baru	Jumlah	239	239	239	241	243	245	247	247	Dinas Kesehatan
35	Persentase Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan Melalui Pelatihan	Persen	8,31	8,31	8,31	11,64	15	16,21	16,63	16,63	Dinas Kesehatan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
36	Nilai Komponen Yang Sesuai Dengan Pembobotan	Nilai	3	3	3	≥ 3,5	≥ 3,5	≥ 3,5	≥ 3,5	≥ 3,5	Dinas Kesehatan
37	Persentase Ketersediaan Obat Esensial	Persen	90	90	90	91	92	93	95	95	Dinas Kesehatan
38	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Melaksanakan Perencanaan Dan Pengelolaan Mutu Tenaga Kesehatan	Persen	70	70	70	75	80	85	90	90	Dinas Kesehatan
39	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Prioritas Terisi Tenaga Kesehatan	Persen	65	65	65	70	70	70	70	70	Dinas Kesehatan
40	Persentase Tenaga Kesehatan Mengikuti Pemilihan Tenaga Kesehatan Puskesmas Teladan	Persen	70	70	70	75	80	85	90	90	Dinas Kesehatan
41	Persentase Penduduk Yang Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan	Persen	85	85	85	90	95	95	95	95	Dinas Kesehatan
42	Persentase Kab/Kota Yang Mendapatkan Pembiayaan Kesehatan	Persen	40	40	40	40	40	40	40	40	Dinas Kesehatan
43	Persentase Dokumen Berita Acara Yang Dibuat	Persen	85	85	85	90	95	95	100	100	Dinas Kesehatan
44	Indek Kepuasan Masyarakat Di RS Al Ihsan	Persen	76,82	76,82	76,82	77,84	78,87	79,89	80,91	80,91	Dinas Kesehatan
45	Indek Kepuasan Masyarakat Di RS Jiwa	Persen	75	75	75	80	85	90	90	90	Dinas Kesehatan
46	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	75,9	75,9	75,9	76,15	76,62	76,80	77	77	Dinas Kesehatan
47	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	75	75	75	76	77	78	79	79	Dinas Kesehatan
48	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	65	65	65	70	75	80	85	85	Dinas Kesehatan
49	Persentase Regulasi Bidang Kesehatan Yang Diusulkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Oleh Dinas Kesehatan Prov Jawa Barat										
50	Jumlah Dinas Kesehatan Kab/Kota Yang Dilakukan Pembinaan Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Jumlah	27	27	27	27	27	27	27	27	Dinas Kesehatan
III.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1	Persentase peningkatan aksesibilitas menuju sentra- sentra ekonomi dan kawasan potensial Di Wilayah Pelayanan I	Persen	88,89	89,01	89,97	90,17	90,37	90,57	90,72	90,72	Dinas Bina Marga
2	Persentase peningkatan aksesibilitas menuju sentra- sentra ekonomi dan kawasan potensial Di Wilayah Pelayanan II	Persen	78,1	79,68	79,68	80,08	80,54	81,06	81,65	81,65	Dinas Bina Marga
3	Persentase Peningkatan Aksesibilitas Menuju Sentra- Sentra Ekonomi Dan Kawasan Potensial Di Wilayah Pelayanan III	Persen	92,275	92,275	92,28	92,36	92,41	92,46	92,52	92,52	Dinas Bina Marga
4	Persentase Peningkatan Aksesibilitas Menuju Sentra- Sentra Ekonomi Dan Kawasan Potensial Di Wilayah Pelayanan IV	Persen	82,2	82,2	82,60	82,88	83,22	83,61	84,06	84,06	Dinas Bina Marga
5	Persentase Peningkatan Aksesibilitas Menuju Sentra- Sentra Ekonomi Dan Kawasan	Persen	94,66	94,66	94,66	94,83	95,01	95,09	95,13	95,13	Dinas Bina Marga



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Potensial Di Wilayah Pelayanan V										
6	Persentase Peningkatan Aksesibilitas Menuju Sentra-Sentra Ekonomi Dan Kawasan Potensial Di Wilayah Pelayanan Vi	Persen	92,8	93,2	93,80	93,92	93,99	94,07	94,15	94,15	Dinas Bina Marga
7	Tingkat kemantapan jalan di Wilayah Pelayanan I	Persen	88,72	89,60	90,72	95,13	99,22	99,97	100,00	100,00	Dinas Bina Marga
8	Tingkat kemantapan jalan di Wilayah Pelayanan II	Persen	83,62	84,50	86,90	93,13	98,89	99,95	100,00	100,00	Dinas Bina Marga
9	Tingkat kemantapan jalan di Wilayah Pelayanan III	Persen	93,23	94,10	95,09	97,43	99,59	99,98	100,00	100,00	Dinas Bina Marga
10	Tingkat kemantapan jalan di Wilayah Pelayanan IV	Persen	87,37	88,23	89,27	94,37	99,09	99,96	100,00	100,00	Dinas Bina Marga
11	Tingkat kemantapan jalan di Wilayah Pelayanan V	Persen	88,92	89,80	91,29	95,43	99,26	99,97	100,00	100,00	Dinas Bina Marga
12	Tingkat kemantapan jalan di Wilayah Pelayanan VI	Persen	94,69	95,57	93,60	96,67	99,46	99,98	100,00	100,00	Dinas Bina Marga
13	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan teknis yang siap bangun	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Bina Marga
14	Persentase ketersediaan data teknis untuk pengelolaan jalan	Persen	9,12	10,12	13,95	35,46	56,97	78,48	100	100	Dinas Bina Marga
15	Persentase pengawasan teknis pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Bina Marga
16	Persentase monitoring pelaksanaan pengelolaan jalan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Bina Marga
17	Persentase kelengkapan peralatan pemeliharaan jalan	Persen	52	52	53	58	64	69	74	74	Dinas Bina Marga
18	Persentase sumber daya konstruksi yang terlatih	Persen	N/A	N/A	20	40	60	80	100	100	Dinas Bina Marga



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
19	Tingkat capaian pembangunan sarana ibadah	Persen	0	60	70	100	0	0	0	100	Dinas Bina Marga
20	Persentase ketersediaan rencana tata ruang	Persen	N/A	16	17	32	55	72	90	90	Dinas Bina Marga
21	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang diberikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Bina Marga
22	Persentase permohonan rekomendasi gubernur yang diproses terhadap rancangan perda rencana tata ruang kabupaten/kota.	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Bina Marga
23	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penataan ruang	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Bina Marga
24	Persentase penerapan perencanaan teknis sumber daya air	Persen	N/A	N/A	15	25	40	60	80	80	Dinas Sumber Daya Air
25	Persentase Hasil Kerja Kontruksi Sumber Daya Air Yang Sesuai Standar (Alternatif 2)	Persen	N/A	N/A	33,33	34,17	35,02	35,90	36,79	36,79	Dinas Sumber Daya Air
26	Persentase sumber air yang dikelola dengan baik	Persen	N/A	N/A	28,60	28,69	28,77	28,86	28,94	28,94	Dinas Sumber Daya Air
27	Tingkat kepatuhan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya air	Persen	N/A	N/A	74,36	74,94	75,52	76,11	76,69	76,69	Dinas Sumber Daya Air
28	Kapasitas Tampung Sumber Air di WS. Ciliwung-Cisadane	m3	N/A	N/A	16.311.255	17.126.818	17.983.159	18.882.317	19.826.432	19.826.432	Dinas Sumber Daya Air
29	Persentase Sungai dan atau Drainase Utama yang Terpelihara pada WS.Ciliwung-Cisadane	Persen	N/A	N/A	45,00	46,00	47,00	48,00	49,00	49,00	Dinas Sumber Daya Air



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
30	Kapasitas Tampung Sumber Air di WS. Cisadea-Cibareno	m3	N/A	N/A	1.504.128	1.510.128	1.516.128	1.522.128	1.528.128	1.528.128	Dinas Sumber Daya Air
31	Persentase Panjang sungai yang dapat dilakukan pengendalian dan penataan di WS. Cisadea-Cibareno	Persen	N/A	N/A	0,003	0,06	0,09	0,12	0,15	0,15	Dinas Sumber Daya Air
32	Persentase Titik pantai yang dapat dilakukan pengamanan dan penataan di WS. Cisadea-Cibareno	Persen	N/A	N/A	N/A	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	Dinas Sumber Daya Air
33	Kapasitas Tampung Sumber Air di WS. Citarum	m3	N/A	N/A	6.542.000	6.598.490	6.604.490	6.610.490	6.616.490	6.616.490	Dinas Sumber Daya Air
34	Persentase Sungai dan atau Drainase Utama yang Terpelihara pada WS.Citarum	Persen	N/A	N/A	20,00	20,00	22,50	24,50	26,50	26,50	Dinas Sumber Daya Air
35	Kapasitas Tampung Sumber Air di WS. Cimanuk-Cisanggarung	m3	N/A	N/A	189.845.890	189.865.890	189.871.890	189.877.890	189.883.890	189.883.890	Dinas Sumber Daya Air
36	Persentase Sungai dan atau Drainase Utama yang Terpelihara pada WS.Cimanuk-Cisanggarung	Persen	N/A	N/A	7,14	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	Dinas Sumber Daya Air
37	Kapasitas Tampung Sumber Air di WS. Citanduy	m3	N/A	N/A	3.327.000	3.333.000	3.339.000	3.345.000	3.351.000	3.351.000	Dinas Sumber Daya Air
38	Persentase Sungai dan atau Drainase Utama yang Terpelihara pada WS.Citanduy	Persen	N/A	N/A	11,11	11,11	11,11	22,22	22,22	22,22	Dinas Sumber Daya Air
39	Kapasitas Tampung Sumber Air di WS. Ciwulan-Cilaki	m3	N/A	N/A	1.034.510	1.040.510	1.046.510	1.052.510	1.058.510	1.058.510	Dinas Sumber Daya Air



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
40	Persentase Panjang sungai yang dapat dilakukan pengendalian dan penataan di WS. Ciwulan-Cilaki	Persen	N/A	N/A	0,001	0,005	0,011	0,016	0,021	0,021	Dinas Sumber Daya Air
41	Persentase Titik pantai yang dapat dilakukan pengamanan dan penataan di WS. Ciwulan-Cilaki	Persen	N/A	N/A	N/A	7,69	15,38	23,08	30,77	30,77	Dinas Sumber Daya Air
42	Tingkat pelayanan informasi publik sumber daya air	Persen	N/A	N/A	43,75	56,25	62,50	68,75	75,00	75,00	Dinas Sumber Daya Air
43	Persentase rencana pengembangan air baku yang diterapkan	Persen	N/A	N/A	3,00	5,00	7,50	10,00	12,50	12,50	Dinas Sumber Daya Air
44	Kapasitas tampung air baku di WS. Ciliwung-Cisadane	m3	N/A	N/A	N/A	3.000	6.000	9.000	12.000	12.000	Dinas Sumber Daya Air
45	Kapasitas tampung air baku di WS. Cisadea-Cibareno	m3	N/A	N/A	N/A	3.000	6.000	9.000	12.000	12.000	Dinas Sumber Daya Air
46	Kapasitas tampung air baku di WS. Citarum	m3	N/A	N/A	N/A	3.000	6.000	9.000	12.000	12.000	Dinas Sumber Daya Air
47	Kapasitas tampung air baku di WS. Cimanuk-Cisanggarung	m3	N/A	N/A	N/A						Dinas Sumber Daya Air
48	Kapasitas tampung air baku di WS. Citanduy	m3	N/A	N/A	N/A	3.000	6.000	9.000	12.000	12.000	Dinas Sumber Daya Air
49	Kapasitas tampung air baku di WS. Ciwulan-Cilaki	m3	N/A	N/A	N/A	3.000	6.000	9.000	12.000	12.000	Dinas Sumber Daya Air



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
50	Persentase penerapan perencanaan teknis irigasi	Persen	N/A	N/A	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00	Dinas Sumber Daya Air
51	Persentase hasil kerja kontruksi irigasi yang sesuai standar	Persen	N/A	N/A	33,33	34,17	35,02	35,90	36,79	36,79	Dinas Sumber Daya Air
52	Persentase daerah irigasi yang dikelola dengan baik	Persen	N/A	N/A	10,99	11,26	11,54	11,83	12,13	12,13	Dinas Sumber Daya Air
53	Persentase daerah irigasi tambak yang dikelola dengan baik	Persen	N/A	N/A	N/A	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	Dinas Sumber Daya Air
54	Persentase kondisi baik jaringan irigasi pada WS.Ciliwung-Cisadane	Persen	65,96	67,47	65,96	66,06	66,16	66,26	66,36	66,36	Dinas Sumber Daya Air
55	Persentase kondisi baik jaringan irigasi pada WS. Citarum	Persen	67,65	68,96	67,76	67,86	67,96	68,06	68,16	68,16	Dinas Sumber Daya Air
56	Persentase kondisi baik jaringan irigasi pada WS. Cimanuk-Cisanggarung	Persen	78,86	77,46	78,86	78,96	79,06	79,16	79,26	79,26	Dinas Sumber Daya Air
57	Persentase kondisi baik jaringan irigasi pada WS. Citanduy	Persen	77,08	77,22	77,22	77,32	77,42	77,52	77,62	77,62	Dinas Sumber Daya Air
58	Persentase kondisi baik jaringan irigasi pada WS. Ciwulan - Cilaki	Persen	73,03	75,39	74,39	74,49	74,59	74,69	74,79	74,79	Dinas Sumber Daya Air
59	Persentase kondisi baik jaringan irigasi pada WS. Cisadea-Cibareno	Persen	81,2	80,68	80,01	80,11	80,21	80,31	80,41	80,41	Dinas Sumber Daya Air
60	Tingkat kinerja Komisi Irigasi provinsi	Poin	N/A	N/A	75,00	76,00	78,00	79,00	80,00	80,00	Dinas Sumber Daya Air



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
61	Persentase rekomendasi kelembagaan sumber daya air yang diterapkan	Persen	N/A	N/A	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	Dinas Sumber Daya Air
62	Persentase kejadian daya rusak air yang ditangani	Persen	N/A	N/A	5,00	6,00	7,50	8,00	10,00	10,00	Dinas Sumber Daya Air
63	Persentase kejadian daya rusak air yang ditangani pada WS. Cisadea-Cibareno	Persen	N/A	N/A	N/A	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	Dinas Sumber Daya Air
64	Persentase kejadian daya rusak air yang ditangani pada WS. Ciwulan-Cilaki	Persen	N/A	N/A	N/A	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	Dinas Sumber Daya Air
IV.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
1	Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	Persen	67,01	70,74	70,67	73,33	76	78,6	81,33	81,33	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	Cakupan Pelayanan Penanganan Persampahan	Persen	67,11	67,87	69	71	73	75	77	77	Dinas Perumahan dan Permukiman
3	Cakupan Pengurangan Sampah	Persen	N/A	N/A	3,49	5,9	8,31	10,72	13,13	13,13	Dinas Perumahan dan Permukiman
4	Cakupan Pelayanan Air Minum	Persen	73,17	76,85	78	80	82	84	86	86	Dinas Perumahan dan Permukiman
5	Pengurangan Luasan Genangan Di Permukiman	Persen	N/A	N/A	85	70	55	40	25	25	Dinas Perumahan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											dan Permukiman
6	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Persen	76,91	71,91	66,91	62	57	52	47	47	Dinas Perumahan dan Permukiman
7	Persentase Prasarana dan Sarana yang dibangun dan dikembangkan	Persen	45	50	31,73	22,11	24,03	16,34	5,79	5,79	Dinas Perumahan dan Permukiman
8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan UPTD P3JB (Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat)	Persen	80,65	80,95	80	80	80	80	80	80	Dinas Perumahan dan Permukiman
9	Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni	Persen	93,04	98,46	98,77	98,08	99,38	99,69	100	100	Dinas Perumahan dan Permukiman
10	Penyediaan Rumah Layak Huni	Persen	91,02	91,32	91,63	91,41	92,25	92,57	92,88	92,88	Dinas Perumahan dan Permukiman
11	Persentase Penanganan Hunian Rumah untuk Pendukung Pelaksanaan Program Pemerintah dan Pasca Bencana	Persen	3,7	3,7	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Permukiman
12	Persentase Layanan Pembinaan Teknis Bangunan Gedung dan Rumah Negara	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Permukiman



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
V.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat										
1	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persen	62	83,5	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
3	Tingkat Kesiapsiagaan penanganan bencana oleh Satlinmas	Persen	0,23	0,26	0,9	1,69	2,37	2,97	3,49	3,49	Satuan Polisi Pamong Praja
4	Persentase Satpol PP dan PPNS yang terdidik dan berkompeten	Persen	4,1	4,8	15	30	50	75	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
5	Pelayanan kedaruratan dan logistik untuk Kab/Kota di Jawa Barat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah
6	Nilai Indeks Kapasitas Kab/Kota di Jawa Barat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah
7	Kapasitas SDM dan perkuatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah
8	Persentase pulihnya kehidupan dan Penghidupan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah
9	Tingkat Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Poin	70,78	70,78	70,78	72	73	74	75	75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Tingkat Ketahanan Lingkungan Strategis Daerah	Poin	70,78	70,78	70,78	71,78	72,78	73,78	74,78	74,78	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11	Kualitas Pembangunan Politik Dalam Negeri	Poin	70,78	70,78	70,78	71,78	72,78	73,78	74,78	74,78	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12	Tingkat Kualitas Kewaspadaan Daerah	Poin	70,78	70,78	70,78	71,78	72,78	73,78	74,78	74,78	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
VI.	Sosial										
1	Persentase PMKS yang direhabilitasi (diluar katagori PMKS di UPTD)	Persen	59,81	59,81	59,81	60,00	60,19	60,38	60,57	60,57	Dinas Sosial
2	Persentase ABH yang di rehab di PSRABH Cileungsi Bogor dan satpel	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
3	persentase wanita tuna susila yang di rehabilitasi sosial di UPTD PSRTS dan satpel - RTM selama 6 bulan	Persen	300	300	300	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
4	persentase remaja yang mendapat pemberdayaan sosial di UPTD dan satpel	Persen	300	300	360	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
5	Persentase penyandang disabilitas yang direhabilitasi di UPTD PSRPD Cibabat Cimahi	Persen	300	300	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
6	Persentase lanjut usia di dalam balai yang mendapat perlindungan sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Persentase PMKS yg mendapat rehabilitasi sosial di PRSBK dan satpel - RTM	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
8	Persentase anak membutuhkan perlindungan khusus yang mendapat rehabilitasi sosial di UPTD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
9	Persentase Keluarga miskin dan Kelompok Rentan yang Meningkatkan Produktifitas Sosial Ekonominya	Persen	0,10	0,10	0,10	0,015	0,018	0,020	0,13	0,13	Dinas Sosial
10	Persentase Keluarga miskin dan Kelompok Rentan yang Meningkatkan Produktifitas Sosial Ekonominya	Persen	0,10	0,10	0,10	0,015	0,018	0,020	0,13	0,13	Dinas Sosial
11	Persentase PMKS yang mendapat Jaminan Sosial	Persen	0,10	0,10	0,10	0,015	0,018	0,020	0,13	0,13	Dinas Sosial
12	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	40	40	40	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	Dinas Sosial
13	Persentase PSKS yang Berdaya/Persentase PMKS yang Pulih Fungsi Sosialnya	Persen			40	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	Dinas Sosial
14	Persentase pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan dan restorasi sosial	Persen	40	40	40	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	Dinas Sosial
15	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	40	40	40	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	Dinas Sosial



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
VII.	Tenaga Kerja										
1	Persentase Tenaga Kerja yang Tersertifikasi	Persen	N/A	N/A	0,20	0,22	0,24	0,26	0,29	0,29	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerja mandiri	Persen	N/A	N/A	0,07	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan pekerja migran	Persen	N/A	N/A	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	N/A	N/A	0,05	0,05	0,05	0,06	0,07	0,07	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5	Persentase pencari kerja terdaftar yang Bekerja	Persen	N/A	N/A	61,90	68,08	74,89	82,38	90,62	90,62	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6	Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial antara Pekerja dengan Perusahaan	Persen	N/A	N/A	5	10	15	20	25	25	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7	Persentase perusahaan yang diperiksa norma ketenagakerjaan	Persen	N/A	N/A	20	20	20	20	20	20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8	Persentase perusahaan yang diperiksa norma ketenagakerjaan Wilayah I	Persen	N/A	N/A	16,11	16,11	16,11	16,11	16,11	16,11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9	Persentase perusahaan yang diperiksa norma ketenagakerjaan Wilayah II	Persen	N/A	N/A	28,21	28,21	28,21	28,21	28,21	28,21	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Persentase perusahaan yang diperiksa norma ketenagakerjaan Wilayah III	Persen	N/A	N/A	36,54	36,54	36,54	36,54	36,54	36,54	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11	Persentase perusahaan yang diperiksa norma ketenagakerjaan Wilayah IV	Persen	N/A	N/A	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12	Persentase perusahaan yang diperiksa norma ketenagakerjaan Wilayah V	Persen	N/A	N/A	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
VIII. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak											
1	Cakupan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah provinsi	Persen	1,40	2,81	8,5	23,7	36	59	75	75	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	Cakupan pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) tingkat provinsi	Persen	2	4	5	7	9	11	13	13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi (Ked) Yang Mendapat Penanganan Pengaduan Oleh Tenaga Terlatih Unit Pelayanan Terpadu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
4	Cakupan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi (Ked) Yang Mendapat Penanganan Pengaduan Oleh Tenaga Terlatih Unit Pelayanan Terpadu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
5	Cakupan Anak Berhadapan Dengan Hukum Yang Berhasil Dibina	Persen	30	35	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
6	Cakupan Organisasi Perempuan Yang Mendapat Pembinaan	Persen	30	35	40	45	60	80	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Cakupan ketersediaan data terpilah yang up to date pada 27 kabupaten/kota di Jawa Barat	Persen	20	25	29	44	66	74	100	100	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
8	Cakupan pembinaan Pengarusutamaan Gender ke kabupaten kota	Persen	20	25	35	45	60	75	100	100	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
9	Cakupan Kelompok Pekka Yang Mendapat Program Pembinaan Program Pekka	Persen	20	30	40	45	60	80	100	100	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
10	Cakupan Kepala Keluarga Yang Mendapat Pembinaan Program P2Wkss	Persen	20	30	40	45	60	80	100	100	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
IX.	Pangan										
1	Penurunan konsumsi Beras	Persen	83,93	83,93	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pernakan
2	Peningkatan konsumsi Pangan hewani	gr/kap/h r	116	116	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,0	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pernakan
3	Peningkatan konsumsi Sayur dan buah	gr/kap/h r	202, 74	202, 74	205	208	210	215	220	220	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pernakan
4	Peningkatan konsumsi Umbi- umbian	gr/kap/h r	48,99	48,99	49,5	53	55	58	60	60	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pernakan
5	Persentase Dewan Ketahanan Pangan kab/kota yang dibentuk dan dibina	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pernakan
6	Keamanan pangan segar	Persen	N/A	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pernakan
7	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang diawasi	Persen	25 PSAT	113 PSAT	84	86	88	90	92	92	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pernakan
8	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang diregistrasi	Persen	54 buah sertifikat	98 buah sertifikat	10	10	10	10	10	10	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pernakan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persen	70,44	80,65	82,0	82,1	82,2	82,3	82,4	82,4	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
10	Rasio komposisi PPH ketersediaan terhadap PPH konsumsi:										Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	- Padi-padian	point	36,5	35,2	≥ 25	≥ 25	≥ 25	≥ 25	≥ 25	≥ 25	
	- Umbi-Umbian	point	2,8	2,9	≥ 2,5	≥ 2,5	≥ 2,5	≥ 2,5	≥ 2,5	≥ 2,5	
	- Pangan Hewani	point	17,1	16,3	17,0	17,5	18,0	18,5	19,0	19,0	
	- Minyak dan Lemak	point	1,1	4,5	4,5	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6	
	- Buah atau Biji berminyak	point	0,8	0,3	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	
	- Kacang-kacagan	point	13	10	≥ 10	≥ 10	≥ 10	≥ 10	≥ 10	≥ 10	
	- Gula	point	0,8	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,3	
- Sayur dan Buah	point	34,8	30	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30		
11	Persentase daerah rawan pangan yang diintervensi	Persen	61 desa terhadap 574 desa yang diintervensi	61 desa terhadap 574 desa yang diintervensi	10	10	10	10	10	10	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
12	Rasio Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dari angka Ideal	Persen	902,21 ton CPPD ideal bdsk permentan no 11 tahun 2018	792,24 ton terhadap CPPD ideal bdsk permentan no 11 tahun 2018	5	5	5	5	5	5	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
13	Persentase peningkatan jumlah lumbung pangan masyarakat	Persen	188 kelom[pok	92 kelompok	10	10	10	10	10	10	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (CV):										Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	- Beras	poin	2,91	4,93	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	
	- Cabe Merah	poin	29,91	15,78	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	
	- Bawang Merah	poin	19,24	13,31	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	
	- Daging Ayam	poin	4,62	6,79	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	
15	HPP Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani/produsen	Rp	4,651	4,870	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
16	Persentase Penerapan Hasil Pelatihan Bidang Peternakan dan Ketahanan Pangan	Persen	53	58	60	65	70	75	80	80	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
X.	Pertanahan										
1	Persentase tertib tata kelola pertanahan melalui pemenuhan urusan wajib sesuai konkuren	Persen	5,65	12,90	21,77	42,74	62,10	80,65	100,00	100,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
XI.	Lingkungan Hidup										
1	Persentase peningkatan jumlah dokumen rencana kebijakan strategis yang dievaluasi dampak dan risikonya melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Persen	4,17	8,33	16,67	25	50	75	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
2	Persentase peningkatan dokumen lingkungan yang dinilai dan diawasi implementasinya	Persen	15	28	47	55	70	85	100	100	Dinas Lingkungan Hidup



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Persentase penurunan konsentrasi Parameter COD (mg/L)	Persen	N/A	N/A	20	40	60	80	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
4	Persentase peningkatan desa berbudaya lingkungan	Persen	N/A	12	12,1	12,2	12,3	12,4	12,5	12,5	Dinas Lingkungan Hidup
5	Persentase peningkatan kemitraan lingkungan	Persen	N/A	N/A	20	40	60	80	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
6	Persentase peningkatan luasan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persen	N/A	88,4	91,21	94,12	96,97	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
7	Persentase peningkatan pengawasan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan hidup pelaku usaha dan/kegiatan dalam pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup	Persen	N/A	N/A	54,44	65,8	77,2	88,6	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
8	Persentase peningkatan jumlah parameter yang terakreditasi di setiap bahan/produk yang diuji	Persen	46,87	56,25	62,5	71,87	81,25	90,62	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
9	Persentase peningkatan jumlah sertifikat kompetensi teknis yang diperoleh	Persen	3,92	58,82	72,54	88,23	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
10	Persentase peningkatan sampah yang terolah di TPA/TPST Regional	Persen	51,87	51,87	51,87	99,42	99,42	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
11	Persentase penurunan konsentrasi parameter SOX	Persen	N/A	N/A	20	40	60	80	100	100	Dinas Lingkungan Hidup



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	Persentase ketersediaan data inventarisasi dan mitigasi GRK kabupaten/kota	Persen	N/A	N/A	18	37	56	74	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
13	Persentase peningkatan kampung iklim	Persen	221,43	447,14	71,43	78,57	85,71	92,86	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
14	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari operasional bank sampah	Persen	0,01	0,51	0,62	6,07	12,21	12,23	15,80	15,80	Dinas Lingkungan Hidup
XII.	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil										
1	Tingkat Akurasi Data Kependudukan Skala Provinsi	Persen	N/A	N/A	80	81,23	82,35	83,57	84,78	84,78	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Persen	N/A	80	81,12	81,83	82,63	83,47	84,28	84,28	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3	Tingkat Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi	Persen	N/A	37,5	50	62,50	75	87,50	100	100	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4	Tingkat kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persen	N/A	N/A	80	80,80	81,60	82,42	83,25	83,25	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
XIII.	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa										
1	Jumlah desa Mandiri	Desa	63	63	63	89	115	141	167	167	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Desa
2	Persentase Aparatur Desa yang Dibina dan Terlatih	Desa	10	10	10	20	30	40	50	50	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Desa
3	Persentase Desa Digital	Desa	100	100	100	200	300	400	500	500	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Desa
4	Persentase Desa Literasi Yang Dibina	Desa	100	100	100	200	300	400	500	500	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Desa
5	Persentase Kader Penggerak Desa	KPD	653	653	653	300	300	300	460	460	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Desa
6	Persentase Kampung Adat Yang Dibina	Jumlah	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Desa
7	Jumlah Bumdesa Yang Mendapat Pendampingan Pembangunan Ekonomi Desa Yang Mandiri	BUMDesa	180	180	180	180	180	180	180	180	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Desa
8	Persentase Inovasi Dan TTG Yang Dihasilkan Dari 27 Kabupaten/Kota.	Jenis	8	8	8	13	18	22	27	27	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Desa



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Persentase Desa Yang Mendapat Bantuan APBD	Desa	5.312	5.312	5.312	5.312	5.312	5.312	5.312	5.312	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Desa
10	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Desa
11	Persentase ketersediaan data Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Desa
XIV. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
1	Cakupan peserta KB Aktif	Persen	74,91	74,72	74,7	74,75	74,8	74,85	74,9	74,9	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	Usia kawin pertama perempuan	Tahun	20	20	20	21	21	21	21	21	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
XV.	Perhubungan										
1	Jumlah Penumpang AKDP di Provinsi Jawa Barat	Penumpang	119.330.910	126.013.440	131.423.940	136.680.898	142.148.134	147.834.059	153.747.421	153.747.421	Dinas Perhubungan
2	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Transportasi	Persen	0,22	0,40	0,41	0,41	0,42	0,60	0,61	0,61	Dinas Perhubungan
3	Jumlah Penumpang Terminal di Wilayah Kerja UPTD PP Perhubungan LLAJ Wilayah I	Penumpang	418.551	1.684.289	1.706.689	1.774.957	1.845.955	1.919.794	1.996.585	1.996.585	Dinas Perhubungan
4	Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi di Wilayah Kerja UPTD PP Perhubungan LLAJ Wilayah I yang terpasang	Penumpang	26,61	29,19	30,04	31,33	32,61	33,89	35,10	35,10	Dinas Perhubungan
5	Jumlah Penumpang Terminal di Wilayah Kerja UPTD PP Perhubungan LLAJ Wilayah II	Penumpang	2.394.886	2.661.655	2.911.481	3.161.385	3.411.844	3.662.382	3.912.295	3.912.295	Dinas Perhubungan
6	Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi di Wilayah Kerja UPTD PP Perhubungan LLAJ Wilayah II yang terpasang	Persen	30	45,64	47,04	48,57	50,25	52,05	53,91	53,91	Dinas Perhubungan
7	Jumlah Penumpang Terminal di Wilayah Kerja UPTD PP Perhubungan LLAJ Wilayah III	Penumpang	1.132.546	1.036.496	1.145.736	1.168.201	1.168.201	1.213.133	1.235.598	1.235.598	Dinas Perhubungan
8	Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi di Wilayah Kerja UPTD PP Perhubungan LLAJ Wilayah III yang terpasang	Persen	26,23	32,15	34,53	36,94	39,31	41,90	44,65	44,65	Dinas Perhubungan
9	Jumlah Penumpang Terminal di Wilayah Kerja UPTD PP Perhubungan LLAJ Wilayah IV	Penumpang	290.097	367.708	383.872	399.227	415.196	431.804	449.076	449.076	Dinas Perhubungan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi di Wilayah Kerja UPTD PP Perhubungan LLAJ Wilayah IV yang terpasang	Persen	24,28	26,74	27,33	28,22	29,10	29,95	30,68	30,68	Dinas Perhubungan
11	Persentase perencanaan prasarana Perhubungan Udara yang dihasilkan	Persen	30,50	34,3	47,74	66,82	77,55	82,97	82,97	82,97	Dinas Perhubungan
12	Jumlah penumpang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Nusawiru	Penumpang	525.315	550.315	578.226	607.137	660.124	693.130	859.212	859.212	Dinas Perhubungan
13	Tingkat ketersediaan prasarana Bandar Udara	Persen	55,56	60	71,70	73,44	76,33	80,63	84,67	84,67	Dinas Perhubungan
14	Persentase perencanaan prasarana dan keselamatan perhubungan laut dan ASDP yang dihasilkan	Persen	27,78	32,03	42,88	60,5	75,84	87,92	100	100	Dinas Perhubungan
15	Jumlah barang dan penumpang angkutan ASDP di Jawa Barat										Dinas Perhubungan
		Ton	149.684	66.840	99.434	104.406	109.626	115.108	120.863	120.863	
		orang	1.047.230	650.864	578.226	607.307	637.494	669.369	702.837	702.837	
16	Tingkat ketersediaan prasarana dan keselamatan perhubungan ASDP	Persen	27,78	32,03	33,74	56,68	73,21	88,61	100,00	100,00	Dinas Perhubungan
17	Jumlah barang dan penumpang angkutan Laut										Dinas Perhubungan
	a. Barang	Ton	37.465.628	28.541.917	33.931.726	35.673.164	37.623.727	39.680.944	41.850.647	41.850.647	
		Teus	N/A	N/A	250.000.000	886.000	3.493.000	3.462.865	3.856.186	3.856.186	
	b. Penumpang	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	22.630	23.762	156.375	156.375	
18	Tingkat ketersediaan prasarana dan keselamatan perhubungan Laut di Jawa Barat	Persen	27,78	32,03	36,36	36,36	60,22	92,04	100,00	100,00	Dinas Perhubungan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
19	Jumlah Penumpang Kereta Api	Penumpang	34.895.277	37.319.593	38.065.985	38.827.305	39.603.851	40.395.928	41.203.846	41.203.846	Dinas Perhubungan
20	Tingkat ketersediaan prasarana moda perkeretaapian	Persen	N/A	3	16	28	32	89,6	100	100	Dinas Perhubungan
XVI.	Komunikasi Dan Informatika										
1	Tingkat Kematangan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Poin	3	3	3	3,3	3,5	3,7	4	4	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Tingkat kematangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Poin	3	3	3	3,3	3,5	3,7	4	4	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Tingkat Layanan Aplikasi Spbe Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Poin	3	3	3	3,3	3,5	3,7	4	4	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	Poin	90,4	90,4	90,4	90,45	90,5	90,55	90,60	90,60	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Persentase diseminasi informasi dan kemitraan komunikasi yang dilaksanakan	Persen	90	90	90	90,05	90,1	90,15	90,2	90,2	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Persentase media komunikasi publik yang dimanfaatkan	Persen	90,8	90,8	90,8	90,85	90,9	90,95	91	91	Dinas Komunikasi dan Informatika



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Persentase persidangan Komisi Informasi melalui mediasi dan ajudikasi non litigasi	Persen	N/A	N/A	80	85	90	93	95	95	Dinas Komunikasi dan Informatika
XVII. Koperasi Dan Usaha Kecil											
1	Tingkat kepatuhan koperasi	Persen	1,5	1,7	2	2,5	3,1	3,7	4,5	4,5	Dinas Koperasi dan Usaha kecil
2	Persentase koperasi aktif	Persen	40	42	45	48	51,5	55,5	60,5	60,5	Dinas Koperasi dan Usaha kecil
3	Laju pertumbuhan volume usaha koperasi	Persen	5,6	5,8	6	6,1	6,3	6,6	6,9	6,9	Dinas Koperasi dan Usaha kecil
4	Laju Pertumbuhan Omzet UMKM Binaan	Persen	7	7,7	8	9	10,1	11,2	12,5	12,5	Dinas Koperasi dan Usaha kecil
5	Jumlah Usaha Pemula	Unit	3.370	3.370	3.370	4.420	5.570	6.820	4.820	4.820	Dinas Koperasi dan Usaha kecil
6	Persentase SDM koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	Persen	5	5	5	5,3	5,9	6,5	7,3	7,3	Dinas Koperasi dan Usaha kecil
XVIII. Penanaman Modal											
1	Laju Minat Investasi di Jawa Barat	Persen	5,5	5,5	N/A	5,5	5,8	6	6,2	6,2	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Peningkatan Laju realisasi proyek penanaman modal	Indeks	5,5	5,5	N/A	5,5	5,8	6	6,2	6,2	Dinas Penanaman



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Kemudahan Prosedur dalam Mendapatkan Pelayanan Perizinan	Indeks	77,5	77,5	N/A	77,5	78	78,5	79	79	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Tingkat Penyelesaian Perizinan Bidang ESDA Yang Tepat Waktu	Indeks	55	55	N/A	55	60	70	80	80	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Tingkat Penyelesaian Perizinan Bidang INSOS Yang Tepat Waktu	Persen	55	55	N/A	55	60	70	80	80	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Tingkat Kualitas Pelayanan Perizinan	Persen	82	82	N/A	82	82	82	82	82	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7	Persentase data dan informasi yang valid	Persen	80	80	N/A	80	85	90	95	95	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
XIX.	Pemuda Dan Olahraga										
1	Persentase pemuda berprestasi tingkat nasional	Persen	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	Persentase pemuda binaan Dispora yang berwirausaha	Persen	4	4	4	4	4	4	4	4	Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	Persen	20	20	20	20	20	20	20	20	Dinas Pemuda dan Olahraga
4	persentase pemberian penghargaan bagi pemuda yang berprestasi di tingkat nasional	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
5	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat berolahraga	Persen	10	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Pemuda dan Olahraga
6	Persentase tenaga olahraga Tradisional, Berkebutuhan khusus dan Rekreasi binaan yang bersertifikat	Persen	10	10	10	11	12	13	14	14	Dinas Pemuda dan Olahraga
7	Persentase event olahraga Tradisional, Berkebutuhan khusus dan Rekreasi yang diselenggarakan dan diikuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
8	Persentase medali emas yang diperoleh dalam Event Nasional PEPARPENAS	Persen	12	12	12	N/A	12	N/A	12	12	Dinas Pemuda dan Olahraga
9	Persentase medali emas yang diperoleh dalam Event Nasional:										Dinas Pemuda dan Olahraga
	a. POPNAS	Persen	N/A	N/A	20	N/A	20	N/A	20	20	
	b. POPWILNAS	Persen	N/A	N/A	N/A	20	N/A	20	N/A	20	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Persentase Tenaga Olahraga Prestasi binaan yang memiliki Sertifikat	Persen	N/A	N/A	10	12	14	16	18	18	Dinas Pemuda dan Olahraga
11	Persentase event olahraga Prestasi yang diselenggarakan dan diikuti	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
12	persentase pemberian pengahragaan bagi insan olahraga yang berprestasi di tingkat nasional	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
13	Persentase penyediaan sarana olahraga kawasan sport Jabar	Persen	50	60	N/A	80	95	100	100	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
XX. Statistik											
1	Persentase ketersediaan data statistik sektoral Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Persen	70	70	70	75	80	85	90	90	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase dokumen hasil pengolahan dan analisis statistik sektoral spasial dan aspasial yang dihasilkan	Persen	70	70	70	75	80	85	90	90	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan data dan Informasi	Poin	80	80	80	85	85	88	90	90	Dinas Komunikasi dan Informatika
XXI. Persandian											
1	Tingkat Kesiapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Level	I s.d. II	I s.d. II	I s.d. II	II	II s.d. II+	II+ s.d. III	III	III	Dinas Komunikasi dan Informatika



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
XXII. Kebudayaan											
1	Persentase usulan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Jawa Barat yang ditetapkan sebagai WBTB Tingkat Nasional	Persen	70	70	70,00	76,92	88,24	94,12	100	100	Dinas Pariwisata dan kebudayaan
2	Persentase bahasa, sastra dan aksara daerah yang dilestarikan	Persen	18,52	18,52	18,52	18,52	18,52	22,22	22,22	22,22	Dinas Pariwisata dan kebudayaan
3	Persentase Cagar Budaya yang dilindungi	Persen	6,00	6,00	6,00	20,00	24,00	26,00	24,00	24,00	Dinas Pariwisata dan kebudayaan
4	Persentase Benda Koleksi Museum Sri Baduga yang dilindungi	Persen	18,21	18,21	18,21	19,04	20,20	21,03	21,52	21,52	Dinas Pariwisata dan kebudayaan
5	Persentase seni budaya yang dilindungi	Persen	10,53	10,53	10,53	15,79	21,05	26,32	26,32	26,32	Dinas Pariwisata dan kebudayaan
XXIII. Perpustakaan											
1	Laju Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	Persen	N/A	N/A	3	3	3	3	3	3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	Persentase naskah kuno berkonten ilmu pengetahuan yang dilestarikan	Persen	N/A	N/A	2	2	2	2	2	2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Persentase karya cetak, karya rekam dan hasil khazanah budaya Jawa Barat yang disimpan sesuai dengan peraturan	Persen	8,63	17,73	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
4	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Persen	N/A	N/A	0,3575	0,3754	0,3942	0,4139	0,4346	0,4346	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
5	Persentase Lokasi Kawasan Konservasi Perairan yang Dikelola di Wilayah Selatan	Persen	N/A	N/A	52,051	54,654	57,387	60,25	63,269	63,269	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
6	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	593.707	594.211	600.154	606.156	612.218	618.341	624.524	624.524	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
7	Persentase Koleksi buku yang dibaca	Persen	1,60	1,63	1,65	1,81	1,99	2,19	2,41	2,41	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
8	Survei Kepuasan (SKM) terhadap Pelayanan Perpustakaan	Poin	77,52	79,12	79,84	82,23	84,69	87,23	89,60	89,60	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
XXIV.	Kearsipan										



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara baku	Persen	N/A	40	52	59	66	73	80	80	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	Persentase penyusutan arsip	Persen	N/A	N/A	20	20	20	20	20	20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
3	Persentase simpul SIKN yang terintegrasi se-Jawa Barat	Persen	N/A	17,8	32	46	60	75	89,2	89,2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kearsipan	Poin	N/A	N/A	50	55	60	65	70	70	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
5	Tingkat Penyelamatan Arsip Statis	Persen	N/A	15,8	16,9	15,2	16,9	17,5	17,5	17,5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
6	Tingkat Pelestarian Arsip Statis	Persen	N/A	14,2	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
XXV.	Kelautan dan Perikanan										



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	274.465,4 8	242.037,08	244.000	248.880	253.858	258.935	264.113	264.113	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Produksi Perikanan Tangkap Wilayah Utara	Ton	211.305,7 6	214.492,79	217.882	221.324	224.821	228.373	231.982	231.982	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	Produksi Perikanan Tangkap Wilayah Selatan	Ton	19.847,24	15.308,04	15.549,907	15.795,5956	16.045,1660	16.298,6796	16.556,1987	16.556,1987	Dinas Kelautan dan Perikanan
4	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.160.747, 98	1.175.417,7 4	1.200.000	1.260.000	1.323.000	1.390.150	1.459.608	1.459.608	Dinas Kelautan dan Perikanan
5	Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Wilayah Utara	Ton	253.557,7 8	312.552,98	281.767	295.856	310.648	326.181	342.490	342.490	Dinas Kelautan dan Perikanan
6	Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Wilayah Selatan	Ton	8.946,63	2.921,204	3.067	3.220,62741	3.381,65878	3.550,74172	3.728,27881	3.728,27881	Dinas Kelautan dan Perikanan
7	Konsumsi Ikan Jawa Barat	kg/kap/t h	28,60	29,31	29,63	29,95	30,28	30,60	30,94	30,94	Dinas Kelautan dan Perikanan
8	Laju Produksi Olahan Yang Terstandardisasi	Persen	5,4341062 68	(4,4871615 78)	3,00	3	3	3	3	3	Dinas Kelautan dan Perikanan
9	Persentase Jumlah Produksi Perikanan yang Memenuhi Standard Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan	Persen	96,14	95,06	91	92	93	94	95	95	Dinas Kelautan dan Perikanan
10	Persentase Lokasi Kawasan Konservasi Perairan Yang Dikelola	Persen	N/A	12,50	25,00	37,50	50,00	62,50	75,00	75,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
11	Produksi Garam	Ton	233.320,4 3	188.634,42	245.978	270.098	283.602	297.783	312.672	312.672	Dinas Kelautan dan Perikanan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	Jumlah Plasma Nutfah yang Dilestarikan di Wilayah Utara Jawa Barat	Jenis	4	4	5	5	5	5	5	5	Dinas Kelautan dan Perikanan
13	Persentase Lokasi Kawasan Konservasi Perairan yang Dikelola di Wilayah Utara	Persen	N/A	N/A	33,333	33,333	66,667	100	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
14	Jumlah Plasma Nutfah yang Dilestarikan di Wilayah Selatan	Jenis	4	4	5	5	5	5	5	5	Dinas Kelautan dan Perikanan
15	Persentase Lokasi Kawasan Konservasi Perairan yang Dikelola di Wilayah Selatan	Persen	N/A	20,00	20,00	33	33	33	50	50	Dinas Kelautan dan Perikanan
16	Tingkat penanganan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
17	Tingkat indikasi pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di Wilayah Utara	Persen	80	91,33	75	70	65	60	55	55	Dinas Kelautan dan Perikanan
18	Tingkat indikasi pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di Wilayah Selatan	Persen	80	78	75	70	65	60	55	55	Dinas Kelautan dan Perikanan
XXVI. Pariwisata											
1	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	Persen	18,52	18,52	18,52	18,52	18,52	22,22	22,22	22,22	Dinas Pariwisata dan kebudayaan
2	Persentase Industri Kreatif yang dikembangkan	Persen	18,52	18,52	18,52	18,52	18,52	22,22	22,22	22,22	Dinas Pariwisata dan kebudayaan
3	Persentase seni budaya dan destinasi wisata yang dipromosikan	Persen	14,81	14,81	14,81	17,41	20,74	22,59	24,44	24,44	Dinas Pariwisata



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											dan kebudayaan
XXVII.	Pertanian										
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan	Persen	70,41	72,71	80,0	80,5	81,0	81,5	82,0	82,0	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
2	Laju pertumbuhan populasi ternak ruminansia besar	Persen	623.904 (ekor)	629.324 ekor Angka sementara	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
3	Laju pertumbuhan populasi ternak ruminansia kecil	Persen	12.676.928 (ekor)	12.883.107 ekor (angka sementara)	2	2	2	2	2	2	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
4	Laju pertumbuhan ternak unggas	Persen	173.796.943 (ekor)	179.581.686 ekor (angka sangat sementara)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
5	Persentase pelaku usaha dengan produktivitas yang meningkat	Persen	8	13,74	18	23	28	33	38	38	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
6	Tingkat kinerja pengendalian penyakit hewan menular strategis di Jawa Barat (%)	Point	73	73	75	76	77	78	79	79	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
7	Persentase kenaikan unit usaha produk peternakan yang memiliki sertifikasi jaminan mutu (%)	Persen	24	20	10	10	10	10	10	10	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Peningkatan Pelayanan Pengujian dan pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan	Persen	72	71	72	80	88	84	96	96	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
9	Persentase penambahan ruang lingkup akreditasi ISO/IEC 17025 : 2017	Persen	2	1,68	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
10	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persen	81,57	85,45	82,0	82,1	82,2	82,3	82,4	82,4	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
11	Persentase tingkat kesembuhan pasien	Persen	86	88	90	91,0	92,0	93,0	94,0	94,0	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
12	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Rumah Sakit Hewan	Persen	80,5	81,65	82,0	82,2	82,4	82,6	82,8	82,8	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
13	Cakupan Pelayanan Pengujian	Persen	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
14	Persentase pakan yang bersertifikat	Persen	N/A	66	66	70	74	76	80	80	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
15	Persentase penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi sesuai ISO 17025:2017	Persen	66,67	66,67	75	83	92	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
16	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pengujian mutu	Persen	81,5	81,75	82,0	82,1	82,2	82,3	82,4	82,4	Dinas Ketahanan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan keamanan pakan/bahan pakan										Pangan Dan Peternakan
17	Persentase ternak sapi perah yang memiliki produksi individu \geq 5.000 kg/laktasi	Persen	34	35	20	22	24	26	30	30	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
18	Persentase produksi hijauan pakan ternak yang berkualitas	Persen	65	65,2	50	55	60	65	70	70	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
19	Persentase produksi susu yang diolah	Persen	1,1	1,1	2,0	2,2	2,4	2,7	3,0	3,0	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
20	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pengembangan ternak sapi perah dan hijauan pakan ternak	Persen	82	82,0	82,1	82,2	82,4	82,6	82,8	82,8	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
21	Persentase bibit ternak betina sesuai SNI dari produksi bibit betina yang dihasilkan	Persen	27	28	30	33	36	38	40	40	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
22	Laju Produksi Susu	liter	250.000	265.000	280.000	300.000	310.000	320.000	330.000	330.000	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
23	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai Perbibitan dan pengembangan inseminasi buatan Sapi perah Bunikasih	Persen	79,8	79,9	81,0	81,2	81,4	81,6	82,0	82,0	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
24	Persentase bibit domba dan kambing sesuai SNI yang dihasilkan	Persen	15	15,78	16	17	18	19	20	20	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
25	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai pengembangan perbibitan ternak domba dan kambing	Persen	80,28	84,48	84,50	84,60	84,65	84,70	84,75	84,75	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
26	Persentase bibit ayam sentul unggul	Persen	61,17	85,30	10	12	13	15	17	17	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
27	Persentase bibit itik rambon galur murni	Persen	51,22	69,88	64	68	72	76	80	80	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
28	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai pengembangan perbibitan ternak unggas	Persen	81,32	81,02	82,0	82,2	82,4	82,6	82,8	82,8	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
29	Laju produksi benih semen beku sapi potong	Persen	10	10	10	15	20	25	30	30	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
30	Persentase induk sapi potong yang memiliki SKLB	Persen	3	5	5	7	9	12	15	15	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
31	Persentase bibit ternak sapi potong sesuai SNI	Persen	18,6	19	20	21	22	23	24	24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
32	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai Perbibitan dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi potong	Persen	82	82	82,0	82,1	82,2	82,3	82,4	82,4	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
33	Produktivitas Tanaman Pangan	Kw/Ha	60,03	56,39	56,76	57,26	57,76	58,26	58,76	58,76	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
34	Persentase Penerapan Sertifikat Mutu Hasil Tanaman Pangan	Kw/Ha	20	20	20	20	20	20	20	20	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
35	Produktivitas Tanaman Hortikultura	Kw/Ha	118,74	101,85	90,05	90,12	90,19	90,26	90,34	90,34	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
36	Persentase Penerapan Sertifikat Mutu Hasil Tanaman Hortikultura	Kw/Ha	20	20	20	20	20	20	20	20	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
37	Produksi Benih Pokok Tanaman Pangan	Kg	300.000	300.000	360.000	362.700	365.300	368.000	370.600	370.600	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
38	Produksi Benih Tanaman Buah	pohon	15.000	40.000	65.000	90.000	115.000	140.000	165.000	165.000	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
39	Produksi Benih Tanaman Sayuran	Kg	5.000	7.500	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	30.000	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
40	Produksi Benih Tanaman Hias	Pohon	41.000	46.250	51.500	56.750	62.000	67.250	72.500	72.500	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
41	Produksi Benih Tanaman Obat	Kg	2.300	3.100	3.900	4.700	5.600	6.600	7.400	7.400	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
42	Produksi Benih Kentang	Knol	136.936	150.737	285.000	285.000	300.000	345.000	390.000	390.000	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
43	Persentase luas lahan yang terkena serangan OPT/DPI	Persen	4,98	3,47	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
44	Persentase benih tanaman pangan dan hortikultura yang berserifikat	Persen	78,45	88,32	69,39	70,5	71,63	72,78	73,94	73,94	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
45	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai Pengawasan Sertifikasi Benih	Persen	79,00	79,00	79,00	79,79	80,59	81,59	82,21	82,21	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
46	Persentase Peningkatan Indeks Pertanaman	Persen	2,13	1,8	1,8	1,85	1,9	1,95	2	2	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
47	Persentase Alsintan Yang Dikembangkan	Persen	50,00	51,00	53,33	66,66	77,77	88,88	100	100	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
48	Persentase Kelompok Tani yang dibina oleh penyuluh	Persen	35,00	35,00	40,11	48,13	56,15	72,2	94,17	94,17	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
49	Persentase penyuluh yang berprestasi	Persen	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
50	Persentase SDM TPH yang dilatih	Persen	17	17	18,36	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
51	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persen	88,00	88,00	88,86	88,86	88,86	88,86	88,86	88,86	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
52	Laju Peningkatan penerapan teknologi budidaya komoditas perkebunan yang tepat	Persen	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	Dinas Perkebunan
53	Laju peningkatan produksi benih perkebunan	Persen	0,95	0,91	1	1	1	1	1	1	Dinas Perkebunan
54	Persentase peningkatan penggunaan benih bersertifikat	Persen	2,46	2,64	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	Dinas Perkebunan
55	Persentase peningkatan pemanfaatan sumberdaya lahan perkebunan	Persen	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	Dinas Perkebunan
56	Persentase peningkatan kompetensi sdm perkebunan	Persen	1,9	1,95	2	2	2	2	2	2	Dinas Perkebunan
57	Persentase peningkatan kelas kelompok tani perkebunan	Persen	1,88	1,92	2	2	2	2	2	2	Dinas Perkebunan
58	Laju peningkatan akses permodalan perkebunan	Persen	1,75	1,81	2	2	2	2	2	2	Dinas Perkebunan
59	Penurunan serangan OPT perkebunan	Persen	-1,04	-1,05	-1	-1	-1	-1	-1	-1	Dinas Perkebunan
60	Laju Peningkatan jumlah petani yang mengolah produk primer	Persen	N/A	N/A	2	2	2	2	2	2	Dinas Perkebunan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
61	laju peningkatan akses pasar bagi petani perkebunan	Persen	N/A	N/A	2	2	2	2	2	2	Dinas Perkebunan
62	Laju Peningkatan Kinerja Perkebunan Besar	Persen	N/A	N/A	2	2	2	2	2	2	Dinas Perkebunan
XXVIII. Kehutanan											
1	Berkurangnya Persentase Luas Lahan Kritis yang ditangani	Persen	0,65	0,65	N/A	0,65	0,65	0,65	0,32	0,32	Dinas Kehutanan
2	Berkurangnya Luas Persentase Lahan Kritis Di CDK Wilayah I	Persen	1,21	1,21	N/A	1,21	1,56	1,85	1,21	1,21	Dinas Kehutanan
3	Berkurangnya luas persentase lahan kritis di CDK Wilayah II	Persen	1,31	1,31	N/A	1,31	2,22	2,22	2,22	2,22	Dinas Kehutanan
4	Berkurangnya luas persentase lahan kritis di CDK Wilayah III	Persen	0,82	0,82	N/A	0,82	0,40	0,45	0,45	0,45	Dinas Kehutanan
5	Berkurangnya luas persentase lahan kritis di CDK Wilayah IV	Persen	0,31	0,31	N/A	0,31	0,31	0,26	0,26	0,26	Dinas Kehutanan
6	Berkurangnya luas persentase lahan kritis di CDK Wilayah V	Persen	0,87	0,87	N/A	0,87	0,78	0,70	0,70	0,70	Dinas Kehutanan
7	Berkurangnya luas persentase lahan kritis di CDK Wilayah VI	Persen	0,76	0,76	N/A	0,76	0,90	0,90	0,90	0,90	Dinas Kehutanan
8	Berkurangnya luas persentase lahan kritis di CDK Wilayah VII	Persen	1,32	1,32	N/A	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	Dinas Kehutanan
9	Berkurangnya luas persentase lahan kritis di CDK Wilayah VIII	Persen	1,7	1,7	N/A	1,70	3,00	3,00	3,00	3,00	Dinas Kehutanan
10	Berkurangnya luas persentase lahan kritis di CDK Wilayah IX	Persen	3,35	3,35	N/A	3,35	3,29	3,29	3,29	3,29	Dinas Kehutanan
11	Persentase sumber benih yang terbangun	Persen	100	100	N/A	100	100	100	100	100	Dinas Kehutanan
12	Persentase Kesiapan Dokumen Arahan dan Dokumen Tata Batas	Persen	100	100	N/A	100	100	100	100	100	Dinas Kehutanan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13	Persentase penurunan emisi	Persen	100	100	N/A						Dinas Kehutanan
14	Tingkat kerusakan hutan	Persen	0,8	0,8	N/A	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	Dinas Kehutanan
15	Tingkat kerusakan hutan di TAHURA Ir. H. Djuanda	Persen	0,8	0,8	N/A	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	Dinas Kehutanan
16	Tingkat kerusakan hutan di CDK Wilayah I	Persen	0,8	0,8	N/A	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	Dinas Kehutanan
17	Tingkat kerusakan hutan di CDK Wilayah II	Persen	0,8	0,8	N/A	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	Dinas Kehutanan
18	Tingkat kerusakan hutan di CDK Wilayah III	Persen	0,8	0,8	N/A	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	Dinas Kehutanan
19	Tingkat kerusakan hutan di CDK Wilayah IV	Persen	0,8	0,8	N/A	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	Dinas Kehutanan
20	Tingkat kerusakan hutan di CDK Wilayah V	Persen	0,8	0,8	N/A	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	Dinas Kehutanan
21	Tingkat kerusakan hutan di CDK Wilayah VI	Persen	0,8	0,8	N/A	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	Dinas Kehutanan
22	Tingkat kerusakan hutan di CDK Wilayah VII	Persen	0,8	0,8	N/A	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	Dinas Kehutanan
23	Tingkat kerusakan hutan di CDK Wilayah VIII	Persen	0,8	0,8	N/A	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	Dinas Kehutanan
24	Tingkat kerusakan hutan di CDK Wilayah IX	Persen	0,8	0,8	N/A	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	Dinas Kehutanan
25	Tingkat kerusakan hutan di Hutan Daerah Kiarapayung	Persen	0,8	0,8	N/A	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	Dinas Kehutanan
26	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan	Persen	10	10	N/A	10	10	10	10	10	Dinas Kehutanan
27	Persentase peningkatan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan di TAHURA Ir. H. Djuanda	Persen	10	10	N/A	10	10	10	10	10	Dinas Kehutanan
28	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan	Persen	10	10	N/A	10	10	10	10	10	Dinas Kehutanan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Satwa liar yang ditangkarkan di CDK Wilayah I										
29	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan di CDK Wilayah II	Persen	10	10	N/A	10	10	10	10	10	Dinas Kehutanan
30	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan di CDK Wilayah III	Persen	10	10	N/A	10	10	10	10	10	Dinas Kehutanan
31	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan di CDK Wilayah IV	Persen	10	10	N/A	10	10	10	10	10	Dinas Kehutanan
32	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan di CDK Wilayah V	Persen	10	10	N/A	10	10	10	10	10	Dinas Kehutanan
33	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan di CDK Wilayah VI	Persen	10	10	N/A	10	10	10	10	10	Dinas Kehutanan
34	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan di CDK Wilayah VII	Persen	10	10	N/A	10	10	10	10	10	Dinas Kehutanan
35	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan di CDK Wilayah VIII	Persen	10	10	N/A	10	10	10	10	10	Dinas Kehutanan
36	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan di CDK Wilayah IX	Persen	10	10	N/A	10	10	10	10	10	Dinas Kehutanan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
37	Jumlah Produksi Hasil Hutan	Persen	1	1	N/A	1	1	1	1	1	Dinas Kehutanan
38	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di CDK Wilayah I	Persen	1	1	N/A	1	1	1	1	1	Dinas Kehutanan
39	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di CDK Wilayah II	Persen	1	1	N/A	1	1	1	1	1	Dinas Kehutanan
40	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di CDK Wilayah III	Persen	1	1	N/A	1	1	1	1	1	Dinas Kehutanan
41	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di CDK Wilayah IV	Persen	1	1	N/A	1	1	1	1	1	Dinas Kehutanan
42	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di CDK Wilayah V	Persen	1	1	N/A	1	1	1	1	1	Dinas Kehutanan
43	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di CDK Wilayah VI	Persen	1	1	N/A	1	1	1	1	1	Dinas Kehutanan
44	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di CDK Wilayah VII	Persen	1	1	N/A	1	1	1	1	1	Dinas Kehutanan
45	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di CDK Wilayah VIII	Persen	1	1	N/A	1	1	1	1	1	Dinas Kehutanan
46	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di CDK Wilayah IX	Persen	1	1	N/A	1	1	1	1	1	Dinas Kehutanan
47	Jumlah Produksi Olahan Hasil Hutan	Persen	1	1	N/A	1	1	1	1	1	Dinas Kehutanan
48	Jumlah Kerjasama Pemanfaatan Jasa Lingkungan	Dokumen	1	1	N/A	1	1	1	1	4	Dinas Kehutanan
49	Persentase peningkatan penerimaan jasa wisata alam	Persen	10	10	N/A	10	10	10	10	10	Dinas Kehutanan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
50	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Persen	50	50	N/A	50	35	25	20	20	Dinas Kehutanan
51	Persentase Layanan Perizinan Perhutanan Sosial	Persen	90	90	N/A	90	90	100	100	100	Dinas Kehutanan
52	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Persen	50	50	N/A	50	35	25	20	20	Dinas Kehutanan
53	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Persen	50	50	N/A	50	35	25	20	20	Dinas Kehutanan
54	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Persen	50	50	N/A	50	35	25	20	20	Dinas Kehutanan
55	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Persen	50	50	N/A	50	35	25	20	20	Dinas Kehutanan
56	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Persen	50	50	N/A	50	35	25	20	20	Dinas Kehutanan
57	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Persen	50	50	N/A	50	35	25	20	20	Dinas Kehutanan
58	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Persen	50	50	N/A	50	35	25	20	20	Dinas Kehutanan
59	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Persen	50	50	N/A	50	35	25	20	20	Dinas Kehutanan
60	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Persen	50	50	N/A	50	35	25	20	20	Dinas Kehutanan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
XXIX.	Energi Dan Sumber Daya Mineral										
1	Tingkat Ketaatan Usaha bidang ketenagalistrikan yang patuh terhadap aturan	Persen	12,5	38,97	63,30	83,40	91,80	96,80	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2	Persentase Instalasi Tenaga Listrik yang Laik Operasi	Persen	79,52	49,88	80	80	82	82	85	85	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
4	Persentase Pelaku usaha ketenagalistrikan yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	Persen	20	20	20	40	60	80	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
5	Persentase terlayannya subsidi listrik tepat sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
6	Persentase Pelaku usaha ketenagalistrikan yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	Persen	20	20	20	40	60	80	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
7	Persentase terlayannya subsidi listrik tepat sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
8	Persentase Pelaku usaha ketenagalistrikan yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	Persen	20	20	20	40	60	80	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
9	Persentase terlayannya subsidi listrik tepat sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Persentase Pelaku usaha ketenagalistrikan yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	Persen	20	20	20	40	60	80	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
11	Persentase terlayannya subsidi listrik tepat sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
12	Persentase Pelaku usaha ketenagalistrikan yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	Persen	20	20	20	40	60	80	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
13	Persentase terlayannya subsidi listrik tepat sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
14	Persentase Pelaku usaha ketenagalistrikan yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	Persen	20	20	20	40	60	80	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
15	Persentase terlayannya subsidi listrik tepat sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
16	Persentase Pelaku usaha ketenagalistrikan yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	Persen	20	20	20	40	60	80	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
17	Persentase terlayannya subsidi listrik tepat sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
18	Jumlah Reduksi CO2 dari bidang energi (tidak termasuk sektor transportasi)	Ton Co2eq	59,40	63,00	66,70	70,30	73,80	77,60	81,10	81,10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
19	Persentase Energi Baru dan Terbarukan yang diterapkan	Persen	4,9	14,7	17,21	37,9	58,6	79,03	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
20	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	SBM (Setara Barel Minyak)	N/A	N/A	N/A	250	250	250	250	250	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
21	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	SBM (Setara Barel Minyak)	N/A	N/A	N/A	250	250	250	250	250	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
22	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	SBM (Setara Barel Minyak)	N/A	N/A	N/A	250	250	250	250	250	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
23	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	SBM (Setara Barel Minyak)	N/A	N/A	N/A	250	250	250	250	250	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
24	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	SBM (Setara Barel Minyak)	N/A	N/A	N/A	250	250	250	250	250	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
25	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	SBM (Setara Barel Minyak)	N/A	N/A	N/A	250	250	250	250	250	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
26	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	SBM (Setara Barel Minyak)	N/A	N/A	N/A	250	250	250	250	250	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
27	Persentase komoditas EBT yang diuji unjuk kinerja sebagai bahan pengambilan kebijakan bidang energi	Persen	N/A	N/A	N/A	50	50	100	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
28	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib teknis	Persen	30	35	40	45	50	55	60	60	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
29	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib Administrasi	Persen	60	62,5	65	67	67,5	68	68,5	68,5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
30	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	Persen	60	62,5	65	67	67,5	68	68,5	68,5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
31	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	Persen	60	62,5	65	67	67,5	68	68,5	68,5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
32	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	Persen	60	62,5	65	67	67,5	68	68,5	68,5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
33	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	Persen	60	62,5	65	67	67,5	68	68,5	68,5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
34	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	Persen	60	62,5	65	67	67,5	68	68,5	68,5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
35	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	Persen	60	62,5	65	67	67,5	68	68,5	68,5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
36	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	Persen	60	62,5	65	67	67,5	68	68,5	68,5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
37	Persentase pengujian kualitas bahan tambang di Jawa Barat	Persen	N/A	N/A	N/A	30	40	50	60	60	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
38	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan	Persen	1,35	2,35	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	7,35	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
39	Laju Pembangunan Sumur Imbuhan	Persen	187	36,15	25,93	20,59	17,07	14,58	12,72	12,72	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
40	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	Persen	1,61	2,61	3,61	4,61	5,61	6,61	7,61	7,61	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
41	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	Persen	31	1,31	2,31	3,31	4,31	5,31	6,31	6,31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
42	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	Persen	2,91	3,91	4,91	5,91	6,91	7,91	8,91	8,91	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
43	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	Persen	1,68	2,68	3,68	4,68	5,68	6,68	7,68	7,68	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
44	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	Persen	1,85	2,85	3,85	4,85	5,85	6,85	7,85	7,85	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
45	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	Persen	1	1	2	3	4	5	6	6	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
46	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	Persen	1	1	2	3	4	5	6	6	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
47	Persentase sample air tanah yang diuji kualitasnya	Persen	N/A	N/A	N/A	1	1,5	2	3	3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
XXX. Perdagangan											
1	Nilai ekspor non migas	USD\$	28943,52	22585.53 (TW. III)	N/A	30715,0949 7	31329,3968 7	30715,0949 7	30715,0949 7	30715,0949 7	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
2	Indeks Harga Konsumen Bahan Makanan	Poin	3,63	N/A	N/A	3,00 - 4,00	3,00 - 4,00	3,00 - 4,00	3,00 - 4,00	3,00 - 4,00	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3	Indeks Keberdayaan Konsumen	Poin	37	37	N/A	38	38	39	39	39	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
XXXI. Perindustrian											
1	Persentase pertumbuhan PMA/PMDN Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE)	Persen	0,22	N/A	N/A	2	2	2	2	2	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
2	Pertumbuhan jumlah Unit Usaha Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Persen	0,22	N/A	N/A	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Pertumbuhan PMA/PMDN Sektor Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka	Persen	0,05	N/A	N/A	2	2	2	2	2	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
4	Pertumbuhan jumlah Unit Usaha Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka	Persen	0,05	0,05	N/A	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) UPTD IPOK	Kategori	A	N/A	N/A	A	A	A	A	A	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) UPTD Industri Logam	Kategori	A	N/A	N/A	B	A	A	A	A	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPSMB Agro	Kategori	B	N/A	N/A	B	A	A	A	A	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPSMB Logam dan Elektronika	Kategori	B	N/A	N/A	B	A	A	A	A	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPSMB Air Minum Dalam Kemasan	Kategori	B	N/A	N/A	B	A	A	A	A	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPSMB Keramik dan Tabung Gas	Kategori	B	N/A	N/A	B	A	A	A	A	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
XXXII.	Transmigrasi										
1	Persentase Perjanjian Kerjasama bidang ketransmigrasian yang direalisasikan	Persen	N/A	N/A	85	85	85	85	85	85	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
XXXIII	Perencanaan										
1	Persentase sasaran, program dan kegiatan RKPD yang konsisten dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah lingkup Bidang Ekonomi	Persen	70	73	75	80	85	90	95	95	Badan Perencanaan Pembanguna Daerah
2	Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan Kabupaten/Kota dengan Provinsi Jawa Barat Lingkup Bidang Ekonomi	Persen	70	73	75	80	85	90	95	95	Badan Perencanaan Pembanguna Daerah
3	Persentase sasaran, program dan kegiatan RKPD yang konsisten dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah lingkup Bidang Fisik	Persen	70	73	75	80	85	90	95	95	Badan Perencanaan Pembanguna Daerah
4	Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan Kabupaten/Kota dengan Provinsi Jawa Barat Lingkup Bidang Fisik	Persen	70	73	75	80	85	90	95	95	Badan Perencanaan Pembanguna Daerah
5	Persentase sasaran, program dan kegiatan RKPD yang konsisten dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Persen	70	73	75	80	85	90	95	95	Badan Perencanaan Pembanguna Daerah



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan Kabupaten/Kota dengan Provinsi Jawa Barat Lingkup Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Persen	70	73	75	80	85	90	95	95	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7	Rata-rata capaian kinerja pelaksanaan pembangunan	Persen	70	80	N/A	80	85	90	95	95	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah	Persen	70	80	N/A	80	85	90	95	95	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9	Rata-rata capaian proyek strategis Jawa Barat yang diselesaikan	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
10	Rata-rata capaian kegiatan APBN di Jawa Barat	Persen	70	75	N/A	80	85	90	95	95	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
11	Rata-rata capaian kinerja pembangunan kab/kota	Persen	75	80	N/A	85	90	95	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	N/A	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
13	Persentase Partisipasi Publik terhadap Proses Perencanaan	Persen	40	50	N/A	60	65	70	75	75	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14	Persentase Kesesuaian Perencanaan dan Panganggaran	Persen	100	100	N/A	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembanguna Daerah
15	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	40,62	65	N/A	81,25	97,5	100	100	100	Badan Perencanaan Pembanguna Daerah
XXXIV. Keuangan											
1	Tingkat kepatuhan terhadap standar keuangan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	Tingkat kepatuhan terhadap Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Persen	80	80	80	80	90	90	90	90	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	Tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan perbendaharaan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan aset daerah	Persen	80	80	80	80	80	80	80	80	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	Tingkat kepatuhan terhadap Pengelolaan Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Daerah	Persen	80	80	80	80	80	80	80	80	Badan Pengelolaan Keuangan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											dan Aset Daerah
6	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pendapatan I	Persen	106,10	104,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pendapatan Daerah
7	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pendapatan I	Persen	4,02	12,29	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	Badan Pendapatan Daerah
8	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pendapatan II	Persen	104,73	106,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pendapatan Daerah
9	Rasio Efektivitas Dana Perimbangan	Persen	99,09	98,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pendapatan Daerah
10	Rasio Efektivitas Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Persen	71,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pendapatan Daerah
11	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pendapatan II	Persen	10,10	4,13	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Badan Pendapatan Daerah
XXXV.	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan										
1	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai	Nilai (0- 60)	N/A	60	60	60	60	60	60	60	Badan Kepegawaian Daerah
2	Nilai Kriteria Pengadaan Pegawai	Nilai (0- 40)	N/A	16	24	32	36	40	40	40	Badan Kepegawaian Daerah
3	Nilai Kriteria Promosi, Mutasi Dan Rotasi	Nilai (0- 40)	N/A	22	28	31	34	37	40	40	Badan Kepegawaian Daerah



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Nilai Kriteria Pembinaan Karir Dan Peningkatan Kompetensi	Nilai (0-40)	N/A	62,5	67,5	82,5	90	102,5	107,5	107,5	Badan Kepegawaian Daerah
5	Nilai Kriteria Manajemen Kinerja	Nilai (0-60)	N/A	52,5	55	57,5	60	60	60	60	Badan Kepegawaian Daerah
6	Nilai kriteria penggajian, penghargaan, dan disiplin	Nilai (0-40)	N/A	20	27,5	32,5	35	37,5	40	40	Badan Kepegawaian Daerah
7	Nilai kriteria Perlindungan dan pemberian kemudahan	Nilai (0-16)	N/A	14	14	14	16	16	16	16	Badan Kepegawaian Daerah
8	Nilai kriteria Sistem pendukung kepegawaian	Nilai (0-24)	N/A	21	22	24	24	24	24	24	Badan Kepegawaian Daerah
9	Persentase Pejabat Struktural, Fungsional Dan Pelaksana Yang Pernah Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	Persen	18,7	18,7	18,7	18,7	37,4	56,1	74,8	74,8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
10	Persentase pejabat struktural, fungsional dan pelaksana yang pernah mengikuti pengembangan kompetensi Teknis Substantif	Persen	6,38	6,38	18,7	18,7	37,4	56,1	74,8	74,8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
11	Persentase Pejabat Struktural Yang Pernah Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Latsar Cpns	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
12	Presentasi Pimpinan Daerah Yang Lulus Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13	Presentasi Pimpinan Tinggi Yang Lulus Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
14	Persentase Dprd/Kepala Desa/Perangkat Desa Yg Lulus Pengembangan Kompetensi Khusus	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
15	Persentase pejabat struktural, fungsional dan pelaksana yg lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan	Persen	N/A	N/A	N/A	25	50	75	100	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
16	Persentase lulusan uji kompetensi Manajerial, Teknis, Sosial Kultural dan Pemerintahan	Persen	N/A	N/A	N/A	18,7	37,4	56,1	74,8	74,8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
17	Persentase Smart ASN Pemprov Jabar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
18	Jumlah Akreditasi Manajerial & Sosial Kultural, Teknis, Pemerintahan, ISO dan akreditasi corpu SI	Sertifikat	4	4	4	5	6	7	8	8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
19	Persentase Rencana Pengembangan Kompetensi Yang Sesuai Prioritas Pembangunan	Persen	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
20	Persentase rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
21	Jumlah rekomendasi perbaikan untuk implementasi proyek perubahan alumni	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
22	Jumlah ASN Non Provinsi yang terfasilitasi pengembangan kompetensi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
23	Persentase ketersediaan data Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
XXXVI.	Penelitian Dan Pengembangan Daerah										
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Berbasis Kajian dan Analisis yang Diterapkan	Persen	90,59	100	20	40	60	80	100	100	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Persentase Penelitian dan Pengembangan IPTEK yang Sesuai dengan Kebutuhan Jawa Barat	Persen	100	100	15	30	46	77	100	100	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
4	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	100	100	20	40	60	80	100	100	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5	Persentase kajian kelitbangan yang didiseminasikan kepada perangkat daerah atau stakeholder lainnya	Persen	100	100	20	40	60	80	100	100	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
6	Persentase kerjasama penelitian yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	20	40	60	80	100	100	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
XXXVI I.	Sekretariat Daerah										
1	Persentase Bahan Kebijakan Pembinaan, Pemahaman Dan Pengamalan Keagamaan	Persen	89	90	90,5	91	91,5	92	92,5	92,5	Sekretariat Daerah
2	Persentase verifikasi dokumen persyaratan dan kelayakan pemekaran daerah	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
3	Persentase Fasilitasi naskah kerja sama daerah	Persen	90	90	90	90	90	95	95	95	Sekretariat Daerah
4	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pelayanan Sosial yang ditindaklanjuti	Persen	89	90	90,5	91	91,5	92	92,5	92,5	Sekretariat Daerah



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yang ditindaklanjuti	Persen	89	90	90,5	91	91,5	92	92,5	92,5	Sekretariat Daerah
6	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Penanggulangan Masalah Pemberdayaan Sosial yang ditindaklanjuti	Persen	89	90	90,5	91	91,5	92	92,5	92,5	Sekretariat Daerah
7	Persentase capaian kinerja urusan pemerintahan daerah provinsi	Persen	N/A	81	84	87	90	93	95	95	Sekretariat Daerah
8	Persentase rancangan produk hukum pemerintah daerah provinsi yang dikaji	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
9	Persentase penyelenggaraan bantuan hukum dan HAM yang difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
10	Persentase desa/Kelurahan sadar hukum	Persen	45	45,5	46,48	48,75	51,1	53,53	56,05	56,05	Sekretariat Daerah
11	Persentase layanan informasi peraturan perundang-undangan melalui website dan sosialisasi	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
12	Persentase Produk Hukum Kabupaten/Kota yang dievaluasi dan di harmonisasi	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
13	Persentase paket pekerjaan yang selesai ditenderkan	Persen	N/A	N/A	90	92	93	94	95	95	Sekretariat Daerah
14	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan aplikasi pengadaan barang/jasa	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15	Persentase Perangkat Daerah yang proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang undangan	Persen	N/A	N/A	90	92	93	94	95	95	Sekretariat Daerah
16	Persentase laporan/rekomendasi/bahan rumusan kebijakan yang akan ditindaklanjuti menjadi kebijakan BUMD Lembaga Keuangan.	Persen	90	90	95	96	97	98	99	99	Sekretariat Daerah
17	Persentase laporan/rekomendasi/bahan rumusan kebijakan yang akan ditindaklanjuti menjadi kebijakan BUMD Non Lembaga Keuangan.	Persen	90	90	90	96	97	98	99	99	Sekretariat Daerah
18	Persentase bahan laporan/rekomendasi/bahan rumusan kebijakan yang akan ditindaklanjuti menjadi kebijakan Investasi Daerah	Persen	90	90	90	96	97	98	99	99	Sekretariat Daerah
19	Persentase efektifitas kebijakan yang diimplementasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan aspek sumber daya alam	Persen	50	50	60	65	70	75	80	80	Sekretariat Daerah
20	Persentase efektifitas kebijakan yang diimplementasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan aspek ketahanan pangan dan pertanian	Persen	60	60	60	65	70	75	80	80	Sekretariat Daerah
21	Persentase efektifitas kebijakan yang diimplementasikan untuk	Persen	50	50	60	65	70	75	80	80	Sekretariat Daerah



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan aspek sarana perekonomian										
22	Persentase penguatan kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat berbasis kinerja	Persen	100	100	50	75	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
23	Persentase penataan kelembagaan berbasis kinerja	Persen	100	100	50	75	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
24	Persentase tingkat kepatuhan unit pelaksanaan pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	N/A	7	12	27	45	69	100	100	Sekretariat Daerah
25	Persentase unit pelayanan publik bidang pertanian yang mengikuti kompetisi Abdibaktitani tingkat Nasional	Persen	5	0	15	0	15	0	15	15	Sekretariat Daerah
26	Persentase Perangkat Daerah Provinsi dengan ketatalaksanaan baik	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
27	Persentase dokumen kinerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang disusun sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	58	N/A	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
28	Persentase dokumen kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disusun sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	77	N/A	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
29	Persentase rencana aksi Reformasi Birokrasi yang diimplementasikan	Persen	N/A	N/A	70	75	80	85	90	90	Sekretariat Daerah



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
30	Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi berkategori 'B'	Persen	N/A	N/A	N/A	8	15	22	30	30	Sekretariat Daerah
31	Persentase Pemberitaan Positif di Media	Persen	56	56,5	56,5	57	57,5	58	58,5	58,5	Sekretariat Daerah
32	Persentase Hubungan Stakeholder Kehumasan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
33	Persentase Pemohon Informasi yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
34	Persentase Acara Pimpinan yang Terdokumentasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
35	Persentase Acara Pimpinan yang Terpublikasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
36	Persentase Layanan Keprotokolan KDH, WKDH, dan Sekda yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
XXXVI II.	Sekretariat DPRD										
1	Tingkat Fasilitasi Pelaksanaan Peran Dan Fungsi Legislasi Serta Pengawasan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
2	Tingkat Fasilitasi Hubungan kelembagaan DPRD, penjangkaran aspirasi serta pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran DPRD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
3	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Sekretariat DPRD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Persentase ketersediaan data Kinerja Sekretariat DPRD dan DPRD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
XXXIV. Penghubung											
1	Persentase Koordinasi Jejaring Kerja Dengan Stakeholder	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penghubung
2	Persentase Fasilitasi Keprotokolan Yang Dilayani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penghubung
3	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penghubung
4	Persentase Penyelenggaraan Promosi Potensi Pembangunan Jawa Barat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penghubung
XXXV. Inspektorat											
1	Penurunan jumlah temuan APIP terhadap Perangkat Daerah (PD) Provinsi	Persen	12	N/A	5	5	5	5	5	5	Inspektorat
2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP terhadap PD Provinsi	Persen	95	N/A	80	85	90	95	100	100	Inspektorat
3	Persentase penanganan kasus pengaduan masyarakat	Persen	57,1	75	80	80	90	90	100	100	Inspektorat
4	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Inspektorat
5	Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang nilai EPPD masuk kategori Sangat Tinggi (ST)	Persen	79	81	82	89	100	100	100	100	Inspektorat
6	Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP-nya adalah \geq A	Persen	61	63	70	80	90	100	100	100	Inspektorat



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Pemenuhan pelaksanaan Reviu atas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Inspektorat
8	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang nilai SAKIP-nya adalah \geq BB	Pemerintah Daerah	2	2	5	10	15	20	25	25	Inspektorat
9	Pemenuhan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Inspektorat
10	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI	Persen	66,8	66,4	75	75	80	80	90	90	Inspektorat
11	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang opini atas LKPD adalah WTP	Pemerintah Daerah	25	N/A	25	26	27	27	27	27	Inspektorat
12	Persentase jumlah PD yang mengimplementasikan SPIP	Persen	N/A	N/A	30	50	75	90	100	100	Inspektorat
13	Nilai evaluasi monitoring dan evaluasi RAD-PPK Pemerintah Daerah Provinsi/Kab./Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Inspektorat
14	Persentase Perangkat Daerah yang dicanangkan menjadi Zona Integritas (ZI)	Persen	N/A	N/A	80	90	100	100	100	100	Inspektorat
15	Jumlah PD Zona Integrasi yang akan ditetapkan menjadi WBK [WBBM]	Perangkat Daerah	N/A	1	2	3	4	5	5	5	Inspektorat
16	Persentase pemenuhan Infrastruktur kebijakan peningkatan kapabilitas APiP	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Inspektorat
17	Persentase permohonan konsultasi yang mampu dilayani	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	Inspektorat

Sumber: Hasil proyeksi, 2019



8.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota

Arah kebijakan pembangunan seluruh kabupaten dan kota di bawah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat mendukung pencapaian 5 (lima) indikator kinerja makro Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari:

- a. Indeks Pembangunan Manusia, beserta indikator komponen pembentuknya, meliputi:
 - 1) Rata-Rata Lama Sekolah
 - 2) Angka Harapan Lama Sekolah
 - 3) Angka Harapan Hidup
 - 4) Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan
- b. Persentase Penduduk Miskin
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka
- d. Laju Pertumbuhan Ekonomi
- e. Indeks Gini

Target dukungan terhadap 5 (lima) indikator makro dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 disajikan pada tabel-tabel berikut ini.



Tabel 8.5
Penetapan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten dan Kota
Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

NO	KABUPATEN/KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (poin)							KONDISI AKHIR
		KONDISI AWAL		TARGET					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kabupaten Bogor	69,13	69,74	70,36	70,98	71,61	72,24	72,88	72,88
2	Kabupaten Sukabumi	65,49	65,96	66,44	66,92	67,40	67,89	68,38	68,38
3	Kabupaten Cianjur	63,7	64,22	64,74	65,26	65,79	66,32	66,86	66,86
4	Kabupaten Bandung	71,02	71,64	72,27	72,91	73,55	74,19	74,85	74,85
5	Kabupaten Garut	64,52	65,25	65,99	66,74	67,50	68,27	69,05	69,05
6	Kabupaten Tasikmalaya	64,14	64,58	65,03	65,48	65,93	66,38	66,84	66,84
7	Kabupaten Ciamis	68,87	69,29	69,72	70,15	70,58	71,02	71,45	71,45
8	Kabupaten Kuningan	67,78	68,19	68,61	69,02	69,44	69,86	70,29	70,29
9	Kabupaten Cirebon	67,39	67,99	68,59	69,19	69,80	70,42	71,04	71,04
10	Kabupaten Majalengka	65,92	66,48	67,05	67,63	68,21	68,79	69,38	69,38
11	Kabupaten Sumedang	70,07	70,48	70,88	71,30	71,71	72,12	72,54	72,54
12	Kabupaten Indramayu	65,58	66,25	66,92	67,60	68,29	68,98	69,68	69,68
13	Kabupaten Subang	67,73	68,30	68,88	69,47	70,06	70,65	71,25	71,25
14	Kabupaten Purwakarta	69,28	69,84	70,40	70,97	71,54	72,12	72,70	72,70
15	Kabupaten Karawang	69,17	69,83	70,49	71,16	71,83	72,51	73,20	73,20
16	Kabupaten Bekasi	72,63	73,28	73,93	74,60	75,26	75,94	76,61	76,61



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	KABUPATEN/KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (poin)							KONDISI AKHIR
		KONDISI AWAL		TARGET					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
17	Kabupaten Bandung Barat	66,63	67,32	68,02	68,73	69,45	70,17	70,90	70,90
18	Kabupaten Pangandaran	66,60	67,08	67,56	68,04	68,53	69,02	69,51	69,51
19	Kota Bogor	75,16	75,75	76,34	76,93	77,53	78,14	78,75	78,75
20	Kota Sukabumi	73,03	73,60	74,17	74,74	75,32	75,90	76,49	76,49
21	Kota Bandung	80,31	80,76	81,21	81,66	82,11	82,57	83,03	83,03
22	Kota Cirebon	74,00	74,44	74,88	75,33	75,77	76,22	76,67	76,67
23	Kota Bekasi	80,3	80,72	81,15	81,58	82,01	82,44	82,87	82,87
24	Kota Depok	79,83	80,22	80,62	81,02	81,42	81,82	82,23	82,23
25	Kota Cimahi	76,95	77,23	77,51	77,79	78,07	78,35	78,63	78,63
26	Kota Tasikmalaya	71,51	72,25	73,00	73,75	74,51	75,28	76,06	76,06
27	Kota Banjar	70,79	71,50	72,22	72,95	73,69	74,43	75,18	75,18

Sumber: Hasil proyeksi, 2019



Tabel 8.6
Penetapan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten dan Kota
Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

NO	KABUPATEN/KOTA	RATA-RATA LAMA SEKOLAH (Tahun)							KONDISI AKHIR
		KONDISI AWAL		TARGET					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kabupaten Bogor	7,84	7,96	8,07	8,19	8,32	8,44	8,56	8,56
2	Kabupaten Sukabumi	6,79	6,91	7,04	7,16	7,29	7,42	7,56	7,56
3	Kabupaten Cianjur	6,92	7,03	7,14	7,25	7,37	7,49	7,60	7,60
4	Kabupaten Bandung	8,51	8,59	8,68	8,77	8,85	8,94	9,03	9,03
5	Kabupaten Garut	7,28	7,41	7,54	7,67	7,81	7,95	8,09	8,09
6	Kabupaten Tasikmalaya	7,12	7,23	7,35	7,47	7,58	7,71	7,83	7,83
7	Kabupaten Ciamis	7,59	7,69	7,79	7,90	8,00	8,11	8,21	8,21
8	Kabupaten Kuningan	7,35	7,44	7,54	7,64	7,74	7,83	7,94	7,94
9	Kabupaten Cirebon	6,61	6,75	6,89	7,04	7,18	7,33	7,49	7,49
10	Kabupaten Majalengka	6,90	6,95	6,99	7,04	7,08	7,13	7,18	7,18
11	Kabupaten Sumedang	7,98	8,10	8,23	8,35	8,48	8,61	8,74	8,74
12	Kabupaten Indramayu	5,97	6,16	6,35	6,55	6,75	6,96	7,18	7,18
13	Kabupaten Subang	6,83	6,97	7,12	7,26	7,42	7,57	7,73	7,73
14	Kabupaten Purwakarta	7,74	7,91	8,08	8,25	8,43	8,62	8,80	8,80
15	Kabupaten Karawang	7,34	7,50	7,67	7,84	8,01	8,19	8,37	8,37
16	Kabupaten Bekasi	8,82	8,94	9,07	9,20	9,33	9,46	9,59	9,59



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	KABUPATEN/KOTA	RATA-RATA LAMA SEKOLAH (Tahun)							KONDISI AKHIR
		KONDISI AWAL		TARGET					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
17	Kabupaten Bandung Barat	7,74	7,83	7,92	8,02	8,11	8,21	8,31	8,31
18	Kabupaten Pangandaran	7,37	7,46	7,56	7,66	7,76	7,86	7,96	7,96
19	Kota Bogor	10,29	10,38	10,46	10,55	10,64	10,72	10,81	10,81
20	Kota Sukabumi	9,52	9,79	10,06	10,35	10,64	10,94	11,25	11,25
21	Kota Bandung	10,59	10,65	10,70	10,76	10,81	10,87	10,93	10,93
22	Kota Cirebon	9,88	10,02	10,17	10,32	10,47	10,62	10,78	10,78
23	Kota Bekasi	10,93	11,04	11,16	11,27	11,39	11,50	11,62	11,62
24	Kota Depok	10,84	10,95	11,05	11,16	11,27	11,38	11,49	11,49
25	Kota Cimahi	10,93	11,00	11,07	11,14	11,20	11,27	11,34	11,34
26	Kota Tasikmalaya	9,03	9,19	9,34	9,50	9,67	9,83	10,00	10,00
27	Kota Banjar	8,59	8,84	9,10	9,36	9,63	9,91	10,20	10,20

Sumber: Hasil proyeksi, 2019



Tabel 8.7
Penetapan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten dan Kota
Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

NO	KABUPATEN/KOTA	ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH (Tahun)							KONDISI AKHIR
		KONDISI AWAL		TARGET					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kabupaten Bogor	12,43	12,62	12,82	13,02	13,23	13,43	13,64	13,64
2	Kabupaten Sukabumi	12,19	12,29	12,39	12,49	12,59	12,69	12,80	12,80
3	Kabupaten Cianjur	11,89	11,98	12,07	12,16	12,25	12,35	12,44	12,44
4	Kabupaten Bandung	12,43	12,67	12,92	13,18	13,43	13,70	13,97	13,97
5	Kabupaten Garut	11,73	11,88	12,03	12,18	12,33	12,48	12,64	12,64
6	Kabupaten Tasikmalaya	12,47	12,52	12,56	12,61	12,65	12,70	12,75	12,75
7	Kabupaten Ciamis	13,66	13,71	13,76	13,81	13,87	13,92	13,97	13,97
8	Kabupaten Kuningan	12,06	12,15	12,24	12,34	12,43	12,52	12,62	12,62
9	Kabupaten Cirebon	12,21	12,40	12,59	12,79	12,98	13,18	13,39	13,39
10	Kabupaten Majalengka	12,18	12,39	12,60	12,82	13,04	13,27	13,49	13,49
11	Kabupaten Sumedang	12,93	12,96	12,98	13,01	13,03	13,06	13,08	13,08
12	Kabupaten Indramayu	12,21	12,43	12,66	12,89	13,13	13,37	13,61	13,61
13	Kabupaten Subang	11,67	11,74	11,82	11,89	11,97	12,05	12,12	12,12
14	Kabupaten Purwakarta	11,89	12,06	12,24	12,42	12,60	12,78	12,97	12,97
15	Kabupaten Karawang	11,96	12,13	12,30	12,48	12,65	12,83	13,01	13,01
16	Kabupaten Bekasi	12,63	12,95	13,28	13,62	13,97	14,32	14,69	14,69



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	KABUPATEN/KOTA	ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH (Tahun)							KONDISI AKHIR
		KONDISI AWAL		TARGET					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
17	Kabupaten Bandung Barat	11,79	12,00	12,21	12,42	12,64	12,86	13,09	13,09
18	Kabupaten Pangandaran	12,03	12,17	12,31	12,46	12,61	12,76	12,91	12,91
19	Kota Bogor	13,37	13,71	14,06	14,41	14,78	15,15	15,54	15,54
20	Kota Sukabumi	13,39	13,47	13,55	13,63	13,71	13,79	13,88	13,88
21	Kota Bandung	13,90	14,10	14,30	14,51	14,72	14,93	15,14	15,14
22	Kota Cirebon	13,08	13,21	13,34	13,47	13,60	13,73	13,87	13,87
23	Kota Bekasi	13,51	13,59	13,67	13,75	13,83	13,91	13,99	13,99
24	Kota Depok	13,87	14,03	14,20	14,37	14,54	14,71	14,88	14,88
25	Kota Cimahi	13,76	13,78	13,79	13,81	13,82	13,84	13,86	13,86
26	Kota Tasikmalaya	13,41	13,49	13,56	13,64	13,72	13,80	13,88	13,88
27	Kota Banjar	13,19	13,43	13,67	13,92	14,17	14,42	14,68	14,68

Sumber: Hasil proyeksi, 2019



Tabel 8.8
Penetapan Angka Harapan Hidup Kabupaten dan Kota
Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

NO	KABUPATEN/KOTA	ANGKA HARAPAN HIDUP (Tahun)							KONDISI AKHIR
		KONDISI AWAL		TARGET					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kabupaten Bogor	70,70	70,76	70,82	70,87	70,93	70,99	71,05	71,05
2	Kabupaten Sukabumi	70,26	70,40	70,54	70,69	70,83	70,97	71,12	71,12
3	Kabupaten Cianjur	69,49	69,60	69,72	69,83	69,94	70,05	70,17	70,17
4	Kabupaten Bandung	73,13	73,17	73,21	73,25	73,30	73,34	73,38	73,38
5	Kabupaten Garut	70,84	70,93	71,03	71,12	71,21	71,31	71,40	71,40
6	Kabupaten Tasikmalaya	68,71	68,91	69,12	69,32	69,53	69,73	69,94	69,94
7	Kabupaten Ciamis	71,07	71,27	71,46	71,66	71,86	72,06	72,26	72,26
8	Kabupaten Kuningan	72,88	73,05	73,22	73,39	73,56	73,72	73,90	73,90
9	Kabupaten Cirebon	71,49	71,55	71,61	71,67	71,73	71,79	71,85	71,85
10	Kabupaten Majalengka	69,39	69,59	69,79	69,99	70,19	70,40	70,60	70,60
11	Kabupaten Sumedang	72,00	72,04	72,07	72,11	72,15	72,18	72,22	72,22
12	Kabupaten Indramayu	70,86	71,01	71,17	71,32	71,48	71,63	71,78	71,78
13	Kabupaten Subang	71,71	71,84	71,97	72,10	72,23	72,36	72,50	72,50
14	Kabupaten Purwakarta	70,42	70,54	70,65	70,77	70,89	71,01	71,13	71,13
15	Kabupaten Karawang	71,64	71,69	71,74	71,79	71,84	71,89	71,94	71,94
16	Kabupaten Bekasi	73,30	73,34	73,38	73,43	73,47	73,51	73,55	73,55



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	KABUPATEN/KOTA	ANGKA HARAPAN HIDUP (Tahun)							KONDISI AKHIR
		KONDISI AWAL		TARGET					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
17	Kabupaten Bandung Barat	71,87	71,95	72,03	72,11	72,18	72,26	72,34	72,34
18	Kabupaten Pangandaran	70,56	70,75	70,95	71,14	71,33	71,53	71,72	71,72
19	Kota Bogor	73,01	73,12	73,23	73,34	73,45	73,57	73,68	73,68
20	Kota Sukabumi	71,95	72,00	72,05	72,10	72,15	72,21	72,26	72,26
21	Kota Bandung	73,86	73,88	73,90	73,92	73,93	73,95	73,97	73,97
22	Kota Cirebon	71,86	71,89	71,92	71,95	71,97	72,00	72,03	72,03
23	Kota Bekasi	74,63	74,74	74,86	74,98	75,09	75,21	75,32	75,32
24	Kota Depok	74,04	74,06	74,09	74,11	74,14	74,16	74,18	74,18
25	Kota Cimahi	73,61	73,62	73,64	73,65	73,66	73,67	73,69	73,69
26	Kota Tasikmalaya	71,48	71,62	71,75	71,89	72,03	72,17	72,31	72,31
27	Kota Banjar	70,39	70,44	70,48	70,53	70,58	70,63	70,67	70,67

Sumber: Hasil proyeksi, 2019



Tabel 8.9
Penetapan Pendapatan Per Kapita Kabupaten dan Kota
Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

NO	KABUPATEN/KOTA	PENDAPATAN PER KAPITA (Ribu Rupiah)							KONDISI AKHIR
		KONDISI AWAL		TARGET					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kabupaten Bogor	9.901	10.130	10.363	10.603	10.847	11.098	11.354	11.354
2	Kabupaten Sukabumi	8.263	8.384	8.506	8.630	8.756	8.883	9.013	9.013
3	Kabupaten Cianjur	7.300	7.460	7.624	7.791	7.962	8.137	8.316	8.316
4	Kabupaten Bandung	9.854	10.087	10.326	10.570	10.820	11.076	11.338	11.338
5	Kabupaten Garut	7.270	7.521	7.782	8.051	8.329	8.617	8.915	8.915
6	Kabupaten Tasikmalaya	7.250	7.362	7.477	7.592	7.710	7.830	7.951	7.951
7	Kabupaten Ciamis	8.658	8.791	8.926	9.063	9.202	9.344	9.487	9.487
8	Kabupaten Kuningan	8.736	8.836	8.937	9.039	9.142	9.246	9.352	9.352
9	Kabupaten Cirebon	9.650	9.820	9.992	10.168	10.346	10.528	10.713	10.713
10	Kabupaten Majalengka	8.833	9.001	9.172	9.346	9.524	9.705	9.890	9.890
11	Kabupaten Sumedang	9.569	9.765	9.966	10.170	10.379	10.592	10.809	10.809
12	Kabupaten Indramayu	9.014	9.109	9.205	9.302	9.400	9.499	9.599	9.599
13	Kabupaten Subang	10.206	10.458	10.715	10.979	11.250	11.527	11.811	11.811
14	Kabupaten Purwakarta	10.941	11.056	11.173	11.291	11.410	11.531	11.652	11.652
15	Kabupaten Karawang	10.703	10.955	11.214	11.478	11.749	12.026	12.309	12.309
16	Kabupaten Bekasi	10.790	10.942	11.095	11.251	11.409	11.569	11.732	11.732



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	KABUPATEN/KOTA	PENDAPATAN PER KAPITA (Ribu Rupiah)							KONDISI AKHIR
		KONDISI AWAL		TARGET					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
17	Kabupaten Bandung Barat	8.002	8.242	8.489	8.744	9.006	9.277	9.555	9.555
18	Kabupaten Pangandaran	8.588	8.689	8.790	8.893	8.997	9.103	9.209	9.209
19	Kota Bogor	10.940	11.056	11.174	11.293	11.413	11.534	11.657	11.657
20	Kota Sukabumi	10.188	10.339	10.492	10.648	10.806	10.966	11.129	11.129
21	Kota Bandung	16.033	16.315	16.602	16.894	17.191	17.493	17.801	17.801
22	Kota Cirebon	11.100	11.239	11.379	11.522	11.666	11.811	11.959	11.959
23	Kota Bekasi	15.378	15.614	15.853	16.096	16.342	16.593	16.847	16.847
24	Kota Depok	14.727	14.872	15.019	15.167	15.316	15.467	15.620	15.620
25	Kota Cimahi	11.353	11.544	11.738	11.935	12.136	12.340	12.548	12.548
26	Kota Tasikmalaya	9.497	9.867	10.252	10.652	11.067	11.498	11.946	11.946
27	Kota Banjar	9.987	10.140	10.295	10.452	10.612	10.775	10.940	10.940

Sumber: Hasil proyeksi, 2019



Tabel 8.10
Penetapan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten dan Kota
Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

NO	KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (Persen)							KONDISI AKHIR
		KONDISI AWAL		TARGET					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kabupaten Bogor	8,57	8,40	8,23	8,07	7,90	7,75	7,59	7,59
2	Kabupaten Sukabumi	8,04	7,77	7,51	7,26	7,02	6,79	6,56	6,56
3	Kabupaten Cianjur	11,41	11,18	10,96	10,74	10,52	10,31	10,11	10,11
4	Kabupaten Bandung	7,36	7,21	7,07	6,93	6,79	6,65	6,52	6,52
5	Kabupaten Garut	11,27	11,04	10,82	10,61	10,40	10,19	9,98	9,98
6	Kabupaten Tasikmalaya	10,84	10,62	10,41	10,20	10,00	9,80	9,60	9,60
7	Kabupaten Ciamis	8,20	8,04	7,88	7,72	7,56	7,41	7,26	7,26
8	Kabupaten Kuningan	13,27	13,00	12,74	12,49	12,24	12,00	11,76	11,76
9	Kabupaten Cirebon	12,97	12,71	12,46	12,21	11,96	11,72	11,49	11,49
10	Kabupaten Majalengka	12,60	12,35	12,10	11,86	11,62	11,39	11,16	11,16
11	Kabupaten Sumedang	10,53	10,32	10,11	9,91	9,71	9,52	9,33	9,33
12	Kabupaten Indramayu	13,67	13,40	13,13	12,87	12,61	12,36	12,11	12,11
13	Kabupaten Subang	10,77	10,55	10,34	10,14	9,93	9,74	9,54	9,54
14	Kabupaten Purwakarta	9,06	8,88	8,70	8,53	8,36	8,19	8,03	8,03
15	Kabupaten Karawang	10,25	10,05	9,84	9,65	9,45	9,27	9,08	9,08
16	Kabupaten Bekasi	4,73	4,64	4,54	4,45	4,36	4,28	4,19	4,19



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (Persen)							KONDISI AKHIR
		KONDISI AWAL		TARGET					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
17	Kabupaten Bandung Barat	11,49	11,26	11,03	10,81	10,60	10,39	10,18	10,18
18	Kabupaten Pangandaran	10,00	9,80	9,60	9,41	9,22	9,04	8,86	8,86
19	Kota Bogor	7,11	6,86	6,63	6,40	6,18	5,96	5,76	5,76
20	Kota Sukabumi	8,48	8,31	8,14	7,98	7,82	7,67	7,51	7,51
21	Kota Bandung	4,17	4,09	4,00	3,92	3,85	3,77	3,69	3,69
22	Kota Cirebon	9,66	9,47	9,28	9,09	8,91	8,73	8,56	8,56
23	Kota Bekasi	4,79	4,69	4,60	4,51	4,42	4,33	4,24	4,24
24	Kota Depok	2,34	2,29	2,25	2,20	2,16	2,12	2,07	2,07
25	Kota Cimahi	5,76	5,64	5,53	5,42	5,31	5,21	5,10	5,10
26	Kota Tasikmalaya	14,80	14,27	13,75	13,25	12,77	12,31	11,87	11,87
27	Kota Banjar	7,06	6,92	6,78	6,64	6,51	6,38	6,25	6,25

Sumber: Hasil proyeksi, 2019



Tabel 8.11
Penetapan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten dan Kota
Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

NO	KABUPATEN/KOTA	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (Persen)							KONDISI AKHIR
		KONDISI AWAL		TARGET					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kabupaten Bogor	9,55	9,36	9,17	8,99	8,81	8,63	8,46	8,46
2	Kabupaten Sukabumi	7,66	7,51	7,36	7,21	7,07	6,92	6,79	6,79
3	Kabupaten Cianjur	10,10	9,90	9,70	9,51	9,32	9,13	8,95	8,95
4	Kabupaten Bandung	3,92	3,53	3,18	2,86	2,57	2,31	2,08	2,08
5	Kabupaten Garut	7,86	7,70	7,55	7,40	7,25	7,10	6,96	6,96
6	Kabupaten Tasikmalaya	6,61	6,55	6,49	6,44	6,38	6,33	6,27	6,27
7	Kabupaten Ciamis	5,17	5,07	4,97	4,87	4,77	4,67	4,58	4,58
8	Kabupaten Kuningan	7,94	7,78	7,63	7,47	7,32	7,18	7,03	7,03
9	Kabupaten Cirebon	9,61	8,65	7,78	7,01	6,31	5,67	5,11	5,11
10	Kabupaten Majalengka	5,02	4,52	4,07	3,66	3,29	2,96	2,67	2,67
11	Kabupaten Sumedang	7,15	7,01	6,87	6,73	6,59	6,46	6,33	6,33
12	Kabupaten Indramayu	8,64	8,47	8,30	8,13	7,97	7,81	7,65	7,65
13	Kabupaten Subang	8,74	8,57	8,39	8,23	8,06	7,90	7,74	7,74
14	Kabupaten Purwakarta	9,11	8,93	8,75	8,57	8,40	8,23	8,07	8,07
15	Kabupaten Karawang	9,55	9,36	9,17	8,99	8,81	8,63	8,46	8,46
16	Kabupaten Bekasi	10,97	10,75	10,54	10,32	10,12	9,92	9,72	9,72



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	KABUPATEN/KOTA	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (Persen)							KONDISI AKHIR
		KONDISI AWAL		TARGET					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
17	Kabupaten Bandung Barat	9,33	9,14	8,96	8,78	8,61	8,43	8,26	8,26
18	Kabupaten Pangandaran	3,34	3,27	3,21	3,14	3,08	3,02	2,96	2,96
19	Kota Bogor	9,57	9,38	9,19	9,01	8,83	8,65	8,48	8,48
20	Kota Sukabumi	8,00	7,84	7,68	7,53	7,38	7,23	7,09	7,09
21	Kota Bandung	8,44	8,27	8,11	7,94	7,78	7,63	7,48	7,48
22	Kota Cirebon	9,29	9,10	8,92	8,74	8,57	8,40	8,23	8,23
23	Kota Bekasi	9,32	9,13	8,95	8,77	8,60	8,42	8,26	8,26
24	Kota Depok	7,00	6,53	6,10	5,69	5,31	4,96	4,63	4,63
25	Kota Cimahi	8,43	8,26	8,10	7,93	7,78	7,62	7,47	7,47
26	Kota Tasikmalaya	6,89	6,36	5,86	5,41	4,99	4,60	4,24	4,24
27	Kota Banjar	5,97	5,85	5,73	5,62	5,51	5,40	5,29	5,29

Sumber: Hasil proyeksi, 2019



Tabel 8.12
Penetapan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota
Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

NO	KABUPATEN/KOTA	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (Persen)							KONDISI AKHIR
		KONDISI AWAL		TARGET					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kabupaten Bogor	5,96	6,08	6,20	6,32	6,45	6,58	6,71	6,71
2	Kabupaten Sukabumi	5,14	5,19	5,24	5,30	5,35	5,40	5,46	5,46
3	Kabupaten Cianjur	5,72	5,98	6,25	6,54	6,83	7,14	7,47	7,47
4	Kabupaten Bandung	6,17	6,23	6,29	6,36	6,42	6,48	6,55	6,55
5	Kabupaten Garut	4,89	4,99	5,09	5,19	5,29	5,40	5,51	5,51
6	Kabupaten Tasikmalaya	5,95	6,19	6,44	6,69	6,96	7,24	7,53	7,53
7	Kabupaten Ciamis	5,21	5,31	5,42	5,53	5,64	5,75	5,87	5,87
8	Kabupaten Kuningan	6,36	6,39	6,42	6,45	6,48	6,51	6,54	6,54
9	Kabupaten Cirebon	5,05	5,15	5,25	5,36	5,47	5,58	5,69	5,69
10	Kabupaten Majalengka	6,81	7,08	7,37	7,66	7,97	8,29	8,62	8,62
11	Kabupaten Sumedang	6,23	6,48	6,74	7,01	7,29	7,58	7,88	7,88
12	Kabupaten Indramayu	1,45	1,48	1,51	1,54	1,57	1,60	1,63	1,63
13	Kabupaten Subang	5,10	5,20	5,31	5,41	5,52	5,63	5,74	5,74
14	Kabupaten Purwakarta	5,12	5,22	5,33	5,43	5,54	5,65	5,77	5,77
15	Kabupaten Karawang	5,76	5,82	5,88	5,93	5,99	6,05	6,11	6,11
16	Kabupaten Bekasi	5,78	5,90	6,01	6,13	6,26	6,38	6,51	6,51



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	KABUPATEN/KOTA	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (Persen)							KONDISI AKHIR
		KONDISI AWAL		TARGET					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
17	Kabupaten Bandung Barat	5,69	5,80	5,92	6,04	6,16	6,28	6,41	6,41
18	Kabupaten Pangandaran	5,10	5,18	5,26	5,34	5,42	5,51	5,59	5,59
19	Kota Bogor	6,12	6,24	6,37	6,49	6,62	6,76	6,89	6,89
20	Kota Sukabumi	5,43	5,54	5,65	5,76	5,88	6,00	6,12	6,12
21	Kota Bandung	7,21	7,35	7,50	7,65	7,80	7,96	8,12	8,12
22	Kota Cirebon	5,79	5,91	6,02	6,14	6,27	6,39	6,52	6,52
23	Kota Bekasi	5,73	5,84	5,96	6,08	6,20	6,33	6,45	6,45
24	Kota Depok	6,65	6,78	6,92	7,06	7,20	7,34	7,49	7,49
25	Kota Cimahi	5,43	5,54	5,65	5,76	5,88	6,00	6,12	6,12
26	Kota Tasikmalaya	6,07	6,13	6,19	6,25	6,32	6,38	6,44	6,44
27	Kota Banjar	5,12	5,22	5,33	5,43	5,54	5,65	5,77	5,77

Sumber: Hasil proyeksi, 2019



Tabel 8.13
Penetapan Indeks Gini Kabupaten dan Kota
Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

NO	KABUPATEN/KOTA	INDEKS GINI (Poin)							KONDISI AKHIR
		KONDISI AWAL		TARGET					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kabupaten Bogor	0,38	0,38	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36
2	Kabupaten Sukabumi	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31
3	Kabupaten Cianjur	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32
4	Kabupaten Bandung	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37	0,36	0,36
5	Kabupaten Garut	0,37	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34
6	Kabupaten Tasikmalaya	0,32	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30
7	Kabupaten Ciamis	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34
8	Kabupaten Kuningan	0,32	0,32	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30
9	Kabupaten Cirebon	0,36	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33
10	Kabupaten Majalengka	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
11	Kabupaten Sumedang	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36
12	Kabupaten Indramayu	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27
13	Kabupaten Subang	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32
14	Kabupaten Purwakarta	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36
15	Kabupaten Karawang	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32
16	Kabupaten Bekasi	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	KABUPATEN/KOTA	INDEKS GINI (Poin)							KONDISI AKHIR
		KONDISI AWAL		TARGET					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
17	Kabupaten Bandung Barat	0,41	0,40	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38
18	Kabupaten Pangandaran	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
19	Kota Bogor	0,41	0,40	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38
20	Kota Sukabumi	0,40	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37
21	Kota Bandung	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40
22	Kota Cirebon	0,41	0,41	0,40	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38
23	Kota Bekasi	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
24	Kota Depok	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
25	Kota Cimahi	0,37	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34
26	Kota Tasikmalaya	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,39	0,39
27	Kota Banjar	0,38	0,38	0,37	0,37	0,36	0,36	0,35	0,35

Sumber: Hasil proyeksi, 2019



BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 dan RPJMN.

Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur proses penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2024.

9.1. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 merupakan pedoman bagi pemerintah provinsi dalam menyusun RKPD mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Selain itu, RPJMD Provinsi Jawa Barat merupakan dokumen yang harus dipedomani oleh pemerintah daerah kabupaten/kota se-Jawa Barat dalam menyusun dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha.
2. Gubernur dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.



3. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya,
4. Gubernur berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 kepada masyarakat.
5. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat berkewajiban menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 berpedoman pada RPJMD Tahun 2018-2023, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
6. Penyusunan RPJMD kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Jawa Barat berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023 sehingga terwujud sinergi dan kolaborasi pembangunan di Jawa Barat.

9.2. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Tahun 2023. Sebagaimana diketahui, Tahun 2023 adalah tahun terakhir RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan RPJMD periode berikutnya belum disusun. Untuk itu, penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, dan RPJMN Tahun 2020-2024, dan RKP Tahun 2024.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan Tahun 2023, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional dan provinsi, dan lain-lain.

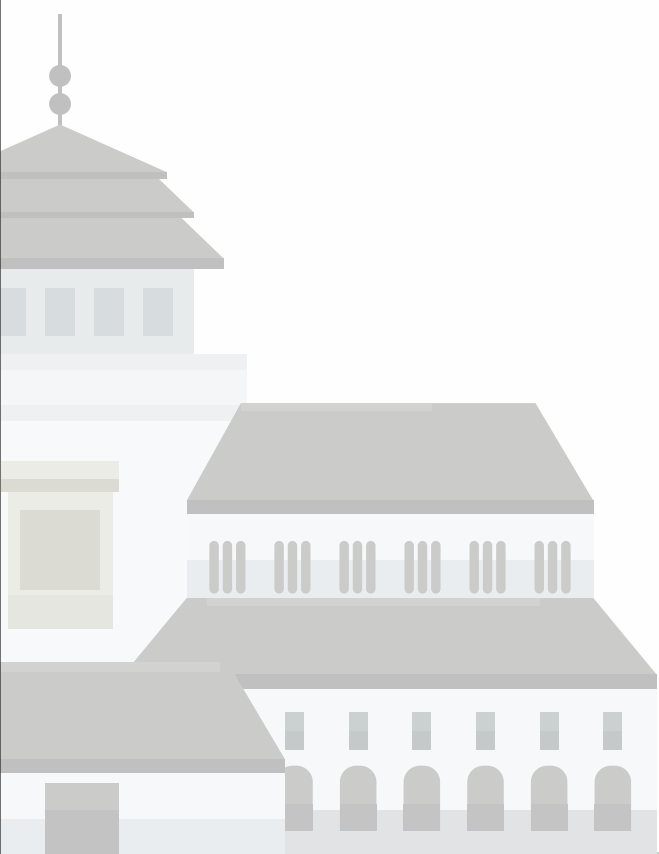


Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD Tahun 2018–2023 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa barat mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, dan mengawal terwujudnya Jabar Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi.



GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

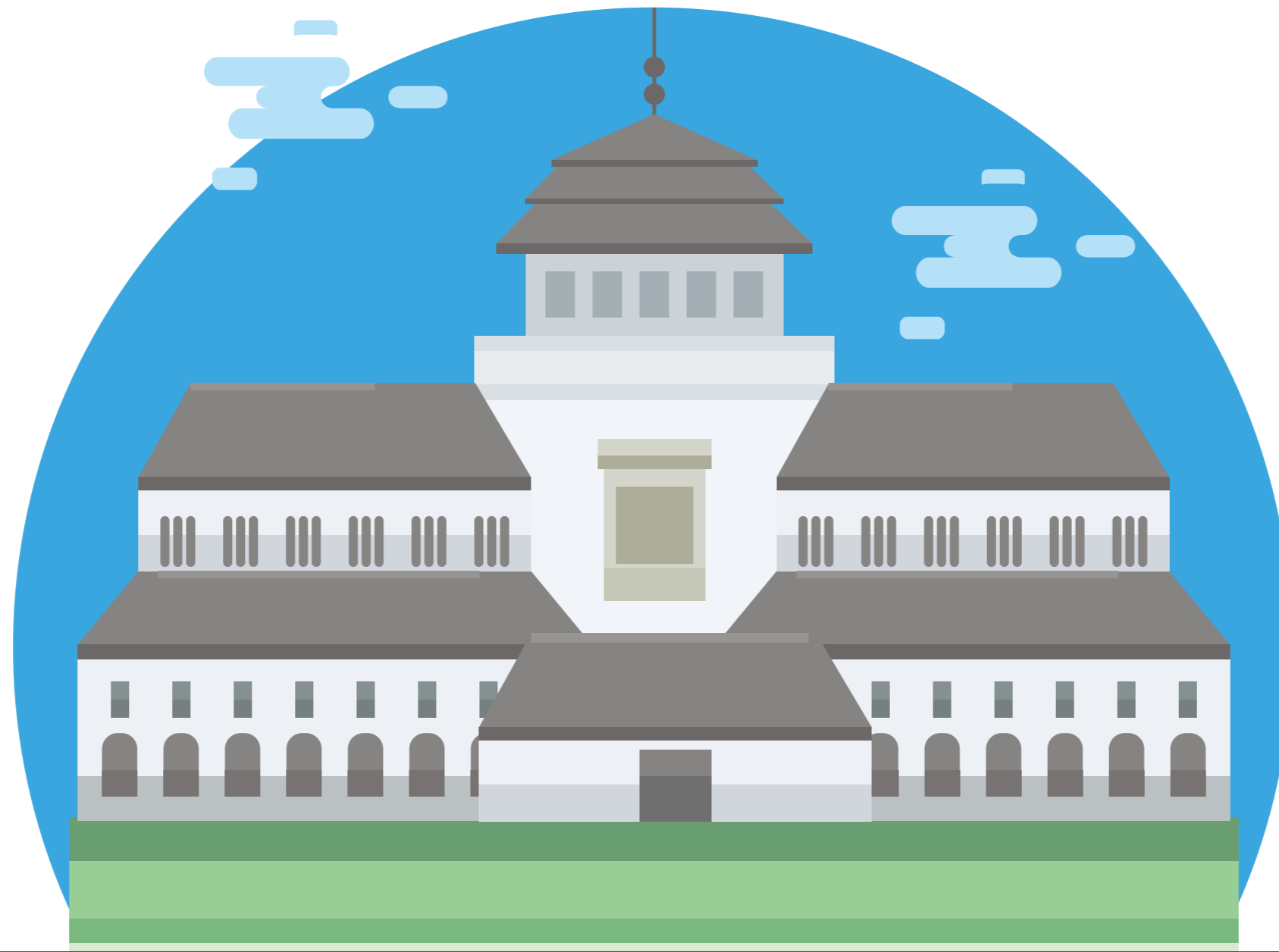




BUKU TABEL

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT 2018 - 2023





Tabel 1
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PENGANGGARAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal				2020		2021		2022		2023		KONDISI AKHIR		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN JABAR JUARA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			2017	2018	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
VI: TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI																			
Misi 1 : Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertakwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban																			
Tujuan:																			
1.1.	Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial	a.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	68.5	68.7	69,1-69,5		69,6-70		70,1-70,5		70,6-71		70,6-71			IKU Pemerintah Daerah	
Sasaran:																			
1.1.1.	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	a.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	68.5	68.7	69,1-69,5		69,6-70		70,1-70,5		70,6-71		70,6-71			IKU Pemerintah Daerah	
		b.	Indeks Demokrasi	Poin	68.78	73.91	70,79-71,78		71,79-72,78		72,79-73,78		73,79-74,78		73,79-74,78			IKU Pemerintah Daerah	
Program:																			
1	Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1	Tingkat Pemahaman Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan	Poin	70.78	70.78	71.78	1,231,790,000	72.78	1,556,600,000	73.78	1,713,578,000	74.78	1,647,460,000	74.78	6,149,428,000	PPD: Pendidikan agama dan rumah ibadah juara JJ: Masjid Juara, Manusia Pancasila	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
2	Program Bina Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	1	Tingkat Ketahanan Lingkungan Strategis Daerah	Poin	70.78	70.78	71.78	1,450,900,000	72.78	1,761,000,000	73.78	1,956,960,000	74.78	1,923,600,000	74.78	7,092,460,000	PPD: Pendidikan agama dan rumah ibadah juara JJ: Masjid Juara, Manusia Pancasila	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3	Program Pembinaan, Pemahaman dan Pengamalan Keagamaan	1	Persentase Bahan Kebijakan Pembinaan, Pemahaman Dan Pengamalan Keagamaan	Persen	89	90	91	11,758,202,379	91.5	13,969,609,464	92	15,442,581,583	92.5	15,336,350,066	92.5	56,506,743,492	PPD: Pendidikan agama dan rumah ibadah juara JJ: Pesantren Juara, Masjid Juara,Ulama Juara	Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial, Sekretariat Daerah	
Misi 2 : Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif																			
Tujuan:																			
2.1.	Meningkatnya Kebahagiaan dan Kesejahteraan Masyarakat	a.	Indeks Kebahagiaan	Poin	69.58	70-71	70 - 71		71-73,5		71-73,5		73,6-76		73,6 - 76			IKU Pemerintah Daerah	
Sasaran:																			
2.1.1.	Meningkatnya Kualitas dan Taraf Hidup Masyarakat	a.	Indeks Kebahagiaan	Poin	69.58	70-71	70 - 71		71-73,5		71-73,5		73,6-76		73,6 - 76			IKU Pemerintah Daerah	
Program:																			
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial						1,968,325,943		7,346,038,920		9,849,054,907		7,195,619,020		26,359,038,790	PPD: Subsidi Gratis Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah) JJ:Pelayanan kesehatan untuk warga kurang mampu, Sekolah gratis bagi warga kurang mampu	Dinas Sosial		
		1	Persentase PMKS Yang Mendapat Jaminan Sosial	Persen	0,10	0,10	0,015		0,018		0,020		0,13		0,13				
		2	Persentase PMKS Yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	Persen	0,10	0,10	0,015		0,018		0,020		0,13		0,13				
2	Program Pemberdayaan Sosial						3,427,842,280		5,272,554,494		5,748,726,071		7,542,123,624		21,991,246,469	PPD: Subsidi Gratis Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah) JJ:Pelayanan kesehatan untuk warga kurang mampu, Sekolah gratis bagi warga kurang mampu	Dinas Sosial		
		1	Persentase PSKS Yang Berperan Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persen	40	40	50.00		60.00		70.00		80.00		80.00				
		2	Persentase PSKS Yang Berdaya/Persentase PMKS Yang Pulih Fungsi Sosialnya	Persen	N/A	N/A	50		60		70		80		80				
		3	Persentase Pihak Berperan Aktif Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Kesetiakawanan Dan Restorasi Sosial	Persen	40	40	50.00		60.00		70.00		80.00		80.00				
3	Program pelayanan Rehabilitasi sosial UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum	1	Persentase ABH yang Direhab di PSRABH Cileungsi Bogor dan Satpel	Persen	100	100	100	1,793,208,300	100	2,414,905,000	100	2,658,579,525	100	2,896,044,268	100	9,762,737,092		Dinas Sosial	
4	Program Rehabilitasi Sosial di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	1	Persentase Wanita Tuna Susila Yang Direhabilitasi Sosial Di UPTD PSRTS Dan Satpel - RTM Selama 6 Bulan	Persen	100	300	100	2,392,782,000	100	3,838,800,000	100	3,366,223,686	100	3,657,537,828	100	13,255,343,514		Dinas Sosial	
5	Program Rehabilitasi Sosial di UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja	1	Persentase Remaja Yang Mendapat Pemberdayaan Sosial Di UPTD Dan Satpel	Persen	300	300	100	2,205,706,674	100	3,472,852,656	100	3,123,398,554	100	3,393,698,526	100	12,195,656,410		Dinas Sosial	
6	Program Rehabilitasi Sosial di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh	1	Persentase Penyandang Disabilitas Yang Direhabilitasi Di UPTD PSRPD Cibabat Cimahi	Persen	300	300	100	1,954,878,960	100	4,261,746,623	100	6,726,563,296	100	7,865,499,320	100	20,808,688,199		Dinas Sosial	
7	Program Rehabilitasi Sosial UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan	1	Persentase Lanjut Usia Di Dalam Balai Yg Mendapat Perlindungan Sosial	Persen	100	100	100	5,856,030,700	100	8,546,070,000	100	7,695,361,986	100	8,361,655,240	100	30,459,117,926		Dinas Sosial	
8	Program Rehabilitasi Sosial di UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya	1	Persentase PMKS Yg Mendapat Rehabilitasi Sosial Di Prsbk Dan Satpel - Rtm	Persen	100	100	100	2,264,968,800	100	3,291,840,000	100	2,986,137,936	100	3,244,559,328	100	11,787,506,064		Dinas Sosial	
9	Program Rehabilitasi Sosial di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus	1	Persentase Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus Yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Di UPTD	Persen	100	100	100	6,123,144,000	100	7,416,000,000	100	8,235,447,200	100	8,687,520,000	100	24,338,967,240		Dinas Sosial	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal				2020				2021				2022				2023				KONDISI AKHIR		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN JABAR JUARA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2017	2018	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.						
10	Program Penanganan Fakir Miskin	1	Persentase Keluarga Miskin Dan Kelompok Rentan Yang Meningkatkan Produktifitas Sosial Ekonominya	Persen	0,10	0,10	0,015	3,929,099,042	0,018	10,196,900,880	0,020	20,724,703,953	0,13	22,591,356,192	0,13	57,442,060,067	PPD: Subsidi Gratis Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah) JJ: Pelayanan kesehatan untuk warga kurang mampu, Sekolah gratis bagi warga kurang mampu, Sembako gratis	Dinas Sosial								
11	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	1	Persentase Tenaga Kerja Yang Tersertifikasi	Persen	N/A	N/A	0.22	2,117,981,800	0.24	2,321,452,815	0.26	2,658,319,785	0.29	2,609,288,553	0.29	9,707,042,953	PPD: Subsidi Gratis Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah) JJ: Buruh juara PPD: Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi JJ: Wirausaha baru	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi								
12	Program Pelatihan Kerja Mandiri	1	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kerja Mandiri	Persen	N/A	N/A	0.078	3,274,248,790	0.086	3,839,900,963	0.094	4,397,110,567	0.104	4,316,008,305	0.104	15,827,268,625	PPD: Subsidi Gratis Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah) JJ: Buruh juara PPD: Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi JJ: Wirausaha baru	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi								
13	Program Pelatihan Pekerja Migran	1	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Pekerja Migran	Persen	N/A	N/A	0.039	1,605,600,000	0.043	1,882,980,000	0.047	2,156,220,000	0.052	2,116,449,720	0.052	7,761,249,720	PPD: Akses Pendidikan Untuk Semua JJ: Migran Juara PPD: Subsidi Gratis Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah) JJ: Buruh juara PPD: Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi JJ: Wirausaha baru	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi								
14	Program Pelatihan Kerja Kompetensi	1	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persen	N/A	N/A	0.050	1,538,000,000	0.055	1,789,150,000	0.060	2,038,850,000	0.066	1,881,288,640	0.066	7,247,288,640	PPD: Subsidi Gratis Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah) JJ: Buruh juara PPD: Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi JJ: Wirausaha baru	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi								
15	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Bekerja	Persen	N/A	N/A	68.08	4,550,710,865	74.89	5,314,745,721	82.38	6,070,873,610	90.62	5,854,503,615	90.62	21,790,833,811	PPD: Subsidi Gratis Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah) JJ: Buruh juara	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi								
16	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	1	Persentase Perusahaan Yang Diperiksa Norma Ketenagakerjaan	Persen	N/A	N/A	20	1,486,031,469	20	1,719,082,538	20	1,952,394,451	20	1,963,013,561	20	7,120,522,020	PPD: Subsidi Gratis Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah) JJ: Buruh juara	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi								
Sasaran:																										
2.1.2.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan	a.	Usia Harapan Hidup	Tahun	72.47	72.76	74,87-76,87		76,07-77,27		77,27-78,47		78,47-79,67		78,47-79,67				IKU Pemerintah Daerah							
Program:																										
1	Program Pelayanan Kesehatan							22,981,245,353		24,759,165,679		27,758,968,730		28,692,532,978		104,191,912,740	PPD: Desentralisasi Layanan Kesehatan JJ: Kesehatan Juara, Ibu dan Anak Juara PPD: Subsidi Gratis Golekmah (Golongan Ekonomi Lemah) JJ: Pelayanan kesehatan untuk warga kurang mampu	Dinas Kesehatan								
		1	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Minimal 50 % Puskesmas Menyelenggarakan Kesehatan Tradisional	Persen	64	64	72		80		88		96		96											
		2	Persentase Kabupaten Kota Puskesmas Sesuai Standar	Persen	82	82	86		91		96		100		100											
		3	Persentase Kab/Kota Yg Mempunyai 80% Rumah Sakit Dengan Pencapaian SPM	Persen	19	19	33		48		63		78		78											
		4	Persentase Rumah Sakit Regional Yg Memenuhi Standar	Persen	38	38	50		63		75		88		88											
		5	Persentase Puskesmas Siap Akreditasi	Persen	95	95	100		100		100		100		100											
		6	Persentase Rumah Sakit Siap Akreditasi	Persen	60	60	70		80		90		100		100											
		7	Persentase Kab/Kota Memiliki Laboratorium Kesehatan Terakreditasi	Persen	19	19	30		40		50		60		60											
		8	Persentase Rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi	Persen	100	100	100		100		100		100		100											
		9	Jumlah Kab/Kota Yang Melaksanakan Kerjasama Dengan Provinsi Terkait Layan Rawat	Jumlah Kab/Kota	8	8	13		18		23		27		27											
2	Program Sumber Daya Kesehatan							46,920,553,744		51,397,034,213		68,806,316,846		69,020,837,552		236,144,742,356	PPD: Desentralisasi Layanan Kesehatan JJ: Kesehatan Juara	Dinas Kesehatan								
		1	Persentase Kab/Kota Yang Mendapatkan Pembiayaan Kesehatan	Persen	40	40	40		40		40		40		40											
		2	Persentase Penduduk Yang Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan	Persen	85	85	90		95		95		95		95											
		3	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Melaksanakan Perencanaan Dan Pengelolaan Mutu Tenaga Kesehatan	Persen	70	70	75		80		85		90		90											
		4	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Prioritas Terisi Tenaga Kesehatan	Persen	65	65	70		70		70		70		70											
		5	Persentase Tenaga Kesehatan Mengikuti Pemilihan Tenaga Kesehatan Puskesmas Teladan	Persen	70	70	75		80		85		90		90											
		6	Persentase Ketersediaan Obat Esensial	Persen	90	90	91		92		93		95		95											
		7	Persentase Dokumen Berita Acara Yang Dibuat	Persen	85	85	90		95		95		100		100											



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal										KONDISI AKHIR		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN JABAR JUARA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
			2017		2018		2020		2021		2022		2023				TARGET	RP.
			TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			TARGET	RP.
3	Program Manajemen Kesehatan						3,895,500,000		3,949,950,000		4,102,410,000		4,150,326,000		16,098,186,000	PPD: Desentralisasi Layanan Kesehatan JJ: Kesehatan Juara	Dinas Kesehatan	
		1	Persentase Regulasi Bidang Kesehatan Yang Diusulkan Oleh Dinas Kesehatan Prov Jawa Barat	Persen	100	100			100				100					
		2	Jumlah Dinas Kesehatan Kab/Kota Yota Yang Dilakukan Pembinaan Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Kab/Kota	27	27			27				27					
4	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Al Ihsan	1	Indek Kepuasan Masyarakat Di RS Al Ihsan	Persen	76.82	76.82	77.84	134,000,000,000	78.87	134,000,000,000	79.89	132,500,000,000	80.91	132,500,000,000	80.91	533,000,000,000	PPD: Desentralisasi Layanan Kesehatan JJ: Kesehatan Juara PPD: Subsidi Gratis Golekmah (Golongan Ekonomi Lemah) JJ: Pelayanan kesehatan untuk warga kurang mampu	Dinas Kesehatan
5	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana RS Al Ihsan	1	Persentase Bor	Persen	60	60	65	64,764,279,108	70	65,764,279,108	75	16,000,000,000	80	12,000,000,000	80	158,528,558,216	PPD: Desentralisasi Layanan Kesehatan JJ: Kesehatan Juara	Dinas Kesehatan
6	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Jiwa	1	Indek Kepuasan Masyarakat Di Ra Jiwa	Persen	75	75	80	33,295,443,056	85	36,224,841,295	90	41,508,085,735	90	43,708,770,793	90	154,737,140,878	PPD: Desentralisasi Layanan Kesehatan JJ: Kesehatan Juara PPD: Subsidi Gratis Golekmah (Golongan Ekonomi Lemah) JJ: Pelayanan kesehatan untuk warga kurang mampu	Dinas Kesehatan
7	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rs Jiwa	1	Persentase Bor Di Rs Jiwa	Persen	58	58	61	45,098,756,596	64	44,191,659,467	67	57,310,255,815	70	59,801,575,108	70	206,402,246,985	PPD: Desentralisasi Layanan Kesehatan JJ: Kesehatan Juara	Dinas Kesehatan
8	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Paru	1	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Di Rs Paru	Persen	75	75	76	13,734,961,201	77	14,131,675,843	78	15,957,005,658	79	16,596,092,053	79	60,419,734,755	PPD: Desentralisasi Layanan Kesehatan JJ: Kesehatan Juara PPD: Subsidi Gratis Golekmah (Golongan Ekonomi Lemah) JJ: Pelayanan kesehatan untuk warga kurang mampu	Dinas Kesehatan
9	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana RS Paru	1	Persentase BOR (Bed Occupancy Ratio)	Persen	57	57	58	156,098,400,000	59	269,592,718,636	60	7,878,189,000	61	8,666,007,900	61	442,235,315,536	PPD: Desentralisasi Layanan Kesehatan JJ: Kesehatan Juara	Dinas Kesehatan
10	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Jampangkulon	1	Persentase BOR RS Jampangkulon	Persen	75.9	75.9	76.15	53,250,000,000	76.62	57,600,000,000	76.8	63,600,000,000	77	69,200,000,000	77	243,650,000,000	PPD: Desentralisasi Layanan Kesehatan JJ: Kesehatan Juara PPD: Subsidi Gratis Golekmah (Golongan Ekonomi Lemah) JJ: Pelayanan kesehatan untuk warga kurang mampu	Dinas Kesehatan
11	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana RS Jampangkulon	1	Persentase Bor RS Jampangkulon	Persen	65	65	68	140,500,000,000	70	106,100,000,000	72	99,800,000,000	75	55,000,000,000	75	401,400,000,000	PPD: Desentralisasi Layanan Kesehatan JJ: Kesehatan Juara	Dinas Kesehatan
12	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Pameungpeuk	1	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	75.9	75.9	76	22,890,600,211	76.62	27,128,841,064	76.8	34,526,200,470	77	39,846,871,435	77	124,392,513,181	PPD: Desentralisasi Layanan Kesehatan JJ: Kesehatan Juara PPD: Subsidi Gratis Golekmah (Golongan Ekonomi Lemah) JJ: Pelayanan kesehatan untuk warga kurang mampu	Dinas Kesehatan
13	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Di RS Pameungpeuk	1	Persentase Bor (Bed Occupancy Ratio)	Persen	57	57	58	106,629,500,000	59	88,022,261,173	60	111,732,292,739	61	103,338,471,488	61	409,722,525,400	PPD: Desentralisasi Layanan Kesehatan JJ: Kesehatan Juara	Dinas Kesehatan
14	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Kesehatan Kerja	1	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	75.9	75.9	76	18,700,000,000	76.62	24,300,000,000	76.8	39,600,000,000	77	45,600,000,000	77	128,200,000,000	PPD: Desentralisasi Layanan Kesehatan JJ: Kesehatan Juara PPD: Subsidi Gratis Golekmah (Golongan Ekonomi Lemah) JJ: Pelayanan kesehatan untuk warga kurang mampu	Dinas Kesehatan
15	Program Peningkatan Prasarana RSUD Kesehatan Kerja	1	Persentase BOR	Persen	60	60	65	108,625,000,000	70	128,100,000,000	75	60,000,000,000	80	118,800,000,000	80	415,525,000,000	PPD: Desentralisasi Layanan Kesehatan JJ: Kesehatan Juara	Dinas Kesehatan
16	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan						12,486,220,000		13,093,720,000		13,053,720,000		13,293,720,000		51,927,380,000	PPD: Desentralisasi Layanan Kesehatan JJ: Kesehatan Juara PPD: Subsidi Gratis Golekmah (Golongan Ekonomi Lemah) JJ: Pelayanan kesehatan untuk warga kurang mampu	Dinas Kesehatan	
		1	Jumlah Penambahan Parameter Pemeriksaan Yang Diakreditasi	Jumlah	68	68	70			72			74		76			
		2	Persentase Kepuasan Pelanggan	Persen	55	55	60			65			70		75			
		3	Jumlah Penambahan Parameter Pemeriksaan Baru	Jumlah	239	239	241			243			245		247			
17	Program Peningkatan Mutu Unit Pelatihan Kesehatan						1,312,267,000		1,574,720,400		2,309,589,920		2,540,548,912		7,737,126,232	PPD: Desentralisasi Layanan Kesehatan JJ: Kesehatan Juara	Dinas Kesehatan	
		1	Persentase Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan Melalui Pelatihan	Persen	8.31	8.31	11.64			15			16.21		16.63			
		2	Nilai Komponen Yang Sesuai Dengan Pembobotan	Nilai	3	3	≥ 3,5			≥ 3,5			≥ 3,5		≥ 3,5			
18	Program Kesehatan Akibat Bencana dan Kesehatan Akibat KLB Provinsi (SPM PROVINSI, PP NO 2/2018)						1,100,000,000		1,200,000,000		1,600,000,000		1,600,000,000		5,500,000,000	PPD: Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Tanggap Bencana Juara PPD: Desentralisasi Layanan Kesehatan JJ: Kesehatan Juara	Dinas Kesehatan	
		1	Persentase Kegiatan Rapid Health Assessment	Persen	100	100	100			100			100		100			
		2	Persentase Masyarakat Yang Dilayani Dilokasi Bencana	Persen	100	100	100			100			100		100			

Sasaran:



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal										KONDISI AKHIR		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN JABAR JUARA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
			2017		2018		2020		2021		2022		2023				TARGET	RP.	
			TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			TARGET	RP.	
2.1.3.	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	70.04	70.14	71		72		72.3		73.25		73.25				IKU Pemerintah Daerah	
		b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	89.18	89.52	89.82		90.5		91		92		92				IKU Pemerintah Daerah	
Program:																			
1	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Cakupan Peserta KB Aktif	Persen	74.91	74.64	74.75	8,631,000,000	74.8	8,313,250,000	74.85	8,758,800,000	74.9	8,320,162,000	74.9	34,023,212,000			PPD: Desentralisasi Layanan Kesehatan JJ: Ibu dan Anak Juara PPD: Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) JJ: Kampung Keluarga Juara	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2	Program Pemenuhan Hak Anak (Program Anak Juara)						8,620,000,000		9,807,937,500		10,612,793,750		10,486,065,995		39,526,797,245			PPD: Desentralisasi Layanan Kesehatan JJ: Ibu dan Anak Juara	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		1 Cakupan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Provinsi	Persen	1.40	2.81	23.7		36		59		75		75					
		2 Cakupan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) Tingkat Provinsi	Persen	2	4	7		9		11		13		13					
3	Program Perlindungan Perempuan dan Anak						6,828,296,700		6,765,735,574		5,409,000,000		6,324,060,000		25,327,092,274			PPD: Desentralisasi Layanan Kesehatan JJ: Ibu dan Anak Juara	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		1 Cakupan Perempuan Korban Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi (KED) Yang Mendapat Penanganan Pengaduan Oleh Tenaga Terlatih Unit Pelayanan Terpadu	Persen	100	100	100		100		100		100		100					
		2 Cakupan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi (Ked) Yang Mendapat Penanganan Pengaduan Oleh Tenaga Terlatih Unit Pelayanan Terpadu	Persen	100	100	100		100		100		100		100					
		3 Cakupan Anak Berhadapan Dengan Hukum Yang Berhasil Dibina	Persen	30	35	100		100		100		100		100					
4	Program Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan						5,940,360,000		6,837,459,000		7,707,267,000		8,103,434,645		28,588,520,645			PPD: Desentralisasi Layanan Kesehatan JJ: Perempuan Juara	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		1 Cakupan Organisasi Perempuan Yang Mendapat Pembinaan	Persen	30	35	45		60		80		100		100					
		2 Cakupan Ketersediaan Data Terpilah Yang Up To Date Pada 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat	Persen	20	25	44		66		74		100		100					
		3 Cakupan Pembinaan Pengarusutamaan Gender Ke Kabupaten Kota	Persen	20	25	45		60		75		100		100					
		4 Cakupan Kelompok Pekka Yang Mendapat Program Pembinaan Program Pekka	Persen	20	30	45		60		80		100		100					
		5 Cakupan Kepala Keluarga Yang Mendapat Pembinaan Program P2WKSS	Persen	20	30	45		60		80		100		100					
Sasaran:																			
2.1.4.	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	a. Rata-rata lama sekolah	Tahun	8.14	8.18	8.39		8.49		8.60		8.70		8.70				IKU Pemerintah Daerah	
		b. Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.42	12.88	13.39		13.64		13.89		14.14		14.14				IKU Pemerintah Daerah	
Program:																			
1	Program Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK						2,385,500,000		2,293,845,000		2,565,000,000		2,418,000,000		9,662,345,000			PPD:Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Sekolah Juara, Perguruan Tinggi Juara, Milenial Juara	BP2D
		1 Persentase Penelitian Dan Pengembangan Iptek Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	Persen	100	100	30		46		77		100		100					
		2 Persentase Pemanfaatan Iptek	Persen	100	100	40		60		80		100		100					
2	Program Pengelolaan Sekolah Menengah Atas						551,247,809,179		728,664,601,131		728,131,825,631		727,291,925,631		2,735,336,161,572			PPD:Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Sekolah Juara, Guru Juara, Tanggap Bencana Juara, Budaya Juara PPD: Subsidi Gratis Golekmah (Golongan Ekonomi Lemah) JJ: Sekolah gratis bagi warga kurang mampu	Dinas Pendidikan
		1 Rasio Siswa Per-Sekolah SMA	Rasio	425	419	720		720		720		720		720					
		2 Rasio Siswa Per-Kelas SMA	Rasio	35	34	36		36		36		36		36					
		3 Persentase SMA dengan Akreditasi B	Persen	50	53	56.5		61		65		70		70					
		4 Angka Kelulusan SMA	Persen	100	100	100		100		100		100		100					
3	Program Pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan						305,876,443,685		384,518,865,092		435,300,227,116		374,507,748,055		1,500,203,283,948			PPD:Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Sekolah Juara, SMK Juara, Guru Juara, Tanggap Bencana Juara, Budaya Juara PPD: Subsidi Gratis Golekmah (Golongan Ekonomi Lemah) JJ: Sekolah gratis bagi warga kurang mampu	Dinas Pendidikan
		1 Rasio Siswa Per-Sekolah SMK	Rasio	366	351	2520		2520		2520		2520		2520					
		2 Rasio Siswa Per-Kelas SMK	Rasio	36.8	36.2	36		36		36		36		36					
		3 Persentase SMK dengan Akreditasi B	Persen	30	35	20		20		20		20		20					
		4 Angka Kelulusan SMK	Persen	100	100	100		100		100		100		100					



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal								KONDISI AKHIR		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN JABAR JUARA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
			2017		2018		2020		2021		2022				2023			
			TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			TARGET	RP.		
		5	Persentase lulusan SMK tersertifikasi	Persen	30	35	20		25		30		35		35			
4	Program Pengelolaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (Sekolah Inklusi)						85,979,740,839		110,908,950,500		105,552,462,000		104,111,527,000		406,552,680,339	PPD:Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Sekolah Juara, Tanggap Bencana Juara, Budaya Juara PPD: Subsidi Gratis Golekmah (Golongan Ekonomi Lemah) JJ: Sekolah gratis bagi warga kurang mampu	Dinas Pendidikan	
		1	Rasio siswa per sekolah SLB	Rasio	57,78	58,48	SDLB-SMPLB 45-SMPLB/SMALB 48		SDLB-SMPLB 45-SMPLB/SMALB 48		SDLB-SMPLB 45-SMPLB/SMALB 48		SDLB-SMPLB 45-SMPLB/SMALB 48					
		2	Rasio siswa per kelas SLB	Rasio	62,25	6,99	SDLB/SMPLB (9)-SMPLB/SMALB (6)		SDLB/SMPLB (9)-SMPLB/SMALB (6)		SDLB/SMPLB (9)-SMPLB/SMALB (6)		SDLB/SMPLB (9)-SMPLB/SMALB (6)					
		3	Persentase SLB terakreditasi minimal B	Persen	44,50	47,02	56,38		61,7		67,02		72,34		72,34			
		4	Angka Kelulusan SLB	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
		5	Jumlah Siswa Pendidikan dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)	Persen	N/A	13,88	25		32		40		48		48			
5	Program Pengelolaan Guru dan Tenaga Kependidikan						107,327,054,809		111,318,210,097		112,960,622,097		111,784,007,097		443,389,894,100	PPD:Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Guru Juara, Sekolah Juara	Dinas Pendidikan	
		1	Persentase Guru yang memiliki sertifikat Pendidik	Persen	20	23	30		50		70		80		80			Dinas Pendidikan
		2	Persentase Kepala Sekolah yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Persen	90	90	30		50		70		80		80			Dinas Pendidikan
		3	Persentase Pengawas yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Persen	100	100	30		50		70		80		80			Dinas Pendidikan
6	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)						1,153,366,000,000		1,268,923,000,000		1,395,793,000,000		1,535,219,000,000		5,353,301,000,000	PPD:Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Sekolah Juara, SMK Juara	Dinas Pendidikan	
		1	Persentase Siswa Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SMP/SMA/SMK/SLB/Negeri Swasta	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
		2	Persentase Sekolah dan Siswa SMA/SMK/SLB yang terlayani dalam BOS	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
7	Program digitalisasi pendidikan UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (UPTD Tikomdik)						25,051,103,226		27,006,975,536		27,167,012,873		30		27,049,304,865	30	106,274,396,499	PPD:Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Sekolah Juara, Milenial Juara
8	Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I						4,456,904,660		4,688,660,000		4,779,800,000		4,713,200,000		18,638,564,660	PPD:Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Sekolah Juara, Tanggap Bencana Juara, Budaya Juara, uru Juara, SMK Juara PPD: Subsidi Gratis Golekmah (Golongan Ekonomi Lemah) JJ: Sekolah gratis bagi warga kurang mampu	Dinas Pendidikan	
		1	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Rasio	N/A	N/A	720/2250/146		720/2250/147		720/2250/148		720/2250/149		720/2250/149			
		2	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Rasio	N/A	N/A	36/9		36/10		36/11		36/12		36/12			
		3	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Persen	N/A	N/A	56.5/22		61/26		65/28		70/30		70/30			
		4	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100			
9	Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II						1,856,904,660		2,088,660,000		2,179,800,000		2,113,200,000		8,238,564,660	PPD:Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Sekolah Juara, Tanggap Bencana Juara, Budaya Juara, uru Juara, SMK Juara PPD: Subsidi Gratis Golekmah (Golongan Ekonomi Lemah) JJ: Sekolah gratis bagi warga kurang mampu	Dinas Pendidikan	
		1	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	Rasio	N/A	N/A	720/2250/146		720/2250/147		720/2250/148		720/2250/149		720/2250/149			
		2	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	Rasio	N/A	N/A	36/9		36/10		36/11		36/12		36/12			
		3	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	Persen	N/A	N/A	56.5/22		61/26		65/28		70/30		70/30			
		4	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100			
10	Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III						2,556,904,660		2,788,660,000		2,879,800,000		2,813,200,000		11,038,564,660	PPD:Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Sekolah Juara, Tanggap Bencana Juara, Budaya Juara, uru Juara, SMK Juara PPD: Subsidi Gratis Golekmah (Golongan Ekonomi Lemah) JJ: Sekolah gratis bagi warga kurang mampu	Dinas Pendidikan	
		1	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Rasio	N/A	N/A	720/2250/146		720/2250/147		720/2250/148		720/2250/149		720/2250/149			
		2	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Rasio	N/A	N/A	36/9		36/10		36/11		36/12		36/12			



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal								KONDISI AKHIR		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN JABAR JUARA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
			2017		2018		2020		2021		2022				2023		
			TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			TARGET	RP.	
		3	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Persen	N/A	N/A	56.5/22		61/26		65/28		70/30		70/30		
		4	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100		
11	Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV						3,756,904,660		3,988,660,000		4,079,800,000		4,013,200,000		15,838,564,660	PPD:Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Sekolah Juara, Tanggap Bencana Juara, Budaya Juara, uru Juara, SMK Juara PPD: Subsidi Gratis Golekmah (Golongan Ekonomi Lemah) JJ: Sekolah gratis bagi warga kurang mampu	Dinas Pendidikan
		1	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	Rasio	N/A	N/A	720/2250/146		720/2250/147		720/2250/148		720/2250/149		720/2250/149		
		2	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	Rasio	N/A	N/A	36/9		36/10		36/11		36/12		36/12		
		3	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	Persen	N/A	N/A	56.5/22		61/26		65/28		70/30		70/30		
		4	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100		
12	Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V						4,198,304,660		4,430,060,000		4,521,200,000		4,454,600,000		17,604,164,660	PPD:Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Sekolah Juara, Tanggap Bencana Juara, Budaya Juara, uru Juara, SMK Juara PPD: Subsidi Gratis Golekmah (Golongan Ekonomi Lemah) JJ: Sekolah gratis bagi warga kurang mampu	Dinas Pendidikan
		1	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	Rasio	N/A	N/A	720/2250/146		720/2250/147		720/2250/148		720/2250/149		720/2250/149		
		2	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	Rasio	N/A	N/A	36/9		36/10		36/11		36/12		36/12		
		3	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	Persen	N/A	N/A	56.5/22		61/26		65/28		70/30		70/30		
		4	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100		
13	Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI						4,870,779,607		5,279,033,825		5,480,495,488		5,436,503,904		21,066,812,823	PPD:Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Sekolah Juara, Tanggap Bencana Juara, Budaya Juara, uru Juara, SMK Juara PPD: Subsidi Gratis Golekmah (Golongan Ekonomi Lemah) JJ: Sekolah gratis bagi warga kurang mampu	Dinas Pendidikan
		1	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	Rasio	N/A	N/A	720/2250/146		720/2250/147		720/2250/148		720/2250/149		720/2250/149		
		2	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	Rasio	N/A	N/A	36/9		36/10		36/11		36/12		36/12		
		3	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	Persen	N/A	N/A	56.5/22		61/26		65/28		70/30		70/30		
		4	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100		
14	Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII						4,076,904,660		4,308,660,000		4,399,800,000		4,333,200,000		17,118,564,660	PPD:Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Sekolah Juara, Tanggap Bencana Juara, Budaya Juara, uru Juara, SMK Juara PPD: Subsidi Gratis Golekmah (Golongan Ekonomi Lemah) JJ: Sekolah gratis bagi warga kurang mampu	Dinas Pendidikan
		1	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	Rasio	N/A	N/A	720/2250/146		720/2250/147		720/2250/148		720/2250/149		720/2250/149		
		2	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	Rasio	N/A	N/A	36/9		36/10		36/11		36/12		36/12		
		3	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	Persen	N/A	N/A	56.5/22		61/26		65/28		70/30		70/30		
		4	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100		
15	Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII						4,556,904,660		4,788,660,000		4,879,800,000		4,813,200,000		19,038,564,660	PPD:Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Sekolah Juara, Tanggap Bencana Juara, Budaya Juara, uru Juara, SMK Juara PPD: Subsidi Gratis Golekmah (Golongan Ekonomi Lemah) JJ: Sekolah gratis bagi warga kurang mampu	Dinas Pendidikan
		1	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	Rasio	N/A	N/A	720/2250/146		720/2250/147		720/2250/148		720/2250/149		720/2250/149		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal								KONDISI AKHIR				PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN JABAR JUARA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
			2017		2018		2020		2021		2022		2023				KONDISI AKHIR	
			TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			TARGET	RP.
	2	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	Rasio	N/A	N/A	36/9		36/10		36/11		36/12		36/12				
	3	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	Persen	N/A	N/A	56.5/22		61/26		65/28		70/30		70/30				
	4	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100				
16		Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX					3,906,904,660		4,138,660,000		4,229,800,000		4,163,200,000		16,438,564,660	PPD:Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Sekolah Juara, Tanggap Bencana Juara, Budaya Juara, uru Juara, SMK Juara PPD: Subsidi Gratis Golekmah (Golongan Ekonomi Lemah) JJ: Sekolah gratis bagi warga kurang mampu	Dinas Pendidikan	
	1	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	Rasio	N/A	N/A	720/2250/146		720/2250/147		720/2250/148		720/2250/149		720/2250/149				
	2	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	Rasio	N/A	N/A	36/9		36/10		36/11		36/12		36/12				
	3	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	Persen	N/A	N/A	56.5/22		61/26		65/28		70/30		70/30				
	4	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100				
17		Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X					3,606,904,660		3,838,660,000		3,929,800,000		3,863,200,000		15,238,564,660	PPD:Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Sekolah Juara, Tanggap Bencana Juara, Budaya Juara, uru Juara, SMK Juara PPD: Subsidi Gratis Golekmah (Golongan Ekonomi Lemah) JJ: Sekolah gratis bagi warga kurang mampu	Dinas Pendidikan	
	1	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	Rasio	N/A	N/A	720/2250/146		720/2250/147		720/2250/148		720/2250/149		720/2250/149				
	2	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	Rasio	N/A	N/A	36/9		36/10		36/11		36/12		36/12				
	3	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	Persen	N/A	N/A	56.5/22		61/26		65/28		70/30		70/30				
	4	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100				
18		Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI					3,281,904,660		3,513,660,000		3,604,800,000		3,538,200,000		13,938,564,660	PPD:Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Sekolah Juara, Tanggap Bencana Juara, Budaya Juara, uru Juara, SMK Juara PPD: Subsidi Gratis Golekmah (Golongan Ekonomi Lemah) JJ: Sekolah gratis bagi warga kurang mampu	Dinas Pendidikan	
	1	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	Rasio	N/A	N/A	720/2250/146		720/2250/147		720/2250/148		720/2250/149		720/2250/149				
	2	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	Rasio	N/A	N/A	36/9		36/10		36/11		36/12		36/12				
	3	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	Persen	N/A	N/A	56.5/22		61/26		65/28		70/30		70/30				
	4	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100				
19		Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII					4,330,529,660		4,446,407,330		4,491,977,330		4,458,677,330		17,727,591,650	PPD:Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Sekolah Juara, Tanggap Bencana Juara, Budaya Juara, uru Juara, SMK Juara PPD: Subsidi Gratis Golekmah (Golongan Ekonomi Lemah) JJ: Sekolah gratis bagi warga kurang mampu	Dinas Pendidikan	
	1	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	Rasio	N/A	N/A	720/2250/146		720/2250/147		720/2250/148		720/2250/149		720/2250/149				
	2	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	Rasio	N/A	N/A	36/9		36/10		36/11		36/12		36/12				
	3	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	Persen	N/A	N/A	56.5/22		61/26		65/28		70/30		70/30				
	4	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100				
20		Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII					3,456,904,660		3,688,660,000		3,779,800,000		3,713,200,000		14,638,564,660	PPD:Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Sekolah Juara, Tanggap Bencana Juara, Budaya Juara, uru Juara, SMK Juara PPD: Subsidi Gratis Golekmah (Golongan Ekonomi Lemah) JJ: Sekolah gratis bagi warga kurang mampu	Dinas Pendidikan	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PENGEMBANGAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal								KONDISI AKHIR		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN JABAR JUARA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
			2017		2018		2020		2021		2022				2023		
			TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			TARGET	RP.	
	1	Rasio siswa per Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	Rasio	N/A	N/A	720/2250/146		720/2250/147		720/2250/148		720/2250/149		720/2250/149			
	2	Rasio siswa per kelas Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	Rasio	N/A	N/A	36/9		36/10		36/12		36/12		36/12			
	3	Persentase Sekolah Menengah Sederajat terakreditasi minimal B di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	Persen	N/A	N/A	56.5/22		61/26		65/28		70/30		70/30			
	4	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Sederajat di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100			
21	Program Pengembangan Bahan Perpustakaan					2,919,370,550		3,053,430,160		3,323,434,066		380,905,085		9,677,139,861	PPD:Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Sekolah Juara, Budaya Juara	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	1	Laju Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	Persen	N/A	N/A	3		3		3		3		3			
	2	Persentase naskah kuno berkonten ilmu pengetahuan yang dilestarikan	Naskah Kuno	N/A	N/A	2		2		2		3		3			
	3	Persentase karya cetak, karya rekam dan hasil khazanah budaya Jawa Barat yang disimpan sesuai dengan peraturan	Persen	8,63	17,73	1,17		1,17		1,17		1,17		1,17			
22	Program Pembinaan Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca					1,377,864,690		1,471,383,424		1,637,251,462		1,815,642,497		6,302,142,072	PPD:Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Sekolah Juara, Budaya Juara	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	1	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Poin	N/A	N/A	0,3754		0,3942		0,4139		0,4346		0,4346			
	2	Persentase pustakawan, tenaga teknis dan penilai lingkup provinsi yang memiliki sertifikat	Persen	N/A	N/A	54,654		57,387		60,25		63,269		63,269			
23	Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan					621,340,000		726,703,400		885,361,908		1,075,669,395		3,309,074,703	PPD:Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Sekolah Juara, Budaya Juara	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	593,707	594,211	606,156		612,218		618,341		624,524		624,524			
	2	Persentase Koleksi buku yang dibaca	Persen	1,60	1,63	1,81		1,99		2,19		2,41		2,41			
	3	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Perpustakaan	Poin	77,52	79,12	82,23		84,69		87,23		89,60		89,60			
Sasaran:																	
2.1.5.	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat nasional	1	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	46.33	49.00	56.31		59.13		62.09		65.19		65.19		IKU Pemerintah Daerah
Program:																	
1	Program Peningkatan dan Pembinaan Kepemudaan					6,154,765,104		7,610,480,217		7,677,541,171		7,867,317,210		29,310,103,701	PPD:Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Olahraga Juara, Milenial Juara PPD: Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi JJ: Wawancara Juara	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	1	Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional	Persen	2.6	2.6	2.6		2.6		2.6		2.6		2.6			
	2	Persentase Pemuda Binaan Dispora Yang Berwirausaha	Persen	4	4	4		4		4		4		4			
	3	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Dibina	Persen	20	20	20		20		20		20		20			
2	Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga					7,238,367,139		7,658,104,505		9,291,343,578		7,731,258,957		31,919,074,180	PPD:Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Olahraga Juara	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	1	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Persen	10	10	10		10		10		10		10			
	2	Persentase Tenaga Olahraga Tradisional, Berkebutuhan Khusus Dan Rekreasi Binaan Yang Bersertifikat	Persen	10	10	11		12		13		14		14			
	3	Persentase Event Olahraga Tradisional, Berkebutuhan Khusus Dan Rekreasi Yang Diselenggarakan Dan Diikuti	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
	4	Persentase Medali Emas Yang Diperoleh Dalam Event Nasional Peparpenas	Persen	12	12	-		12		-		12		12			
3	Program Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi, Dan Organisasi Olahraga					20,107,302,212		24,987,899,865		24,209,956,864		28,178,997,004		97,484,155,945	PPD:Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Olahraga Juara	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	1	Persentase Medali Emas Yang Diperoleh Dalam Event Nasional:															
		A. Popnas	Persen	N/A	N/A	-		20		-		20		20			
		B. Popwilnas	Persen	N/A	N/A	20		-		20		-		-			
	2	Persentase Tenaga Olahraga Prestasi Binaan Yang Memiliki Sertifikat	Persen	N/A	N/A	12		14		16		18		18			
	3	Persentase Event Olahraga Prestasi Yang Diselenggarakan Dan Diikuti	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100			
4	Program peningkatan Kesejahteraan, Sarana dan Prasarana Keolahragaan					151,560,742,810		51,294,721,894		30,672,774,203		6,959,846,284		240,488,085,191	PPD:Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Olahraga Juara	Dinas Pemuda dan Olahraga	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal								Kondisi Akhir				PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN JABAR JUARA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
			2017		2018		2020		2021		2022		2023				Kondisi Akhir	
			TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			TARGET	RP.
	1	persentase pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berprestasi di tingkat nasional	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
	2	Persentase penyediaan sarana olahraga kawasan sport Jabar	Persen	50	60	80		95		100								
Tujuan:																		
2.2.	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram berbasiskan kearifan lokal dan seni budaya daerah	a.	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat	Persen	N/A	N/A	18.65		20.72		21.83		22.16		22.16		IKU Pemerintah Daerah	
Sasaran:																		
2.2.1.	Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal	a.	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat	Persen	N/A	N/A	18.65		20.72		21.83		22.16		22.16		IKU Pemerintah Daerah	
Program:																		
1	Program Pengembangan Nilai Budaya						47,875,396,125		45,957,073,358		47,098,340,736		54,583,515,784		195,514,326,004		PPD: Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Budaya Juara, Sekolah Juara Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	
	1	Persentase Usulan Warisan Budaya Tak Benda (WBTE) Jawa Barat Yang Ditetapkan Sebagai WBTE Tingkat Nasional	Persen	70	70	76.92		88.24		94.12		100		100				
	2	Persentase Bahasa, Sastra Dan Aksara Daerah Yang Dilestarikan	Persen	18.52	18.52	18.52		18.52		22.22		22.22		22.22				
2	Program Pengelolaan keragaman budaya						20,413,749,723		23,129,565,801		26,846,938,526		27,946,065,243		98,336,319,292		PPD: Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Budaya Juara, Sekolah Juara Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	
	1	Persentase Cagar Budaya Yang Dilindungi	Persen	6.00	6.00	20.00		24.00		26.00		24.00		24.00				
	2	Persentase Benda Koleksi Museum Sri Baduga Yang Dilindungi	Persen	18.21	18.21	19.04		20.20		21.03		21.52		21.52				
	3	Persentase Seni Budaya Yang Dilindungi	Persen	10.53	10.53	15.79		21.05		26.32		26.32		26.32				
Sasaran:																		
2.2.2.	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	a.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	69.58	69.61	70-71		71,-73,5		71,-73,5		73,6-76		73,6-76		IKU Pemerintah Daerah	
Program:																		
1	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Persen	100	100	85	898,659,450	90	1,057,836,000	95	1,315,228,300	95	1,236,881,500	95	4,508,605,250	Satuan Polisi Pamong Praja	
2	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1	Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persen	62	83.5	100	1,671,111,000	100	1,893,663,338	100	2,082,387,469	100	2,353,746,500	100	8,000,908,306	Satuan Polisi Pamong Praja	
3	Program Perlindungan Masyarakat	1	Tingkat Kesiapsiagaan penanganan bencana oleh Satlinmas	Persen	0.23	0.26	1.69	771,985,500	2.37	859,409,500	2.97	952,696,650	3.49	895,488,500	3.49	3,479,580,150	PPD: Akses Pendidikan Untuk Semua JJ: Tanggap Bencana Juara Satuan Polisi Pamong Praja	
4	Program Pembinaan Masyarakat dan Aparatur	1	Persentase Satpol PP dan PPNS yang terdidik dan berkompeten	Persen	4.1	4.8	30	835,404,505	50	879,780,000	75	958,080,000	100	883,545,000	100	3,556,809,505	Satuan Polisi Pamong Praja	
Misi 3: Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah																		
Tujuan:																		
3.1.	Terwujudnya Percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	a.	Tingkat Konektivitas antar wilayah	Persen	40.9	40,90-41,00	44-46		47.49		50-52		53-55		53-55		IKU Pemerintah Daerah	
Sasaran:																		
3.1.1.	Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok	a.	Konsumsi Listrik per Kapita	KWh/ Kapita	1,155	1,231	1,340		1,386		1,447		1,503		1,503		IKU Pemerintah Daerah	
Program:																		
1	Program Ketenagalistrikan						2,422,650,000		2,690,175,000		3,497,865,000		3,274,810,000		11,885,500,000		PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Energi Juara Dinas Sumber Daya Energi	
	1	Tingkat Ketaatan Usaha bidang ketenagalistrikan yang patuh terhadap aturan	Persen	12.5	38.97	83.40		91.80		96.80		100.00		100.00				
	2	Persentase Instalasi Tenaga Listrik yang Laik Operasi	Persen	79.52	49.88	80		82		82		85		85				
	3	Persentase terlayannya subsidi listrik tepat sasaran	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
2	Program Ketenagalistrikan Wilayah I Cianjur						372,000,000		380,680,000		356,925,000		829,335,000		1,938,940,000		PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Energi Juara Dinas Sumber Daya Energi	
	1	Persentase Pelaku usaha ketenagalistrikan yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	Persen	20	20	40		60		80		100		100				
	2	Persentase terlayannya subsidi listrik tepat sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
3	Program Ketenagalistrikan Wilayah II Bogor						231,500,000		238,010,000		316,565,000		298,855,000		1,084,930,000		PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Energi Juara Dinas Sumber Daya Energi	
	1	Persentase Pelaku usaha ketenagalistrikan yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	Persen	20	20	40		60		80		100		100				
	2	Persentase terlayannya subsidi listrik tepat sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
4	Program Ketenagalistrikan Wilayah III Purwakarta						376,875,000		385,012,500		434,411,250		414,803,750		1,611,102,500		PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Energi Juara Dinas Sumber Daya Energi	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal								KONDISI AKHIR		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN JABAR JUARA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
			2017		2018		2020		2021		2022				2023	
			TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			TARGET	RP.
	1	Persentase Pelaku usaha ketenagalistrikan yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	Persen	20	20	40		60		80		100		100		
	2	Persentase terlayannya subsidi listrik tepat sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
5	Program Ketenagalistrikan Wilayah IV Bandung					241,750,000		249,345,000		328,462,500		150,000,000		969,557,500	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Energi Juara	Dinas Sumber Daya Energi
	1	Persentase Pelaku usaha ketenagalistrikan yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	Persen	20	20	40		60		80		100		100		
	2	Persentase terlayannya subsidi listrik tepat sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
6	Program Ketenagalistrikan Wilayah V Sumedang					312,000,000		320,680,000		414,155,000		391,385,000		1,438,220,000	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Energi Juara	Dinas Sumber Daya Energi
	1	Persentase Pelaku usaha ketenagalistrikan yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	Persen	20	20	40		60		80		100		100		
	2	Persentase terlayannya subsidi listrik tepat sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
7	Program Ketenagalistrikan Wilayah VI Tasikmalaya					312,000,000		320,680,000		414,155,000		391,385,000		1,438,220,000	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Energi Juara	Dinas Sumber Daya Energi
	1	Persentase Pelaku usaha ketenagalistrikan yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	Persen	20	20	40		60		80		100		100		
	2	Persentase terlayannya subsidi listrik tepat sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
8	Program Ketenagalistrikan Wilayah VII Cirebon					291,750,000		299,345,000		378,462,500		359,487,500		1,329,045,000	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Energi Juara	Dinas Sumber Daya Energi
	1	Persentase Pelaku Usaha Ketenagalistrikan Yang Taat Peraturan Di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	Persen	20	20	40		60		80		100		100		
	2	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	Persen	100	100	100		100		100		100		100		
Sasaran:																
3.1.2.	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	a.	Tingkat Konektivitas antar wilayah	Persen	40.9	40,90-41,00	44-46		47.49		50-52		53-55			IKU Pemerintah Daerah
Program:																
1	Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan Darat					33,125,446,980		34,686,912,770		28,910,826,740		29,956,961,880		126,680,148,370	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: 1. Lingkungan Juara, 2. Transportasi Juara, 3. Pansela Juara PPD: Subsidi Gratis Golekmah (Golongan Ekonomi Lemah) JJ: Buruh Juara PPD: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata JJ: Pariwisata Juara	Dinas Perhubungan
	1	Jumlah Penumpang AKDP di Provinsi Jawa Barat	Penumpang	119,330,910	126,013,440	136,680,898		142,148,134		147,834,059		153,747,421		153,747,421		
	2	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Transportasi	Persen	0,22	0,40	0,41		0,42		0,60		0,61		0,61		
2	Program Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I					26,226,627,192		6,533,775,412		5,082,324,230		4,664,659,764		42,507,386,598	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Pansela Juara PPD: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata JJ: Pariwisata Juara	Dinas Perhubungan
	1	Jumlah Penumpang Terminal di Wilayah Kerja UPTD PP Perhubungan LLAJ Wilayah I	Penumpang	418,551	1,684,289	1,774,957		1,845,955		1,919,794		1,996,585		1,996,585		
	2	Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi di Wilayah Kerja UPTD PP Perhubungan LLAJ Wilayah I yang terpasang	Persen	26.61	29.19	31.33		32.61		33.89		35.10		35.10		
3	Program Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah II					4,962,114,158		5,521,593,000		6,349,323,230		5,816,591,200		22,649,621,588	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Pansela Juara PPD: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata JJ: Pariwisata Juara	Dinas Perhubungan
	1	Jumlah Penumpang Terminal di Wilayah Kerja UPTD PP Perhubungan LLAJ Wilayah II	Penumpang	2,394,886	2661655	3,161,385		3,411,844		3,662,382		3,912,295		3,912,295		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal										KONDISI AKHIR		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN JABAR JUARA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
			2017		2018		2020		2021		2022		2023				TARGET	RP.	
			TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			TARGET	RP.	
		2	Persentase Fasilitas Perengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi di Wilayah Kerja UPTD PP Perhubungan LLAJ Wilayah II yang terpasang	Persen	30.00	45.64	48.57		50.250		52.050		53.910		53.910				
4	Program Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah III							3,020,354,258		3,354,318,138		3,800,090,150		3,611,228,164		13,785,990,709	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Pansela Juara PPD: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata JJ: Pariwisata Juara	Dinas Perhubungan	
		1	Jumlah Penumpang Terminal di Wilayah Kerja UPTD PP Perhubungan LLAJ Wilayah III	Penumpang	1,132,546	1,036,496	1,168,201		1,168,201		1,213,133		1,235,598		1,235,598				
		2	Persentase Fasilitas Perengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi di Wilayah Kerja UPTD PP Perhubungan LLAJ Wilayah III yang terpasang	Persen	26.23	32.15	36.94		39.31		41.90		44.65		44.65				
5	Program Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah IV							4,306,644,000		4,706,392,054		4,990,266,000		4,534,112,000		18,537,414,054	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Pansela Juara PPD: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata JJ: Pariwisata Juara	Dinas Perhubungan	
		1	Jumlah Penumpang Terminal di Wilayah Kerja UPTD PP Perhubungan LLAJ Wilayah IV	Penumpang	290,097	367,708	399,227		415,196		431,804		449,076		449,076				
		2	Persentase Fasilitas Perengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi di Wilayah Kerja UPTD PP Perhubungan LLAJ Wilayah IV yang terpasang	Persen	24.28	26.74	28.22		29.10		29.95		30.68		30.68				
6	Program Peningkatan Prasarana dan aksesibilitas Perhubungan Udara							7,275,429,405		4,936,195,000		82.97	2,383,720,000	82.97	2,248,320,000	82.97	16,843,664,405	PPD: Infrastruktur Wilayah Juara JJ: Pansela Juara, Transportasi Juara PPD: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata JJ: Pariwisata Juara	Dinas Perhubungan
7	Program Peningkatan Prasarana Bandara dan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Bandara Nusawiru							57,390,300,000		47,129,500,000		71,191,654,240		91,711,602,285		267,423,056,526	PPD: Infrastruktur Wilayah Juara JJ: Pansela Juara, Transportasi Juara PPD: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata JJ: Pariwisata Juara	Dinas Perhubungan	
		1	Jumlah penumpang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Nusawiru	Penumpang	525,315	550,315	607,137		660,124		693,130		859,212		859,212				
		2	Tingkat ketersediaan prasarana Bandar Udara	Persen	55.56	60.00	73.44		76.33		80.63		84.67		84.67				
8	Program Peningkatan Prasarana dan Keselamatan Perhubungan Laut dan ASDP							1,412,035,000		1,165,835,000		87.92	958,670,000	100.00	866,540,000	100.00	4,403,080,000	PPD: Infrastruktur Wilayah Juara JJ: Pansela Juara PPD: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata JJ: Pariwisata Juara	Dinas Perhubungan
9	Program Peningkatan Prasarana dan Keselamatan Perhubungan ASDP							2,371,500,000		1,984,400,000		2,072,800,000		655,760,000		7,084,460,000	PPD: Infrastruktur Wilayah Juara JJ: Pansela Juara PPD: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata JJ: Pariwisata Juara	Dinas Perhubungan	
		1	Jumlah Barang Dan Penumpang Angkutan ASDP Di Jawa Barat																
			A. Barang	Ton	N/A	N/A	104,406		109,626		115,108		120,863		120,863				
			B. Penumpang	Orang	N/A	N/A	607,307		637,494		669,369		702,837		702,837				
		2	Tingkat Ketersediaan Prasarana Dan Keselamatan Perhubungan ASDP	Persen	27.78	32.03	56.68		73.21		88.61		100.00		100.00				
10	Program Peningkatan Prasarana dan Keselamatan Perhubungan Laut							3,474,247,500		777,636,750		888,324,350		873,882,170		6,014,090,770	PPD: Infrastruktur Wilayah Juara JJ: Pansela Juara, Transportasi Juara PPD: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata JJ: Pariwisata Juara	Dinas Perhubungan	
		1	Jumlah Barang Dan Penumpang Angkutan Laut																
			A. Barang	Ton	37,465,628	28,541,917	35,673,164		37,623,727		39,680,944		41,850,647		41,850,647				
			B. Penumpang	Teus	N/A	N/A	886,000		886,000		886,000		886,000		886,000				
			B. Penumpang	Orang	-	-	22,630		23,762		24,894		26,026		27,158				
		2	Tingkat Ketersediaan Prasarana Dan Keselamatan Perhubungan Laut Di Jawa Barat	Persen	27.78	32.03	36.36		60.22		92.04		100.00		100.00				
11	Program Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Massal Perkotaan Berbasis Rel dan Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian							17,454,690,000		18,752,940,000		24,718,140,000		2,576,200,000		63,501,970,000	PPD: Infrastruktur Wilayah Juara JJ: Transportasi Juara, Pansela Juara PPD: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata JJ: Pariwisata Juara	Dinas Perhubungan	
		1	Jumlah Penumpang Kereta Api	Penumpang	34,895,277	37,319,593	38,827,305		39,603,851		40,395,928		41,203,846		41,203,846				
		2	Tingkat ketersediaan prasarana moda perkeretaapian	Persen	N/A	3.00	28		32		89.6		100		100				
12	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I							116,045,500,000		90.37	18,000,000,000	90.57	-	90.72	-	134,045,500,000	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah Juara JJ: Transportasi Juara, Pansela Juara PPD: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata JJ: Pariwisata Juara	Dinas Bina Marga	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal										KONDISI AKHIR		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN JABAR JUARA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
			2017		2018		2020		2021		2022		2023				TARGET	RP.
			TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			TARGET	RP.
13	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II	1	Presentase peningkatan aksesibilitas menuju sentra-sentra ekonomi dan kawasan potensial Di Wilayah Pelayanan II	Persen	78.1	79.68	80.08	92,566,674,000	80.54	170,500,000,000	81.06	95,760,000,000	81.65	33,516,000,000	81.65	392,342,674,000	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Transportasi Juara, Pansela Juara PPD: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata JJ: Pariwisata Juara	Dinas Bina Marga
14	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III	1	Presentase peningkatan aksesibilitas menuju sentra-sentra ekonomi dan kawasan potensial Di Wilayah Pelayanan III	Persen	92.28	92.28	92.36	119,288,918,620	92.41	379,833,870,948	92.46	432,476,712,329	92.52	83,260,800,000	92.52	1,014,860,301,897	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Transportasi Juara, Pansela Juara PPD: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata JJ: Pariwisata Juara	Dinas Bina Marga
15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV	1	Presentase peningkatan aksesibilitas menuju sentra-sentra ekonomi dan kawasan potensial Di Wilayah Pelayanan IV	Persen	82.20	82.20	82.88	-	83.22	2,628,000,000	83.61	120,000,000,000	84.06	-	84.06	122,628,000,000	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Transportasi Juara, Pansela Juara PPD: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata JJ: Pariwisata Juara	Dinas Bina Marga
16	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V	1	Presentase peningkatan aksesibilitas menuju sentra-sentra ekonomi dan kawasan potensial Di Wilayah Pelayanan V	Persen	94.66	94.66	94.83	-	95.01	104,000,000,000	95.09	165,984,000,000	95.13	-	95.13	269,984,000,000	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Transportasi Juara, Pansela Juara PPD: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata JJ: Pariwisata Juara	Dinas Bina Marga
17	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI	1	Presentase peningkatan aksesibilitas menuju sentra-sentra ekonomi dan kawasan potensial Di Wilayah Pelayanan VI	Persen	92.80	93.20	93.92	12,000,000,000	93.99	100,470,000,000	94.07	250,191,658,656	94.15	120,960,000,000	94.15	483,621,658,656	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Transportasi Juara PPD: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata JJ: Pariwisata Juara	Dinas Bina Marga
18	Program Peningkatan, Pemeliharaan Berkala dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Wilayah Pelayanan I	1	Tingkat kemantapan jalan di Wilayah Pelayanan I	Persen	88.72	89.60	95.13	120,438,000,000	99.22	139,320,200,000	99.97	123,945,600,000	100	107,633,400,000	100	491,337,200,000	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Transportasi Juara, Pansela Juara PPD: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata JJ: Pariwisata Juara	Dinas Bina Marga
19	Program Peningkatan, Pemeliharaan Berkala dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Wilayah Pelayanan II	1	Tingkat kemantapan jalan di Wilayah Pelayanan II	Persen	83.62	84.50	93.13	108,540,000,000	98.89	126,058,400,000	99.95	119,889,600,000	100	108,981,600,000	100	463,469,600,000	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Transportasi Juara, Pansela Juara PPD: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata JJ: Pariwisata Juara	Dinas Bina Marga
20	Program Peningkatan, Pemeliharaan Berkala dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Wilayah Pelayanan III	1	Tingkat kemantapan jalan di Wilayah Pelayanan III	Persen	93.23	94.1	97.43	178,591,500,000	99.59	199,341,000,000	99.98	182,798,400,000	100	160,826,400,000	100	721,557,300,000	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Transportasi Juara PPD: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata JJ: Pariwisata Juara	Dinas Bina Marga
21	Program Peningkatan, Pemeliharaan Berkala dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Wilayah Pelayanan IV	1	Tingkat kemantapan jalan di Wilayah Pelayanan IV	Persen	87.37	88.23	94.37	123,025,500,000	99.09	143,188,800,000	99.96	135,816,000,000	100	123,895,800,000	100	525,926,100,000	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Transportasi Juara PPD: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata JJ: Pariwisata Juara	Dinas Bina Marga
22	Program Peningkatan, Pemeliharaan Berkala dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Wilayah Pelayanan V	1	Tingkat kemantapan jalan di Wilayah Pelayanan V	Persen	88.92	89.80	95.43	93,339,000,000	99.26	105,248,000,000	99.97	86,774,400,000	100	74,176,200,000	100	359,537,600,000	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Transportasi Juara PPD: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata JJ: Pariwisata Juara	Dinas Bina Marga
23	Program Peningkatan, Pemeliharaan Berkala dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Wilayah Pelayanan VI	1	Tingkat kemantapan jalan di Wilayah Pelayanan VI	Persen	94.69	95.57	96.67	114,642,000,000	99.46	126,233,200,000	99.98	113,947,200,000	100	102,349,800,000	100	457,172,200,000	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Transportasi Juara PPD: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata JJ: Pariwisata Juara	Dinas Bina Marga
24	Program Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan						11,202,739,875		11,911,689,650		11,949,589,200		10,455,890,550		45,519,909,275	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Transportasi Juara PPD: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata JJ: Pariwisata Juara	Dinas Bina Marga	
		1	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan teknis yang siap bangun	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
		2	Persentase ketersediaan data teknis untuk pengelolaan jalan	Persen	9.12	10.12	35.46		56.97		78.48		100		100			
25	Program Pengawasan dan Pemanfaatan Jalan dan Jembatan						25,673,696,500		30,186,243,600		28,750,366,400		24,233,621,200		108,843,927,700	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Transportasi Juara PPD: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata JJ: Pariwisata Juara	Dinas Bina Marga	
		1	Persentase pengawasan teknis pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
		2	Persentase monitoring pelaksanaan pengelolaan jalan	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
		3	Persentase kelengkapan peralatan pemeliharaan jalan	Persen	52	52	58		64		69		74		74			
Sasaran:																		
3.1.3.	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	a.	Indeks Desa Membangun	Poin	0.64	0.64	0.66		0.67		0.68		0.69		0.69		IKU Pemerintah Daerah	
Program:																		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal										KONDISI AKHIR		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN JABAR JUARA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
			2017		2018		2020		2021		2022		2023				TARGET	RP.
			TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.				
1	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Desa	1	Jumlah Bumdesa Yang Mendapat Pendampingan Pembangunan Ekonomi Desa Yang Mandiri	Bumdesa	180	180	180	53,307,700,000	180	55,391,000,000	180	56,297,500,000	180	56,611,477,765	180	221,607,677,765	PPD: Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) JJ: Satu Desa Satu BUMDes, One Village One Company (OVOC), CEO BUMDesa (Chief Executive Officer), Desa Sejahtera Mandiri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	Program Pengembangan Potensi Desa						5,832,860,000								38,852,442,525	PPD: Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) JJ: Desa Sejahtera Mandiri, Sapa Warga, Penguatan Infrastruktur Perdesaan, Jembatan Desa, Desa Wisata	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
		1	Persentase Inovasi Dan TTG Yang Dihasilkan Dari 27 Kabupaten/Kota.	Jenis	8	8	13		18			22		27				
		2	Persentase Desa Yang Mendapat Bantuan APBD	Desa	5312	5312	5312		5312			5312		5312	5312			
3	Program Bina Aparatur dan Aset Pemerintah Desa						52,315,130,000								214,450,630,000	PPD: Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) JJ: Desa Digital, Patriot Desa, Desa Sejahtera Mandiri, Mobil Siaga, Sapa warga, Penguatan Infrastruktur Perdesaan, Jembatan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
		1	Jumlah Desa Mandiri	Desa	63	63	89		115			141		167	167			
		2	Persentase Aparatur Desa Yang Dibina Dan Terlatih	Persen	10	10	20		30			40		50	50			
		3	Persentase Desa Digital	Desa	100	100	200		300			400		500	500			
4	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Partisipasi Masyarakat						40,928,952,176								222,636,452,176	PPD: Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) JJ: Desa Digital, Patriot Desa, Desa Sejahtera Mandiri, Mobil Siaga, Sapa warga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
		1	Persentase Desa Literasi Yang Dibina	Desa	100	100	200		300			400		500	500			
		2	Persentase Kader Penggerak Desa	Kpd	653	653	300		300			300		460	460			
		3	Persentase Kampung Adat Yang Dibina	Persen	100	100	100		100			100		100	100			
Sasaran:																		
3.1.4.	Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan	a.	Usulan Pembentukan Daerah Persiapan Otonomi Baru	Usulan	0	0	1		1			2		2		6		IKU Pemerintah Daerah
Program:																		
1	Program Penataan Daerah	1	Persentase Verifikasi Dokumen Persyaratan Dan Kelayakan Pemekaran Daerah	Persen	N/A	N/A	100	328,580,000	100	390,929,000	100	435,866,200	100	432,867,820	100	1,588,243,020	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Pansela Juara PPD: Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah JJ: Penataan daerah	Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial, Sekretariat Daerah
Tujuan:																		
3.2.	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	51,85 (metode lama)	49,54 (metode baru)	49,98		50,20			50,42		50,64		50,64		IKU Pemerintah Daerah
Sasaran:																		
3.2.1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	51,85 (metode lama)	49,54 (metode baru)	49,98		50,20			50,42		50,64		50,64		IKU Pemerintah Daerah
		b.	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	2.02	2.38	3.92		5.87			7.11		7.72		7.72		IKU Pemerintah Daerah
Program:																		
1	Program Pembinaan Evaluasi Dampak dan Risiko Kebijakan Strategis	1	Persentase peningkatan jumlah dokumen rencana kebijakan strategis yang dievaluasi dampak dan risikonya melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Persen	4.17	8.33	25	1,883,250,000	50	711,139,000	75	614,800,000	100	745,996,542	100	3,955,185,542	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Lingkungan Hidup
2	Program Pembinaan Pencegahan Dampak Lingkungan	1	Persentase peningkatan dokumen lingkungan yang dinilai dan diawasi implementasinya	Persen	15	28	55	333,060,000	70	404,816,426	85	456,728,931	100	454,404,078	100	1,649,009,435	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Lingkungan Hidup
3	Program Pembinaan dan Pengendalian Pencemaran Air, Sampah dan B3	1	Persentase penurunan konsentrasi Parameter COD (mg/L)	Persen	N/A	N/A	40	86,214,100,000	60	16,439,940,500	80	7,940,850,000	100	15,933,085,570	100	126,527,976,070	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara, Kelola Sampah Juara	Dinas Lingkungan Hidup
4	Program Pembinaan Konservasi Lingkungan untuk Masyarakat dan Mitra Lingkungan						3,465,480,000								4,119,009,900	15,701,557,400	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara, Kelola Sampah Juara	Dinas Lingkungan Hidup
		1	Persentase peningkatan desa berbudaya lingkungan	Persen	N/A	12	12.2		12.3			12.4		12.5		12.5		
		2	Persentase peningkatan kemitraan lingkungan	Persen	N/A	N/A	40		60			80		100		100		
5	Program Pelestarian Keanekaragaman Hayati	1	Persentase peningkatan luasan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persen	N/A	88.4	94.12	1,845,040,000	96.97	1,961,554,000	100	2,095,534,000	100	2,642,209,840	100	8,544,337,840	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Lingkungan Hidup
6	Program Peningkatan Penyelesaian Kasus Lingkungan	1	Persentase peningkatan pengawasan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan hidup pelaku usaha dan/kegiatan dalam pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup	Persen	N/A	N/A	65.8	3,045,478,000	77.2	3,481,907,623	88.6	3,753,876,636	100	3,633,075,952	100	13,914,338,211	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Lingkungan Hidup
7	Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Lingkungan						650,420,000								694,671,123	2,614,148,532	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Lingkungan Hidup
		1	Persentase peningkatan jumlah parameter yang terakreditasi di setiap bahan/produk yang diuji	Persen	46.87	56.25	71.87		81.25			90.62		100		100		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal										KONDISI AKHIR		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN JABAR JUARA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
			2017		2018		2020		2021		2022		2023				TARGET	RP.	
			TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			TARGET	RP.	
35	Program Pelayanan dan Pengembangan Laboratorium ESDM Bidang Air Tanah	1	Persentase sample air tanah yang diuji kualitasnya	Persen	N/A	N/A	1	150,000,000	1.5	200,000,000	2	220,000,000	3	250,000,000	3	820,000,000	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara, Energi Juara	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
36	Program Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan						1,325,587,500		1,657,100,500		1,995,223,875		1,997,174,055		6,975,085,930	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat berbasis inovasi JJ: Petani Juara	Dinas Kehutanan		
		1	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Persen	50	50	50		35		25		20		20				
		2	Persentase Layanan Perizinan Perhutanan Sosial	Persen	90	90	90		90		100		100		100				
37	Program Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan CDK Wilayah I	1	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Persen	50	50	50	374,000,000	35	411,400,000	25	309,723,700	20	327,782,708	20	1,422,906,408	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat berbasis inovasi JJ: Petani Juara	Dinas Kehutanan	
38	Program Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan CDK Wilayah II	1	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Persen	50	50	50	374,000,000	35	411,400,000	25	309,723,700	20	327,782,708	20	1,422,906,408	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat berbasis inovasi JJ: Petani Juara	Dinas Kehutanan	
39	Program Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan CDK Wilayah III	1	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Persen	50	50	50	374,000,000	35	411,400,000	25	309,723,700	20	327,782,708	20	1,422,906,408	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat berbasis inovasi JJ: Petani Juara	Dinas Kehutanan	
40	Program Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan CDK Wilayah IV	1	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Persen	50	50	50	519,700,000	35	600,644,000	25	539,744,700	20	545,587,548	20	2,205,676,248	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat berbasis inovasi JJ: Petani Juara	Dinas Kehutanan	
41	Program Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan CDK Wilayah V	1	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Persen	50	50	50	711,600,000	35	821,392,000	25	932,668,000	20	669,865,680	20	3,135,525,680	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat berbasis inovasi JJ: Petani Juara	Dinas Kehutanan	
42	Program Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan CDK Wilayah VI	1	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Persen	50	50	50	374,000,000	35	455,444,000	25	696,190,000	20	792,134,000	20	2,317,768,000	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat berbasis inovasi JJ: Petani Juara	Dinas Kehutanan	
43	Program Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan CDK Wilayah VII	1	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Persen	50	50	50	374,000,000	35	411,400,000	25	309,723,700	20	327,782,708	20	1,422,906,408	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat berbasis inovasi JJ: Petani Juara	Dinas Kehutanan	
44	Program Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan CDK Wilayah VIII	1	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Persen	50	50	50	374,000,000	35	411,400,000	25	309,723,700	20	327,782,708	20	1,422,906,408	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat berbasis inovasi JJ: Petani Juara	Dinas Kehutanan	
45	Program Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan CDK Wilayah IX	1	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Persen	50	50	50	374,000,000	35	411,400,000	25	309,723,700	20	327,782,708	20	1,422,906,408	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat berbasis inovasi JJ: Petani Juara	Dinas Kehutanan	
46	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	1	Persentase Pengurangan Luas Lahan Kritis	Persen	0.65	0.65	0.65	893,365,000	0.65	1,073,003,800	0.65	1,248,411,450	0	1,263,489,018	0	4,478,269,268	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Kehutanan	
47	Program Pengelolaan DAS CDK Wilayah I	1	Persentase Pengurangan Luas Lahan Kritis di CDK Wilayah I	Persen	1.21	1.21	1.21	3,847,987,500	1.56	4,977,065,515	1.85	5,877,670,816	1	6,733,060,648	1	21,435,784,479	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Kehutanan	
48	Program Pengelolaan DAS CDK Wilayah II	1	Persentase Pengurangan Luas Lahan Kritis di CDK Wilayah II	Persen	N/A	N/A	1.31	4,076,890,170	2.22	5,026,654,187	2.22	5,476,608,707	2	5,578,957,545	2	20,159,110,608	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Kehutanan	
49	Program Pengelolaan DAS CDK Wilayah III	1	Persentase Pengurangan Luas Lahan Kritis di CDK Wilayah III	Persen	N/A	N/A	0.82	2,813,502,244	0.40	5,018,125,484	0.45	5,610,858,532	0	5,739,619,415	0	19,182,105,675	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Kehutanan	
50	Program Pengelolaan DAS CDK Wilayah IV	1	Persentase Pengurangan Luas Lahan Kritis di CDK Wilayah IV	Persen	N/A	N/A	0.31	3,457,775,698	0.31	3,928,922,666	0.26	4,391,652,311	0	4,384,366,612	0	16,162,717,287	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Kehutanan	
51	Program Pengelolaan DAS CDK Wilayah V	1	Persentase Pengurangan Luas Lahan Kritis di CDK Wilayah V	Persen	N/A	N/A	0.87	7,935,066,101	0.78	6,923,344,913	0.70	7,766,429,238	1	8,124,399,717	1	30,749,239,970	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Kehutanan	
52	Program Pengelolaan DAS CDK Wilayah VI	1	Persentase Pengurangan Luas Lahan Kritis di CDK Wilayah VI	Persen	N/A	N/A	0.76	4,041,959,559	0.90	4,948,273,015	0.90	5,534,020,816	1	5,655,097,928	1	20,179,351,318	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Kehutanan	
53	Program Pengelolaan DAS CDK Wilayah VII	1	Persentase Pengurangan Luas Lahan Kritis di CDK Wilayah VII	Persen	N/A	N/A	1.32	4,230,782,711	1.32	4,852,626,482	1.32	5,439,968,081	1	5,578,048,724	1	20,101,425,998	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Kehutanan	
54	Program Pengelolaan DAS CDK Wilayah VIII	1	Persentase Pengurangan Luas Lahan Kritis di CDK Wilayah VIII	Persen	N/A	N/A	1.70	4,462,511,612	3.00	5,795,330,773	3.00	6,476,942,800	3	6,718,720,915	3	23,453,506,100	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Kehutanan	
55	Program Pengelolaan DAS CDK Wilayah IX	1	Persentase Pengurangan Luas Lahan Kritis di CDK Wilayah IX	Persen	N/A	N/A	3.35	5,119,717,445	3.29	5,857,060,397	3.29	6,612,744,585	3	6,845,521,797	3	24,435,044,224	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Kehutanan	
56	Program Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	1	Persentase sumber benih yang terbangun	Persen	100	100	100	1,850,125,000	100	2,264,515,000	100	2,663,966,250	100	2,651,551,650	100	9,430,157,900	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Kehutanan	
57	Program Kondisi dan Penataan Batas Kawasan Hutan	1	Persentase Kesiapan Dokumen Arah dan Dokumen Tata Batas	Persen	100	100	100	880,000,000	100	968,000,000	100	722,333,700	100	981,653,708	100	3,551,987,408	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Kehutanan	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal								Kondisi Akhir				PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN JABAR JUARA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
			2017		2018		2020		2021		2022		2023					
			TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.				
83	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman						27,670,710,000		35,780,000,000		98,631,840,000		1,935,522,395,119		2,097,604,945,119	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara, Kota Juara, Kelola Sampah Juara PPD: Subsidi Gratis Golekmah (Golongan Ekonomi Lemah) JJ: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)	Dinas Perumahan dan Permukiman	
	1	Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	Persen	67.01	70.74	73.33			76		78.6		81.33		81.33			
	2	Cakupan Pelayanan Penanganan Persampahan	Persen	67.11	67.87	71			73		75		77		77			
	3	Cakupan Pengurangan Sampah	Persen	N/A	N/A	5.9			8.31		10.72		13.13		13.13			
	4	Cakupan Pelayanan Air Minum	Persen	73.17	76.85	80			82		84		86		86			
	5	Pengurangan Luasan Genangan Di Permukiman	Persen	N/A	N/A	70			55		40		25		25			
84	Program Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman						493,602,370,000		384,582,000,000		507,950,000,000		3,180,000,000		1,389,314,370,000	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara, Kota Juara, Kelola Sampah Juara PPD: Subsidi Gratis Golekmah (Golongan Ekonomi Lemah) JJ: Buruh Juara	Dinas Perumahan dan Permukiman	
	1	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Persen	76.91	71.91	62			57		52		47		47			
	2	Persentase Prasarana Dan Sarana Yang Dibangun Dan Dikembangkan	Persen	45	50	22.11			24.03		16.34		5.79		5.79			
Sasaran:																		
3.2.2.	Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik	a.	Indeks Penggunaan Air	Poin	NA	NA	11,910		11,834		11,822		11,811		11,811		IKU Pemerintah Daerah	
Program:																		
1	Program Perencanaan Teknis Sumber Daya Air	1	Persentase penerapan perencanaan teknis sumber daya air	Persen	N/A	N/A	25.00	3,885,000,000	40.00	4,095,000,000	60.00	4,200,000,000	80.00	3,885,000,000	80.00	16,065,000,000	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Sumber Daya Air
2	Program Bina Konstruksi Sumber Daya Air	1	Persentase hasil kerja konstruksi sumber daya air yang sesuai standar (alternatif 2)	Persen	N/A	N/A	34.17	600,000,000	35.02	457,250,000	35.90	470,000,000	36.79	461,000,000	36.79	1,988,250,000	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara PPD: Gerbang Desa JJ: Gerbang Desa Juara	Dinas Sumber Daya Air
3	Program Bina Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	1	Persentase sumber air yang dikelola dengan baik	Persen	N/A	N/A	28.69	518,000,000	28.77	614,250,000	28.86	700,000,000	28.94	749,250,000	28.94	2,581,500,000	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara PPD: Gerbang Desa JJ: Gerbang Desa Juara	Dinas Sumber Daya Air
4	Program Bina Manfaat Sumber Daya Air	1	Tingkat kepatuhan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya air	Persen	N/A	N/A	74.94	1,017,500,000	75.52	1,345,500,000	76.11	1,660,000,000	76.69	1,794,500,000	76.69	5,817,500,000	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Sumber Daya Air
5	Program Pengelolaan Sumber Daya Air di WS. Ciliwung-Cisadane						14,824,142,500		15,756,000,000		16,440,000,000		15,466,000,000		62,486,142,500	PPD: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata JJ: Pariwisata Juara PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Sumber Daya Air	
		1	Kapasitas Tampung Sumber Air di WS. Ciliwung-Cisadane	M3	N/A	N/A	17,126,818		17,983,159		18,882,317		19,826,432		19,826,432			
		2	Persentase Sungai dan atau Drainase Utama yang Terpelihara pada WS.Ciliwung-Cisadane	Persen	N/A	N/A	46.00		47.00		48.00		49.00		49.00			
6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air di WS. Cisadea-Cibareno						18,463,000,000		20,377,500,000		22,040,000,000		21,460,000,000		82,340,500,000	PPD: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata JJ: Pariwisata Juara PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Sumber Daya Air	
		1	Kapasitas Tampung Sumber Air di WS. Cisadea-Cibareno	M3	N/A	N/A	1,510,128		1,516,128		1,522,128		1,528,128		1,528,128			
		2	Persentase Panjang sungai yang dapat dilakukan pengendalian dan penataan di WS. Cisadea-Cibareno	Persen	N/A	N/A	0.06		0.09		0.12		0.15		0.15			
		3	Persentase Titik pantai yang dapat dilakukan pengamanan dan penataan di WS. Cisadea-Cibareno	Persen	N/A	N/A	18.18		18.18		18.18		18.18		18.18			
7	Program Pengelolaan Sumber Daya Air di WS. Citarum						13,493,900,000		13,084,500,000		13,740,000,000		12,025,000,000		52,343,400,000	PPD: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata JJ: Pariwisata Juara PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Sumber Daya Air	
		1	Kapasitas Tampung Sumber Air di WS. Citarum	M3	N/A	N/A	6,598,490		6,604,490		6,610,490		6,616,490		6,616,490			
		2	Persentase Sungai dan atau Drainase Utama yang Terpelihara pada WS.Citarum	Persen	N/A	N/A	20.00		22.50		24.50		26.50		26.50			
8	Program Pengelolaan Sumber Daya Air di WS. Cimanuk-Cisanggarung						14,134,000,000		15,366,000,000		16,440,000,000		15,836,000,000		61,776,000,000	PPD: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata JJ: Pariwisata Juara PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Sumber Daya Air	
		1	Kapasitas Tampung Sumber Air di WS. Cimanuk-Cisanggarung	M3	N/A	N/A	189,865,890		189,871,890		189,877,890		189,883,890		189,883,890			
		2	Persentase Sungai dan atau Drainase Utama yang Terpelihara pada WS.Cimanuk-Cisanggarung	Persen	N/A	N/A	14.29		14.29		14.29		14.29		14.29			



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal								Kondisi Akhir				PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN JABAR JUARA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
			2017		2018		2020		2021		2022		2023				Kondisi Akhir	
			TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			TARGET	RP.
33	Program Air Tanah Wilayah VI Tasikmalaya	1	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	Persen	1	1	3	220,000,000	4	110,942,000	5	142,770,000	6	148,855,000	6	622,567,000	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
34	Program Air Tanah Wilayah VII Cirebon	1	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	Persen	1	1	3	190,000,000	4	210,000,000	5	250,000,000	6	127,590,000	6	777,590,000	PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sasaran:																		
3.2.3.	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	a.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin	166	166	164		163		162		161		161			IKU Pemerintah Daerah
Program:																		
1	Program pengendalian daya rusak air	1	Persentase kejadian daya rusak air yang ditangani	Persen	N/A	N/A	6.00	3,256,000,000	7.50	4,036,500,000	8.00	4,760,000,000	10.00	4,976,500,000	10.00	17,029,000,000	PPD: Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Tanggap Bencana Juara PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Sumber Daya Air
2	Program pengendalian daya rusak air pada WS. Cisadea-Cibareno	1	Persentase kejadian daya rusak air yang ditangani pada WS. Cisadea-Cibareno	Persen	N/A	N/A	22.50	1,850,000,000	22.50	2,047,500,000	22.50	2,200,000,000	22.50	2,220,000,000	22.50	8,317,500,000	PPD: Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Tanggap Bencana Juara PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Sumber Daya Air
3	Program pengendalian daya rusak air pada WS. Ciwulan-Cilaki	1	Persentase kejadian daya rusak air yang ditangani pada WS. Ciwulan-Cilaki	Persen	N/A	N/A	15.38	740,000,000	15.38	780,000,000	15.38	1,000,000,000	15.38	925,000,000	15.38	3,445,000,000	PPD: Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Tanggap Bencana Juara PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Sumber Daya Air
4	Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan penanggulangan bencana	1	Persentase kapasitas SDM dan kekuatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana	Persen	100	100	100	5,552,331,000	100	6,507,190,000	100	7,634,992,000	100	7,715,820,000	100	27,410,333,000	PPD: Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Tanggap Bencana Juara PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Program Pemulihan Pasca Bencana	1	Terpulanginya kehidupan dan Penghidupan	Persen	100	100	100	1,330,115,000	100	1,571,350,000	100	1,990,560,000	100	1,885,500,000	100	6,777,525,000	PPD: Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Tanggap Bencana Juara PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Program Perlindungan Masyarakat	1	Tingkat Kesiapsiagaan penanganan bencana oleh Satlinmas	Persen	0.23	0.26	1.69	771,985,500	2.37	859,409,500	2.97	952,696,650	3.49	895,488,500	3.49	3,479,580,150	PPD: Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Tanggap Bencana Juara	Satuan Polisi Pamong Praja
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan							71,329,511,900		97,006,191,800		98,499,665,000		59,292,666,000		326,128,034,700	PPD: Akses Pendidikan untuk Semua JJ: Tanggap Bencana Juara PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara, Kota Juara PPD: Subsidi Gratis Golekmah (Golongan Ekonomi Lemah) JJ: Buruh Juara, Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)	Dinas Perumahan dan Permukiman
		1	Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni	Persen	93.04	98.46	98.08		99.38		99.69		100		100			
		2	Penyediaan Rumah Layak Huni	Persen	91.02	91.32	91.41		92.25		92.57		92.88		92.88			
		3	Persentase Penanganan Hunian Rumah Untuk Pendukung Pelaksanaan Program Pemerintah Dan Pasca Bencana yang ditangani	Persen	3.7	3.7	100		100		100		100		100			
		4	Persentase Layanan Pembinaan Teknis Bangunan Gedung Dan Rumah Negara	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
Misi 4: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi Dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan																		
Tujuan:																		
4.1.	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi	a.	Produk Domestik Regional Bruto (ADHB) (Rp. Trilyun)	Persen	1786.09	1911.116	2188.04		2341.2		2505.08		2680.44		2680.44			IKU Pemerintah Daerah
Sasaran:																		
4.1.1.	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan	a.	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Poin	85.2	81.6	83.2		84		84.8		85.6		85.6			IKU Pemerintah Daerah
		b.	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	108.39	110.9	115.36		117.65		120		122.38		122.38			IKU Pemerintah Daerah
Program:																		
1	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan							2,809,200,052		3,229,753,478		3,707,754,394		3,690,322,947		13,437,030,871	PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat berbasis inovasi JJ: Petani Juara PPD: Gerakan Bangun Desa JJ: One Village One Company (OVOC) PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Pantura Juara	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		1	Produktivitas Tanaman Pangan	Kw/Ha	60.03	56.39	57.26		57.76		58.26		58.76		58.76			
		2	Persentase Penerapan Sertifikat Mutu Hasil Tanaman Pangan	Persen	20	20	20		20		20		20		20			
2	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Hortikultura							5,396,047,800		6,203,867,230		7,122,034,590		7,088,551,422		25,810,501,042	PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat berbasis inovasi JJ: Petani Juara PPD: Gerakan Bangun Desa JJ: One Village One Company (OVOC)	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		1	Produktivitas Tanaman Hortikultura	Kw/Ha	118.74	101.85	90.12		90.19		90.26		90.34		90.34			
		2	Persentase Penerapan Sertifikat Mutu Hasil Tanaman Hortikultura	Persen	20	20	20		20		20		20		20			



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal								KONDISI AKHIR		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN JABAR JUARA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
			2017		2018		2020		2021		2022				2023			
			TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			TARGET	RP.		
22	Program ketersediaan dan distribusi						4,640,071,858		5,444,584,203			6,259,697,580		6,197,100,605		22,541,454,247	PPD: Desentralisasi Layanan Kesehatan JJ: Kesehatan Juara PPD: Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) JJ: Desa Sejahtera Mandiri PPD: Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi JJ: Logistik Juara, Petani Juara	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	1	Rasio Komposisi PPH Ketersediaan Terhadap PPH Konsumsi																
		- Padi-Padian	Point	36.5	35.2	≥ 25			≥ 25			≥ 25		≥ 25		≥ 25		
		- Umbi-Umbian	Point	2.8	2.9	≥ 2,5			≥ 2,5			≥ 2,5		≥ 2,5		≥ 2,5		
		- Pangan Hewani	Point	17.1	16.3	17.5		18.0		18.5		19.0		19.0		19.0		
		- Minyak Dan Lemak	Point	1.1	4.5	4.5		4.5		4.6		4.6		4.6		4.6		
		- Buah Atau Biji Berminyak	Point	0.8	0.3	0.6		0.7		0.8		0.9		0.9		0.9		
		- Kacang-Kacagan	Point	13	10	≥ 10		≥ 10		≥ 10		≥ 10		≥ 10		≥ 10		
		- Gula	Point	0.8	1.8	2.0		2.1		2.2		2.3		2.3		2.3		
		- Sayur Dan Buah	Point	34.8	30	≥ 30		≥ 30		≥ 30		≥ 30		≥ 30		≥ 30		
	2	Persentase Daerah Rawan Pangan Yang Diintervensi	Persen	61 desa terhadap 574 desa yang diintervensi	61 desa terhadap 574 desa yang diintervensi	10		10		10		10		10		10		
	3	Rasio Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Dari Angka Ideal	Persen	902,21 ton CPPD ideal bdsk permentan no 11 tahun 2018	792,24 ton terhadap CPPD ideal bdsk permentan no 11 tahun 2018	5		5		5		5		5		5		
	4	Persentase Peningkatan Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat	Persen	188 kelompok	92 kelompok	10		10		10		10		10		10		
	5	Stabilitas Harga Dan Pasokan Pangan (CV) :																
		- Beras	Poin	2.91	4.93	≤ 10		≤ 10		≤ 10		≤ 10		≤ 10		≤ 10		
		- Cabe Merah	Poin	29.91	15.78	≤ 25		≤ 25		≤ 25		≤ 25		≤ 25		≤ 25		
		- Bawang Merah	Poin	19.24	13.31	≤ 25		≤ 25		≤ 25		≤ 25		≤ 25		≤ 25		
		- Daging Ayam	Poin	4.62	6.79	≤ 10		≤ 10		≤ 10		≤ 10		≤ 10		≤ 10		
	6	HPP Gabah Kering Panen (GKP) Di Tingkat Petani/Produsen	Rp	4.651	4.870	≥ HPP		≥ HPP		≥ HPP		≥ HPP		≥ HPP		≥ HPP		
23	Program pelatihan peternakan dan ketahanan pangan						1,195,820,126		1,403,155,720			1,613,223,368		1,597,091,134		5,809,290,347	PPD: Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) JJ: Desa Sejahtera Mandiri PPD: Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi JJ: Logistik Juara, Petani Juara	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	1	Persentase Penerapan Hasil Pelatihan Bidang Peternakan dan Ketahanan Pangan	Persen	53	58	65		70		75		80		80		80		
	2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan	Persen	70.41	72.71	80.5		81.0		81.5		82.0		82.0		82.0		
24	Program Produksi Peternakan						5,069,413,333		5,948,366,447			6,838,901,496		6,770,512,481		24,627,193,757	PPD: Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) JJ: Desa Sejahtera Mandiri PPD: Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi JJ: Logistik Juara, Petani Juara	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	1	Laju pertumbuhan populasi ternak ruminansia besar	Persen	623.904 (ekor)	629.324 ekor Angka sementara	1		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		
	2	Laju pertumbuhan populasi ternak ruminansia kecil	Persen	12.676.928 (ekor)	12.883.107 ekor (angka sementara)	2		2		2		2		2		2		
	3	Laju pertumbuhan ternak unggas	Persen	173.796.943 (ekor)	179.581.686 ekor (angka sangat sementara)	2.5		2.5		2.5		2.5		2.5		2.5		
	4	Persentase pelaku usaha dengan produktivitas yang meningkat	Persen	8	13.74	23		28		33		38		38		38		
25	Program Perbibitan dan pengembangan inseminasi buatan Sapi perah Bunikasih						1,548,760,610		1,817,290,294			2,089,358,385		2,068,464,801		7,523,874,091	PPD: Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) JJ: Desa Sejahtera Mandiri PPD: Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi JJ: Logistik Juara, Petani Juara	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	1	Persentase bibit ternak betina sesuai SNI dari produksi bibit betina yang dihasilkan	Persen	27	28	33		36		38		40		40		40		
	2	Jumlah produksi susu	Persen	250,000	265,000	300,000												
	3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai Perbibitan dan pengembangan inseminasi buatan Sapi perah Bunikasih	Persen	79.8	79.9	81.2		81.4		81.6		82.0		82.0		82.0		
26	Program pengembangan perbibitan ternak domba dan kambing						2,039,682,000		2,393,329,400			2,751,636,800		2,724,120,432		9,908,768,632	PPD: Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) JJ: Desa Sejahtera Mandiri PPD: Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi JJ: Logistik Juara, Petani Juara	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	1	Persentase bibit domba dan kambing sesuai SNI yang dihasilkan	Persen	15	15.78	17		00000p		19		20		20		20		
	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai pengembangan perbibitan ternak domba dan kambing	Persen	80.28	84.48	84.60		84.65		84.70		84.75		84.75		84.75		
27	Program pengembangan perbibitan ternak unggas						3,478,879,632		4,082,060,293			4,693,189,045		4,646,257,155		16,900,386,125	PPD: Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) JJ: Desa Sejahtera Mandiri PPD: Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi JJ: Logistik Juara, Petani Juara	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	1	Persentase bibit ayam sentul unggul	Persen	61.17	85.30	12		13		15		17		17		17		
	2	Persentase bibit itik rambon galur murni	Persen	51.22	69.88	68		72		76		80		80		80		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PENGANGKUTAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal										KONDISI AKHIR		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN JABAR JUARA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
			2017	2018	2020		2021		2022		2023		TARGET	RP.				
			TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.						
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai pengembangan perbibitan ternak unggas	Persen	81.32	81.02	82.2		82.4		82.6		82.8		82.8			
28	Program Perbibitan dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi potong						1,903,995,000		2,234,116,500		2,568,588,000		2,542,902,120		9,249,601,620	PPD: Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) JJ: Desa Sejahtera Mandiri PPD: Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi JJ: Logistik Juara, Petani Juara	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	
		1	Laju produksi benih semen beku sapi potong	Persen	10	10	15		20		25		30		30			
		2	Persentase induk sapi potong yang memiliki SKLB	Persen	3	5	7		9		12		15		15			
		3	Persentase bibit ternak sapi potong sesuai SNI	Persen	18,6	19	21		22		23		24		24			
		4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai Perbibitan dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi potong	Persen	82	82	82.1		82.2		82.3		82.4		82.4			
29	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Perkebunan	1	Laju Peningkatan penerapan teknologi budidaya komoditas perkebunan yang tepat	Persen	N/A	N/A	1	6,802,976,000	1	7,765,510,720	1	8,806,261,904	1	9,164,450,363	1	32,539,198,987	PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat berbasis inovasi JJ: Petani Juara PPD: Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) JJ: Desa Sejahtera Mandiri	Dinas Perkebunan
30	Program Peningkatan produksi benih perkebunan secara berkelanjutan	1	Laju peningkatan produksi benih perkebunan	Persen	0.95	0.91	1	11,760,099,416	1	12,865,921,060	1	15,187,885,371	1	14,455,427,996	1	54,269,333,842	PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat berbasis inovasi JJ: Petani Juara PPD: Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) JJ: Desa Sejahtera Mandiri	Dinas Perkebunan
31	Program Peningkatan penggunaan benih bersertifikat	1	Persentase peningkatan penggunaan benih bersertifikat	Persen	2.46	2.64	3,67	2,620,241,286	3,67	2,958,685,743	3,67	3,326,090,830	3,67	3,517,241,330	3,67	12,422,259,189	PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat berbasis inovasi JJ: Petani Juara	Dinas Perkebunan
32	Program Pemberdayaan sumberdaya alam perkebunan	1	Persentase peningkatan pemanfaatan sumberdaya lahan perkebunan	Persen	N/A	N/A	1	12,170,333,455	1	13,718,468,215	1	15,400,256,659	1	16,327,393,872	1	57,616,452,201	PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat berbasis inovasi JJ: Petani Juara PPD: Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) JJ: Desa Sejahtera Mandiri	Dinas Perkebunan
33	Program Peningkatan kompetensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan permodalan petani perkebunan						6,461,425,000		7,002,473,500		7,890,857,700		8,307,915,660		29,662,671,860	PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat berbasis inovasi JJ: Petani Juara, Logistik Juara PPD: Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) JJ: Desa Sejahtera Mandiri	Dinas Perkebunan	
		1	Persentase peningkatan kompetensi SDM perkebunan	Persen	1.9	1.95	2		2		2		2		2			
		2	Persentase peningkatan kelas kelompok tani perkebunan	Persen	1.88	1.92	2		2		2		2		2			
		3	Laju peningkatan akses permodalan perkebunan	Persen	1.75	1.81	2		2		2		2		2			
34	Program Peningkatan Pengendalian OPT perkebunan secara berkelanjutan	1	Penurunan serangan OPT perkebunan	Persen	-1.04	-1.05	-1	3,844,639,553	-1	4,458,373,459	-1	5,118,046,881	-1	5,112,511,510	-1	18,533,571,403	PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat berbasis inovasi JJ: Petani Juara	Dinas Perkebunan
35	Program Peningkatan pengolahan dan pemasaran produk perkebunan						12,097,363,833		8,757,719,711		15,062,525,304		15,887,795,733		51,805,404,581	PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat berbasis inovasi JJ: Petani Juara, Logistik Juara, Pasar Juara PPD: Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) JJ: Desa Sejahtera Mandiri	Dinas Perkebunan	
		1	Laju Peningkatan jumlah petani yang mengolah produk primer	Persen	N/A	N/A	2		2		2		2		2			
		2	Laju peningkatan akses pasar bagi petani perkebunan	Persen	N/A	N/A	2		2		2		2		2			
36	Program Peningkatan Produksi Hasil Hutan	1	Jumlah Produksi Hasil Hutan	Persen	N/A	N/A	1	1,297,070,000	1	1,458,648,400	1	1,485,734,800	1	1,428,099,112	1	5,669,552,312	PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat berbasis inovasi JJ: Petani Juara PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Kehutanan
37	Program Peningkatan Produksi Hasil Hutan CDK Wilayah I	1	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di CDK Wilayah I	Persen	N/A	N/A	1	244,158,107	1	268,573,917	1	295,431,309	1	324,974,440	1	1,133,137,772	PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat berbasis inovasi JJ: Petani Juara PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Kehutanan
38	Program Peningkatan Produksi Hasil Hutan CDK Wilayah II	1	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di CDK Wilayah II	Persen	N/A	N/A	1	244,158,107	1	268,573,917	1	295,431,309	1	324,974,440	1	1,133,137,772	PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat berbasis inovasi JJ: Petani Juara PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Kehutanan
39	Program Peningkatan Produksi Hasil Hutan CDK Wilayah III	1	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di CDK Wilayah III	Persen	N/A	N/A	1	900,000,000	1	990,000,000	1	1,089,000,000	1	1,197,900,000	1	4,176,900,000	PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat berbasis inovasi JJ: Petani Juara PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Kehutanan
40	Program Peningkatan Produksi Hasil Hutan CDK Wilayah IV	1	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di CDK Wilayah IV	Persen	N/A	N/A	1	1,068,000,000	1	1,174,800,000	1	1,292,280,000	1	1,421,508,000	1	4,956,588,000	PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat berbasis inovasi JJ: Petani Juara PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Kehutanan
41	Program Peningkatan Produksi Hasil Hutan CDK Wilayah V	1	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di CDK Wilayah V	Persen	N/A	N/A	1	960,000,000	1	1,056,000,000	1	1,161,600,000	1	1,277,760,000	1	4,455,360,000	PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat berbasis inovasi JJ: Petani Juara PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Kehutanan
42	Program Peningkatan Produksi Hasil Hutan CDK Wilayah VI	1	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di CDK Wilayah VI	Persen	N/A	N/A	1	600,000,000	1	660,000,000	1	-	1	798,600,000	1	2,058,600,000	PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat berbasis inovasi JJ: Petani Juara PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Kehutanan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal								KONDISI AKHIR				PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN JABAR JUARA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
			2017		2018		2020		2021		2022		2023					
			TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.				
43	Program Peningkatan Produksi Hasil Hutan CDK Wilayah VII	1	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di CDK Wilayah VII	Persen	N/A	N/A	1	244,158,107	1	268,573,917	1	295,431,309	1	324,974,440	1,133,137,772	PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat berbasis inovasi JJ: Petani Juara PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Kehutanan	
44	Program Peningkatan Produksi Hasil Hutan CDK Wilayah VIII	1	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di CDK Wilayah VIII	Persen	N/A	N/A	1	244,158,107	1	268,573,917	1	295,431,309	1	324,974,440	1,133,137,772	PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat berbasis inovasi JJ: Petani Juara PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Kehutanan	
45	Program Peningkatan Produksi Hasil Hutan CDK Wilayah IX	1	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di CDK Wilayah IX	Persen	N/A	N/A	1	244,158,107	1	268,573,917	1	295,431,309	1	324,974,440	1,133,137,772	PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat berbasis inovasi JJ: Petani Juara PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Kehutanan	
46	Program Peningkatan Pengolahan Hasil Hutan	1	Jumlah Produksi Olahan Hasil Hutan	Persen	N/A	N/A	1	871,942,500	1	1,046,783,100	1	1,217,565,525	1	1,232,786,841	4,369,077,966	PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat berbasis inovasi JJ: Petani Juara PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Kehutanan	
Sasaran:																		
4.1.2.	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	a.	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	Persen	2.71	2.85	3,01-3,15		3,16-3,30		3,31-3,45		3,46-3,50		3,46-3,50		IKU Pemerintah Daerah	
Program:																		
1	Program Destinasi Pariwisata	1	Persentase Destinasi Wisata Yang Dikembangkan	Persen	18.52	18.52	18.52	156,718,137,500	18.52	181,738,493,000	22.22	160,854,834,650	22.22	174,167,625,900	22.22	673,479,091,050	PPD: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata JJ: Pariwisata Juara	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
2	Program Industri Pariwisata	1	Persentase Industri Kreatif Yang Dikembangkan	Persen	18.52	18.52	18.52	16,801,016,950	18.52	19,290,977,569	22.22	20,376,985,979	22.22	18,766,892,276	22.22	75,235,872,774	PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat Berbasis Inovasi JJ: Ekonomi Kreatif Juara PPD: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata JJ: Ekonomi Kreatif Juara	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	Program Pemasaran Pariwisata	1	Persentase Seni Budaya Dan Destinasi Wisata Yang Dipromosikan	Persen	14.81	14.81	17.41	6,857,200,000	20.74	6,548,704,000	22.59	7,748,340,000	24.44	7,016,063,000	24.44	28,170,307,000	PPD: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata JJ: Pariwisata Juara	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
4	Program Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Ir. H. Djuanda	1	Persentase peningkatan penerimaan jasa wisata alam	Persen	10	10	10	6,479,574,475	10	7,180,170,437	10	7,937,888,192	10	8,667,694,237	10	30,265,327,341	PPD: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata JJ: Pariwisata Juara PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara PPD: Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi JJ: Petani Juara	Dinas Kehutanan
5	Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya	1	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan	Persen	10	10	10	850,000,000	10	623,370,000	10	703,917,500	10	744,960,700	10.00	2,922,248,200	PPD: Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata JJ: Pariwisata Juara PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara	Dinas Kehutanan
Sasaran:																		
4.1.3	Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat	a.	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Persen	5.35	6.49	2.7		2.77		2.85		2.94		2.94		IKU Pemerintah Daerah	
		b.	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	4.55	4.19	3		4		4		5		5		IKU Pemerintah Daerah	
Program:																		
1	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Jawa Barat	1	Nilai ekspor non migas	USD\$	28943.52	22585.53 (TW. III)	30715.09497	6,531,885,000	31329.39687	7,034,560,000	30715.09497	7,753,945,000	30715.09497	7,185,240,000	30715.09497	28,505,630,000	PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat Berbasis Inovasi JJ: Pasar Juara, Logistik Juara, Industri Juara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri	1	Indeks Harga Konsumen Bahan Makanan	Poin	3.63		3,00 - 4,00	24,852,365,000	3,00 - 4,00	73,903,490,000	3,00 - 4,00	83,603,815,000	3,00 - 4,00	75,734,480,000	3,00 - 4,00	258,094,150,000	PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat Berbasis Inovasi JJ: Pasar Juara, Logistik Juara, UMKM Juara, Wirausaha Juara PPD: Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara JJ: Pesantren Juara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	Program Pembangunan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE)							6,885,183,600		9,033,070,360		10,092,844,232		8,402,478,630		34,413,576,822	PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat Berbasis Inovasi JJ: Industri Juara PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara, Pantura Juara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		1	Persentase pertumbuhan PMA/PMDN Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE)	Persen	0.22	N/A	2		2		2		2		2			
		2	Pertumbuhan jumlah Unit Usaha Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Persen	0.22	N/A	0.2		0.2		0.2		0.2		0.2			
4	Program Pembangunan Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka							6,547,200,000		7,869,400,000		9,936,537,500		9,079,950,000		33,433,087,500	PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat Berbasis Inovasi JJ: Industri Juara PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara, Pantura Juara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		1	Pertumbuhan PMA/PMDN Sektor Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka	Persen	0.05	N/A	2		2		2		2		2			
		2	Pertumbuhan jumlah Unit Usaha Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka	Persen	0.05	Proses	0.2		0.2		0.2		0.2		0.2			
5	Program Pemberdayaan Industri Pangan, Olahan dan Kemasan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) UPTD IPOK	Kategori	A	N/A	A	3,601,770,000	A	7,650,000,000	A	4,237,620,000	A	3,712,240,000	A	19,201,630,000	PPD: Pertumbuhan Ekonomi Umat Berbasis Inovasi JJ: Industri Juara PPD: Infrastruktur Konektivitas Wilayah JJ: Lingkungan Juara, Pantura Juara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal								KONDISI AKHIR				PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN JABAR JUARA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
			2017		2018		2020		2021		2022		2023				KONDISI AKHIR	
			TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			TARGET	RP.
		2	Nilai kriteria Perlindungan dan pemberian kemudahan	Nilai (0-16)	N/A	14	14	14	16	16	16	16	16	16				
4	Program Pengelolaan Sistem Kepegawaian	1	Nilai kriteria Sistem pendukung kepegawaian	Nilai (0-24)	N/A	21	24	1,374,812,538	24	1,441,095,208	24	1,644,631,661	24	1,639,133,801	24	6,099,673,209		
5	Program pengembangan kompetensi teknis umum dan Fungsional	1	Persentase Pejabat Struktural, Fungsional Dan Pelaksana Yang Pernah Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	Persen	18.70	18.70	18.70	5,160,647,200	37.4	5,806,210,000	56.1	6,259,070,000	74.8	5,748,800,000	74.8	22,974,727,200		
6	Program pengembangan teknis substantif	1	Persentase Pejabat Struktural, Fungsional Dan Pelaksana Yang Pernah Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif	Persen	6.38	6.38	18.7	18,111,120,000	37.4	4,130,280,000	56.1	4,358,510,000	74.8	3,961,000,000	74.8	30,560,910,000		
7	Program pengembangan kompetensi manajerial dan latsar CPNS							10,322,400,000		5,015,340,000		5,673,800,000		5,405,600,000		26,417,140,000		
		1	Persentase Pejabat Struktural Yang Pernah Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Latsar Cpn	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
		2	Presentasi Pimpinan Daerah Yang Lulus Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
		3	Presentasi Pimpinan Tinggi Yang Lulus Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
		4	Persentase Dprd/Kepala Desa/Perangkat Desa Yg Lulus Pengembangan Kompetensi Khusus	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
8	Program Pengembangan Kompetensi Pemerintahan	1	Persentase Pejabat Struktural, Fungsional Dan Pelaksana Yg Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan	Persen			25	1,900,260,000	50		75		100		100	1,900,260,000		
9	Program Uji Kompetensi dan Sertifikasi Pengembangan Kompetensi	1	Persentase Lulusan Uji Kompetensi Manajerial, Teknis, Sosial Kultural Dan Pemerintahan	Persen			18.70%	3,549,800,000	37.4%	1,720,950,000	56.10%	1,805,300,000	74.8%	1,631,000,000	74.8%	8,707,050,000		
10	Program Pengembangan Smart ASN	1	Persentase Smart ASN Pemprov Jabar	Persen	100	100	100	2,346,000,000	100	2,458,500,000	100	2,579,000,000	100	2,330,000,000	100	9,713,500,000		
11	Program pengembangan Corporate University	1	Jumlah Akreditasi Manajerial & Sosial Kultural, Teknis, Pemerintahan, ISO Dan Akreditasi Corpu Sl	Sertifikat	4	4	5	4,392,460,000	6	3,343,560,000	7	3,997,450,000	8	3,844,500,000	8	15,577,970,000		
12	Program Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi							1,505,700,000		811,305,000		928,440,000		932,000,000		4,177,445,000		
		1	Persentase Rencana Pengembangan Kompetensi Yang Sesuai Prioritas Pembangunan	Persen			100		100		100		100		100			
		2	Persentase Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaran Pengembangan Kompetensi Yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
		3	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Untuk Implementasi Proyek Perubahan Alumni	Dokumen	1	1	1		1		1		1		1			
13	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi ASN Non Provinsi	1	Jumlah ASN Non Provinsi Yang Terfasilitasi Pengembangan Kompetensi	Persen	100	100	100	351,900,000	100	393,360,000	100	438,430,000	100	419,400,000	100	1,603,090,000		
14	Program Pengelolaan Anggaran Daerah	1	Tingkat kepatuhan terhadap standar keuangan daerah	Persen	100	100	100	3,514,712,650	100	4,041,324,338	100	4,539,083,241	100	3,831,601,962	100	15,926,722,191		
15	Program Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	1	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Persen	80	80	80	1,549,046,840	90	1,781,141,538	90	2,000,519,886	90	2,036,030,900	90	7,366,739,164		
16	Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persen	100	100	100	1,157,026,163	100	1,330,384,147	100	2,963,593,686	100	1,520,768,100	100	6,971,772,096		
17	Program Pengelolaan Aset Daerah	1	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Aset Daerah	Persen	80	80	80	4,069,187,611	80	4,678,876,644	80	5,255,161,126	80	5,348,444,927	80	19,351,670,308		
18	Program Pengelolaan Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Daerah	1	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Pengamanan Dan Pemanfaatan Aset Daerah	Persen	80	80	80	17,359,724,457	80	19,932,788,295	80	22,373,558,971	80	22,689,849,092	80	82,355,920,815		
19	Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Ekonomi							4,701,061,000		5,139,120,000		3,298,833,600		4,100,130,540		17,239,145,140		
		1	Persentase Sasaran, Program Dan Kegiatan Rkpd Yang Konsisten Dengan Rpjmd Dan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Bidang Ekonomi	Persen	70	73	80		85		90		95		95			
		2	Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota Dengan Provinsi Jawa Barat Lingkup Bidang Ekonomi	Persen	70	73	80		85		90		95		95			
20	Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Fisik							2,668,090,750		3,104,577,500		2,695,024,683		2,651,786,653		11,119,479,585		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal								KONDISI AKHIR				PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN JABAR JUARA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
			2017		2018		2020		2021		2022		2023				TARGET	RP.
			TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.						
	1	Persentase Sasaran, Program Dan Kegiatan Rkpd Yang Konsisten Dengan Rjmd Dan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Bidang Fisik	Persen	70	73	80		85		90		95		95				
	2	Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota Dengan Provinsi Jawa Barat Lingkup Bidang Fisik	Persen	70	73	80		85		90		95		95				
21		Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya					5,502,538,000		5,249,860,000		5,614,016,380		6,497,421,282		22,863,835,662	PPD: Inovasi Pelayanan publik dan penataan daerah JJ: APBD Juara	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	1	Persentase Sasaran, Program Dan Kegiatan Rkpd Yang Konsisten Dengan Rjmd Dan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya	Persen	70	73	80		85		90		95		95				
	2	Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota Dengan Provinsi Jawa Barat Lingkup Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya	Persen	70	73	80		85		90		95		95				
22		Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah					3,226,245,000		2,994,000,000		3,420,495,000		2,855,680,000		12,496,420,000	PPD: Inovasi Pelayanan publik dan penataan daerah JJ: APBD Juara	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	1	Rata-rata capaian kinerja pelaksanaan pembangunan	Persen	70	80	80		85		90		95		95				
	2	Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah	Persen	70	80	80		85		90		95		95				
	3	Rata-rata capaian proyek strategis Jawa Barat yang diselesaikan	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100				
	4	Rata-rata capaian kegiatan APBN di Jawa Barat	Persen	70	75	80		85		90		95		95				
	5	Rata-rata capaian kinerja pembangunan kab/kota	Persen	75	80	85		90		95		100		100				
23		Program Perencanaan Pembangunan Daerah					9,397,435,000		9,040,500,000		18,150,000,000		9,980,685,000		46,568,620,000	PPD: Inovasi Pelayanan publik dan penataan daerah JJ: APBD Juara	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	1	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
	2	Persentase Partisipasi Publik terhadap Proses Perencanaan	Persen	40	50	60		65		70		75		75				
	3	Persentase Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
	4	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	40	64	81		97		100		100		100				
24		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sertifikat				21,515,060,000		26,576,550,000		31,004,645,538		31,376,646,683		110,472,902,221	PPD: Inovasi Pelayanan publik dan penataan daerah JJ: Birokrasi Juara	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	1	Tingkat Kematangan Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Poin	3	3	3.3		3.5		3.7		4		4				
	2	Tingkat Kematangan Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Poin	3	3	3.3		3.5		3.7		4		4				
25		Program Pengembangan Aplikasi Informatika					3,885,980,000		4,212,600,000		4,611,090,000		4,357,980,000		17,067,650,000	PPD: Inovasi Pelayanan publik dan penataan daerah JJ: Birokrasi Juara	Dinas Komunikasi dan Informatika	
26		Program Pengelolaan dan Pengembangan Informasi Komunikasi Publik					4,584,982,500		5,451,600,000		6,269,010,000		6,454,965,000		22,760,557,500	PPD: Inovasi Pelayanan publik dan penataan daerah JJ: Birokrasi Juara	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	1	Persentase Layanan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persen	90.4	90.4	90.45		90.5		90.55		90.60		90.60				
	2	Persentase Diseminasi Informasi Dan Kemitraan Komunikasi Yang Dilaksanakan	Persen	90	90	90.05		90.1		90.15		90.2		90.2				
	3	Persentase Media Komunikasi Publik Yang Dimanfaatkan	Persen	90.8	90.8	90.85		90.9		90.95		91		91				
	4	Persentase Persidangan Komisi Informasi Melalui Mediasi Dan Adjudikasi Non Litigasi	Persen	N/A	N/A	85		90		93		95		95				
27		Program Optimalisasi Kelembagaan Perangkat Daerah					981,046,000		1,180,402,500		1,389,420,000		1,115,040,000		4,665,908,500	PPD: Inovasi Pelayanan publik dan penataan daerah JJ: Birokrasi Juara	Biro Organisasi, Sekretariat Daerah	
	1	Persentase penguatan kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat berbasis kinerja	Persen	100	100	75		100		100		100		100				
	2	Persentase penataan kelembagaan berbasis kinerja	Persen	100	100	75		100		100		100		100				
28		Program Peningkatan Pelayanan Publik					938,800,000		1,193,095,000		952,010,000		1,091,810,000		4,175,715,000	PPD: Inovasi Pelayanan publik dan penataan daerah JJ: Birokrasi Juara	Biro Organisasi, Sekretariat Daerah	
	1	Persentase tingkat kepatuhan unit pelaksanaan pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	N/A	7	27		45		69		100						
	2	Persentase unit pelayanan publik bidang pertanian yang mengikuti kompetisi Abdibaktitani tingkat Nasional	Persen	5	N/A	0		15		0		15						



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal				2020				2021				2022				2023				KONDISI AKHIR		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN JABAR JUARA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2017	2018	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.						
29	Program Pengembangan Ketatalaksanaan	1	Persentase Perangkat Daerah Provinsi dengan ketatalaksanaan baik	Persen	N/A	N/A	100	743,999,000	100	888,475,000	100	1,080,660,000	100	1,091,810,000	100	3,804,944,000	PPD: Inovasi Pelayanan publik dan penataan daerah JJ: Birokrasi Juara	Biro Organisasi, Sekretariat Daerah								
30	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi							950,535,000		1,256,557,500		1,646,720,000		1,649,330,000		5,503,142,500	PPD: Inovasi Pelayanan publik dan penataan daerah JJ: Birokrasi Juara	Biro Organisasi, Sekretariat Daerah								
		1	Persentase Dokumen Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Yang Disusun Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Persen	58	N/A	100		100		100		100													
		2	Persentase Dokumen Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Disusun Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Persen	77	N/A	100		100		100		100													
		3	Persentase Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Yang Diimplementasikan	Persen	N/A	N/A	75		80		85		90													
		4	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Indeks Reformasi Birokrasi Berkategori 'B'	Persen	N/A	N/A	8		15		22		30													
31	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah I							732,724,000		855,600,000		1,005,924,000		992,096,000		3,586,344,000	PPD: Inovasi Pelayanan publik dan penataan daerah JJ: APBD Juara	Badan Pendapatan Daerah								
		1	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pendapatan I	Persen	106.09	104.34	100		100		100		100													
		2	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pendapatan I	Persen	4.02	12.28	5.71		5.71		5.71		5.71													
32	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah II							1,098,200,000		1,307,412,000		1,519,139,080		1,349,427,720		5,274,178,800	PPD: Inovasi Pelayanan publik dan penataan daerah JJ: APBD Juara	Badan Pendapatan Daerah								
		1	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pendapatan II	Persen	104.73	106.69	100		100		100		100													
		2	Rasio Efektivitas Dana Perimbangan	Persen	99.09	98.81	100		100		100		100													
		3	Rasio Efektivitas Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Persen	71.96	100	100		100		100		100													
		4	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pendapatan II	Persen	10.09	4.12	3		3		3		3													
33	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah							7,260,550,000		8,341,190,000		10,872,031,500		10,805,058,000		37,278,829,500	PPD: Inovasi Pelayanan publik dan penataan daerah JJ: Birokrasi Juara	Inspektorat								
		1	Penurunan Temuan APIP Terhadap Perangkat Daerah (PD) Provinsi	Persen	12	N/A	5		5		5		5													
		2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Terhadap PD Provinsi yang diselesaikan	Persen	95	N/A	85		90		95		100													
		3	Persentase Kasus Pengaduan Masyarakat yang ditangani	Persen	57.1	75	80		90		90		100													
		4	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	Persen	100	100	100		100		100		100													
		5	Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Nilai EPPD Masuk Kategori Sangat Tinggi (ST)	Persen	79	81	89		100		100		100													
34	Program Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja							2,838,000,000		3,260,400,000		3,535,620,000		3,513,840,000		13,147,860,000	PPD: Inovasi Pelayanan publik dan penataan daerah JJ: Birokrasi Juara	Inspektorat								
		1	Persentase Perangkat Daerah Yang Nilai Sakip-nya Adalah ≥ A	Persen	61	63	80		90		100		100													
		2	Persentase Reviu Atas Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan	Persen	100	100	100		100		100		100													
		3	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Nilai Sakip-nya Adalah ≥ BB	Pemerintah Daerah	2	2	10		15		20		25													
35	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah							5,131,500,000		5,887,200,000		6,386,985,000		6,368,835,000		23,774,520,000	PPD: Inovasi Pelayanan publik dan penataan daerah JJ: APBD Juara	Inspektorat								
		1	Persentase Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan	Persen	100	100	100		100		100		100													
		2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang diselesaikan	Persen	66.8	66.4	75		80		80		90													
		3	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Opini Atas LKPD Adalah WTP	Pemerintah Daerah	25	N/A	26		27		27		27													



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PENGANGKUTAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal								KONDISI AKHIR		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN JABAR JUARA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB							
			2017		2018		2020		2021		2022				2023						
			TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			TARGET	RP.					
36	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern dan Integritas						3,372,490,000			3,627,442,000			3,690,145,100			3,447,413,200		14,137,490,300	PPD: Inovasi Pelayanan publik dan penataan daerah JJ: Birokrasi Juara	Inspektorat	
	1	Persentase Jumlah PD Yang Mengimplementasikan SPIP	Persen	N/A	N/A	50			75			90			100			100			
	2	Persentase Jumlah Perangkat Daerah Menyusun Daftar Risiko (Risk Register)	Persen	N/A	N/A	90			100			100			100			100			
	3	Nilai Evaluasi Monitoring Dan Evaluasi RAD-PPK Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100			100			100			100			100			
	4	Persentase Perangkat Daerah Yang Dicanangkan Menjadi Zona Integritas (ZI)	Persen	N/A	N/A	90			100			100			100			100			
	5	Jumlah PD Zona Integrasi Yang Akan Ditetapkan Menjadi WBK [WBBM]	Perangkat Daerah	N/A	1	3			4			5			5			5			
Sasaran:																					
5.1.2	Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif	a.	Tingkat Efektivitas Kerjasama Daerah	Persen	N/A	N/A	60			70			80			90			90		IKU Pemerintah Daerah
Program:																					
1	Program Kerja Sama Daerah	1	Persentase Fasilitasi naskah kerja sama daerah	Persen	90	90	90	6,731,707,646	90	5,607,647,532	95	6,252,245,346	95	6,209,235,341	95	24,800,835,865	PPD: Inovasi Pelayanan publik dan penataan daerah JJ: Birokrasi Juara	Biro Pemerintahan dan Kerjasama, Sekretariat Daerah			
JUMLAH							7,248,215,397,277	8,113,576,143,189	8,593,626,842,236	9,021,691,686,022	32,952,710,692,765										



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Tabel 2
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

NOMOR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2019		PERANGKAT DAERAH
				K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar					
1	Pendidikan					
1	Program Pendidikan Menengah				1,306,738,798,631	Dinas Pendidikan
		1 APK SMA/SMK Sederajat	Persen	85		
		2 APM SMA/SMK Sederajat	Persen	65		
		3 SMA/SMK Sederajat Akreditasi A	Persen	10		
		4 SMA yang Memenuhi Standar Sarana dan Prasarana	Persen	70		
		5 SMK yang Memenuhi Standar Sarana dan Prasarana	Persen	70		
2	Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus				60,803,757,000	Dinas Pendidikan
		1 APK SLB	Persen	24		
		2 Sekolah SLB Terakreditasi A	Sekolah	5		
		3 SLB yang memenuhi standar sarana dan prasarana	Persen	20		
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan				49,211,025,000	Dinas Pendidikan
		1 Nilai Rerata Uji Kompetensi GTK SMA/MA/SMK/SLB	-	75,51		
		2 Kualifikasi S2 Guru SMA	Persen	10		
		3 Kualifikasi S2 Guru SMK	Persen	10		
		4 Kualifikasi S2 Guru SLB	Persen	5		
4	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)				1,046,697,000,000	Dinas Pendidikan
		1 Siswa Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SMP/SMA/SMK/SLB Negeri Swasta	Siswa	8.050.838		
5	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan				16,055,000,000	Dinas Pendidikan
		1 Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Pendidikan	Persen	100		
		2 Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Pendidikan	Persen	100		
		3 Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Pendidikan	Persen	100		
		4 Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Pendidikan	Persen	100		
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pendidikan				37,748,140,000	Dinas Pendidikan
		1 Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Pendidikan	Persen	100		
7	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan				179,988,810,000	Dinas Pendidikan
		1 Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Pendidikan	Persen	70		
		2 Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Pendidikan	Unit	350		
		3 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Pendidikan	Persen	100		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NOMOR (1)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2)	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) (3)	SATUAN (4)	TARGET 2019		PERANGKAT DAERAH (7)
				K (5)	Rp. (6)	
2	Kesehatan					
8	Program Promosi Kesehatan				2,759,412,300	Dinas Kesehatan
		1	Persentase Rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persen	70	
		2	Persentase Desa Siaga Aktif	Persen	85	
9	Program Pengembangan Lingkungan Sehat				1,178,521,000	Dinas Kesehatan
		1	Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Yang Berkualitas	Persen	61,5	
		2	Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jamban Sehat	Persen	56	
10	Program Pelayanan Kesehatan				221,011,767,700	Dinas Kesehatan
		1	Ratio kematian ibu	Persen	86	
		2	Ratio kematian bayi	Persen	5,9	
		3	Prevalensi Gizi Buruk	Persen	0,52	
		4	Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan	Persen	89	
11	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular				8,486,884,000	Dinas Kesehatan
		1	Persentase desa/kelurahan yang mencapai UCI \geq 90%	Persen	94	
		2	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (treatment Success Rate)	Persen	89	
		3	Prevalensi Hipertensi	Persen	28,55	
		4	Persentase Kab/Kota dengan 100% Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa	Persen	100	
		5	Prosentasi penduduk yang mengalami gangguan jiwa berat dan mendapatkan pelayanan kesehatan di RS Jiwa	Persen	44,1	
12	Program Sumber Daya Kesehatan				87,793,992,500	Dinas Kesehatan
		1	Persentase Puskesmas terisi dokter sesuai standar	Persen	100	
		2	Persentase RSUD terisi dokter spesialis Penunjang sesuai standar	Persen	64,52	
		3	Jumlah Puskesmas yang sudah Terakreditasi	Puskesmas	256	
		4	Jumlah Rumah Sakit yang sudah Terakreditasi	Rumah Sakit	95	
		5	Jumlah RS mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai standar	Rumah Sakit	99	
		6	Persentase ketersediaan obat esensial di instalasi farmasi kabupaten/kota	Persen	75	
		7	Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan	Persen	85	
13	Program Manajemen Kesehatan				5,420,980,000	Dinas Kesehatan
		1	Terpenuhinya regulasi kebijakan bidang kesehatan provinsi	Dokumen	2	
		2	Tercapainya pengelolaan data dan informasi kesehatan provinsi (Pemerintah dan Swasta)	Persen	55	
14	Program Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Akibat KLB Provinsi				1,956,627,100	Dinas Kesehatan
		1	Persentase penanganan kesehatan pada kejadian bencana dan paska bencana	Persen	100	
		2	Persentase penanganan kesehatan pada Kejadian Luar Biasa Penyakit	Persen	100	
15	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Provinsi				673,806,338,445	Dinas Kesehatan
		1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	80	
		2	Peningkatan kinerja keuangan	Persen	30	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NOMOR (1)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2)	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) (3)	SATUAN (4)	TARGET 2019		PERANGKAT DAERAH (7)		
				K (5)	Rp. (6)			
		3	Peningkatan kinerja pelayanan	Persen	70			
		4	Peningkatan mutu dan manfaat untuk masyarakat	Persen	60			
	16	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan				6,584,370,000	Dinas Kesehatan	
		1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Kesehatan	Persen	100			
		2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Kesehatan	Persen	100			
		3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Kesehatan	Persen	100			
		4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Kesehatan	Persen	100			
	17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kesehatan	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Kesehatan	Persen	100	79,462,291,937	Dinas Kesehatan
	18	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan					132,844,593,000	Dinas Kesehatan
		1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Kesehatan	Persen	70			
		2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Kesehatan	Unit	350			
		3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Kesehatan	Persen	100			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
	19	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	91,48	400,390,303,450	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	20	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan					660,407,082,100	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
		1	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	91,48			
		2	Persentase aksesibilitas menuju kawasan potensial dan pusat-pusat kegiatan	Persen	88,83			
	21	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	1	Penambahan SDM Jasa Konstruksi yang bersertifikat	Orang	100	93,577,500,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	22	Program Penataan Ruang					3,850,210,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
		1	Persentase Ketersediaan Rencana Rinci	Persen	20			
		1	Persentase Ketersediaan Rencana Rinci	Persen	20			
		2	Persentase Ketersediaan Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persen	35			
		3	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Persen	100			
	23	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang					610,280,000	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
		1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	Persen	100			
		2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	Persen	100			



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NOMOR (1)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2)	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) (3)	SATUAN (4)	TARGET 2019		PERANGKAT DAERAH (7)
				K (5)	Rp. (6)	
		3 Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	Persen	100		
		4 Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	Persen	100		
	24 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	1 Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	Persen	100	5,915,850,000	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
	25 Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang				22,920,285,000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
		1 Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	Persen	70		
		2 Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	Unit	350		
		3 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	Persen	100		
	26 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Situ, Sungai, Pantai, dan Sumber Daya Air lainnya				218,526,594,824	Dinas Sumber Daya Air
		1 Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Air	Persen	0,5		
		2 Tingkat Pelayanan Rekomendasi Perijinan Sumber Daya Air	Persen	60		
	27 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Tambak dan Jaringan Pengairan lainnya				131,618,323,000	Dinas Sumber Daya Air
		1 Indeks kinerja sistem irigasi	Persen	52		
		2 Cakupan layanan D.I. Tambak	Ha	0		
	28 Program Pengendalian Daya Rusak Air	1 Tingkat Pengurangan Titik Terdampak Banjir dan Kekeringan	Persen	5	4,900,000,000	Dinas Sumber Daya Air
	29 Program Pengelolaan Kelembagaan, Data dan Sistem Informasi Sumber Daya Air				10,063,750,000	Dinas Sumber Daya Air
		1 Tingkat Implementasi Penerapan Rekomendasi Kebijakan yang Dihasilkan Kelembagaan SDA	Persen	60		
		2 Tingkat Penyediaan Sistem Informasi SDA yang dapat diakses Masyarakat	Persen	45		
	30 Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Sumber Daya Air				1,050,000,000	Dinas Sumber Daya Air
		1 Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Sumber Daya Air	persen	100		
		2 Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Sumber Daya Air	Persen	100		
		3 Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Sumber Daya Air	Persen	100		
		4 Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Sumber Daya Air	Persen	100		
	31 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Sumber Daya Air	1 Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Sumber Daya Air	Persen	100	3,820,350,000	Dinas Sumber Daya Air
	32 Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Sumber Daya Air				26,076,231,000	Dinas Sumber Daya Air



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NOMOR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2019		PERANGKAT DAERAH	
				K	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Sumber Daya Air	Persen	70		
		2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Sumber Daya Air	Unit	350		
		3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Sumber Daya Air	Persen	100		
	33	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman				14,174,000,000	Dinas Permukiman dan Perumahan
		1	Cakupan Pelayanan Air Minum	Persen	78		
		2	Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	Persen	69		
		3	Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan	Persen	69,24		
		4	Pengurangan luasan Genangan di Permukiman (menurunkan jumlah kawasan dengan genangan lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Persen	95		
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
	34	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman				203,825,360,500	Dinas Permukiman dan Perumahan
		1	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	98,46		
		2	Presentase Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Persen	74,76		
		3	Penanganan Hunian Rumah untuk Pendukung Pelaksanaan Program Pemerintah dan Pasca Bencana	Persen	100		
		4	Terbangunnya PSU Pendukung Permukiman	Kawasan	12		
	35	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perumahan Dan Permukiman				1,300,000,000	Dinas Permukiman dan Perumahan
		1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Perumahan Dan Permukiman	Persen	100		
		2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Perumahan Dan Permukiman	Persen	100		
		3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Perumahan Dan Permukiman	Persen	100		
		4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Perumahan Dan Permukiman	Persen	100		
	36	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perumahan Dan Permukiman				966,274,638	Dinas Permukiman dan Perumahan
	37	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Perumahan Dan Permukiman				20,882,687,000	Dinas Permukiman dan Perumahan
		1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Perumahan Dan Permukiman	Persen	70		
		2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Perumahan Dan Permukiman	Unit	350		
		3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Perumahan Dan Permukiman	Persen	100		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NOMOR (1)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2)	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) (3)	SATUAN (4)	TARGET 2019		PERANGKAT DAERAH (7)	
				K (5)	Rp. (6)		
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
38	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat				8,536,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1	Jumlah penanganan kasus pelanggaran Perda dan Perkada	Kasus	150		
		2	Jumlah pemeliharaan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Kali	800		
		3	Jumlah kesiapsiagaan penanganan bencana oleh Satlinmas	Kali	100		
		4	Jumlah peningkatan kapasitas anggota Satlinmas di Jawa Barat	Orang	756		
		5	Jumlah Pol PP dan PPNS yang terdidik dan berkompeten	Orang	520		
39	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja				733,410,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja	Persen	100		
		2	indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Barat	Persen	100		
		3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja	Persen	100		
		4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Satuan Polisi Pamong Praja	Persen	100		
40	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja	Persen	100	1,107,258,200	Satuan Polisi Pamong Praja
41	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Satuan Polisi Pamong Praja					4,738,631,800	Satuan Polisi Pamong Praja
		1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja	Persen	70		
		2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja	Unit	350		
		3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja	Persen	100		
42	Program Pengurangan Kerentanan Bencana					1,424,300,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	Tingkat Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sektor Pembangunan	Persen	80		
		2	Tingkat Pengurangan Korban Jiwa Akibat Bencana Alam	Persen	75		
43	Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana					11,660,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1	Tingkat Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab./Kota	27		
		2	Tingkat Penanganan Keadaan Darurat Bencana	Persen	90		
		3	Tingkat Pemulihan Pasca Bencana	Persen	95		
44	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	1	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Persen	75	1,300,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NOMOR (1)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2)	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) (3)	SATUAN (4)	TARGET 2019		PERANGKAT DAERAH (7)
				K (5)	Rp. (6)	
45	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah				968,900,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1 Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persen	100		
		2 Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persen	100		
		3 Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persen	100		
		4 Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persen	100		
46	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persen	100	1,520,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
47	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah				4,438,600,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1 Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persen	70		
		2 Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Unit	350		
		3 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persen	100		
48	Program Kesatuan Bangsa dan Politik				9,000,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		1 Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Barat	Poin	73		
		2 Rasio masyarakat Jawa Barat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan	Persen	1,5		
		3 Persentase penurunan aksi unjuk rasa di Jawa Barat	Persen	59		
		4 Persentase penurunan konflik sosial di Jawa Barat	Persen	50		
		5 Tingkat harmonisasi kerukunan antar umat beragama	Skala	68,5		
49	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				1,150,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		1 Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persen	100		
		2 Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persen	100		
		3 Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persen	100		
		4 Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persen	100		
50	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persen	100	550,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
51	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				5,220,200,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NOMOR (1)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2)	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) (3)	SATUAN (4)	TARGET 2019		PERANGKAT DAERAH (7)
				K (5)	Rp. (6)	
		1	Persen	70		
		2	Unit	350		
		3	Persen	100		
6	Sosial					
	52 Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial	1	Persen	2,61	40,885,032,400	Dinas Sosial
	53 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				5,757,025,000	Dinas Sosial
		1	Persen	1		
		2	Persen	100.00		
	54 Program Pemberdayaan Sosial				5,033,150,000	Dinas Sosial
		1	Persen	8,85		
		2	Persen	7,92		
		3	Persen	44,00		
		4	Persen	1		
		5	Persen	45,55		
	55 Program Penanganan Fakir Miskin	1	Persen	1	3,096,905,000	Dinas Sosial
	56 Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Sosial				2,881,717,000	Dinas Sosial
		1	Persen	100		
		2	Persen	100		
		3	Persen	100		
		4	Persen	100		
	57 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Sosial	1	Persen	100	25,752,961,956	Dinas Sosial
	58 Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Sosial				24,618,608,644	Dinas Sosial
		1	Persen	70		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NOMOR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2019		PERANGKAT DAERAH
				K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2 Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Sosial	Unit	350		
		3 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Sosial	Persen	100		
II	Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Non Dasar					
7	Tenaga Kerja					
	59 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				13,077,194,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1 Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	57		
		2 Jumlah Tenaga Kerja yang Tersertifikasi	Orang	500		
		3 Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	1,000		
	60 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				4,585,427,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	50		
		2 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen	12		
	61 Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	60	4,314,050,200	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	62 Program Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan				6,065,865,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1 Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Perusahaan	12,000		
		2 Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	Perusahaan	6,000		
	63 Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi				2,703,245,000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		1 Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Persen	100		
		2 Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Persen	100		
		3 Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Persen	100		
		4 Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Persen	100		
	64 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1 Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Persen	100	29,134,800,550	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	65 Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi				18,921,903,650	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1 Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Persen	70		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NOMOR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2019		PERANGKAT DAERAH
				K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2 Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Unit	350		
		3 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Persen	100		
8	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindung Anak					
	66 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak lintas daerah Kabupaten/Kota				19,180,565,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
		1 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	Persen	60		
		2 Persentase Kab/Kota mendapat Penghargaan KLA Tingkat Nasional	Persen	70		
		3 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Persen	80		
	67 Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana				1,490,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
		1 Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana	Persen	100		
		2 Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana	Persen	100		
		3 Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana	Persen	100		
		4 Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana	Persen	100		
	68 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana	1 Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana	Persen	100	20,834,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
	69 Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana				4,614,125,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
		1 Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana	Persen	70		
		2 Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana	Unit	350		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NOMOR (1)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2)		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) (3)	SATUAN (4)	TARGET 2019		PERANGKAT DAERAH (7)	
					K (5)	Rp. (6)		
			3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana	Persen	100		
9		Pangan						
	70	Program Ketahanan Pangan	1	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	86,5	8,209,922,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
10		Pertanahan						
	71	Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan					2,950,000,000	Dinas Permukiman dan Perumahan
			1	Rekomendasi Penyelesaian konflik pertanahan dan permasalahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Persen	100		
			2	Persentase Kelengkapan data Spasial pertanahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Persen	15		
			3	Jumlah Sertifikat Tanah Rumah Tidak Layak Huni bagi MBR yang Difasilitasi	Sertifikat	10,000		
			4	Persentase Bahan Keputusan Gubernur yang dikeluarkan untuk Penetapan Lokasi pembangunan bagi kepentingan umum	Persen	100		
			5	Ketersediaan Data Spasial Pertanahan	Kawasan	10		
11		Lingkungan Hidup						
	72	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup					69,255,472,350	Dinas Lingkungan Hidup
			1	Indeks Kualitas Air	Poin	42,47		
			2	Indeks Kualitas Udara	Poin	79,31		
			3	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Bidang Pengelolaan Limbah Domestik	Persen	0,62		
	73	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup					2,290,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
			1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup	Persen	100		
			2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup	Persen	100		
			3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup	Persen	100		
			4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Lingkungan Hidup	Persen	100		
	74	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Lingkungan Hidup	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Lingkungan Hidup	Persen	100	3,761,928,240	Dinas Lingkungan Hidup
	75	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Lingkungan Hidup					43,192,599,410	Dinas Lingkungan Hidup
			1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Persen	70		
			2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Unit	350		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NOMOR (1)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2)	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) (3)	SATUAN (4)	TARGET 2019		PERANGKAT DAERAH (7)
				K (5)	Rp. (6)	
		3 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Persen	100		
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
	76 Program Penataan Administrasi Kependudukan				5,250,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1 Akurasi Data Kependudukan	Persen	80		
		2 Tingkat Pemanfaatan Data Kependudukan	Perangkat Daerah	12		
		3 Tertib Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Persen	90		
	77 Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				450,000,000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		1 Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Persen	100		
		2 Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Persen	100		
		3 Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Persen	100		
		4 Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Persen	100		
	78 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1 Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Persen	100	860,000,000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	79 Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				4,036,200,000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		1 Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Persen	70		
		2 Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Unit	350		
		3 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Persen	100		
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
	80 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat				9,407,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1 Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang Terlibat dalam Kegiatan TMMD, BSMSS,dan BBGRM	Persen	80		
		2 Persentase Lembaga Budaya dan Keswadayaan Masyarakat	Persen	80		
		3 Persentase Posyandu Mandiri	Persen	100		
	81 Program Pemantapan Kerja Sama Pemerintah Desa Antar Perbatasan Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1 Identifikasi potensi kawasan perdesaan di perbatasan	Kabupaten	5		
		2 Jumlah kerjasama pengembangan potensi kawasan perdesaan di perbatasan	Kabupaten	5		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	82 Program Pemantapan Pemerintahan Dan Pembangunan Desa				54,766,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1 Persentase tingkat perkembangan desa mandiri	Persen	25		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NOMOR (1)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2)	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) (3)	SATUAN (4)	TARGET 2019		PERANGKAT DAERAH (7)		
				K (5)	Rp. (6)			
		2	Jumlah perangkat desa/kelurahan yang memiliki pendidikan di atas pendidikan minimal	Persen	65			
		3	Jumlah desa yang sudah menerapkan SISKEUDES	Desa	60			
		4	Tingkat kelengkapan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa sesuai standar baku sarana dan prasarana pemerintahan desa	Persen	50			
	83	Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan				21,703,574,800	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		1	Prosentase anggaran APB-Desa diatas 30% untuk pembangunan infrastruktur perdesaan	Persen	40			
		2	Jumlah desa yang sudah memiliki rencana tata ruang wilayah desa	Dokumen	40			
	84	Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan				53,406,600,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		1	Persentase Kader Terlatih dalam Kelembagaan Desa	Persen	50			
		2	Jumlah dan jenis Teknologi Tepat Guna (TTG) di Jawa Barat	Buah	25			
		3	Persentase Pelibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	Persen	70			
		4	Persentase Kerjasama Pengembangan Kapasitas Produksi Desa, dan Akses Pemasaran Potensi Desa	Persen	30			
		5	Persentase Kader Terlatih dalam Kelembagaan Desa	Persen	50			
	85	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				3,685,600,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
		1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Persen	100			
		2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Persen	100			
		3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Persen	100			
		4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Persen	100			
	86	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Persen	100	9,225,801,578	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	87	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				6,697,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
		1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Persen	70			
		2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Unit	350			
		3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Persen	100			
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NOMOR (1)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2)	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) (3)	SATUAN (4)	TARGET 2019		PERANGKAT DAERAH (7)
				K (5)	Rp. (6)	
88	Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	1 Menurunnya jumlah keluarga Pra sejahtera	Keluarga	1,083,117	11,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
89	Program Pelayanan Keluarga Berencana				1,700,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
		1 Cakupan Peserta KB Aktif	Persen	73		
		2 Cakupan KB Pria	Persen	2,50		
90	Program Pendewasaan Usia Perkawinan	1 Persentase Pasangan Usia Subur yang Istrinya di Bawah Usia 20 Tahun	Persen	75	1,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
15	Perhubungan					
91	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1 Persentase ketersediaan Prasarana Transportasi Darat, Laut & ASDP, Kereta Api dan Udara	Persen	79	102,289,102,000	Dinas Perhubungan
92	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum				73,367,450,000	Dinas Perhubungan
		1 Jumlah Penumpang Angkutan Umum	Orang	174,000,000		
		2 Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Bidang Transportasi	Persen	0,42		
93	Pengembangan Fasilitas Perlengkapan Jalan	1 Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Ruas Jalan Provinsi	Persen	38	16,003,544,000	Dinas Perhubungan
94	Program Pengendalian dan Pengamanan Perhubungan	1 Persentase Angkutan Penumpang Umum (AKDP) yang Daftar Ulang Kartu Pengawasan	Persen	56	9,338,500,000	Dinas Perhubungan
95	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perhubungan				1,596,235,000	Dinas Perhubungan
		1 Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Perhubungan	Persen	100		
		2 Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Perhubungan	Persen	100		
		3 Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Perhubungan	Persen	100		
		4 Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Perhubungan	Persen	100		
96	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perhubungan	1 Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Perhubungan	Persen	100	10,118,237,000	Dinas Perhubungan
97	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Perhubungan				36,833,246,000	Dinas Perhubungan
		1 Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Perhubungan	Persen	70		
		2 Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Perhubungan	Unit	350		
		3 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Perhubungan	Persen	100		
16	Komunikasi dan Informatika					



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NOMOR (1)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2)	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) (3)	SATUAN (4)	TARGET 2019		PERANGKAT DAERAH (7)	
				K (5)	Rp. (6)		
98	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi				62,414,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	2.5		
		2	Jumlah Layanan Informasi Publik yang Disediakan Pemerintah Daerah	Media	15		
		3	Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi di Daerah	Persen	80		
99	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika				1,349,000,000	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
		1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika	Persen	100		
		2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika	Persen	100		
		3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Komunikasi Dan Informatika	Persen	100		
		4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	Persen	100		
100	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Komunikasi Dan Informatika	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika	Persen	100	3,356,486,600	Dinas Komunikasi Dan Informatika
101	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika				8,919,913,400	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Komunikasi Dan Informatika	Persen	70		
		2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Komunikasi Dan Informatika	Unit	350		
		3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Komunikasi Dan Informatika	Persen	100		
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
102	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				129,515,736,600	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	
		1	Pertumbuhan Koperasi Berkualitas	Persen	20		
		2	Pertumbuhan Akses Modal KUK	Persen	20		
		3	Pertumbuhan Jumlah Rasio Wirausaha	Persen	1,5		
103	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil				1,990,000,000	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil	
		1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil	Persen	100		
		2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil	Persen	100		
		3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil	Persen	100		
		4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil	Persen	100		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NOMOR (1)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2)	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) (3)	SATUAN (4)	TARGET 2019		PERANGKAT DAERAH (7)		
				K (5)	Rp. (6)			
	104	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil	Persen	100	2,500,000,000	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
	105	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil					9,685,300,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
			1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil	Persen	70		
			2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil	Unit	350		
			3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil	Persen	100		
18	Penanaman Modal							
	106	Program Peningkatan Investasi Daerah	1	Jumlah Nilai Investasi PMA-PMDN	Trilyun Rupiah	108,5	3,847,975,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	107	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Perijinan)	Poin	79	5,800,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	108	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					1,275,000,000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persen	100		
			2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persen	100		
			3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persen	100		
			4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persen	100		
	109	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					1,577,953,375	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persen	100		
	110	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					24,795,000,000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persen	70		
			2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Unit	350		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NOMOR (1)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2)	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) (3)	SATUAN (4)	TARGET 2019		PERANGKAT DAERAH (7)	
				K (5)	Rp. (6)		
		3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persen	100		
19	Kepemudaan dan Olahraga						
	111	Program Peningkatan dan Pembinaan Kepemudaan dan Kepramukaan				11,017,644,999	Dinas Pemuda dan Olahraga
		1	Jumlah pemuda berprestasi Nasional. (Pemuda pelopor, PPAN, Paskibraka, KPN)	Orang	17		
		2	Persentase Pemuda yang Berwirausaha atas Pembinaan Kewirausahaan	Persen	10		
		3	Persentase Pembinaan Organisasi Kepemudaan yang Terdata	Persen	20		
		4	Prestasi Marching Band di Tingkat Nasional	Peringkat	1		
		5	Jumlah Penerima Penghargaan Kepemudaan dan Kepramukaan	Kategori	5		
		6	Jumlah Event Kepemudaan Tingkat Jawa Barat	Event	2		
		7	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan di Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab./Kota	5		
	112	Program Pembinaan, Pemasarakatan dan Pengembangan Olah Raga				10,057,973,066	Dinas Pemuda dan Olahraga
		1	Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Olahraga	Orang	10,137		
		2	Persentase Kecamatan Penempatan Sarjana Pendamping, Penggerak, Pembangunan Olahraga (SP3OR)	Persen	17,28		
		3	Persentase Tenaga Olahraga Tradisional, Layanan Khusus dan Rekreasi yang dibina yang bersertifikat	Persen	10		
		4	Jumlah event olahraga Tradisional, Layanan khusus dan Rekreasi yang diselenggarakan dan diikuti	Event	9		
	113	Program Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi, Dan Organisasi Olahraga				49,703,871,050	Dinas Pemuda dan Olahraga
		1	Jumlah Penerima Penghargaan Insan Olahraga Berprestasi/Berjasa	Orang	1,160		
		2	Persentase medali emas yang diperoleh dalam Event Nasional:				
		a.	POPNAS	Persen	20		
		b.	POPWILNAS	Persen	0		
		c.	PEPARPENAS	Persen	12		
		3	Persentase Sertifikat Lanjutan bagi Tenaga Olahraga Prestasi yang dibina	Persen	10		
		4	Persentase Pembangunan Kawasan SPORt Jabar Arcamanik	Persen	90		
		5	Jumlah Event Olahraga yang Mendukung Prestasi Olahraga Jawa Barat	Event	7		
		6	Jumlah Sarana dan Prasarana keolahragaan di Kabupaten/Kota yang tersedia	Kab./Kota	5		
	114	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Pemuda Dan Olahraga				2,670,840,000	Dinas Pemuda Dan Olahraga
		1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Pemuda Dan Olahraga	Persen	100		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NOMOR (1)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2)	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) (3)	SATUAN (4)	TARGET 2019		PERANGKAT DAERAH (7)
				K (5)	Rp. (6)	
		2	Persen	100		
		3	Persen	100		
		4	Persen	100		
	115	1	Persen	100	680,000,000	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	116				13,412,341,951	Dinas Pemuda Dan Olahraga
		1	Persen	70		
		2	Unit	350		
		3	Persen	100		
20	Statistik					
	117	1	Persen	70	3,450,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Persandian					
	118				6,570,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		1	Skala Tingkat Kematangan	III		
		2	Skala Tingkat Kematangan	II		
22	Kebudayaan					
	119				9,100,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		1	Jumlah Pembinaan Pelestarian Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah	3		
		2	Jumlah Pembinaan Pelestarian Cagar Budaya, Nilai Budaya, Sejarah dan Permuseuman	3		
		3	Usulan/Rekomendasi Per Tahun	1		
	120				10,077,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NOMOR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2019		PERANGKAT DAERAH
				K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1 Pelestarian Seni Tradisi	Jumlah Pembinaan Pelestarian Seni Tradisi	3		
		2 Jumlah Event/Festival/Pasanggiri/ Lomba/Sayembara Karya Seni	Event Per Tahun	5		
23	Perpustakaan					
	121 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1 Indeks membaca masyarakat	Poin	69	9,850,505,550	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	122 Program Pelestarian Koleksi Naskah Kuno	1 Persentase pelestarian koleksi naskah kuno	Persen	60	453,389,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	123 Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah				489,813,750	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
		1 Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	Persen	100		
		2 Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	Persen	100		
		3 Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	Persen	100		
		4 Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	Persen	100		
	124 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	1 Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	Persen	100	6,942,222,950	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
	125 Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah				11,789,538,250	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
		1 Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	Persen	70		
		2 Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	Unit	350		
		3 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	Persen	100		
24	Kearsipan					
	126 Program Pengembangan dan Pembinaan Kearsipan	1 Persentase perangkat daerah yang menerapkan standar baku kearsipan	Persen	37	2,956,023,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	127 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	1 Persentase arsip statis yang diselamatkan	Persen	100	1,365,507,500	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
III	Urusan Pemerintahan Pilihan					
1	Kelautan dan Perikanan					
	128 Program Peningkatan Produksi Perikanan Dan Daya Saing Produk Perikanan				41,024,922,500	Dinas Kelautan dan Perikanan
		1 Produksi Perikanan Tangkap	Ton	244,000		
		2 Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1,200,000		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NOMOR (1)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2)	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) (3)	SATUAN (4)	TARGET 2019		PERANGKAT DAERAH (7)		
				K (5)	Rp. (6)			
		3	Peningkatan produksi perikanan yang memenuhi standar jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan	Persen	91			
		4	Konsumsi Ikan Jawa Barat	Kg/Kap/Tahun	29,10			
	129	Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan				30,336,697,210	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		1	Peningkatan Penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan secara akuntabel	Persen	75			
		2	Jumlah Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	Kawasan	1			
		3	Jumlah Benih Ikan yang ditebar di Perairan Daratan	Ekor	60,000,000			
		4	Jumlah Plasma Nutfah yang dilestarikan	Jenis	4			
		5	Produksi garam	Ton	245,978			
	130	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan				2,066,949,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan	Persen	100			
		2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan	Persen	100			
		3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan	Persen	100			
		4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan	Persen	100			
	131	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Persen	100	14,918,287,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	132	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan				21,627,067,500	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan	Persen	70			
		2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan	Unit	350			
		3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan	Persen	100			
2	Pariwisata							
	133	Program pengembangan Destinasi Pariwisata	1	Jumlah Event Pariwisata	Event Per Tahun	3	71,235,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	134	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata					12,050,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		1	Jumlah Event Promosi Pariwisata	Event Per Tahun	5			
		2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Jawa Barat	Orang Per Tahun	6,030,682			
		3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusatntara ke Jawa Barat	Orang Per Tahun	72,169,325			



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NOMOR (1)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2)	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) (3)	SATUAN (4)	TARGET 2019		PERANGKAT DAERAH (7)
				K (5)	Rp. (6)	
	135	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan			2,670,000,000	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		1 Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Persen	100		
		2 Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Persen	100		
		3 Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Persen	100		
		4 Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Persen	100		
	136	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan			2,763,695,744	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
	137	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan			29,801,436,415	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		1 Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Persen	70		
		2 Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Unit	350		
		3 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Persen	100		
3	Pertanian					
	138	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dan Hortikultura			82,647,250,108	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen	2,5		
		2 Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Persen	1,5		
		3 Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan	Persen	2,5		
	139	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura			2,800,000,000	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		1 Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Persen	100		
		2 Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Persen	100		
		3 Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Persen	100		
		4 Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Persen	100		
	140	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura			15,516,977,825	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
	141	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura			24,966,519,175	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NOMOR (1)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2)	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) (3)	SATUAN (4)	TARGET 2019		PERANGKAT DAERAH (7)		
				K (5)	Rp. (6)			
		1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Persen	70			
		2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Unit	350			
		3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Persen	100			
	142	Program Peningkatan Produksi Produktifitas dan Nilai Tambah Perkebunan				28,437,500,000	Dinas Perkebunan	
		1	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Rata-rata Komoditas Perkebunan	Persen	2,6			
		2	Peningkatan ketersediaan benih unggul komoditas perkebunan	Persen	2,6			
		3	peningkatan benih tanaman perkebunan tersertifikasi	Persen	2,6			
		4	Peningkatan Kemantapan Kelembagaan	Persen	2,6			
		5	Optimalisasi Lahan Perkebunan	Ha	≥484,234			
		6	Penurunan intensitas serangan OPT Perkebunan	Persen	1			
		7	Peningkatan Penerapan Jaminan Mutu	Persen	10			
	143	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perkebunan				2,180,000,000	Dinas Perkebunan	
		1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Perkebunan	Persen	100			
		2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Perkebunan	Persen	100			
		3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Perkebunan	Persen	100			
		4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Perkebunan	Persen	100			
	144	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perkebunan	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Perkebunan	Persen	100	7,597,836,023	Dinas Perkebunan
	145	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Perkebunan				9,557,212,892	Dinas Perkebunan	
		1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Perkebunan	Persen	70			
		2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Perkebunan	Unit	350			
		3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Perkebunan	Persen	100			
	146	Program Peningkatan Produksi Produktifitas dan Nilai Tambah Produk Peternakan				29,327,287,300	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	
		1	Produksi Komoditas Peternakan					
			a Daging	Ton	1,043,467			
			b.Telur	Ton	243,517			
			c.Susu	Ton	326,698			



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NOMOR (1)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2)	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) (3)	SATUAN (4)	TARGET 2019		PERANGKAT DAERAH (7)	
				K (5)	Rp. (6)		
		2	Jumlah Sertifikasi Jaminan Mutu Pelaku Usaha Produk Peternakan	Unit	480		
		3	Peningkatan mutu produk peternakan				
		a	Daging	Persen	60		
		b	Telur	Persen	81		
		c	Susu	Persen	81		
		4	Bobot Kinerja Pengendalian PHMS di Jawa Barat	Poin	76		
	147		Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan			1,453,800,000	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
		1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	Persen	100		
		2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	Persen	100		
		3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	Persen	100		
		4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	Persen	100		
	148	1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	Persen	100	7,511,128,000	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
	149		Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan			19,175,686,280	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
		1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	Persen	70		
		2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	Unit	350		
		3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	Persen	100		
4	Kehutanan						
	150		Program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat			6,727,833,605	Dinas Kehutanan
		1	Peningkatan Produksi Hasil Hutan	Persen	1		
		2	Peningkatan Jasa Wisata Alam	Persen	8		
		3	Bertambahnya Unit Manajemen Hutan Rakyat	Persen	20		
	151		Program Pengelolaan DAS dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya			23,351,570,395	Dinas Kehutanan
		1	Persentase-Tutupan Hutan	Persen	33,06		
		2	Jumlah Penangkar Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi yang memiliki izin	Persen	20		
		3	Penurunan Gangguan Keamanan Hutan	Persen	2		
		4	Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditetapkan	Persen	10		
		5	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	Persen	9,05		
	152	1	Program Penyuluhan Kehutanan	Persen	100	1,090,000,000	Dinas Kehutanan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NOMOR (1)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2)	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) (3)	SATUAN (4)	TARGET 2019		PERANGKAT DAERAH (7)
				K (5)	Rp. (6)	
153	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kehutanan				2,090,000,000	Dinas Kehutanan
		1 Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Kehutanan	Persen	100		
		2 Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Kehutanan	Persen	100		
		3 Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Kehutanan	Persen	100		
		4 Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Kehutanan	Persen	100		
154	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kehutanan	1 Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Kehutanan	Persen	100	7,276,057,000	Dinas Kehutanan
155	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Kehutanan				30,889,751,049	Dinas Kehutanan
		1 Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Kehutanan	Persen	70		
		2 Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Kehutanan	Unit	350		
		3 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Kehutanan	Persen	100		
5	Energi dan Sumber Daya Mineral					
156	Program Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Geologi				11,250,446,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		1 Persentase Usaha Pertambangan yang Tertib Administrasi dan Teknis	Persen	34,53		
		2 Persentase Peningkatan Muka Air Tanah	Persen	5		
157	Program Pengembangan Energi				22,285,825,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		1 Konsumsi Listrik Per Kapita	Kwh	1,376		
		2 Jumlah Instalasi Tenaga Listrik yang Laik Operasi	Unit	600		
		3 Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Bidang Energi	Persen	0,36		
158	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral				1,475,000,000	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
		1 Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Persen	100		
		2 Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Persen	100		
		3 Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Persen	100		
		4 Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Persen	100		
159	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	1 Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Persen	100	12,482,757,056	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NOMOR (1)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2)	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) (3)	SATUAN (4)	TARGET 2019		PERANGKAT DAERAH (7)
				K (5)	Rp. (6)	
160	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral				19,537,245,000	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
		1	Persen	70		
		2	Unit	350		
		3	Persen	100		
6	Perdagangan					
161	Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga				3,760,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		1	Poin	37		
		2	Jumlah Pengujian	160		
		3	SNI Wajib	20		
162	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri				15,895,367,500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		1	Persen	22		
		2	Poin	150		
163	Program Pengembangan Ekspor				2,900,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		1	Ribu Ton	7,500		
		2	Juta USD	30,000		
164	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan				2,780,000,000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		1	Persen	100		
		2	Persen	100		
		3	Persen	100		
		4	Persen	100		
165	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perindustrian Dan Perdagangan				25,621,400,000	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
166	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan				22,797,208,850	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		1	Persen	70		
		2	Unit	350		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NOMOR (1)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2)	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) (3)	SATUAN (4)	TARGET 2019		PERANGKAT DAERAH (7)	
				K (5)	Rp. (6)		
		3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Persen	100		
7	Perindustrian						
	167	Program Pembangunan Industri				12,475,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		1	PDRB sektor industri non-migas	Rp. Triliun	821,95		
		2	Jumlah Unit usaha Industri	Unit Usaha	211,000		
		3	PMA sektor Industri	Rp. Triliun	16,7		
		4	PMDN sektor industri	Rp. Triliun	4,8		
8	Transmigrasi						
	168	Program Pengembangan Transmigrasi				1,169,914,600	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
IV	Penunjang Urusan Pemerintahan						
1	Perencanaan						
	169	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				44,097,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		1	Tingkat Partisipasi Publik dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	30		
		2	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota	Persen	80		
		3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100		
		4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100		
	170	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				1,180,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100		
		2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100		
		3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100		
		4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100		
	171	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				4,198,520,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	172	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				10,858,850,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	70		
		2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Unit	350		
		3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NOMOR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2019		PERANGKAT DAERAH
				K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Keuangan					
173	Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah				38,706,639,283	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		1 Jumlah penetapan petunjuk pelaksanaan di bidang pengelolaan keuangan daerah	Buah	3		
		2 Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran	Persen	100		
		3 Persentase aset yang diamankan secara fisik dan legal	Persen	40		
		4 Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan asset daerah.	Persen	85		
174	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah				1,850,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		1 Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Persen	100		
		2 Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Persen	100		
		3 Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Persen	100		
		4 Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Persen	100		
175	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah				39,400,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		1 Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Persen	100		
176	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah				39,722,300,000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		1 Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Persen	70		
		2 Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Unit	350		
		3 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Persen	100		
177	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				28,694,600,000	Badan Pendapatan Daerah
		1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	56,52		
		2 Dana Perimbangan	Persen	43,16		
		3 Pendapatan lain2-lain yang sah	Persen	0,31		
		4 Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Pendapatan Daerah)	Skor	82,3		
178	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah				7,850,025,000	Badan Pendapatan Daerah
		1 Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Badan Pendapatan Daerah	Persen	100		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NOMOR (1)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2)	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) (3)	SATUAN (4)	TARGET 2019		PERANGKAT DAERAH (7)
				K (5)	Rp. (6)	
		2	Persen	100		
		3	Persen	100		
		4	Persen	100		
	179	1	Persen	100	127,546,268,902	Badan Pendapatan Daerah
	180				182,619,106,098	Badan Pendapatan Daerah
		1	Persen	70		
		2	Unit	350		
		3	Persen	100		
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan					
	181				48,871,732,500	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		1	Orang	220		
		2	Orang	720		
	182				2,010,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		1	Persen	100		
		2	Persen	100		
		3	Persen	100		
		4	Persen	100		
	183	1	Persen	100	18,686,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	184				26,905,748,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		1	Persen	70		
		2	Unit	350		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NOMOR (1)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2)	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) (3)	SATUAN (4)	TARGET 2019		PERANGKAT DAERAH (7)	
				K (5)	Rp. (6)		
		3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persen	100		
185	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					32,819,739,500	Badan Kepegawaian Daerah
		1	Persentase pegawai yang mencapai SKP diatas 76%;	Persen	80		
		2	Persentase Pelanggaran Disiplin	Persen	2		
		3	Jumlah PNS yang Melanjutkan Pendidikan Formal	Orang	200		
		4	Tingkat Kesejahteraan Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Persen	100		
186	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah					3,741,250,000	Badan Kepegawaian Daerah
		1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah	Persen	100		
		2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah	Persen	100		
		3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Kepegawaian Daerah	Persen	100		
		4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Kepegawaian Daerah	Persen	100		
187	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Kepegawaian Daerah					1,038,050,000	Badan Kepegawaian Daerah
		1	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Badan Kepegawaian Daerah	Persen	100		
188	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Kepegawaian Daerah					10,634,610,500	Badan Kepegawaian Daerah
		1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Badan Kepegawaian Daerah	Persen	70		
		2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Badan Kepegawaian Daerah	Unit	350		
		3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Kepegawaian Daerah	Persen	100		
4	Penelitian dan Pengembangan						
189	Program Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK					7,050,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Berbasis IPTEK	Jumlah	5		
		2	Jumlah Hasil Penelitian yang Diterapkan dalam Pembangunan Jawa Barat	Jumlah	10		
		3	Jumlah Karya IPTEK yang Didaftarkan untuk mendapat Kekayaan Intelektual (KI)	Jumlah	60		
		4	Jumlah Inovasi yang Ditindaklanjuti menjadi SIDA	Jumlah	15		
190	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah					1,550,000,000	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persen	100		
		2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persen	100		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NOMOR (1)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2)	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) (3)	SATUAN (4)	TARGET 2019		PERANGKAT DAERAH (7)		
				K (5)	Rp. (6)			
		3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persen	100			
		4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persen	100			
	191	1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persen	100	1,100,000,000	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	192		Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah				4,200,000,000	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persen	70			
		2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Unit	350			
		3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persen	100			
5	Fungsi Lainnya							
	193		Program Pendidikan Politik Masyarakat					Sekretariat Daerah
		1	Persentase Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian antar waktu DPRD Prov, DPRD Kab/Kota	Persen	95			
		2	Persentase Fasilitasi pengangkatan Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persen	95			Sekretariat Daerah
	194		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah				11,628,100,000	Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)
		1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Tingkat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Persen	85			
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	82,3			Sekretariat Daerah (Biro Pem-KS)
		3	Persentase Penggunaan Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa Mulai Dari Perencanaan, Proses Pengadaan sampai dengan Monev/Pelaporan	Persen	100			Sekretariat Daerah (Biro Pem-KS)
		4	Nilai hasil evaluasi AKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Kategori	A			Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)
	195	1	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum dan HAM	Prosentase harmonisasi dan sinkronisasi terhadap rancangan prodak hukum daerah	Persen	80	8,406,500,000	Sekretariat Daerah (Biro Hukum)
	196		Program Kerja Sama Pembangunan				9,391,900,000	
		1	Kerja sama antar daerah	Buah	10			Sekretariat Daerah (Biro Pem-KS)
		2	Kerja sama dengan pihak ketiga	Buah	15			Sekretariat Daerah (Biro Pem-KS)
		3	Kerja sama luar negeri	Buah	3			Sekretariat Daerah (Biro Pem-KS)
		4	Peraturan perundang-undangan yang diharmonisasi terkait upaya sinkronisasi regulasi bidang kerja sama daerah	Buah	3			Sekretariat Daerah (Biro Pem-KS)
	197		Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan				81,415,632,640	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NOMOR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET 2019		PERANGKAT DAERAH	
				K	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		1	Persentase Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Persen	80		Sekretariat Daerah
		2	Prosentase Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian antar waktu DPRD Prov, DPRD Kab/Kota	Persen	95		Sekretariat Daerah (Biro Pemksm)
		3	Prosentasi Fasilitasi pengangkatan Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persen	95		Sekretariat Daerah (Biro Pemksm)
		4	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Dokumen	9		Sekretariat Daerah (Biro Pemksm)
		5	Jumlah Dokumen fasilitasi administrasi kependudukan dan Pemerintahan Desa	Dokumen	15		Sekretariat Daerah (Biro Pemksm)
		6	Tingkat Persepsi Publik yang Positif terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Kualifikasi "Baik"	61 - 79 (baik)		Sekretariat Daerah (Biro Humas dan Protokol)
		7	Kontribusi BUMD terhadap PAD meningkat	Kali	4		Sekretariat Daerah (Biro SPI BUMD)
		8	Jumlah BUMD yang dibina dan diawasi	BUMD	12		Sekretariat Daerah (Biro SPI BUMD)
		9	Rata-rata Kontribusi Deviden terhadap PAD	Persen	2		Sekretariat Daerah (Biro SPI BUMD)
		10	Keputusan Gubernur untuk Penetapan Lokasi pembangunan bagi kepentingan umum	Kepgub	9		Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan dan Kerjasama)
		11	Dokumen fasilitasi administrasi kependudukan dan Pemerintahan Desa	Dokumen	15		Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan dan Kerjasama)
		12	Jumlah Forum Komunikasi dengan insan pers dan media massa	Forum	4		Sekretariat Daerah
	198		Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah			14,665,773,540	Sekretariat Daerah
		1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Sekretariat Daerah	Persen	100		
		2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Sekretariat Daerah	Persen	100		
		3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Sekretariat Daerah	Persen	100		
		4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Sekretariat Daerah	Persen	100		
	199		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat Daerah			17,540,592,573	Sekretariat Daerah
	200		Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah			183,202,363,310	Sekretariat Daerah
		1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Sekretariat Daerah	Persen	70		
		2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Sekretariat Daerah	Unit	350		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NOMOR (1)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2)	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) (3)	SATUAN (4)	TARGET 2019		PERANGKAT DAERAH (7)
				K (5)	Rp. (6)	
		3 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat Daerah	Persen	100		
201	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				117,787,725,000	Sekretariat DPRD Provinsi
		1 Tingkat kinerja DPRD	Persen	100		
		2 Tingkat dukungan dan fasilitasi DPRD	Persen	100		
202	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi				1,050,000,000	Sekretariat DPRD Provinsi
		1 Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi	Persen	100		
		2 Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD Provinsi	Persen	100		
		3 Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi	Persen	100		
		4 Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Sekretariat DPRD Provinsi	Persen	100		
203	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi	1 Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi	Persen	100	10,702,200,000	Sekretariat DPRD Provinsi
204	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Sekretariat DPRD Provinsi				26,180,425,000	Sekretariat DPRD Provinsi
		1 Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Sekretariat DPRD Provinsi	Persen	70		
		2 Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Sekretariat DPRD Provinsi	Unit	350		
		3 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat DPRD Provinsi	Persen	100		
205	Program Pembinaan dan Pengawasan				32,050,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi
		1 Hasil Penilaian EPPD Provinsi Jawa Barat di Tingkat Nasional	Poin	3,275		
		2 Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	Peringkat	A		
		3 Opini BPK-RI terhadap LKPD Provinsi Jawa Barat	Opini	WTP		
		4 Level Maturitas SPIP Pemeintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Level	III		
		5 Persentase Penyelesaian tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI	Persen	75		
		6 Persentase Penyelesaian TLHP Hasil Pemeriksaan Inspektorat terhadap PD Provinsi	Persen	90		
		7 Persentase Nilai Indikator RAD-PPK	Persen	100		
		8 Persentase Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat	Persen	75		
206	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi				1,412,200,000	Inspektorat Daerah Provinsi
		1 Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi	Persen	100		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NOMOR (1)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2)	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) (3)	SATUAN (4)	TARGET 2019		PERANGKAT DAERAH (7)		
				K (5)	Rp. (6)			
		2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Inspektorat Daerah Provinsi	Persen	100			
		3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Inspektorat Daerah Provinsi	Persen	100			
		4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Inspektorat Daerah Provinsi	Persen	100			
	207	1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Inspektorat Daerah Provinsi	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi	Persen	100	742,014,000	Inspektorat Daerah Provinsi
	208		Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Inspektorat Daerah Provinsi				5,555,986,000	Inspektorat Daerah Provinsi
		1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Inspektorat Daerah Provinsi	Persen	70			
		2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Inspektorat Daerah Provinsi	Unit	350			
		3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Inspektorat Daerah Provinsi	Persen	100			
	209	1	Program Fasilitasi Promosi Potensi Pembangunan Jawa Barat	Jumlah Promosi Potensi Pembangunan Jawa Barat	Event/Promosi	15	4,135,000,000	Badan Penghubung
	210	1	Program Penyelenggaraan Pelayanan dan Informasi Potensi Pembangunan Daerah Jawa Barat	Persentasi Pelayanan dan Informasi Potensi Pembangunan Daerah Jawa Barat yang Efektif dan Efisien	Persen	100	424,400,000	Badan Penghubung
	211		Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Penghubung				100,000,000	Badan Penghubung
		1	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Badan Penghubung	Persen	100			
		2	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Penghubung	Persen	100			
		3	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Penghubung	Persen	100			
		4	Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Penghubung	Persen	100			
	212	1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Penghubung	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Badan Penghubung	Persen	100	1,969,720,000	Badan Penghubung
	213		Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Penghubung				9,142,980,000	Badan Penghubung
		1	Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Badan Penghubung	Persen	70			
		2	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Badan Penghubung	Unit	350			
		3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Penghubung	Persen	100			



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NOMOR (1)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2)	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) (3)	SATUAN (4)	TARGET 2019		PERANGKAT DAERAH (7)
				K (5)	Rp. (6)	
214	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah I					Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah I
		1 Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah I	Persen	100		
		2 Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah I	Persen	100		
		3 Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah I	Persen	100		
		4 Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah I	Persen	100		
215	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah I					Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah I
		1 Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah I	Persen	100		
216	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah I					Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah I
		1 Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah I	Persen	70		
		2 Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah I	Unit	350		
		3 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah I	Persen	100		
217	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah II					Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah II
		1 Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah II	Persen	100		
		2 Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah II	Persen	100		
		3 Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah II	Persen	100		
		4 Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah II	Persen	100		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NOMOR (1)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2)	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) (3)	SATUAN (4)	TARGET 2019		PERANGKAT DAERAH (7)
				K (5)	Rp. (6)	
218	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah II					Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah II
		1 Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah II	Persen	100		
219	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah II					Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah II
		1 Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah II	Persen	70		
		2 Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah II	Unit	350		
		3 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah II	Persen	100		
220	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah III					Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah III
		1 Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah III	Persen	100		
		2 Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah III	Persen	100		
		3 Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah III	Persen	100		
		4 Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah III	Persen	100		
221	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah III					Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah III
		1 Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah III	Persen	100		
222	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah III					Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah III
		1 Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah III	Persen	70		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NOMOR (1)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2)	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) (3)	SATUAN (4)	TARGET 2019		PERANGKAT DAERAH (7)
				K (5)	Rp. (6)	
		2 Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah III	Unit	350		
		3 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah III	Persen	100		
	223 Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV					Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV
		1 Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV	Persen	100		
		2 Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV	Persen	100		
		3 Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV	Persen	100		
		4 Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV	Persen	100		
	224 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV					Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV
		1 Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV	Persen	100		
	225 Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV					Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV
		1 Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV	Persen	70		
		2 Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV	Unit	350		
		3 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV	Persen	100		
				JUMLAH	8,907,080,394,817	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE						PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH						
							2017	2018	2020		2021		2022		2023											
							(8)	(9)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(18)	Rp.			(19)					
30		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	1	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia dibagi jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan x100%	Persen	N/A	N/A		582,900,000	100		593,650,000	100		526,650,000	100		579,800,000	100		2,283,000,000	Ked Wilayah X	Dinas Pendidikan	
31		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	1	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia dibagi jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan x100%	Persen	N/A	N/A	100		737,900,000	100		748,650,000	100		681,650,000	100		734,800,000	100		2,903,000,000	Cabang Dinas wil.XI	Dinas Pendidikan
32		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	1	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia dibagi jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan x100%	Persen	N/A	N/A	100		485,900,000	100		485,900,000	100		485,900,000	100		485,900,000	100		1,943,600,000	Cabang Dinas wil.XII	Dinas Pendidikan
33		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	1	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia dibagi jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan x100%	Persen	N/A	N/A	100		837,900,000	100		848,650,000	100		781,650,000	100		834,800,000	100		3,303,000,000	Cabang Dinas wil.XIII	Dinas Pendidikan
34		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Pendidikan								13,621,317,739			19,405,824,610			16,035,692,187			20,899,425,850			69,962,260,387	Sekretaris Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	
				1	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Jumlah ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi dibagi Jumlah ASN dinas pendidikan x100%	Persen	N/A	N/A	100			100			100			100			100				
				2	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan Prasarana x100%	Persen	N/A	N/A	100			100			100			100			100				
				3	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	Persen	N/A	N/A	100			100			100			100			100				
				4	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan dibagi jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan x100%	Persen	N/A	N/A	100			100			100			100			100				
				5	Persentase ketersediaan data Kinerja Dinas Pendidikan	Jumlah data Kinerja Dinas Pendidikan yang disediakan / Jumlah data kinerja (indikator kinerja tujuan, sasaran program dan kegiatan) Dinas Pendidikan yang seharusnya disediakan * 100	Persen	N/A	N/A	100			100			100			100			100				
35		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I								34,881,003,083			34,909,972,500			34,921,365,000			34,913,040,000			139,625,380,583	KCD Wilayah I	Dinas Pendidikan	
				1	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan Prasarana x100%	Persen	N/A	N/A	100			100			100			100			100				
				2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	Persen	N/A	N/A	100			100			100			100			100				
				3	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan dibagi jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan x100%	Persen	N/A	N/A	100			100			100			100			100				
36		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II								20,556,456,000			20,606,620,000			20,606,620,000			20,606,620,000			82,376,316,000	KCD Wilayah II	Dinas Pendidikan	
				1	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan Prasarana x100%	Persen	N/A	N/A	100			100			100			100			100				
				2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	Persen	N/A	N/A	100			100			100			100			100				
				3	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan dibagi jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan x100%	Persen	N/A	N/A	100			100			100			100			100				
37		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III								74,497,748,083			74,526,717,500			74,538,110,000			74,529,785,000			298,092,360,583	KCD Wilayah III	Dinas Pendidikan	
				1	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan Prasarana x100%	Persen	N/A	N/A	100			100			100			100			100				
				2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	Persen	N/A	N/A	100			100			100			100			100				
				3	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan dibagi jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan x100%	Persen	N/A	N/A	100			100			100			100			100				
38		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV								71,969,109,248			72,056,017,500			72,090,195,000			71,886,155,438			288,001,477,185	KCD Wilayah IV	Dinas Pendidikan	
				1	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan Prasarana x100%	Persen	N/A	N/A	100			100			100			100			100				
				2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	Persen	N/A	N/A	100			100			100			100			100				
				3	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan dibagi jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan x100%	Persen	N/A	N/A	100			100			100			100			100				
39		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V								31,562,251,165			31,620,190,000			31,642,975,000			31,626,325,000			126,451,741,165	KCD Wilayah V	Dinas Pendidikan	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH	
							2017	2018	2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE				
							(8)	(9)	K (10)	Rp. (11)	K (12)	Rp. (13)	K (14)	Rp. (15)	K (16)	Rp. (17)	K (18)	Rp. (19)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				1	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan Prasarana x100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100			
				2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100			
				3	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan dibagi jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan x100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100			
40		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI								53,136,068,083		53,165,037,500		53,176,430,000		53,168,105,000		212,645,640,583	KCD Wilayah VI	Dinas Pendidikan
				1	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan Prasarana x100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100			
				2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100			
				3	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan dibagi jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan x100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100			
41		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII								44,516,758,583		44,545,728,000		44,557,120,500		44,548,795,500		178,168,402,583	KCD Wilayah VII	Dinas Pendidikan
				1	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan Prasarana x100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100			
				2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100			
				3	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan dibagi jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan x100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100			
42		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII								39,239,848,083		39,268,817,500		39,280,210,000		39,271,885,000		157,060,760,583	KCD Wilayah VIII	Dinas Pendidikan
				1	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan Prasarana x100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100			
				2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100			
				3	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan dibagi jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan x100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100			
43		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX								49,705,328,083		49,998,215,000		49,745,690,000		49,737,365,000		199,186,598,083	KCD Wilayah IX	Dinas Pendidikan
				1	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan Prasarana x100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100			
				2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100			
				3	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan dibagi jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan x100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100			
44		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X								48,644,078,083		48,673,047,500		48,684,440,000		48,676,115,000		194,677,680,583	KCD Wilayah X	Dinas Pendidikan
				1	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan Prasarana x100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100			
				2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100			
				3	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan dibagi jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan x100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100			
45		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI								40,737,943,083		40,737,943,083		40,737,943,083		40,737,943,083		162,951,772,330	KCD Wilayah XI	Dinas Pendidikan
				1	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan Prasarana x100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100			
				2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100			



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL											PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH		
							2017	2018	2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE				
							(8)	(9)	K (10)	Rp. (11)	K (12)	Rp. (13)	K (14)	Rp. (15)	K (16)	Rp. (17)	K (18)			Rp. (19)	
				3	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan dibagi jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan x100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100			
46		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII							30,584,963,083		30,613,932,500		30,625,325,000		30,617,000,000		122,441,220,583		KCD Wilayah XII	Dinas Pendidikan
				1	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan Prasarana x100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100			
				2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100			
				3	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan dibagi jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan x100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100			
47		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII							32,459,158,083		32,488,127,500		32,499,520,000		32,441,095,651		129,887,901,233		KCD Wilayah XIII	Dinas Pendidikan
				1	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan Prasarana x100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100			
				2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100			
				3	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan dibagi jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan x100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100			
2			Kesehatan							1,119,817,370,802		1,257,543,488,031		1,010,926,537,667		1,047,993,981,854		4,436,281,378,355			
48		a. Angka Kematian Ibu b. Angka Kematian Bayi	Program Kesehatan Masyarakat							6,120,352,692		6,891,191,330		10,068,522,217		10,903,564,439		33,983,630,677		Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
				1	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Persentase Persalinan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal 88%	Jumlah Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan di Bagi Sasaran Ibu Bersalin dalam Satu tahun di Kali 100 %	Jumlah	17	17	19		21		24		27		27			
				2	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Pemberian Tablet Tambah Darah Pada Bumil Minimal 95%	Jumlah Ibu Hamil di Kali 90 Tablet diTambah 10%	Jumlah	17	17	19		21		24		27		27			
				3	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Rumah Tangga Yang Akses Terhadap Air Minum Yang Berkualitas	Jumlah penduduk yang memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum berkualitas (layak) di suatu wilayah pada periode tertentu di Bagi Jumlah penduduk di wilayah dan pada periode yang sama di Kali 100 %	Persen	80	80	85		90		90		100		100			
				4	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Rumah Tangga Yang Akses Terhadap Jamban Sehat	Jumlah penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) di suatu wilayah pada periode tertentu di Bagi Jumlah penduduk di wilayah dan pada periode yang sama di Kali 100 %	Persen	75	75	80		85		90		95		95			
				5	Persentase Kabupaten/Kota Yang Puskesmas Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar	Jumlah Puskesmas Kab/Kota yang menyelenggarakan Kesehatan Kerja dasar Per Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab/Kota di Kali 100%	Persen	55	55	60		65		70		75		75			
				6	Persentase Kabupaten/Kota Yang Puskesmas Menyelenggarakan Kesehatan Olah Raga Pada Kelompok Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Jumlah Puskesmas Kab/Kota yang menyelenggarakan Kesehatan Olah Raga Per Jumlah seluruh Puskesmas yang ada di Kab/Kota di Kali 100%	Persen	55	55	60		65		70		75		75			
				7	Jumlah Unsur Masyarakat Tingkat Provinsi Yang Dilibatkan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Unsur Komponen Masyarakat yang diikuti sertakan dalam Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Oleh Provinsi	Jumlah Komponen Unsur Masyarakat	4	4	4		4		4		4		4			
49		Persentase Penyakit Menular Dan Penyakit Tidak Menular	Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit							5,083,431,693		5,988,425,241		8,896,515,529		9,479,956,076		29,448,328,539		Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan
				1	Persentase Desa/Kelurahan Yang Mencapai Uci >90%	Jumlah Desa/Kelurahan UCI di Satu Wilayah Pada Kurun Waktu Tertentu di Bagi Jumlah desa/keurahan di suatu wilayah kerja p ada kurun waktu yang sama di Kali 100%	Persen	90	90	90.5		91		91.5		92		92			
				2	Angka Keberhasilan Pengobatan Tb (Treatment Success Rate)	JUMLAH SEMUA KASUS TB YANG SEMBUH DAN PENGOBATAN LENGKAP DIBAGI JUMLAH KASUS TB YANG DIOBATI DAN DILAPORKAN DIKALI 100%	Persen	90	90	90		90		90		90		90			
				3	Persentase Pasien Hiv Yg Di Obati	JUMLAH ORANG YANG MENDAPAT ARV (ON ARV) DI BAGI YANG HIV POSITIF	Persen	60	60	65		70		75		90		90			



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH		
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
				4	Persentase Kab/Kota Yg 50 % Puskesmas Melaksanakan Tatalaksana Pneumonia Balita Sesuai Standar	Jumlah penderita Pneumonia yang ditangani dalam kurun waktu tertentu di Bagi Jumlah penderita Pneumonia di satu wilayah dalam kurun waktu tertentu di Kali 100 %	Persen	60	60	60		60		65		65		65				
				5	Persentase Kab/Kota Yang Mencapai Ir Dbd < 49/100.000 Pddk	Jumlah Kasus Baru di Bagi Jumlah Populasi di Kali 100 %	Persen	68	68	70		72		74		76		76				
				6	Persentase Kab/Kota Yang Sudah Eliminasi Malaria	Jumlah Kabupaten yang sudah Eliminasi di Bagi Jumlah seluruh Kab/Kota di Kali 100%	Persen	89	89	89		93		93		93		93				
				7	Proporsi Kab/Kota Yang Mencapai Eliminasi Filariasis	Jumlah kasus filariasis (baru dan lama) di wilayah dan pada periode tertentu di Bagi Jumlah penduduk pada periode waktu yang sama di Kali 100.000	Persen	27	27	45		54		73		73		73				
				8	Proporsi Cacat Kusta Tk II	Jumlah penderita kusta dengan cacat tingkat 2 pada wilayah dan waktu tertentu di Bagi Jumlah seluruh p enderita kusta (PB+MB) baru yang ditemukan pada wilayah dan kurun waktu yang sama di Kali 100 %	Persen	10	10	10		9		9		9		9				
				9	Persentase Kab/Kota Yang Melakukan Deteksi Dini Hepatitis B Pada Ibu Hamil	Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan Deteksi Dini Hepatitis B (DDHB) pada Ibu Hamil di Bagi Jumlah Seluruh Kabupaten/Kota di Kali 100%	Persen	70	70	80		90		100		100		100				
				10	Persentase Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies Ditatalaksana Sesuai Standar	Jumlah Kasus yang ditatalaksana di Bagi Jumlah Kasus di Kali 100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				11	Prevalensi Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi di Bagi Jumlah Penduduk dikali 100 % (Sumber Data Risesdas)	Persen	60	60	60		60		60		60		60				
				12	Persentase Penduduk Yang Mengalami Gangguan Jiwa Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah ODGJ yang di Obati dibagi Jumlah ODGJ yang ditemukan di Jawa Barat dikali 100 %	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
50	Usia Harapan Hidup	Persentase Penyakit Menular Dan Penyakit Tidak Menular	Program Kesehatan Akibat Bencana Dan Kesehatan Akibat KLB Provinsi								1,100,000,000		1,200,000,000		1,600,000,000		1,600,000,000		5,500,000,000	Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan	
				1	Persentase Kegiatan Rapid Health Assessment	Jumlah Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dalam Kurun Waktu Satu Tahun Di Bagi Jumlah Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Dalam Satu Tahun Yang Sama Dikali 100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				2	Persentase Masyarakat Yang Dilayani Dilokasi Bencana		Persen	100	100	100		100		100		100		100				
51	Usia Harapan Hidup	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Terakreditasi	Program Pelayanan Kesehatan								22,981,245,353		24,759,165,679		27,758,968,730		28,692,532,978		104,191,912,740	Bidang Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	
				1	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Minimal 50 % Puskesmas Menyelenggarakan Program Kesehatan Tradisional	Jumlah Kab / Kota dengan Minimal 50% dari Total Puskesmas menyelenggarakan Program Kesehatan Tradisional (n/Σ X 100%)	Persen	64	64	72		80		88		96		96				
				2	Persentase Kabupaten Kota Puskesmas Sesuai Standar	Jumlah puskesmas sesuai standar dibagi jumlah seluruh puskesmas kali 100% (n/Σ x 100%)	Persen	82	82	86		91		96		100		100				
				3	Persentase Kab/Kota Yg Mempunyai 80% Rumah Sakit Dengan Pencapaian Spm	Jumlah Kab/Kota yang mempunyai semua RS dengan SPM 80% di Bagi Jumlah semua Kab/Kota di Kali 100 %	Persen	19	19	33		48		63		78		78				
				4	Persentase Rumah Sakit Regional Yg Memenuhi Standar	Jumlah RS Regional yang sesuai dengan Standar di Bagi Jumlah RS regional di Kali 100%	Persen	38	38	50		63		75		88		88				
				5	Persentase Puskesmas Siap Akreditasi	Jumlah Puskesmas yang siap akreditasi dibagi total jumlah puskesmas di Jawa Barat dikali 100 %	Persen	95	95	100		100		100		100		100				
				6	Persentase Rumah Sakit Siap Akreditasi	Jumlah Rumah Sakit yang siap akreditasi dibagi total jumlah rumah sakit di Jawa Barat dikali 100 %	Persen	60	60	70		80		90		100		100				
				7	Persentase Kab/Kota Memiliki Laboratorium Kesehatan Terakreditasi	Jumlah Kab/Kota yang sudah memiliki Laboratorium Kesehatan terakreditasi dibagi total jumlah Kab/Kota di Jawa Barat dikali 100 %	Persen	19	19	30		40		50		60		60				
				8	Persentase Rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi	Jumlah RS yg mengusulkan Rekomendasi Izin RS Kelas B dan Fasilitas Yankes Tingkat Lanjutan di bagi Jumlah Rekomendasi Izin yg dikeluarkan Dinkes Prov Jabar dikali 100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				9	Jumlah Kab/Kota Yang Melaksanakan Kerjasama Dengan Provinsi Terkait LAYAD Rawat	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan layad rawat	Jumlah Kab/Kota	8	8	13		18		23		27		27				
52	Usia Harapan Hidup	Persentase tenaga kesehatan yang sesuai standar	Program Sumber Daya Kesehatan								46,920,553,744		51,397,034,213		68,806,316,846		69,020,837,552		236,144,742,356	Bidang Sumber Daya Kesehatan	Dinas Kesehatan	
				1	Persentase Kab/Kota Yang Mendapatkan Pembiayaan Kesehatan	Jumlah Anggaran yang diluncurkan dengan memperhitungkan Silpa di Kab/Kota di Bagi Kebutuhan Anggaran Per Tahun di Kali 100 Persen	Persen	40	40	40		40		40		40		40				



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH	
							2017	2018	2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE				
							(8)	(9)	K (10)	Rp. (11)	K (12)	Rp. (13)	K (14)	Rp. (15)	K (16)	Rp. (17)	K (18)	Rp. (19)			
				3	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di RS Al Ihsan	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dibagi Jumlah Unit Kerja x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100					
				4	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Rencana dan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-Undangan dibagi Jumlah Dokumen x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100					
				5	Persentase Ketersediaan Data Kinerja Di RS Al Ihsan	Jumlah Data Kinerja RS Al Ihsan yang disediakan dibagi Jumlah Data Kinerja (Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program) x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100					
71		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran RS Jiwa UPT Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat								18,136,365,618		21,676,392,022		31,831,141,088		35,014,255,196		106,658,153,924	Direktur Perencanaan Keuangan Dan Umum	Dinas Kesehatan
				1	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di RS Jiwa	Jumlah ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi dibagi Jumlah ASN RS Jiwa x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100					
				2	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di RS Jiwa	Jumlah Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100					
				3	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di RS Jiwa	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dibagi Jumlah Unit Kerja x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100					
				4	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Rencana dan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-Undangan dibagi Jumlah Dokumen x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100					
				5	Persentase Ketersediaan Data Kinerja Di RS Jiwa	Jumlah Data Kinerja RS Jiwa yang disediakan dibagi Jumlah Data Kinerja (Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program) x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100					
72		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Rs Paru UPT Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat								13,629,825,000		16,118,190,000		23,640,012,000		26,004,013,200		79,392,040,200	Wakil Direktur Pelayanan Medis Dan Keperawatan	Dinas Kesehatan
				1	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di RS Paru	Jumlah ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi dibagi Jumlah ASN RS Paru x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100					
				2	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di RS Paru	Jumlah Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100					
				3	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di RS Paru	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dibagi Jumlah Unit Kerja x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100					
				4	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Rencana dan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-Undangan dibagi Jumlah Dokumen x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100					
				5	Persentase Ketersediaan Data Kinerja Di RS Paru	Jumlah Data Kinerja RS Paru yang disediakan dibagi Jumlah Data Kinerja (Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program) x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100					
73		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran RS Jampangkulon UPT Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat								18,232,500,000		21,270,000,000		30,640,000,000		32,920,000,000		103,062,500,000	Direktur Rs Jampang Kulon	Dinas Kesehatan
				1	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di RS Jampangkulon	Jumlah ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi dibagi Jumlah ASN RS Jampangkulon x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100					
				2	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di RS Jampangkulon	Jumlah Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100					
				3	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di RS Jampangkulon	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dibagi Jumlah Unit Kerja x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100					
				4	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Rencana dan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-Undangan dibagi Jumlah Dokumen x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100					
				5	Persentase Ketersediaan Data Kinerja Di RS Jampangkulon	Jumlah Data Kinerja RS Jampangkulon yang disediakan dibagi Jumlah Data Kinerja (Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program) x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100					
74		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Rs Pameungpeuk UPT Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat								7,864,275,000		10,172,238,750		16,266,456,750		19,509,254,063		53,812,224,563	Direktur Rs Pameungpeuk	Dinas Kesehatan
				1	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di RS Pameungpeuk	Jumlah ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi dibagi Jumlah ASN RS Pameungpeuk x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100					
				2	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di RS Pameungpeuk	Jumlah Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100					
				3	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di RS Pameungpeuk	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dibagi Jumlah Unit Kerja x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100					
				4	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Rencana dan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-Undangan dibagi Jumlah Dokumen x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100					
				5	Persentase Ketersediaan Data Kinerja Di RS Pameungpeuk	Jumlah Data Kinerja RS Pameungpeuk yang disediakan dibagi Jumlah Data Kinerja (Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program) x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100					
75		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Rs Kesehatan Kerja UPT Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat								4,922,500,000		6,270,000,000		8,960,000,000		10,000,000,000		30,152,500,000	Direktur Rs Kesehatan Kerja	Dinas Kesehatan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH							
							2017	2018	2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE										
							(8)	(9)	K (10)	Rp. (11)	K (12)	Rp. (13)	K (14)	Rp. (15)	K (16)	Rp. (17)	K (18)	Rp. (19)									
				1	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di RS Kesehatan Kerja	Jumlah ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi dibagi Jumlah ASN RS Kesehatan Kerja x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100											
				2	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di RS Kesehatan Kerja	Jumlah Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100											
				3	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di RS Kesehatan Kerja	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dibagi Jumlah Unit Kerja x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100											
				4	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Rencana dan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-undangan dibagi Jumlah Dokumen x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100											
				5	Persentase Ketersediaan Data Kinerja Di RS Kesehatan Kerja	Jumlah Data Kinerja RS Kesehatan Kerja yang disediakan dibagi Jumlah Data Kinerja (Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program) x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100											
76		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Unit Laboratorium Kesehatan UPT Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat								3,225,927,500		3,652,830,000		5,290,440,000		5,640,440,000		17,809,637,500	Laboratorium Kesehatan	Dinas Kesehatan						
				1	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di Laboratorium Kesehatan	Jumlah ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi dibagi Jumlah ASN Laboratorium Kesehatan x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100											
				2	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Laboratorium Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100											
				3	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Laboratorium Kesehatan	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dibagi Jumlah Unit Kerja x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100											
				4	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Rencana dan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-undangan dibagi Jumlah Dokumen x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100											
				5	Persentase Ketersediaan Data Kinerja Di Laboratorium Kesehatan	Jumlah Data Kinerja Laboratorium Kesehatan yang disediakan dibagi Jumlah Data Kinerja (Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program) x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100											
77		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Unit Pelatihan Kesehatan UPT Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat								2,525,472,675		2,700,550,644		4,476,158,929		4,923,774,822		14,625,957,070	Unit Pelatihan Kesehatan	Dinas Kesehatan						
				1	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di Upelkes	Jumlah ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi dibagi Jumlah ASN Upelkes x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100											
				2	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Upelkes	Jumlah Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100											
				3	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Upelkes	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dibagi Jumlah Unit Kerja x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100											
				4	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Rencana dan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-undangan dibagi Jumlah Dokumen x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100											
				5	Persentase Ketersediaan Data Kinerja Di Upelkes	Jumlah Data Kinerja Upelkes yang disediakan dibagi Jumlah Data Kinerja (Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program) x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100											
78		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	1	Persentase Bangunan Gedung Serba Guna/Mesjid Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Persentase Bangunan Gedung Serba Guna/mesjid Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Persen	100	100	100		2,997,500,000		15,000,000,000					17,997,500,000	Sekretaris	Dinas Kesehatan						
79		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat								25,563,183,731		28,550,151,416		39,778,735,243		41,585,557,239		135,477,627,629	Sekretaris	Dinas Kesehatan						
				1	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Jumlah ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi dibagi Jumlah ASN di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100											
				2	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100											
				3	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dibagi Jumlah Unit Kerja x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100											
				4	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Rencana dan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-undangan dibagi Jumlah Dokumen x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100											
				5	Persentase Ketersediaan Data Kinerja Di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Jumlah Data Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang disediakan dibagi Jumlah Data Kinerja (Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program) x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100											
3			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								1,880,442,869,680		2,130,108,450,169		2,426,297,360,172		3,326,604,997,906		9,654,609,750,228								
80	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Persentase aksesibilitas menuju kawasan potensial dan pusat-pusat kegiatan yang dibangun/ditingkatkan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I	1	Persentase Peningkatan Aksesibilitas Menuju Sentra-Sentra Ekonomi Dan Kawasan Potensial Di Wilayah Pelayanan I	(Luas Jalan Provinsi Di Wp I : Luas Jalan Provinsi Sesuai Standar Di WP I) X 100 %	Persen	88.89	89.01	90.17		116,045,500,000		90.37		18,000,000,000		90.57		-	90.72		-	90.72	134,045,500,000	Bidang UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah Pelayanan I	Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PENANGGUNG JAWAB ESELON II	PERANGKAT DAERAH
							2017	2018	2020		2021		2022		2023						
							(8)	(9)	K (10)	Rp. (11)	K (12)	Rp. (13)	K (14)	Rp. (15)	K (16)	Rp. (17)					
81	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Persentase aksesibilitas menuju kawasan potensial dan pusat-pusat kegiatan yang dibangun/ditingkatkan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II	1	Persentase peningkatan aksesibilitas menuju sentra-sentra ekonomi dan kawasan potensial Di Wilayah Pelayanan II	(Luas Jalan Provinsi Di Wp II : Luas Jalan Provinsi Sesuai Standar Di WP II) X 100 %	Persen	78.1	79.68	80.08	92,566,674,000	80.54	170,500,000,000	81.06	95,760,000,000	81.65	33,516,000,000	81.65	392,342,674,000	Bidang UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah Pelayanan II	Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat
82	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Persentase aksesibilitas menuju kawasan potensial dan pusat-pusat kegiatan yang dibangun/ditingkatkan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III	1	Persentase Peningkatan Aksesibilitas Menuju Sentra-Sentra Ekonomi Dan Kawasan Potensial Di Wilayah Pelayanan III	(Luas Jalan Provinsi Di Wp III : Luas Jalan Provinsi Sesuai Standar Di WP III) X 100 %	Persen	92.28	92.28	92.36	119,288,918,620	92.41	379,833,870,948	92.46	432,476,712,329	92.52	83,260,800,000	92.52	1,014,860,301,897	Bidang UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah Pelayanan III	Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat
83	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Persentase aksesibilitas menuju kawasan potensial dan pusat-pusat kegiatan yang dibangun/ditingkatkan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV	1	Persentase Peningkatan Aksesibilitas Menuju Sentra-Sentra Ekonomi Dan Kawasan Potensial Di Wilayah Pelayanan IV	(Luas Jalan Provinsi Di Wp IV : Luas Jalan Provinsi Sesuai Standar Di WP IV) X 100 %	Persen	82.20	82.20	82.88	-	83.22	2,628,000,000	83.61	120,000,000,000	84.06	-	84.06	122,628,000,000	Bidang UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah Pelayanan IV	Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat
84	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Persentase aksesibilitas menuju kawasan potensial dan pusat-pusat kegiatan yang dibangun/ditingkatkan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V	1	Persentase Peningkatan Aksesibilitas Menuju Sentra-Sentra Ekonomi Dan Kawasan Potensial Di Wilayah Pelayanan V	(Luas Jalan Provinsi Di Wp V : Luas Jalan Provinsi Sesuai Standar Di WP V) X 100 %	Persen	94.66	94.66	94.83	-	95.01	104,000,000,000	95.09	165,984,000,000	95.13	-	95.13	269,984,000,000	Bidang UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah Pelayanan V	Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat
85	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Persentase aksesibilitas menuju kawasan potensial dan pusat-pusat kegiatan yang dibangun/ditingkatkan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI	1	Persentase Peningkatan Aksesibilitas Menuju Sentra-Sentra Ekonomi Dan Kawasan Potensial Di Wilayah Pelayanan VI	(Luas Jalan Provinsi Di Wp VI : Luas Jalan Provinsi Sesuai Standar Di WP VI) X 100 %	Persen	92.80	93.20	93.92	12,000,000,000	93.99	100,470,000,000	94.07	250,191,658,656	94.15	120,960,000,000	94.15	483,621,658,656	Bidang UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah Pelayanan VI	Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat
86	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Tingkat kemandapan jalan	Program Peningkatan, Pemeliharaan Berkala dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Wilayah Pelayanan I	1	Tingkat Kemandapan Jalan Di Wilayah Pelayanan I	((Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik + Kondisi Sedang) : (Total Panjang Jalan Provinsi)) X 100%	Persen	88.72	89.60	95.13	120,438,000,000	99.22	139,320,200,000	99.97	123,945,600,000	100	107,633,400,000	100	491,337,200,000	Bidang UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah Pelayanan I	Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat
87	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Tingkat kemandapan jalan	Program Peningkatan, Pemeliharaan Berkala dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Wilayah Pelayanan II	1	Tingkat Kemandapan Jalan Di Wilayah Pelayanan II	((Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik + Kondisi Sedang) : (Total Panjang Jalan Provinsi)) X 100%	Persen	83.62	84.50	93.13	108,540,000,000	98.89	126,058,400,000	99.95	119,889,600,000	100	108,981,600,000	100	463,469,600,000	Bidang UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah Pelayanan II	Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat
88	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Tingkat kemandapan jalan	Program Peningkatan, Pemeliharaan Berkala dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Wilayah Pelayanan III	1	Tingkat Kemandapan Jalan Di Wilayah Pelayanan III	((Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik + Kondisi Sedang) : (Total Panjang Jalan Provinsi)) X 100%	Persen	93.23	94.1	97.43	178,591,500,000	99.59	199,341,000,000	99.98	182,798,400,000	100	160,826,400,000	100	721,557,300,000	Bidang UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah Pelayanan III	Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat
89	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Tingkat kemandapan jalan	Program Peningkatan, Pemeliharaan Berkala dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Wilayah Pelayanan IV	1	Tingkat Kemandapan Jalan Di Wilayah Pelayanan IV	((Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik + Kondisi Sedang) : (Total Panjang Jalan Provinsi)) X 100%	Persen	87.37	88.23	94.37	123,025,500,000	99.09	143,188,800,000	99.96	135,816,000,000	100	123,895,800,000	100	525,926,100,000	Bidang UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah Pelayanan IV	Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat
90	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Tingkat kemandapan jalan	Program Peningkatan, Pemeliharaan Berkala dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Wilayah Pelayanan V	1	Tingkat Kemandapan Jalan Di Wilayah Pelayanan V	((Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik + Kondisi Sedang) : (Total Panjang Jalan Provinsi)) X 100%	Persen	88.92	89.80	95.43	93,339,000,000	99.26	105,248,000,000	99.97	86,774,400,000	100	74,176,200,000	100	359,537,600,000	Bidang UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah Pelayanan V	Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat
91	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Tingkat kemandapan jalan	Program Peningkatan, Pemeliharaan Berkala dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Wilayah Pelayanan VI	1	Tingkat Kemandapan Jalan Di Wilayah Pelayanan VI	((Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik + Kondisi Sedang) : (Total Panjang Jalan Provinsi)) X 100%	Persen	94.69	95.57	96.67	114,642,000,000	99.46	126,233,200,000	99.98	113,947,200,000	100	102,349,800,000	100	457,172,200,000	Bidang UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah Pelayanan VI	Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat
92	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Tingkat kemandapan jalan	Program Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan	1	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis Yang Siap Bangun	Jumlah Perencanaan Teknis Yang Dibuat : Rencana Penanganan Pada Tahun N+1	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
				2	Persentase Ketersediaan Data Teknis Untuk Pengelolaan Jalan	Panjang Jalan Yang Akan Dileperkan/ Total Panjang Jalan Provinsi X 100%	Persen	9.12	10.12	35.46		56.97		78.48		100		100			
93	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Tingkat kemandapan jalan	Program Pengawasan dan Pemanfaatan Jalan dan Jembatan	1	Persentase Pengawasan Teknis Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan Dan Rehabilitasi Jalan	Jumlah Jalan Yang Disupervisi Dibagi Panjang Jalan Yang Ditangani	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
				2	Persentase Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan Jalan	Panjang Jalan Provinsi Yang Dimonitor Dibagi Jumlah Panjang Jalan Provinsi X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
				3	Persentase Kelengkapan Peralatan Pemeliharaan Jalan	(Jumlah Alat Yang Tersedia X Bobot) : (Alat Yang Dibutuhkan X100%)	Persen	52	52	58		64		69		74		74			
94		Tingkat kemandapan jalan	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	1	Persentase Sumber Daya Konstruksi Yang Terlatih	Jumlah Sumber Daya Konstruksi Yang Terlatih Dibagi Jumlah Sumber Daya Konstruksi Yang Akan Dilatih Selama Lima Tahun X100%	Persen	NA	N/A	40		60		80		100		100			
				2	Tingkat Capaian Pembangunan Sarana Ibadah	Realisasi Pelaksanaan Pembangunan Dibagi Target Pelaksanaan Pembangunan X100%	Persen	NA	60	100											
95	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang	Program Penataan Ruang								3,440,340,000		3,707,931,200		4,729,820,160		3,173,591,904		15,051,683,264	Bidang Penataan Ruang	Dinas Bina Marga



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON	PERANGKAT DAERAH		
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
				1	Persentase Rencana Tata Ruang yang diselesaikan	Jumlah Rancangan Perda Rencana Tata Ruang Yang Diselesaikan Dibagi Jumlah Rancangan Perda Rencana Tata Ruang Yang Harus Disusun Selama 5 Tahun X100%	Persen	N/A	16	32		55	72		90	90						
				2	Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Yang Diberikan Dibagi Jumlah Permohonan Pemanfaatan Ruang X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
				3	Persentase Permohonan Rekomendasi Gubernur Yang Diproses Terhadap Rancangan Perda Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota Dibagi Jumlah Permohonan Rekomendasi Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota X100%	Jumlah Permohonan Rekomendasi Gubernur Yang Diproses Terhadap Rancangan Perda Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota Dibagi Jumlah Permohonan Rekomendasi Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
				4	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penataan Ruang	Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penataan Ruang Yang Dilaksanakan Dibagi Rencana Pembinaan Dan Pengawasan Penataan Ruang X 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
96		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Pengelolaan Jalan Dan Penataan Ruang	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	90	93	96	810,000,000	97	993,600,000	98	1,244,160,000	99	1,306,368,000	99	4,354,128,000	Sekretaris Dinas Bina Marga	Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat	
97		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Pelayanan I	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	90	91	94	337,500,000	96	414,000,000	97	518,400,000	98	544,320,000	98	1,814,220,000	Bidang UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah Pelayanan I	Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat	
98		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Pelayanan II	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	91	92	94	337,500,000	96	414,000,000	97	518,400,000	98	544,320,000	98	1,814,220,000	Bidang UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah Pelayanan II	Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat	
99		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Pelayanan III	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	84	85	89	337,500,000	90	414,000,000	92	518,400,000	94	544,320,000	94	1,814,220,000	Bidang UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah Pelayanan III	Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat	
100		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	87	88	92	337,500,000	95	414,000,000	97	518,400,000	98	544,320,000	98	1,814,220,000	Bidang UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah Pelayanan IV	Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat	
101		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Pelayanan V	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	86	87	89	337,500,000	92	414,000,000	94	518,400,000	96	544,320,000	96	1,814,220,000	Bidang UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah Pelayanan V	Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat	
102		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	86	87	89	337,500,000	91	414,000,000	93	518,400,000	95	544,320,000	95	1,814,220,000	Bidang UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah Pelayanan VI	Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat	
103		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	67	68	71	450,000,000	73	552,000,000	75	691,200,000	78	725,760,000	78	2,418,960,000	Sekretaris Dinas Bina Marga	Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat	
104		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang								6,247,093,875		7,016,878,935		8,037,733,308		7,684,353,710		28,986,059,828	Sekretaris	Dinas Bina Marga	
				1	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	Jumlah ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Dibagi Jumlah ASN Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang X100%	Persen	96	96	97		98	99		100	100						
				2	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	92	93	90		96	97		98	98						
				3	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100	100		100	100						
				4	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100	100		100	100						
				5	Persentase Ketersediaan Data Kinerja Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	Jumlah Data Kinerja dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Yang Disediakan/Jumlah Data Kinerja (Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Dan Kegiatan) Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Yang Seharusnya Disediakan*100	Persen	100	100	100		100	100		100	100						
105		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I								1,366,722,500		1,372,363,300		1,554,080,440		1,562,701,811		5,855,868,051	UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah Pelayanan I	Dinas Bina Marga	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH		
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Pelayanan I	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	83	84	86		88		90		92		92				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Pelayanan I	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	100	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Pelayanan I	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	100	100	100	100		100		100		100		100				
	106	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II									1,366,722,500		1,372,363,300		1,554,080,440		1,562,701,811		5,855,868,051	UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah Pelayanan II	Dinas Bina Marga
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Pelayanan II	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	84	84	87		89		91		93		93				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Pelayanan II	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	100	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Pelayanan II	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	100	100	100	100		100		100		100		100				
	107	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III									1,366,722,500		1,372,363,300		1,554,080,440		1,562,701,811		5,855,868,051	UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah Pelayanan III	Dinas Bina Marga
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Pelayanan III	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	80	80	85		87		89		91		91				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Pelayanan III	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Pelayanan III	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
	108	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV									1,366,722,500		1,372,363,300		1,554,080,440		1,562,701,811		5,855,868,051	UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah Pelayanan IV	Dinas Bina Marga
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	86	87	89		91		93		95		95				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
	109	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V									1,366,722,500		1,372,363,300		1,554,080,440		1,562,701,811		5,855,868,051	UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah Pelayanan V	Dinas Bina Marga
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Pelayanan V	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	80	80	85		87		89		91		91				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Pelayanan V	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH		
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Pelayanan V	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
	110	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI									1,366,722,500	1,372,363,300	1,554,080,440	1,562,701,811	5,855,868,051	UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah Pelayanan VI	Dinas Bina Marga				
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	84	85	88	90	91	93	93	93	93						
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100						
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100						
	111	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi									1,291,722,500	1,289,863,300	1,463,330,440	1,462,876,811	5,507,793,051	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	Dinas Bina Marga				
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	NA	67	71	74	78	85	85	85	85						
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100						
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100						
	112	Indeks Penggunaan Air	Persentase Peningkatan kapasitas tampung sumber daya air	Program Perencanaan Teknis Sumber Daya Air	1	Persentase Penerapan Perencanaan Teknis Sumber Daya Air	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Yang Diterapkan/Dilaksanakan Dibagi Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan X100%	Persen	N/A	N/A	25.00	3,885,000,000	40.00	4,095,000,000	60.00	4,200,000,000	80.00	3,885,000,000	80.00	16,065,000,000	Bid. Cantek	Dinas Sumber Daya Air
	113	Indeks Penggunaan Air	Persentase Peningkatan kapasitas tampung sumber daya air	Program Bina Konstruksi Sumber Daya Air	1	Persentase Hasil Kerja Konstruksi Sumber Daya Air Yang Sesuai Standar (Alternatif 2)	Jumlah Hasil Kerja Konstruksi Sumber Daya Air Yang Sesuai Standar Dibagi Jumlah Hasil Kerja Konstruksi Sumber Daya Air Yang Dilaksanakan X100%	Persen	N/A	N/A	34.17	600,000,000	35.02	457,250,000	35.90	470,000,000	36.79	461,000,000	36.79	1,988,250,000	Bid. Konstruksi	Dinas Sumber Daya Air
	114	Indeks Penggunaan Air	Persentase Peningkatan kapasitas tampung sumber daya air	Program Bina Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	1	Persentase Sumber Air Yang Dikelola Dengan Baik	Jumlah Sumber Air Yang Dikelola Dengan Baik Dibagi Jumlah Sumber Air Yang Dikelola X100%	Persen	N/A	N/A	28.69	518,000,000	28.77	614,250,000	28.86	700,000,000	28.94	749,250,000	28.94	2,581,500,000	Bid. Op	Dinas Sumber Daya Air
	115	Indeks Penggunaan Air	Persentase Peningkatan kapasitas tampung sumber daya air	Program Bina Manfaat Sumber Daya Air	1	Tingkat Kepatuhan Penggunaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Air	Jumlah Penggunaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Yang Sesuai Dengan Izin Dibagi Jumlah Penggunaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Air X100%	Persen	N/A	N/A	74.94	1,017,500,000	75.52	1,345,500,000	76.11	1,660,000,000	76.69	1,794,500,000	76.69	5,817,500,000	Bid. Bina Manfaat	Dinas Sumber Daya Air
	116	Indeks Penggunaan Air	Persentase Peningkatan kapasitas tampung sumber daya air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air di WS. Ciliwung-Cisadane								14,824,142,500	15,756,000,000	16,440,000,000	15,466,000,000	62,486,142,500	UPTD WS. CILIWUNG-CISADANE	Dinas Sumber Daya Air				
				1	Kapasitas Tampung Sumber Air Di WS. Ciliwung-Cisadane	Kapasitas Tampung Sumber Air Di WS. Ciliwung-Cisadane	M3	N/A	N/A	17,126,818	17,983,159	18,882,317	19,826,432	19,826,432	19,826,432	19,826,432						
				2	Persentase Sungai Dan Atau Drainase Utama Yang Terpelihara Pada WS. Ciliwung-Cisadane	Jumlah Sungai Dan Atau Drainase Utama Yang Terpelihara Pada WS. Ciliwung-Cisadane Dibagi Jumlah Sungai Dan Atau Drainase Utama Pada WS. Ciliwung-Cisadane X100%	Persen	N/A	N/A	46.00	47.00	48.00	49.00	49.00	49.00	49.00						
	117	Indeks Penggunaan Air	Persentase Peningkatan kapasitas tampung sumber daya air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air di WS. Cisadea-Cibareno								18,463,000,000	20,377,500,000	22,040,000,000	21,460,000,000	82,340,500,000	UPTD WS. CISADEA-CIBARENO	Dinas Sumber Daya Air				
				1	Kapasitas Tampung Sumber Air Di WS. Cisadea-Cibareno	Kapasitas Tampung Sumber Air Di WS. Cisadea-Cibareno	M3	N/A	N/A	1,510,128	1,516,128	1,522,128	1,528,128	1,528,128	1,528,128	1,528,128						
				2	Persentase Panjang Sungai Yang Dapat Dilakukan Pengendalian Dan Penataan Di WS. Cisadea-Cibareno	Panjang Sungai Yang Dapat Dilakukan Pengendalian Dan Penataan Di WS. Cisadea-Cibareno Dibagi Panjang Sungai Di WS. Cisadea-Cibareno X100%	Persen	N/A	N/A	0.06	0.09	0.12	0.15	0.15	0.15	0.15						
				3	Persentase Titik Pantai Yang Dapat Dilakukan Pengamanan Dan Penataan Di WS. Cisadea-Cibareno	Jumlah Titik Pantai Yang Dapat Dilakukan Pengamanan Dan Penataan Di WS. Cisadea-Cibareno Dibagi Jumlah Titik Pantai Yang Perlu Dilakukan Penanganan Dan Penataan Di WS. Cisadea-Cibareno X100%	Persen	N/A	N/A	18.18	18.18	18.18	18.18	18.18	18.18	18.18						
	118	Indeks Penggunaan Air	Persentase Peningkatan kapasitas tampung sumber daya air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air di WS. Citarum								13,493,900,000	13,084,500,000	13,740,000,000	12,025,000,000	52,343,400,000	UPTD WS. CITARUM	Dinas Sumber Daya Air				
				1	Kapasitas Tampung Sumber Air Di WS. Citarum	Kapasitas Tampung Sumber Air Di WS. Citarum	M3	N/A	N/A	6,598,490	6,604,490	6,610,490	6,616,490	6,616,490	6,616,490	6,616,490						
				2	Persentase Sungai Dan Atau Drainase Utama Yang Terpelihara Pada WS. Citarum	Jumlah Sungai Dan Atau Drainase Utama Yang Terpelihara Pada WS. Citarum Dibagi Jumlah Sungai Dan Atau Drainase Utama Pada WS. Citarum X100%	Persen	N/A	N/A	20.00	22.50	24.50	26.50	26.50	26.50	26.50						
	119	Indeks Penggunaan Air	Persentase Peningkatan kapasitas tampung sumber daya air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air di WS. Cimanuk-Cisanggarung								14,134,000,000	15,366,000,000	16,440,000,000	15,836,000,000	61,776,000,000	UPTD WS. Cimanuk-Cisanggarung	Dinas Sumber Daya Air				



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH		
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
141	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Tingkat implementasi rekomendasi yang dihasilkan oleh kelembagaan Sumber Daya Air	Program pengendalian daya rusak air	1	Persentase Kejadian Daya Rusak Air Yang Ditangani	Persen	N/A	N/A	6.00	3,256,000,000	7.50	4,036,500,000	8.00	4,760,000,000	10.00	4,976,500,000	10.00	17,029,000,000	Bidang Bina Op	Dinas Sumber Daya Air		
142	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Persentase Titik Terdampak Banjir dan Kekeringan yang ditangani	Program pengendalian daya rusak air pada WS. Cisadea-Cibareno	1	Persentase Kejadian Daya Rusak Air Yang Ditangani Pada WS. Cisadea-Cibareno	Persen	N/A	N/A	22.50	1,850,000,000	22.50	2,047,500,000	22.50	2,200,000,000	22.50	2,220,000,000	22.50	8,317,500,000	UPTD PSDA WS. Cisadea-Cibareno	Dinas Sumber Daya Air		
143	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Persentase Titik Terdampak Banjir dan Kekeringan yang ditangani	Program pengendalian daya rusak air pada WS. Ciwulan-Cilaki	1	Persentase Kejadian Daya Rusak Air Yang Ditangani Pada WS. Ciwulan-Cilaki	Persen	N/A	N/A	15.38	740,000,000	15.38	780,000,000	15.38	1,000,000,000	15.38	925,000,000	15.38	3,445,000,000	UPTD PSDA WS. Ciwulan-Cilaki	Dinas Sumber Daya Air		
144		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Sumber Daya Air	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Dinas Sumber Daya Air		N/A	N/A	100	1,850,000,000	100	1,950,000,000	100	2,000,000,000	100	1,850,000,000	100	7,650,000,000	Sekretaris	Dinas Sumber Daya Air		
145		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD PSDA WS. Ciliwung-Cisadane	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Psda WS. Ciliwung-Cisadane		N/A	N/A	100	201,650,000	100	234,000,000	100	280,000,000	100	277,500,000	100	993,150,000	UPTD PSDA WS. Ciliwung-Cisadane	Dinas Sumber Daya Air		
146		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD PSDA WS. Cisadea-Cibareno	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Psda WS. Cisadea-Cibareno		N/A	N/A	75.50	3,330,000,000	78.50	780,000,000	81.50	800,000,000	84.50	740,000,000	84.50	5,650,000,000	UPTD PSDA WS. Cisadea-Cibareno	Dinas Sumber Daya Air		
147		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD PSDA WS. Citarum	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Psda WS. Citarum		N/A	N/A	80.00	2,590,000,000	82.80	682,500,000	85.60	800,000,000	88.40	832,500,000	88.40	4,905,000,000	UPTD PSDA WS. Citarum	Dinas Sumber Daya Air		
148		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD PSDA WS. Cimanuk-Cisanggarung	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Psda WS. Cimanuk-Cisanggarung		N/A	N/A	100	814,000,000	100	780,000,000	100	800,000,000	100	740,000,000	100	3,134,000,000	UPTD PSDA WS. Cimanuk-Cisanggarung	Dinas Sumber Daya Air		
149		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD PSDA WS. Citanduy	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Psda WS. Citanduy		N/A	N/A	100	555,000,000	100	585,000,000	100	600,000,000	100	555,000,000	100	2,295,000,000	UPTD PSDA WS. Citanduy	Dinas Sumber Daya Air		
150		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD PSDA WS. Ciwulan-Cilaki	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Psda WS. Ciwulan-Cilaki		N/A	N/A	100	3,885,000,000	100	585,000,000	100	600,000,000	100	555,000,000	100	5,625,000,000	UPTD PSDA WS. Ciwulan-Cilaki	Dinas Sumber Daya Air		
151		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Sumber Daya Air						10,865,050,000			9,742,200,000		10,196,000,000		9,527,500,000		40,330,750,000	Sekretaris	Dinas Sumber Daya Air		
				1	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di Dinas Sumber Daya Air		N/A	N/A	50		60	70	80	80								
				2	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Dinas Sumber Daya Air		N/A	N/A	100		100	100	100	100								
				3	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Dinas Sumber Daya Air		N/A	N/A	100		100	100	100	100								
				4	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Dinas Sumber Daya Air		N/A	N/A	100		100	100	100	100								
				5	Persentase Ketersediaan Data Kinerja Dinas Sumber Daya Air		N/A	N/A	100		100	100	100	100								
152		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD PSDA WS. Ciliwung-Cisadane						1,369,703,000			1,530,750,000		1,144,000,000		1,128,500,000		5,172,953,000	UPTD PSDA WS. Ciliwung-Cisadane	Dinas Sumber Daya Air		
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Psda WS. Ciliwung-Cisadane		N/A	N/A	100		100	100	100	100								
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Psda WS. Ciliwung-Cisadane		N/A	N/A	100		100	100	100	100								
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Psda WS. Ciliwung-Cisadane		N/A	N/A	100		100	100	100	100								
153		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD PSDA WS. Cisadea-Cibareno						653,235,000			757,399,500		854,502,000		869,455,785		3,134,592,285	UPTD PSDA WS. Cisadea-Cibareno	Dinas Sumber Daya Air		
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Psda WS. Cisadea-Cibareno		N/A	N/A	67.40		70.20	73.25	76.49	76.49								
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Psda WS. Cisadea-Cibareno		N/A	N/A	100		100	100	100	100								
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Psda WS. Cisadea-Cibareno		N/A	N/A	100		100	100	100	100								
154		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD PSDA WS. Citarum						740,000,000			828,750,000		900,000,000		878,750,000		3,347,500,000	UPTD PSDA WS. Citarum	Dinas Sumber Daya Air		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE						PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH
							2017	2018	2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE			
							(8)	(9)	K (10)	Rp. (11)	K (12)	Rp. (13)	K (14)	Rp. (15)	K (16)	Rp. (17)	K (18)	Rp. (19)		
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pada Ws. Citarum	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%		N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	100	100			
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pada Ws. Citarum	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%		N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	100	100			
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pada Ws. Citarum	Jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan dibagi jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan x100%		N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	100	100			
155		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD PSDA WS. Cimanuk-Cisanggarung								1,575,392,660	1,820,863,746	2,188,000,000	2,321,935,000	7,906,191,406	UPTD PSDA WS. Cimanuk-Cisanggarung	Dinas Sumber Daya Air			
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pada Ws. Cimanuk-Cisanggarung	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%		N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	100	100			
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pada Ws. Cimanuk-Cisanggarung	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%		N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	100	100			
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pada Ws. Cimanuk-Cisanggarung	Jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan dibagi jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan x100%		N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	100	100			
156		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD PSDA WS. Citanduy								747,514,700	886,212,990	995,830,040	1,007,707,066	3,637,264,796	UPTD PSDA WS. Citanduy	Dinas Sumber Daya Air			
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pada Ws. Citanduy	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%		N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	100	100			
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pada Ws. Citanduy	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%		N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	100	100			
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pada Ws. Citanduy	Jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan dibagi jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan x100%		N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	100	100			
157		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD PSDA WS. Ciwulan-Cilaki								714,871,450	817,771,500	906,414,000	916,763,245	3,355,820,195	UPTD PSDA WS. Ciwulan-Cilaki	Dinas Sumber Daya Air			
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pada Ws. Ciwulan-Cilaki	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%		N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	100	100			
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pada Ws. Ciwulan-Cilaki	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%		N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	100	100			
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pada Ws. Ciwulan-Cilaki	Jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan dibagi jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan x100%		N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	100	100			
158	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	a. Persentase luasan genangan permukiman yang tertangani b. Cakupan akses infrastruktur dasar permukiman	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman								27,670,710,000	35,780,000,000	98,631,840,000	1,935,522,395,119	2,097,604,945,119	Bidang Infrastruktur Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman			
				1	Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	Jumlah Penduduk Terlayani Akses Air Limbah Layak Dibagi Jumlah Penduduk X 100%	Persen	67.01	70.74	73.33	76	78.6	81.33	81.33	81.33					
				2	Cakupan Pelayanan Penanganan Sampah	Jumlah Penduduk Terlayani Penanganan Sampah Dibagi Jumlah Penduduk X 100%	Persen	67.11	67.87	71	73	75	77	77	77					
				3	Cakupan Pengurangan Sampah	Jumlah Penduduk Yang Melakukan Pengurangan Sampah Dibagi Jumlah Penduduk X 100%	Persen	N/A	N/A	5.9	8.31	10.72	13.13	13.13						
				4	Cakupan Pelayanan Air Minum	Jumlah Penduduk Yang Terlayani Air Minum Dibagi Jumlah Penduduk X 100%	Persen	73.17	76.85	80	82	84	86	86	86					
				5	Pengurangan Luasan Genangan Di Permukiman	Luas Daerah Bebas Genangan Dibagi Luas Daerah Rawan Genangan X100%	Persen	N/A	N/A	70	55	40	25	25						
4			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								579,791,544,000	499,668,091,620	627,326,626,400	71,864,356,880	1,778,650,618,900					
159	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Tingkat kualitas kawasan permukiman	Program Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman								493,602,370,000	384,582,000,000	507,950,000,000	3,180,000,000	1,389,314,370,000	Bidang Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman			
				1	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Dibagi Luas Kawasan Permukiman Kumuh X100%	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Dibagi Luas Kawasan Permukiman Kumuh X100%	Persen	76.91	71.91	62	57	52	47	47						
				2	Persentase Prasarana Dan Sarana Yang Dibangun Dan Dikembangkan	Jumlah Prasarana Dan Sarana Yang Dibangun Dan Dikembangkan Dibagi Jumlah Psa Yang Akan Dibangun Dan Dikembangkan Selama 5 Tahun X100%	Persen	45	50	22.11	24.03	16.34	5.79	5.79						



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE						PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH	
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
160		Tingkat ketersediaan rumah layak	Program pengelolaan dan pelayanan perumahan	1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPTD P3Jb (Pengelolaan Dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat)	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur Dibagi Total Unsur Yang Terisi X Nilai Penimbang (Permenpanrb Nomor 14 Th 2017)	Persen	80.65	80.95	80	50,000,000	80	50,000,000	80	50,000,000	80	50,000,000	80	200,000,000	UPT P3Jb (Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat)	Dinas Perumahan dan Permukiman	
161	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Pemenuhan unsur penyelenggaraan bangunan gedung	Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan							71,329,511,900		97,006,191,800		98,499,665,000		59,292,666,000		326,128,034,700	Bidang Perumahan	Dinas Perumahan dan Permukiman	
				1 Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Layak Huni Dibagi Jumlah Rumah X100%	Persen	93.04	98.46	98.08		99.38		99.69		100		100				
				2 Penyediaan Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Dibagi Jumlah Rumah Tangga X 100 %	Persen	91.02	91.32	91.41		92.25		92.57		92.88		92.88				
				3 Persentase Hunian Rumah Untuk Pendukung Pelaksanaan Program Pemerintah Dan Pasca Bencana yang ditangani	Jumlah Penanganan Rumah Yang Ditangani Dibagi Total Rumah Yang Terkena Dampak X100%	Persen	3.7	3.7	100		100		100		100		100				
				4 Persentase Layanan Pembinaan Teknis Bangunan Gedung Dan Rumah Negara	Jumlah Pembinaan Teknis Terlayani Dibagi Total Jumlah Pemohon X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
162		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perumahan dan Permukiman	1 Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Dinas Perumahan Dan Permukiman	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	100	100	100	1,021,250,000	100	1,201,750,000	100	1,386,875,000	100	610,225,000	100	4,220,100,000	Sekretaris	Dinas Perumahan dan Permukiman	
163		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan	1 Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Pengelolaan Dan Pelayanan Perumahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	100	100	100	1,013,252,000	100	1,164,738,400	100	1,362,622,000	100	587,553,680	100	4,128,166,080	UPTD Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan	Dinas Perumahan dan Permukiman	
164		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Perumahan dan Permukiman							7,279,760,100		9,196,731,420		10,345,564,400		4,741,876,200		31,563,932,120	Sekretaris	Dinas Perumahan dan Permukiman	
				1 Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di Dinas Perumahan Dan Permukiman	Jumlah ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Dibagi Jumlah ASN Dinas Pendidikan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				2 Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Dinas Perumahan Dan Permukiman	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				3 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Dinas Perumahan Dan Permukiman	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				4 Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Dinas Perumahan Dan Permukiman	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				5 Persentase Ketersediaan Data Kinerja Dinas Perumahan Dan Permukiman	Jumlah Data Kinerja dinas Perumahan Dan Permukiman Yang Disediakan/Jumlah Data Kinerja (Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Dan Kegiatan) Dinas Perumahan Dan Permukiman Yang Seharusnya Disediakan*100	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
165		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan							5,495,400,000		6,466,680,000		7,731,900,000		3,402,036,000		23,096,016,000	UPTD Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan	Dinas Perumahan dan Permukiman	
				1 Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pengelolaan Dan Pelayanan Perumahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				2 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pengelolaan Dan Pelayanan Perumahan	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
5			Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							29,733,062,128		34,243,705,724		39,643,733,678		39,789,241,098		143,409,742,628			
166	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Laju Penegakan Perda dan Perkada	Program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Persentase Penegakan Perda Dan Perkada	Jumlah Pelanggaran Perda Dan Perkada Yang Diselesaikan Dibagi Jumlah Pelanggaran Kali 100%	Persen	100	100	85	898,659,450	90	1,057,836,000	95	1,315,228,300	95	1,236,881,500	95	4,508,605,250	Bidang Penegakan Perda dan Pergub	Satuan Polisi Pamong Praja	
167	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Tingkat Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum Masyarakat	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat	1 Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Penanganan Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat Dibagi Jumlah Kasus Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat X100%	Persen	62	83.5	100	1,671,111,000	100	1,893,663,338	100	2,082,387,469	100	2,353,746,500	100	8,000,908,306	Bidang Ketertiban dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	
168	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Persentase anggota linmas untuk perlindungan masyarakat	Program Perlindungan Masyarakat	1 Tingkat Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Oleh Satlinmas	Jumlah Anggota Linmas Yang Terdaftar Dan Mengikuti Pemberdayaan Dibagi Jumlah Anggota Yang Terdaftar X100%	Persen	0.23	0.26	1.69	771,985,500	2.37	859,409,500	2.97	952,696,650	3.49	895,488,500	3.49	3,479,580,150	Bidang Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	
169	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Persentase Anggota Satpol PP dan PPNS yang kompeten	Program pembinaan masyarakat dan aparat	1 Persentase Satpol PP Dan PPNS Yang Terdidik Dan Berkompeten	Jumlah Satpol Pp Dan Ppns Yang Mengikuti Diklat Dan Bimtek Dibagi Jumlah Satpol Pp Dan Ppns X 100%	Persen	4.1	4.8	30	835,404,505	50	879,780,000	75	958,080,000	100	883,545,000	100	3,556,809,505	Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur	Satuan Polisi Pamong Praja	
170		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja							789,154,738		952,237,248		1,155,284,800		1,184,129,700		4,080,806,486	Sekretaris	Satuan Polisi Pamong Praja	
				1 Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				2 Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100				
171		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Satuan Polisi Pamong Praja							3,756,789,528		4,351,266,646		4,972,279,998		4,794,496,474		17,874,832,646	Sekretaris	Satuan Polisi Pamong Praja	
				1 Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Dibagi Jumlah ASN Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat X100%	Persen	80	90	100		100		100		100		100				



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE						PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH	
							2017	2018	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2020	2021	2022	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
				3	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
172		Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	Program Kedaruratan dan Logistik	1	Meningkatnya pelayanan kedaruratan dan logistik untuk Kab/Kota di Jawa Barat	Jumlah Masyarakat Yang Sadar Resiko Bencana Dibagi Jumlah Masyarakat Yang Rentan Terhadap Bencana X100%	Persen	100	100	100	495,000,000	100	559,800,000	100	654,940,000	100	678,300,000	100	2,388,040,000	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
173		Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan								1,372,230,000		1,548,990,000		1,682,330,000		1,870,726,500		6,474,276,500	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				1	Meningkatnya Nilai Indeks Kapasitas Kab/Kota di Jawa Barat	Jumlah masyarakat yang sadar resiko bencana dibagi jumlah masyarakat yang rentan terhadap bencana x100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
				2	Meningkatnya Nilai Indeks Kapasitas Kab/Kota di Jawa Barat	Jumlah masyarakat yang sadar resiko bencana dibagi jumlah masyarakat yang rentan terhadap bencana x100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
174	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	Program Pemulihan Pasca Bencana	1	Terpulihnya kehidupan dan Penghidupan	Jumlah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana dibagi Jumlah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana yang disalurkan x100%	Persen	100	100	100	1,330,115,000	100	1,571,350,000	100	1,990,560,000	100	1,885,500,000	100	6,777,525,000	Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
175	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks Kapasitas Provinsi	Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana	1	Persentase kapasitas SDM dan kekuatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana	Jumlah masyarakat yang sadar resiko bencana dibagi jumlah masyarakat yang rentan terhadap bencana x100%	Persen	100	100	100	5,552,331,000	100	6,507,190,000	100	7,634,992,000	100	7,715,820,000	100	27,410,333,000	Sekretariat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
176		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	100	100	100	1,658,250,000	100	1,858,500,000	100	1,993,576,000	100	2,069,470,000	100	7,579,796,000	Sekretaris	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
177		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Badan Penanggulangan Bencana Daerah								2,011,379,712		2,326,961,268		2,912,909,866		2,935,974,424		10,187,225,270	Sekretaris	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				1	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Dibagi Jumlah ASN Dinas Pendidikan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
				2	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
				3	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
				4	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
				5	Persentase Ketersediaan Data Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Data Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Yang Disediakan/Jumlah Data Kinerja (Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Dan Kegiatan) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Yang Seharusnya Disediakan*100	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
178	a. Indeks Kerukunan Umat Beragama b. Indeks Demokrasi	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa	Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1	Tingkat Pemahaman Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan	Tingkat Kebebasan Sipil+Hak-Hak Politik + Lembaga-Lembaga Demokrasi Di Provinsi Jawa Barat	Poin	70.78	70.78	71.78	1,231,790,000	72.78	1,556,600,000	73.78	1,713,578,000	74.78	1,647,460,000	74.78	6,149,428,000	Kabid Ideologi dan Wawasan kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
179	a. Indeks Kerukunan Umat Beragama b. Indeks Demokrasi	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa	Program Bina Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	1	Tingkat Ketahanan Lingkungan Strategis Daerah		Poin	70.78	70.78	71.78	1,450,900,000	72.78	1,761,000,000	73.78	1,956,960,000	74.78	1,923,600,000	74.78	7,092,460,000	Kabid Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
180		Tingkat Bina Politik dan Demokratisasi	Program Bina Politik Dalam Negeri	1	Kualitas Pembangunan Politik Dalam Negeri		Poin	70.78	70.78	71.78	1,759,500,000	72.78	1,811,000,000	73.78	2,183,820,000	74.78	2,496,700,000	74.78	8,251,020,000	Kabid Politik dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
181		Tingkat Kualitas Kewaspadaan Daerah	Program Bina Kewaspadaan Daerah	1	Tingkat Kualitas Kewaspadaan Daerah		Poin	70.78	70.78	71.78	895,200,000	72.78	1,092,000,000	73.78	1,499,520,000	74.78	1,540,300,000	74.78	5,027,020,000	Kabid Kewaspadaan Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
182		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	70.78	100	100	1,128,770,000	100	1,250,000,000	100	1,420,703,000	100	1,255,000,000	100	5,054,473,000	Sekretaris Badan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
183		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								2,124,491,695		2,406,121,724		2,563,887,596		2,422,102,500		9,516,603,515	Sekretaris Badan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				1	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Jumlah ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Dibagi Jumlah ASN Dinas Pendidikan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
				2	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
				3	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100			



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PENANGGUNG JAWAB ESELON II	PERANGKAT DAERAH
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
				4	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Persen	100	100	100												
				5	Persentase Ketersediaan Data Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Persen	100	100	100												
6			Sosial							112,893,991,038		115,783,701,812		116,945,395,501		118,395,382,844		464,018,471,195			
	184	Persentase PMKS yang tertangani dan berhasil berfungsi secara sosial	Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial	1	Persentase PMKS Yang Direhabilitasi (Diluar Katagori PMKS Di UPTD)	Persen	59,81	59,81	60,00	3,345,522,746	60,19	5,678,772,818	60,38	7,427,465,885	60,57	6,137,032,912	60,57	22,588,794,361	Bidang Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	
	185	Indeks Kebahagiaan	Persentase PMKS yang tertangani dan berhasil berfungsi secara sosial	Program pelayanan Rehabilitasi sosial UPTD Pantii Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum	1	Persentase ABH yang Direhab di PSRABH Cileungsi Bogor dan Satpel	Persen	100	100	100	1,793,208,300	100	2,414,905,000	100	2,658,579,525	100	2,896,044,268	100	9,762,737,092	UPTD Pantii Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum Cileungsi Bogor dan satuan pelayanan	Dinas Sosial
	186	Indeks Kebahagiaan	Persentase PMKS yang tertangani dan berhasil berfungsi secara sosial	Program Rehabilitasi Sosial di UPTD Pantii Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	1	Persentase Wanita Tuna Susila Yang Direhabilitasi Sosial Di UPTD PSRTS Dan Satpel - Rtm Selama 6 Bulan	Persen	100	300	100	2,392,782,000	100	3,838,800,000	100	3,366,223,686	100	3,657,537,828	100	13,255,343,514	UPTD Pantii Sosial Susila dan satuan pelayanan	Dinas Sosial
	187	Indeks Kebahagiaan	Persentase PMKS yang tertangani dan berhasil berfungsi secara sosial	Program Rehabilitasi Sosial di UPTD Pantii Pemberdayaan Sosial Bina Remaja	1	Persentase Remaja Yang Mendapat Pemberdayaan Sosial Di UPTD Dan Satpel	Persen	300	300	100	2,205,706,674	100	3,472,852,656	100	3,123,398,554	100	3,393,698,526	100	12,195,656,410	UPTD Pantii pemberdayaan sosial bina remaja dan satuan pelayanan	Dinas Sosial
	188	Indeks Kebahagiaan	Persentase PMKS yang tertangani dan berhasil berfungsi secara sosial	Program Rehabilitasi Sosial di UPTD Pantii Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh	1	Persentase Penyandang Disabilitas Yang Direhabilitasi Di UPTD PSRPD Cibabat Cimahi	Persen	300	300	100	1,954,878,960	100	4,261,746,623	100	6,726,563,296	100	7,865,499,320	100	20,808,688,199	UPTD Pantii Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh - cibabat cimahi	Dinas Sosial
	189	Indeks Kebahagiaan	Persentase PMKS yang tertangani dan berhasil berfungsi secara sosial	Program Rehabilitasi Sosial UPTD Pantii Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan	1	Persentase Lanjut Usia Di Dalam Balai Yg Mendapat Perlindungan Sosial	Persen	100	100	100	5,856,030,700	100	8,546,070,000	100	7,695,361,986	100	8,361,655,240	100	30,459,117,926	UPTD Pantii Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan	Dinas Sosial
	190	Indeks Kebahagiaan	Persentase PMKS yang tertangani dan berhasil berfungsi secara sosial	Program Rehabilitasi Sosial di UPTD Pantii Rehabilitasi Sosial Bina Karya	1	Persentase Pmsk Yg Mendapat Rehabilitasi Sosial Di Prsbk Dan Satpel - Rtm	Persen	100	100	100	2,264,968,800	100	3,291,840,000	100	2,986,137,936	100	3,244,559,328	100	11,787,506,064	UPTD Pantii Rehabilitasi Sosial Bina Karya	Dinas Sosial
	191	Indeks Kebahagiaan	Persentase PMKS yang tertangani dan berhasil berfungsi secara sosial	Program Rehabilitasi Sosial di UPTD Pantii Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus	1	Persentase Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus Yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Di UPTD	Persen	100	100	100	6,123,144,000	100	7,416,000,000	100	8,235,447,200	100	8,687,520,000	100	30,462,111,200	UPTD Pantii Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus	Dinas Sosial
	192	Indeks Kebahagiaan	Persentase PMKS yang tertangani dan berhasil berfungsi secara sosial	Program Penanganan Fakir Miskin	1	Persentase Keluarga Miskin Dan Kelompok Rentan Yang Meningkatkan Produktifitas Sosial Ekonominya	Persen	0,10	0,10	0,015	3,929,099,042	0,018	10,196,900,880	0,020	20,724,703,953	0,13	22,591,356,192	0,13	57,442,060,067	Bidang Penanganan Fakir Miskin	Dinas Sosial
	193	Indeks Kebahagiaan	Persentase PMKS yang tertangani dan berhasil berfungsi secara sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial						1,968,325,943		7,346,038,920		9,849,054,907		7,195,619,020		26,359,038,790	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	
				1	Persentase PMKS Yang Mendapat Jaminan Sosial	Persen	0,10	0,10	0,015		0,018		0,020		0,13		0,13				
				2	Persentase PMKS Yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	Persen	0,10	0,10	0,015		0,018		0,020		0,13		0,13				
	194	Indeks Kebahagiaan	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), LKS, BU dan Seterusnya yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	Program Pemberdayaan Sosial						3,427,842,280		5,272,554,494		5,748,726,071		7,542,123,624		21,991,246,469	Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	
				1	Persentase PSK Yang Berperan Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persen	40	40	50,00		60,00		70,00		80,00		80,00				
				2	Persentase Paks Yang Berdaya/Persentase PMKS Yang Puli Fungsi Sosialnya	Persen	N/A	N/A	50		60		70		80		80				
				3	Persentase Pihak Yang Berperan Aktif Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Kesetiakawanan Dan Restorasi Sosial	Persen	40	40	50,00		60,00		70,00		80,00		80,00				
	195	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), LKS, BU dan Seterusnya yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	Program Pemberdayaan Sosial UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial	1	Persentase PSKS Yang Berperan Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persen	40	40	50,00	636,777,252	60,00	925,473,600	70,00	969,613,952	80,00	1,053,524,673	80,00	3,585,389,476	UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial	
	196	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Sosial	1	Persentase Kapasitas Sarana Dan Prasarana Dinas Sosial	Persen	100	100	100	52,521,065,725	100	21,687,072,500	100	9,061,470,796	100	2,304,119,993	100	85,573,729,013	Bidang Sekretariat	Dinas Sosial	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON II	PERANGKAT DAERAH	
							2017	2018	2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE				
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
197		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja	1	Persentase Kapasitas Sarana Dan Prasarana UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	100	100	100	297,240,000	100	480,000,000	100	777,240,000	100	777,240,000	UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja	Dinas Sosial		
198		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum	1	Persentase Kapasitas Sarana Dan Prasarana UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	100	100	100	1,139,420,000	100	900,000,000	100	767,850,000	100	931,500,000	100	3,738,770,000	UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum	Dinas Sosial
199		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus	1	Persentase Kapasitas Sarana Dan Prasarana UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	100	100	100	3,715,500,000	100	4,500,000,000	100	2,559,500,000	100	2,700,000,000	100	13,475,000,000	UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus	Dinas Sosial
200		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya	1	Persentase Kapasitas Sarana Dan Prasarana UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	100	100	100	-	100	-	100	-	100	607,027,500	100	607,027,500	UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya	Dinas Sosial
201		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	1	Persentase Kapasitas Sarana Dan Prasarana UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	100	100	100	594,480,000	100	802,800,000	100	763,688,253	100	898,254,927	100	3,059,223,180	UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial
202		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	1	Persentase Kapasitas Sarana Dan Prasarana UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	100	100	100	-	100	690,000,000	100	-	100	714,150,000	100	1,404,150,000	UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	Dinas Sosial
203		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan	1	Persentase Kapasitas Sarana Dan Prasarana UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Dan Pemeliharaan Makam Pahlawan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	100	100	100	1,238,500,000	100	1,657,500,000	100	1,562,606,744	100	1,821,464,044	100	6,280,070,788	UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan	Dinas Sosial
204		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Sosial								5,945,861,170		7,510,192,199		7,055,133,171		7,879,489,337		28,390,675,876	Bidang Sekretariat	Dinas Sosial
				1	Persentase Kompetensi Dan Produktifitas ASN	Jumlah ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Dibagi Jumlah ASN Dinas Sosial X100%	Persen	100	100	100			100		100		100				
				2	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik Di Dinas Sosial	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	100	100	100			100		100		100				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100			100		100		100				
				4	Persentase Ketersediaan Data Kinerja Dinas Sosial	Jumlah Data Kinerja Dinas Sosial Yang Disediakan/Jumlah Data Kinerja (Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Dan Kegiatan) Dinas Sosial Yang Seharusnya Disediakan*100	100	100	100	100			100		100		100				
205		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja								1,515,901,663		1,910,528,514		1,943,439,015		2,240,469,983		7,610,339,175	UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja	Dinas Sosial
				1	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	100	100	100			100		100		100				
				2	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100			100		100		100				
206		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial								787,612,060		925,283,875		985,442,067		1,099,046,477		3,797,384,479	UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
				1	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik UPTD Pengembangan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	100	100	100			100		100		100				
				2	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik UPTD Pengembangan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100			100		100		100				
207		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum								1,778,992,946		2,255,532,637		2,734,628,206		3,125,606,889		9,894,760,678	UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum	Dinas Sosial
				1	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	100	100	100			100		100		100				
				2	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100			100		100		100				
208		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus								1,805,771,107		2,318,552,276		2,408,728,330		2,630,027,453		9,163,079,166	UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus	Dinas Sosial
				1	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	100	100	100			100		100		100				
				2	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100			100		100		100				



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH		
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
228		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Latihan Kerja Mandiri, Kelas A	1 Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Balai Latihan Kerja Mandiri, Kelas A	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	N/A	N/A	70	223,000,000	70	261,525,000	70	299,475,000	70	293,951,350	70	1,077,951,350	BLK Mandiri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
229		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor	1 Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	N/A	N/A	70	501,000,000	70	5,338,550,000	70	665,500,000	70	661,107,700	70	7,166,157,700	UPTD. Pengawasan Ketenagakerjaan Wil. I	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
230		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Bekasi dan Karawang	1 Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Bekasi dan Karawang	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	N/A	N/A	70	3,198,885,000	70	282,040,000	70	310,244,000	70	187,893,117	70	3,979,062,117	UPTD. Pengawasan Ketenagakerjaan Wil. II	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
231		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon, Kelas A	1 Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon, Kelas A	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	N/A	N/A	70	4,848,027,600	70	217,459,330	70	246,533,870	70	243,102,579	70	5,555,123,379	UPTD. Pengawasan Ketenagakerjaan Wil. III	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
232		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, Kelas A	1 Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, Kelas A	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	N/A	N/A	70	366,522,800	70	5,184,842,490	70	492,217,110	70	483,138,439	70	6,526,720,839	UPTD. Pengawasan Ketenagakerjaan Wil. IV	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
233		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya, Kelas A	1 Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya, Kelas A	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	N/A	N/A	70	206,100,000	70	238,067,500	70	270,132,500	70	272,315,945	70	986,615,945	UPTD. Pengawasan Ketenagakerjaan Wil. V	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
234		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi							5,989,769,984		7,008,543,027		7,880,207,861		7,734,861,805		28,613,382,677	Sekretariat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
				1	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Jumlah ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Dibagi Jumlah ASN Dinas X100%	Persen	N/A	N/A	3		3		3		3		3				
				2	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	N/A	N/A	80		80		80		80		80				
				3	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100				
				4	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100				
235		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Latihan Kerja Kompetensi, Kelas A							1,233,559,427		1,407,205,420		1,584,492,795		1,632,997,797		5,858,255,439	BLK Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Balai Latihan Kerja Kompetensi, Kelas A	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	N/A	N/A	80		80		80		80		80				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Balai Latihan Kerja Kompetensi, Kelas A	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100				
				3	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di UPTD Balai Latihan Kerja Kompetensi, Kelas A	Jumlah ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Dibagi Jumlah ASN UPTD X100%	Persen	N/A	N/A	3		3		3		3		3				
				4	Persentase Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Balai Latihan Kerja Kompetensi, Kelas A	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100				
236		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia, Kelas A							1,581,455,788		1,246,315,274		1,707,945,984		1,436,495,375		5,972,212,421	BLK PMI	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia, Kelas A	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	N/A	N/A	80		80		80		80		80				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia, Kelas A	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100				
				3	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di UPTD Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia, Kelas A	Jumlah ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Dibagi Jumlah ASN UPTD X100%	Persen	N/A	N/A	3		3		3		3		3				
				4	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia, Kelas A	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100				
237		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Latihan Kerja Mandiri, Kelas A							1,334,927,440		1,503,915,292		1,680,115,976		1,624,687,921		6,143,646,629	BLK Mandiri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Balai Latihan Kerja Mandiri, Kelas A	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	N/A	N/A	80		80		80		80		80				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Balai Latihan Kerja Mandiri, Kelas A	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100				



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH		
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
				3	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di UPTD Balai Latihan Kerja Mandiri	Jumlah ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Dibagi Jumlah ASN UPTD X100%	Persen	N/A	N/A	3		3		3		3						
				4	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Balai Latihan Kerja Mandiri, Kelas A	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100						
238		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor							896,538,468		1,003,889,182		1,117,145,822		1,190,171,453		4,207,744,925	UPTD. Pengawasan Ketenagakerjaan Wil. I	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	N/A	N/A	80		80		80		80						
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100						
				3	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor	Jumlah ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Dibagi Jumlah ASN UPTD X100%	Persen	N/A	N/A	3		3		3		3						
				4	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100						
239		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Bekasi dan Karawang, Kelas A							794,130,680		916,356,697		1,039,122,461		1,049,436,892		3,799,046,730	UPTD. Pengawasan Ketenagakerjaan Wil. II	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Bekasi Dan Karawang, Kelas A	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	N/A	N/A	80		80		80		80						
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Bekasi Dan Karawang, Kelas A	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100						
				3	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Bekasi Dan Karawang	Jumlah ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Dibagi Jumlah ASN UPTD X100%	Persen	N/A	N/A	3		3		3		3						
				4	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Bekasi Dan Karawang, Kelas A	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100						
240		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon, Kelas A							1,136,027,660		1,144,716,683		1,285,970,092		1,334,043,334		4,900,757,769	UPTD. Pengawasan Ketenagakerjaan Wil. III	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon, Kelas A	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	N/A	N/A	80		80		80		80						
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon, Kelas A	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100						
				3	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon	Jumlah ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Dibagi Jumlah ASN UPTD X100%	Persen	N/A	N/A	3		3		3		3						
				4	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon, Kelas A	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100						
241		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, Kelas A							1,254,227,360		1,440,044,738		1,627,963,282		1,518,873,727		5,841,109,107	UPTD. Pengawasan Ketenagakerjaan Wil. IV	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, Kelas A	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	N/A	N/A	80		80		80		80						
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, Kelas A	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100						



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE						PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH	
							2017	2018	2020		2021		2022		2023		K				Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				3	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Iv Bandung	Jumlah ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Dibagi Jumlah ASN UPTD X100%	Persen	N/A	N/A	3		3		3		3		3			
				4	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Iv Bandung, Kelas A	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100			
	242	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya, Kelas A							1,148,318,565		970,647,502		1,128,425,543		1,150,739,379		4,398,130,989		UPTD. Pengawasan Ketenagakerjaan Wil. V	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya, Kelas A	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	N/A	N/A	80		80		80		80		80			
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya, Kelas A	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100			
				3	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya	Jumlah ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Dibagi Jumlah ASN UPTD X100%	Persen	N/A	N/A	3		3		3		3		3			
				4	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya, Kelas A	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100			
2			Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak							38,592,266,484		40,672,466,533		41,260,870,099		41,963,606,898		162,489,210,015			
	243	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Persentase kabupaten/kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Program Pemenuhan Hak Anak (Program Anak Juara)						8,620,000,000		9,807,937,500		10,612,793,750		10,486,065,995		39,526,797,245		Bidang Pemenuhan Hak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana
				1	Cakupan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Provinsi Yang Mendapat Penguatan (Pengembangan)/Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Provinsi X 100%	Persen	1.40	2.81	23.7		36		59		75		75			
				2	Cakupan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (Pha) Tingkat Provinsi	Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak Tingkat Provinsi/Jumlah Lembaga Di Jawa Barat X 100%	Persen	2	4	7		9		11		13		13			
	244	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Tingkat Keberhasilan penanganan kasus KED terhadap perempuan dan anak	Program Perlindungan Perempuan dan Anak (Program Perempuan Juara dan Anak Juara)						6,828,296,700		6,765,735,574		5,409,000,000		6,324,060,000		25,327,092,274		Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana
				1	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi (Ked) Yang Mendapat Penanganan Pengaduan Oleh Tenaga Terlatih Unit Pelayanan Terpadu	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Berhasil Ditangani/Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Dilaporkan Di Jawa Barat X 100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
				2	Cakupan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi (Ked) Yang Mendapat Penanganan Pengaduan Oleh Tenaga Terlatih Unit Pelayanan Terpadu	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Yang Berhasil Ditangani/Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilaporkan Di Jawa Barat X 100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
				3	Cakupan Anak Berhadapan Dengan Hukum Yang Berhasil Dibina	Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum Yang Berhasil Dibina/Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Jawa Barat X 100%	Persen	30	35	100		100		100		100		100			
	245	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	a. Cakupan perempuan di legislatif b. Cakupan Pemahaman Pengarusutamaan Gender c. Cakupan kabupaten kota yang mendapat peningkatan kualitas perempuan hidup di Jawa Barat	Program Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (Program Perempuan Juara)						5,940,360,000		6,837,459,000		7,707,267,000		8,103,434,645		28,588,520,645		Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana
				1	Cakupan Organisasi Perempuan Yang Mendapat Pembinaan	Jumlah Organisasi Perempuan Yang Mendapat Pembinaan Di Tingkat Provinsi/Jumlah Organisasi Perempuan Di Jawa Barat X 100%	Persen	30	35	45		60		80		100		100			
				2	Cakupan Ketersediaan Data Terpilah Yang Up To Date Pada 27 Kabupaten/Kota Di Jawa Barat	Jumlah Kabupaten Kota Yang Memiliki Data Terpilah/Jumlah Kabupaten Kota Yang Ada Di Jawa Barat X 100%	Persen	20	25	44		66		74		100		100			
				3	Cakupan Pembinaan Pengarusutamaan Gender Ke Kabupaten Kota	Jumlah Kabupaten Kota Yang Mendapat Pemahaman Pengarusutamaan Gender/Jumlah Kabupaten Kota Yang Ada Di Jawa Barat X 100%	Persen	20	25	45		60		75		100		100			



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH		
							2017	2018	2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE					
							(8)	(9)	K (10)	Rp. (11)	K (12)	Rp. (13)	K (14)	Rp. (15)	K (16)	Rp. (17)	K (18)	Rp. (19)				
				4	Cakupan Kelompok Pekka Yang Mendapat Program Pembinaan Program Pekka	Jumlah Kelompok Pekka Yang Mendapat Pembinaan Program Pekka/Jumlah Kelompok Pekka Yang Ada Di Jawa Barat X 100%	Persen	20	30	45		60		80		100						
				5	Cakupan Kepala Keluarga Yang Mendapat Pembinaan Program P2Wkss	Jumlah Kepala Keluarga Yang Mendapat Pembinaan Program P2Wkss/Jumlah Kelompok P2Wkss Yang Ada Di Jawa Barat X 100%	Persen	20	30	45		60		80		100						
246		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Dinas	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	88	89	92	12,288,000,000	94	12,276,000,000	96	12,096,000,000	98	11,465,827,000	98	48,125,827,000	Sekretariat	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
247		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana								4,915,609,784		4,985,334,459		5,435,809,349		5,584,219,258		20,920,972,851	Sekretariat	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
				1	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana	Jumlah ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Dibagi Jumlah ASN Dp3Ab Prov Jabar X100%	Persen	88	89	92		94		96		98		98				
				2	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	88	89	92		94		96		98		98				
				3	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	88	89	92		94		96		98		98				
				4	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				5	Persentase Ketersediaan Data Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana	Jumlah Data Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana Yang Disediakan/Jumlah Data Kinerja (Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Dan Kegiatan) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana Yang Seharusnya Disediakan X 100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
3			Pangan								12,121,282,563		14,207,503,568		16,192,938,721		16,031,009,333		58,552,734,185			
248	a. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b. Nilai Tukar Petani (NTP)	Tingkat Konsumsi Pangan : - Energi - Protein	Program Konsumsi Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia								1,240,994,079		1,456,162,095		1,674,165,373		1,657,423,719		6,028,745,265	Bidang Konsumsi dan SDM	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	
				1	Konsumsi Beras (Persen)	Data Bps	Persen	83.93	83.93	1.5		1.5		1.5		1.5		1.5				
				2	Konsumsi Pangan Hewani	Data Bps	Persen	116	116	7.5		8.0		8.5		9.0		9.0				
				3	Konsumsi Sayur Dan Buah	Data Bps	Gr/Kap/Hr	202.74	202.74	208		210		215		220		220				
				4	Konsumsi Umbi-Umbian	Data Bps	Gr/Kap/Hr	48.99	48.99	53		55		58		60		60				
				5	Persentase Dewan Ketahanan Pangan kab/kota yang dibentuk dan dibina	Jumlah Dewan Ketahanan Pangan kab/kota yang dibentuk dan dibina dibagi jumlah Dewan Ketahanan Pangan kab/kota yang harus dibentuk dan dibina x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				6	Laju Pangan Segar yang aman	Jumlah Pasar Yang Diawasi Tahun N Dikurangi Jumlah Pasar Yang Diawasi Tahun N-1 Dibagi Jumlah Pasar Yang Diawasi Tahun N-1 Dikali 100%	Persen	N/A	10 % setiap tahun dari data awal 27 pasar di 7,534 pasar	10		10		10		10		10				
249		Persentase keamanan pangan segar asal tumbuhan yang sesuai SNI	Program Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan								1,061,422,500		1,245,455,750		1,431,914,000		1,417,594,860		5,156,387,110	Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	
				1	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Diawasi	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan Tersertifikasi Dibagi Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Diuji Laboratorium X 100%	Persen	25 PSAT	113 PSAT	86		88		90		92		92				
				2	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Diregistrasi	Jumlah Psat/Packing House Yang Diregistrasi Tahun N Dikurangi Jumlah Psat/Packing House Yang Diregistrasi Tahun N-1 Dibagi Jumlah Psat/Packing House Yang Diregistrasi Tahun N-1 Dikali 100%	Persen	54 buah sertifikat	98 buah sertifikat	10		10		10		10		10				
				3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur Dibagi Total Unsur Yang Terisi X Nilai Penimbang	Persen	70.44	80.65	82.1		82.2		82.3		82.4		82.4				
250	a. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b. Nilai Tukar Petani (NTP)	Skor PPH Ketersediaan	Program Ketersediaan Dan Distribusi								4,640,071,858		5,444,584,203		6,259,697,580		6,197,100,605		22,541,454,247	Bidang Ketersediaan dan Distribusi	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	
				1	Rasio Komposisi PPH Ketersediaan Terhadap PPH Konsumsi	Perbandingan Prosentase Skor Rill PPH Ketersediaan Terhadap Skor Maksimal, Jika Skor Rill Melebihi Skor Maks Maka Skor PPH Adalah Skor Maksimal																
					- Padi-Padian	Data Bps	Point	36.5	35.2	≥ 25		≥ 25		≥ 25		≥ 25		≥ 25				
					- Umbi-Umbian	Data Bps	Point	2.8	2.9	≥ 2.5		≥ 2.5		≥ 2.5		≥ 2.5		≥ 2.5				
					- Pangan Hewani	Data Bps	Point	17.1	16.3	17.5		18.0		18.5		19.0		19.0				
					- Minyak Dan Lemak	Data Bps	Point	1.1	4.5	4.5		4.5		4.6		4.6		4.6				



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE						PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH	
							2017	2018	2020		2021		2022		2023						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	K (10)	Rp. (11)	K (12)	Rp. (13)	K (14)	Rp. (15)	K (16)	Rp. (17)	K (18)	Rp. (19)	(20)	(21)	
				- Buah Atau Biji Berminyak	Data Bps	Point	0,8	0,3	0,6		0,7		0,8		0,9		0,9				
				- Kacang-Kacagan	Data Bps	Point	13	10	≥ 10		≥ 10		≥ 10		≥ 10		≥ 10				
				- Gula	Data Bps	Point	0,8	1,8	2,0		2,1		2,2		2,3		2,3				
				- Sayur Dan Buah	Data Bps	Point	34,8	30	≥ 30		≥ 30		≥ 30		≥ 30		≥ 30				
				2. Persentase Daerah Rawan Pangan Yang Diintervensi	Jumlah Desa Rentan Pangan Yang Diintervensi Tahun N Dikurangi Jumlah Desa Yang Diintervensi Tahun N-1 Dibagi Jumlah Desa Yang Diintervensi Tahun N-1 Dikalai 100%	Persen	61 desa terhadap 574 desa yang diintervensi	61 desa terhadap 574 desa yang diintervensi	10		10		10		10		10				
				3. Rasio Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Dari Angka Ideal	Jumlah Cppd Eksisting / CPPD Ideal Bdsk Permentan No 11 Tahun 2018	Persen	902,21 ton CPPD ideal bdsk permentan no 11 tahun 2018	792,24 ton terhadap CPPD ideal bdsk permentan no 11 tahun 2018	5		5		5		5		5				
				4. Persentase Peningkatan Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat	Jumlah Lumbung Pangan Tahun Ke (N) Dikurangi Jumlah Lumbung Pangan Tahun Ke (N-1) Dibagi Jumlah Lumbung Pangan Tahun Ke (N-1) X100%	Persen	188 kelompok	92 kelompok	10		10		10		10		10				
				5. Stabilitas Harga Dan Pasokan Pangan (Cv) :	(2-(Cv/Target Cv))*100																
				- Beras		Poin	2,91	4,93	≤ 10		≤ 10		≤ 10		≤ 10		≤ 10				
				- Cabe Merah		Poin	29,91	15,78	≤ 25		≤ 25		≤ 25		≤ 25		≤ 25				
				- Bawang Merah		Poin	19,24	13,31	≤ 25		≤ 25		≤ 25		≤ 25		≤ 25				
				- Daging Ayam		Poin	4,62	6,79	≤ 10		≤ 10		≤ 10		≤ 10		≤ 10				
				6. Hpp Gabah Kering Panen (GkP) Di Tingkat Petani/Produsen	Intruksi Presiden No 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah (Hpp Gabah Kering Panen Di Tingkat Petani Rp. 3700)	Rp	4.651	4.870	≥ HPP		≥ HPP		≥ HPP		≥ HPP		≥ HPP				
251	a. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b. Nilai Tukar Petani (NTP)	Skor PPH Ketersediaan	Program pelatihan peternakan dan ketahanan pangan							1,195,820,126		1,403,155,720		1,613,223,368		1,597,091,134		5,809,290,347	Balai pelatihan peternakan dan ketahanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	
				1. Persentase Penerapan Hasil Pelatihan Bidang Peternakan Dan Ketahanan Pangan	Jumlah Peserta Pelatihan Yang Menerapkan Hasil Pelatihan / Jumlah Keseluruhan Peserta Pada 1 Tahun X 100%	Persen	53	58	65		70		75		80		80				
				2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Balai Pelatihan Peternakan Dan Ketahanan Pangan	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur Dibagi Total Unsur Yang Terisi X Nilai Penimbang	Persen	70,41	72,71	80,5		81,0		81,5		82,0		82,0				
252		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	1. Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	0,6	0,7	1,77	218,850,000	2,94	256,795,000	3,53	295,240,000	4,12	292,287,600	4,12	1,063,172,600	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	
253		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan							3,764,124,000		4,401,350,800		4,918,698,400		4,869,511,416		17,953,684,616	Sekretaris DKPP	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	
				1. Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	Jumlah ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Dibagi Jumlah ASN Dinas Pendidikan X100%	Persen	21	21,5	25		29		32		36		36				
				2. Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	9,6	9,8	11,78		12,96		13,55		14,13		14,13				
				3. Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				4. Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				5. Persentase Ketersediaan Data Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	Jumlah Data Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Yang Disediakan/Jumlah Data Kinerja (Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Dan Kegiatan) Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Yang Seharusnya Disediakan*100	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
4			Pertanahan							14,670,190,000		23,325,420,000		37,333,514,068		7,170,000,000		82,499,124,068			
254	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan	Program Pertanahan	1. Persentase Tertib Tata Kelola Pertanahan Melalui Pemenuhan Urusan Wajib Sesuai Konkuren	Pelaksanaan Sub Urusan Wajib Pertanahan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (1 Kegiatan = 1 Poin yg Dikonversi Mjd Bobot Pemenuhan Urusan), Jumlah (Poin) Kegiatan Yang Dilaksanakan Dibagi Jumlah Total (Poin) Sub Urusan Pertanahan Yang Harus Terpenuhi Dikalai 100%	Persen	5,65	12,90	42,74	14,670,190,000	62,10	23,325,420,000	80,65	37,333,514,068	100	7,170,000,000	100	82,499,124,068	Bidang Pertanahan	Dinas Perumahan dan Permukiman	
5			Lingkungan Hidup							263,933,712,000		78,219,218,524		87,157,806,702		108,489,507,830		537,800,245,055			
255	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Indeks Kualitas Air (IKA)	Program Pembinaan Evaluasi Dampak dan Risiko Kebijakan Strategis	1. Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Rencana Kebijakan Strategis yang Dievaluasi Dampak dan Risikonya melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Jumlah Dokumen KLHS yang Divalidasi Dibagi Jumlah Target Dokumen KLHS Selama Lima Tahun X100%	Persen	4,17	8,33	25	1,883,250,000	50	711,139,000	75	614,800,000	100	745,996,542	100	3,955,185,542	Bidang Tata Kelola Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	
256	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Indeks Kualitas Air (IKA)	Program Pembinaan Pencegahan Dampak Lingkungan	1. Persentase Peningkatan Dokumen Lingkungan yang Ditinjau dan Diawasi Implementasinya	Jumlah Dokumen Lingkungan (AMDAL) yang Ditinjau Dibagi Jumlah Target Dokumen Lingkungan (Amdal) Selama Lima Tahun X100%	Persen	15	28	55	333,060,000	70	404,816,426	85	456,728,931	100	454,404,078	100	1,649,009,435	Bidang Tata Kelola Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	
257	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Indeks Kualitas Air (IKA)	Program Pembinaan dan Pengendalian Pencemaran Air, Sampah dan B3	1. Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter COD (Mg/L)	Angka Penurunan Konsentrasi Parameter COD Dibagi Angka Penurunan Konsentrasi Parameter COD Selama Lima Tahun X100%	Persen	N/A	N/A	40	86,214,100,000	60	16,439,940,500	80	7,940,850,000	100	15,933,085,570	100	126,527,976,070	Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL			2020			2021			2022			2023			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH		
							2017	2018		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)								
269		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup							1,923,382,000			2,097,790,200			2,430,705,300			2,442,640,828			8,894,518,328	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup		
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	100	100	100			100			100			100			100				
				2	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100			100			100			100			100				
270		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional							19,189,210,000			19,486,550,600			22,572,462,900			22,510,536,004			83,758,759,504	UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional	Dinas Lingkungan Hidup		
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pengelolaan Sampah Tpa/TPst Regional	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	100	100	100			100			100			100			100				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pengelolaan Sampah Tpa/TPst Regional	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100			100			100			100			100				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pengelolaan Sampah Tpa/TPst Regional	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100			100			100			100			100				
6			Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil							5,607,783,916			6,452,769,095			7,413,581,633			7,364,792,051			26,838,926,694				
271		Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota di Jawa Barat	Program Penataan Data Kependudukan	1	Tingkat Akurasi Data Kependudukan Skala Provinsi	Jumlah Data Konsolidasi Bersih Dibagi Jumlah Data Pelayanan Adminduk X 100%	Persen	N/A	N/A	81.23			595,000,000	82.35		487,520,000	83.57		555,753,000	84.78		588,368,550	84.78	2,226,641,550	Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
272		Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota di Jawa Barat	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Persentase Nilai Rata-Rata Kinerja Disidukapil Kab/Kota Se Jawa Barat	Persen	N/A	80	81.83			1,244,048,005	82.63		1,704,300,198	83.47		2,260,704,086	84.28		2,031,876,721	84.28	7,240,929,009	Sekretariat	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
273		Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota di Jawa Barat	Program Pemanfaatan Data Kependudukan	1	Tingkat Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Yang Melakukan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Dibagi Jumlah Perangkat Daerah X 100%	Persen	N/A	37.5	62.50			300,000,000	75		330,000,000	87.50		363,000,000	100		399,300,000	100	1,392,300,000	Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
274		Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota di Jawa Barat	Program Peningkatan Layanan Dokumen Kependudukan	1	Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Agregasi Kepemilikan Dokumen Ktp Elektronik Dan Akte Kelahiran 0-18 Tahun Seluruh Kabupaten/ Kota Di Jawa Barat /2	Persen	N/A	N/A	80.80			645,000,000	81.60		709,500,000	82.42		780,450,000	83.25		858,495,000	83.25	2,993,445,000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (PPAK)	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
275		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	88	92	98			292,805,000	98		332,200,000	100		166,050,000	100		186,092,500	100	977,147,500	Sekretaris	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
276		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil							2,530,930,910			2,889,248,897			3,287,624,547			3,300,659,280			12,008,463,635	Sekretariat	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
				1	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Jumlah ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Dibagi Jumlah ASN Dinas Pendidikan X100%	Persen	N/A	N/A	90			95			100			100			100				
				2	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	88	92	98			100			100			100			100				
				3	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	85	90	95			98			100			100			100				
				4	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	90	92	94			96			98			100			100				
				5	Persentase Ketersediaan Data Kinerja Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Jumlah Data Kinerja Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Yang Disediakan/Jumlah Data Kinerja (Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Dan Kegiatan) Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Yang Seharusnya Disediakan*100	Persen	N/A	N/A	100			100			100			100			100				
7			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							160,167,141,776			176,093,152,393			194,508,555,132			197,278,040,265			728,046,889,566				
277	Indeks Desa Membangun	Persentase Desa Mandiri	Program Bina Aparatur dan Aset Pemerintah Desa							52,315,130,000			53,546,500,000			53,615,000,000			54,974,000,000			214,450,630,000	Bidang Bina Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa		
				1	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri Di Jawa Barat	Desa	63	63	89			115			141			167			167				
				2	Persentase Aparatur Desa Yang Dibina Dan Terlatih	Aparatur Desa Yang Dibina Dan Terlatih Dibagi Total Aparat Desa Di Jawa Barat Dikali 100%	Persen	10	10	20			30			40			50			50				
				3	Persentase Desa Digital	Jumlah Desa Digital Di Jawa Barat dibagi jumlah desa di Jawa Barat x 100%	Desa	100	100	200			300			400			500			500				



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE						PENANGGUNG JAWAB ESELON II	PERANGKAT DAERAH		
							2017		2018		2020		2021		2022		2023					
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
278	Indeks Desa Membangun	a. Persentase Desa Literasi yang dibina b. Persentase KPD	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Partisipasi Masyarakat							40,928,952,176				44,664,000,000		61,287,500,000		75,756,000,000		222,636,452,176	Bid. KPPM	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
				1	Persentase Desa Literasi Yang Dibina	Jumlah Desa Literasi Yang Dibina	Desa	100	100	200		300		400		500		500				
				2	Persentase Kader Penggerak Desa	Jumlah Kader Penggerak Desa Di Jawa Barat	Kpd	653	653	300		300		300		460		460				
				3	Persentase Kampung Adat Yang Dibina	Jumlah Kampung Adat Yang Dibina Dibagi Jumlah Kampung Adat Di Jawa Barat Dikalai 100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
279	Indeks Desa Membangun	Persentase inovasi dan TTT yang dihasilkan dari 27 Kabupaten/Kota.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Desa	1	Jumlah Bumdesa Yang Mendapat Pendampingan Pembangunan Ekonomi Desa Yang Mandiri	Jumlah Bumdesa Yang Mendapat Pendampingan	Bumdesa	180	180	180	53,307,700,000	180	55,391,000,000	180	56,297,500,000	180	56,611,477,765	180	221,607,677,765	Bid. PUEM	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
280	Indeks Desa Membangun	Persentase inovasi dan TTT yang dihasilkan dari 27 Kabupaten/Kota.	Program Pengembangan Potensi Desa							5,832,860,000			14,126,527,393		16,372,305,132		2,520,750,000		38,852,442,525	Bidang PPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
				1	Persentase Inovasi Dan TTT Yang Dihasilkan Dari 27 Kabupaten/Kota.	Jenis Inovasi Dan Ttt Yang Dihasilkan Dari Kabupaten/Kota.	Jenis	8	8	13		18		22		27		27				
				2	Persentase Desa Yang Mendapat Bantuan APBD		Desa	5312	5312	5312		5312		5312		5312		5312				
281		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Data Dan Informasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa							2,571,555,000			2,930,500,000		2,877,500,000		3,020,000,000		11,399,555,000	Sekretariat/Perencanaan dan Pelaporan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
				1	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X 100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				2	Persentase Ketersediaan Data Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Jumlah Ketersediaan Data Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dibagi Jumlah Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa X 100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
282		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	100	100	100	625,135,000	100	655,875,000	100	596,250,000	100	619,437,500	100	2,496,697,500	Sekretariat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
283		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							4,585,809,600			4,778,750,000		3,462,500,000		3,776,375,000		16,603,434,600	Sekretariat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
				1	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X 100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				2	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Jumlah ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Dibagi Jumlah ASN X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
8			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							8,631,000,000			8,313,250,000		8,758,800,000		8,320,162,000		34,023,212,000			
284	a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka Fertilitas Total (Total Fertility Rate)	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	Cakupan Peserta KB Aktif	(Jumlah Peserta Kb Aktif Pada Suatu Wilayah Dalam Kurun Waktu Tertentu/Jumlah Seluruh Pus Pada Suatu Wilayah Dalam Satu Tahun) X 100%	Persen	74.91	74.64	74.75	8,631,000,000	74.8	8,313,250,000	74.85	8,758,800,000	74.9	8,320,162,000	74.9	34,023,212,000	Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
9			Perhubungan							185,515,258,660			161,853,732,001		183,788,633,207		176,885,606,752		708,043,230,620			
285	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Tingkat ketersediaan Sarana, Prasarana Perhubungan Darat dan Fasilitas Perlengkapan jalan	Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan Darat							33,125,446,980			34,686,912,770		28,910,826,740		29,956,961,880		126,680,148,370	Bidang Transportasi Darat	Dinas Perhubungan	
				1	Jumlah Penumpang AKDP Di Provinsi Jawa Barat	Jumlah Penumpang Akdp Di Jawa Barat Selama Satu Tahun	Penumpang	#####	126,013,440	136,680,898		142,148,134		147,834,059		153,747,421		153,747,421				
				2	Tingkat Upega Pemurunan Emisi Gas Rumah Kaca Transportasi	Jumlah Emisi Grk Yang Dapat Diturunkan Dari Hasil Mitigasi Transportasi Dibagi Proyekti Emisi Grk Transportasi Kondisi Bau Pada Tahun 2030 Dikalai 100%	Persen	0,22	0,40	0,41		0,42		0,60		0,61		0,61				
286	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Tingkat ketersediaan Sarana, Prasarana Perhubungan Darat dan Fasilitas Perlengkapan jalan	Program Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I							26,226,627,192			6,533,775,412		5,082,324,230		4,664,659,764		42,507,386,598	UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I	Dinas Perhubungan	
				1	Jumlah Penumpang Terminal Di Wilayah Kerja UPTD Pp Perhubungan LLAJ Wilayah I	Jumlah Penumpang Terminal Tipe B Di Wilayah Kerja UPTD Pp Perhubungan LLAJ Wilayah I Selama Satu Tahun	Penumpang	418,551	1,684,289	1,774,957		1,845,955		1,919,794		1,996,585		1,996,585				
				2	Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan Di Ruas Jalan Provinsi Di Wilayah Kerja UPTD Pp Perhubungan LLAJ Wilayah I Yang Terpasang	Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan Di Ruas Jalan Provinsi Di Wilayah Kerja UPTD Pp Perhubungan LLAJ Wilayah I Yang Terpasang Selama Satu Tahun Dibagi Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan Di Ruas Jalan Provinsi Di Wilayah Kerja UPTD Pp Perhubungan LLAJ Wilayah I Yang Dibutuhkan X100%	Persen	26.61	29.19	31.33		32.61		33.89		35.10		35.10				
287	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Tingkat ketersediaan Sarana, Prasarana Perhubungan Darat dan Fasilitas Perlengkapan jalan	Program Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah II							4,962,114,158			5,521,593,000		6,349,323,230		5,816,591,200		22,649,621,588	UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah II	Dinas Perhubungan	
				1	Jumlah Penumpang Terminal Di Wilayah Kerja UPTD Pp Perhubungan LLAJ Wilayah III	Jumlah Penumpang Terminal Tipe B Di Wilayah Kerja UPTD Pp Perhubungan LLAJ Wilayah III Selama Satu Tahun	Penumpang	2,394,886	2,661,655	3,161,385		3,411,844		3,662,382		3,912,295		3,912,295				



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH		
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
				2	Persentase Fasilitas Perengkapan Jalan Di Ruas Jalan Provinsi Di Wilayah Kerja UPTD Pp Perhubungan LLAJ Wilayah II Yang Terpasang	Persen	30.00	45.64	48.57		50.250		52.050		53.910		53.910					
288	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Tingkat ketersediaan Sarana, Prasarana Perhubungan Darat dan Fasilitas Perengkapan jalan	Program Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah III							3,020,354,258		3,354,318,138		3,800,090,150		3,611,228,164		13,785,990,709	UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah III	Dinas Perhubungan		
				1	Jumlah Penumpang Terminal Di Wilayah Kerja UPTD Pp Perhubungan LLAJ Wilayah III	Penumpang	1,132,546	1,036,496	1,168,201		1,168,201		1,213,133		1,235,598		1,235,598					
				2	Persentase Fasilitas Perengkapan Jalan Di Ruas Jalan Provinsi Di Wilayah Kerja UPTD Pp Perhubungan LLAJ Wilayah III Yang Terpasang	Persen	26.23	32.15	36.94		39.31		41.90		44.65		44.65					
289	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Tingkat ketersediaan Sarana, Prasarana Perhubungan Darat dan Fasilitas Perengkapan jalan	Program Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah IV							4,306,644,000		4,706,392,054		4,990,266,000		4,534,112,000		18,537,414,054	UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah IV	Dinas Perhubungan		
				1	Jumlah Penumpang Terminal Di Wilayah Kerja UPTD Pp Perhubungan LLAJ Wilayah IV	Penumpang	290,097	367,708	399,227		415,196		431,804		449,076		449,076					
				2	Persentase Fasilitas Perengkapan Jalan Di Ruas Jalan Provinsi Di Wilayah Kerja UPTD Pp Perhubungan LLAJ Wilayah IV Yang Terpasang	Persen	24.28	26.74	28.22		29.10		29.95		30.68		30.68					
290	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Tingkat ketersediaan Prasarana Perhubungan Udara	Program Peningkatan Prasarana dan aksesibilitas Perhubungan Udara	1	Persentase Perencanaan Prasarana Perhubungan Udara Yang Dihilangkan	Persen	30.50	34.3	66.82		77.55		4,936,195,000		82.97		2,248,320,000		16,843,664,405	Bidang Transportasi Udara	Dinas Perhubungan	
291	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Tingkat ketersediaan Prasarana Perhubungan Udara	Program Peningkatan Prasarana Bandara dan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Bandara Nusawiru							57,390,300,000		47,129,500,000		71,191,654,240		91,711,602,285		267,423,056,526	UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Nusawiru	Dinas Perhubungan		
				1	Jumlah Penumpang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Di Banda Udara Nusawiru Pangandaran Selama Satu Tahun	Penumpang	525,315.00	550,315.00	607,137		660,124		693,130		859,212		859,212					
				2	Tingkat Ketersediaan Prasarana Bandar Udara	Persen	55.56	60.00	73.44		76.33		80.63		84.67		84.67					
292	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Tingkat ketersediaan prasarana dan fasilitas keselamatan Perhubungan Laut dan ASDP	Program Peningkatan Prasarana dan Keselamatan Perhubungan Laut dan ASDP	1	Persentase Perencanaan Prasarana Dan Keselamatan Perhubungan Laut Dan Asdp Yang Dihilangkan / Jumlah Perencanaan Prasarana Dan Keselamatan Perhubungan Laut Dan Asdp Yang Dibutuhkan X 100 %	Persen	27.78	32.03	60.50		75.84		1,165,835,000		87.92		958,670,000		4,403,080,000	Bidang Transportasi Laut dan ASDP	Dinas Perhubungan	
293	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Tingkat ketersediaan prasarana dan fasilitas keselamatan Perhubungan Laut dan ASDP	Program Peningkatan Prasarana dan Keselamatan Perhubungan ASDP							2,371,500,000		1,984,400,000		2,072,800,000		655,760,000		7,084,460,000	UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas ASDP	Dinas Perhubungan		
				1	Jumlah Barang Dan Penumpang Angkutan ASDP Di Jawa Barat																	
					A. Barang	Ton	N/A	N/A	104,406		109,626		115,108		120,863		120,863					
					B. Penumpang	Orang	N/A	N/A	607,307		637,494		669,369		702,837		702,837					
				2	Tingkat Ketersediaan Prasarana Dan Keselamatan Perhubungan ASDP	Persen	27.78	32.03	56.68		73.21		88.61		100.00		100.00					
294	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Tingkat ketersediaan prasarana dan fasilitas keselamatan Perhubungan Laut dan ASDP	Program Peningkatan Prasarana dan Keselamatan Perhubungan Laut							3,474,247,500		777,636,750		888,324,350		873,882,170		6,014,090,770	UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Pelabuhan Laut	Dinas Perhubungan		
				1	Jumlah Barang Dan Penumpang Angkutan Laut																	
					A. Barang	Ton	37,465,628	28,541,917	35,673,164		37,623,727		39,680,944		41,850,647		41,850,647					
						Teus	N/A	N/A	886,000		3,493,000		3,462,865		3,856,186		3,856,186					
					B. Penumpang	Orang	-	-	22,630		23,762		156,375		156,375		156,375					
				2	Tingkat Ketersediaan Prasarana Dan Keselamatan Perhubungan Laut Di Jawa Barat	Persen	27.78	32.03	36.36		60.22		92.04		100.00		100.00					



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH									
							2017	2018	2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE												
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)									
295	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Tingkat ketersediaan Jaringan Transportasi Massal berbasis Rel	Program Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Massal Perkotaan Berbasis Rel dan Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian							17,454,690,000				18,752,940,000				24,718,140,000			2,576,200,000			63,501,970,000	Bidang Kereta Api	Dinas Perhubungan			
				1	Jumlah Penumpang Kereta Api Selama Satu Tahun	Penumpang	34,895,277	37,319,593	38,827,305			39,603,851			40,395,928			41,203,846			41,203,846								
				2	Tingkat Ketersediaan Prasarana Moda Perkeretaapian	Persen	N/A	3.00	28			32			89.6			100			100								
296		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perhubungan		Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Dinas Perhubungan	Persen	50	55	75			711,450,000	83.33		1,091,420,000	91.6			1,243,680,000	100				1,217,840,000	100	4,264,390,000	Sekretaris	Dinas Perhubungan	
297		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I		Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wilayah I	Persen	70	70	89.00			260,865,000	98.00		300,140,500	99.00			344,862,100	100				342,892,220	100	1,248,759,820	UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I	Dinas Perhubungan	
298		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II		Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wilayah II	Persen	50	55	78.00			163,405,836	93.00		188,008,009	98.00			216,022,034	100				214,788,099	100	782,223,978	UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah II	Dinas Perhubungan	
299		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah III		Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wilayah III	Persen	53	58	78.00			825,626,200	93.00		921,157,622	98.00			1,028,356,550	100				1,213,519,435	100	3,988,659,806	UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah III	Dinas Perhubungan	
300		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah IV		Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wilayah IV	Persen	65	70	89.00			776,668,622	93.00		929,144,946	98.00			1,067,595,640	100				1,061,497,448	100	3,834,906,655	UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah IV	Dinas Perhubungan	
301		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Nusawiru		Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Nusawiru	Persen	58	60	68.00			260,865,000	73.00		297,660,000	77.00			336,830,000	80.00				327,880,000	80.00	1,223,235,000	UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Nusawiru	Dinas Perhubungan	
302		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan		Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Kelas A	Persen	68	68	79.00			474,300,000	84.00		868,175,000	93.00			1,114,130,000	100.00				819,700,000	100.00	3,276,305,000	UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Kelas A	Dinas Perhubungan	
303		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Pelabuhan Laut, Kelas A		Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Pelabuhan Laut, Kelas A	Persen	11	11	20.00			537,831,900	82.00		3,158,321,430	90.00			208,798,326	100.00				207,605,653	100.00	4,112,557,309	UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Pelabuhan Laut, Kelas A	Dinas Perhubungan	
304		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Perhubungan							6,506,443,575				7,560,203,748				8,649,454,780						5,995,785,960		28,711,888,062	Sekretaris	Dinas Perhubungan	
				1	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di Dinas Perhubungan	Persen	70.98	70.98	77.97			84.97			91.96			98.95			98.95								
				2	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Dinas Perhubungan	Persen	65	70	80.00			85.00			90.00			95.00			95.00								
				3	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Dinas Perhubungan	Persen	100.00	100.00	100.00			100.00			100.00			100.00			100.00								
				4	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Dinas Perhubungan	Persen	100.00	100.00	100.00			100.00			100.00			100.00			100.00								
				5	Persentase Ketersediaan Data Kinerja Dinas Perhubungan	Persen	100.00	100.00	100.00			100.00			100.00			100.00			100.00								
305		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I							3,243,263,590				3,731,567,580				4,287,579,423							4,263,088,425		15,525,499,017	UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah I	Dinas Perhubungan
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wilayah I	Persen	86	88	92.00			93.00			95.00			100.00			100.00								
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wilayah I	Persen	100.00	100.00	100.00			100.00			100.00			100.00			100.00								
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wilayah I	Persen	100.00	100.00	100.00			100.00			100.00			100.00			100.00								



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH		
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
306		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II	1. Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wilayah II	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	60	60	78.00	1,600,875,099	93.00	1,841,791,379	98.00	2,115,825,369	100.00	2,103,739,604	100.00	7,662,231,451	UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah III	Dinas Perhubungan		
				2. Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wilayah II	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00					
				3. Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wilayah II	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00					
307		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah III	1. Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wilayah III	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	60	60	78.00	1,620,111,711	93.00	1,862,342,970	98.00	2,138,033,704	100.00	2,130,098,449	100.00	7,750,586,834	UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah III	Dinas Perhubungan		
				2. Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wilayah III	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00					
				3. Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wilayah III	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00					
308		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah IV	1. Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wilayah IV	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	90	90	92.00	2,259,474,324	93.00	2,599,595,254	95.00	2,987,157,143	100.00	2,970,233,902	100.00	10,816,460,624	UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah IV	Dinas Perhubungan		
				2. Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wilayah IV	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00					
				3. Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wilayah IV	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00					
309		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Nusawiru	1. Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Nusawiru	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	60	65	75.00	1,955,760,590	80.00	2,069,537,930	90.00	2,160,839,660	98.00	1,955,100,920	98.00	8,141,239,100	UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Nusawiru	Dinas Perhubungan		
				2. Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Nusawiru	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100					
				3. Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Nusawiru	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100					
310		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	1. Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan, Kelas A	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	55	60	76.00	2,176,672,643	82.00	3,571,039,423	94.00	3,079,691,619	100	3,057,725,391	100	11,885,129,076	UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas ASDP	Dinas Perhubungan		
				2. Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan, Kelas A	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100					



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH		
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan, Kelas A	Persen	100	100	100					100				100				
311		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Pelabuhan Laut								1,122,256,080		1,314,128,089		1,463,637,918		1,488,253,782		5,388,275,869	UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Pelabuhan Laut	Dinas Perhubungan	
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Pelabuhan Laut, Kelas A	Persen	60	65	76.00			82.00		94.00		100.00		100.00				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Pelabuhan Laut, Kelas A	Persen	100	100	100			100		100		100		100				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Pelabuhan Laut, Kelas A	Persen	100	100	100			100		100		100		100				
10			Komunikasi dan Informatika								39,289,064,255		45,634,882,700		52,889,242,203		53,332,014,880		191,145,204,039			
312	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik								21,515,060,000		26,576,550,000		31,004,645,538		31,376,646,683		110,472,902,221	Bidang E-Government	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				1	Tingkat Kematangan Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Poin	3	3	3.3			3.5		3.7		4		4				
				2	Tingkat Kematangan Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Poin	3	3	3.3			3.5		3.7		4		4				
313	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Program Pengembangan Aplikasi Informatika								3,885,980,000		4,212,600,000		4,611,090,000		4,357,980,000		17,067,650,000	Bidang Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	
314	Indeks Reformasi Birokrasi	a. Indeks Keterbukaan Informasi Publik b. Persentase penyelesaian sengketa informasi	Program Pengelolaan dan Pengembangan Informasi Komunikasi Publik								4,584,982,500		5,451,600,000		6,269,010,000		6,454,965,000		22,760,557,500	Bidang Informasi Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				1	Persentase Layanan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persen	90.4	90.4	90.45			90.5		90.55		90.60		90.60				
				2	Persentase Diseminasi Informasi Dan Kemitraan Komunikasi Yang Dilaksanakan	Persen	90	90	90.05			90.1		90.15		90.2		90.2				
				3	Persentase Media Komunikasi Publik Yang Dimanfaatkan	Persen	90.8	90.8	90.85			90.9		90.95		91		91				
				4	Persentase Persidangan Komisi Informasi Melalui Mediasi Dan Ajudikasi Non Litigasi	Persen	N/A	N/A	85			90		93		95		95				
315		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika								3,150,724,150		2,286,376,260		2,642,146,799		2,627,746,430		10,706,993,639	Sekretaris	Dinas Komunikasi dan Informatika	
316		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Komunikasi dan Informatika								6,152,317,605		7,107,756,440		8,362,349,866		8,514,676,766		30,137,100,679	Sekretaris	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				1	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di Dinas Komunikasi Dan Informatika	Persen	30	30	40			50		50		50		50				
				2	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Dinas Komunikasi Dan Informatika	Persen	85	85	85			87		87		90		90				
				3	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Dinas Komunikasi Dan Informatika	Persen	100	100	100			100		100		100		100				
				4	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Dinas Komunikasi Dan Informatika	Persen	100	100	100			100		100		100		100				
				5	Persentase Ketersediaan Data Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika	Persen	100	100	100			100		100		100		100				
11			Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah								167,164,771,355		158,208,682,266		170,870,945,899		159,229,798,383		655,474,197,903			



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH		
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
317	a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB b. Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	Persentase Koperasi berkualitas	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	1	Tingkat Kepatuhan Koperasi	Jumlah Koperasi Yang Patuh Tahun (N)/Dibagi Jumlah Koperasi Aktif Tahun (N) Dikali 100	Persen	1,5	1,7	2,5	1.720.000,000	3,1	2.390.000,000	3,7	1.871.160,000	4,5	1.975.280,000	4,5	7.956.440,000	Bidang Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha kecil	
318	a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB b. Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	Persentase Koperasi berkualitas	Program kelembagaan koperasi	1	Persentase Koperasi Aktif	Koperasi Aktif Tahun (N) Dibagi Total Koperasi Tahun (N) Dikali 100%	Persen	40	42	48	66.832,074,182	51,5	66.670,490,192	55,5	67.966,925,000	60,5	54.101,233,897	60,5	255.570,723,271	Bidang Kelembagaan Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha kecil	
319	a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB b. Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	Persentase Koperasi berkualitas	Program Pemberdayaan koperasi	1	Laju Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Jumlah Volume Usaha Koperasi Tahun N Dikurangi Jumlah Volume Usaha Koperasi Tahun N-1 Dibagi Jumlah Volume Usaha Koperasi Tahun N-1 X 100%	Persen	5,6	5,8	6,1	31.866,031,147	6,3	20.578,970,569	6,6	23.512,388,695	6,9	25.802,047,487	6,9	101.759,437,898	Bidang Pemberdayaan Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha kecil	
320	a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB b. Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	Persentase UMKM yang Naik Kelas	Program Usaha Kecil	1	Laju Pertumbuhan Omzet Umkm Binaan	Omset Umkm Tahun N Dikurangi Omset Umkm Tahun N-1 Dibagi Omset Umkm N-1 Dikali 100	Persen	7	7,7	9	40.105,047,000	10,1	41.523,934,100	11,2	46.569,380,000	12,5	47.087,141,700	12,5	175.285,502,800	Bidang Usaha Kecil	Dinas Koperasi dan Usaha kecil	
321	a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB b. Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	Persentase UMKM yang Naik Kelas	Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian dan wirausaha								17.454.805,745		17.252.607,714		19.861.774,900		19.264.798,412		73.833.986,771	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha, Kelas A.	Dinas Koperasi dan Usaha kecil	
				1	Jumlah Usaha Pemula	Jumlah Usaha Pemula	Unit	3.370	3.370	4.420		5.570		6.820		4.820		4.820				
				2	Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian	Jumlah SDM Koperasi Yang Dilatih dibagi Jumlah SDM Koperasi x 100%	Orang	5,0	5,0	5,3		5,9		6,5		7,3		7,3				
322		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	100	100	100	2.139,861,048	100	2.268,130,316	100	2.650,939,014	100	2.634,204,036	100	9.693,134,415	Sekretariat	Dinas Koperasi dan Usaha kecil	
323		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian Dan Wirausaha, Kelas A.	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	100	100	100	297,417,725	100	315,245,777	100	368,452,079		366,126,096		1,347,241,677	UPTD P3W	Dinas Koperasi dan Usaha kecil	
324		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil								5,038,114,783		5,376,456,597		5,951,216,702		5,972,462,246		22,338,250,327	Sekretariat	Dinas Koperasi dan Usaha kecil	
				1	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil	Jumlah ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Dibagi Jumlah ASN Dinas Pendidikan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				2	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				4	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				5	Persentase Ketersediaan Data Kinerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil	Jumlah Data Kinerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Yang Disediakan/Jumlah Data Kinerja (Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Dan Kegiatan) Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Yang Seharusnya Disediakan*100	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
325		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha, Kelas A.								1,711,419,725		1,832,847,000		2,118,709,509		2,026,504,510		7,689,480,745	UPTD P3W	Dinas Koperasi dan Usaha kecil	
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian Dan Wirausaha, Kelas A.	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian Dan Wirausaha, Kelas A.	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian Dan Wirausaha, Kelas A.	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
12			Penanaman Modal								24,728,856,570		31,973,523,733		34,678,839,282		29,512,257,437		120,893,477,022			
326	a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB b. Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	Nilai realisasi investasi	Program Pengembangan Dan Promosi Penanaman Modal	1	Laju Minat Investasi Di Jawa Barat	Nilai Minat Investasi Tahun N Dikurangi Nilai Minat Investasi Tahun N - 1 Dibagi Nilai Minat Investasi Tahun N - 1 X 100 %	Persen	5,5	5,5	5,5	4.414,306,450	5,8	4.899,036,000	6	4.907,457,969	6,2	5.043,728,188	6,2	19.264,528,606	Bidang Pengembangan dan Promosi PMPTSP	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
327	a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB b. Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	Nilai realisasi investasi	Program Pengendalian Penanaman Modal	1	Peningkatan Laju Realisasi Proyek Penanaman Modal	Realisasi Proyek Penanaman Modal Tahun N Dikurangi Realisasi Proyek Penanaman Modal Tahun N-1 Dibagi Realisasi Proyek Penanaman Modal Tahun N-1 X 100%	Persen	5,5	5,5	5,5	805,790,000	5,8	729,600,000	6	1,023,750,000	6,2	742,220,000	6,2	3.301,360,000	Bidang Pengendalian PMPTSP	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
328	a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB b. Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan	Program Penataan Regulasi PMPTSP	1	Kemudahan Prosedur Dalam Mendapatkan Pelayanan Perizinan	Nilai Persepsi Masyarakat Terhadap Kemudahan Prosedur Pelayanan Perizinan Dalam Survei Kepuasan Masyarakat	Indeks	77,50	77,50	77,50	1.589,162,500	78	1.400,600,000	78,50	1.535,937,500	79	1.646,075,000	79	6.171,775,000	Bidang Pengembangan dan Promosi PMPTSP	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH		
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
329	a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB b. Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan	Program Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	1	Tingkat Penyelesaian Perizinan Bidang Esda Yang Tepat Waktu	Persen	55	55	55	995,007,500	60	1,242,040,000	70	1,532,352,344	80	1,604,114,818	80	5,373,514,662	Bidang Pelayanan Perizinan ESDA	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
330	a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB b. Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan	Program Pelayanan Perizinan Infrastruktur Dan Sosial	1	Tingkat Penyelesaian Perizinan Bidang Insos Yang Tepat Waktu	Persen	55	55	55	948,200,000	60	1,171,600,000	70	1,367,500,000	80	1,409,800,000	80	4,897,100,000	Bidang Pelayanan Perizinan INSOS	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
331	a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB b. Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan	Program Pengendalian dan Penanganan Permasalahan Perizinan	1	Tingkat Kualitas Pelayanan Perizinan	Persen	82	82	82	2,028,325,000	82	2,268,800,000	82	2,868,125,000	82	2,767,510,000	82	9,932,760,000	Bidang Pengendalian PMPTSP	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
332	a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB b. Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan	Program Manajemen Data Dan Informasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	Persentase Data Dan Informasi Yang Valid	Persen	80	80	80	2,111,713,685	85	2,457,821,929	90	2,521,454,365	95	2,339,340,207	95	9,430,330,186	Bidang Data dan Informasi	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
333	a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB b. Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persen	40	40	60	4,665,100,000	70	8,071,200,000	80	8,287,500,000	90	1,746,400,000	90	22,770,200,000	Sekretariat	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
334		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							7,171,251,435		9,732,825,804		10,634,762,105		12,213,069,224		39,751,908,568	Sekretariat	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
				1	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persen	60	N/A	60		70		80		90		90					
				2	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persen	65	N/A	65		75		90		100		100					
				3	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persen	60	N/A	90		90		100		100		100					
				4	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persen	65	N/A	95		95		95		95		95					
				5	Persentase Ketersediaan Data Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persen	90	N/A	100		100		100		100		100					
13			Kepemudaan dan Olahraga							195,592,286,881		98,790,164,891		85,389,010,882		64,253,856,728		444,025,319,382				
335	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Program Peningkatan dan Pembinaan Kepemudaan							6,154,765,104		7,610,480,217		7,677,541,171		7,867,317,210		29,310,103,701	Bidang Layanan Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga		
				1	Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional	Persen	2.6	2.6	2.6		2.6		2.6		2.6		2.6					
				2	Persentase Pemuda Binaan Dispora Yang Berwirausaha	Persen	4	4	4		4		4		4		4					
				3	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Dibina	Persen	20	20	20		20		20		20		20					
336	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Program peningkatan Kesejahteraan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	1	Persentase Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Yang Berprestasi Di Tingkat Nasional	Persen	100	100	100	782,760,000	100	888,745,000	100	843,987,100	100	877,142,310	100	3,392,634,410	Bidang Sarana Prasarana Dan Kesejahteraan	Dinas Pemuda dan Olahraga		
337	Indeks Pembangunan Pemuda	a. Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO) b. Peringkat Jawa Barat pada Multievent Berkebutuhan Khusus Nasional (PEPARPENAS)	Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga							7,238,367,139		7,658,104,505		9,291,343,578		7,731,258,957		31,919,074,180	Bidang Pembudayaan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga		
				1	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Persen	10	10	10		10		10		10		10					
				2	Persentase Tenaga Olahraga Tradisional, Berkebutuhan Khusus Dan Rekreasi Binaan Yang Bersertifikat Dibagi Jumlah Tenaga Olahraga Tradisional, Berkebutuhan Khusus Dan Rekreasi Yang Dibina X100%	Persen	10	10	11		12		13		14		14					



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH		
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
				3	Persentase Event Olahraga Tradisional, Berkebutuhan Khusus Dan Rekreasi Yang Diselenggarakan Dan Diikuti	Jumlah Event Olahraga Tradisional, Berkebutuhan Khusus Dan Rekreasi Yang Diselenggarakan Dan Diikuti Dibagi Jumlah Event Olahraga Tradisional, Berkebutuhan Khusus Dan Rekreasi Yang Diagendakan Dalam Setahun X100%	Persen	100	100	100												
				4	Persentase Medali Emas Yang Diperoleh Dalam Event Nasional Peparpenas	Jumlah Perolehan Medali Emas Pada Peparpenas Dibagi Jumlah Total Medali Emas Peparpenas X100%	Persen	12	12	-		12	-		12		12					
338	Indeks Pembangunan Pemuda	Peringkat Jawa Barat pada Multievent Nasional : - POPNAS - POPWILNAS	Program Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi, Dan Organisasi Olahraga							20,107,302,212		24,987,899,865		24,209,956,864		28,178,997,004		97,484,155,945	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga		
				1	Persentase Medali Emas Yang Diperoleh Dalam Event Nasional:																	
				A.	Popnas	Jumlah Perolehan Medali Emas Pada Popnas Dibagi Jumlah Total Medali Emas Popnas X100%	Persen	N/A	N/A	-		20	-		20		20					
				B.	Popwilnas	Jumlah Perolehan Medali Emas Pada Popwilnas Dibagi Jumlah Total Medali Emas Popwilnas X100%	Persen	N/A	N/A	20		-		20		-		-				
				2	Persentase Tenaga Olahraga Prestasi Binaan Yang Memiliki Sertifikat	Jumlah Tenaga Olahraga Prestasi Yang Memiliki Sertifikat Dibagi Jumlah Tenaga Olahraga Prestasi Binaan X100%	Persen	N/A	N/A	12		14		16		18		18				
				3	Persentase Event Olahraga Prestasi Yang Diselenggarakan Dan Diikuti	Jumlah Event Olahraga Prestasi Yang Diselenggarakan Dan Diikuti Dibagi Jumlah Event Olahraga Prestasi Yang Diagendakan Dalam Setahun X100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100				
339	Indeks Pembangunan Pemuda	Peringkat Jawa Barat pada Multievent Nasional : - POPNAS - POPWILNAS	Program peningkatan Kesejahteraan, Sarana dan Prasarana Keolahragaan							151,560,742,810		51,294,721,894		30,672,774,203		6,959,846,284		240,488,085,191	Bidang Sarana Prasarana Dan Kesejahteraan	Dinas Pemuda dan Olahraga		
				1	Persentase Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berprestasi Di Tingkat Nasional	Jumlah Penghargaan Yang Diberikan Kepada Insan Olahraga Yang Berprestasi Dibagi Jumlah Insan Olahraga Yang Berprestasi X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				2	Persentase Penyediaan Sarana Olahraga Kawasan Sport Jabar	Jumlah Sarana Yang Telah Dibangun Dibagi Jumlah Bagunan Pada Kawasan Sport Jabar Yang Harus Dibangun X100%	Persen	50	60	80		95		100								
340		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	100	100	100		522,276,755		630,109,466		685,107,460		680,166,139		2,517,659,821	Sekretariat	Dinas Pemuda dan Olahraga
341		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Pemuda dan Olahraga							9,226,072,860		5,720,103,945		12,008,300,506		11,959,128,824		38,913,606,134	Sekretariat	Dinas Pemuda dan Olahraga		
				1	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di Dinas Pemuda Dan Olahraga	Jumlah ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Dibagi Jumlah ASN Dinas Pendidikan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				2	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Dinas Pemuda Dan Olahraga	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Dinas Pemuda Dan Olahraga	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				4	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Dinas Pemuda Dan Olahraga	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				5	Persentase Ketersediaan Data Kinerja Dinas Pemuda Dan Olahraga	Jumlah Data Kinerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Yang Disediakan/Jumlah Data Kinerja (Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Dan Kegiatan) Dinas Pemuda Dan Olahraga Yang Seharusnya Disediakan*100	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
14			Statistik							2,156,245,000		2,502,780,000		2,875,455,000		2,764,740,000		10,299,220,000				
	342	Tingkat kematangan pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik							2,156,245,000		2,502,780,000		2,875,455,000		2,764,740,000		10,299,220,000	Bidang Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				1	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Jumlah Data Statistik Sektoral Pemerintah Provinsi Jawa Barat Yang Diinput Dibagi Jumlah Data Statistik Sektoral Pemerintah Provinsi Jawa Barat Yang Harus Disediakan X100%	Persen	70	70	75		80		85		90		90				
				2	Persentase Dokumen Hasil Pengolahan Dan Analisis Statistik Sektoral Spasial Dan Aspasial Yang Dihasilkan	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Dan Analisis Statistik Sektoral Spasial Dan Aspasial Yang Dihasilkan Dibagi Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Dan Analisis Statistik Sektoral Spasial Dan Aspasial Yang Dibutuhkan X100%	Persen	70	70	75		80		85		90		90				
				3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Data Dan Informasi	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsor Dibagi Total Unsor Yang Terisi X Nilai Penimbang	Poin	80	80	85		85		88		90		90				
15			Persandian							4,881,170,000		5,154,240,000		5,388,240,000		4,873,440,000		20,297,090,000				
	343	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Program Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi Daerah	1	Tingkat Kesiapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Hasil Perhitungan Tingkat Kesiapan Keamanan Informasi	Level	I s.d. II	I s.d. II	II		4,881,170,000		5,154,240,000		5,388,240,000		4,873,440,000		20,297,090,000	Bidang Persandian & Keamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL											PENANGGUNG JAWAB ESELON II	PERANGKAT DAERAH					
							2017		2018		2020		2021		2022		2023			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE				
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K			Rp.	K	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)				
16				Kebudayaan								82,419,717,162		85,077,260,649		91,949,905,991		100,427,828,371		359,874,712,174				
	344	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat	Laju seni budaya yang dilestarikan	Program Pengembangan Nilai Budaya			70	70	76.92		88.24	47,875,396,125		45,957,073,358		47,098,340,730		54,583,515,784		195,514,326,004	Bidang Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan kebudayaan		
					1	Persentase Usulan Warisan Budaya Tak Benda (WBTE) Jawa Barat Yang Ditetapkan Sebagai WBTE Tingkat Nasional	Jumlah Usulan Warisan Budaya Tak Benda (Wbtb) Jawa Barat Yang Ditetapkan Sebagai Wbtb Tingkat Nasional Dibagi Jumlah Usulan Warisan Budaya Tak Benda (Wbtb) Jawa Barat X100%	Persen																
					2	Persentase Bahasa, Sastra Dan Aksara Daerah Yang Dilestarikan	Jumlah Bahasa, Sastra Dan Aksara Daerah Yang Dilestarikan Dibagi Jumlah Bahasa, Sastra Dan Aksara Daerah Yang Harus Dilestarikan X100%	Persen	18.52	18.52	18.52													
	345	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat	Laju seni budaya yang dilestarikan	Program Pengelolaan keragaman budaya								20,413,749,723		23,129,565,801		26,846,938,526		27,946,065,243		98,336,319,292	UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat	Dinas Pariwisata dan kebudayaan		
					1	Persentase Cagar Budaya Yang Dilindungi	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilindungi Dibagi Jumlah Cagar Budaya X100%	Persen	6.00	6.00	20.00													
					2	Persentase Benda Koleksi Museum Sri Baduga Yang Dilindungi	Jumlah Koleksi Museum Yang Dilindungi Dibagi Jumlah Benda Koleksi Museum Sri Baduga X100%	Persen	18.21	18.21	19.04													
					3	Persentase Seni Budaya Yang Dilindungi	Jumlah Seni Budaya Yang Dilindungi Dibagi Jumlah Seni Budaya X100%	Persen	10.53	10.53	15.79													
	346	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, Kelas A			6.75	6.75	13.49		19.41	3,160,412,500		3,851,440,000		4,591,380,000		4,669,137,000		16,272,369,500	UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat	Dinas Pariwisata dan kebudayaan		
	347	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran		Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, Kelas A								10,970,158,815		12,139,181,490		13,413,246,729		13,229,110,343		49,751,697,377	UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat	Dinas Pariwisata dan kebudayaan		
					1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, Kelas A	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	6.75	6.75	13.49													
					2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, Kelas A	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	11.11	11.11	16.67													
					3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, Kelas A	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	13.04	13.04	17.39													
17				Perpustakaan								55,935,282,421		15,674,979,568		17,434,234,575		16,083,096,855		105,127,593,419				
	348	a. Rata-rata Lama Sekolah b. Harapan Lama Sekolah	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Membaca	Program Pengembangan Bahan Perpustakaan								2,919,370,550		3,053,430,160		3,323,434,066		380,905,085		9,677,139,861	Bidang Perpustakaan Deposit dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah		
					1	Laju Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	Jumlah Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah Tahun N Dikurangi Jumlah Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah Tahun N-1 Dibagi Jumlah Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah Tahun N-1 X100%	Persen	N/A	N/A	3													
					2	Persentase Naskah Kuno Berkonten Ilmu Pengetahuan Yang Dilestarikan	Jumlah Naskah Kuno Berkonten Ilmu Pengetahuan Yang Dilestarikan Dibagi Jumlah Naskah Kuno Yang Berkonten Ilmu Pengetahuan X100%	Naskah Kuno	N/A	N/A	2													
					3	Persentase Karya Cetak, Karya Rekam Dan Hasil Khazanah Budaya Jawa Barat Yang Disimpan Sesuai Dengan Peraturan	Jumlah Karya Cetak, Karya Rekam Dan Hasil Khazanah Budaya Jawa Barat Yang Disimpan Sesuai Dengan Peraturan Dibagi Jumlah Karya Cetak, Karya Rekam Dan Hasil Khazanah Budaya Jawa Barat Yang Diterbitkan X100%	Persen	8,63	17,73	1,17													
	349	a. Rata-rata Lama Sekolah b. Harapan Lama Sekolah	Tingkat Kebiasaan Membaca Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca								1,377,864,690		1,471,383,424		1,637,251,462		1,815,642,497		6,302,142,072	Bidang Bina Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah		
					1	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Jumlah Perpustakaan Dibagi Jumlah Penduduk X1000	Poin	N/A	N/A	0,3754													
					2	Persentase Pustakawan, Tenaga Teknis Dan Penilai Lingkup Provinsi Yang Memiliki Sertifikat	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Lingkup Provinsi Bersertifikat / Jumlah Seluruh Pustakawan, Tenaga Teknis Dan Penilai Lingkup Provinsi X100%	Persen	N/A	N/A	54,654													
	350	a. Rata-rata Lama Sekolah b. Harapan Lama Sekolah	Tingkat Pemanfaatan Bahan Bacaan	Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan								621,340,000		726,703,400		885,361,908		1,075,669,395		3,309,074,703	Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah		
					1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	593,707	594,211	606,156													
					2	Persentase Koleksi Buku Yang Dibaca	Jumlah Koleksi Buku Yang Dibaca Dibagi Jumlah Koleksi Buku Yang Ada Di Perpustakaan X100%	Persen	1,60	1,63	1,81													
					3	Survei Kepuasan (SKM) terhadap Pelayanan Perpustakaan	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur Dibagi Total Unsur Yang Terisi X Nilai Penimbang	Poin	77,52	79,12	82,23													



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH		
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			(20)	
	351	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	100	100	100	44,101,355,787	100	3,132,521,199	100	3,398,533,097	100	3,769,995,985	100	54,402,406,067	Sekretariat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
	352	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan								6,915,351,394		7,290,941,385		8,189,654,042		9,040,883,893		31,436,830,715	Sekretariat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
				1	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Jumlah ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Dibagi Jumlah ASN Dinas Pendidikan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				2	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				4	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				5	Persentase Ketersediaan Data Kinerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Jumlah Data Kinerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Yang Disediakan/Jumlah Data Kinerja (Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Dan Kegiatan) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Yang Seharusnya Disediakan*100	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
18			Kearsipan								2,596,200,000		2,916,692,000		3,254,222,960		3,737,982,650		12,505,097,610			
	353	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	Program Pengelolaan dan pengembangan Arsip Dinamis								1,410,700,000		1,558,642,000		1,648,962,960		1,892,857,650		6,511,162,610	Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
				1	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menerapkan Standar Baku Kearsipan/ Jumlah Perangkat Daerah X100%	Jumlah Perangkat Daerah Yang Telah Menerapkan Standar Baku Kearsipan/ Jumlah Perangkat Daerah X100%	Persen	N/A	40	59		66		73		80		80				
				2	Persentase Penyusutan Arsip	Jumlah Arsip Yang Disusutkan Oleh Pencipta Arsip Dibagi Jumlah Arsip Yang Harus Disusutkan X100%	Persen	N/A	N/A	20		20		20		20		20				
	354	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	Program Peningkatan Pelayanan Kearsipan								410,000,000		425,950,000		465,860,000		480,875,000		1,782,685,000	Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
				1	Persentase Simpul Sikn Yang Terintegrasi Se-Jawa Barat	Jumlah Simpul Sikn Yang Terintegrasi Se-Jawa Barat Dibagi Jumlah Simpul Sikn Se-Jawa Barat X100%	Persen	N/A	17.8	46		60		75		89.2		89.2				
				2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Kearsipan	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsir (IKM) Terhadap Pelayanan Kearsipan	Poin	N/A	N/A	55		60		65		70		70				
	355	Persentase Penyelamatan dan Pelestarian arsip Statis	Program Penyelamatan dan Pelestarian arsip Statis								775,500,000		932,100,000		1,139,400,000		1,364,250,000		4,211,250,000	Bidang Pengelolaan Arsip Statis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
				1	Tingkat Penyelamatan Arsip Statis	Jumlah Arsip Yang Dapat Diselamatkan/ Jumlah Arsip Yang Harus Diselamatkan X100%	Persen	N/A	15,8	15,2		16,9		17,5		17,5		17,5				
				2	Tingkat Pelestarian Arsip Statis	Jumlah Arsip Yang Dapat Dilestarikan/ Jumlah Arsip Yang Harus Dilestarikan X100%	Persen	N/A	14,2	17,1		17,1		17,1		17,1		17,1				
II			Urusan Pemerintahan Pilihan								835,148,735,034		1,003,563,943,432		1,085,389,285,509		1,102,304,021,225		4,026,405,985,200			
I			Kelautan dan Perikanan								185,076,270,315		221,980,501,275		263,801,648,496		281,383,063,669		952,241,483,755			
	356	a. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b. Nilai Tukar Petani (NTP)	Produksi Perikanan	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1	Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	274,465.48	242,037.08	248,880	9,288,180,000	253,858	8,987,645,000	258,935	9,363,900,000	264,113	9,238,680,000	264,113	36,878,405,000	Bidang Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
	357	a. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b. Nilai Tukar Petani (NTP)	Produksi Perikanan	Program Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Wilayah Utara	1	Produksi Perikanan Tangkap Wilayah Utara	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Wilayah Utara (Ton)	Ton	211,305.76	214,492.79	221,324	65,282,894,500	224,821	86,033,785,100	228,373	108,063,959,775	231,982	115,422,577,077	231,982	374,803,216,452	UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem	Dinas Kelautan dan Perikanan
	358	a. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b. Nilai Tukar Petani (NTP)	Produksi Perikanan	Program Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Wilayah Selatan	1	Produksi Perikanan Tangkap Wilayah Selatan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Wilayah Selatan (Ton)	Ton	19,847	15,308	15795.59556	46,523,817,752	16045.16597	54,956,668,597	16298.6796	65,661,081,786	16556.19873	77,263,978,270	16556.19873	244,405,546,406	UPTD Pelabuhan Perikanan Cilautureun	Dinas Kelautan dan Perikanan
	359	a. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b. Nilai Tukar Petani (NTP)	Produksi Perikanan	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1	Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	1,160,748	1,175,418	1260000	1,644,195,500	1323000	1,870,610,480	1390150	2,130,009,420	1459608	2,112,744,270	1459608	7,757,559,670	Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
	360	a. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b. Nilai Tukar Petani (NTP)	Produksi Perikanan	Program Peningkatan Teknologi Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara	1	Produksi Perikanan Budidaya Air Payau Dan Laut Wilayah Utara	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Air Payau Dan Laut Wilayah Utara (Ton)	Ton	253,558	312,553	295855.5062	7,145,770,000	310648.2815	8,020,440,000	326180.6956	8,842,150,000	342489.7304	8,625,470,000	342489.7304	32,633,830,000	UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara	Dinas Kelautan dan Perikanan
	361	a. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b. Nilai Tukar Petani (NTP)	Produksi Perikanan	Program Peningkatan Teknologi Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan	1	Produksi Perikanan Budidaya Air Payau Dan Laut Wilayah Selatan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Air Payau Dan Laut Wilayah Selatan (Ton)	Ton	8,947	2,921	3220.62741	3,530,671,768	3381.658781	4,394,111,525	3550.74172	5,364,403,792	3728.278806	5,626,309,696	3728.278806	18,915,496,781	UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan	Dinas Kelautan dan Perikanan
	362	a. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b. Nilai Tukar Petani (NTP)	persentase peningkatan konsumsi ikan Provinsi Jawa Barat	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan							2,203,362,700		2,242,362,100		2,580,449,025		2,574,229,867		9,600,403,692	Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				1	Konsumsi Ikan Jawa Barat	Konsumsi Ikan Didapat Dari Survey Susenas Dengan Sasaran Rumah Tangga Yang Dilaksanakan Oleh Bps Dan Menghasilkan Raw Data Konsumsi Ikan Per Rumah Tangga. Yang Kemudian Dihitung Melalui Aplikasi Perhitungan Konsumsi Ikan	Kg/Kap/Th	28.6	29.31	29.95		30.277		30.604		30.935		30.935				



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH
							2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
				2	Laju Produksi Olahan Yang Terstandarisasi	Persentase	5.43410627	-4.487161578	3		3		3		3		3			
363	a. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b. Nilai Tukar Petani (NTP)	persentase peningkatan konsumsi ikan Provinsi Jawa Barat	Program Peningkatan Mutu Produk Perikanan	1	Persentase Produksi Perikanan Yang Memenuhi Standar Jaminan Mutu Dan Keamanan Pangan	Persentase	96.14	95.06	92	1,055,867,675	93	1,269,828,000	94	1,602,637,500	95	1,715,767,000	95	5,644,100,175	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
364	a. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b. Nilai Tukar Petani (NTP)	Persentase Kawasan Konservasi Perairan yang Dikelola	Program Pengelolaan dan Pelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan							4,125,230,500		4,582,433,000		5,009,517,500		4,559,051,000		18,276,232,000	Bidang Kelautan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				1	Persentase Lokasi Kawasan Konservasi Perairan Yang Dikelola	Persentase	N/A	12.5	37.5		50		62.5		75		75			
				2	Produksi Garam	Ton	233,320	188,634	270,098		283,602		297,783		312,672		312,672			
365		Persentase Kawasan Konservasi Perairan yang Dikelola	Program Pengelolaan dan Pelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara							4,894,069,200		5,287,362,000		5,709,820,500		5,447,680,000		21,338,931,700	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara	Dinas Kelautan dan Perikanan
				1	Jumlah Plasma Nutfah Yang Dilestarikan Di Wilayah Utara Jawa Barat	Jenis	4	4	5		5		5		5		5			
				2	Persentase Lokasi Kawasan Konservasi Perairan Yang Dikelola Di Wilayah Utara	Persentase	N/A	N/A	33.333		66.667		100		100		100			
366		Persentase Kawasan Konservasi Perairan yang Dikelola	Program Pengelolaan dan Pelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan							5,732,290,000		6,356,762,000		7,007,114,250		6,970,319,290		26,066,485,540	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				1	Jumlah Plasma Nutfah Yang Dilestarikan Di Wilayah Selatan	Jenis	4	4	5		5		5		5		5			
				2	Persentase Lokasi Kawasan Konservasi Perairan Yang Dikelola Di Wilayah Selatan	Persentase	N/A	20	33.33		33.33		33.33		50		50			
367		Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	1	Tingkat Penanganan Kasus Pelanggaran Sektor Kelautan Dan Perikanan	Persentase	100	100	100	4,768,660,000	100	5,499,838,357	100	6,304,153,216	100	5,491,437,637	100	22,064,089,209	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
368		Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara	1	Tingkat Indikasi Pelanggaran Sektor Kelautan Dan Perikanan Di Wilayah Utara	Persentase	80	91.33	70	2,298,590,000	65	2,557,360,000	60	2,804,025,000	55	2,846,260,000	55	10,506,235,000	UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara	Dinas Kelautan dan Perikanan
369		Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan	1	Tingkat Indikasi Pelanggaran Sektor Kelautan Dan Perikanan Di Wilayah Selatan	Persentase	80	78	70	2,035,894,000	65	2,360,640,000	60	2,675,400,000	55	2,542,970,000	55	9,614,904,000	UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan	Dinas Kelautan dan Perikanan
370		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan	Persentase	100	100	100	633,285,000	100	730,323,000	100	840,178,500	100	838,153,580	100	3,041,940,000	Sekretariat Dinas	Dinas Kelautan dan Perikanan
371		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Wilayah Selatan	Persentase	100	100	100	443,299,500	100	574,914,200	100	689,363,115	100	748,126,376	100	2,455,703,191	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan	Dinas Kelautan dan Perikanan
372		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Wilayah Utara	Persentase	100	100	100	2,345,500,000	100	2,459,000,000	100	2,572,500,000	100	2,333,000,000	100	9,710,000,000	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara	Dinas Kelautan dan Perikanan
373		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pelabuhan Perikanan Cilautereun	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Pelabuhan Perikanan Cilautereun	Persentase	100	100	100	455,027,000	100	524,750,600	100	603,611,400	100	602,156,632	100	2,185,545,632	UPTD Pelabuhan Perikanan Cilautereun	Dinas Kelautan dan Perikanan
374		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Cisem	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Cisem	Persentase	100	100	100	3,049,150,000	100	3,196,700,000	100	3,087,000,000	100	3,499,500,000	100	12,832,350,000	UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Cisem	Dinas Kelautan dan Perikanan
375		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan	Persentase	100	100	100	328,370,000	100	378,686,000	100	435,781,500	100	434,731,220	100	1,577,568,720	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
376		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Wilayah Utara	Persentase	100	100	100	623,903,000	100	698,356,000	100	782,040,000	100	783,888,000	100	2,888,187,000	UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara	Dinas Kelautan dan Perikanan
377		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Wilayah Selatan	Persentase	100	100	100	1,212,623,500	100	1,398,433,300	100	1,609,278,825	100	1,605,400,291	100	5,825,735,916	UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan	Dinas Kelautan dan Perikanan
378		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan	Persentase	100	100	100	281,460,000	100	324,588,000	100	373,527,000	100	372,346,800	100	1,351,921,800	UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan	Dinas Kelautan dan Perikanan
379		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara	Persentase	100	100	100	375,280,000	100	466,964,100	100	527,877,000	100	522,526,676	100	1,892,647,776	UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara	Dinas Kelautan dan Perikanan
380		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Kelautan dan Perikanan							3,760,719,100		4,636,592,040		5,216,772,750		5,169,624,710		18,783,708,600	Sekretariat	Dinas Kelautan dan Perikanan
				1	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di Dinas Kelautan Dan Perikanan	Persentase	78	78	80		82		84		86		86			



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH		
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
				2	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Dinas Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
				3	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Dinas Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
				4	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Dinas Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
				5	Persentase Ketersediaan Data Kinerja Dinas Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Data Kinerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Yang Disediakan/Jumlah Data Kinerja (Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Dan Kegiatan) Dinas Kelautan Dan Perikanan Yang Seharusnya Disediakan*100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
381		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan							1,926,400,000		1,695,235,000		1,956,787,500		1,960,064,000	7,538,486,500	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan	Dinas Kelautan dan Perikanan			
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Wilayah Selatan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Wilayah Selatan	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Wilayah Selatan	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
382		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara							1,340,025,000		1,515,810,000		1,699,392,500		1,667,906,900	6,223,134,400	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara	Dinas Kelautan dan Perikanan			
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Wilayah Utara	J+G1079:G1080Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Wilayah Utara	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Wilayah Utara	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
383		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pelabuhan Perikanan Cilautereun							962,399,500		1,107,206,100		1,271,350,025		1,274,554,070	4,615,509,695	UPTD Pelabuhan Perikanan Cilautereun	Dinas Kelautan dan Perikanan			
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pelabuhan Perikanan Cilautereun	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pelabuhan Perikanan Cilautereun	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pelabuhan Perikanan Cilautereun	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
384		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem							875,616,000		1,007,124,800		1,156,179,200		1,159,588,496	4,198,508,496	UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem	Dinas Kelautan dan Perikanan			
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
385		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan							983,509,000		1,131,550,200		1,330,188,300		1,459,567,961	4,904,815,461	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan			



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE						PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH
							2017		2018		2020		2021		2022		2023			
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pengujian Dan Penerapan Mutu Produk Perikanan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pengujian Dan Penerapan Mutu Produk Perikanan	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pengujian Dan Penerapan Mutu Produk Perikanan	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
386		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara							1,116,711,000		1,280,615,000		1,441,703,000		1,411,980,140		5,251,009,140	UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara	Dinas Kelautan dan Perikanan
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Wilayah Utara	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Wilayah Utara	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Wilayah Utara	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
387		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan							1,257,348,471		1,447,349,980		1,662,778,306		1,664,966,644		6,032,443,401	UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Wilayah Selatan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Wilayah Selatan	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Wilayah Selatan	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
388		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan							1,447,918,000		1,667,120,400		1,915,684,100		1,917,262,908		6,947,985,408	UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Perikanan Air Payau Dan Laut Wilayah Selatan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Perikanan Air Payau Dan Laut Wilayah Selatan	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Perikanan Air Payau Dan Laut Wilayah Selatan	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
389		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara							1,128,232,649		1,319,336,396		1,511,033,711		1,520,244,159		5,478,846,915	UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara	Dinas Kelautan dan Perikanan
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Perikanan Air Payau Dan Laut Wilayah Utara	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Perikanan Air Payau Dan Laut Wilayah Utara	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Perikanan Air Payau Dan Laut Wilayah Utara	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
2			Pariwisata							202,666,103,682		232,248,120,536		217,164,501,179		226,683,772,087		878,762,497,485		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL		2020				2021				2022				2023				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH
							2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)							
390	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	a. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara b. Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara	Program Destinasi Pariwisata	1	Persentase Destinasi Wisata Yang Dikembangkan	Persentase Destinasi Wisata Yang Dikembangkan Dibagi Jumlah Destinasi Wisata X100%	Persentase	18.52	18.52	18.52	156,718,137,500	18.52	181,738,493,000	22.22	160,854,834,650	22.22	174,167,625,900	22.22	673,479,091,050	Bidang Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan						
391	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	a. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara b. Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara	Program Industri Pariwisata	1	Persentase Industri Kreatif Yang Dikembangkan	Jumlah Industri Kreatif Yang Dikembangkan Dibagi Jumlah Industri Kreatif Yang Akan Dikembangkan Selama 5 Tahun Kedepan X 100%	Persentase	18.52	18.52	18.52	16,801,016,950	18.52	19,290,977,569	22.22	20,376,985,979	22.22	18,766,892,276	22.22	75,235,872,774	Bidang Industri Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan						
392	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	a. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara b. Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara	Program Pemasaran Pariwisata	1	Persentase Seni Budaya Dan Destinasi Wisata Yang Dipromosikan	Jumlah Seni Budaya Dan Destinasi Wisata Yang Dipromosikan Dibagi Jumlah Seni Budaya Dan Destinasi Wisata Yang Ada X100%	Persentase	14.81	14.81	17.41	6,857,200,000	20.74	6,548,704,000	22.59	7,748,340,000	24.44	7,016,063,000	24.44	28,170,307,000	Bidang Pemasaran	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan						
393		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persentase	6.75	6.75	13.49	1,188,125,000	19.41	1,292,096,000	31.92	1,400,760,000	28.42	1,313,928,000	28.42	5,194,909,000	Sekretaris	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan						
394		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan								21,101,624,232		23,377,849,968		26,783,580,550		25,419,262,911		96,682,317,600	Sekretaris	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan						
				1	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Jumlah ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Dibagi Jumlah ASN Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan X100%	Persentase	16.67	16.67	19.05		20.24		21.43		22.62		22.62									
				2	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persentase	6.75	6.75	13.49		19.41		31.92		28.42		28.42									
				3	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persentase	14.40	14.40	18.60		21.80		23.60		21.60		21.60									
				4	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persentase	13.04	13.04	17.39		21.74		26.09		21.74		21.74									
				5	Persentase Ketersediaan Data Kinerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Jumlah Data Kinerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Yang Disediakan/Jumlah Data Kinerja (Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Dan Kegiatan) Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Yang Seharusnya Disediakan*100	Persentase	100	100	100		100		100		100		100									
3			Pertanian								212,999,855,531		234,709,273,066		270,318,162,573		269,042,819,248		987,070,110,419								
395	a. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b. Nilai Tukar Petani (NTP)	Produksi komoditas peternakan (ton) : - Daging - Telur - Susu	Program Produksi Peternakan								5,069,413,333		5,948,366,447		6,838,901,496		6,770,512,481		24,627,193,757	Bidang Produksi Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan						
				1	Laju Pertumbuhan Populasi Ternak Ruminansia Besar	Populasi Tahun N Dikurangi Populasi Tahun N-1 Dibagi Populasi Tahun N-1 Dikali 100%	Persentase	623.904 (ekor)	629.324 ekor (angka sementara)	1		1.00		1.00		1.00		1.00									
				2	Laju Pertumbuhan Populasi Ternak Ruminansia Kecil		Persentase	12.676.928 (ekor)	12.883.107 ekor (angka sementara)	2		2		2		2		2									
				3	Laju Pertumbuhan Ternak Unggas		Persentase	173.796.943 (ekor)	179.581.686 ekor (angka sangat sementara)	2.5		2.5		2.5		2.5		2.5									
				4	Persentase Pelaku Usaha Dengan Produktivitas Yang Meningkatkan	Jumlah Pelaku Usaha Yang Meningkatkan Produktivitas Hasil Peternakannya Dibagi Jumlah Pelaku Usaha Yang Dibina X 100% (Akumulatif)	Persentase	8	13.74	23		28		33		38		38									
396		Produksi komoditas peternakan (ton) : - Daging - Telur - Susu	Program kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner								1,717,184,640		2,014,916,288		2,316,571,136		2,293,405,425		8,342,077,489	Bidang Keswan dan Kesmavet	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan						
				1	Tingkat Kinerja Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis Di Jawa Barat (%)	Kinerja Pengendalian Phms = Kinerja Pengendalian Rabies + Kinerja Pengendalian Anthrax + Kinerja Pengendalian Ai + Kinerja Pengendalian Brucellosis	Point	73	73	76		77		78		79		79									
				2	Persentase Kenaikan Unit Usaha Produk Peternakan Yang Memiliki Sertifikasi Jaminan Mutu (%)	Unit Usaha Yang Memiliki Sertifikat Tahun N Dikurangi Unit Usaha Yang Memiliki Sertifikat Tahun N-1 Dibagi Unit Usaha Yang Memiliki Sertifikat Tahun N-1 Dikali 100%	Persentase	24	20	10		10		10		10		10									
397		Produksi komoditas peternakan (ton) : - Daging - Telur - Susu	Program penyidikan dan pengujian penyakit hewan dan produk hewan								450,160,000		520,872,000		593,384,000		600,760,160		2,165,176,160	Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan						
				1	Peningkatan Pelayanan Pengujian Dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Dan Produk Hewan	Jumlah Sampel Yang Diuji Tahun N Dikurangi Jumlah Sampel Yang Diuji Tahun N-1 Dibagi Jumlah Sampel Yang Diuji Tahun N-1 Dikali 100%	Persentase	72	71	80		88		84		96		96									
				1	Persentase Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi Iso/Iec 17025 : 2017	Jumlah Jenis Pengujian Penyakit Hewan Yang Terakreditasi Dibagi Jumlah Total Jenis Pengujian Penyakit Hewan Dikali 100%	Persentase	2	1.68	2.56		2.56		2.56		2.56		2.56									
				3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Balai Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur Dibagi Total Unsur Yang Terisi X Nilai Penimbang	Persentase	81.57	85.45	82.1		82.2		82.3		82.4		82.4									
398		Produksi komoditas peternakan (ton) : - Daging - Telur - Susu	Program pelayanan rumah sakit hewan								319,521,000		374,920,700		431,050,400		426,739,896		1,552,231,996	UPTD, Rumah Sakit Hewan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan						
				1	Persentase Tingkat Kesembuhan Pasien	Jumlah Pasien Yang Sembuh Dibagi Jumlah Pasien Yang Dilyani X 100 %	Persentase	86	88	91.0		92.0		93.0		94.0		94.0									



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE						PENANGGUNG JAWAB ESELON II	PERANGKAT DAERAH		
							2017	2018	2020		2021		2022		2023		K	Rp.			K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
				2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Rumah Sakit Hewan	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur Dibagi Total Unsur Yang Terisi X Nilai Penimbang	Persen	80.5	81.65	82.2	82.4						82.8					
399		Produksi komoditas peternakan (ton) : - Daging - Telur - Susu	Program pengujian mutu dan keamanan pakan/bahan pakan									494,590,058		580,343,860		667,227,638		660,555,362		2,402,716,917	Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan Cikole Lembang	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
				1	Persentase Ruang Lingkup Parameter Uji Yang Terakreditasi Sesuai ISO 17025:2017	Jumlah Jenis Pengujian Yang Terakreditasi Dibagi Jumlah Total Jenis Pengujian Dikali 100%	Persen	66.67	66.67	83	92			100		100		100				
				2	Persentase Pakan Yang Bersertifikat	Jumlah Sertifikat Pakan Yang Diterbitkan Dibagi Jumlah Pakan Disertifikasi X 100 %	Persen	N/A	66	70	74			76		80		80				
				3	Cakupan Pelayanan Pengujian	Jumlah Sampel Yang Diuji Pada Tahun N Dikurangi Jumlah Sampel Yang Diuji Pada Tahun N-1 Dibagi Jumlah Sampel Yang Diuji Pada Tahun N-1 Dikali 100%	Persen	2.5	2.5	2.5	2.5			2.5		2.5		2.5				
				4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pengujian Mutu Dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur Dibagi Total Unsur Yang Terisi X Nilai Penimbang	Persen	81.5	81.75	82.1	82.2			82.3		82.4		82.4				
400		Produksi komoditas peternakan (ton) : - Daging - Telur - Susu	Program pengembangan ternak sapi perah dan hijauan pakan ternak									3,038,812,437		3,565,692,665		4,099,515,576		4,058,520,420		14,762,541,097	Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah Dan Hijauan Pakan Ternak Cikole Lembang	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
				1	Persentase Ternak Sapi Perah Yang Memiliki Produksi Individu ≥ 5.000 Kg/Laktasi	Jumlah Ternak Sapi Perah Yang Memiliki Produksi Individu ≥ 5.000 Kg/Laktasi Dibagi Jumlah Induk Laktasi X 100 %	Persen	34	35	22	24			26		30		30				
				2	Persentase Produksi Hijauan Pakan Ternak Yang Berkualitas	Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak Yang Berkualitas Dibagi Total Produksi Hijauan Pakan Ternak X 100 %	Persen	65	65.2	55	60			65		70		70				
				3	Persentase Produksi Susu Yang Diolah	Jumlah Produksi Susu Yang Diolah Dibagi Jumlah Produksi Susu X 100%	Persen	1.1	1.1	2.2	2.4			2.7		3.0		3.0				
				4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pengembangan Ternak Sapi Perah Dan Hijauan Pakan Ternak	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur Dibagi Total Unsur Yang Terisi X Nilai Penimbang	Persen	82	82.0	82.2	82.4			82.6		82.8		82.8				
401	a. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b. Nilai Tukar Petani (NTP)	Produksi komoditas peternakan (ton) : - Daging - Telur - Susu	Program Perbibitan dan pengembangan inseminasi buatan Sapi perah Bunikasih									1,548,760,610		1,817,290,294		2,089,358,385		2,068,464,801		7,523,874,091	Balai Perbibitan Dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
				1	Persentase Bibit Ternak Betina Sesuai Sni Dari Produksi Bibit Betina Yang Dihasilkan	Bibit Ternak Sesuai Sni Dibagi Produksi Bibit Betina Yang Dihasilkan X 100 %	Persen	27	28	33	36			38		40		40				
				2	Laju Produksi Susu	Jumlah Produksi Susu Yang Dihasilkan Dalam Satu Tahun N dikurangi Jumlah Produksi Susu Yang Dihasilkan Dalam Satu Tahun N-1 dibagi Jumlah Produksi Susu Yang Dihasilkan Dalam Satu Tahun N-1 x 100%	Persen	250,000	265,000	300,000												
				3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Balai Perbibitan Dan Pengembangan Inseminasi Buatan Sapi Perah Bunikasih	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur Dibagi Total Unsur Yang Terisi X Nilai Penimbang	Persen	79.8	79.9	81.2	81.4			81.6		82.0		82.0				
402	a. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b. Nilai Tukar Petani (NTP)	Produksi komoditas peternakan (ton) : - Daging - Telur - Susu	Program pengembangan perbibitan ternak domba dan kambing									2,039,682,000		2,393,329,400		2,751,636,800		2,724,120,432		9,908,768,632	Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Dan Kambing Margawati	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
				1	Persentase Bibit Domba Dan Kambing Sesuai Sni Yang Dihasilkan	Jumlah Bibit Ternak Domba Sesuai Sni Yang Dihasilkan Dibagi Dengan Jumlah Induk Sdg Yang Produktif X 100 %	Persen	15	15.78	17	00000jp			19		20		20				
				2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Dan Kambing	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur Dibagi Total Unsur Yang Terisi X Nilai Penimbang	Persen	80.28	84.48	84.60	84.65			84.70		84.75		84.75				
403	a. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b. Nilai Tukar Petani (NTP)	Produksi komoditas peternakan (ton) : - Daging - Telur - Susu	Program pengembangan perbibitan ternak unggas									3,478,879,632		4,082,060,293		4,693,189,045		4,646,257,155		16,900,386,125	Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
				1	Persentase Bibit Ayam Sentul Unggul	Jumlah Bibit Ayam Sentul Unggul Dibagi Jumlah Populasi Ayam Sentul Dikali 100%	Persen	61.17	85,30	12	13			15		17		17				
				2	Persentase Bibit Itik Rambon Galur Murni	Jumlah Bibit Itik Rambon Galur Murni Dibagi Jumlah Populasi Itik Rambon Dikali 100%	Persen	51.22	69.88	68	72			76		80		80				
				3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur Dibagi Total Unsur Yang Terisi X Nilai Penimbang	Persen	81.32	81.02	82.2	82.4			82.6		82.8		82.8				
404	a. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b. Nilai Tukar Petani (NTP)	Produksi komoditas peternakan (ton) : - Daging - Telur - Susu	Program Perbibitan dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi potong									1,903,995,000		2,234,116,500		2,568,588,000		2,542,902,120		9,249,601,620	Balai Perbibitan dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi potong Ciamis	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
				1	Laju Produksi Benih Semen Beku Sapi Potong	Jumlah Produksi Benih Semen Beku Sapi Potong Tahun N Dikurangi Jumlah Produksi Benih Semen Beku Sapi Potong Tahun N-1 Dibagi Jumlah Produksi Benih Semen Beku Sapi Potong Tahun N-1 Dikali 100%	Persen	10	10	15	20			25		30		30				



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (UTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON II	PERANGKAT DAERAH	
							2017	2018	2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	K (10)	Rp. (11)	K (12)	Rp. (13)	K (14)	Rp. (15)	K (16)	Rp. (17)	K (18)	Rp. (19)	(20)	(21)	
				2	Persentase Induk Sapi Potong Yang Memiliki Skib	Jumlah Ternak Bibit Terpilih Dibagi Jumlah Total Bibit Untuk Replacement Dikali 100%	Persen	3	5	7	9	12	15	18	21	24	27	30			
				3	Persentase Bibit Ternak Sapi Potong Sesuai Sni	Jumlah Ternak Bibit Terpilih Hasil Uji Performance Dibagi Jumlah Total Bibit X 100 %	Persen	18,6	19	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
				4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Balai Perbibitan Dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur Dibagi Total Unsur Yang Terisi X Nilai Penimbang	Persen	82	82	82,1	82,2	82,3	82,4	82,5	82,6	82,7	82,8	82,9	83		
405		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Balai Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	55	60	70	75	80	85	90	95	100	100	100	BPMKP Cikole Lembang	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	
406		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan Cikole Lembang	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Balai Pengujian Mutu Dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan Cikole Lembang	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	55	60	70	75	80	85	90	95	100	100	100	BPMKP/BP Cikole Lembang	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	
407		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Cikole Lembang	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah Dan Hijauan Pakan Ternak Cikole Lembang	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	5	7	27,27	45,45	63,64	81,82	100	118,18	136,36	154,55	172,73	UPTD Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah Cikole Lembang	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	
408		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan Cikole Lembang	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Balai Pelatihan Peternakan Dan Ketahanan Pangan Cikole Lembang	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	67,4	70,8	80,8	88,5	96,2	104	111,8	119,6	127,4	135,2	143	UPTD Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	
409		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Balai Perbibitan Dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	7,14	14,3	42,9	57,1	71,4	85,7	100	114,3	128,6	143	157,1	UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	
410		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	100	80	80,28	85,21	90,14	95,07	100	100,00	100,00	100,00	100,00	UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	
411		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing Margawati	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Dan Kambing Margawati	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Prosen (%)	75	75	86	91	97	100	100	100	100	100	100	BPPTDK Margawati	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	
412		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Balai Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	60	60	65	70	75	80	85	90	95	100	100	Balai Keswan dan Kesmavet	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	
413		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Balai Perbibitan Dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	69	70	80	86	90	96	100	104	108	112	116	Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	
414		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Rumah Sakit Hewan	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Rumah Sakit Hewan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	70	72	80,00	86,00	92,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	UPTD Rumah Sakit Hewan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	
415		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan							416,762,150		475,445,905		536,509,160		597,570,315		658,641,470	BPMKP Cikole Lembang	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Balai Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	70	73	78	80	82	85	88	90	92	95	98			
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Balai Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	80	85	95	100	100	100	100	100	100	100	100			
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Balai Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	80	85	95	100	100	100	100	100	100	100	100			
416		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan Cikole Lembang							687,700,000		513,590,000		738,100,000		958,600,000		1.189.100.000	BPMKP/BP Cikole Lembang	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Balai Pengujian Mutu Dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan Cikole Lembang	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	70	72	78	80	82	85	88	90	92	95	98			
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Balai Pengujian Mutu Dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan Cikole Lembang	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	80	85	95	100	100	100	100	100	100	100	100			
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Balai Pengujian Mutu Dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan Cikole Lembang	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	80	85	95	100	100	100	100	100	100	100	100			
417		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Cikole Lembang							2,592,305,884		2,606,787,891		3,039,132,414		3,053,524,421		3,486,960,945	UPTD Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah Cikole Lembang	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH		
							2017	2018	2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE					
							(8)	(9)	K (10)	Rp. (11)	K (12)	Rp. (13)	K (14)	Rp. (15)	K (16)	Rp. (17)	K (18)	Rp. (19)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah Dan Hijauan Pakan Ternak Cikole Lembang	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	47	50	57.53		61.64		67.12		71.23		71.23				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah Dan Hijauan Pakan Ternak Cikole Lembang	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah Dan Hijauan Pakan Ternak Cikole Lembang	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
418		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan Cikole Lembang								443,135,343			502,796,742		565,275,867		311,440,181		1,822,648,134	UPTD Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Balai Pelatihan Peternakan Dan Ketahanan Pangan Cikole Lembang	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	65	67	73.7		78.9		84.2		94.7		94.7				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Balai Pelatihan Peternakan Dan Ketahanan Pangan Cikole Lembang	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Balai Pelatihan Peternakan Dan Ketahanan Pangan Cikole Lembang	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
419		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis								906,550,000			770,385,000		1,033,340,000		1,023,006,600		3,733,281,600	Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Balai Perbibitan Dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	35	40	50		62.5		75		100		100				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Balai Perbibitan Dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Balai Perbibitan Dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
420		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi								596,657,608			688,925,308		783,731,914		796,177,733		2,865,492,563	UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	100	80	75		80		90		100		100				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
421		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing Margawati								750,158,711			880,223,925		1,012,003,005		1,001,882,975		3,644,268,616	BPPTDK Margawati	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Dan Kambing Margawati	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Prosen (%)	60	63	73		80		84		93		93				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Dan Kambing Margawati	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Prosen (%)	100	100	100		100		100		100		100				



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH									
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE								
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)											
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Dan Kambing Margawati	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Prosen (%)	100	100	100																			
422		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner								1,028,595,000		1,206,936,500		1,387,628,000		1,373,751,720		4,996,911,220	Balai Keswan dan Kesmavet	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan								
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Balai Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	60	60	65			70		75		80		80										
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Balai Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	90	90	90			90		90		90		90										
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Balai Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	90	90	90			90		90		90		90										
423		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih								1,247,186,073		1,448,367,341		1,653,981,415		2,470,423,202		6,819,958,030	Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan								
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Balai Perbibitan Dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	58	60	68			72		76		80		80										
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Balai Perbibitan Dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100			100		100		100		100										
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Balai Perbibitan Dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100			100		100		100		100										
424		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Rumah Sakit Hewan								977,658,051		1,136,514,785		1,309,441,488		1,309,433,694		4,733,048,018	UPTD Rumah Sakit Hewan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan								
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Rumah Sakit Hewan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X X 100%	Persen	70	71	78			84		89		95		95										
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Rumah Sakit Hewan	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X 100%	Persen	100	100	100			100		100		100		100										
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Rumah Sakit Hewan	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X 100%	Persen	100	100	100			100		100		100		100										
425	a.Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b.Nilai Tukar Petani (NTP)	Produksi tanaman pangan dan hortikultura	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan								2,809,200,052		3,229,753,478		3,707,754,394		3,690,322,947		13,437,030,871	Bidang Tanaman Pangan	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura								
				1	Produktivitas Tanaman Pangan	Jumlah Produksi Tanaman Pangan Dibagi Luas Lahan	Kw/Ha	60.03	56.39	57.26			57.76		58.26		58.76		58.76										
				2	Persentase Penerapan Sertifikat Mutu Hasil Tanaman Pangan	Jumlah Kelompok Yang Mendapatkan Sertifikat Dibagi Jumlah Kelompok Yang Dibina X100%	Persen	20	20	20			20		20		20		20										
426	a.Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b.Nilai Tukar Petani (NTP)	Produksi tanaman pangan dan hortikultura	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Hortikultura								5,396,047,800		6,203,867,230		7,122,034,590		7,088,551,422		25,810,501,042	Bidang Tanaman Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura								
				1	Produktivitas Tanaman Hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Dibagi Luas Lahan	Kw/Ha	118.74	101.85	90.12			90.19		90.26		90.34		90.34										
				2	Persentase Penerapan Sertifikat Mutu Hasil Tanaman Hortikultura	Jumlah Kelompok Yang Mendapatkan Sertifikat Dibagi Jumlah Kelompok Yang Dibina X100%	Persen	20	20	20			20		20		20		20										
427	a.Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b.Nilai Tukar Petani (NTP)	Produksi tanaman pangan dan hortikultura	Program Peningkatan Produksi Benih Tanaman Pangan								300,000		300,000		362,700		612,451,425		365,300		704,138,931	368,000	808,350,926	370,600	804,550,587	370,600	2,929,491,868	Bidang Tanaman Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
428	a.Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b.Nilai Tukar Petani (NTP)	Produksi tanaman pangan dan hortikultura	Program Peningkatan Produksi Benih Tanaman Hortikultura								1,378,204,569		1,584,529,729		1,819,038,855		1,810,486,919		6,592,260,071	UPTD/Balai Benih Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura								
				1	Produksi Benih Tanaman Buah	Jumlah Produksi Benih Tanaman Buah	Pohon	15,000	40,000	90,000			115,000		140,000		165,000		165,000										
				2	Produksi Benih Tanaman Sayuran	Jumlah Produksi Benih Tanaman Sayuran	Kg	5,000	7,500	15,000			20,000		25,000		30,000		30,000										
				3	Produksi Benih Tanaman Hias	Jumlah Produksi Benih Tanaman Hias	Pohon	41,000	46,250	56,750			62,000		67,250		72,500		72,500										



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE						PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH				
							2017		2018		2020		2021		2022		2023							
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)						
				4	Produksi Benih Tanaman Obat	Jumlah Produksi Benih Tanaman Obat	Kg	2,300	3,100	4,700	5,600	285,000	944,308,365	300,000	1,085,676,765	345,000	1,246,356,053	390,000	1,240,496,499	390,000	4,516,837,682	UPTD/Balai Benih Kentang	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	
429	a.Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b.Nilai Tukar Petani (NTP)	Produksi tanaman pangan dan hortikultura	Program Pengembangan Perbenihan Kentang	Produksi Benih Kentang	Jumlah Produksi Benih Kentang	Knol	136,936	150,737	285,000															
430	a.Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b.Nilai Tukar Petani (NTP)	Produksi tanaman pangan dan hortikultura	Program perlindungan tanaman pangan dan hortikultura	Persentase Luas Lahan Yang Terkena Serangan Opt/Dpi	Jumlah Luas Lahan Yang Terkena Serangan Opt/Dpi Dibagi Jumlah Luas Lahan X 100%	Persen	4.98	3.47	5	11,684,520,277	5	12,919,918,816	5	14,295,793,177	5	13,743,363,603	5	52,643,595,873	52,643,595,873	52,643,595,873	UPTD/Balai Perindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura		
431	a.Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b.Nilai Tukar Petani (NTP)	Produksi tanaman pangan dan hortikultura	Program pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura									964,462,604	1,108,848,209			1,272,956,852		1,266,972,238		4,613,239,903	UPTD/Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura		
				1	Persentase Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Yang Bersertifikat	Jumlah Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Yang Bersertifikat Dibagi Jumlah Calon Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Yang Diuji X 100%	Persen	78.45	88.32	70.5	71.63		72.78		73.94		73.94							
				2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Balai Pengawasan Sertifikasi Benih	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur Dibagi Total Unsur Yang Terisi X Nilai Penimbang	Persen	79.00	79.00	79.79	80.59		81.59		82.21		82.21							
432	a.Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b.Nilai Tukar Petani (NTP)	Produksi tanaman pangan dan hortikultura	Program prasarana dan sarana tanaman pangan dan hortikultura	Persentase Peningkatan Indeks Pertanaman	Jumlah Luas Pertanaman Dalam Pola Tanam Selama Setahun X 100 Dengan Luas Lahan Yang Tersedia Untuk Ditanami	Persen	2.13	1.8	1.85	674,505,975	1.9	775,483,404	1.95	890,254,324	2	886,068,928	2	3,226,312,630			Bidang Prasarana dan Sarana	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura		
433	a.Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b.Nilai Tukar Petani (NTP)	Produksi tanaman pangan dan hortikultura	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	Persentase Alsintan Yang Dikembangkan	Jumlah Alsintan Yang Dikembangkan Dibagi Jumlah Alsintan Yang Akan Dikembangkan Selama 5 Tahun X100%	Persen	50	51	66.66	436,520,302	77.77	501,869,905	88.88	576,146,247	100	573,437,582	100	2,087,974,035			Bidang Prasarana dan Sarana	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura		
434	a.Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b.Nilai Tukar Petani (NTP)	Produksi tanaman pangan dan hortikultura	Program Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura							43,898,093,992		48,169,753,518		52,898,332,380		50,477,620,418		195,443,800,308			Bidang Penyuluhan	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura		
				1	Persentase Kelompok Tani Yang Di Bina Oleh Penyuluh	Jumlah Kelompok Tani Yang Dibina Dibagi Jumlah Kelompok Tani Di Jawa Barat X100%	Persen	35	35	48		56		72		94		94						
				2	Persentase Penyuluh Yang Berprestasi	Jumlah Penyuluh Yang Berprestasi Dibagi Jumlah Penyuluh X100%	Persen	2.13	2.13	2.13	2.13		2.13		2.13		2.13		2.13					
435	a.Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b.Nilai Tukar Petani (NTP)	Produksi tanaman pangan dan hortikultura	Program pelatihan Sumber Daya Manusia tanaman pangan dan hortikultura							2,158,419,120		2,481,546,892		2,848,813,836		2,835,420,569		10,324,200,417			UPTD/Balai Pelatihan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura		
				1	Persentase Sdm Tph Yang Dilatih	Jumlah Sdm Tanaman Pangan Dan Hortikultura Yang Dilatih Dibagi Jumlah Sdm Tph Yang Akan Dilatih Selama 5 Tahun X 100%	Persen	17	17	20		20		20		20		20						
				2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Balai Pelatihan Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur Dibagi Total Unsur Yang Terisi X Nilai Penimbang	Persen	88	88	89		89		89		89		89						
436		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	20	25	35	1,600,995,416	40	1,840,673,650	45	2,113,091,870	50	2,103,157,488	50	7,657,918,424			Sekretariat	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura		
437		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Benih Kentang	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Balai Benih Kentang	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	10	10	40.00	951,600,000	60.00	1,094,060,000	80.00	1,255,980,000	100.00	1,250,075,200	100.00	4,551,715,200			UPTD/Balai Benih Kentang	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura		
438		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Benih Hortikultura	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Balai Benih Hortikultura	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	34.45	53	60.43	951,600,000	76.55	1,094,060,000	98.42	1,255,980,000	100	1,250,075,200	100	4,551,715,200			UPTD/Balai Benih Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura		
439		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Benih Padi dan Palawija	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Balai Benih Padi Dan Palawija	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	39.53	54.15	67	951,600,000	84.10	1,094,060,000	98.82	1,255,980,000	100	1,250,075,200	100	4,551,715,200			UPTD/Balai Benih Padi Palawija	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura		
440		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	20	20	70.96	951,600,000	82.81	1,094,060,000	93.16	1,255,980,000	100	1,250,075,200	100	4,551,715,200			UPTD/Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura		
441		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Perindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Balai Perindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	70	70	77.5	951,600,000	85	1,094,060,000	92.5	1,255,980,000	100	1,250,075,200	100	4,551,715,200			Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Perindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura		
442		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	15	25	55	951,600,000	70	1,094,060,000	85	1,255,980,000	100	1,250,075,200	100	4,551,715,200			Balai Pelatihan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura		
443		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	69.23	81.25	92.3	951,600,000	95.12	1,094,060,000	97.61	1,255,980,000	98.2	1,250,075,200	98.2	4,551,715,200			UPTD/Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura		
444		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura							6,127,603,045		7,044,940,508		8,087,586,037		8,049,563,475		29,309,693,066			Sekretariat	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura		
				1	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Jumlah ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Dibagi Jumlah ASN Dinas Pendidikan X100%	Persen	100	100	100	100	100		100		100		100						
				2	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	35	40	50		55		60		65		65						
				3	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100	100	100		100		100		100						



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH		
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
				4	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100						
				5	Persentase Ketersediaan Data Kinerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Jumlah Data Kinerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Yang Disediakan/Jumlah Data Kinerja (Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Dan Kegiatan) Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Yang Seharusnya Disediakan*100	Persen	100	100	100		100		100		100						
445		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Benih Kentang								640,996,518		736,957,388		846,026,488		842,049,023		3,066,029,418	UPTD Balai Benih Kentang	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Balai Benih Kentang	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	80	80	80		80		80		80						
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Balai Benih Kentang	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100						
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Balai Benih Kentang	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100						
446		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Benih Hortikultura								2,197,216,704		2,526,152,697		2,900,021,267		2,886,387,253		10,509,777,921	UPTD/Balai Benih Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Balai Benih Hortikultura	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	97.09	97.53	97.99		98.57		99.44		100						
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Balai Benih Hortikultura	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100						
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Balai Benih Hortikultura	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100						
447		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Benih Padi dan Palawija								1,651,190,627		1,898,383,372		2,179,342,585		2,169,096,735		7,898,013,319	UPTD Balai Benih Padi dan Palawija	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Balai Benih Padi Dan Palawija	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	97.47	98.15	98.50		98.81		98.98		100						
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Balai Benih Padi Dan Palawija	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100						
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Balai Benih Padi Dan Palawija	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100						
448		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura								1,319,549,529		1,517,093,692		1,741,622,338		1,733,434,364		6,311,699,924	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	30	50	82.19		83.47		90.25		100						
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	30	50	77.49		83.68		91.08		100						
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	30	50	66.01		76.92		90.91		100						
449		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura								1,550,986,019		1,783,177,558		2,047,086,402		2,037,462,335		7,418,712,314	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	68	68	76		82		84		100						
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100						



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL			2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH
							2017	2018		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100			100		100		100		100		
	450	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura							935,577,560		1,075,638,908		1,234,832,601		1,229,027,223		4,475,076,293	UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	100	100	100			100		100		100		100		
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100			100		100		100		100		
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100			100		100		100		100		
	451	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian							559,772,510		643,573,677		738,822,063		735,348,603		2,677,516,853	UPTD/Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	65	68	79			85		90		100		100		
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	68	73	85			89		90		100		100		
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	63	69	80			85		90		100		100		
	452	a. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b. Nilai Tukar Petani (NTP)	Laju peningkatan produksi komoditas unggulan utama perkebunan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Perkebunan	Laju Peningkatan Penerapan Teknologi Budidaya Komoditas Perkebunan Yang Tepat	Jumlah Poktan Yang Menerapkan Teknologi Budidaya Yang Tepat T Dikurangi Jumlah Poktan Yang Menerapkan Teknologi Budidaya Yang Tepat T-1 Dibagi Jumlah Poktan Yang Menerapkan Teknologi Budidaya Yang Tepat T-1 X100%	Persen	N/A	N/A	1	6,802,976,000	1	7,765,510,720	1	8,806,261,904	1	9,164,450,363	1	32,539,198,987	Bidang Produksi Perkebunan	Dinas Perkebunan
	453	a. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b. Nilai Tukar Petani (NTP)	Laju peningkatan produksi komoditas unggulan utama perkebunan	Program Peningkatan produksi benih perkebunan secara berkelanjutan	Laju Peningkatan Produksi Benih Perkebunan	(Jumlah Benih T Dikurangi Jumlah Benih T-1) Dibagi Jumlah Benih T-1 Dikali 100%	Persen	0.95	0.91	1	11,760,099,416	1	12,865,921,060	1	15,187,885,371	1	14,455,427,996	1	54,269,333,842	Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan	Dinas Perkebunan
	454	a. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b. Nilai Tukar Petani (NTP)	Laju peningkatan produksi komoditas unggulan utama perkebunan	Program Peningkatan penggunaan benih bersertifikat	Persentase Peningkatan Penggunaan Benih Bersertifikat	(Jumlah Sertifikat T Dikurangi Jumlah Sertifikat T-1) Dibagi Jumlah Sertifikat T-1 Dikali 100%	Persen	2.46	2.64	3.67	2,620,241,286	3,67	2,958,685,743	3,67	3,326,090,830	3,67	3,517,241,330	3,67	12,422,259,189	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan	Dinas Perkebunan
	455	a. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b. Nilai Tukar Petani (NTP)	Laju peningkatan produksi komoditas unggulan utama perkebunan	Program Pemberdayaan sumberdaya alam perkebunan	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Sumberdaya Lahan Perkebunan	Luas Lahan Perkebunan Yang Dikelola T Dikurangi Luas Lahan Perkebunan T-1) Dibagi Luas Lahan Perkebunan T-1 Dikali 100%	Persen	N/A	N/A	1	12,170,333,455	1	13,718,468,215	1	15,400,256,659	1	16,327,393,872	1	57,616,452,201	Bidang Pengembangan dan Perlindungan	Dinas Perkebunan
	456	a. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b. Nilai Tukar Petani (NTP)	Laju peningkatan produksi komoditas unggulan utama perkebunan	Program Peningkatan kompetensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan permodalan petani perkebunan						6,461,425,000		7,002,473,500		7,890,857,700		8,307,915,660		29,662,671,860	Bidang Sumberdaya Perkebunan	Dinas Perkebunan	
				1	Persentase Peningkatan Kompetensi Sdm Perkebunan	(Jumlah Sdm Perkebunan Yang Meningkat Kompetensinya Dibagi Jumlah Sdm Perkebunan Yang Dibina Dikali 100%	Persen	1.9	1.95	2		2		2		2		2			
				2	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Perkebunan	(Jumlah Kelompok Tani Yang Kelas Lanjut Dibagi Jumlah Kelompok Tani Binaan Dikali 100%	Persen	1.88	1.92	2		2		2		2		2			
				3	Laju Peningkatan Akses Permodalan Perkebunan	(Jumlah Petani Yang Mendapat Akses Modal T Dikurangi Jumlah Petani Yang Mendapat Akses Modal T-1) Dibagi Jumlah Petani Yang Mendapat Akses Modal T-1 Dikali 100%	Persen	1.75	1.81	2		2		2		2		2			
	457	a. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b. Nilai Tukar Petani (NTP)	Laju peningkatan produksi komoditas unggulan utama perkebunan	Program Peningkatan Pengendalian OPT perkebunan secara berkelanjutan	Penurunan Serangan Opt Perkebunan	(Jumlah Luas Serangan Opt. T Dikurangi Jumlah Luas Serangan Opt. T-1) Dibagi Jumlah Luas Serangan Opt T-1 Dikali 100%	Persen	-1.04	-1.05	-1	3,844,639,553	-1	4,458,373,459	-1	5,118,046,881	-1	5,112,511,510	-1	18,533,571,403	Balai Perlindungan Perkebunan	Dinas Perkebunan
	458	a. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b. Nilai Tukar Petani (NTP)	Laju peningkatan nilai tambah produk perkebunan	Program Peningkatan pengolahan dan pemasaran produk perkebunan						12,097,363,833		8,757,719,711		15,062,525,304		15,887,795,733		51,805,404,581	Bidang Pengolahan Pemasaran dan Usaha Perkebunan	Dinas Perkebunan	
				1	Laju Petani Yang Mengolah Produk Primer	(Jumlah Petani Yang Mengolah Produk Primer T Dikurangi Petani Yang Mengolah Produk Primer T-1) Dibagi Petani Yang Mengolah Produk Primer T-1 Dikali 100%	Persen	N/A	N/A	2		2		2		2		2			



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON III		PERANGKAT DAERAH
							2017		2018		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				2	Laju Petani yang melakukan inovasi pemasaran	Jumlah Petani Yang Melakukan Inovasi Pemasaran T. Dikurangi Jumlah Petani Yang Melakukan Inovasi Pemasaran T-1 Dibagi Jumlah Petani Yang Melakukan Inovasi Pemasaran T-1 X100%	Persen	N/A	N/A	2											
459		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Ptd Balai Pengembangan Dan Produksi Benih Perkebunan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	100	100	100	489,624,000	100	575,261,280	100	667,118,496	100	665,942,957	100	2,397,946,733	BPPBP	Dinas Perkebunan	
460		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Perkebunan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	100	100	100	704,721,500	100	827,980,230	100	960,191,386	100	958,499,419	100	3,451,392,535	BPSBP	Dinas Perkebunan	
461		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Perlindungan Perkebunan	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja UPTD Balai Perlindungan Perkebunan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	100	100	100	569,454,000	100	669,053,880	100	775,887,816	100	774,520,613	100	2,788,916,309	BPP	Dinas Perkebunan	
462		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Perkebunan							4,436,311,000		4,841,525,920		5,569,976,544		5,498,333,315		20,346,146,779	Sekretaris	Dinas Perkebunan	
				1	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di Dinas Perkebunan	Jumlah ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Dibagi Jumlah ASN Dinas Pendidikan X100%	Persen	95	90	100			100		100		100				
				2	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Dinas Perkebunan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	99.17	99.58	100			100		100		100				
				3	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Dinas Perkebunan	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100			100		100		100				
				4	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Dinas Perkebunan	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	99.84	98.95	100			100		100		100				
				5	Persentase Ketersediaan Data Kinerja Dinas Perkebunan	Jumlah Data Kinerja Dinas Perkebunan Yang Disediakan/Jumlah Data Kinerja (Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Dan Kegiatan) Dinas Perkebunan Yang Seharusnya Disediakan*100	Persen	100	100	100			100		100		100				
463		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan							1,528,313,000		1,710,941,860		1,652,462,428		1,707,968,322		6,599,685,610	BPPBP	Dinas Perkebunan	
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Balai Pengembangan Dan Produksi Benih Perkebunan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	100	99.05	99.45	100			100		100		100				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Balai Pengembangan Dan Produksi Benih Perkebunan	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	100	100	100	100			100		100		100				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Balai Pengembangan Dan Produksi Benih Perkebunan	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	100	100	100	100			100		100		100				
464		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan							1,439,417,250		1,627,645,000		1,749,430,000		1,795,860,000		6,612,352,250	BPSBP	Dinas Perkebunan	
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Perkebunan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	100	99.05	99.45	100			100		100		100				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Perkebunan	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	100	100	100	100			100		100		100				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Perkebunan	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	100	100	100	100			100		100		100				
465		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Perlindungan Perkebunan							1,596,566,540		1,805,645,278		1,571,352,007		1,623,471,109		6,597,034,934	BPP	Dinas Perkebunan	
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Balai Perlindungan Perkebunan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	100	100	100	100			100		100		100				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Balai Perlindungan Perkebunan	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	100	100	100	100			100		100		100				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Balai Perlindungan Perkebunan	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	100	100	100	100			100		100		100				
466		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perkebunan	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Dinas Perkebunan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	100	100	100	487,850,000	100	573,177,000	100	664,701,400	100	663,530,120	100	2,389,258,520	BPP	Dinas Perkebunan	
4			Kehutanan							96,517,682,521		107,150,750,518		111,539,813,359		116,359,873,660		431,567,820,058			



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE						PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH
							2017	2018	K (10)	2020	2021	2022	2023	K (18)	2024	2025				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Rp. (11)	K (12)	Rp. (13)	K (14)	Rp. (15)	K (16)	Rp. (17)	K (18)	Rp. (19)	(20)	(21)
467	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase tutupan hutan	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Berkurangnya Luas Lahan Kritis yang ditangani	Jumlah luas lahan kritis yang ditangani dibagi jumlah lahan kritis x100	Persen	0.65	0.65	0.65	893,365,000	0.65	1,073,003,800	0.65	1,248,411,450	0	1,263,489,018	0	4,478,269,268	Bidang Pengelolaan DAS	Dinas kehutanan
468	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase tutupan hutan	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) CDK Wilayah I	Berkurangnya Luas Persentase Lahan Kritis Di CDK Wilayah I	Jumlah luas lahan kritis yang ditangani dibagi jumlah lahan kritis x100	Persen	1.21	1.21	1.21	3,847,987,500	1.56	4,977,065,515	1.85	5,877,670,816	1	6,733,060,648	1	21,435,784,479	CDK Wilayah I	Dinas kehutanan
469	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase tutupan hutan	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) CDK Wilayah II	Berkurangnya Luas Persentase Lahan Kritis Di CDK Wilayah II	Jumlah luas lahan kritis yang ditangani dibagi jumlah lahan kritis x100	Persen	N/A	N/A	1.31	4,076,890,170	2.22	5,026,654,187	2.22	5,476,608,707	2	5,578,957,545	2	20,159,110,608	CDK Wilayah II	Dinas kehutanan
470	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase tutupan hutan	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) CDK Wilayah III	Berkurangnya Luas Persentase Lahan Kritis Di CDK Wilayah III	Jumlah luas lahan kritis yang ditangani dibagi jumlah lahan kritis x100	Persen	N/A	N/A	0.82	2,813,502,244	0.40	5,018,125,484	0.45	5,610,858,532	0	5,739,619,415	0	19,182,105,675	CDK Wilayah III	Dinas kehutanan
471	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase tutupan hutan	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) CDK Wilayah IV	Berkurangnya Luas Persentase Lahan Kritis Di CDK Wilayah IV	Jumlah luas lahan kritis yang ditangani dibagi jumlah lahan kritis x100	Persen	N/A	N/A	0.31	3,457,775,698	0.31	3,928,922,666	0.26	4,391,652,311	0	4,384,366,612	0	16,162,717,287	CDK Wilayah IV	Dinas kehutanan
472	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase tutupan hutan	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) CDK Wilayah V	Berkurangnya Luas Persentase Lahan Kritis Di CDK Wilayah V	Jumlah luas lahan kritis yang ditangani dibagi jumlah lahan kritis x100	Persen	N/A	N/A	0.87	7,935,066,101	0.78	6,923,344,913	0.70	7,766,429,238	1	8,124,399,717	1	30,749,239,970	CDK Wilayah V	Dinas kehutanan
473	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase tutupan hutan	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) CDK Wilayah VI	Berkurangnya Luas Persentase Lahan Kritis Di CDK Wilayah VI	Jumlah luas lahan kritis yang ditangani dibagi jumlah lahan kritis x100	Persen	N/A	N/A	0.76	4,041,959,559	0.90	4,948,273,015	0.90	5,534,020,816	1	5,655,097,928	1	20,179,351,318	CDK Wilayah VI	Dinas kehutanan
474	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase tutupan hutan	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) CDK Wilayah VII	Berkurangnya Luas Persentase Lahan Kritis Di CDK Wilayah VII	Jumlah luas lahan kritis yang ditangani dibagi jumlah lahan kritis x100	Persen	N/A	N/A	1.32	4,230,782,711	1.32	4,852,626,482	1.32	5,439,968,081	1	5,578,048,724	1	20,101,425,998	CDK Wilayah VII	Dinas kehutanan
475	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase tutupan hutan	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) CDK Wilayah VIII	Berkurangnya Luas Persentase Lahan Kritis Di CDK Wilayah VIII	Jumlah luas lahan kritis yang ditangani dibagi jumlah lahan kritis x100	Persen	N/A	N/A	1.70	4,462,511,612	3.00	5,795,330,773	3.00	6,476,942,800	3	6,718,720,915	3	23,453,506,100	CDK Wilayah VIII	Dinas kehutanan
476	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase tutupan hutan	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) CDK Wilayah IX	Berkurangnya Luas Persentase Lahan Kritis Di CDK Wilayah IX	Jumlah luas lahan kritis yang ditangani dibagi jumlah lahan kritis x100	Persen	N/A	N/A	3.35	5,119,717,445	3.29	5,857,060,397	3.29	6,612,744,585	3	6,845,521,797	3	24,435,044,224	CDK Wilayah IX	Dinas kehutanan
477	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase tutupan hutan	Program Serifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase sumber benih yang terbangun	jumlah sumber benih yang dibangun dibagi jumlah sumber benih yang direncanakan x100%	Persen	100	100	100	1,850,125,000	100	2,264,515,000	100	2,663,966,250	100	2,651,551,650	100	9,430,157,900	UPTD SPTH	Dinas kehutanan
478	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase tutupan hutan	Program Prakondisi dan Penataan Batas Kawasan Hutan	Persentase Kesiapan Dokumen Arahan dan Dokumen Tata Batas	Jumlah Dokumen yang disusun dibagi Dokumen yang direncanakan x 100 %	Persen	100	100	100	880,000,000	100	968,000,000	100	722,333,700	100	981,653,708	100	3,551,987,408	Bidang Pemolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Dinas kehutanan
479	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase tutupan hutan	Program Mitigasi dan Adaptasi perubahan iklim Sektor Kehutanan	Persentase penurunan emisi sektor kehutanan	Jumlah penyerapan emisi sektor kehutanan tahun ke n dibagi rencana penyerapan emisi 2030 x 100 %	Persen	100	100	100	110,000,000	100	121,000,000	100	133,100,000	100	146,410,000	100	510,510,000	Bidang Pemolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Dinas kehutanan
480	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Tingkat kerusakan hutan	Program Perlindungan Hutan	Tingkat kerusakan hutan	luas kerusakan hutan tahun ke n dibagi luas kawasan hutan x 100 %	Persen	0.8	0.8	0.8	675,275,000	0.7	452,903,000	0.6	532,793,250	1	530,310,330	1	2,191,281,580	Bidang Perlindungan dan KSDAE	Dinas kehutanan
481	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Tingkat kerusakan hutan	Program Perlindungan Hutan TAHURA Ir. H. Djuanda	Tingkat kerusakan hutan di TAHURA Ir. H. Djuanda	luas kerusakan hutan tahun ke n dibagi luas kawasan hutan x 100 %	Persen	0.8	0.8	0.8	331,075,000	0.7	405,229,000	0.6	476,709,750	1	474,488,190	1	1,687,501,940	UPTD TAHURA Ir. H. Djuanda	Dinas kehutanan
482	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Tingkat kerusakan hutan	Program Perlindungan Hutan CDK Wilayah I	Tingkat kerusakan hutan di CDK Wilayah I	luas kerusakan hutan tahun ke n dibagi luas kawasan hutan x 100 %	Persen	0.8	0.8	0.8	120,000,000	0.7	130,000,000	0.6	145,000,000	1	160,000,000	1	555,000,000	CDK Wilayah I	Dinas kehutanan
483	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Tingkat kerusakan hutan	Program Perlindungan Hutan CDK Wilayah II	Tingkat kerusakan hutan di CDK Wilayah II	luas kerusakan hutan tahun ke n dibagi luas kawasan hutan x 100 %	Persen	0.8	0.8	0.8	120,000,000	0.7	130,000,000	0.6	145,000,000	1	160,000,000	1	555,000,000	CDK Wilayah II	Dinas kehutanan
484	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Tingkat kerusakan hutan	Program Perlindungan Hutan CDK Wilayah III	Tingkat kerusakan hutan di CDK Wilayah III	luas kerusakan hutan tahun ke n dibagi luas kawasan hutan x 100 %	Persen	0.8	0.8	0.8	165,000,000	0.7	181,500,000	0.6	199,650,000	1	219,615,000	1	765,765,000	CDK Wilayah III	Dinas kehutanan
485	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Tingkat kerusakan hutan	Program Perlindungan Hutan CDK Wilayah IV	Tingkat kerusakan hutan di CDK Wilayah IV	luas kerusakan hutan tahun ke n dibagi luas kawasan hutan x 100 %	Persen	0.8	0.8	0.8	120,000,000	0.7	130,000,000	0.6	145,000,000	1	160,000,000	1	555,000,000	CDK Wilayah IV	Dinas kehutanan
486	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Tingkat kerusakan hutan	Program Perlindungan Hutan CDK Wilayah V	Tingkat kerusakan hutan di CDK Wilayah V	luas kerusakan hutan tahun ke n dibagi luas kawasan hutan x 100 %	Persen	0.8	0.8	0.8	200,000,000	0.7	220,000,000	0.6	242,000,000	1	111,644,280	1	773,644,280	CDK Wilayah IV	Dinas kehutanan
487	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Tingkat kerusakan hutan	Program Perlindungan Hutan CDK Wilayah VI	Tingkat kerusakan hutan di CDK Wilayah VI	luas kerusakan hutan tahun ke n dibagi luas kawasan hutan x 100 %	Persen	0.8	0.8	0.8	120,000,000	0.7	130,000,000	0.6	145,000,000	1	160,000,000	1	555,000,000	CDK Wilayah VI	Dinas kehutanan
488	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Tingkat kerusakan hutan	Program Perlindungan Hutan CDK Wilayah VII	Tingkat kerusakan hutan di CDK Wilayah VII	luas kerusakan hutan tahun ke n dibagi luas kawasan hutan x 100 %	Persen	0.8	0.8	0.8	120,000,000	0.7	130,000,000	0.6	145,000,000	1	160,000,000	1	555,000,000	CDK Wilayah VII	Dinas kehutanan
489	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Tingkat kerusakan hutan	Program Perlindungan Hutan CDK Wilayah VIII	Tingkat kerusakan hutan di CDK Wilayah VIII	luas kerusakan hutan tahun ke n dibagi luas kawasan hutan x 100 %	Persen	0.8	0.8	0.8	120,000,000	0.7	130,000,000	0.6	145,000,000	1	160,000,000	1	555,000,000	CDK Wilayah VIII	Dinas kehutanan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH
							2017	2018	2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE			
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
490	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Tingkat kerusakan hutan	Program Perlindungan Hutan CDK Wilayah IX	1	Tingkat kerusakan hutan di CDK Wilayah IX	Persen	0.8	0.8	0.8	120,000,000	0.7	130,000,000	0.6	145,000,000	1	160,000,000	1	555,000,000	CDK Wilayah IX	Dinas kehutanan
491	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Tingkat kerusakan hutan	Program Perlindungan Hutan Daerah Kiarapayung	1	Tingkat kerusakan hutan di Hutan Daerah Kiarapayung	Persen	0.8	0.8	0.8	110,000,000	0.7	121,000,000	0.6	133,100,000	1	146,410,000	1	510,510,000	CDK Wilayah IX	Dinas kehutanan
492	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan	Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya	1	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan	Persen	10	10	10	850,000,000	10	623,370,000	10	703,917,500	10	744,960,700	10.00	2,922,248,200	Bidang Perlindungan dan KSDAE	Dinas kehutanan
493	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan	Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya TAHURA Ir. H. Djuanda	1	Persentase peningkatan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan di TAHURA Ir. H. Djuanda	Persen	10	10	10	214,225,000	10	262,207,000	10	308,459,250	10	307,021,770	10.00	1,091,913,020	UPTD TAHURA Ir. H. Djuanda	Dinas kehutanan
494	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan	Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya CDK Wilayah I	1	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan di CDK Wilayah I	Persen	10	10	10	165,000,000	10	181,500,000	10	199,650,000	10	219,615,000	10.00	765,765,000	CDK Wilayah I	Dinas kehutanan
495	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan	Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya CDK Wilayah II	1	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan di CDK Wilayah II	Persen	10	10	10	165,000,000	10	181,500,000	10	199,650,000	10	219,615,000	10.00	765,765,000	CDK Wilayah II	Dinas kehutanan
496	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan	Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya CDK Wilayah III	1	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan di CDK Wilayah III	Persen	10	10	10	165,000,000	10	181,500,000	10	199,650,000	10	219,615,000	10.00	765,765,000	CDK Wilayah III	Dinas kehutanan
497	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan	Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya CDK Wilayah IV	1	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan di CDK Wilayah IV	Persen	10	10	10	165,000,000	10	181,500,000	10	199,650,000	10	219,615,000	10.00	765,765,000	CDK Wilayah IV	Dinas kehutanan
498	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan	Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya CDK Wilayah V	1	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan di CDK Wilayah V	Persen	10	10	10	165,000,000	10	181,500,000	10	199,650,000	10	219,615,000	10.00	765,765,000	CDK Wilayah V	Dinas kehutanan
499	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan	Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya CDK Wilayah VI	1	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan di CDK Wilayah VI	Persen	10	10	10	165,000,000	10	181,500,000	10	199,650,000	10	219,615,000	10.00	765,765,000	CDK Wilayah VI	Dinas kehutanan
500	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan	Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya CDK Wilayah VII	1	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan di CDK Wilayah VII	Persen	10	10	10	165,000,000	10	181,500,000	10	199,650,000	10	219,615,000	10.00	765,765,000	CDK Wilayah VII	Dinas kehutanan
501	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan	Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya CDK Wilayah VIII	1	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan di CDK Wilayah VIII	Persen	10	10	10	165,000,000	10	181,500,000	10	199,650,000	10	219,615,000	10.00	765,765,000	CDK Wilayah VIII	Dinas kehutanan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
502	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan	Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya CDK Wilayah IX	1	Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan di CDK Wilayah IX	Persen	10	10	10	165,000,000	10	181,500,000	10	199,650,000	10	219,615,000	10.00	765,765,000	CDK Wilayah IX	Dinas kehutanan	
503	a. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b. Nilai Tukar Petani (NTP)	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	Program Peningkatan Produksi Hasil Hutan	1	Jumlah Produksi Hasil Hutan	Persen	N/A	N/A	1	1,297,070,000	1	1,458,648,400	1	1,485,734,800	1	1,428,099,112	1	5,669,552,312	Bidang Bina Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas kehutanan	
504	a. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b. Nilai Tukar Petani (NTP)	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	Program Peningkatan Produksi Hasil Hutan CDK Wilayah I	1	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di CDK Wilayah I	Persen	N/A	N/A	1	244,158,107	1	268,573,917	1	295,431,309	1	324,974,440	1	1,133,137,772	CDK Wilayah I	Dinas kehutanan	
505	a. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b. Nilai Tukar Petani (NTP)	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	Program Peningkatan Produksi Hasil Hutan CDK Wilayah II	1	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di CDK Wilayah II	Persen	N/A	N/A	1	244,158,107	1	268,573,917	1	295,431,309	1	324,974,440	1	1,133,137,772	CDK Wilayah II	Dinas kehutanan	
506	a. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b. Nilai Tukar Petani (NTP)	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	Program Peningkatan Produksi Hasil Hutan CDK Wilayah III	1	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di CDK Wilayah III	Persen	N/A	N/A	1	900,000,000	1	990,000,000	1	1,089,000,000	1	1,197,900,000	1	4,176,900,000	CDK Wilayah III	Dinas kehutanan	
507	a. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b. Nilai Tukar Petani (NTP)	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	Program Peningkatan Produksi Hasil Hutan CDK Wilayah IV	1	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di CDK Wilayah IV	Persen	N/A	N/A	1	1,068,000,000	1	1,174,800,000	1	1,292,280,000	1	1,421,508,000	1	4,956,588,000	CDK Wilayah IV	Dinas kehutanan	
508	a. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b. Nilai Tukar Petani (NTP)	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	Program Peningkatan Produksi Hasil Hutan CDK Wilayah V	1	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di CDK Wilayah V	Persen	N/A	N/A	1	960,000,000	1	1,056,000,000	1	1,161,600,000	1	1,277,760,000	1	4,455,360,000	CDK Wilayah V	Dinas kehutanan	
509	a. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b. Nilai Tukar Petani (NTP)	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	Program Peningkatan Produksi Hasil Hutan CDK Wilayah VI	1	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di CDK Wilayah VI	Persen	N/A	N/A	1	600,000,000	1	660,000,000	1	-	1	798,600,000	1	2,058,600,000	CDK Wilayah VI	Dinas kehutanan	
510	a. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b. Nilai Tukar Petani (NTP)	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	Program Peningkatan Produksi Hasil Hutan CDK Wilayah VII	1	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di CDK Wilayah VII	Persen	N/A	N/A	1	244,158,107	1	268,573,917	1	295,431,309	1	324,974,440	1	1,133,137,772	CDK Wilayah VII	Dinas kehutanan	
511	a. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b. Nilai Tukar Petani (NTP)	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	Program Peningkatan Produksi Hasil Hutan CDK Wilayah VIII	1	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di CDK Wilayah VIII	Persen	N/A	N/A	1	244,158,107	1	268,573,917	1	295,431,309	1	324,974,440	1	1,133,137,772	CDK Wilayah VIII	Dinas kehutanan	
512	a. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b. Nilai Tukar Petani (NTP)	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	Program Peningkatan Produksi Hasil Hutan CDK Wilayah IX	1	Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di CDK Wilayah IX	Persen	N/A	N/A	1	244,158,107	1	268,573,917	1	295,431,309	1	324,974,440	1	1,133,137,772	CDK Wilayah IX	Dinas kehutanan	
513	a. Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) b. Nilai Tukar Petani (NTP)	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	Program Peningkatan Pengolahan Hasil Hutan	1	Jumlah Produksi Olahan Hasil Hutan	Persen	N/A	N/A	1	871,942,500	1	1,046,783,100	1	1,217,565,525	1	1,232,786,841	1	4,369,077,966	UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan	Dinas kehutanan	
514		Persentase peningkatan penerimaan jasa wisata alam	Program Pemanfaatan Jasa Lingkungan	1	Jumlah Kerjasama Pemanfaatan Jasa Lingkungan	Dokumen	N/A	N/A	1	160,000,000	1	176,000,000	1	193,600,000	1	212,960,000	1	742,560,000	Bidang Perlindungan dan KSDAE	Dinas kehutanan	
515	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	Persentase peningkatan penerimaan jasa wisata alam	Program Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Ir. H. Djuanda	1	Persentase peningkatan penerimaan jasa wisata alam	Persen	10	10	10	6,479,574,475	10	7,180,170,437	10	7,937,888,192	10	8,667,694,237	10	30,265,327,341	UPTD Ir. H. Djuanda	Dinas kehutanan	
516	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Program Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	1	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Persen	50	50	50	1,325,587,500	35	1,657,100,500	25	1,995,223,875	20	1,997,174,055	20	6,975,085,930	Bidang Bina Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas kehutanan	
				1	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Persen	50	50	50	374,000,000	35	411,400,000	25	309,723,700	20	327,782,708	20	1,422,906,408	CDK Wilayah I	Dinas kehutanan	
				2	Persentase Layanan Perizinan Perhutanan Sosial	Persen	90	90	90		90		100		100		100				
517	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Program Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan CDK Wilayah I	1	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Persen	50	50	50	374,000,000	35	411,400,000	25	309,723,700	20	327,782,708	20	1,422,906,408	CDK Wilayah I	Dinas kehutanan	
518	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Program Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan CDK Wilayah II	1	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Persen	50	50	50	374,000,000	35	411,400,000	25	309,723,700	20	327,782,708	20	1,422,906,408	CDK Wilayah II	Dinas kehutanan	
519	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Program Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan CDK Wilayah III	1	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Persen	50	50	50	374,000,000	35	411,400,000	25	309,723,700	20	327,782,708	20	1,422,906,408	CDK Wilayah III	Dinas kehutanan	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL							KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE							PENANGGUNG JAWAB ESELON II	PERANGKAT DAERAH		
							2017		2018		2020		2021		2022		2023		K				Rp.	
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(19)	(19)				
520	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Program Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan CDK Wilayah IV	1	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Jumlah Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari pada tahun n dikurangi jumlah Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari tahun n-1 dibagi jumlah Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari tahun n-1 x100%	Persen	50	50	50	519,700,000	35	600,644,000	25	539,744,700	20	545,587,548	20	2,205,676,248	CDK Wilayah IV	Dinas kehutanan			
521	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Program Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan CDK Wilayah V	1	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Jumlah Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari pada tahun n dikurangi jumlah Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari tahun n-1 dibagi jumlah Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari tahun n-1 x100%	Persen	50	50	50	711,600,000	35	821,392,000	25	932,668,000	20	669,865,680	20	3,135,525,680	CDK Wilayah V	Dinas kehutanan			
522	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Program Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan CDK Wilayah VI	1	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Jumlah Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari pada tahun n dikurangi jumlah Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari tahun n-1 dibagi jumlah Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari tahun n-1 x100%	Persen	50	50	50	374,000,000	35	455,444,000	25	696,190,000	20	792,134,000	20	2,317,768,000	CDK Wilayah VI	Dinas kehutanan			
523	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Program Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan CDK Wilayah VII	1	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Jumlah Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari pada tahun n dikurangi jumlah Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari tahun n-1 dibagi jumlah Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari tahun n-1 x100%	Persen	50	50	50	374,000,000	35	411,400,000	25	309,723,700	20	327,782,708	20	1,422,906,408	CDK Wilayah VII	Dinas kehutanan			
524	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Program Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan CDK Wilayah VIII	1	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Jumlah Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari pada tahun n dikurangi jumlah Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari tahun n-1 dibagi jumlah Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari tahun n-1 x100%	Persen	50	50	50	374,000,000	35	411,400,000	25	309,723,700	20	327,782,708	20	1,422,906,408	CDK Wilayah VIII	Dinas kehutanan			
525	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Program Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan CDK Wilayah IX	1	Persentase peningkatan Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari	Jumlah Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari pada tahun n dikurangi jumlah Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari tahun n-1 dibagi jumlah Unit Pengelolaan Hutan Rakyat yang dikelola secara lestari tahun n-1 x100%	Persen	50	50	50	374,000,000	35	411,400,000	25	309,723,700	20	327,782,708	20	1,422,906,408	CDK Wilayah IX	Dinas kehutanan			
526		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kehutanan	1	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Kehutanan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia dibagi jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan x100%	Persen	100	100	100	467,400,000	100	572,088,000	100	673,002,000	100	669,865,680	100	2,382,355,680	Sekretariat	Dinas kehutanan			
527		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I	1	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia dibagi jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan x100%	Persen	30	30	30	1,168,500,000	40	238,370,000	50	278,100,000	60	272,610,000	60	1,957,580,000	CDK Wilayah I	Dinas kehutanan			
528		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II	1	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia dibagi jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan x100%	Persen	30	30	30	194,750,000	40	1,300,200,000	50	278,100,000	60	272,610,000	60	2,045,660,000	CDK Wilayah II	Dinas kehutanan			
529		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III	1	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia dibagi jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan x100%	Persen	30	30	30	194,750,000	40	1,300,200,000	50	278,100,000	60	272,610,000	60	2,045,660,000	CDK Wilayah III	Dinas kehutanan			
530		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV	1	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia dibagi jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan x100%	Persen	30	30	30	194,750,000	40	1,300,200,000	50	224,334,000	60	223,288,560	60	1,942,572,560	CDK Wilayah IV	Dinas kehutanan			
531		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V	1	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia dibagi jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan x100%	Persen	30	30	30	2,483,062,500	40	1,300,200,000	50	224,334,000	60	223,288,560	60	4,230,885,600	CDK Wilayah V	Dinas kehutanan			
532		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI	1	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia dibagi jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan x100%	Persen	30	30	30	194,750,000	40	1,300,200,000	50	278,100,000	60	272,610,000	60	2,045,660,000	CDK Wilayah VI	Dinas kehutanan			
533		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII	1	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia dibagi jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan x100%	Persen	30	30	30	1,947,500,000	40	238,370,000	50	278,100,000	60	272,610,000	60	2,736,580,000	CDK Wilayah VII	Dinas kehutanan			
534		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII	1	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia dibagi jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan x100%	Persen	30,00	30,00	70	194,750,000	80	1,300,200,000	90	278,100,000	100	272,610,000	100	2,045,660,000	CDK Wilayah VIII	Dinas kehutanan			
535		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX	1	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia dibagi jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan x100%	Persen	30,00	30,00	70	1,558,000,000	80	238,370,000	90	278,100,000	100	272,610,000	100	2,347,080,000	CDK Wilayah IX	Dinas kehutanan			
536		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA) Ir.H. Djuaanda	1	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA) Ir.H. Djuaanda	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia dibagi jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan x100%	Persen	30,00	30,00	100	1,168,500,000	100	281,710,000	100	324,450,000	100	314,550,000	100	2,089,210,000	UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA) Ir.H. Djuaanda	Dinas kehutanan			
537		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	1	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia dibagi jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan x100%	Persen	30,00	30,00	100	342,760,000	100	238,370,000	100	280,417,500	100	279,110,700	100	1,140,658,200	UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	Dinas kehutanan			
538		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan	1	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia dibagi jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan x100%	Persen	30,00	30,00	100	584,250,000	100	650,100,000	100	695,250,000	100	629,100,000	100	2,558,700,000	UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan	Dinas kehutanan			
539		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Kehutanan								4,047,301,712		4,838,038,161		5,577,587,187		5,480,194,880		19,943,121,941	Sekretariat	Dinas kehutanan			
				1	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di Dinas Kehutanan	Jumlah ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi dibagi jumlah ASN dinas kehutanan x100%	Persen	70	70	70			70		70				70					
				2	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di Dinas Kehutanan	jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana x100%	Persen	100	100	100					100				100					



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH	
							2017	2018	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				3	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di Dinas Kehutanan	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	Persen	100	100	100		100		100	100		100	100			
				4	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Dinas Kehutanan	Jumlah dokumen rencana dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan dibagi jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan x100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
				5	Persentase ketersediaan data Kinerja Dinas Kehutanan	Jumlah data Kinerja Dinas Kehutanan yang disediakan/Jumlah data kinerja (indikator kinerja tujuan, sasaran program dan kegiatan) Dinas Kehutanan yang seharusnya disediakan x100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
				6	Persentase Terbangunnya Aplikasi Teknologi Informasi Inovasi Pembangunan Kehutanan	Jumlah Aplikasi Teknologi Informasi Inovasi Pembangunan /Jumlah Teknologi Informasi Pembangunan Kehutanan x 100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
	540	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I								1,079,775,000		1,257,773,000		1,436,360,750		1,344,194,203		5,118,102,953	CDK Wilayah I	Dinas kehutanan
				1	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I	jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan Prasarana x100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
				2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
	541	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II								1,140,715,000		1,155,470,800		1,322,735,700		1,371,659,388		4,990,580,888	CDK Wilayah II	Dinas kehutanan
				1	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II	jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan Prasarana x100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
				2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
	542	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III								1,130,715,000		1,144,470,800		1,310,635,700		1,358,349,388		4,944,170,888	CDK Wilayah III	Dinas kehutanan
				1	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III	jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan Prasarana x100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
				2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
	543	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV								1,130,715,000		1,144,470,800		1,310,635,700		1,358,349,388		4,944,170,888	CDK Wilayah IV	Dinas kehutanan
				1	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV	jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan Prasarana x100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
				2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
	544	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V								1,113,187,500		1,123,017,500		1,285,398,125		1,333,229,425		4,854,832,550	CDK Wilayah V	Dinas kehutanan
				1	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V	jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan Prasarana x100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
				2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
	545	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI								1,073,853,065		1,074,872,960		1,228,761,083		1,276,856,323		4,654,343,430	CDK Wilayah VI	Dinas kehutanan
				1	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI	jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan Prasarana x100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
				2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
	546	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII								1,130,715,000		1,144,470,800		1,310,635,700		1,358,349,388		4,944,170,888	CDK Wilayah VII	Dinas kehutanan
				1	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII	jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan Prasarana x100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
				2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
	547	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII								980,715,000		1,135,285,800		1,291,426,950		1,351,894,038		4,759,321,788	CDK Wilayah VIII	Dinas kehutanan
				1	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII	jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan Prasarana x100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100			



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE						PENANGGUNG JAWAB ESELON II	PERANGKAT DAERAH	
							2017	2018	2020		2021		2022		2023		K	Rp.			
							(8)	(9)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
							100	100	100		100		100		100		100				
548		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	Persen	100	100	100		965,715,000		1,118,785,800		1,273,276,950		1,331,929,038		4,689,706,788	CDK Wilayah IX	Dinas kehutanan
							100	100	100				100		100		100				
							100	100	100				100		100		100				
549		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA) Ir. H. Djuanda	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	Persen	100	100	100		2,461,725,000		1,718,986,808		2,012,138,282		2,017,937,725		8,210,787,815	UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA) Ir. H. Djuanda	Dinas kehutanan
							100	100	100				100		100		100				
							100	100	100				100		100		100				
550		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan Prasarana x100%	Persen	100	100	100		1,146,159,250		1,282,703,400		1,316,265,225		1,351,921,989		5,097,049,864	UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	Dinas kehutanan
							100	100	100				100		100		100				
							100	100	100				100		100		100				
551		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	Persen	100	100	100		1,100,145,446		1,101,942,634		1,255,287,635		1,311,714,120		4,769,089,835	UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan	Dinas kehutanan
							100	100	100				100		100		100				
							100	100	100				100		100		100				
5			Energi Dan Sumber Daya Mineral								36,800,338,456		43,246,471,871		48,294,305,699		47,435,151,725		175,776,267,751		
552	Konsumsi listrik per kapita	Jumlah konsumsi listrik di Jawa Barat	Program Ketenagalistrakan	Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrakan Yang Taat Terhadap Aturan	Jumlah Pelaku Usaha Bidang Ketenagalistrakan Yang Taat Terhadap Aturan Dibagi Jumlah Pelaku Usaha Bidang Ketenagalistrakan Di Jawa Barat Dikali 100%	Persen	12.5	38.97	83.40		2,422,650,000		2,690,175,000		3,497,865,000		3,274,810,000		11,885,500,000	Bidang Ketenagalistrakan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
							79.52	49.88	80				82		82		85		85		
							100	100	100				100		100		100		100		
553	Konsumsi listrik per kapita	Jumlah konsumsi listrik di Jawa Barat	Program Ketenagalistrakan Wilayah I Cianjur	Persentase Instalasi Tenaga Listrik Yang Laik Operasi	Jumlah Instalasi Tenaga Listrik Yang Teregistrasi Laik Operasi Dibagi Total Instalasi Tenaga Listrik Yang Mengajukan Permohonan Registrasi Slo X 100%	Persen	20	20	40		372,000,000		380,680,000		356,925,000		829,335,000		1,938,940,000	Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
							100	100	100				100		100		100		100		
							100	100	100				100		100		100		100		
554	Konsumsi listrik per kapita	Jumlah konsumsi listrik di Jawa Barat	Program Ketenagalistrakan Wilayah II Bogor	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	Jumlah Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Dibagi Jumlah Kab/Kota Dikali 100%	Persen	20	20	40		231,500,000		238,010,000		316,565,000		298,855,000		1,084,930,000	Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
							100	100	100				100		100		100		100		
							100	100	100				100		100		100		100		
555	Konsumsi listrik per kapita	Jumlah konsumsi listrik di Jawa Barat	Program Ketenagalistrakan Wilayah III Purwakarta	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	Jumlah Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Dibagi Jumlah Kab/Kota Dikali 100%	Persen	20	20	40		376,875,000		385,012,500		434,411,250		414,803,750		1,611,102,500	Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
							100	100	100				100		100		100		100		
							20	20	40				60		80		100		100		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESEKON III	PERANGKAT DAERAH							
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE						
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)									
				2	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	Jumlah Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Dibagi Jumlah Kab/Kota Dikali 100%	Persen	100	100	100																	
556	Konsumsi listrik per kapita	Jumlah konsumsi listrik di Jawa Barat	Program Ketenagalistrikan Wilayah IV Bandung								241,750,000		249,345,000		328,462,500		150,000,000		969,557,500		Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral					
				1	Persentase Pelaku Usaha Ketenagalistrikan Yang Taat Peraturan Di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	Jumlah Pelaku Usaha Bidang Ketenagalistrikan Yang Taat Terhadap Aturan Dibagi Jumlah Pelaku Usaha Bidang Ketenagalistrikan Di Wilayah Iv Bandung Dikali 100%	Persen	20	20	40		60		80		100		100									
				2	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	Jumlah Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Dibagi Jumlah Kab/Kota Dikali 100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100									
557	Konsumsi listrik per kapita	Jumlah konsumsi listrik di Jawa Barat	Program Ketenagalistrikan Wilayah V Sumedang								312,000,000		320,680,000		414,155,000		391,385,000		1,438,220,000		Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral					
				1	Persentase Pelaku Usaha Ketenagalistrikan Yang Taat Peraturan Di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	Jumlah Pelaku Usaha Bidang Ketenagalistrikan Yang Taat Terhadap Aturan Dibagi Jumlah Pelaku Usaha Bidang Ketenagalistrikan Di Wilayah V Sumedang Dikali 100%	Persen	20	20	40		60		80		100		100									
				2	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	Jumlah Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Dibagi Jumlah Kab/Kota Dikali 100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100									
558	Konsumsi listrik per kapita	Jumlah konsumsi listrik di Jawa Barat	Program Ketenagalistrikan Wilayah VI Tasikmalaya								312,000,000		320,680,000		414,155,000		391,385,000		1,438,220,000		Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral					
				1	Persentase Pelaku Usaha Ketenagalistrikan Yang Taat Peraturan Di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	Jumlah Pelaku Usaha Bidang Ketenagalistrikan Yang Taat Terhadap Aturan Dibagi Jumlah Pelaku Usaha Bidang Ketenagalistrikan Di Wilayah Vi Tasikmalaya Dikali 100%	Persen	20	20	40		60		80		100		100									
				2	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	Jumlah Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Dibagi Jumlah Kab/Kota Dikali 100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100									
559	Konsumsi listrik per kapita	Jumlah konsumsi listrik di Jawa Barat	Program Ketenagalistrikan Wilayah VII Cirebon								291,750,000		299,345,000		378,462,500		359,487,500		1,329,045,000		Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral					
				1	Persentase Pelaku Usaha Ketenagalistrikan Yang Taat Peraturan Di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	Jumlah Pelaku Usaha Bidang Ketenagalistrikan Yang Taat Terhadap Aturan Dibagi Jumlah Pelaku Usaha Bidang Ketenagalistrikan Di Wilayah Vii Cirebon Dikali 100%	Persen	20	20	40		60		80		100		100									
				2	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	Jumlah Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Dibagi Jumlah Kab/Kota Dikali 100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100									
560	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (thdp BAU 2030)	Program Pengembangan dan Konservasi Energi								7,673,500,000		7,055,210,000		12,730,325,000		12,673,940,000		40,132,975,000		Bidang Energi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral					
				1	Persentase Energi Baru Dan Terbarukan	Jumlah EBT Yang Diterapkan Dibagi Jumlah EBT Yang Akan Dikembangkan Selama Lima Tahun X100%	Persen	4.9	14.7	37.9		58.6		79.03		100		100									
				2	Jumlah Reduksi Co2 Dari Bidang Energi (Tidak Termasuk Sektor Transportasi)	E-Jumlah Penghematan Energi X Faktor Konversi Dibagi 1000	Ton Co2Eq	59.4	63	70.3		74		78		81		81									
561	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (thdp BAU 2030)	Program Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Wilayah I Cianjur		Jumlah Konversi Energi Biogas + Jumlah Konversi Pits Dimana: -1. Jumlah Konversi Energi Biogas = Kapasitas Terpasang X Faktor Produksi X Faktor Operasi X Faktor Konversi Energi X Faktor Volume 2. Jumlah Konversi Energi Pits = Kapasitas Terpasang X Esh X Efficiency System X Faktor Operasi X Faktor Konversi Energi	SBM (Setara Barel Minyak)	N/A	N/A	250		688,500,000		250		618,715,000		250		928,005,000		250		893,130,000	250	3,128,350,000	Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
562	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (thdp BAU 2030)	Program Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Wilayah II Bogor		Jumlah Konversi Energi Biogas + Jumlah Konversi Pits Dimana: -1. Jumlah Konversi Energi Biogas = Kapasitas Terpasang X Faktor Produksi X Faktor Operasi X Faktor Konversi Energi X Faktor Volume 2. Jumlah Konversi Energi Pits = Kapasitas Terpasang X Esh X Efficiency System X Faktro Operasi X Faktor Konversi Energi	SBM (Setara Barel Minyak)	N/A	N/A	250		688,500,000		250		618,715,000		250		928,005,000		250		893,130,000	250	3,128,350,000	Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
563	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (thdp BAU 2030)	Program Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Wilayah III Purwakarta		Jumlah Konversi Energi Biogas + Jumlah Konversi Pits Dimana: -1. Jumlah Konversi Energi Biogas = Kapasitas Terpasang X Faktor Produksi X Faktor Operasi X Faktor Konversi Energi X Faktor Volume 2. Jumlah Konversi Energi Pits = Kapasitas Terpasang X Esh X Efficiency System X Faktro Operasi X Faktor Konversi Energi	SBM (Setara Barel Minyak)	N/A	N/A	250		688,500,000		250		618,715,000		250		928,005,000		250		893,130,000	250	3,128,350,000	Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL			2020			2021			2022			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE			PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH
							2017	2018		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)					
564	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (thdp BAU 2030)	Program Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Wilayah IV Bandung	1	Jumlah Pemanfaatan EBT Di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	Jumlah Konversi Energi Biogas + Jumlah Konversi Pits Dimana: 1. Jumlah Konversi Energi Biogas = Kapasitas Terpasang X Faktor Produksi X Faktor Operasi X Faktor Konversi Energi X Faktor Volume 2. Jumlah Konversi Energi Pits = Kapasitas Terpasang X Esh X Efficiency System X Faktor Operasi X Faktor Konversi Energi	SBM (Setara Barrel Minyak)	N/A	N/A	250	688,500,000	250	618,715,000	250	928,005,000	250	893,130,000	250	3,128,350,000	Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
565	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (thdp BAU 2030)	Program Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Wilayah V Sumedang	1	Jumlah Pemanfaatan EBT Di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	Jumlah Konversi Energi Biogas + Jumlah Konversi Pits Dimana: 1. Jumlah Konversi Energi Biogas = Kapasitas Terpasang X Faktor Produksi X Faktor Operasi X Faktor Konversi Energi X Faktor Volume 2. Jumlah Konversi Energi Pits = Kapasitas Terpasang X Esh X Efficiency System X Faktor Operasi X Faktor Konversi Energi	SBM (Setara Barrel Minyak)	N/A	N/A	250	688,500,000	250	618,715,000	250	928,005,000	250	893,130,000	250	3,128,350,000	Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
566	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (thdp BAU 2030)	Program Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Wilayah VI Tasikmalaya	1	Jumlah Pemanfaatan EBT Di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	Jumlah Konversi Energi Biogas + Jumlah Konversi Pits Dimana: 1. Jumlah Konversi Energi Biogas = Kapasitas Terpasang X Faktor Produksi X Faktor Operasi X Faktor Konversi Energi X Faktor Volume 2. Jumlah Konversi Energi Pits = Kapasitas Terpasang X Esh X Efficiency System X Faktor Operasi X Faktor Konversi Energi	SBM (Setara Barrel Minyak)	N/A	N/A	250	688,500,000	250	618,715,000	250	928,005,000	250	893,130,000	250	3,128,350,000	Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
567	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (thdp BAU 2030)	Program Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Wilayah VII Cirebon	1	Jumlah Pemanfaatan EBT Di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	Jumlah Konversi Energi Biogas + Jumlah Konversi Pits Dimana: 1. Jumlah Konversi Energi Biogas = Kapasitas Terpasang X Faktor Produksi X Faktor Operasi X Faktor Konversi Energi X Faktor Volume 2. Jumlah Konversi Energi Pits = Kapasitas Terpasang X Esh X Efficiency System X Faktor Operasi X Faktor Konversi Energi	SBM (Setara Barrel Minyak)	N/A	N/A	250	688,500,000	250	618,715,000	250	928,005,000	250	893,130,000	250	3,128,350,000	Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
568	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (thdp BAU 2030)	Program Pelayanan dan Pengembangan Laboratorium ESDM bidang energi	1	Persentase Komoditas EBT Yang Diuji Unjuk Kinerja Sebagai Bahan Penggunaan Kebijakan Bidang Energi	Jumlah Komoditas EBT Yang Diuji Unjuk Kinerja Sebagai Bahan Penggunaan Kebijakan Bidang Energi Dibagi Dengan Jumlah Komoditas EBT Yang Akan Dikembangkan Selama Lima Tahun X100%	Persen	N/A	N/A	50	200,000,000	50	200,000,000	100	250,000,000	100	148,855,000	100	798,855,000	UPTD Laboratorium ESDM	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
569	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi dan teknis	Program Pertambangan	1	Persentase Usaha Pertambangan Yang Tertib Teknis	Jumlah Pemegang Iup Yang Tertib Administrasi Dibagi Dengan Jumlah Pemegang Iup Di Jawa Barat X100%	Persen	30	35	45	1,270,750,000	50	1,217,405,000	55	1,400,775,000	60	1,228,310,000	60	5,117,240,000	Bidang Pertambangan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
				2	Persentase Usaha Pertambangan Yang Tertib Administrasi	Jumlah Pemegang Iup Yang Tertib Administrasi Dibagi Dengan Jumlah Pemegang Iup Di Jawa Barat	Persen	60	62.5	67		50	67.5	68	68.5	68.5		60					
570	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi dan teknis	Program Pertambangan Wilayah I Cianjur	1	Persentase Usaha Pertambangan Yang Tertib Administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	Jumlah Pemegang Iup Yang Tertib Administrasi Dibagi Dengan Jumlah Pemegang Iup Di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	Persen	60	62.5	67	184,800,000	67.5	203,280,000	68	250,000,000	68.5	127,590,000	68.5	765,670,000	Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
571	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi dan teknis	Program Pertambangan Wilayah II Bogor	1	Persentase Usaha Pertambangan Yang Tertib Administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	Jumlah Pemegang Iup Yang Tertib Administrasi Dibagi Dengan Jumlah Pemegang Iup Di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	Persen	60	62.5	67	114,400,000	67.5	119,000,000	68	150,000,000	68.5	200,000,000	68.5	583,400,000	Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
572	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi dan teknis	Program Pertambangan Wilayah III Purwakarta	1	Persentase Usaha Pertambangan Yang Tertib Administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	Jumlah Pemegang Iup Yang Tertib Administrasi Dibagi Dengan Jumlah Pemegang Iup Di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	Persen	60	62.5	67	175,000,000	67.5	192,500,000	68	250,000,000	68.5	127,590,000	68.5	745,090,000	Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
573	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi dan teknis	Program Pertambangan Wilayah IV Bandung	1	Persentase Usaha Pertambangan Yang Tertib Administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	Jumlah Pemegang Iup Yang Tertib Administrasi Dibagi Dengan Jumlah Pemegang Iup Di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	Persen	60	62.5	67	105,600,000	67.5	116,160,000	68	150,000,000	68.5	250,000,000	68.5	621,760,000	Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
574	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi dan teknis	Program Pertambangan Wilayah V Sumedang	1	Persentase Usaha Pertambangan Yang Tertib Administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	Jumlah Pemegang Iup Yang Tertib Administrasi Dibagi Dengan Jumlah Pemegang Iup Di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	Persen	60	62.5	67	193,000,000	67.5	228,000,000	68	142,770,000	68.5	148,855,000	68.5	712,625,000	Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
575	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi dan teknis	Program Pertambangan Wilayah VI Tasikmalaya	1	Persentase Usaha Pertambangan Yang Tertib Administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	Jumlah Pemegang Iup Yang Tertib Administrasi Dibagi Dengan Jumlah Pemegang Iup Di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	Persen	60	62.5	67	160,000,000	67.5	165,000,000	68	200,000,000	68.5	250,000,000	68.5	775,000,000	Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
576	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi dan teknis	Program Pertambangan Wilayah VII Cirebon	1	Persentase Usaha Pertambangan Yang Tertib Administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	Jumlah Pemegang Iup Yang Tertib Administrasi Dibagi Dengan Jumlah Pemegang Iup Di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	Persen	60	62.5	67	195,000,000	67.5	215,000,000	68	250,000,000	68.5	127,590,000	68.5	787,590,000	Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
577	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi dan teknis	Program Pelayanan dan Pengembangan Laboratorium ESDM bidang tambang	1	Persentase Pengujian Kualitas Bahan Tambang Di Jawa Barat	Jumlah Titik Sampling Wiup Yang Diuji/Jumlah Total Wiup Yang Diterbitkan Provinsi X 100%	Persen	N/A	N/A	30	150,000,000	40	200,000,000	50	220,000,000	60	250,000,000	60	820,000,000	UPTD Laboratorium ESDM	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
578	Indeks Penggunaan Air	Persentase Sumur Bor yang meningkat muka air tanahnya	Program Air Tanah								1,186,250,000		1,323,412,500		1,686,135,000		1,610,960,000		5,806,757,500	Bidang Air Tanah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE						PENANGGUNG JAWAB ESELON	PERANGKAT DAERAH	
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				1	Persentase Pengguna Air Tanah Yang Taat Peraturan	Jumlah Perusahaan Pengguna Air Tanah Yang Taat Peraturan Dibagi Jumlah Perusahaan Pengguna Air Tanah Di Jawa Barat Dikali 100%	Persen	1.35	2.35	4.35		5.35		6.35	7.35		7.35				
				2	Laju Pembangunan Sumur Imbunan	Jumlah Sumur Imbunan Yang Dibangun Tahun N Dikurangi Jumlah Sumur Imbunan N-1 Dibagi Jumlah Sumur Imbunan N-1 X100%	Persen	187	36.15	20.59		17.07		14.58	12.72		12.72				
579	Indeks Penggunaan Air	Persentase Sumur Bor yang meningkat muka air tanahnya	Program Air Tanah Wilayah I Cianjur	1	Persentase Pengguna Air Tanah Yang Taat Peraturan Di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	Jumlah Perusahaan Pengguna Air Tanah Yang Taat Peraturan Dibagi Jumlah Perusahaan Pengguna Air Tanah Di Cabang Dinas I Cianjur Dikali 100%	Persen	1.61	2.61	4.61	221,100,000	5.61	243,210,000	6.61	142,770,000	7.61	148,855,000	7.61	755,935,000	Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
580	Indeks Penggunaan Air	Persentase Sumur Bor yang meningkat muka air tanahnya	Program Air Tanah Wilayah II Bogor	1	Persentase Pengguna Air Tanah Yang Taat Peraturan Di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	Jumlah Perusahaan Pengguna Air Tanah Yang Taat Peraturan Dibagi Jumlah Perusahaan Pengguna Air Tanah Di Cabang Dinas II Bogor Dikali 100%	Persen	0.31	1.31	3.31	124,809,174	4.31	138,071,304	5.31	166,565,000	6.31	159,487,500	6.31	588,932,978	Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
581	Indeks Penggunaan Air	Persentase Sumur Bor yang meningkat muka air tanahnya	Program Air Tanah Wilayah III Purwakarta	1	Persentase Pengguna Air Tanah Yang Taat Peraturan Di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	Jumlah Perusahaan Pengguna Air Tanah Yang Taat Peraturan Dibagi Jumlah Perusahaan Pengguna Air Tanah Di Cabang Dinas III Purwakarta Dikali 100%	Persen	2.91	3.91	5.91	155,925,000	6.91	180,707,450	7.91	214,155,000	8.91	212,650,000	8.91	763,437,450	Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
582	Indeks Penggunaan Air	Persentase Sumur Bor yang meningkat muka air tanahnya	Program Air Tanah Wilayah IV Bandung	1	Persentase Pengguna Air Tanah Yang Taat Peraturan Di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	Jumlah Perusahaan Pengguna Air Tanah Yang Taat Peraturan Dibagi Jumlah Perusahaan Pengguna Air Tanah Di Cabang Dinas IV Bandung Dikali 100%	Persen	1.68	2.68	4.68	111,375,000	5.68	129,076,750	6.68	166,565,000	7.68	170,120,000	7.68	577,136,750	Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
583	Indeks Penggunaan Air	Persentase Sumur Bor yang meningkat muka air tanahnya	Program Air Tanah Wilayah V Sumedang	1	Persentase Pengguna Air Tanah Yang Taat Peraturan Di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	Jumlah Perusahaan Pengguna Air Tanah Yang Taat Peraturan Dibagi Jumlah Perusahaan Pengguna Air Tanah Di Cabang Dinas V Sumedang Dikali 100%	Persen	1.85	2.85	4.85	242,000,000	5.85	113,587,540	6.85	142,770,000	7.85	148,855,000	7.85	647,212,540	Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
584	Indeks Penggunaan Air	Persentase Sumur Bor yang meningkat muka air tanahnya	Program Air Tanah Wilayah VI Tasikmalaya	1	Persentase Pengguna Air Tanah Yang Taat Peraturan Di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	Jumlah Perusahaan Pengguna Air Tanah Yang Taat Peraturan Dibagi Jumlah Perusahaan Pengguna Air Tanah Di Cabang Dinas VI Tasikmalaya Dikali 100%	Persen	1	1	3	220,000,000	4	110,942,000	5	142,770,000	6	148,855,000	6	622,567,000	Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
585	Indeks Penggunaan Air	Persentase Sumur Bor yang meningkat muka air tanahnya	Program Air Tanah Wilayah VII Cirebon	1	Persentase Pengguna Air Tanah Yang Taat Peraturan Di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	Jumlah Perusahaan Pengguna Air Tanah Yang Taat Peraturan Dibagi Jumlah Perusahaan Pengguna Air Tanah Di Cabang Dinas VII Cirebon Dikali 100%	Persen	1	1	3	190,000,000	4	210,000,000	5	250,000,000	6	127,590,000	6	777,590,000	Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
586	a.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) b. Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Sumur Bor yang meningkat muka air tanahnya	Program Pelayanan dan Pengembangan Laboratorium ESDM Bidang Air Tanah	1	Persentase Sample Air Tanah Yang Diuji Kualitasnya	Titik Sampling Yang Diuji/Jumlah Ijin Penggunaan Air Tanah (Ipat) X100%	Persen	N/A	N/A	1	150,000,000	1.5	200,000,000	2	220,000,000	3	250,000,000	3	820,000,000	UPTD Laboratorium ESDM	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
587		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja Di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	70	70	78.03	810,000,000	80.22	853,400,000	85.14	1,427,700,000	90.00	1,063,250,000	90.00	4,154,350,000	Sekretaris	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
588		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	70	70	76.67	141,750,000	78.10	150,000,000	82.86	237,950,000	90.00	318,975,000	90.00	848,675,000	Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
589		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	30	30	72.17	303,750,000	73.78	149,345,000	76.55	285,540,000	80.00	318,975,000	80.00	1,057,610,000	Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
590		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	70	70	77	303,750,000	78	149,345,000	83	285,540,000	90	318,975,000	90	1,057,610,000	Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
591		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	70	70	77	141,750,000	78	150,000,000	83	237,950,000	90	318,975,000	90	848,675,000	Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
592		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	30	30	33	141,750,000	75	7,553,777,860	78	623,171,361	80	750,000,000	80	9,068,699,221	Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
593		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	70	70	77	546,750,000	78	150,000,000	83	237,950,000	90	318,975,000	90	1,253,675,000	Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
594		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	50	50	57	141,750,000	58	150,000,000	63	237,950,000	70	318,975,000	70	848,675,000	Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
595		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Laboratorium ESDM	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Laboratorium ESDM	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	50	50	63	1,053,000,000	63	200,000,000	66	285,540,000	70	425,300,000	70	1,963,840,000	UPTD Laboratorium ESDM	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
596		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral								4,390,572,065		4,537,957,500		5,143,277,000		5,011,113,500		19,082,920,065	Sekretaris	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				1	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Jumlah ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Dibagi Jumlah ASN Dinas ESDM X100%	Persen	40	40	50		55		60	65		65				
				2	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	100	100	100		100		100	100		100				
				3	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100	100		100				
				4	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100	100		100				



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH			
							2017	2018	2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
597		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur	5 Persentase Ketersediaan Data Kinerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Data Kinerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Yang Disediakan/Jumlah Data Kinerja (Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Dan Kegiatan) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Yang Seharusnya Disediakan*100	100	100	100	100			691,663,000		1,493,869,640		872,489,400		894,694,800		3,952,716,840	Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
598		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor	1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
599		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta	1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
600		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung	1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
601		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang	1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
602		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya	1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
603		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon	1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
604		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Laboratorium ESDM	1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Laboratorium ESDM	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Laboratorium ESDM	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
6																							
605	a. Laju Pertumbuhan Sektor Industri b. Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Laju pertumbuhan ekspor non migas	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Jawa Barat	1	Nilai Ekspor Non Migas	Nilai Ekspor Non Migas Yang Dipublikasikan BPS	USD\$	28943.52	22585.53 (TW. III)	30715.09497		6,531,885,000	31329.39687	7,034,560,000	30715.09497	7,753,945,000	30715.09497	7,185,240,000	30715.09497	28,505,630,000	Bidang Perdagangan Luar Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
606	a. Laju Pertumbuhan Sektor Industri b. Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri	1	Indeks Harga Konsumen Bahan Makanan	Indeks Harga Konsumen Yang Dipublikasikan BPS	Poin	3.63		3,00 - 4,00		24,852,365,000	3,00 - 4,00	73,903,490,000	3,00 - 4,00	83,603,815,000	3,00 - 4,00	75,734,480,000	3,00 - 4,00	258,094,150,000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE						PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH				
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				K		Rp	
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			(20)	(21)		
607		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	1 Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen Yang Dipublikasikan BPS	Poin	37	37	38	3,675,710,000	39	3,794,610,000	39	3,973,370,000	39	3,771,240,000	39	15,214,930,000	Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
608		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Program Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bpsmb Agro	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsor Dibagi Total Unsor Yang Terisi X Nilai Penimbang	Kategori	B	N/A	#REF!	1,150,000,000	A	996,575,000	A	1,057,410,000	A	1,107,420,000	A	4,311,405,000	UPTD BPSMB Agro	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
609		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Program Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bpsmb Logam Dan Elektronika	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsor Dibagi Total Unsor Yang Terisi X Nilai Penimbang	Kategori	B	N/A	#REF!	1,150,000,000	A	996,575,000	A	1,057,410,000	A	1,107,420,000	A	4,311,405,000	UPTD BPSMB Logam dan Elektronika	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
610		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Program Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum Dalam Kemasan	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bpsmb Air Minum Dalam Kemasan	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsor Dibagi Total Unsor Yang Terisi X Nilai Penimbang	Kategori	B	N/A	#REF!	1,150,000,000	A	996,575,000	A	1,057,410,000	A	1,107,420,000	A	4,311,405,000	UPTD BPSMB Air Minum dalam Kemasan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
611		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Program Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bpsmb Keramik Dan Tabung Gas	Hasil Survey Ikm	Persen	B	N/A	#REF!	1,150,000,000	A	996,575,000	A	1,057,410,000	A	1,107,420,000	A	4,311,405,000	UPTD BPSMB Keramik dan Tabung Gas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
612		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	85	85	#REF!	4,964,100,000	87	4,408,900,000	90	2,199,795,000	90	1,985,340,000	90	13,558,135,000	Sekretariat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
613		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Industri Logam	1 Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Industri Logam	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	85	85	#REF!	6,000,000,000	87	3,003,650,000	90	3,539,900,000	90	3,423,000,000	90	15,966,550,000	UPTD Industri Logam	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
614		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Industri Pangan	1 Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Industri Pangan, Olah dan Kemasan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	85	85	#REF!	3,031,700,000	87	3,927,850,000	90	4,551,300,000	90	4,335,800,000	90	15,846,650,000	UPTD IPOK	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
615		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang	1 Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	85	85	#REF!	2,923,425,000	87	3,465,750,000	90	4,298,450,000	90	4,335,800,000	90	15,023,425,000	UPTD BPSMB Logam dan Elektronika	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
616		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor	1 Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	85	85	#REF!	2,923,425,000	87	3,696,800,000	90	4,424,875,000	90	4,449,900,000	90	15,495,000,000	UPTD BPSMB Keramik dan Tabung Gas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
617		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum dalam Kemasan Cirebon	1 Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum Dalam Kemasan Cirebon	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	85	85	#REF!	2,165,500,000	87	2,079,450,000	90	2,275,650,000	90	2,053,800,000	90	8,574,400,000	UPTD BPSMB Air Minum dalam Kemasan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
618		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung	1 Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	85	85	#REF!	1,299,300,000	87	1,386,300,000	90	1,517,100,000	90	1,369,200,000	90	5,571,900,000	UPTD BPSMB Agro	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
619		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Perindustrian dan Perdagangan							5,861,610,330		6,585,717,958		7,860,548,546		7,752,210,798		28,060,087,631	Sekretariat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
				1	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Persen	30	30	#REF!		30		30		30		30							
				2	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Persen	85	85	#REF!		87		90		90		90							
				3	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Persen	100	100	#REF!		100		100		100		100							
				4	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Persen	100	100	#REF!		100		100		100		100							
620		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Industri Logam							2,036,583,602		2,548,397,640		2,968,886,387		2,897,120,000		10,450,987,629		Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
				1	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di UPTD Industri Logam	Persen			#REF!		87		87		90		90							
				2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di UPTD Industri Logam	Persen			#REF!		100		100		100		100							
621		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Industri Pangan, Olah dan Kemasan							4,031,245,000		9,825,000,000		5,428,995,000		5,258,220,000		24,543,460,000	UPTD IPOK	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
				1	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di UPTD Industri Pangan, Olah dan Kemasan	Persen			#REF!		87		87		90		90							
				2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di UPTD Industri Pangan, Olah dan Kemasan	Persen			#REF!		100		100		100		100							
622		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang							1,875,609,000		1,998,351,400		2,330,929,680		2,365,601,596		8,570,491,676	UPTD BPSMB Logam dan Elektronika	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
				1	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang	Persen			#REF!		87		87		90		90							
				2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang	Persen			#REF!		100		100		100		100							
623		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor							1,571,165,000		1,776,866,500		2,047,978,550		2,091,697,060		7,487,707,110	UPTD BPSMB Keramik dan Tabung Gas Bogor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH				
							2017	2018	2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE							
							(8)	(9)	K (10)	Rp. (11)	K (12)	Rp. (13)	K (14)	Rp. (15)	K (16)	Rp. (17)	K (18)	Rp. (19)						
				1	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor	Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan Prasarana x100%	Persen			#REF!	87		87		90		90							
				2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	Persen			#REF!	100		100		100		100							
624		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum dalam Kemasan Cirebon								1,555,220,000		1,581,099,500		1,795,705,650		1,860,129,680				6,792,154,830			
				1	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum dalam Kemasan Cirebon	Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan Prasarana x100%	Persen			85		87		87		90		90				UPTD BPSMB Air Minum dalam Kemasan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
				2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum dalam Kemasan Cirebon	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	Persen			100		100		100		100		100						
625		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung								1,490,080,000		1,676,508,000		1,919,119,600		1,970,561,663				7,056,269,263	UPTD BPSMB Agro	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
				1	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung	Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan Prasarana x100%	Persen			100		100		100		100		100						
				2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	Persen			85		87		87		90		90						
7			Perindustrian								18,903,523,600		26,615,665,360		26,481,821,732		23,081,308,630				95,082,319,322			
626	a. Laju Pertumbuhan Sektor Industri b. Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	PDRB industri non migas	Program Pembangunan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (LMATE)								6,885,183,600		9,033,070,360		10,092,844,232		8,402,478,630				34,413,576,822	Bidang ILMATE	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
				1	Persentase Pertumbuhan Pma/Pmdn Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan Elektronika (lmate)	Jumlah Pma/Pmdn Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan Elektronika Tahun N Dikurangi Tahun N-1 Dibagi Tahun N X 100%	Persen	0.22	N/A	2		2		2		2		2						
				2	Pertumbuhan Unit Usaha Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan Elektronika	Jumlah Unit Usaha Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan Elektronika Tahun N Dikurangi Tahun N-1 Dibagi Tahun N X 100%	Persen	0.22	N/A	0.2		0.2		0.2		0.2		0.2						
627	a. Laju Pertumbuhan Sektor Industri b. Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	PDRB industri non migas	Program Pembangunan Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka								6,547,200,000		7,869,400,000		9,936,537,500		9,079,950,000				33,433,087,500	Bidang Industri AKTA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
				1	Pertumbuhan Pma/Pmdn Sektor Industri Agro, Kimia, Tekstil Dan Aneka	Jumlah Pma/Pmdn Sektor Industri Agro, Kimia, Tekstil Dan Aneka Tahun N Dikurangi Tahun N-1 Dibagi Tahun N X 100%	Persen	0.05	N/A	2		2		2		2		2						
				2	Pertumbuhan Unit Usaha Industri Agro, Kimia, Tekstil Dan Aneka	Jumlah Unit Usaha Industri Agro, Kimia, Tekstil Dan Aneka Tahun N Dikurangi Tahun N-1 Dibagi Tahun N X 100%	Persen	0.05	Proses	0.2		0.2		0.2		0.2		0.2						
628	a. Laju Pertumbuhan Sektor Industri b. Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	PDRB industri non migas	Program Pemberdayaan Industri Pangan, Olahan dan Kemasan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) UPTD Iпок	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsor Dibagi Total Unsor Yang Terisi X Nilai Penimbang	Kategori	A	N/A	A	3,601,770,000	A	7,650,000,000	A	4,237,620,000	A	3,712,240,000	A			19,201,630,000	UPTD IPOK	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
629	a. Laju Pertumbuhan Sektor Industri b. Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	PDRB industri non migas	Program Pemberdayaan Industri Logam		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) UPTD Industri Logam	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsor Dibagi Total Unsor Yang Terisi X Nilai Penimbang	Kategori	A	N/A	A	1,869,370,000	A	2,063,195,000	A	2,214,820,000	A	1,886,640,000	A			8,034,025,000	UPTD Industri Logam	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
8			Transmigrasi								796,037,998		933,559,809		1,069,029,056		1,049,311,408				3,847,938,271			
630		Persentase realisasi MoU yang dilaksanakan	Program Pengembangan Transmigrasi		Persentase Perjanjian Kerjasama Bidang Ketransmigrasian Yang Direalisasikan	Jumlah Perjanjian Kerjasama Bidang Ketransmigrasian Yang Direalisasikan Dibagi Jumlah Perjanjian Kerjasama Bidang Ketransmigrasian Yang Dibuat X100%	Persen	N/A	N/A	85	796,037,998	85	933,559,809	85	1,069,029,056	85	1,049,311,408	85			3,847,938,271	Bidang Penempatan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
III			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								754,506,240,297		770,541,547,799		857,344,662,972		853,845,403,436				3,236,237,854,504			
1			Perencanaan								36,791,901,120		38,458,884,292		43,753,176,336		39,994,421,681				158,998,383,429			
631	Indeks Reformasi Birokrasi	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan Jawa Barat	Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Ekonomi								4,701,061,000		5,139,120,000		3,298,833,600		4,100,130,540				17,239,145,140	Bidang Perencanaan dan Sumber daya Alam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				1	Persentase Sasaran, Program Dan Kegiatan Rkpj Yang Konsisten Dengan Rjmd Dan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Bidang Ekonomi	- Jumlah Sasaran Prioritas Pembangunan Rkpj Bidang Ekonomi Yang Konsisten Dengan Rjmd Dibagi Jumlah Sasaran Rkpj Bidang Ekonomi X100% - Jumlah Program Rkpj Bidang Ekonomi Yang Konsisten Dengan Rjmd Dibagi Jumlah Program Rkpj Bidang Ekonomi X100% - Jumlah Kegiatan Rkpj Bidang Ekonomi Yang Konsisten Dengan Renstra Perangkat Daerah Dibagi Jumlah Kegiatan Rkpj Bidang Ekonomi X100%	Persen	70	73	80		85		90		95		95						



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON II	PERANGKAT DAERAH				
							2017	2018	2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE							
							(8)	(9)	K (10)	Rp. (11)	K (12)	Rp. (13)	K (14)	Rp. (15)	K (16)	Rp. (17)	K (18)	Rp. (19)						
				2	Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota Dengan Provinsi Jawa Barat Lingkup Bidang Ekonomi	Jumlah Prioritas Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi Pada Rkpd Kabupaten/Kota Dibagi Jumlah Prioritas Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi Pada Rkpd Provinsi Jawa Barat X100%	Persen	70	73	80		85		90		95		95						
632	Indeks Reformasi Birokrasi	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan Jawa Barat	Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Fisik						2,668,090,750		3,104,577,500		2,695,024,683		2,651,786,653		11,119,479,585						Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				1	Persentase Sasaran, Program Dan Kegiatan Rkpd Yang Konsisten Dengan Rjmd Dan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Bidang Fisik	- Jumlah Sasaran Prioritas Pembangunan Rkpd Lingkup Bidang Fisik Yang Konsisten Dengan Rjmd Dibagi Jumlah Sasaran Rkpd Lingkup Bidang Fisik X100% - Jumlah Program Rkpd Lingkup Bidang Fisik Yang Konsisten Dengan Rjmd Dibagi Jumlah Program Rkpd Lingkup Bidang Fisik X100% - Jumlah Kegiatan Rkpd Lingkup Bidang Fisik Yang Konsisten Dengan Renstra Perangkat Daerah Dibagi Jumlah Kegiatan Rkpd Lingkup Bidang Fisik X100%	Persen	70	73	80		85		90		95		95						
				2	Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota Dengan Provinsi Jawa Barat Lingkup Bidang Fisik	Jumlah Prioritas Pembangunan Lingkup Bidang Fisik Pada Rkpd Kabupaten/Kota Dibagi Jumlah Prioritas Pembangunan Lingkup Bidang Fisik Pada Rkpd Provinsi Jawa Barat X100%	Persen	70	73	80		85		90		95		95						
633	Indeks Reformasi Birokrasi	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan Jawa Barat	Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya						5,502,538,000		5,249,860,000		5,614,016,380		6,497,421,282		22,863,835,662						Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				1	Persentase Sasaran, Program Dan Kegiatan Rkpd Yang Konsisten Dengan Rjmd Dan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya	- Jumlah Sasaran Prioritas Pembangunan Rkpd Lingkup Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya Yang Konsisten Dengan Rjmd Dibagi Jumlah Sasaran Rkpd Lingkup Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya X100% - Jumlah Program Rkpd Lingkup Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya Yang Konsisten Dengan Rjmd Dibagi Jumlah Program Rkpd Lingkup Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya X100% - Jumlah Kegiatan Rkpd Lingkup Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya Yang Konsisten Dengan Renstra Perangkat Daerah Dibagi Jumlah Kegiatan Rkpd Lingkup Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya X100%	Persen	70	73	80		85		90		95		95						
				2	Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota Dengan Provinsi Jawa Barat Lingkup Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya	Jumlah Prioritas Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya Pada Rkpd Kabupaten/Kota Dibagi Jumlah Prioritas Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya Pada Rkpd Provinsi Jawa Barat X100%	Persen	70	73	80		85		90		95		95						
634	Indeks Reformasi Birokrasi	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan Jawa Barat	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah						3,226,245,000		2,994,000,000		3,420,495,000		2,855,680,000		12,496,420,000						Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				1	Rata-rata capaian kinerja pelaksanaan pembangunan	Σ Realisasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Dibagi Σ Indikator Rencana Pembangunan Daerah X100%	Persen	70	80	80		85		90		95		95						
				2	Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah	Σ Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Dibagi Σ Target Kinerja Perangkat Daerah X100%	Persen	70	80	80		85		90		95		95						
				3	Rata-rata capaian proyek strategis Jawa Barat yang diselesaikan	Σ Realisasi Proyek Strategis Jawa Barat Yang Diselesaikan Dibagi Σ Proyek Strategis Jawa Barat X100%	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100						
				4	Rata-rata capaian kegiatan APBN di Jawa Barat	Σ Realisasi Capaian Pelaksanaan Kegiatan Apbn Di Jawa Barat Dibagi Σ Kegiatan Apbn Di Jawa Barat X100%	Persen	70	75	80		85		90		95		95						
				5	Rata-rata capaian kinerja pembangunan kab/kota	Σ Realisasi Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota Dibagi Σ Target Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota X100%	Persen	75	80	85		90		95		100		100						
635	Indeks Reformasi Birokrasi	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan Jawa Barat	Program Perencanaan Pembangunan Daerah						9,397,435,000		9,040,500,000		18,150,000,000		9,980,685,000		46,568,620,000						Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				1	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Σ Dokumen Perencanaan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Aturan Dibagi Σ Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100		100		100		100		100						
				2	Persentase Partisipasi Publik Terhadap Proses Perencanaan	Σ Rencana Program Pembangunan Yang Disepakati Dibagi Σ Usulan Rencana Program Pembangunan	Persen	40	50	60		65		70		75		75						
				3	Persentase Kesesuaian Perencanaan Dan Penganggaran	Σ Kesesuaian Program Dan Kegiatan Pada Kua/Ppas Dibagi Σ Program Dan Kegiatan Pada Rkpd X 100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100						



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE						PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH	
							2017	2018	2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE				
							(8)	(9)	K (10)	Rp. (11)	K (12)	Rp. (13)	K (14)	Rp. (15)	K (16)	Rp. (17)	K (18)	Rp. (19)			
				4	Persentase Ketersediaan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Sisdipd Yang Diisi Dan Dimutakhirkan Dibagi \sum Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Sisdipd Yang Harus Diisi X100%	Persen	40	64	81		97		100		100		100				
636		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	2,363,654,100	100	2,727,977,000	100	2,330,989,691	100	3,146,792,725	100	10,569,413,516	Sekretariat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
637		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						100	8,932,877,270	100	10,202,849,792	100	8,243,816,983	100	10,761,925,481	100	38,141,469,525	Sekretariat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				1	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				2	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				4	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				5	Persentase Ketersediaan Data Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Disediakan/Jumlah Data Kinerja (Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Dan Kegiatan) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Seharusnya Disediakan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
2			Keuangan							234,735,573,165		263,954,790,519		296,932,071,926		292,527,479,981		1,088,149,915,591			
638	Indeks Reformasi Birokrasi	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tinggi	Program Pengelolaan Anggaran Daerah	1	Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Keuangan Daerah	Persen	100	100	100	3,514,712,650	100	4,041,324,338	100	4,539,083,241	100	3,831,601,962	100	15,926,722,191	Bidang Anggaran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
639	Indeks Reformasi Birokrasi	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tinggi	Program Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	1	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah/Jumlah Perangkat Daerah X 100%	Persen	80	80	80	1,549,046,840	90	1,781,141,538	90	2,000,519,886	90	2,036,030,900	90	7,366,739,164	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
640	Indeks Reformasi Birokrasi	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tinggi	Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah/Jumlah Perangkat Daerah X 100%	Persen	100	100	100	1,157,026,163	100	1,330,384,147	100	2,963,593,686	100	1,520,768,100	100	6,971,772,096	Bidang Perbendaharaan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
641	Indeks Reformasi Birokrasi	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah Tinggi	Program Pengelolaan Aset Daerah	1	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Aset Daerah/Perangkat Daerah X 100%	Persen	80	80	80	4,069,187,611	80	4,678,876,644	80	5,255,161,126	80	5,348,444,927	80	19,351,670,308	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
642	Indeks Refromasi Birokrasi	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah Tinggi	Program Pengelolaan Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Daerah	1	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Pengamanan Dan Pemanfaatan Aset Daerah/Perangkat Daerah X 100%	Persen	80	80	80	17,359,724,457	80	19,932,788,295	80	22,373,558,971	80	22,689,849,092	80	82,355,920,815	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
643		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Persen	88	94	100	15,572,666,000	100	13,758,008,700	100	11,519,785,130	100	8,365,471,598	100	49,215,931,428	Sekretaris Badan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
644		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah							14,871,309,521		17,090,787,009		19,180,128,248		19,551,588,563		70,693,813,341	Sekretaris Badan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
				1	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Persen	N/A	N/A	70		70		70		70		70				
				2	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				4	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				5	Persentase Ketersediaan Data Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Disediakan/Jumlah Data Kinerja (Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Dan Kegiatan) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Seharusnya Disediakan*100	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
645	Indeks Reformasi Birokrasi	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah							732,724,000		855,600,000		1,005,924,000		992,096,000		3,586,344,000	Bidang Pendapatan I	Badan Pendapatan Daerah	
				1	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pendapatan I	Persen	106.09	104.34	100		100		100		100		100				
				2	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pendapatan I	Persen	4.02	12.28	5.71		5.71		5.71		5.71		5.71				



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE						PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH				
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				K		Rp.	
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			(20)	(21)		
646	Indeks Reformasi Birokrasi	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah II									1,098,200,000	1,307,412,000		1,519,139,080		1,349,427,720		5,274,178,800	Bidang Pendapatan II	Badan Pendapatan Daerah			
				1 Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pendapatan II	Realisasi PAD Lingkup Pendapatan II Dibagi Target PAD Lingkup Pendapatan II X100%	Persen	104.73	106.69	100		100			100				100						
				2 Rasio Efektivitas Dana Perimbangan	Realisasi Dana Perimbangan Dibagi Target Dana Perimbangan X100%	Persen	99.09	98.81	100		100			100				100						
				3 Rasio Efektivitas Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Dibagi Target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah X100%	Persen	71.96	100	100		100			100				100						
				4 Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pendapatan II	Pad Lingkup Pendapatan II Tahun N Dikurangi PAD Lingkup Pendapatan II Tahun N-1, Dibagi PAD Lingkup Pendapatan II Tahun N-1 X100%	Persen	10.09	4.12	3		3			3				3						
647		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I									516,778,542	630,931,450		790,798,243		844,712,837		2,783,221,072	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	Badan Pendapatan Daerah			
				1 Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	Realisasi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I Dibagi Target PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I X100%	Persen	105.07	104.39	100		100			100				100						
				2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur Dibagi Total Unsur Yang Terisi Dikali Nilai Penimbang	Poin	82.23	86.35	87.35		87.85			88.35				88.85						
				3 Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	Pad Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I Tahun N Dikurangi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I Tahun N-1, Dibagi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I Tahun N-1 X100%	Persen	-1.83	10.61	5.66		5.66			5.66				5.66						
648		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere									418,090,330	526,966,750		680,550,945		745,689,255		2,371,297,280	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	Badan Pendapatan Daerah			
				1 Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	Realisasi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere Dibagi Target PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere X100%	Persen	105.97	104.45	100		100			100				100						
				2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur Dibagi Total Unsur Yang Terisi Dikali Nilai Penimbang	Poin	83.25	84.6	85.6		86.1			86.6				87.1						
				3 Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	Pad Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere Tahun N Dikurangi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere Tahun N-1, Dibagi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere Tahun N-1 X100%	Persen	-2.36	8.98	5.74		5.74		2202000000		5.74			5.74						
649		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor									489,773,690	602,482,750		760,630,385		817,616,215		2,670,503,040	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	Badan Pendapatan Daerah			
				1 Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	Realisasi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor Dibagi Target PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor X100%	Persen	107.07	105.84	100		100			100				100						
				2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur Dibagi Total Unsur Yang Terisi Dikali Nilai Penimbang	Poin	82.05	82.87	83.87		84.37			84.87				85.37						
				3 Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	Pad Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor Tahun N Dikurangi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor Tahun N-1, Dibagi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor Tahun N-1 X100%	Persen	9.46	14.42	5.72		5.72			5.72				5.72						
650		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor									443,166,264	553,383,400		708,563,956		770,850,404		2,475,964,024	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	Badan Pendapatan Daerah			
				1 Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	Realisasi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor Dibagi Target PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor X100%	Persen	105.84	103.73	100		100			100				100						
				2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur Dibagi Total Unsur Yang Terisi Dikali Nilai Penimbang	Poin	80.32	82.85	83.85		84.35			84.85				85.35						



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON II	PERANGKAT DAERAH		
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
				3	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	Pad Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor Tahun N Dikurangi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor Tahun N-1, Dibagi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor Tahun N-1 X100%	Persen	7.15	10.35	5.73		5.73		5.73		5.73		5.73				
651		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi								470,901,280		605,488,000		632,015,112		702,094,608		2,410,499,000	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	Badan Pendapatan Daerah	
				1	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	Realisasi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi Dibagi Target PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi X100%	Persen	109.2	104.45	100		100		100		100		100				
				2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsor Dibagi Total Unsor Yang Terisi Dikali Nilai Penimbang	Poin	81.47	85.1	86.1		86.6		87.1		87.6		87.6				
				3	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	Pad Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi Tahun N Dikurangi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi Tahun N-1, Dibagi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi Tahun N-1 X100%	Persen	6.54	10.37	3.50		3.50		3.50		3.50		3.50				
652		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak								449,915,270		560,493,250		716,103,455		777,622,345		2,504,134,320	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	Badan Pendapatan Daerah	
				1	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	Realisasi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak Dibagi Target PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak X100%	Persen	106.95	106.27	100		100		100		100		100				
				3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsor Dibagi Total Unsor Yang Terisi Dikali Nilai Penimbang	Poin	81.07	82.35	83.35		83.85		84.35		84.85		84.85				
				2	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	Pad Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak Tahun N Dikurangi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak Tahun N-1, Dibagi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak Tahun N-1 X100%	Persen	6.81	13.98	5.71		5.71		5.71		5.71		5.71				
653		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu								324,809,268		428,698,300		576,344,122		652,091,198		1,981,942,888	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	Badan Pendapatan Daerah	
				1	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	Realisasi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu Dibagi Target PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu X100%	Persen	107	111	100		100		100		100		100				
				2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsor Dibagi Total Unsor Yang Terisi Dikali Nilai Penimbang	Poin	80.83	83.01	84.01		84.51		85.01		85.51		85.51				
				3	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	Pad Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu Tahun N Dikurangi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu Tahun N-1, Dibagi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu Tahun N-1 X100%	Persen	-0.72	14.56	5.74		5.74		5.74		5.74		5.74				
654		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur								425,439,640		534,709,000		688,761,060		753,063,540		2,401,973,240	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	Badan Pendapatan Daerah	
				1	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	Realisasi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur Dibagi Target PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur X100%	Persen	107.17	107.98	100		100		100		100		100				
				2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsor Dibagi Total Unsor Yang Terisi Dikali Nilai Penimbang	Poin	77.1	82.8	83.8		84.3		84.8		85.3		85.3				



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL											PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH							
							2017	2018	2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE									
							(8)	(9)	K (10)	Rp. (11)	K (12)	Rp. (13)	K (14)	Rp. (15)	K (16)	Rp. (17)	K (18)			Rp. (19)						
				3	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	Pad Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun N Dikurangi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun N-1, Dibagi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun N-1 X100%	Persen	-0.46	18.02	5.72			5.72			5.72			5.72							
655		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi									584,220,048		701,978,800		866,138,992		912,383,528		3,064,721,368			Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	Badan Pendapatan Daerah		
				1	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	Realisasi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi Dibagi Target PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi X100%	Persen	105.41	104.11	100		100		100		100		100		100						
				2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsor Dibagi Total Unsor Yang Terisi Dikali Nilai Penimbang	Poin	76.7	82.05	83.05		83.55		84.05		84.55		84.55		84.55						
				3	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	Pad Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi Tahun N Dikurangi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi Tahun N-1, Dibagi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi Tahun N-1 X100%	Persen	2.30	8.49	5.69		5.69		5.69		5.69		5.69		5.69						
656		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi									583,129,790		700,830,250		864,921,035		911,289,565		3,060,170,640			Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	Badan Pendapatan Daerah		
				1	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	Realisasi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi Dibagi Target PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi X100%	Persen	106.27	104.95	100		100		100		100		100		100						
				3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsor Dibagi Total Unsor Yang Terisi Dikali Nilai Penimbang	Poin	84.78	84.8	85.8		86.3		86.8		87.3		87.3		87.3						
				2	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	Pad Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun N Dikurangi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun N-1, Dibagi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun N-1 X100%	Persen	8.15	15.89	5.72		5.72		5.72		5.72		5.72		5.72						
657		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang									501,007,320		1,179,517,000		773,179,780		828,888,020		3,282,592,120			Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	Badan Pendapatan Daerah		
				1	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	Realisasi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang Dibagi Target PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang X100%	Persen	106.89	105.26	100		100		100		100		100		100						
				2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsor Dibagi Total Unsor Yang Terisi Dikali Nilai Penimbang	Poin	83	83	84		84		85		85		85		85						
				3	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	Pad Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang Tahun N Dikurangi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang Tahun N-1, Dibagi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang Tahun N-1 X100%	Persen	4.83	15.88	5.72		5.72		5.72		5.72		5.72		5.72						
658		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta									447,708,270		558,168,250		713,637,955		775,407,845		2,494,922,320			Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	Badan Pendapatan Daerah		
				1	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	Realisasi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta Dibagi Target PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta X100%	Persen	107.93	106.34	100		100		100		100		100		100						
				2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsor Dibagi Total Unsor Yang Terisi Dikali Nilai Penimbang	Poin	83.75	83.55	84.55		85.05		85.55		86.05		86.05		86.05						



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH				
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE			
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)						
				3	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	Pad Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun N Dikurangi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun N-1, Dibagi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun N-1 X100%	Persen	4.66	18.03	5.71		5.71		5.71		5.71		5.71						
659		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang									454,329,270		565,143,250		721,034,455		782,051,345		2,522,558,320	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	Badan Pendapatan Daerah		
				1	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	Realisasi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang Dibagi Target PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang X100%	Persen	108.16	108.35	100		100		100		100		100		100				
				2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur Dibagi Total Unsur Yang Terisi Dikali Nilai Penimbang	Poin	83.23	83.25	84.25		84.75		85.25		85.75		85.75		85.75				
				3	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	Pad Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang Tahun N Dikurangi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang Tahun N-1, Dibagi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang Tahun N-1 X100%	Persen	4.58	23.79	5.75		5.75		5.75		5.75		5.75		5.75				
660		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon									450,881,280		585,468,000		622,143,250		693,227,750		2,351,720,280	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	Badan Pendapatan Daerah		
				1	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	Realisasi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon Dibagi Target PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon X100%	Persen	106.55	102.32	100		100		100		100		100		100				
				2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur Dibagi Total Unsur Yang Terisi Dikali Nilai Penimbang	Poin	82.5	83.68	84.68		85.18		85.68		86.18		86.18		86.18				
				3	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	Pad Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon Tahun N Dikurangi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon Tahun N-1, Dibagi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon Tahun N-1 X100%	Persen	5.37	9.70	2.66		2.66		2.66		2.66		2.66		2.66				
661		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber									459,228,810		570,304,750		726,507,865		786,967,535		2,543,008,960	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	Badan Pendapatan Daerah		
				1	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	Realisasi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber Dibagi Target PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber X100%	Persen	107.93	104.80	100		100		100		100		100		100				
				3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur Dibagi Total Unsur Yang Terisi Dikali Nilai Penimbang	Poin	80.55	83.1	84.1		84.6		85.1		85.6		85.6		85.6				
				2	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	Pad Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber Tahun N Dikurangi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber Tahun N-1, Dibagi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber Tahun N-1 X100%	Persen	5.35	15.05	5.93		5.93		5.93		5.93		5.93		5.93				
662		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug									412,197,640		520,759,000		673,968,060		739,776,540		2,346,701,240	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	Badan Pendapatan Daerah		
				1	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	Realisasi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug Dibagi Target PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug X100%	Persen	108.99	107.62	100		100		100		100		100		100				
				3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur Dibagi Total Unsur Yang Terisi Dikali Nilai Penimbang	Poin	80.68	82.88	83.88		84.38		84.88		85.38		85.38		85.38				



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH		
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
				2	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon li Ciledug	Pad Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon li Ciledug Tahun N Dikurangi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon li Ciledug Tahun N-1, Dibagi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon li Ciledug Tahun N-1 X100%	Persen	2.16	12.93	5.55		5.55		5.55		5.55		5.55				
663		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I								436,540,850		546,403,750		701,162,525		764,202,475		2,448,309,600	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	Badan Pendapatan Daerah	
				1	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	Realisasi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I Dibagi Target PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I X100%	Persen	108.93	105.90	100		100		100		100		100				
				3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur Dibagi Total Unsur Yang Terisi Dikali Nilai Penimbang	Poin	81.18	83.45	84.45		84.95		85.45		85.95		85.95		85.95		
				2	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	Pad Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I Tahun N Dikurangi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I Tahun N-1, Dibagi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I Tahun N-1 X100%	Persen	6.31	16.92	5.62		5.62		5.62		5.62		5.62				
664		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis								504,507,280		494,226,100		645,831,774		714,504,666		2,359,069,820	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	Badan Pendapatan Daerah	
				1	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu li Haurgeulis	Realisasi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu li Haurgeulis Dibagi Target PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu li Haurgeulis X100%	Persen	103.99	105.61	100		100		100		100		100				
				3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu li Haurgeulis	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur Dibagi Total Unsur Yang Terisi Dikali Nilai Penimbang	Poin	84.3	85.6	86.6		87.1		87.6		88.1		88.1		88.1		
				2	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu li Haurgeulis	Pad Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu li Haurgeulis Tahun N Dikurangi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu li Haurgeulis Tahun N-1, Dibagi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu li Haurgeulis Tahun N-1 X100%	Persen	9.26	13.29	3.54		3.54		3.54		3.54		3.54				
665		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan								427,646,640		537,034,000		691,226,560		755,278,040		2,411,185,240	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	Badan Pendapatan Daerah	
				1	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	Realisasi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan Dibagi Target PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan X100%	Persen	107.82	106.20	100		100		100		100		100				
				3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur Dibagi Total Unsur Yang Terisi Dikali Nilai Penimbang	Poin	81.95	82.8	83.8		84.3		84.8		85.3		85.3		85.3		
				2	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	Pad Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun N Dikurangi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun N-1, Dibagi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun N-1 X100%	Persen	1.10	12.12	5.97		5.97		5.97		5.97		5.97				
666		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka								438,747,850		548,728,750		703,628,025		766,416,975		2,457,521,600	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	Badan Pendapatan Daerah	
				1	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	Realisasi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka Dibagi Target PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka X100%	Persen	106.16	105.58	100		100		100		100		100				



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH		
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
				3+L1 634: L163 5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur Dibagi Total Unsur Yang Terisi Dikali Nilai Penimbang	Poin	83.25	82.8	83.8		84.3		84.8		85.3		85.3				
				2	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	Pad Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun N Dikurangi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun N-1, Dibagi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun N-1 X100%	Persen	1.62	11.64	5.46		5.46		5.46		5.46		5.46				
667		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran								455,759,406		566,649,850		722,632,099		783,486,341		2,528,527,696	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	Badan Pendapatan Daerah	
				1	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	Realisasi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran Dibagi Target PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran X100%	Persen	105.08	100.83	100		100		100		100		100				
				3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur Dibagi Total Unsur Yang Terisi Dikali Nilai Penimbang	Poin	80.55	83.13	84.13		84.63		85.13		85.63		85.63				
				2	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	Pad Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran Tahun N Dikurangi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran Tahun N-1, Dibagi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran Tahun N-1 X100%	Persen	4.39	8.02	4.76		4.76		4.76		4.76		4.76				
668		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan								463,929,720		575,257,000		731,759,380		791,684,420		2,562,630,520	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan	Badan Pendapatan Daerah	
				1	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan	Realisasi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan Dibagi Target PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan X100%	Persen	104.93	101.31	100		100		100		100		100				
				3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur Dibagi Total Unsur Yang Terisi Dikali Nilai Penimbang	Poin	82.9	82.9	83.9		84.4		84.9		85.4		85.4				
				2	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan	Pad Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan Tahun N Dikurangi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan Tahun N-1, Dibagi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan Tahun N-1 X100%	Persen	-0.68	7.80	5.66		5.66		5.66		5.66		5.66				
669		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta								579,576,520		697,087,000		860,951,580		907,724,220		3,045,339,520	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	Badan Pendapatan Daerah	
				1	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	Realisasi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta Dibagi Target PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta X100%	Persen	104.68	102.33	100		100		100		100		100				
				3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur Dibagi Total Unsur Yang Terisi Dikali Nilai Penimbang	Poin	82.3	82.65	83.65		84.15		84.65		85.15		85.15				
				2	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	Pad Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta Tahun N Dikurangi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta Tahun N-1, Dibagi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta Tahun N-1 X100%	Persen	1.29	12.64	5.11		5.11		5.11		5.11		5.11				
670		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat								480,945,690		593,182,750		750,768,385		808,758,215		2,633,655,040	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	Badan Pendapatan Daerah	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH		
							2017	2018	2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE					
							(8)	(9)	K (10)	Rp. (11)	K (12)	Rp. (13)	K (14)	Rp. (15)	K (16)	Rp. (17)	K (18)	Rp. (19)				
				1	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	Realisasi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat Dibagi Target PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat X100%	Persen	105.39	102.75	100		100		100		100						
				3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur Dibagi Total Unsur Yang Terisi Dikali Nilai Penimbang	Poin	81.7	82.925	83.925		84.425		84.925		85.425		85.425				
				2	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	Pad Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun N Dikurangi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun N-1, Dibagi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun N-1 X100%	Persen	4.35	11.02	5.70		5.70		5.70		5.70		5.70				
671		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek									478,738,690		590,857,750		748,302,885		806,543,715		2,624,443,040	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	Badan Pendapatan Daerah
				1	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	Realisasi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek Dibagi Target PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek X100%	Persen	106.06	104.32	100		100		100		100		100				
				3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur Dibagi Total Unsur Yang Terisi Dikali Nilai Penimbang	Poin	83.23	83.48	84.48		84.98		85.48		85.98		85.98				
				2	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	Pad Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek Tahun N Dikurangi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek Tahun N-1, Dibagi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek Tahun N-1 X100%	Persen	7.8	14.24	5.72		5.72		5.72		5.72		5.72				
672		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang									489,773,690		602,482,750		760,630,385		817,616,215		2,670,503,040	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	Badan Pendapatan Daerah
				1	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	Realisasi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang Dibagi Target PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang X100%	Persen	106.76	104.31	100		100		100		100		100				
				2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur Dibagi Total Unsur Yang Terisi Dikali Nilai Penimbang	Poin	84.85	85.68	86.68		87.18		87.68		88.18		88.18				
				3	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	Pad Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang Tahun N Dikurangi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang Tahun N-1, Dibagi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang Tahun N-1 X100%	Persen	5.91	15.30	5.71		5.71		5.71		5.71		5.71				
673		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang									434,267,640		544,009,000		698,623,060		761,921,540		2,438,821,240	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	Badan Pendapatan Daerah
				1	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	Realisasi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang Dibagi Target PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang X100%	Persen	107.47	104.11	100		100		100		100		100				
				2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur Dibagi Total Unsur Yang Terisi Dikali Nilai Penimbang	Poin	84	89	90		91		91		92		92				
				3	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	Pad Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun N Dikurangi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun N-1, Dibagi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun N-1 X100%	Persen	3.75	14.16	5.73		5.73		5.73		5.73		5.73				



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE						PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH					
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				K		Rp.		
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			(20)	(21)			
674		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut									452,122,270			562,818,250			718,568,955			779,836,845		2,513,346,320	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	Badan Pendapatan Daerah
				1	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	Realisasi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut Dibagi Target PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut X100%	Persen	106.55	104.76	100		100		100			100			100			100		
				2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur Dibagi Total Unsur Yang Terisi Dikali Nilai Penimbang	Poin	82.18	82.93	83.93		84.43		84.93			85.43			85.43			85.43		
				3	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	Pad Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut Tahun N Dikurangi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut Tahun N-1, Dibagi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut Tahun N-1 X100%	Persen	5.31	11.44	5.76		5.76		5.76			5.76			5.76			5.76		
675		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya									527,431,280			507,483,250			659,890,055			727,131,745		2,421,936,330	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	Badan Pendapatan Daerah
				1	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	Realisasi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya Dibagi Target PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya X100%	Persen	107.40	104.67	100		100		100			100			100			100		
				2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur Dibagi Total Unsur Yang Terisi Dikali Nilai Penimbang	Poin	84	83.98	84.98		85.48		85.98			86.48			86.48			86.48		
				3	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	Pad Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun N Dikurangi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun N-1, Dibagi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun N-1 X100%	Persen	5.39	13.09	4.90		4.90		4.90			4.90			4.90			4.90		
676		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya									494,827,720			607,807,000			766,276,380			822,687,420		2,691,598,520	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	Badan Pendapatan Daerah
				1	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	Realisasi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Dibagi Target PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya X100%	Persen	104.10	104.23	100		100		100			100			100			100		
				3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur Dibagi Total Unsur Yang Terisi Dikali Nilai Penimbang	Poin	82.5	83.4	84.4		84.9		85.4			85.9			85.9			85.9		
				2	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	Pad Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun N Dikurangi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun N-1, Dibagi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun N-1 X100%	Persen	2.43	12.38	5.83		5.83		5.83			5.83			5.83			5.83		
677		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis									423,232,640			532,384,000			686,295,560			750,849,040		2,392,761,240	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	Badan Pendapatan Daerah
				1	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	Realisasi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis Dibagi Target PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis X100%	Persen	105.61	104.88	100		100		100			100			100			100		
				3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur Dibagi Total Unsur Yang Terisi Dikali Nilai Penimbang	Poin	81.5	88.03	89.03		89.53		90.03			90.53			90.53			90.53		
				2	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	Pad Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun N Dikurangi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun N-1, Dibagi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun N-1 X100%	Persen	-0.52	8.48	5.51		5.51		5.51			5.51			5.51			5.51		
678		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran									475,224,280			609,693,000			632,769,555			702,772,245		2,420,459,080	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	Badan Pendapatan Daerah



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE						PENANGGUNG JAWAB ESELON II	PERANGKAT DAERAH		
							2017	2018	2020		2021		2022		2023		K	Rp.			K	Rp.
							(8)	(9)	(10)	Rp. (11)	(12)	Rp. (13)	(14)	Rp. (15)	(16)	Rp. (17)	(18)	Rp. (19)				
				1	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	Realisasi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran Dibagi Target PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran X100%	Persen	106.39	107.24	100		100		100		100		100				
				2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur Dibagi Total Unsur Yang Terisi Dikali Nilai Penimbang	Poin	92	92.08	93.08		93.58		94.08		94.58		94.58				
				3	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	Pad Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun N Dikurangi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun N-1, Dibagi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun N-1 X100%	Persen	-1.88	6.21	3.54		3.54		3.54		3.54		3.54				
679		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi								490,482,280		625,423,000		645,802,188		714,478,092		2,476,185,560	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	Badan Pendapatan Daerah	
				1	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	Realisasi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi Dibagi Target PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi X100%	Persen	104.29	102.42	100		100		100		100		100				
				3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur Dibagi Total Unsur Yang Terisi Dikali Nilai Penimbang	Poin	81.28	82.05	83.05		83.55		84.05		84.55		84.55				
				2	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	Pad Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi Tahun N Dikurangi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi Tahun N-1, Dibagi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi Tahun N-1 X100%	Persen	7.60	11.61	5.68		5.68		5.68		5.68		5.68				
680		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar								419,164,280		553,633,000		605,126,369		677,943,271		2,255,866,920	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	Badan Pendapatan Daerah	
				1	Rasio Efektivitas PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	Realisasi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar Dibagi Target PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar X100%	Persen	107.49	105.57	100		100		100		100		100				
				3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur Dibagi Total Unsur Yang Terisi Dikali Nilai Penimbang	Poin	83.75	83.98	84.98		85.48		85.98		86.48		86.48				
				2	Laju Pertumbuhan PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	Pad Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar Tahun N Dikurangi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar Tahun N-1, Dibagi PAD Lingkup Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar Tahun N-1 X100%	Persen	-0.42	4.93	5.68		5.68		5.68		5.68		5.68				
681		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Data dan Aplikasi serta Infrastruktur Sistem Pendapatan Daerah								753,120,000		772,000,000		794,480,000		754,320,000		3,073,920,000	PLOPD	Badan Pendapatan Daerah	
				1	Persentase Validitas Dan Keakuratan Database Sistem Pendapatan	Jumlah Kendaraan Bermotor Aktif Dibagi Jumlah Total Potensi Kendaraan Bermotor X100%	Persen	76.00	77.50	80.5		82		83.5		85		85				
				2	Persentase Service Level Agreement (SLA)	Total Waktu Layanan Dalam 1 Tahun (Menit) Dikurangi Jumlah Gangguan Layanan (Menit) Dibagi Total Waktu Layanan Dalam Satu Tahun (Menit) X100%	Persen	95.00	95.00	95		96		96		96		96				
682		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Perencanaan Kinerja, Pengembangan Layanan, Regulasi dan Kerja Sama Pendapatan Daerah								2,062,099,415		2,229,353,220		2,401,055,775		2,238,553,013		8,931,061,423	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	Badan Pendapatan Daerah	
				1	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Badan Pendapatan Daerah Yang Tersedia Dibagi Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Badan Pendapatan Daerah Yang Dibutuhkan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				2	Persentase Pemenuhan Dokumen Analisis Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan Daerah Serta Rencana Pengembangan Instrumen Pelayanan Pendapatan	Jumlah Dokumen Analisis Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan Daerah Serta Rencana Pengembangan Instrumen Pelayanan Pendapatan Yang Tersedia Dibagi Jumlah Dokumen Analisis Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan Daerah Serta Rencana Pengembangan Instrumen Pelayanan Pendapatan Yang Dibutuhkan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Pemenuhan Dokumen Regulasi Dan Kerja Sama Pelayanan/Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Dan Kerja Sama Pelayanan/Pendapatan Daerah Yang Tersedia Dibagi Jumlah Dokumen Regulasi Dan Kerja Sama Pelayanan/Pendapatan Daerah Yang Dibutuhkan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
683		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Pembinaan dan Pengendalian Unit Kerja Bapenda								918,318,753		1,060,679,275		1,232,927,041		1,226,169,214		4,438,094,283	Bidang Pembinaan dan Pengendalian	Badan Pendapatan Daerah	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE						PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH	
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
				1	Persentase Pemenuhan Dokumen Evaluasi Dan Pelaporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Dan Pelaporan Kinerja Yang Tersedia Dibagi Jumlah Dokumen Evaluasi Dan Pelaporan Kinerja Yang Dibutuhkan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
				2	Persentase Kepatuhan Unit Kerja Terhadap Tupoksi Dan Spip	Jumlah Unit Kerja Yang Patuh Terhadap Tupoksi Dan Spip Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
				3	Persentase Akurasi, Kecepatan Dan Kecermatan Unit Kerja Dalam Pengelolaan Dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Unit Kerja Dengan Akurasi, Kecepatan Dan Kecermatan Tinggi Dalam Pengelolaan Dan Pelaporan Keuangan Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
684		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pendapatan Daerah	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	79.14	79.85	85	18,784,027,221	87	19,977,316,980	87	19,676,070,000	90	17,716,000,000	90	76,153,414,201	Sekretaris	Badan Pendapatan Daerah
685		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	79.28	79.87	85	1,271,288,499	87	1,439,259,520	87	1,420,191,117	90	1,375,608,691	90	5,506,347,827	PLOPD	Badan Pendapatan Daerah
686		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	78.76	79.44	85	256,763,210	87	165,144,750	87	275,124,465	90	157,295,935	90	854,328,360	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	Badan Pendapatan Daerah
687		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	78.71	79.39	85	167,555,440	87	276,514,000	87	187,180,760	90	268,124,840	90	899,375,040	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	Badan Pendapatan Daerah
688		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	78.84	79.53	85	267,732,000	87	209,250,000	87	287,378,000	90	243,595,000	90	1,007,955,000	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	Badan Pendapatan Daerah
689		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	78.57	79.24	85	15,449,000,000	87	1,071,780,250	87	89,850,000	90	189,850,000	90	16,800,480,250	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	Badan Pendapatan Daerah
690		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	78.56	79.23	85	180,300,000	87	80,300,000	87	17,438,800,000	90	80,300,000	90	17,779,700,000	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	Badan Pendapatan Daerah
691		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	78.82	79.51	85	154,490,000	87	262,750,000	87	172,585,000	90	255,015,000	90	844,840,000	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	Badan Pendapatan Daerah
692		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	78.656	79.33	85	243,086,872	87	150,737,190	87	259,846,255	90	15,645,073,121	90	16,298,743,438	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	Badan Pendapatan Daerah
693		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	78.57	79.24	85	1,022,688,488	87	247,367,800	87	156,273,252	90	240,363,868	90	1,666,693,408	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	Badan Pendapatan Daerah
694		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	79.26	79.91	85	267,732,000	87	325,500,000	87	287,378,000	90	310,030,000	90	1,190,640,000	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	Badan Pendapatan Daerah
695		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	78.96	79.66	85	15,449,000,000	87	1,046,507,500	87	35,500,000	90	135,500,000	90	16,666,507,500	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	Badan Pendapatan Daerah
696		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	79.11	79.82	85	267,732,000	87	255,750,000	87	287,378,000	90	287,885,000	90	1,098,745,000	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	Badan Pendapatan Daerah
697		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	79.12	79.83	85	147,692,440	87	255,589,000	87	164,991,260	90	248,194,340	90	816,467,040	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	Badan Pendapatan Daerah
698		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	79.09	79.79	85	229,930,504	87	136,877,400	87	245,148,916	90	130,372,044	90	742,328,864	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	Badan Pendapatan Daerah
699		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	78.68	79.36	85	131,500,000	87	231,500,000	87	131,500,000	90	15,964,144,638	90	16,458,644,638	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	Badan Pendapatan Daerah
700		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	79.02	79.72	85	267,732,000	87	279,000,000	87	287,378,000	90	354,320,000	90	1,188,430,000	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	Badan Pendapatan Daerah



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH
							2017	2018	2020		2021		2022		2023						
							(8)	(9)	K (10)	Rp. (11)	K (12)	Rp. (13)	K (14)	Rp. (15)	K (16)	Rp. (17)	K (18)	Rp. (19)			
701		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	Persen	78.93	79.74	85	200,000,000	87	300,000,000	87	200,000,000	90	300,000,000	90	1,000,000,000	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	Badan Pendapatan Daerah	
702		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	Persen	78.92	79.61	85	212,375,000	87	112,375,000	87	212,375,000	90	112,375,000	90	649,500,000	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	Badan Pendapatan Daerah	
703		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	Persen	78.92	78.63	85	167,732,000	87	308,869,165	87	187,378,000	90	431,812,265	90	1,095,791,430	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	Badan Pendapatan Daerah	
704		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	Persen	79.19	79.90	85	267,732,000	87	212,519,880	87	287,378,000	90	202,419,473	90	970,049,353	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	Badan Pendapatan Daerah	
705		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	Persen	79.11	79.82	85	59,300,000	87	220,574,500	87	59,300,000	90	159,300,000	90	498,474,500	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	Badan Pendapatan Daerah	
706		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	Persen	79.08	79.56	85	173,500,000	87	73,500,000	87	173,500,000	90	73,500,000	90	494,000,000	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	Badan Pendapatan Daerah	
707		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan	Persen	78.93	79.51	85	167,732,000	87	379,000,000	87	187,378,000	90	498,610,000	90	1,232,720,000	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan	Badan Pendapatan Daerah	
708		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	Persen	78.98	79.68	85	261,265,490	87	169,887,750	87	280,154,085	90	22,306,813,515	90	23,018,120,840	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	Badan Pendapatan Daerah	
709		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	Persen	78.88	79.51	85	132,420,000	87	239,500,000	87	147,930,000	90	232,870,000	90	752,720,000	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	Badan Pendapatan Daerah	
710		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	Persen	78.76	79.44	85	271,550,000	87	19,530,000,000	87	1,170,791,305	90	171,550,000	90	21,143,891,305	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	Badan Pendapatan Daerah	
711		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	Persen	78.81	79.50	85	101,800,000	87	201,800,000	87	101,800,000	90	201,800,000	90	607,200,000	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	Badan Pendapatan Daerah	
712		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	Persen	78.68	79.36	85	270,645,240	87	179,769,000	87	290,632,460	90	171,225,140	90	912,271,840	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	Badan Pendapatan Daerah	
713		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	Persen	78.812	79.50	85	168,226,368	87	277,220,800	87	187,930,272	90	268,798,048	90	902,175,488	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	Badan Pendapatan Daerah	
714		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	Persen	78.78	79.46	85	350,000,000	87	17,670,000,000	87	1,240,885,470	90	150,000,000	90	19,410,885,470	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	Badan Pendapatan Daerah	
715		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	Persen	78.75	79.43	85	154,490,000	87	262,750,000	87	16,444,885,000	90	255,015,000	90	17,117,140,000	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	Badan Pendapatan Daerah	
716		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	Persen	78.69	79.37	85	200,000,000	87	100,000,000	87	15,568,205,095	90	100,000,000	90	15,968,205,095	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	Badan Pendapatan Daerah	
717		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	Persen	78.74	79.42	85	150,000,000	87	250,000,000	87	147,930,000	90	150,000,000	90	697,930,000	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	Badan Pendapatan Daerah	
718		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	Persen	78.79	79.48	85	250,000,000	87	150,000,000	87	250,000,000	90	150,000,000	90	800,000,000	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	Badan Pendapatan Daerah	
719		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	Persen	78.83	79.52	85	150,000,000	87	250,000,000	87	150,000,000	90	250,000,000	90	800,000,000	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	Badan Pendapatan Daerah	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH		
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
720		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Badan Pendapatan Daerah			Persen	61.20	62.00	67	35,185,627,647	68	38,385,240,135	68	42,046,909,263	69	41,312,989,729	69	156,930,766,774	Sekretaris	Badan Pendapatan Daerah		
				1	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di Badan Pendapatan Daerah	Jumlah ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Dibagi Jumlah ASN Badan Pendapatan Daerah X100%																
				2	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%		79.21	79.92	85		87		87		90		90				
				3	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Badan Pendapatan Daerah	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%		100	100	100		100		100		100		100				
721		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah			Persen	79.34	80.05	85	2,258,214,828	87	2,554,993,915	87	2,760,114,532	90	2,667,705,695	90	10,241,028,970	PLOPD	Badan Pendapatan Daerah		
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%																
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%		100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%		100	100	100		100		100		100		100				
722		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I			Persen	78.91	79.60	85	1,981,147,939	87	2,240,775,315	87	2,531,963,067	90	2,354,308,267	90	9,108,194,588	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	Badan Pendapatan Daerah		
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%																
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%		100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%		100	100	100		100		100		100		100				
723		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere			Persen	78.93	79.63	85	2,060,188,242	87	2,336,296,935	87	2,647,520,086	90	2,602,404,771	90	9,646,410,034	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	Badan Pendapatan Daerah		
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%																
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%		100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%		100	100	100		100		100		100		100				
724		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor			Persen	79.02	79.72	85	3,196,565,882	87	3,498,035,890	87	3,993,432,583	90	3,862,981,627	90	14,551,015,981	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	Badan Pendapatan Daerah		
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%																
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%		100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%		100	100	100		100		100		100		100				
725		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor			Persen				1,536,151,513		1,729,917,965		1,894,028,078		1,794,773,687		6,954,871,242	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	Badan Pendapatan Daerah		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH		
							2017	2018	2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE					
							(8)	(9)	K (10)	Rp. (11)	K (12)	Rp. (13)	K (14)	Rp. (15)	K (16)	Rp. (17)	K (18)	Rp. (19)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	78.86	79.55	85		87		87		90		90				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
726		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi								1,433,606,367			1,627,059,475		1,844,693,121		1,816,944,673		6,722,303,636	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	Badan Pendapatan Daerah
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	78.74	79.43	85		87		87		90		90				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
727		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak								1,799,973,659			2,030,975,230		2,291,127,280		2,246,808,169		8,368,884,338	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	Badan Pendapatan Daerah
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	78.84	79.53	85		87		87		90		90				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
728		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu								1,286,466,840			1,302,460,355		1,471,352,493		1,462,439,483		5,522,719,171	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	Badan Pendapatan Daerah
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	78.83	79.52	85		87		87		90		90				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
729		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur								1,166,773,471			1,297,748,775		1,310,585,918		1,329,889,205		5,104,997,368	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	Badan Pendapatan Daerah
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	78.71	79.40	85		87		87		90		90				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH		
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100						
	730	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi								2,812,987,944		3,199,868,155		3,639,117,693		3,546,928,056		13,198,901,848	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	Badan Pendapatan Daerah	
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	79.01	79.71	85		87		87		90		90				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
	731	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi								1,677,514,266		1,904,700,485		2,160,883,097		2,122,812,709		7,865,910,557	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	Badan Pendapatan Daerah	
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	78.88	79.57	85		87		87		90		90				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
	732	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang								1,836,275,705		2,079,561,650		2,352,874,653		2,176,406,981		8,445,118,989	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	Badan Pendapatan Daerah	
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	78.86	79.55	85		87		87		90		90				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
	733	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta								1,700,402,752		1,924,438,800		2,175,654,576		2,151,052,840		7,951,548,968	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	Badan Pendapatan Daerah	
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	79.11	79.81	85		87		87		90		90				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
	734	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang								1,423,556,120		1,608,459,425		1,814,773,272		1,803,814,771		6,650,603,588	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	Badan Pendapatan Daerah	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE						PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH				
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				K		Rp.	
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			(20)	(21)		
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	78.84	79.53	85		87		87		90		90						
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100						
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100						
	735	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon										1,402,826,949		1,571,730,470		1,756,917,804		1,631,455,321			6,362,930,544	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	Badan Pendapatan Daerah
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	78.78	79.47	85		87		87		90		90						
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100						
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100						
	736	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber										2,078,018,805		2,362,836,370		2,685,362,832		2,625,222,691			9,751,440,698	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	Badan Pendapatan Daerah
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	79.01	79.71	85		87		87		90		90						
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100						
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100						
	737	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug										1,447,219,796		1,621,806,950		1,682,688,448		1,678,588,704			6,430,303,898	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	Badan Pendapatan Daerah
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	78.98	79.68	85		87		87		90		90						
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100						
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100						
	738	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I										1,636,996,413		1,845,581,320		2,080,143,166		2,042,438,656			7,605,159,555	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	Badan Pendapatan Daerah
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	78.78	79.47	85		87		87		90		90						
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100						



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE						PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH							
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				K		Rp.				
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)									
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100											
739		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis									1,851,062,254		2,084,908,955		2,347,398,902		2,310,564,910		8,593,935,021					Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	Badan Pendapatan Daerah	
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	78.99	79.69	85		87		87		90		90									
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100									
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100									
740		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan									1,783,112,920		2,008,830,250		2,130,733,726		2,070,518,245		7,993,195,141					Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	Badan Pendapatan Daerah	
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	79.02	79.72	85		87		87		90		90									
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100									
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100									
741		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka									1,498,733,566		1,698,319,510		1,922,339,448		1,898,405,280		7,017,797,804					Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	Badan Pendapatan Daerah	
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	78.96	79.66	85		87		87		90		90									
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100									
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100									
742		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran									1,815,528,475		2,050,546,380		2,180,933,547		2,139,263,448		8,186,271,850					Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	Badan Pendapatan Daerah	
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	79.01	79.71	85		87		87		90		90									
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100									
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100									



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH		
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
743		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan							2,482,417,572			2,815,023,930		3,190,399,781		3,131,754,612		11,619,595,895	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan	Badan Pendapatan Daerah	
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	79.02	79.72	85		87		87		90		90				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
744		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta							2,365,573,514			2,664,134,025		2,863,316,526		2,826,813,292		10,719,837,357	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	Badan Pendapatan Daerah	
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	78.97	79.67	85		87		87		90		90				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
745		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat							2,029,415,340			2,292,878,070		2,587,834,224		2,563,197,661		9,473,325,295	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	Badan Pendapatan Daerah	
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	78.94	79.64	85		87		87		90		90				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
746		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek							1,236,582,311			1,399,161,905		1,580,729,951		1,569,604,842		5,786,079,008	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	Badan Pendapatan Daerah	
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	78.88	79.57	85		87		87		90		90				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
747		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang							1,543,009,686			1,746,783,660		1,975,170,583		1,953,787,438		7,218,751,368	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	Badan Pendapatan Daerah	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH		
							2017	2018	2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE					
							(8)	(9)	K (10)	Rp. (11)	K (12)	Rp. (13)	K (14)	Rp. (15)	K (16)	Rp. (17)	K (18)	Rp. (19)				
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	78.96	79.66	85		87		87		90		90				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
748		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang									1,557,136,881		1,771,525,370		2,011,145,959		2,004,503,811		7,344,312,021	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	Badan Pendapatan Daerah
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	78.83	79.52	85		87		87		90		90				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
749		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut									1,464,623,209		1,640,789,090		1,836,446,869		1,825,647,854		6,767,507,022	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	Badan Pendapatan Daerah
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	78.86	79.55	85		87		87		90		90				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
750		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya									1,395,308,045		1,567,410,620		1,757,171,202		1,623,005,286		6,342,895,153	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	Badan Pendapatan Daerah
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	78.87	79.56	85		87		87		90		90				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
751		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya									1,521,062,125		1,735,480,690		1,978,992,610		1,927,267,660		7,162,803,086	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	Badan Pendapatan Daerah
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	79.04	79.74	85		87		87		90		90				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH		
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100						
	752	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis								1,662,365,008		1,868,729,030		2,099,512,742		1,846,282,029		7,476,888,808	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	Badan Pendapatan Daerah	
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	78.79	79.48	85		87		87		90		90				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
	753	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran								2,034,117,623		2,276,916,705		2,277,276,079		2,222,378,142		8,810,688,548	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	Badan Pendapatan Daerah	
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	78.98	79.67	85		87		87		90		90				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
	754	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi								1,574,756,129		1,633,822,585		1,849,865,887		1,826,526,852		6,884,971,454	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	Badan Pendapatan Daerah	
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	78.89	79.58	85		87		87		90		90				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
	755	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar								1,170,603,749		1,319,294,077		1,480,735,642		1,518,342,571		5,488,976,039	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	Badan Pendapatan Daerah	
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	78.82	79.51	85		87		87		90		90				
				2	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
3			Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan								151,359,829,631		97,576,296,303		111,793,867,706		108,867,028,704		469,597,022,344			
	756	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Sistem Merit		Program Pengadaan Dan Mutasi						4,094,120,430		4,666,422,517		5,177,531,642		4,954,228,558		18,892,303,147	Kabid Pengadaan dan mutasi	Badan Kepegawaian Daerah	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE						PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH	
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				
							(8)	(9)	(10)	(11)	K (12)	Rp. (13)	K (14)	Rp. (15)	K (16)	Rp. (17)	K (18)	Rp. (19)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				1	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai	Σ Skor Indikator Perencanaan Kebutuhan Dikali Bobot Skor Indikator Perencanaan Kebutuhan	Nilai (0-60)	N/A	60	60		60		60		60		60			
				2	Nilai Kriteria Pengadaan Pegawai	Σ Skor Indikator Pengadaan Pegawai Dikali Bobot Skor Indikator Pengadaan Pegawai	Nilai (0-40)	N/A	16	32		36		40		40		40			
				3	Nilai Kriteria Promosi, Mutasi Dan Rotasi	Σ Skor Indikator Promosi, Mutasi Dan Rotasi Dikali Bobot Skor Indikator Promosi, Mutasi Dan Rotasi	Nilai (0-40)	N/A	22	31		34		37		40		40			
757	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Sistem Merit	Program Pengembangan Karir							9,462,232,031		10,870,045,993		12,287,514,509		12,218,171,850		44,837,964,384	Kabid Pengembangan Karir	Badan Kepegawaian Daerah	
				1	Nilai Kriteria Pembinaan Karir Dan Peningkatan Kompetensi	Σ Skor Indikator Pembinaan Karir Dan Peningkatan Kompetensi Dikali Bobot Skor Indikator Pembinaan Karir Dan Peningkatan Kompetensi	Nilai (0-120)	N/A	62.5	82.5		90		102.5		107.5		107.5			
				2	Nilai Kriteria Manajemen Kinerja	Σ Skor Indikator Manajemen Kinerja Dikali Bobot Skor Indikator Manajemen Kinerja	Nilai (0-60)	N/A	52.5	57.5		60		60		60		60			
758	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Sistem Merit	Program Kesejahteraan Dan Disiplin							7,339,673,319		8,123,848,985		8,994,686,005		9,021,046,923		33,479,255,232	Kabid Kesejahteraan dan Disiplin	Badan Kepegawaian Daerah	
				1	Nilai Kriteria Penggajian, Penghargaan, Dan Disiplin	Σ Skor Indikator Penggajian, Penghargaan, Dan Disiplin Dikali Bobot Skor Indikator Penggajian, Penghargaan, Dan Disiplin	Nilai (0-40)	N/A	20	32.5		35		37.5		40		40			
				2	Nilai Kriteria Perlindungan Dan Pemberian Kemudahan	Σ Skor Indikator Perlindungan Dan Pemberian Kemudahan Dikali Bobot Skor Indikator Perlindungan Dan Pemberian Kemudahan	Nilai (0-16)	N/A	14	14		16		16		16		16			
759	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Sistem Merit	Program Pengelolaan Sistem Kepegawaian	1	Nilai Kriteria Sistem Pendukung Kepegawaian	Σ Skor Indikator Sistem Pendukung Kepegawaian Dikali Bobot Skor Indikator Sistem Pendukung	Nilai (0-24)	N/A	21	24	1,374,812,538	24	1,441,095,208	24	1,644,631,661	24	1,639,133,801	24	6,099,673,209	Kabid Pengadaan, Penghentian dan Informasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
760		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Badan Kepegawaian Daerah							7,890,454,513		8,685,258,409		9,969,528,130		9,852,414,612		36,397,655,664	Sekretaris	Badan Kepegawaian Daerah	
				1	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di Bkd	Jumlah ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Dibagi Jumlah ASN X 100%	%	100	100	100		100		100		100		100			
				2	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Bkd	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X 100%	%	100	100	100		100		100		100		100			
				3	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Bkd	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X 100%	%	100	100	100		100		100		100		100			
				4	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Bkd	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X 100%	%	100	100	100		100		100		100		100			
				5	Persentase Ketersediaan Data Kinerja Bkd	Jumlah Data Kinerja Bkd Yang Disediakan / Jumlah Data Kinerja (Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Dan Kegiatan) Bkd	%	100	100	100		100		100		100		100			
761		Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Badan Kepegawaian Daerah	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di Bkd	(Peningkatan Sarana: Ekebutuhan Sarana) X 100 %	%	N/A	90	100	27,993,599,000	100	32,360,265,192	100	37,117,500,758	100	36,478,592,958	100	133,949,957,908	Sekretaris	Badan Kepegawaian Daerah
762	Indeks Reformasi Birokrasi	Indek Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Program pengembangan kompetensi teknis umum dan fungsional	1	Persentase Pejabat Struktural, Fungsional Dan Pelaksana Yang Pernah Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	Jumlah Pejabat Struktural, Fungsional Dan Pelaksana Yang Pernah Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Dibagi Jumlah Pejabat Struktural, Fungsional Dan Pelaksana Dikali Seratus Persen	Persen	18.70	18.70	18.70	5,160,647,200	37.4	5,806,210,000	56.1	6,259,070,000	74.8	5,748,800,000	74.8	22,974,727,200	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
763	Indeks Reformasi Birokrasi	Indek Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Program pengembangan teknis substantif	1	Persentase Pejabat Struktural, Fungsional Dan Pelaksana Yang Pernah Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif	Jumlah Pejabat Struktural, Fungsional Dan Pelaksana Yang Pernah Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif Dibagi Jumlah Pejabat Struktural, Fungsional Dan Pelaksana Dikali Seratus Persen	Persen	6.38	6.38	18.7	18,111,120,000	37.4	4,130,280,000	56.1	4,358,510,000	74.8	3,961,000,000	74.8	30,560,910,000	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
764	Indeks Reformasi Birokrasi	Indek Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Program pengembangan kompetensi manajerial dan latsar CPNS							10,322,400,000		5,015,340,000		5,673,800,000		5,405,600,000		26,417,140,000	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
				1	Persentase Pejabat Struktural Yang Pernah Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Latsar Cpns	Jumlah Pejabat Struktural Yang Pernah Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial Dibagi Jumlah Pejabat Struktural Dikali Seratus Persen	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
				2	Presentasi Pimpinan Daerah Yang Lulus Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah	Jumlah Lulusan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah Dibagi Jumlah Pns Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah Dikali Seratus Persen	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
				3	Presentasi Pimpinan Tinggi Yang Lulus Pengembangan Kompetensi Pimpinan Tinggi	Jumlah Lulusan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Tinggi Dibagi Jumlah Pns Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Pimpinan Tinggi Dikali Seratus Persen	Persen	100	100	100		100		100		100		100			



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE						PENANGGUNG JAWAB ESELON II	PERANGKAT DAERAH				
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				K		Rp.	
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			(18)	(19)		
				4	Persentase Dprd/Kepala Desa/Perangkat Desa Yg Lulus Pengembangan Kompetensi Khusus	Jumlah Lulusan Pengembangan Kompetensi Dprd Kab/Kota Dibagi Jumlah Pns Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Dprd Kab/Kota Dikali Seratus Persen	Persen	100	100	100		100		100		100		100						
765	Indeks Reformasi Birokrasi	Indek Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Program Pengembangan Kompetensi Pemerintahan	1	Persentase Pejabat Struktural, Fungsional Dan Pelaksana Yg Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan	Jumlah Pejabat Struktural, Fungsional Dan Pelaksana Yang Pernah Mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dibagi Jumlah Pejabat Struktural Dikali Seratus Persen	Persen			25	1,900,260,000	50		75		100		100	1,900,260,000	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
766	Indeks Reformasi Birokrasi	Indek Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Program Uji Kompetensi dan Sertifikasi Pengembangan Kompetensi	1	Persentase Lulusan Uji Kompetensi Manajerial, Teknis, Sosial Kultural Dan Pemerintahan	Jumlah Pns Pemprov Jabar Bersertifikat Kompetensi Teknis Dibagi Total Pns Pemprov Jabar Dikali Seratus Persen	Persen			18.70	3,549,800,000	37.40	1,720,950,000	56.10	1,805,300,000	74.8	1,631,000,000	74.8	8,707,050,000	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
767	Indeks Reformasi Birokrasi	Indek Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Program Pengembangan Smart ASN	1	Persentase Smart ASN Pemprov Jabar	Jumlah ASN Bersertifikat Kompetensi, Toefl Minimal 500 (Mampu Berbahasa Asing) Mampu Mengoperasikan 5 Aplikasi (Menguasai Tik) Punya Fakta Integritas (Berintegritas) Sertifikat Mengikuti Pk Luar Negeri (Berwawasan Global) Pernah Terlibat Kerjasama Dengan Luar Negeri (Networking) Dibagi Jumlah Pns Jabar	Persen	100	100	100	2,346,000,000	100	2,458,500,000	100	2,579,000,000	100	2,330,000,000	100	9,713,500,000	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
768	Indeks Reformasi Birokrasi	Indek Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Program pengembangan Corporate University	1	Jumlah Akreditasi Manajerial & Sosial Kultural, Teknis, Pemerintahan, ISO Dan Akreditasi Corpu SI	Jumlah Akreditasi Manajerial, Teknis, Sosial Kultural, Pemerintahan, Iso Dan Akreditasi Corpu Berstandar Internasional Yang Dicapai	Sertifikat	4	4	5	4,392,460,000	6	3,343,560,000	7	3,997,450,000	8	3,844,500,000	8	15,577,970,000	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
769	Indeks Reformasi Birokrasi	Indek Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Program Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi								1,505,700,000		811,305,000		928,440,000		932,000,000		4,177,445,000	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
				1	Persentase Rencana Pengembangan Kompetensi Yang Sesuai Prioritas Pembangunan	Jumlah Rencana Pengembangan Kompetensi Yang Sesuai Dengan Prioritas Pembanguna Dibagi Jumlah Rencana Pengembangan Kompetensi Dikali 100 Persen	Persen			100		100		100		100		100						
				2	Persentase Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Yang Ditindaklanjuti Dibagi Jumlah Rekomendasi	Persen	100	100	100		100		100		100		100						
				3	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Untuk Implementasi Proyek Perubahan Alumni	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Untuk Implementasi Proyek Perubahan Alumni	Dokumen	1	1	1		1		1		1		1						
770	Indeks Reformasi Birokrasi	Indek Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi ASN Non Provinsi	1	Jumlah ASN Non Provinsi Yang Terfasilitasi Pengembangan Kompetensi	Jumlah ASN Non Provinsi Yang Tersedia dibagi jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dikali seratus persen	Persen	100	100	100	351,900,000	100	393,360,000	100	438,430,000	100	419,400,000	100	1,603,090,000	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan , Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif dan Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
771			Program data dan Informasi kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Persentase ketersediaan data Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia/Jumlah data kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dikali seratus persen	Jumlah Ketersediaan data Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia/Jumlah data kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dikali seratus persen	Persen	N/A	N/A	100	909,490,600	100	1,159,645,000	100	1,289,500,000	100	1,351,400,000	100	4,710,035,600	Sekretariat	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
772			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia dibagi jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dikali seratus persen	Persen	N/A	N/A	91	39,882,000,000	91	2,458,500,000	91	2,579,000,000	91	2,330,000,000	91	47,249,500,000	Sekretariat	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
773			Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia								4,773,160,000		4,131,710,000		6,693,975,000		6,749,740,000		22,348,585,000	Sekretariat	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
				1	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran dibagi jumlah unit kerja dikali seratus persen	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100						
				2	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan Prasarana dikali seratus persen	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100						
				3	Persentase Fasilitas Kesejahteraan dan dukungan Peningkatan Kinerja Pegawai di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Fasilitas Kesejahteraan dan dukungan peningkatan kinerja Pegawai	Persen	N/A	N/A	100		100		100		100		100						
4			Penelitian dan Pengembangan								10,086,960,001		10,890,870,003		9,601,500,007		11,059,080,006		41,638,410,017					
774		a.Persentase rekomendasi kebijakan daerah yang dihasilkan b. Persentase rencana kelitbang yang diimplementasikan	Program Kebijakan Pembangunan Berbasis Kajian dan Analisis	1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Berbasis Kajian Dan Analisis Yang Diterapkan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Berbasis Kajian Dan Analisis Yang Diterapkan Dibagi Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Berbasis Kajian Dan Analisis Yang Disusun X100%	Persen	90.59	100	40	976,500,000	60	1,331,910,000	80	769,500,000	100	697,500,000	100	3,775,410,000	Bidang Analisis Kebijakan IPTEK	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah			
775	a. Rata-rata Lama Sekolah b. Harapan Lama Sekolah	Persentase hasil kelitbang yang diterapkan	Program Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK								2,385,500,000		2,293,845,000		2,565,000,000		2,418,000,000		9,662,345,000	Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah			



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PENANGGUNG JAWAB ESELON II	PERANGKAT DAERAH
							2017	2018	2020		2021		2022		2023						
							(8)	(9)	K (10)	Rp. (11)	K (12)	Rp. (13)	K (14)	Rp. (15)	K (16)	Rp. (17)	K (18)	Rp. (19)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				1	Persentase Penelitian Dan Pengembangan Iptek Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	Jumlah Penelitian Dan Pengembangan Iptek Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Dibagi Jumlah Penelitian Dan Pengembangan Iptek Yang Dilaksanakan X100%	Persen	100	100	30		46		77		100		100			
				2	Persentase Pemanfaatan Iptek	Jumlah Iptek Yang Dimanfaatkan Dibagi Jumlah Iptek Yang Dihasilkan X100%	Persen	100	100	40		60		80		100		100			
776		Persentase inovasi berbasis IPTEK yang diterapkan	Program Penerapan Inovasi Berbasis IPTEK	1	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah Dibagi Jumlah Perangkat Daerah X100%	Persen	100	100	40	1,395,000,000	60	1,479,900,000	80	256,500,000	100	2,092,500,000	100	5,223,900,000	Bidang Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
777		a. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kelitbangan b. Prosentase Kerjasama Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan IPTEK yang diterapkan	Program Kerjasama dan Layanan IPTEK								1,116,000,000		1,109,925,000		872,100,000		953,250,000		4,051,275,000	Bidang Kerjasama dan Layanan IPTEK	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
				1	Persentase Kajian Kelitbangan Yang Didiseminasikan Kepada Perangkat Daerah Atau Stakeholder Lainnya	Jumlah Kajian Kelitbangan Yang Didiseminasikan Dibagi Dengan Jumlah Kajian Kelitbangan Yang Dihasilkan X100%	Persen	100	100	40		60		80		100		100			
				2	Persentase Kerjasama Penelitian Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Kerjasama Penelitian Yang Ditindaklanjuti Dibagi Jumlah Kerjasama Penelitian X100%	Persen	100	100	40		60		80		100		100			
778		Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	100	100	40	325,500,000	60	345,310,000	80	359,100,000	100	325,500,000	100	1,355,410,000	Sekretariat	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
779		Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah								3,888,460,001		4,329,980,003		4,779,300,007		4,572,330,006		17,570,070,017	Sekretariat	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
				1	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Jumlah ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Dibagi Jumlah ASN Dinas Pendidikan X100%	Persen	100	100	40		60		80		100		100			
				2	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	100	100	40		60		80		100		100			
				3	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	40		60		80		100		100			
				4	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	40		60		80		100		100			
				5	Persentase Ketersediaan Data Kinerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Jumlah Data Kinerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Yang Disediakan/Jumlah Data Kinerja (Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Dan Kegiatan) Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Yang Seharusnya Disediakan X100%	Persen	100	100	40		60		80		100		100			
5			Fungsi Lainnya								321,531,976,379		359,660,706,682		395,264,046,998		401,397,393,065		1,477,854,123,124		
780	a. Indeks Kerukunan Umat Beragama b. Indeks Demokrasi	Prosentase Bahan Kebijakan umum pembinaan, Pemahaman, Pengamalan keagamaan	Program Pembinaan, Pemahaman dan Pengamalan Keagamaan	1	Persentase Bahan Kebijakan Pembinaan, Pemahaman Dan Pengamalan Keagamaan	Jumlah Bahan Kebijakan Umum Pembinaan, Pemahaman Dan Pengamalan Keagamaan Yang Ditindaklanjuti Dibagi Jumlah Bahan Kebijakan Pembinaan, Pemahaman Dan Pengamalan Keagamaan Yang Disusun X 100%	Persen	89	90	91	11,758,202,379	91.5	13,969,609,464	92	15,442,581,583	92.5	15,336,350,066	92.5	56,506,743,492	Bagian Pelayanan Sosial	Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial, Sekretariat Daerah
781	Usulan Pembentukan Daerah Persiapan Otonomi Baru	Persentase Dokumen Persyaratan dan Kelayakan Pemekaran Daerah yang Dianalisis	Program Penataan Daerah	1	Persentase Verifikasi Dokumen Persyaratan Dan Kelayakan Pemekaran Daerah	Jumlah Dokumen Yang Diverifikasi Dibagi Jumlah Dokumen Persyaratan Dan Kelayakan Usulan Pemekaran Daerah X 100%	Persen	N/A	N/A	100	328,580,000	100	390,929,000	100	435,866,200	100	432,867,820	100	1,588,243,020	Bagian Kerjasama dan Kerjasama	Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi, Sekretariat Daerah
782		Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pelayanan dan Pengembangan Sosial yang ditindaklanjuti	Program Pelayanan Sosial	1	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pelayanan Sosial Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pelayanan Sosial Yang Ditindaklanjuti Dibagi Jumlah Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pelayanan Sosial Yang Disusun X 100%	Persen	89	90	91	2,011,753,300	91.5	2,371,591,930	92	2,655,221,213	92.5	2,693,807,834	92.5	9,732,374,277	Bagian Pelayanan Sosial	Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial, Sekretariat Daerah
783		Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pelayanan dan Pengembangan Sosial yang ditindaklanjuti	Program Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga	1	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Yang Ditindaklanjuti Dibagi Jumlah Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Yang Disusun X 100%	Persen	89	90	91	2,674,142,932	91.5	3,181,569,244	92	3,547,289,908	92.5	3,522,887,642	92.5	12,925,889,726	Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga yang ditindaklanjuti	Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial, Sekretariat Daerah
784		Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pelayanan dan Pengembangan Sosial yang ditindaklanjuti	Program Penanggulangan Masalah dan Pemberdayaan Sosial	1	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pemberdayaan Sosial Yang Ditindaklanjuti Dibagi Jumlah Bahan Kebijakan Umum Lingkup Penanggulangan Masalah Dan Pemberdayaan Sosial Yang Disusun X 100%	Jumlah Bahan Kebijakan Umum Lingkup Pemberdayaan Sosial Yang Ditindaklanjuti Dibagi Jumlah Bahan Kebijakan Umum Lingkup Penanggulangan Masalah Dan Pemberdayaan Sosial Yang Disusun X 100%	Persen	89	90	91	2,690,071,883	91.5	3,131,072,364	92	3,217,620,662	92.5	3,238,163,070	92.5	12,276,927,979	Bagian Penanggulangan Masalah dan Pemberdayaan Sosial	Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial, Sekretariat Daerah
785	Tingkat Efektivitas Kerjasama Daerah	Persentase Kerja Sama yang Ditindaklanjuti	Program Kerja Sama Daerah	1	Persentase Fasilitasi Naskah Kerja Sama Daerah	Jumlah Naskah Kerja Sama Yang Difasilitasi Dibagi Jumlah Permohonan Fasilitasi Naskah Kerja Sama X 100%	Persen	90	90	90	6,731,707,646	90	5,607,647,532	95	6,252,245,346	95	6,209,235,341	95	24,800,835,865	Bagian Kerjasama dan Kerjasama	Biro Pemerintahan dan Kerjasama, Sekretariat Daerah
786		Skoring LPPD Provinsi di Tingkat Nasional	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Realisasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Dibagi Target Kinerja Urusan Yang Ditetapkan X 100%	Persen	N/A	81	87	977,778,000	90	1,154,338,900	93	1,285,385,420	95	1,289,475,462	95	4,706,977,782	Bagian Kerjasama dan Kerjasama	Biro Pemerintahan dan Kerjasama, Sekretariat Daerah



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
787		Persentase Fasilitas Administrasi Pemerintahan Umum	Program Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	1	Persentase Administrasi Pemerintahan Umum Yang Diverifikasi	Persen	90	90	90	1,792,596,354	90	2,132,746,668	90	2,377,905,414	90	2,361,547,495	90	8,664,795,931	Bagian Tata Pemerintahan Daerah Biro Pemerintahan dan Kerjasama	Biro Pemerintahan dan Kerjasama, Sekretariat Daerah	
788		Prosentase koordinasi dan fasilitasi produk perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM serta dokumentasi pembinaan dan pengawasan produk hukum	Program Perundang-Undangan Daerah Provinsi	1	Persentase Rancangan Produk Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Yang Dikaji	Persen	100	100	100	1,876,655,200	100	2,104,035,725	100	2,382,990,383	100	2,528,291,119	100	8,891,972,427	Bagian Perundang-undangan Biro Hukum	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Daerah	
789		Prosentase koordinasi dan fasilitasi produk perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM serta dokumentasi pembinaan dan pengawasan produk hukum	Program Bantuan Hukum dan HAM	1	Persentase Penyelenggaraan Bantuan Hukum Dan Ham Yang Difasilitasi	Persen	100	100	100	1,322,534,500	100	1,645,011,463	100	1,917,473,574	100	2,176,681,315	100	7,061,700,851	Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Daerah	
790		Prosentase koordinasi dan fasilitasi produk perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM serta dokumentasi pembinaan dan pengawasan produk hukum	Program Dokumentasi hukum, pembinaan, pengawasan produk hukum							2,269,694,015		2,804,562,818		3,260,813,298		3,381,422,584		11,716,492,715	Bagian Dokumentasi Hukum Biro Hukum	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Daerah	
				1	Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum	Persen	45	45.5	48.75			51.1		53.53		56.05		56.05			
				2	Persentase Layanan Informasi Peraturan Perundang-Undangan Melalui Website Dan Sosialisasi	Persen	N/A	N/A	100			100		100		100		100			
				3	Persentase Produk Hukum Kabupaten/Kota Yang Dievaluasi Dan Di Harmonisasi	Persen	N/A	N/A	100			100		100		100		100			
791		Level Kematangan/Maturitas PEJ	Program Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	1	Persentase Paket Pekerjaan Yang Selesai Ditenderkan	Persen	N/A	N/A	92	1,595,960,000	93	1,898,798,000	94	2,117,064,400	95	2,102,500,840	95	7,714,323,240	Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Biro Pengadaan Barang/Jasa	Biro Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Daerah	
792		Level Kematangan/Maturitas PEJ	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	1	Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa	Persen	N/A	N/A	100	2,053,625,000	100	2,443,306,250	100	2,724,163,750	100	2,705,423,875	100	9,926,518,875	Bagian Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Biro Pengadaan Barang/Jasa	Biro Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Daerah	
793		Level Kematangan/Maturitas PEJ	Program Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	1	Persentase Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang Undangan	Persen	N/A	N/A	92	1,626,471,000	93	1,935,098,550	94	2,157,537,690	95	2,142,695,709	95	7,861,802,949	Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Biro Pengadaan Barang/Jasa	Biro Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Daerah	
794	a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB b. Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	Persentase perumusan kebijakan umum serta koordinasi, supervisi, pembinaan, pengendalian dalam aspek BUMD Lembaga Keuangan, BUMD NonLembaga Keuangan dan investasi Daerah yang ditindaklanjuti	Program BUMD Lembaga Keuangan.	1	Persentase Laporan/Rekomendasi/Bahan Rumusan Kebijakan Yang Akan Ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan Bumd Lembaga Keuangan.	Persen	90	90	96	1,408,200,000	97	1,573,870,000	98	1,646,720,000	99	1,533,180,000	99	6,161,970,000	Bagian BUMD Lembaga Keuangan Biro BUMD dan Investasi	Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi, Sekretariat Daerah	
795	a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB b. Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	Persentase perumusan kebijakan umum serta koordinasi, supervisi, pembinaan, pengendalian dalam aspek BUMD Lembaga Keuangan, BUMD NonLembaga Keuangan dan investasi Daerah yang ditindaklanjuti	Program BUMD Non Lembaga Keuangan.	1	Persentase Laporan/Rekomendasi/Bahan Rumusan Kebijakan Yang Akan Ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan Bumd Non Lembaga Keuangan.	Persen	90	90	96	1,760,250,000	97	1,929,260,000	98	2,006,940,000	99	1,858,400,000	99	7,554,850,000	Bagian BUMD Non Lembaga Keuangan Biro BUMD dan Investasi	Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi, Sekretariat Daerah	
796	a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB b. Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	Persentase perumusan kebijakan umum serta koordinasi, supervisi, pembinaan, pengendalian dalam aspek BUMD Lembaga Keuangan, BUMD NonLembaga Keuangan dan investasi Daerah yang ditindaklanjuti	Program Investasi Daerah	1	Persentase Bahan Laporan/Rekomendasi/Bahan Rumusan Kebijakan Yang Akan Ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan Investasi Daerah	Persen	90	90	96	938,800,000	97	1,066,170,000	98	1,132,120,000	99	1,068,580,000	99	4,205,670,000	Bagian Investasi Biro BUMD dan Investasi	Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi, Sekretariat Daerah	
797		Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Perekonomian yang ditindaklanjuti	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sumber daya alam	1	Persentase Efektifitas Kebijakan Yang Diimplementasikan Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Aspek Sumber Daya Alam / Jumlah Target Pada Kebijakan X 100%	Persen	50	50	65	1,063,660,400	70	1,265,493,020	75	1,410,961,156	80	1,401,254,972	80	5,141,369,548	Bagian Sumber Daya Alam Biro Perekonomian	Biro Perekonomian, Sekretariat Daerah	
798		Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Perekonomian yang ditindaklanjuti	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian	1	Persentase Efektifitas Kebijakan Yang Diimplementasikan Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Aspek Ketahanan Pangan Dan Pertanian / Jumlah Target Pada Kebijakan X 100%	Persen	60	60	65	671,242,000	70	798,612,100	75	890,412,380	80	884,287,118	80	3,244,553,598	Bagian Ketahanan pangan dan pertanian Biro Perekonomian	Biro Perekonomian, Sekretariat Daerah	
799		Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Perekonomian yang ditindaklanjuti	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sarana perekonomian	1	Persentase Efektifitas Kebijakan Yang Diimplementasikan Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Aspek Sarana Perekonomian / Jumlah Target Pada Kebijakan X 100%	Persen	50	50	65	981,046,000	70	1,167,202,300	75	1,299,828,140	80	1,292,419,634	80	4,740,496,074	Bagian Sarana Perekonomian Biro Perekonomian	Biro Perekonomian, Sekretariat Daerah	
800	Indeks Reformasi Birokrasi	a. Nilai Penguatan Organisasi b. Nilai Penataan Organisasi	Program Optimalisasi Kelembagaan Perangkat Daerah							981,046,000		1,180,402,500		1,389,420,000		1,115,040,000		4,665,908,500	Bagian Kelembagaan	Biro Organisasi, Sekretariat Daerah	
				1	Persentase Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Berbasis Kinerja	Persen	100	100	75			100		100		100		100			
				2	Persentase Penataan Kelembagaan Berbasis Kinerja	Persen	100	100	75			100		100		100		100			



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL											PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH				
							2017		2018		2020		2021		2022		2023			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE			
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K			Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
801	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Program Peningkatan Pelayanan Publik									938,800,000		1,193,095,000		952,010,000		1,091,810,000		4,175,715,000	Bagian Ketatalaksanaan	Biro Organisasi, Sekretariat Daerah	
				1	Persentase Tingkat Kepatuhan Unit Pelaksanaan Pelayanan Publik Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Unit Pelaksana Pelayanan Publik Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pelayanan Publik/ Jumlah Seluruh Unit Pelaksana Pelayanan Publik X 100%	Persen	N/A	7	27	45		69		100								
				2	Persentase Unit Pelayanan Publik Bidang Pertanian Yang Mengikuti Kompetisi Abdibaktitani Tingkat Nasional	Jumlah Upp Lingkup Pertanian Yang Mengikuti Seleksi Abdibaktitani Tingkat Nasional / Jumlah Seluruh Upp Bidang Pertanian X 100%	Persen	5	N/A	0	15		0		15								
802	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Penataan Tata Laksana	Program Pengembangan Ketatalaksanaan									743,999,000		888,475,000		1,080,660,000		1,091,810,000		3,804,944,000	Bagian Ketatalaksanaan	Biro Organisasi, Sekretariat Daerah	
				3	Persentase Perangkat Daerah Provinsi Dengan Ketatalaksanaan Baik	Jumlah Perangkat Daerah Dan UPTD Provinsi Jawa Barat Yang Telah Menerapkan Standar Kerja Secara Benar/ Jumlah Seluruh Perangkat Daerah Dan UPTD Provinsi Jawa Barat X 100%	Persen	N/A	N/A	100	100		888,475,000		1,080,660,000		1,091,810,000		1,091,810,000		3,804,944,000	Bagian Ketatalaksanaan	Biro Organisasi, Sekretariat Daerah
803	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Jawa Barat	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi									950,535,000		1,256,557,500		1,646,720,000		1,649,330,000		5,503,142,500	Biro Organisasi	Biro Organisasi, Sekretariat Daerah	
				1	Persentase Dokumen Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Yang Disusun Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun Sesuai Peraturan Perundang-Undangan/ Jumlah Seluruh Dokumen Kinerja Perangkat Daerah X 100%	Persen	58	N/A	100	100		100		100		100		100				
				2	Persentase Dokumen Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Disusun Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Disusun Sesuai Peraturan Perundang-Undangan/ Jumlah Seluruh Dokumen Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota X 100%	Persen	77	N/A	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Yang Diimplementasikan	Jumlah Rencana Aksi Yang Diimplementasikan/ Jumlah Rencana Aksi Yang Disusun Di Dalam Road Map Reformasi Birokrasi X 100%	Persen	N/A	N/A	75	80		80		85		90		90				
				4	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Indeks Reformasi Birokrasi Berkategori 'B'	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi Berkategori 'B' / Jumlah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota X 100%	Persen	N/A	N/A	8	15		15		22		30		30				
804		Kualifikasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Program Pengelolaan Informasi, Media dan Hubungan Antar Lembaga									6,301,875,127		8,471,595,128		9,365,941,179		9,318,610,843		33,458,022,277	Bagian Pelayanan Media dan Informasi Biro Humas & Protokol	Biro Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan, Sekretariat Daerah	
				1	Persentase Pemberitaan Positif Di Media	Jumlah Sentimen Berita Positif / Total Berita X 100 %	Persen	56	56.5	57	57.5		57.5		58		58.5		58.5				
				2	Persentase Hubungan Stakeholder Stakeholder Kehumasan / 5 Kelompok Stakeholder X 100 %	Jumlah Hubungan Kelompok Stakeholder Kehumasan / 5 Kelompok Stakeholder X 100 %	Persen	100	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Pemohon Informasi Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Pemohon Informasi Ditindaklanjuti / Jumlah Pemohon Informasi X 100 %	Persen	100	100	100	100		100		100		100		100				
805		Kualifikasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Program Pengelolaan Publikasi dan Dokumentasi									12,312,361,445		15,119,382,155		16,857,351,709		16,379,451,225		60,668,546,534	Bagian publikasi, peliputan dan dokumentasi Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Biro Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan, Sekretariat Daerah	
				1	Persentase Acara Pimpinan Yang Terdokumentasikan	Jumlah Acara Pimpinan Yang Didokumentasikan / Jumlah Acara Pimpinan Yang Dihadiri X 100 %	Persen	100	100	100	100		100		100		100		100				
				2	Persentase Acara Pimpinan Yang Terpublikasikan	Jumlah Acara Pimpinan Yang Dipublikasikan / Jumlah Acara Pimpinan Yang Dihadiri X 100 %	Persen	100	100	100	100		100		100		100		100				
806		Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan	Program penyelenggaraan keprotokolan di pemerintah daerah									5,341,865,880		6,660,120,294		7,425,699,613		7,119,087,265		26,546,773,052	Bagian Protokol Biro Humas & Protokol	Biro Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan, Sekretariat Daerah	
				1	Persentase Layanan Keprotokolan Kdh, Wkdh, Dan Sekda Yang Dilaksanakan	Jumlah Layanan Keprotokolan Kdh, Wkdh, Dan Sekda Yang Dilaksanakan Dibagi Jumlah Acara Resmi X 100%	Persen	100	100	100	100		100		100		100		100				
807		Persentase Kualitas Layanan Umum, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah lingkup Sekretariat Daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat Daerah									34,810,704,000		31,160,595,200		32,838,478,560		30,893,558,416		129,703,336,176	Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Biro Umum, Sekretariat Daerah	
				1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di Sekretariat Daerah	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	100	100	100	100		100		100		100		100				
808		Persentase Kualitas Layanan Umum, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah lingkup Sekretariat Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat Daerah									12,385,114,120		14,084,501,706		15,703,511,987		15,595,485,495		57,768,613,308	Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Biro Umum, Sekretariat Daerah	
				1	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Sekretariat Daerah	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	100	100	100	100		100		100		100		100				
				2	Persentase Ketersediaan Data Kinerja Biro Umum	Jumlah Data Kinerja Biro Umum Yang Disediakan/ Jumlah Data Kinerja (Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Dan Kegiatan) Biro Umum Yang Seharusnya Disediakan X 100%	Persen	100	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Terkelolanya Barang Milik Daerah Di Lingkungan Sekretariat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Kelola /Jumlah Barang Milik Daerah Yang Tercatat X 100%	Persen	100	100	100	100		100		100		100		100				
809		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perencanaan Sekretariat Daerah									1,581,670,000		1,922,869,000		2,112,698,200		2,008,663,020		7,625,900,220	Bagian Administrasi Keuangan dan Perencanaan	Sekretariat Daerah	
				1	Persentase Pelaporan Capaian Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Biro Umum	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Laporan Capaian Keuangan X100%	Persen	100	100	100	100		100		100		100		100				



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE						PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH				
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				K		Rp.	
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			(20)	(21)		
810		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Biro Umum	2	Persentase Ketersediaan Data Kinerja Sekretariat Daerah	Jumlah Data Kinerja Sekretariat Daerah Yang Disediakan/Jumlah Data Kinerja (Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Dan Kegiatan) Sekretariat Daerah Yang Seharusnya Disediakan*100	Persen	100	100	100	100	63,787,948,012	75,693,526,058	84,394,479,733	83,813,919,185	307,689,872,988	Bagian Rumah Tangga, Tata Usaha dan Kepegawaian	Biro Umum, Sekretariat Daerah						
				1	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Biro Umum	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100	100			100	100									
				2	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di Sekretariat Daerah	Jumlah ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Dibagi Jumlah ASN Dinas Pendidikan X100%	Persen	100	100	100	100			100	100									
811		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Biro Pemerintahan dan Kerjasama									1,477,497,000	1,720,249,850	1,781,301,016	1,794,653,318	6,773,701,184	Bagian Urusan Pemerintah Daerah Biro Pemerintahan dan Kerjasama	Biro Pemerintahan dan Kerjasama, Sekretariat Daerah						
				1	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Biro Pemerintahan Dan Kerjasama	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100	100			100	100									
				2	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Biro Pemerintahan Dan Kerjasama	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100	100			100	100									
				3	Persentase Ketersediaan Data Kinerja Biro Pemerintahan Dan Kerjasama	Jumlah Data Kinerja Biro Pemerintahan Dan Kerjasama Yang Disediakan/Jumlah Data Kinerja (Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Dan Kegiatan) Biro Pemerintahan Dan Kerjasama Yang Seharusnya Disediakan X 100%	Persen	100	100	100	100			100	100									
812		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia									787,924,135	944,779,341	1,081,995,485	1,140,621,300	3,955,320,262	Bagian Dokumentasi Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Daerah						
				1	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Biro Hukum Dan Hak Asasi Manusia	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100	100			100	100									
				2	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Biro Hukum Dan Hak Asasi Manusia	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100	100			100	100									
				3	Persentase Ketersediaan Data Biro Hukum Dan Hak Asasi Manusia	Jumlah Data Kinerja Biro Hukum Dan Hak Asasi Manusia Yang Disediakan/Jumlah Data Kinerja (Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Dan Kegiatan) Biro Hukum Dan Hak Asasi Manusia Yang Seharusnya Disediakan X 100%	Persen	100	100	100	100			100	100									
813		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial									1080	2,127,320,800	1100	2,530,986,040	1100	2,821,922,312	6800001000	2,802,509,943	1100	10,282,739,095	Bagian Pelayanan Sosial	Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial, Sekretariat Daerah	
				1	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Biro Pelayanan Dan Pengembangan Sosial	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100	100			100	100									
				2	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Biro Pelayanan Dan Pengembangan Sosial	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	10	10			10	10									
				3	Persentase Ketersediaan Data Biro Pelayanan Dan Pengembangan Sosial	Jumlah Data Kinerja Biro Pelayanan Dan Pengembangan Sosial Yang Disediakan/Jumlah Data Kinerja (Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Dan Kegiatan) Biro Pelayanan Dan Pengembangan Sosial Yang Seharusnya Disediakan X 100%	Persen	100	100	100	100			100	100									
814		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Biro Perekonomian									1,652,386,000	2,010,804,200	2,304,674,760	2,347,309,236	8,315,174,196	Kabag Ketahanan Pangan dan Pertanian	Biro Perekonomian, Sekretariat Daerah						
				1	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Biro Perekonomian	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	90	90	90	90			90	90									
				2	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Biro Perekonomian	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	90	100			100	100									



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON II	PERANGKAT DAERAH		
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
				3	Persentase Ketersediaan Data Biro Perkonomian	Jumlah Data Kinerja Biro Perkonomian Yang Disediakan/Jumlah Data Kinerja (Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Dan Kegiatan) Biro Perkonomian Yang Seharusnya Disediakan X 100%	Persen	100	100	90		100		100		100		100				
815		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Biro Pengadaan Barang/Jasa								2,079,534,000		2,439,576,700		2,713,674,260		2,744,796,186		9,977,581,146	Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	Biro Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Daerah	
				1	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Biro Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				2	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Biro Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		680000000		100				
				3	Persentase Ketersediaan Data Biro Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Data Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Yang Disediakan/Jumlah Data Kinerja (Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Dan Kegiatan) Biro Pengadaan Barang/Jasa Yang Seharusnya Disediakan X 100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
816		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Biro Organisasi								1,443,390,000		1,691,710,000		1,886,320,000		2,043,380,000		7,064,800,000	Bagian Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Biro Organisasi, Sekretariat Daerah	
				1	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Biro Organisasi	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				2	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Biro Organisasi	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Ketersediaan Data Biro Organisasi	Jumlah Data Kinerja Biro Organisasi Yang Disediakan/Jumlah Data Kinerja (Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Dan Kegiatan) Biro Organisasi Yang Seharusnya Disediakan X 100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
817		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol								2,545,641,300		3,191,712,130		3,551,260,301		3,584,541,020		12,873,154,751	Bagian publikasi, peliputan dan dokumentasi	Biro Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan, Sekretariat Daerah	
				1	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				2	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Ketersediaan Data Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol	Jumlah Data Kinerja Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol Yang Disediakan/Jumlah Data Kinerja (Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Dan Kegiatan) Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol Yang Seharusnya Disediakan X 100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
818		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Biro BUMD dan Investasi								915,727,995		1,054,553,324		1,182,947,752		1,210,581,260		4,363,810,330	Bagian Investasi Biro BUMD dan Investasi	Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi, Sekretariat Daerah	
				1	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Biro BUMD Dan Investasi	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				2	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Biro BUMD Dan Investasi	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
				3	Persentase Ketersediaan Data Biro BUMD Dan Investasi	Jumlah Data Kinerja Biro BumD Dan Investasi Yang Disediakan/Jumlah Data Kinerja (Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Dan Kegiatan) Biro BumD Dan Investasi Yang Seharusnya Disediakan X 100%	Persen	100	100	100		100		100		100		100				
819		Tingkat dukungan dan fasilitasi	Program peningkatan peran dan fungsi legislatif serta pengawasan lembaga legislatif								30,721,883,000		38,065,034,000		39,342,980,456		49,996,467,522		158,126,364,979	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Sekretariat DPRD	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE						PENANGGUNG JAWAB ESELON II	PERANGKAT DAERAH				
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				K		Rp.	
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			(18)	(19)		
820		Tingkat dukungan dan fasilitasi	Program hubungan kelembagaan, aspirasi, pengawasan dan anggaran	1	Tingkat Fasilitasi Hubungan Kelembagaan DPRD, penjiwaan aspirasi serta pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran DPRD yang terlaksana sesuai dengan jadwal / % rencana Fasilitasi Hubungan kelembagaan DPRD, penjiwaan aspirasi serta pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran DPRD x 100 %	Persen	100	100	100	25,115,670,000	100	28,259,790,000	100	29,500,705,000	100	26,726,895,000	100	109,603,060,000	Bagian Humas dan Protokol	Sekretariat DPRD				
821		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di Sekretariat DPRD	Persen	100	100	100	6,286,910,000	100	6,578,180,000	100	6,872,110,000	100	8,878,700,000	100	28,615,900,000	Bagian Umum dan Administrasi	Sekretariat DPRD				
822		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Sekretariat DPRD							15,248,101,665		15,944,207,852		17,156,927,000		16,470,713,000		64,819,949,517	Bagian Umum dan Administrasi	Sekretariat DPRD				
				1	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di Sekretariat DPRD	Persen	100	100	100		100		100	100	100		100							
				2	Persentase Anggota DPRD Yang Terpenuhi Kesejahteraannya	Persen	100	100	100		100		100	100	100		100							
				3	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Sekretariat DPRD	Persen	100	100	100		100		100	100	100		100							
				4	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Sekretariat DPRD	Persen	100	100	100		100		100	100	100		100							
				5	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Sekretariat DPRD	Persen	100	100	100		100		100	100	100		100							
823		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian, Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja							5,946,179,498		6,276,226,990		7,552,010,029		6,908,953,727		26,683,370,244	Bagian Umum dan Administrasi	Sekretariat DPRD				
				1	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Sekretariat DPRD	Persen	100	100	100		100		100	100	100		100							
				2	Persentase ketersediaan data Kinerja Sekretariat DPRD dan DPRD	Persen	100	100	100		100		100	100	100		100							
824	Indeks Reformasi Birokrasi	a. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (EPPD) Provinsi Jawa Barat b. Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang masuk peringkat 10 besar nasional	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah							7,260,550,000		8,341,190,000		10,872,031,500		10,805,058,000		37,278,829,500	Inspektur Pembantu Bidang Administrasi, Inspektur Pembantu Bidang Khusus, Bidang Pemerintahan & Kesra	Inspektorat				
				1	Penurunan Temuan APJP Terhadap Perangkat Daerah (PD) Provinsi	Persen	12	N/A	5	(Jumlah Temuan T-1 - Jumlah Temuan T) / Jumlah Temuan T-1 X 100%	5		5	5	5		5							
				2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP Terhadap PD Provinsi yang diselesaikan	Persen	95	N/A	85	(Jumlah Rekomendasi Yang Selesai TI / Total Jumlah Rekomendasi) X 100%	90		95	100	100		100							
				3	Persentase Kasus Pengaduan Masyarakat yang ditangani	Persen	57.1	75	80	(Jumlah Kasus Yang Ditangani / Total Jumlah Kasus Yang Masuk) X 100%	90		90	100	100		100							
				4	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	Persen	100	100	100	(Jumlah Rekomendasi Yang Selesai TI / Total Jumlah Rekomendasi) X 100%	100		100	100	100		100							
				5	Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Nilai EPPD Masuk Kategori Sangat Tinggi (ST)	Persen	79	81	89	(Jumlah Pemda Kab Kota Yang St / Total Jumlah Pemda Kab Kota Di Jabar) X 100%	100		100	100	100		100							
825	Indeks Reformasi Birokrasi	a. Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat b. Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang nilai SAKIP-nya adalah ≥ BB	Program Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja							2,838,000,000		3,260,400,000		3,535,620,000		3,513,840,000		13,147,860,000	Inspektur Pembantu Bidang Administrasi, Inspektur Pembantu Bidang Khusus, Bidang Pemerintahan & Kesra	Inspektorat				
				1	Persentase Perangkat Daerah Yang Nilai Sakip-nya Adalah ≥ A	Persen	61	63	80	(Jumlah Pd Nilai A / Total Jumlah Pd) X 100%	90		100	100	100		100							
				2	Persentase Reviu Atas Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	(Jumlah Reviu Yang Dilaksanakan / Jumlah Reviu Yang Harus Dilaksanakan) X 100%	100		100	100	100		100							
				3	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Nilai Sakip-nya Adalah ≥ BB	Pemerintah Daerah	2	2	10		15		20	25	25		25							
826	Indeks Reformasi Birokrasi	a. Opini BPK-RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat b. Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang opini atas LKPD adalah WTP	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah							5,131,500,000		5,887,200,000		6,386,985,000		6,368,835,000		23,774,520,000	Inspektur Pembantu Bidang Administrasi, Inspektur Pembantu Bidang Khusus, Bidang Pemerintahan & Kesra	Inspektorat				



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE						PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH
							2017		2018		2020		2021		2022		2023			
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
				1	Persentase Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan	(Jumlah Reviu Yang Dilaksanakan / Jumlah Reviu Yang Harus Dilaksanakan) X 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
				2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang diselesaikan	(Jumlah Rekomendasi Yang Selesai TI / Total Jumlah Rekomendasi) X 100%	Persen	66.8	66.4	75	80	80	90	90	90	90				
				3	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Opini Atas LKPD Adalah WTP	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Opini Atas LKPD Adalah WTP	Pemerintah Daerah	25	N/A	26	27	27	27	27	27	27				
827	Indeks Reformasi Birokrasi	a. Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah b. Nilai Indikator Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern dan Integritas							3,372,490,000	3,627,442,000	3,690,145,100	3,447,413,200	14,137,490,300		Inspektur Pembantu Bidang Administrasi, Inspektur Pembantu Bidang Khusus, Bidang Pemerintahan & Kesra	Inspektorat			
				1	Persentase Jumlah PD Yang Mengimplementasikan SPIP	(Jumlah PD Sdh SPIP / Total Jumlah PD) X 100%	Persen	N/A	N/A	50	75	90	100	100	100					
				2	Persentase Jumlah Perangkat Daerah Menyusun Daftar Risiko (Risk Register)	(Jumlah PD Sdh Punya Daftar Risiko / Total Jumlah PD) X 100%	Persen	N/A	N/A	90	100	100	100	100	100					
				3	Nilai Evaluasi Monitoring Dan Evaluasi RAD-PPK Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Data Kinerja Inspektorat / Jumlah Data Kinerja Inspektorat * 100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100					
				4	Persentase Perangkat Daerah Yang Dicanangkan Menjadi Zona Integritas (ZI)	(Jumlah Pd Sdh Zi / Total Jumlah Pd) X 100%	Persen	N/A	N/A	90	100	100	100	100	100					
				5	Jumlah PD Zona Integritas Yang Akan Ditetapkan Menjadi WBK [WBBM]	Jumlah PD Yang Akan Ditetapkan Menjadi WBK [WBBM]	Perangkat Daerah	N/A	1	3	4	5	5	5	5					
828		Tingkat Kapabilitas APIP	Program Peningkatan Kapabilitas APIP							830,095,900	951,067,315	1,027,623,295	1,033,429,455	3,842,215,965	Sekretaris	Inspektorat				
				1	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kebijakan Peningkatan Kapabilitas APIP	(Jumlah Infrastruktur PK APIP Yang Sdh Dibuat / Total Jumlah Infrastruktur PK APIP Yang Harus Dibuat) X 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100					
				2	Persentase Permohonan Konsultasi Yang Mampu Dilyani	(Jumlah PD Yg Ditangani / Jumlah Total PD Yang Mengajukan Konsultasi) X 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100					
829		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Inspektorat	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di Inspektorat	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%		100	100	100	7,095,000,000	1,482,000,000	1,607,100,000	1,597,200,000	11,781,300,000	Sekretaris	Inspektorat			
830		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Inspektorat							3,476,550,000	5,416,710,000	5,873,950,500	5,837,766,000	20,604,976,500	Sekretaris	Inspektorat				
				1	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di Inspektorat	Jumlah ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Dibagi Jumlah ASN X100%		100	100	100	100	100	100	100	100					
				2	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Inspektorat	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%		100	100	100	100	100	100	100	100					
				3	Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Inspektorat	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%		100	100	100	100	100	100	100	100					
				4	Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Inspektorat	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%		100	100	100	100	100	100	100	100					
				5	Persentase Ketersediaan Data Kinerja Inspektorat	Jumlah Data Kinerja Inspektorat Yang Disediakan / Jumlah Data Kinerja (Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Dan Kegiatan) Inspektorat Yang Seharusnya Disediakan * 100	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100					
831		Persentase koordinasi jejaring kerja dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Jawa Barat	Program Koordinasi Hubungan Antar Lembaga dan Fasilitas Keprotokolkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Barat							466,840,000	358,510,948	264,757,569	261,283,579	1,351,392,096	Kepala Badan	Badan Penghubung				
				1	Persentase Koordinasi Jejaring Kerja Dengan Stakeholder	% Realisasi Koordinasi Jejaring Kerja Dengan Stakeholder Yang Terlaksana / % Koordinasi Jejaring Kerja Dengan Stakeholder Yang Diusulkan X100 %	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100					
				2	Persentase Fasilitasi Keprotokolkan Yang Dilyani	% Realisasi Fasilitasi Keprotokolkan Yang Dilaksanakan / % Fasilitasi Keprotokolkan Yang Diusulkan X 100 %	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100					
832		Persentase fasilitasi promosi dan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan potensi pembangunan Jawa Barat	Program Fasilitasi Promosi dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Potensi Pembangunan Jawa Barat							3,249,523,200	3,589,981,395	4,128,161,417	4,301,072,927	15,268,738,939	Kepala Badan	Badan Penghubung				
				1	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Dibagi Jumlah Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Dihimpun / Didapat X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100					
				2	Persentase Penyelenggaraan Promosi Potensi Pembangunan Jawa Barat	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Potensi Jawa Barat Yang Difasilitasi Dibagi Jumlah Usulan Fasilitasi Promosi Potensi Jawa Barat X100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100					
833		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Penghubung	1	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di Badan Penghubung	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibutuhkan X100%	Persen	100	100	100	833,309,743	1,022,700,291	2,457,579,068	3,663,228,286	7,976,817,388	Kepala Badan	Badan Penghubung			
834		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Badan Penghubung							3,961,062,952	4,813,649,435	5,743,153,681	5,681,907,761	20,199,773,829	Kepala Badan	Badan Penghubung				



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

NO	IKU PEMERINTAH DAERAH	IKU PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL												PENANGGUNG JAWAB ESELON III	PERANGKAT DAERAH				
							2017		2018		2020		2021		2022		2023				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE			
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)						
1				Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Di Badan Penghubung	Jumlah ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Dibagi Jumlah ASN Badan Penghubung X100%	Persen	100	100	100			100			100									
2				Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Di Badan Penghubung	Jumlah Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Dibagi Jumlah Sarana Dan Prasarana X100%	Persen	100	100	100			100			100									
3				Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Badan Penghubung	Jumlah Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dibagi Jumlah Unit Kerja X100%	Persen	100	100	100			100			100									
4				Persentase Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Di Badan Penghubung	Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Dibagi Jumlah Dokumen Rencana Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan X100%	Persen	100	100	100			100			100									
5				Persentase Ketersediaan Data Kinerja Badan Penghubung	Jumlah Data Kinerja Badan Penghubung Yang Disediakan/Jumlah Data Kinerja (Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program Dan Kegiatan) Badan Penghubung Yang Seharusnya Disediakan*100	Persen	100	100	100			100			100									
JUMLAH												9,513,288,034,439			10,125,141,579,406			10,732,545,020,605			11,149,053,871,690			41,411,184,578,440